



**RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH**

**2021**

**PENINGKATAN KONEKTIVITAS INFRASTRUKTUR DAERAH  
DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR, DALAM RANGKA  
PERCEPATAN PEMULIHAN KETAHANAN EKONOMI DAN  
KEHIDUPAN MASYARAKAT**

**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN  
2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode sisa 1 (satu) tahun.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD) setelah disepakati dengan DPRD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Pasuruan.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2021 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII : PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Hasil pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun KUA dan PPAS.

### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 24 Juli 2020  
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 24 Juli 2020  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd.

MISBAH ZUNIB  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 45

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana kerja tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun, yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program, strategis nasional. Selain itu, sebagai bagian dari perencanaan pembangunan regional, RKPD Kabupaten/Kota juga mengacu pada RKPD Provinsi. Penyusunan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, prioritas pembangunan nasional tahun 2021 dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021. Selain itu, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang *“Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan”* dimana Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu kawasan Bromo-Tengger-Semeru, maka RKPD tahun 2021 juga berpedoman pada Perpres tersebut.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan RKPD melalui beberapa tahapan yaitu :

1. Persiapan Penyusunan RKPD

Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

## 2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

## 3. Penyusunan Rancangan RKPD

Penyusunan Rancangan RKPD kabupaten/kota adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD kabupaten/kota berdasarkan:

- a. rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi; dan
- b. hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.

## 4. Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD bertujuan untuk membahas rancangan RKPD kabupaten/kota, dalam rangka: menyepakati permasalahan pembangunan Daerah; menyepakati prioritas pembangunan Daerah; menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi; d. penyesuaian program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah kabupaten/kota dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.



## 5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD kabupaten/kota menjadi rancangan akhir RKPD kabupaten/kota berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD kabupaten/kota.

Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas, dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD.

## 6. Penetapan RKPD

Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan disampaikan oleh kepala BAPPEDA kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan.

Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD kabupaten/ kota dijadikan sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD kabupaten/kota serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kabupaten/kota.

## **2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RKPD**

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Presiden Nomor ...Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

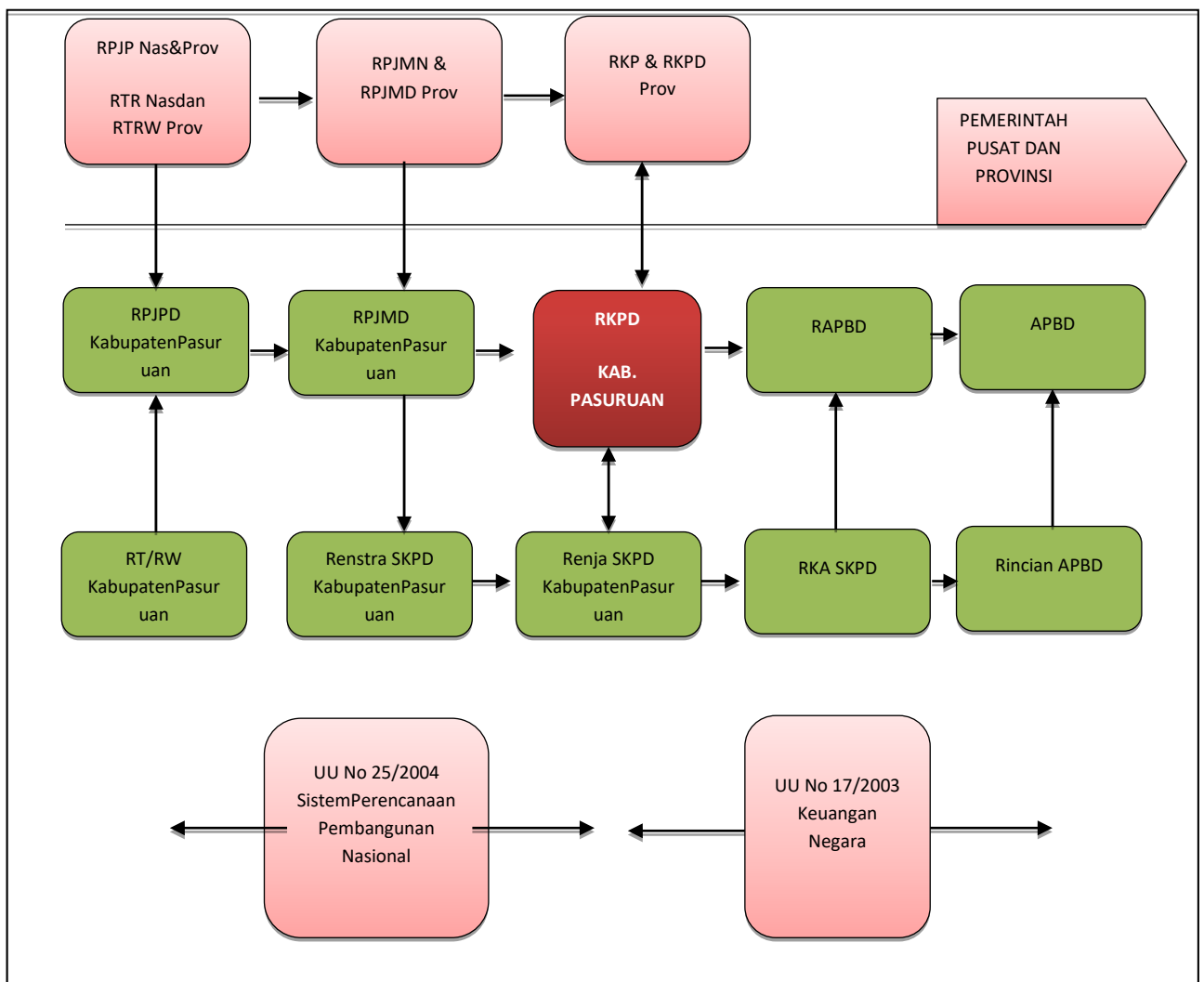
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2020 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor .... Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kabupaten Pasuruan tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029;
19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor... Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

### **3. HUBUNGAN RPKD KABUPATEN PASURUAN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik dokumen perencanaan berskala nasional maupun regional (provinsi). Di tingkat nasional dokumen perencanaan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang kemudian dijabarkan menjadi dokumen lima tahunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dokumen tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sedangkan pada tingkat Provinsi terdiri dari RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD Provinsi, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 menjadi acuan dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2021. RKPD Kabupaten Pasuruan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dokumen Renja Perangkat Daerah dijadikan acuan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Keterkaitan dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan lainnya merupakan upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan daerah (Kabupaten/Kota) dengan perencanaan daerah (Provinsi) dan perencanaan pemerintah pusat.

**Gambar 1.1**  
**Keterkaitan RKPD Kabupaten Pasuruan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



### 3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 adalah menjaga kesesuaian dan keberlanjutan perencanaan pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2021 dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Sedangkan tujuan Penyusunan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 adalah sebagai pedoman perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021.

#### **4. SISTEMATIKA**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika dokumen RKPD.

##### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Memuat kondisi umum daerah berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Selain itu juga memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta memuat permasalahan pembangunan daerah.

##### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, serta penjelasan tentang kebijakan keuangan pemerintah daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

##### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

##### **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD), dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana

program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

## **BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci pada akhir tahun perencanaan.

## **BAB VII PENUTUP**





Kabupaten Pasuruan memiliki karakter fisik yang beragam diantaranya wilayah pegunungan, wilayah pesisir, dan wilayah dataran rendah. Untuk wilayah pesisir yaitu wilayah perairan laut dan kawasan pantai yang membentang sepanjang  $\pm$  48 km mulai dari Kecamatan Nguling hingga Kecamatan Bangil dengan wilayah eksploitasi laut mencapai 112,5 mil laut persegi dan potensi laut lestari/*Maximum Sustainable Yield* (MSY) sebesar  $\pm$  27.000 ton per tahun. Kawasan perairan laut di Kabupaten Pasuruan memiliki garis pantai memanjang dari Barat ke Timur menghadap ke Laut Jawa dengan luas kawasan pesisir secara administratif (jarak arbiter 2 Km dari garis pantai) sekitar 4.917 ha. Sebagian besar telah dimanfaatkan secara maksimal, terutama di wilayah Kecamatan Nguling, Lekok dan Kraton.

Jenis geologi yang ada di Kabupaten Pasuruan cukup beragam dan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu batuan permukaan, batuan sedimen dan batuan gunung api. Batuan gunung api terbagi atas dua kelompok yaitu gunung api kuarter muda (*young quarternary*) seluas 52,43% dan kuarter tua (*old quarternary*) seluas 34,95%.

Kondisi topografi meliputi kelerengan dan ketinggian. Kondisi kelerengan di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

- a. Kelerengan 0–2%, meliputi seluruh Kecamatan Bangil, Rembang, Kraton, Pohjentrek, Gondangwetan, Rejoso dan Lekok, sebagian Kecamatan Pasrepan, Kejayan, Wonorejo, Winongan, Grati dan Nguling.
- b. Kelerengan 2–5%, meliputi sebagian dari Kecamatan Purwodadi, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Wonorejo, Purwosari, Prigen, Sukorejo, Pandaan, Gempol, Beji, Winongan, Grati dan Nguling.
- c. Kelerengan 5–8%, meliputi sebagian Kecamatan Purwodadi, Tukur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Purwosari, Prigen,



Sukorejo, Pandaan, Gempol, Beji, Winongan dan Lekok.

- d. Kelerengan 8–15%, meliputi sebagian Kecamatan Purwodadi, Tukur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Purwosari, Prigen, Pandaan, Gempol, Winongan dan Grati
- e. Kelerengan 15–25%, meliputi sebagian Kecamatan Purwodadi, Tukur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Purwosari, Prigen, Gempol dan Beji.
- f. Kelerengan 25–45%, meliputi sebagian Kecamatan Purwodadi, Tukur, Puspo, Tosari, Lumbang, Purwosari, Prigen dan Gempol.
- g. Kelerengan > 45%, meliputi sebagian Kecamatan Tukur, Puspo, Tosari, Lumbang, dan Prigen.

Sedangkan gambaran wilayah berdasarkan ketinggian dibagi menjadi lima, yaitu:

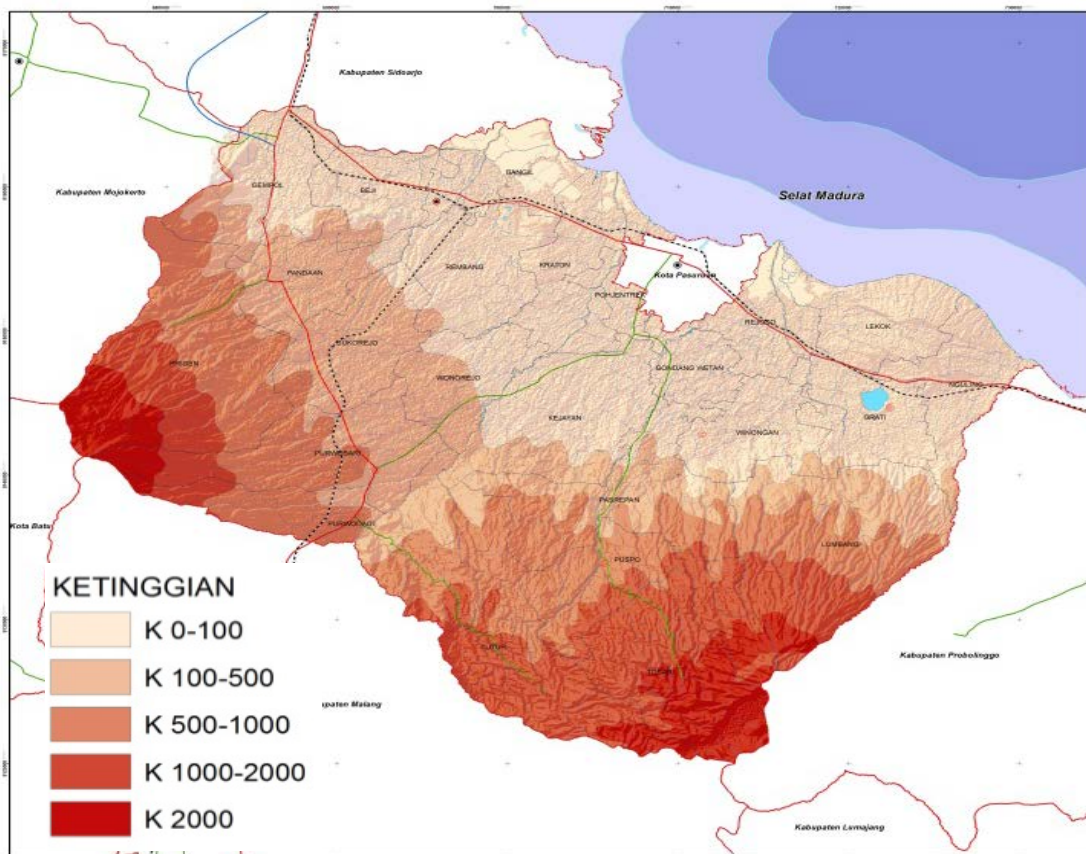
- a. Wilayah pesisir dengan ketinggian 0–12,5 mdpl seluas 18.819,04 ha atau 12,77%. Wilayah ini sesuai untuk pengembangan usaha perikanan dan pertambakan dengan lokasi penyebaran pada sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Beji, Bangil, Rembang, Kraton, Pohjentrek, Gondangwetan, Rejoso, Winongan, Grati, Lekok dan Nguling.
- b. Wilayah dataran dengan ketinggian 12,5–500 mdpl seluas 50.384,02 ha atau 34%. Wilayah ini sesuai untuk pengembangan pertanian, permukiman, perindustrian dengan lokasi berada pada sebagian wilayah kecamatan-kecamatan di Kabupaten Pasuruan kecuali Kecamatan Tosari.
- c. Wilayah perbukitan dengan ketinggian 500–1000 mdpl seluas 21.877,17 ha atau 14,84% dari luas wilayah. Peruntukannya sesuai untuk tanaman keras/tahunan dan sebagai penyangga bagi kawasan perlindungan tanah dan air serta untuk lahan pertanian tanaman pangan dengan sistem teras siring, meliputi sebagian kawasan Kecamatan Lumbang, Gempol, Purwodadi, Tukur, Tosari,



Pasrepan, Puspo, Purwosari, dan Prigen.

- d. Wilayah pegunungan dengan ketinggian 1.000–2.000 mdpl seluas 18.615,08 ha atau 12,63% dari luas wilayah berfungsi sebagai kawasan penyangga untuk perlindungan tanah dan air, meliputi sebagian kawasan Kecamatan Purwodadi, Tukur, Tosari, Lumbang, Puspo, Purwosari dan Prigen.
- e. Wilayah dengan ketinggian > 2000 mdpl seluas 7.920,77 ha atau sekitar 5,37% dari luas wilayah, dengan peruntukkan sebagai hutan lindung yang berfungsi untuk melindungi kawasan bawahannya, tersebar pada sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Tukur, Tosari, Lumbang, Puspo, Purwosari, dan Prigen.

**Gambar 2.2. Peta Ketinggian Kabupaten Pasuruan**



Keberagaman jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Pasuruan karena dipengaruhi oleh faktor litologi dan strukturnya, yaitu mencakup : alluvial, regosol, andosol, grumosol, mediteran dan

latosol. Penjelasan jenis tanah di Kabupaten Pasuruan dikelompokkan dalam 6 jenis yaitu :

### **1. Alluvial**

- a. Bahan induk : alluvial dari aneka macam asal
- b. Sifat dan Corak : warna: kelabu; tekstur : liat; keasaman : aneka; zat organik : kadar lemah; kejenuhan : sedang hingga tinggi; permeabilitas : rendah; kepekaan erosi : tinggi, tetapi karena daerahnya datar tidak sampai lanjut tingkatnya;
- c. Pemakaian : padi sawah, palawija dan perikanan.

### **2. Regosol**

- a. Bahan induk : alluvial dari aneka macam asal
- b. Sifat dan Corak : warna: kelabu hingga kuning; tekstur : pasir, kadar liat <40%; keasaman : aneka; zat organik : kadar rendah; Kejenuhan : aneka; Permeabilitas : tinggi; Kepekaan erosi : tinggi;
- c. Pemakaian : padi sawah, palawija, tebu, sayuran

### **3. Andosol**

- a. Bahan induk : abu dan tuf vulkan
- b. Sifat dan Corak : warna: hitam hingga kuning; tekstur : lempung hingga debu, liat menurun; keasaman : agak masam hingga netral; zat organik : lemah; Kejenuhan : basa; Permeabilitas : sedang; Kepekaan erosi : besar;
- c. Pemakaian : sayuran, bunga-bunga, teh , kopi, hutan pinus

### **4. Grumusol**

- a. Bahan induk : merjel, liat, tuf vulkan;
- b. Sifat dan Corak : warna: kelabu hingga hitam; tekstur : liat makin ke bawah makin meningkat; keasaman : sedikit asam hingga alkalin; zat organik : kadar rendah; kejenuhan : basa tinggi; permeabilitas : rendah; kepekaan erosi : besar;



- c. Pemakaian : padi sawah, jagung, kedele, tebu, kapas dan hutan jati

#### **5. Mediteran**

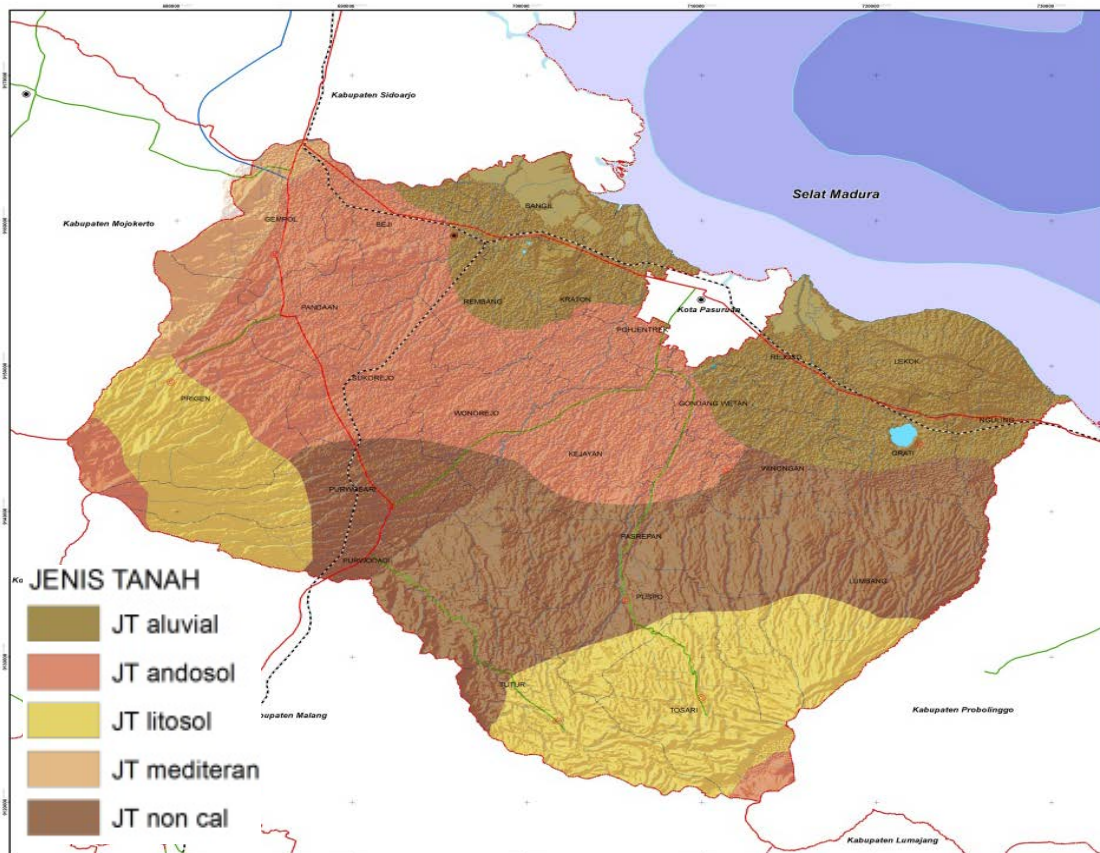
- a. Bahan induk : batu kapur keras, batuan sedimen dan tuf vulkan basa;
- b. Sifat dan Corak : warna: kuning hingga merah; tekstur : lempung liat; keasaman : agak masam hingga netral; zat organik : rendah; Kejenuhan : basa tinggi; Permeabilitas : sedang; Kepekaan erosi : besar hingga sedang;
- c. Pemakaian : padi sawah, tegalan, rumput ternak

#### **6. Latosol**

- a. Bahan induk : tuf vulkan, bahan vulkan;
- b. Sifat dan Corak : warna: merah hingga kuning; tekstur : liat tetap dari atas hingga ke bawah; keasaman : masam hingga agak masam; zat organik : kadar rendah hingga agak sedang di lapisan atas, menurun ke bawah; Kejenuhan : basa rendah hingga sedang; Permeabilitas : tinggi; Kepekaan erosi : kecil;
- c. Pemakaian : padi sawah, jagung, umbian, kelapa, coklat, cengkeh, kopi maupun hutan tropika.



**Gambar 2.3. Peta Jenis Tanah Kabupaten Pasuruan**



### **2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah**

Kabupaten Pasuruan secara ekonomis memiliki beberapa keunggulan potensi daerah, apabila dapat dimanfaatkan dengan baik dapat meningkatkan perekonomian daerah.

#### **1. Posisi wilayah yang strategis**

Letak wilayah daerah Kabupaten Pasuruan, dilihat dari segi ekonomi sangat strategis, karena terletak pada delta jalur raya ekonomi Surabaya -Jember / Banyuwangi / Bali, Surabaya - Malang dan Malang - Jember / Banyuwangi / Bali, dilintasi Jalur Angkutan Kereta Penumpang dan Barang Surabaya - Bangil - Banyuwangi serta Surabaya - Bangil - Malang. Terlebih lagi dengan pembangunan Jalan Tol Porong - Gempol, Gempol - Pandaan, Pandaan - Malang,

Gempol - Pasuruan, dan Pasuruan - Probolinggo semakin membuat Kabupaten Pasuruan menjadi pilihan yang tepat bagi pengembangan industri, dengan semakin pendeknya waktu tempuh ke Surabaya.

## **2. Ketersediaan infrastruktur**

Infrastruktur atau juga disebut sebagai prasarana wilayah adalah fasilitas (baik berupa fisik maupun sistem) yang dipergunakan untuk memfasilitasi suatu sarana sehingga dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya. Secara umum infrastruktur terdiri dari komponen utama jalan, jembatan, perumahan/permukiman, air bersih, pengolahan sampah dan limbah, jaringan irigasi, jaringan drainase, energi, telepon dan komunikasi. Dengan adanya infrastruktur jalan yang telah menghubungkan hampir seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan, sangat mendukung bagi perkembangan ekonomi, pariwisata, pertanian, industri, transportasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain adanya prasarana jalan, sistem transportasi barang dan jasa juga didukung dengan adanya jalur kereta api yang melintasi wilayah Kabupaten Pasuruan. Jalur kereta api yang ada melayani 2 (dua) jurusan yaitu Surabaya-Bangil-Malang-Blitar dan Surabaya – Pasuruan – Jember - Banyuwangi. Sebagai daerah yang berbasis pada sektor pertanian dan industri, di Kabupaten Pasuruan telah tersedia sistem jaringan irigasi yang mendukung produksi pertanian serta kawasan industri. Sistem jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Pasuruan akan mampu mengairi lahan pertanian secara memadai melalui peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif. Sementara Kawasan Industri lengkap dengan infrastruktur pengelolaan limbah dan fasilitas lainnya serta terkoneksi langsung dengan tol ke arah Surabaya-Malang-Banyuwangi/Bali. Beberapa komponen infrastruktur yang lain seperti air bersih, energi listrik, pipa gas, dan telekomunikasi juga telah tersedia dalam jumlah yang



cukup memadai. Sehingga dengan adanya infrastruktur yang telah terbangun akan sangat menunjang bagi perkembangan ekonomi dan wilayah.

### **3. Potensi Wisata**

Kabupaten Pasuruan memiliki potensi wisata yang beragam, mulai dari wisata alam, wisata budaya dan religi, wisata buatan, wisata agro dan wisata minat khusus, berupa destinasi wisata yang menarik kunjungan wisatawan, baik domestik maupun manca negara. Wisata Alam yang paling dikenal dan dikunjungi wisatawan adalah wisata Sunrise Puncak Penanjakan Gunung Bromo di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Wisata alam lainnya antara lain Air Terjun Kakek Bodho, Pemandian Alam Banyubiru, Danau Ranu Grati, Sumber Air Umbulan, Air Terjun Coban Cemoro Gading, Air Terjun Sembel Nyonya, Air Terjun Putuk Truno, Air Terjun Coban Baung, Air Terjun Coban Jala, Air Terjun Rambut Moyo, Air Terjun Coban Waru, Pantai Pasir Panjang Kecamatan Lekok, Hutan Mangrove di pantai Penunggul Kecamatan Nguling dan Hutan Mangrove di Kecamatan Rejoso dan Kraton. Wisata Budaya dan Religi antara lain Candi Laras, Candi Satrio Manggung, Candi Kebo Ireng, Candi Gununggangsir, Candi Belahan, Candi Sepilar, Candi Makutoromo, Candi Jawi, Goa Jepang/Inna Tretes, Makam Ki Ageng Penanggungan, Makam Sakerah, Dewa Wisata Situs Purbakala Tambak Sari, Makam Mbah Bangil, Makam Mbah Ratu Ayu, Makam Mbah Semendhi, Makam Mbah Segoropuro, Pertapaan Abiyoso, dan Pertapaan Indrokilo. Wisata Buatan antara lain Saygon Water Park dan Taman Dayu Water Park. Sedangkan Wisata Agro antara lain Agrowisata Apel di Kecamatan Tuter, Agro Kopi di Kecamatan Tuter dan Prigen, Agro Bunga Krisan dan Paprika di Kecamatan Tuter, Peternakan Sapi Perah di Kecamatan Tuter dan Grati, Agro Jamur di Kecamatan Sukorejo dan Purwodadi, Agro





Durian di Kecamatan Lumbang, Purwodadi, Tukur, dan Puspo, Agro Wisata Bhakti Alam di Kecamatan Tukur, Agro PG Kedawung di Kecamatan Grati, Agro Mangga di Kecamatan Rembang dan Sukorejo, Kebun Pak Budi di Kecamatan Purwosari, Kebun Bunga Sedap Malam di Kecamatan Rembang dan Bangil. Wisata Minat Khusus antara lain Taman Safari Indonesia II, Taman Dayu, Finna Golf & Country Club, Kaliandra, Bukit Flora, dan Baung Camp serta 36 Desa Wisata yang tersebar di Kecamatan Tosari, Tukur, Purwodadi, Purwosari, Grati, Gempol, Prigen dan Winongan yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Desa-Desa Wisata dan Kelompok-kelompok Sadar Wisata inilah yang akan terus berkembang dengan melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat sehingga berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja di pedesaan yang diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan secara bertahap akan mengembangkan branding wisata halal yang tidak hanya terkonsentrasi pada infrastruktur saja tetapi juga pengembangan kuliner, destinasi wisata, akomodasi, dan lainnya.

#### **4. Potensi Industri**

Potensi industri di Kabupaten Pasuruan meliputi industri besar, menengah, dan kecil. Industri besar sebagian besar berlokasi di Kecamatan Gempol, Beji, Pandaan, Sukorejo, Rembang, Purwosari, Purwodadi, Wonorejo, Bangil dan Kejayan. Industri kecil dan menengah berkembang di perdesaan, antara lain bergerak dalam bidang : makanan dan minuman, bordir, Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), Konveksi, Meubel kayu, dan Logam. Salah satu industri kecil menengah yang menjadi unggulan adalah kerajinan bordir, konveksi dan batik. Kerajinan bordir di Kecamatan Bangil telah



dikenal memiliki keunggulan desain dan kualitas sehingga pesanan melebihi kapasitas yang ada, solusinya pengerjaan pesanan tersebut disebar ke kecamatan-kecamatan lain seperti Kecamatan Beji, Wonorejo, Rembang, Pandaan, Sukorejo, Winongan. Produk kerajinan bordir disamping untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal juga mampu menembus pasaran ekspor (Brunei, Malaysia, Singapura dan Timur Tengah). Sedangkan industri konveksi paling banyak di Kecamatan Gempol dengan produk utamanya celana jeans, kaos dan celana sport. Sementara industri batik warna alam telah menunjukkan jati dirinya dan dikagumi oleh konsumen dalam dan luar negeri seperti Korea, Malaysia dan Australia. Sentra industri kayu, antara lain di desa Sentul Kecamatan Purwodadi, Tambaksari Kecamatan Kraton, Wonorejo Kecamatan Wonorejo, Sungikulon dan Sungiwetan Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Winongan, Kecamatan Rejoso serta Kecamatan Kraton. Pengrajin kayu menghasilkan mainan anak-anak, setir mobil, kotak tissue, handle perseneling, dashboard, catur dan lain-lain. Selain kerajinan kayu di wilayah Kabupaten Pasuruan juga berkembang industri meubel. Pemasaran kerajinan kayu dan meubel tersebut mencakup wilayah lokal dan luar negeri. Kerajinan perak dihasilkan dari sentra-sentra industri kerajinan perak meliputi Kecamatan Bangil dan Gempol. Produk-produk yang dihasilkan telah menembus pasar luar negeri, antara lain Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Sementara Industri Kecil *spare part* kendaraan bermotor telah berkembang di Kecamatan Winongan dengan pasar terbesarnya ke Malang dan Surabaya. Selain itu di Kabupaten Pasuruan terdapat kawasan industri yaitu Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER), suatu kawasan berikat yang menjadi tempat potensial untuk berinvestasi yang aman dan menjanjikan. Di luar kawasan industri PIER masih terdapat kawasan peruntukan industri yang



memungkinkan pengembangan kawasan industri baru. Industri Kecil Makanan Minuman yang rata-rata berbahan baku lokal tumbuh pesat di seluruh kecamatan. Sentra pia di Kecamatan Gempol terus tumbuh dan berkembang dan mampu menyerap banyak tenaga kerja karena bersifat padat karya. Pia telah dipasarkan ke luar daerah utamanya Malang dan Surabaya. Industri olahan apel, kopi dan susu tumbuh di Kecamatan Tukur. Industri aneka keripik di Kecamatan Sukorejo, Pandaan, Prigen, Tosari dan Purwodadi. Industri olahan ikan berkembang di Kecamatan Rejoso, Lekok, Grati, Bangil dan Beji. Industri minuman pokok di Kecamatan Winongan dan sirup serta dodol salak di Kecamatan Gondangwetan. Berkembangnya sentra-sentra industri potensial memberikan harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi sektor riil di daerah. Hal ini diharapkan akan mengentaskan kemiskinan. Berkembangnya industri kecil menengah ditopang oleh berkembangnya tempat-tempat pemasaran produk seperti Kawasan Masjid Cheng Hoo dan Pasar Buah Pandaan, Sentra Produk Unggulan di Bangil, Taman Dayu serta Sentra Kulakan produk UMKM/IKM di Gempol.

##### **5. Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.**

Wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki potensi pertanian yang cukup besar sehingga mampu menghasilkan produk-produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang berkualitas antara lain padi, jagung, kentang, paprika, wortel, mangga, durian, apel, bunga sedap malam dan krisan. Sedangkan potensi hasil perkebunan yang menjadi komoditas unggulan dan dapat terus dikembangkan meliputi tebu dan kopi. Sentra tananam tebu tersebar di Kecamatan Grati, Winongan, Gondangwetan, Nguling dan Kejayan. Sentra tanaman Kopi di Kecamatan Tukur, Purwodadi, Purwosari, Prigen, Lumbang, Pasrepan, Puspo, dan Tosari. Komoditas perikanan



di Kabupaten Pasuruan meliputi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Potensi perikanan budidaya antara lain : udang, bandeng, patin, tombro, nila, gurami dan lele. Sedangkan potensi perikanan tangkap antara lain : tongkol, teri nasi, cumi-cumi, kakap dan lain-lain. Selanjutnya inovasi teknologi budidaya perikanan harus terus ditingkatkan dengan mengedepankan kemampuan sumberdaya alam, daya dukung dan daya tampung . Potensi hasil peternakan yang menjadi unggulan Kabupaten Pasuruan adalah sapi perah, sapi potong, kambing, domba dan unggas. Hasil produksi sapi perah adalah susu segar yang ditampung oleh koperasi dan selanjutnya dikirim ke industri pengolahan susu antara lain PT. Nestle Kejayan Pasuruan, PT. Indolakto di Purwosari dan PT. Frisian Flag Indonesia. Disamping itu tumbuh dan berkembang Usaha Mikro Kecil Menengah olahan produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan seperti pia, kopi bubuk, kerupuk susu, susu pasteurisasi aneka rasa, dendeng daging, nugget ikan, bakso ikan, ikan crispy, telur asin dan aneka jenis olahan pangan lainnya. Salah satu komoditas unggulan adalah telur asin dari itik yang diproduksi di Kecamatan Grati dan Gempol.

## **6. Potensi Sumberdaya Alam**

Potensi Sumberdaya alam yang dimaksud disini adalah sumberdaya alam baik di permukaan bumi maupun didalam bumi. Sumberdaya alam di permukaan bumi antara lain (potensi unsur hara yang subur untuk pertanian dalam arti luas), cukup banyak sumber air permukaan (danau/ranu grati, sumber/mata air yang mengalir di beberapa sungai), potensi keindahan alam pegunungan, air terjun, dsbnya. Sedangkan sumberdaya alam di dalam bumi baik yang sudah tereksplorasi maupun belum secara garis besar terdiri dari potensi bahan tambang galian C (batuan, pasir, tanah urug, dan



sebagainya) dan potensi air bawah tanah. Berbagai macam potensi tersebut, pada satu sisi merupakan potensi yang dapat dieksploitasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat namun di sisi lain harus tetap mengutamakan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan.

### **2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana**

Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya tidak terlepas dari kondisi geofisik wilayah Kabupaten Pasuruan. Keberadaan gunung berapi, adanya dataran rendah dan kondisi dataran tinggi yang mulai terdegradasi menjadikan Kabupaten Pasuruan memiliki beberapa potensi bencana alam. Potensi bencana yang ada di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

1. Kawasan rawan bencana gunung berapi yaitu kawasan Gunung Bromo seluas 1.320 Ha dan daerah waspada seluas 751 Ha yang berada di Desa Ngadirejo, Mororejo, Wonokitri dan Desa Keduwung di Kecamatan Tosari dan Gunung Welirang; sedangkan kawasan rawan bencana gunung berapi di Gunung Welirang seluas 1.368 Ha dan waspada seluas 809 Ha yang meliputi sebagian dari Desa Lumbangrejo dan Kelurahan Pecalukan di Kecamatan Prigen, Desa Cendono, Desa Sumberejo di Kecamatan Purwosari.
2. Kawasan rawan longsor/gerakan tanah di Kabupaten Pasuruan yang luasnya mencapai 37.626,4 Ha, dikarenakan sebagian wilayahnya berada pada kelerengan > 40%. Daerah-daerah potensial longsor berada di Kecamatan Tukur, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang dan Kecamatan Prigen.
3. Kawasan rawan banjir sebesar 11.948,15 Ha, daerah potensial banjir berada di Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Rembang, Kecamatan Bangil, Kecamatan Kraton, Kecamatan Grati, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Gondangwetan,



Kecamatan Rejoso, Kecamatan Winongan, karena merupakan daerah hilir yang dipengaruhi adanya daerah aliran sungai. Kondisi banjir ini diakibatkan adanya hujan di hulu sungai cukup tinggi, sehingga mengakibatkan air meluap, serta beberapa kecamatan lagi yaitu Kecamatan Lekok dan Kecamatan Kraton merupakan daerah rawan banjir yang biasanya disebabkan adanya rob.

4. Kawasan rawan bahaya angin puyuh/puting beliung berpotensi di Kecamatan Gempol, Pandaan dan Sukorejo, serta kemungkinan beberapa kecamatan lain mengingat terjadinya anomali iklim pada beberapa tahun terakhir.

#### 2.1.1.4 Kondisi Demografis

Kondisi demografis Kabupaten Pasuruan tahun 2018 berdasarkan pendataan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 2,30% dan mencapai sejumlah 1.876.881 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 949.084 jiwa dan perempuan sebanyak 927.797 jiwa, dengan sex ratio sebesar 102,29.
- b. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan tahun 2019, secara proporsional terbagi menjadi kelompok sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Jiwa)	%
1	Tidak/belum tamat sekolah	347.230	18,50
2	Belum tamat SD/ sederajat	371.384	19,79
3	Tamat SD/ sederajat	578.350	30,81
4	SLTP/ sederajat	251.094	13,38
5	SLTA/ sederajat	275.208	14,66
6	Diploma I/II/III	10.506	0,56
7	Diploma IV/Strata 1	40.979	0,43
8	Strata 2/3	2.130	0,11
	<b>Jumlah</b>	<b>1.876.881</b>	<b>100</b>



Berdasarkan data tersebut penduduk Kabupaten Pasuruan tertinggi tamat SD/ sederajat (30,81%), kemudian SLTP/SLTA/Sederajat (28,04%), dan terendah tamat pendidikan diploma/strata-1/2/3 (1,10%).

c. Komposisi penduduk menurut kelompok umur secara proporsional (data diolah) berdasarkan data tahun 2019 sebagai berikut:

1) Usia muda (0-14 tahun)	: 19,87 % (372.888)
2) Usia produktif (15-64 tahun)	: 71,77 % (1.347.037)
3) Usia tua (65 tahun ke atas)	: 8,36 % (156.956)
Jumlah	: 1.876.881 jiwa

Berdasarkan data tersebut maka angka rasio ketergantungan sebesar 39,33 dengan pengertian bahwa dari setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 39 penduduk usia nonproduktif (usia muda dan usia tua).

d. Komposisi penduduk menurut pekerjaan (data diolah) secara proporsional berdasarkan data tahun 2019 diperoleh gambaran sebagai berikut :

1) Belum/Tidak Bekerja	: 22,02%	413.281
2) Pelajar/Mahasiswa	: 14,95%	280.598
3) Pensiunan	: 0,32%	5.928
4) Pegawai Negeri Sipil	: 0,64%	11.960
5) TNI/Polri	: 0,20%	3.753
6) Petani/Peternak/Nelayan	: 13,99%	262.573
7) Karyawan Swasta/BUMN/BUMD	: 20,78%	390.022
8) Buruh Harian Lepas	: 0,67%	12.548
9) BuruhTani/Peternakan/Nelayan	: 1,35%	25.307
10) Guru/Dosen	: 0,67%	12.544
11) Dokter/Bidan/Perawat	: 0,08%	1.443
12) Pedagang/Wiraswasta	: 10,40%	195.278
13) Lain-Lain	: 13,94%	261.646
		<b>1.876.881</b>

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lima tertinggi proporsi penduduk berdasarkan pekerjaan adalah :



- (1) belum/tidak bekerja sebesar 22,02%;
- (2) karyawan swasta/BUMN/BUMD sebesar 20,78%;
- (3) pelajar/mahasiswa sebesar 14,95%;
- (4) petani/peternak/nelayan sebesar 13,99%; dan
- (5) pedagang/wiraswasta sebesar 10,40%.

e. Komposisi penduduk menurut agama (data diolah) berdasarkan data tahun 2019 sebagai berikut:

1. Islam	:	98,20 % (1.843.674)
2. Kristen	:	0,52 % (9.627)
3. Katolik	:	0,19 % (3.376)
4. Hindu	:	1,05 % (19.422)
5. Budha	:	0,04 % (747)
6. Konghuchu	:	0,001 % (20)
7. Kepercayaan	:	0,0004 % (15)

Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk beragama Islam yaitu sebesar 98,23% dan 1,77% beragama lain.

### **2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat (pembagian urusan sesuai permendagri 90)**

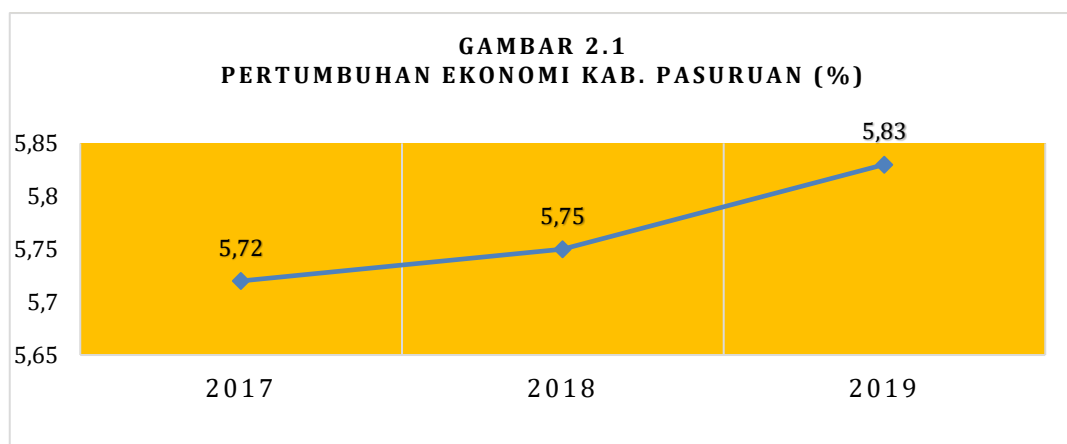
#### **Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Perekonomian Daerah.**

Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2019 sebesar 5,83%, terdapat percepatan dibandingkan tahun 2018 yang tumbuh sebesar 5,75%. Berdasarkan data sangat sementara BPS Kabupaten Pasuruan, pertumbuhan ekonomi tersebut terbesar dipengaruhi oleh lapangan usaha : (1) Transportasi dan Pergudangan tumbuh 7,42%, (2) Informasi dan komunikasi tumbuh 7,10%; (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh 6,94%; (4) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh 6,65% ; (5) Jasa Pendidikan tumbuh 6,54% ; (6) Industri Pengolahan tumbuh 6,46%;



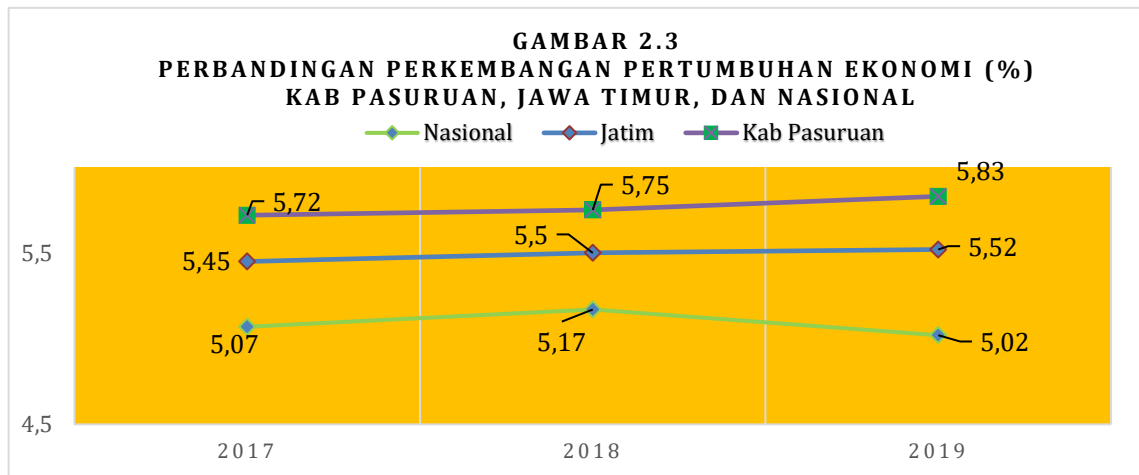


(7)Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh 6,02% ; (8) Jasa Perusahaan tumbuh 5,91% ; (9) Real Estate tumbuh 5,53% ; serta 8 (delapan) lapangan usaha lain tumbuh rata-rata 3,13%.



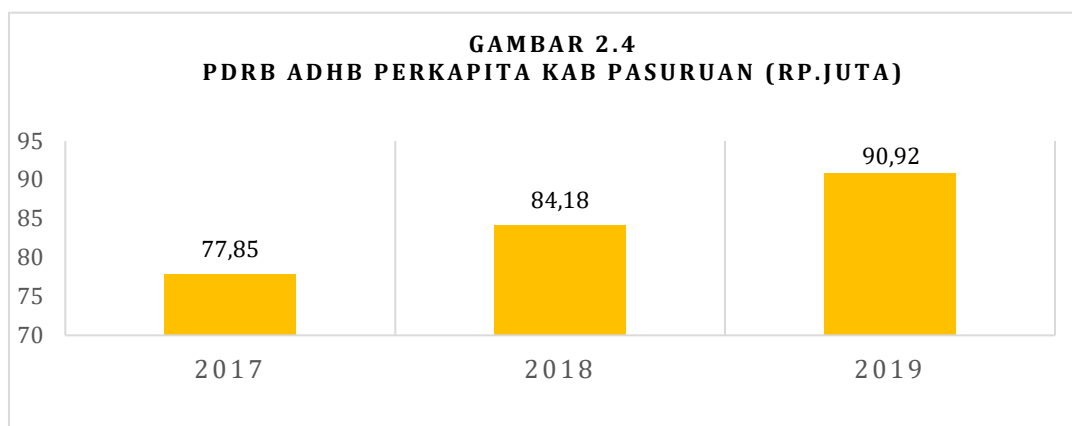
Sedangkan struktur perekonomian Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 dapat dijelaskan berdasarkan seberapa besar kontribusi setiap lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. Volume PDRB Kabupaten Pasuruan tahun 2019 atas dasar harga berlaku (data sangat sementara) mencapai Rp.147,977 Trilyun. Secara berurutan kontribusi lapangan usaha mulai dari yang terbesar yaitu : (1) Industri Pengolahan 57,55% ; (2) Konstruksi 12,86%; (3) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9,82%; (4) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6,63%; (5) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3,93%, serta (6) dua belas lapangan usaha lainnya 9,21%.

Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan dengan Jawa Timur dan Nasional sebagaimana Gambar 1.4 menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2017-2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan selalu berada di atas angka Jawa Timur dan Nasional.



### 1. PDRB perkapita dan Indeks Pembangunan Manusia.

PDRB perkapita digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur pendapatan perkapita masyarakat. PDRB perkapita tahun 2019 sebesar Rp.90,92 juta per jiwa, sedangkan tahun 2018 mencapai Rp.84,18 juta per jiwa atau mengalami kenaikan 8%. Kondisi tersebut mengindikasikan secara makro kesejahteraan masyarakat meningkat. Perkembangan PDRB perkapita disajikan pada gambar 2.4



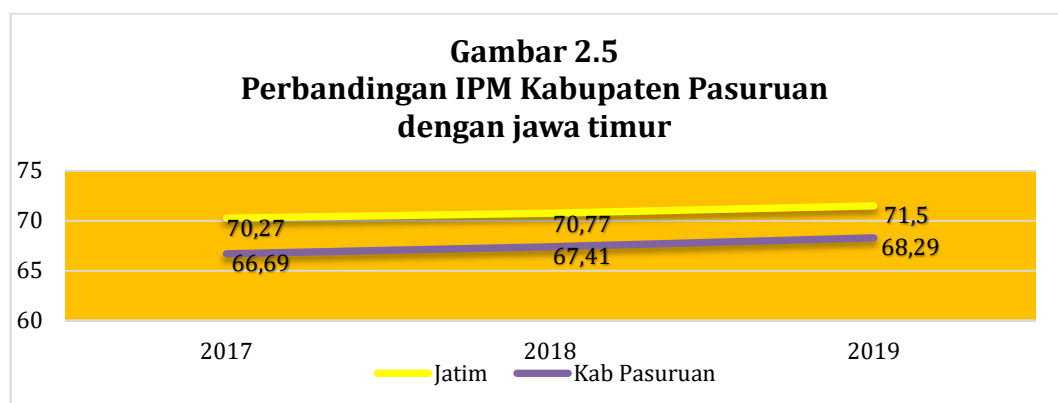
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur berdasarkan tiga unsur yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. IPM Kabupaten Pasuruan tahun 2019 mencapai 68,29., sedangkan tahun 2018 sebesar 67,41

atau meningkat 1,30%. Peningkatan atau pertumbuhan IPM Kabupaten Pasuruan tersebut, berdasarkan data BPS menempati urutan ke-8 se Jawa Timur, setelah: 1. Kab. Sampang tumbuh 1,54% ; 2. Kab. Sumenep tumbuh 1,49% ; 3. Kab. Bangkalan tumbuh 1,46% ; 4. Kab. Tuban tumbuh 1,39% ; 5. Kab. Jombang tumbuh 1,38% ; 6. Kab. Malang tumbuh 1,37% ; dan 7. Kab. Bojonegoro tumbuh 1,33%.

**Tabel 2.1**  
**IPM Kabupaten Pasuruan dan Komponennya**

Uraian	2017	2018	2019
IPM	66,69	67,41	68,29
Angka Harapan Hidup (Tahun)	69,90	70,01	70,17
Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,50	12,30	12,31
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,82	6,83	7,25
Pengeluaran per kapita	9.556	9.933	10.268

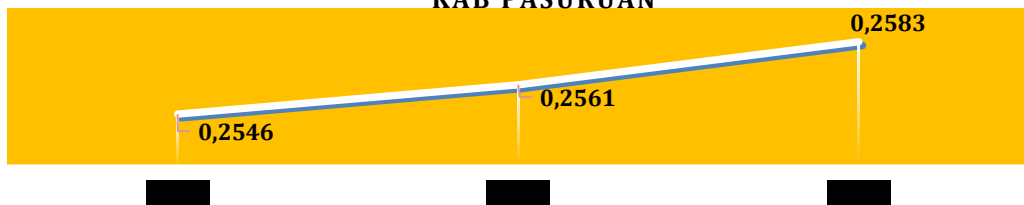
Perbandingan IPM Kabupaten Pasuruan dengan Jawa Timur sebagaimana Gambar 1-9. Dalam periode tahun 2017 s/d 2019, angka IPM Kabupaten Pasuruan masih di bawah angka Jawa Timur dengan jarak/kesenjangan yang semakin kecil. Selain itu jika dilihat dari pertumbuhannya terdapat percepatan, yaitu tahun 2018 naik 1,07% sedangkan tahun 2019 naik 1,30%.



## 2. Indeks Kesenjangan Wilayah

Kondisi kesenjangan/disparitas wilayah diukur dengan indeks Wiliamson. Berdasarkan hasil perhitungan Bappeda bekerja sama dengan Universitas Brawijaya Malang, Indeks Wiliamson tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan tren peningkatan namun tidak signifikan, namun demikian perlu dilakukan pengendalian agar kesenjangan wilayah tidak semakin besar antar wilayah di Kabupaten Pasuruan.

GAMBAR 2.6  
INDEKS WILLIAMSON  
KAB PASURUAN



## 3. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan.

Kondisi pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan berdasarkan data BPS Kabupaten Pasuruan tahun 2019 dijelaskan pada uraian berikut. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2019 mencapai 5,42% menurun dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 6,11%. Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) terdiri dari penduduk yang bekerja, penduduk yang mempunyai pekerjaan tapi sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

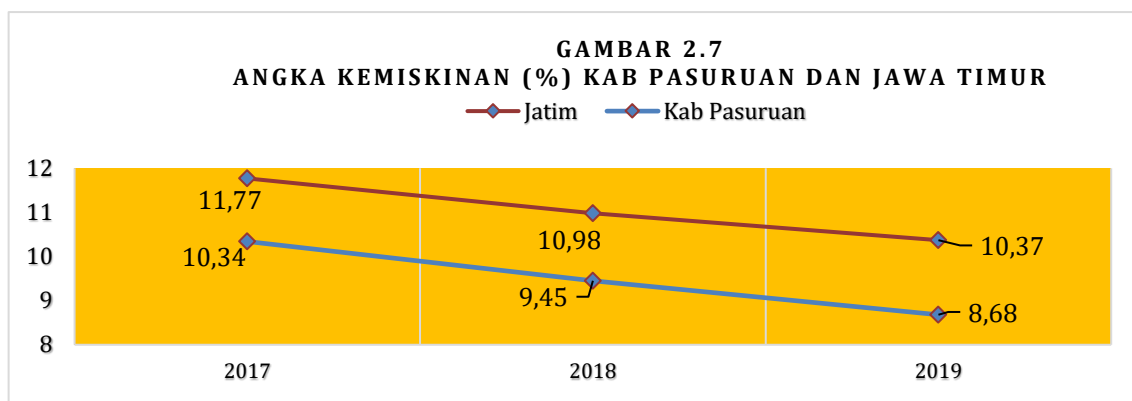
**Tabel 2.2**  
**Perkembangan TPT Kabupaten Pasuruan**

Uraian	2017	2018	2019
Angkatan Kerja	819.322	864.530	861.085
Pengangguran	40.759	52.820	46.653
TPT (%)	4,97	6,11	5,42

Secara kuantitas kemiskinan Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan yaitu mencapai 8,68% di tahun 2019, sementara tahun 2018 mencapai 9,45%. Secara kualitas terdapat penurunan namun tidak signifikan sebagaimana ditunjukkan pada tabel I-3 , indeks kedalaman dan indeks keparahan meningkat (berarti negatif / kondisi menurun). Namun demikian garis kemiskinan meningkat (berarti positif / kondisi lebih baik). Angka kemiskinan Kabupaten Pasuruan juga selalu berada di bawah angka Jawa Timur sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1-9.

**Tabel 2-3**  
**Angka Kemiskinan Kab Pasuruan**

Uraian	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	165.640	152.480	141.090
Persentase Penduduk Miskin (%)	10,34	9,45	8,68
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)	315.141	437.899	462.738
Indek Kedalaman (P1)	1,67	1,50	1,56
Indek Keparahan (P2)	0,44	0,37	0,42



### 2.1.3. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

#### A. PELAYANAN DASAR

##### 1. Bidang Pendidikan

Kinerja Bidang Pendidikan dalam melaksanakan bidang urusan pendidikan tahun 2019 sebagaimana Tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Capaian Indikator Bidang Pendidikan**

Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019
Indeks Pendidikan **	nilai	70,48	71,50
Rata-rata Lama Sekolah *	tahun	8,00	8,02
Harapan Lama Sekolah **	tahun	12,30	12,31

Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan lulus sekolah (RLBI) sesuai dengan jenjang pendidikannya. Hal ini untuk mengetahui apakah siswa lulus sesuai dengan ketentuan. Angka rata-rata lama sekolah merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2019 mencapai 8,02 tahun (hasil pengolahan data dinas pendidikan tahun 2019) belum mencapai target yang ditentukan yaitu 8,06 tahun. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan 0,02 poin atau menunjukkan kondisi yang lebih baik. Pencapaian angka rata-rata lama sekolah dikarenakan kesadaran masyarakat tentang wajib belajar sembilan tahun dan pentingnya mengenyam pendidikan yang lebih tinggi serta dukungan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dalam pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu dan layanan pendidikan yang baik terhadap masyarakat sehingga memotivasi masyarakat yang ada di Kabupaten Pasuruan untuk memperoleh pendidikan yang lebih



tinggi dan layak. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan diperoleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Menurut data BPS Kabupaten Pasuruan menunjukkan HLS tahun 2019 mencapai 12,31 tahun, yang artinya penduduk yang usia sekolah mempunyai harapan dapat menempuh pendidikan hingga D1. Dibandingkan tahun 2018, HLS mengalami peningkatan 0,01 poin.

## 2. Bidang Kesehatan

Urusan kesehatan di dukung dengan beberapa indikator, capaian indikator kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Capaian Indikator Bidang Kesehatan**

Indikator Kinerja	Kinerja			
	Satuan	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019
Angka Harapan Hidup	Tahun	70,01		70,17
Angka Kematian Bayi (AKB)	/1000 KH	5,37	6,66	5,33
Angka Kematian Ibu (AKI)	/100.000 KH	111,32	90	83,61
Persentase balita gizi buruk	%	0,03	0,03	0,03
Persentase Rumah Tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	47,37	46	51,24
Persentase Desa Siaga	%	100	100	100
Persentase akreditasi puskesmas dan RSUD Strata Madya	%	90	81	94
Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pelayanan Kesehatan di Puskesmas	-	82,08	81	82,73

Angka Kematian Bayi Kabupaten Pasuruan tahun 2019 tercapai sebesar 5,33 per 1.000 kelahiran hidup. Capaian ini mengalami penurunan 0,04 jika dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 5,37 bayi per 1000 kelahiran hidup. Jika dilihat dari target RPJMD untuk tahun 2019 sebesar 6,66 per 1.000 kelahiran hidup maka pencapaian tahun 2018 sudah melampaui dari target yang telah ditetapkan. Jumlah kematian bayi tahun 2019 sebanyak 134 kasus,



menurun dibandingkan tahun 2018 sebesar 135 kasus. Penyebab kematian terbesar adalah karena : Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 45 kasus (33,5%), asfiksia sebanyak 42 kasus (31,3%), kelainan kongenital bawaan sejumlah 20 kasus (15%), Sepsis sebanyak 18 kasus (13,2%), lain lain sebanyak 10 kasus (7,4%). Kematian bayi terbanyak karena Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) disebabkan Ibu Hamil dalam keadaan Kekurangan Energi Kalori (KEK), Preeklamsi Berat (PEB) dan anemi. Kasus BBLR bisa dicegah dan ditingkatkan berat badan bayi apabila pemeriksaan kehamilan dilakukan secara rutin dan berkualitas, serta ibu hamil sehat dan gizi baik, selalu mendapatkan penyuluhan. Disamping penyebab diatas, salah satu penyebab yang lainnya adalah Asfiksia yang disebabkan bayi tidak mendapatkan penanganan asfiksia (resusitasi) oleh petugas sesuai dengan standar. Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan digunakan untuk mengetahui keselamatan ibu pada proses persalinan. Indikator ini diperoleh dengan perhitungan jumlah kematian ibu dalam satu tahun dibanding dengan jumlah kelahiran hidup dikalikan 100.000. Target Angka kematian ibu (AKI) berdasarkan SDGs (*Sustainable Development Goals*) harus di bawah 70 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2030 serta target RPJMD adalah 90 per 100.000 Kelahiran Hidup untuk tahun 2019. Indikator ini menggambarkan kasus gizi buruk pada balita pada waktu tertentu dihitung berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) dan tanda-tanda tersangka kasus gizi buruk. Indikator ini diperoleh dengan mengukur persentase jumlah balita dengan gizi buruk terhadap jumlah balita yang ada di Kabupaten Pasuruan.





**Tabel 2.6**  
**Jumlah Balita Gizi Buruk**

No	Uraian	2018	2019
1	Jml balita gizi buruk	41	40
2	Jml balita	119.273	118.492
3	% Balita Gizi Buruk	0,03	0,03

Persentase Rumah Tangga Sehat dicapai dengan melakukan Survey Mawas diri pada Keluarga di Kabupaten Pasuruan setiap tahun. Hasil Survey Tahun 2019 sebesar 94.026 KK (51,20%) sedangkan Tahun 2018 sebesar 53.392 KK (47,40%) capaiannya meningkat, hal ini disebabkan sudah adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta intensifnya upaya promosi kesehatan. Namun masih belum memenuhi target. Karena masih adanya kesadaran masyarakat yang perlu ditingkatkan.

**Tabel 2.7**  
**Persentase Rumah Tangga (RT) yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)**

Uraian	2018	2019
Jml RT yang berPHBS	53.392	49.196
Jml RT yng disurvey	112.718	94.026
% RT yng ber PHBS	47,40%	51,20%

Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Desa Siaga merupakan gambaran masyarakat yang sadar, mau dan mampu untuk mencegah dan mengatasi berbagai ancaman terhadap kesehatan masyarakat seperti kurang gizi, penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, kejadian bencana, kecelakaan, dan



lain-lain dengan memanfaatkan potensi setempat, secara gotong-royong. Dikatakan Desa Siaga Aktif apabila Desa tersebut mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) lainnya yang membuka pelayanan setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveillance berbasis masyarakat yang meliputi gizi, penyakit, lingkungan dan perilaku. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan/ Puskesmas di Kabupaten Pasuruan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan kesehatan di Puskesmas secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan - kualitas pelayanan publik bidang kesehatan selanjutnya. Indeks Kepuasan Masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja unit pelayanan kesehatan. Rata-rata Indeks Kesehatan Masyarakat (IKM) di Puskesmas se Kabupaten Pasuruan mengalami kenaikan pada tahun 2019 yaitu sebesar 82,73, jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 82,08 dapat dikatakan mengalami kenaikan sebesar 0,65.

**Tabel 2.8**  
**Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas**

Uraian	2018	2019
Jumlah Nilai IKM	2709	2730
Jumlah Puskesmas	33	33
Rata-rata IKM Puskesmas	82,08	82,73

Akreditasi Puskesmas merupakan suatu pengakuan terhadap hasil dari proses penilaian eksternal, oleh Komisioner Akreditasi Fasilitas pelayanan Kesehatan Primer (FKTP) dan Fasilitas pelayanan Kesehatan lanjutan (FKTL) terhadap kualitas pelayanan kesehatan di

Puskesmas dan Rumah sakit yang sesuai dengan standar Mutu Pelayanan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

**Tabel 2.9**  
**Persentase Puskesmas dan RSUD yang terakreditasi Strata Madya**

Uraian	2018	2019
Terakreditasi minimal madya	30	32
Jumlah Puskesmas dan RSUD	34	34
<b>Persentase</b>	<b>88</b>	<b>94</b>

Sedangkan Capaian indikator untuk Nilai Akreditasi adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.10**  
**Capaian Indikator Bidang Kesehatan**

NO	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		Satuan	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019
	Nilai akreditasi RS	%	80	80	83,62
	IKM terhadap layanan RS	-	78,34	82,30	91,52

### **Nilai Akreditasi Rumah Sakit**

Indikator sini diukur berdasarkan dari Elemen Penilaian (EP) Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS). Pada tahun 2019 di RSUD Bangil telah dilakukan penilaian standar pelayanan Rumah Sakit oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dan berdasarkan hasil penilaian tersebut RSUD Bangil dinyatakan lulus dengan nilai 83,62 % (Lulus Paripurna), angka tersebut melebihi target EP sebesar 80 %.

### **IKM terhadap layanan RS**

Indeks Kepuasan Masyarakat dimaksudkan untuk mengetahui jumlah komulatif hasil penilaian kepuasan dari pasien atau keluarga pasien. Instrumen yang digunakan adalah Instrumen Baku yang ditetapkan oleh Kemenpan RB Nomor : 14 Tahun 2017 tentang :



Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dimana pada Tahun 2019 capaian IKM RSUD Bangil sebesar 91,52 %, pencapaian ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 82,30 % (melebihi target 9,22 %).

### 3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM

Urusan Penataan Ruang dan Sumber Daya Air di Kabupaten Pasuruan yang dilaksanakan oleh Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang dalam melaksanakan bidang pekerjaan umum dan tata ruang tahun 2019 sebagaimana Tabel berikut :

**Tabel 2.11**  
**Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**

NO	Indikator Kinerja	Kinerja 2019		
		Satuan	Target	Realisasi
	Indeks Ketahanan Air	%		77,68
	Persentase ketersediaan & pemenuhan air baku	%		52,37

#### Indeks ketahanan air

Indeks Ketahanan air merupakan nilai kemampuan untuk menjaga keberlanjutan dalam pemenuhan kebutuhan air baku, baik dalam jumlah yang mencukupi serta mutu yang dapat diterima. Pemenuhan kebutuhan air tersebut dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan kehidupan, kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan, dan perkembangan sosial-ekonomi; menjamin perlindungan atas pencemaran air dan bencana terkait air; serta melestarikan ekosistem dalam suasana damai dan kondisi politik yang stabil. Indeks ketahanan air diperoleh dari proporsi antara air



baku yang dibutuhkan dengan jumlah ketersediaan air baku yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Pada tahun 2019 indeks ketahanan air di Kabupaten Pasuruan adalah 77,68 % dan telah sesuai dengan target yang telah ditentukan

### **Persentase ketersediaan dan pemenuhan air baku**

Air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Berkembangnya Kabupaten Pasuruan yang di iringi penambahan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan air bersih menjadi meningkat, sedangkan sumber air bersih menjadi terdegradasi. Sumber air di wilayah Kabupaten Pasuruan di ambil dari mata air Umbulan dan sumber air permukaan yang berasal dari beberapa sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Pasuruan, yang terdiri dari 7 (tujuh) sungai yang bermuara di Selat Madura yaitu:

- a. Sungai Laweyan : bermuara di Desa Penunggul - Kecamatan Nguling
- b. Sungai Rejoso : bermuara di wilayah Kecamatan Rejoso
- c. Sungai Gembong : bermuara di wilayah Kota Pasuruan
- d. Sungai Welang : bermuara di Desa Pulokerto – Kecamatan Kraton
- e. Sungai Masangan : bermuara di Desa Raci – Kecamatan Bangil
- f. Sungai Kedung Larangan : bermuara di Desa Kali Larangan
- g. Sungai Petrung : bermuara di Kecamatan Kraton

Indikator kinerja persentase ketersediaan dan pemenuhan air baku di wilayah Kabupaten Pasuruan diperoleh dari persentase perbandingan sumber air baku dalam kondisi baik dengan jumlah sumber air baku keseluruhan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Tahun 2019 persentase ketersediaan dan pemenuhan air baku sebesar 52,37 % atau tercapai 98, 44% dari target yang ditentukan.



## **SUB-URUSAN PENATAAN RUANG**

Sub-Urusan Penataan Ruang pada Tahun 2019, berdasarkan peraturan perundangan terkait kelembagaan yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah (PD) yang salah satu tugas dan fungsi bidangnya adalah membidangi Sub-Urusan Penataan Ruang di Kabupaten Pasuruan, yakni: Dinas PUSumber Daya Air dan Tata Ruang (sebagai penanggung jawab utama) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan Sub-Urusan Penataan Ruang dinilai dengan indikator kinerja sebagaimana tabel 2.12

**Tabel 2.12**  
**Capaian Kinerja Sub-Urusan Penataan Ruang**

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1.	Terwujudnya ketaatan rencana tata ruang	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	%	55	55

Untuk mendukung Indikator Kinerja Utama ketaatan terhadap rencana tata ruang terdapat 3 (tiga) program utama yakni Program Perencanaan Tata Ruang, Program Pemanfaatan Ruang serta Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan yang diamanatkan oleh PP Nomor 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Khususnya program Perencanaan Tata Ruang dilaksanakan oleh Dinas PU, SDA dan Tata Ruang yang disupport oleh BAPPEDA terkait Kegiatan Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029. Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang telah sesuai dengan target yang ditentukan yakni 55,00 %



#### 4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2019 tergambar pada pencapaian indikator kinerja sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.13**  
**Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019
1	Tujuan : Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase capaian lingkungan permukiman yang layak huni	%	n/a	71,46
2.	Sasaran : Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat	a. Persentase ketersediaan sarana prasarana dasar permukiman	%	n/a	72.46
		b. Persentase rumah layak huni	%	26,71	28.11
		c. Persentase Bangunan Gedung yang terstandarisasi SLF	%	n/a	0.002

Penjelasan dari masing – masing indikator adalah sebagai berikut :

Indikator tujuan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Persentase capaian lingkungan permukiman yang layak huni. Target indikator 2019 sebesar 76,05% dan realisasi sebesar 71,46% dengan capaian 93,96%. Indikator tujuan ini di dukung dari 3 indikator sasaran yaitu :

- **Persentase ketersediaan sarana prasarana dasar permukiman**

Target tahun 2019 indikator ini sebesar 77,18% dan realisasi sebesar 72,46% dengan capaian 93,88%. Indikator ini sangat dipengaruhi oleh akses air bersih dan akses sanitasi. Jumlah akses air bersih sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 377.582KK. Sedangkan jumlah akses sanitasi sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 369.110 KK.



- **Persentase Rumah layak huni**

Target tahun 2019 indikator ini sebesar 27,12% dan realisasi sebesar 28,11% dengan capaian 103,65%. Indikator ini diperoleh dari jumlah rumah swadaya yang direhab dibagi jumlah keseluruhan rumah swadaya dikalikan 100%. Jumlah rumah swadaya yang direhab pada tahun 2019 sebanyak 2.692 unit. Sedangkan jumlah keseluruhan rumah swadaya adalah sebanyak 42.634 Unit.

- **Persentase Bangunan Gedung yang terstandarisasi SLF (Sertifikat Laik Fungsi)**

Target tahun 2019 indikator ini sebesar 0,003% dan realisasi sebesar 0,002% dengan capaian 66,67%. Indikator ini diperoleh dari jumlah bangunan Gedung ber SLF dibagi jumlah bangunan gedung dikalikan 100%. Jumlah bangunan Gedung ber SLF sampai dengan tahun 2019 sebanyak 10 unit. Sedangkan jumlah bangunan Gedung sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 504.663 unit.

## **5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

Ketenteraman masyarakat menggambarkan kondisi adanya sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan ketaatan terhadap peraturan/norma sosial dan hukum. Masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun. Penyelenggaraan urusan trantib dan limas diampu oleh 2 (dua) OPD yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan bidang Trantibum dan Linmas sebagaimana tabel dibawah ini :





**Tabel 2.14**  
**Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019
	Tujuan : Terwujudnya tatanan masyarakat yang tertib dan tenteram serta perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Palanggaran Perda	%	n/a	80,19
1.	Sasaran : Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda	Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan	%	90,39	91,24
2.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	%	100	100

**Indikator Tujuan Persentase Pelanggaran Perda**

Indikator ini diukur dengan formula perhitungan jumlah pelanggaran perda Tahun 2019 dibanding dengan jumlah pelanggaran perda Tahun 2018. Jumlah pelanggaran perda Tahun 2019 sebanyak 1.085 sedangkan jumlah pelanggaran Tahun 2018 sebanyak 1.353. Untuk Persentase Pelanggaran Perda pada Tahun 2019 mencapai 80,19 %, capaian ini melampaui target yang ditentukan yaitu sebesar 75 %

**Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan**

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula perhitungan jumlah kasus pelanggaran Perda yang diselesaikan, dibandingkan dengan jumlah penindakan pelanggaran Perda.

URAIAN	2018	2019
Jumlah Kasus Pelanggaran Perda yang diselesaikan	1.223	990
Jumlah Penindakan pelanggaran Perda	1.353	1.085
Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan (%)	90,39	91,24



Jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan tahun 2019 sebanyak 990 kasus dibagi dengan jumlah penindakan pelanggaran Perda sebanyak 1.085 kasus. Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan tahun 2019 sebesar 91,24% sedangkan target yang ditetapkan dalam kinerja sebesar 91% sehingga tingkat pencapaiannya 100,27%.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yang sebesar 90,39% tampak mengalami kenaikan sebesar 0,85%. Dalam menekan jenis pelanggaran tahun 2019 dikatakan berhasil karena kasus-kasus pelanggaran Perda sudah mengalami penurunan. Tetapi penurunan tersebut masih belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu kurang 5,19% itu dikarenakan :

- a. Pelanggaran tidak bisa diprediksi.
  - b. Banyaknya PHK sehingga masyarakat cenderung melanggar Perda.
  - c. Pencabutan Perda perijinan yang berakibat tindakan tidak bisa maksimal.
  - d. Kurangnya ketaatan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.
- Adapun langkah yang ditempuh dalam pelanggaran perda yaitu melakukan penindakan dengan tegas berupa Surat tegoran, panggilan dinas, penyetopan, penyelidikan dan penyidikan

#### **Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan.**

Pengukuran indikator kinerja persentase gangguan trantibum yang diselesaikan dilakukan dengan cara membandingkan jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan dengan jumlah gangguan trantibum yang ditangani. Jumlah gangguan trantibum yang ditangani pengukurannya adalah jumlah gangguan trantibun yang ditangani terhadap jumlah gangguan trantibum, data tersebut diambil dari kriteria dari jenis gangguan trantibum antara lain : unjuk rasa, Gepeng, anak jalanan dan anak punk.



URAIAN	2018	2019
Jumlah gangguan trantibum yang ditangani	161	178
Jumlah kasus gangguan trantibum diselesaikan	161	178
Jumlah Seluruh Kasus gangguan trantibum	161	178
Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan (%)	100	100

Berdasarkan tabel diatas persentase gangguan trantibum yang diselesaikan adalah Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sebanyak 178 kasus dibagi jumlah gangguan trantibum yang ditangani sebanyak 178 kasus sehingga tingkat pencapaian persentase gangguan trantibum yang diselesaikan tahun 2019 sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 dengan jumlah gangguan trantibum sebanyak 161 kasus sehingga mengalami peningkatan terhadap gangguan trantibum sebanyak 17 kasus tetapi capaiannya sama yaitu sebesar 100%.

**Tabel 2.15**  
**Capaian Indikator Ketentraman dan Ketertiban Umum serta**  
**Perlindungan Masyarakat**

Indikator Kinerja	Kinerja			
	Satuan	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019
Indeks Resiko Bencana	Poin	214	212	179,39
Persentase desa tangguh bencana berkategori utama	%	6,25	7,5	7,5
Persentase korban bencana tertangani	%	100	100	100
Persentase pemulihan sarana dan prasarana akibat dampak bencana	%	100	100	100



### **Indeks resiko bencana**

Penilaian indeks resiko bencana telah menggunakan parameter-parameter bahaya, kerentanan dan kapasitas sebagai penghitungan resiko bencana, dimana Kabupaten Pasuruan merupakan wilayah yang mempunyai indeks resiko bencana tertinggi nomor 2 di Propinsi Jawa Timur. Perhitungan indeks rawan bencana tersebut diperoleh dari dampak korban jiwa (meninggal dan luka-luka) dan kerusakan (rumah dan fasilitas/infrastruktur) serta kepadatan penduduk. Indeks Resiko Bencana Multi Ancaman Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2018 sebesar 214 dengan kelas resiko tinggi, sedangkan Indeks Resiko Bencana pada Tahun 2019 turun menjadi 179,39 namun masih dalam kategori level ancaman kelas resiko tinggi, sehingga perlu dilakukan perencanaan dan pelaksanaan pengurangan resiko bencana. Jenis bencana yang sering terjadi di Kabupaten Pasuruan antara lain bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, rawan air bersih dan kebakaran hutan.

### **Persentase Desa Tangguh Bencana Berkategori Utama**

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Ketangguhan menghadapi bencana ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan resiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dengan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Masyarakat di



dalam desa tangguh bencana aktif terlibat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Jumlah desa tangguh bencana berkategori utama sampai tahun 2018 di Kabupaten Pasuruan sejumlah 5 Desa yaitu Desa Kedawungkulon Kecamatan Grati, Kelurahan Ledug Kecamatan Prigen, Desa Patuguran Kecamatan Rejoso, Desa Tambakan Kecamatan Bangil, Desa Sukorejo Kecamatan Pohjentrek dan pada tahun 2019 bertambah 1 desa tangguh bencana berkategori utama yaitu Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton.

### **Persentase Korban Bencana Tertangani**

Pada tahun 2019 Prosentase korban bencana tertangani sudah 100% sama dengan tahun 2018. Dengan jumlah korban bencana yang tertangani dan jumlah korban yang terdampak sama yaitu pada tahun 2018 sebesar 230.500 jiwa dan tahun 2019 sebesar 197.161 jiwa. Upaya penanganan korban bencana banjir yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kab. Pasuruan meliputi Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Pasuruan melakukan identifikasi ke lokasi kejadian bersama Muspika, SatPol PP, Dinas Pekerjaan Umum SDA dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, Aparat Pemerintah Desa/ Kelurahan terdampak beserta Relawan. Dan Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Pasuruan bersama dengan Pol PP dan Relawan melakukan Pertolongan Penyelamatan dan Evakuasi (PPE) kepada korban yang terdampak banjir, maupun bencana lainnya. Penyaluran bantuan tanggap darurat bencana kekeringan berupa air bersih bagi masyarakat terdampak.



## **Persentase Pemulihan Sarana Dan Prasarana Akibat Dampak Bencana**

Pada tahun 2019 persentase capaian pemulihan sarana dan prasarana akibat dampak bencana sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2018, dimana Jumlah sarpras yg dipulihkan (Rehab/rekon) sama dengan jumlah sarpras yg terdampak bencana yaitu pada tahun 2018 sebesar 215 unit sarpras dan tahun 2019 sebesar 60 unit sarpras. Sampai saat ini BPBD Kabupaten Pasuruan bersama dengan Dinas Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan serta Dinas PU Bina Marga Kabupaten melakukan assesment untuk menghitung kerusakan Sarana dan prasarana umum yang terdampak bencana dan direncanakan untuk sarana prasarana umum yang rusak direncanakan akan dilakukan penanganan. Persentase pemulihan sarana dan prasarana akibat bencana yang terjadi di Kabupaten Pasuruan dilakukan dengan beberapa penanganan yaitu : Pemasangan bronjong melalui BTT, pemasangan *sandbag* di tanggul yang jebol, dan normalisasi sungai.

### **6. Bidang Sosial**

Berikut disampaikan tabel target dan capaian indikator untuk Bidang Sosial yang meliputi Persentase PMKS dan Penanganan PMKS.

**Tabel 2.16**  
**Capaian Indikator Persentase PMKS dan Persentase Penanganan PMKS Tahun 2019**

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja 2019		
		Satuan	Target	Realisasi
1.	Persentase PMKS	%		6,11
2.	Persentase penanganan PMKS	%	99,91	99,93



Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, didefinisikan sebagai perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Jumlah PMKS di Kabupaten Pasuruan tahun 2019 sedikit ada penambahan, namun secara proporsional terhadap jumlah penduduk mengalami penurunan, sebagaimana tabel III.1.06-2.

**Tabel 2.17**  
**Persentase PMKS Kabupaten Pasuruan**

Uraian	2018	2019
Jumlah PMKS (orang)	109.903	114.741
Jumlah Penduduk (orang)	1.779.045	1.876.881
% PMKS	6,18	6,11

Sumber : Dinas Sosial

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial tahun 2019 sebesar 111.511 orang atau 6,11 % dari jumlah penduduk sebesar 1.876.881 orang. Pencapaian Tahun 2019 mengalami penurunan 0,07 % bila dibandingkan tahun 2018 yang mencapai presentase 6,18 % (109.903 orang). Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menurunkan PMKS adalah dengan melakukan penanganan PMKS. Indikator penanganan PMKS merupakan perbandingan jumlah PMKS yang ditangani dengan jumlah PMKS yang ada dalam waktu satu tahun. Realisasi jumlah penanganan PMKS untuk tahun 2019 sebanyak 114.659 orang atau 99,93 % dari 114.741 orang penyandang PMKS



**Tabel 2.18**  
**Persentase Penanganan PMKS Kabupaten Pasuruan**

Uraian	2018	2019
Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan	109.901	114.659
Jumlah PMKS yang ada	109.903	114.741
% Penanganan PMKS	99,99 %	99.93 %

## **B. TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

### **1. Bidang Tenaga Kerja**

Pembangunan bidang ketenagakerjaan diarahkan melalui peningkatan kesempatan lapangan kerja baru yang berpengaruh terhadap penurunan pengangguran terbuka. Ketenagakerjaan mempunyai korelasi positif terhadap suksesnya proses pembangunan, dengan tenaga kerja yang berkualitas suatu daerah akan mampu bersaing dengan daerah yang lebih maju.

Kinerja Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan bidang urusan tenaga kerja tahun 2019 sebagaimana tabel 2.19

**Tabel 2.19**  
**Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja**

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019
1	Tujuan : Menurunnya angka pengangguran terbuka	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,11	5,42
2	Sasaran : Meningkatnya ketrampilan pencari kerja, penempatan dan perluasan kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	70,03	70,05
		Persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi	%	95,83	68,75

### **Tingkat pengangguran terbuka**

Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/ pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Tahun 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,42% turun sebesar 0,69 dari tahun 2018 (6,11%).





### **Persentase pencari kerja yang ditempatkan**

Indikator ini mempunyai pengertian pencari kerja yang terdaftar dan tercatat yang diterima bekerja oleh pemberi kerja.

Angkatan kerja yang mendapatkan pekerjaan adalah para calon tenaga kerja yang bekerja dalam institusi pemerintah maupun perusahaan, bekerja di luar negeri sebagai TKI/TKW maupun melakukan wirausaha mandiri. Keberhasilan penempatan tenaga kerja merupakan wujud keberhasilan suatu daerah dalam menanggulangi pengangguran. Tahun 2019 persentase pencari kerja yang ditempatkan sebesar 70,05 % mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 0,02 dari 70,03%.

### **Persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi**

Secara berkala pemerintah daerah mengadakan pelatihan bagi tenaga kerja dengan jaminan kualitas dalam bentuk uji kompetensi bagi peserta. Tahun 2019 tercatat sebanyak 68,75% dari peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi. Sedangkan tahun 2018 tercatat 95,83% yang lulus uji kompetensi. Penurunan jumlah peserta lulus uji kompetensi dimungkinkan karena latar belakang pendidikan peserta adalah SMU bukan SMK. Rincian jumlah peserta pelatihan sebagai berikut.

<b>Tahun</b>	<b>Jenis Pelatihan</b>	<b>Jumlah Peserta</b>	<b>Jumlah Lulus Uji Kompetensi</b>	<b>% Lulus Uji Kompetensi</b>
2018	Las	16	15	
	Teknik mekanik	16	15	
	Listrik	16	16	
	<b>Jumlah</b>	<b>48</b>	<b>46</b>	<b>95,83</b>
2019	Las	16	12	
	Teknik mekanik	16	10	
	Listrik	16	11	
	<b>Jumlah</b>	<b>48</b>	<b>33</b>	<b>68,75</b>



Dengan adanya sertifikat kompetensi maka tenaga kerja memiliki daya saing dan mempunyai kesempatan lebih besar mengisi lowongan kerja yang tersedia.

## **2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Kinerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.20

**Tabel 2.20**  
**Capaian Kinerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan**  
**(Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)**

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019
	Tujuan : Meningkatkan kesetaraan masyarakat	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	%	90,41	90,68
1.	Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase Kekerasan Perempuan dan Anak	%	0,008 7	0,006 7
		Persentase Anggaran yang Responsif Gender	%	n/a	3,16

### **IPG (Indeks Pembangunan Gender)**

IPG tahun 2019 mencapai 90,68 meningkat 0,27 poin dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa kesetaraan gender di Kabupaten Pasuruan semakin meningkat.

### **Persentase Kekerasan Perempuan dan Anak**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi isu penting dalam beberapa dekade terakhir ini, dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya kasus KDRT di dunia dan buruknya efek yang ditimbulkan terhadap perempuan dan anak-anak. Menurut laporan World Health Organization (WHO), antara 40 hingga 70 persen

perempuan. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jenis kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, meliputi :

- Kekerasan fisik; adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- Kekerasan seksual meliputi : (I) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (II) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- Penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Jumlah kekerasan (KDRT) yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga.

Dari data dapat dilihat bahwa persentase kekerasan perempuan dan anak pada tahun 2019 sebesar 0,0067%.

**Tabel 2.21**  
**Jumlah Penanganan Kasus yang ditangani**

Uraian	2018	2019
Jumlah Kekerasan (KDRT)	39 kasus	55 kasus
Jumlah Perempuan & Anak	448.275 jiwa	820.893 jiwa
Persentase Kekerasan Perempuan dan Anak	0,0087 %	0,0067 %

Data tersebut menunjukkan adanya penurunan persentase kasus kekerasan dalam rumah tangga sebesar 0,002 % bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 0,0087 %. Capaian tersebut juga telah memenuhi target yang ditentukan (0,0065 %). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkat keberanian, kesadaran dan peran aktif masyarakat untuk melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan keberhasilan program inovasi SAKERA JEMPOL (Sadari Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola). Dengan semakin banyak kasus yang terungkap maka semakin mudah menentukan strategi pencegahan dan penanganan kasus KDRT.

#### **Persentase Anggaran yang Responsif Gender**

Jumlah anggaran yang responsif gender pada tahun 2019 sebesar Rp.1.201.692.208.820,- atau 3,16 % dari jumlah anggaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan sudah berkomitmen dalam mendukung percepatan pengarusutamaan gender.

**Tabel 2.22**  
**Jumlah Anggaran Responsif Gender**

Uraian / Data	2018	2019
Jumlah ARG	n/a	Rp. 37.996.522.084,-
Jumlah Anggaran	n/a	Rp. 1.201.692.208.820,-
Persentase anggaran yang reponsif gender	n/a	3,16 %



### 3. Bidang Pangan

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Ketahanan Pangan adalah Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan urusan Ketahanan Pangan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana tabel 2.23.

**Tabel 2.23**  
**Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah**  
**Bidang Pangan**

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019
1.	Tujuan : Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	indeks	n/a	69,38
2	Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Rasio Ketersediaan Pangan	Rasio	2,52	2,53

Adapun capaian masing-masing indikator kinerja utama pada urusan Ketahanan Pangan tahun 2019 dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi suatu negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan.

Pada tahun 2019 capaian Indeks Ketahanan Pangan mencapai 69,38 indeks. Hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut telah melampaui dari target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Tahun 2018 - 2023 sebesar 67 indeks atau sebesar 103,55%. Indeks Ketahanan Pangan dihitung dengan menggunakan penjumlahan bobot kali nilai standar 6 indikator, yaitu : 1. rasio luas baju lahan sawah terhadap luas wilayah desa; 2. rasio jumlah sarpras penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga; 3. rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; 4. desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara; 5. rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; 6. rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

## **2. Rasio Ketersediaan Pangan**

Ketersediaan bahan pangan adalah tersedianya bahan pangan yang bersumber dari kemampuan suatu daerah memproduksi bahan pangan dan menjaga kestabilan stok pangan baik yang berada di gudang Bulog, lumbung pangan, lembaga pembeli gabah, dan Koperasi Unit Desa serta alur distribusi bahan pangan lainnya tanpa mempertimbangkan jumlah dan jenis kebutuhan bahan pangan yang dikonsumsi oleh penduduk.

Realisasi Rasio Ketersediaan Pangan pada tahun 2019 mencapai 2,53 rasio meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu 2,52 rasio. Hal ini menunjukkan bahwa capaian tahun 2019 telah melampaui Target sebesar 2,5 atau sebesar 101,20% dari target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Tahun 2018 - 2023 dengan menggunakan formula perhitungan data rata - rata ketersediaan



pangan utama per tahun (kg) dibagi rata-rata kebutuhan pangan utama per tahun (kg).

Penyediaan pangan yang cukup dan berkualitas merupakan salah satu tujuan utama di dalam pelaksanaan ketahanan pangan daerah. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan bahan pangan domestik khususnya pangan utama sumber karbohidrat, protein nabati dan hewani untuk menunjang kebutuhan gizi masyarakat.

#### 4. Bidang Pertanahan

Pengadministrasian pertanahan menjadi penting karena dapat mengantisipasi timbulnya kasus/ konflik pertanahan. Pada akhir tahun 2018 capaian indikator kinerja mencapai 100 % dan tetap sama di tahun 2019.

**Tabel 2.24**  
**Persentase Pengelolaan Administrasi Pertanahan**

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kinerja 2018	Kinerja 2019	
				Target	Realisasi
1.	Persentase pengelolaan administrasi pertanahan sesuai ketentuan yg berlaku	%	100	100	100

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan pertanahan yang diampu Dinas PU Sumberdaya Air dan Tata Ruang menggunakan indikator “Persentase pengelolaan administrasi pertanahan sesuai ketentuan yg berlaku” yang merupakan indikator kinerja hasil dari Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan & Pemanfaatan Tanah. Indikator ‘persentase pengelolaan administrasi pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku’ telah mencapai 100%, yang berarti pembinaan yang dilakukan telah

efektif mencapai target yang diharapkan. Pembinaan yang dilakukan antara lain:

- Penyaduran Buku C desa untuk membantu masyarakat apabila akan memproses sertifikat tanah.
- Peningkatan pemahaman pelaksana PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) tentang proses pembuatan akta tanah di tingkat desa dan kecamatan.

## 5. Bidang Lingkungan Hidup

Capaian Kinerja Bidang Lingkungan Hidup tahun 2019 sebagaimana dimuat dalam Tabel 2.25

**Tabel 2.25**  
**Capaian Kinerja Bidang Lingkungan Hidup**

No	TUJUAN/SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019
1.	Tujuan: Meningkatkan kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	57,10	57,38
2.	Sasaran: 1.Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	50,00	50,00
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	82,25	78,83
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	43,57	43,89
	2.Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	Nilai TPA (Program Adipura)	Poin	-	78



### **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

Penyusunan Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menggambarkan kondisi lingkungan hidup Kabupaten Pasuruan terkini bertambah baik atau sebaliknya, tekanan terhadap lingkungan akibat perubahan media lingkungan (air, udara dan lahan/hutan) dari kegiatan manusia dan respon atau upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Tujuan dari penyusunan Laporan IKLH adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan tentang kondisi lingkungan di Kabupaten Pasuruan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat tentang pencapaian target program-program Pemerintah Kabupaten Pasuruan di bidang urusan Lingkungan Hidup. Hasil yang dicapai berupa tersedianya data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tahun 2019 sebesar 57,38 dengan kategori sangat kurang (Sumber: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2014, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah indeks pencemaran air, indeks pencemaran udara dan indeks tutupan hutan. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,28 dari Tahun 2018.

### **Indeks Kualitas Air (IKA)**

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj).



Air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu air sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian namun di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa. Sehingga dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air juga harus bersinergi dengan program dan kegiatan unit internal Pemerintah Kabupaten Pasuruan serta pelaku usaha. Pada tahun 2019 realisasi indikator kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Pasuruan masih sama dengan realisasi pada tahun 2018 yakni 50,00 dengan capaian kinerja sebesar 91,19 % dari target yang ditentukan.

#### **Indeks Kualitas Udara (IKU)**

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di wilayah Kabupaten Pasuruan. Indeks kualitas udara diperoleh dari pengolahan data hasil pemantauan kualitas udara tahunan. Pada tahun 2019 nilai untuk Indikator Kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Pasuruan adalah 78,83 poin (95,84 %) dengan target capaian adalah sebesar 82,25 poin dan mengalami penurunan dari realisasi tahun 2018 yakni 82,25 poin. Penurunan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) tersebut bisa disebabkan adanya kenaikan jumlah kebutuhan akan transportasi dan energi yang semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk.



Peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energi akan meningkatkan pencemaran udara yang akan berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan.

### **Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)**

Indeks Kualitas Tutupan Lahan sangat dipengaruhi oleh luas tutupan lahan. Luas tutupan lahan total adalah dengan menjumlahkan luasan tutupan hutan, belukar dan semak belukar, hutan kota, kebun raya, taman kota dan RTH kabupaten. Target IKTL Tahun 2019 sebesar 43,62 poin dan realisasi sebesar 43,89 poin dengan capaian sebesar 100,62%. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 (43,57 poin) mengalami peningkatan sebesar 0,32 poin.

### **Nilai TPA (Program Adipura)**

Sebagai upaya mendukung penilaian Program Adipura dimana salah satunya adalah Nilai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) maka Pemerintah Kabupaten Pasuruan berupaya dengan beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

- a. Penyediaan Prasarana & Sarana Pengelolaan Persampahan,
- b. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarpras Persampahan,
- c. Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan
- d. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, dan
- e. Penyediaan/ Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih (Pembangunan/ Penyediaan TPA)

Pada tahun 2019 realisasi Nilai TPA Kabupaten Pasuruan adalah 78 poin melebihi target yang telah ditentukan yakni 77 poin maupun standar nilai program adipura sebesar 76 poin sehingga pada tahun 2019 Kabupaten Pasuruan memperoleh Penghargaan Adipura untuk kesekian kalinya. Selain kegiatan diatas ada pula Program SDSB di Kabupaten Pasuruan yang digulirkan sejak tahun 2018 melalui Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan suatu kebijakan



terobosan baru untuk mengatasi permasalahan sampah, oleh karena itu agar tujuan Kabupaten Pasuruan menjadi Kabupaten Sehat, bersih dan indah oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2018 – 2023 diprioritaskan menjadi program unggulan dengan jargon SDSB (Satu Desa Satu Bank Sampah). Kebijakan Strategis Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam pengelolaan sampah melalui Jargon SDSB ini dimaksudkan sbb :

- a. Agar setiap desa/kelurahan segera melakukan program pengelolaan sampah;
- b. Sampah dapat berkurang dan terpilah dari sumbernya;
- c. Mengubah mindset (pola pikir) masyarakat peduli terhadap sampah;
- d. Menambah pendapatan masyarakat dan menjadi sumber daya.

Sedangkan Tujuan Program Prioritas Unggulan SDSB adalah untuk meningkatkan tata kelola sampah sehingga lingkungan menjadi bersih, sehat dan nyaman untuk mendukung Program Kabupaten Pasuruan Sehat dan bebas sampah tahun 2025.

#### **6. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Tujuan utama perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat serta menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan. Pasal 1 pada poin 1 menyatakan bahwa urusan kependudukan dan catatan sipil terfokus pada administrasi kependudukan yang meliputi rangkaian penerbitan dokumen serta data kependudukan, yang mencakup

pendaftaran penduduk, pencatatan penduduk, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Pencatatan merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam rangka menyelenggarakan administrasi kependudukan berupa pelayanan pemerintah yang menyangkut kedudukan hukum seseorang di mana pada suatu saat tertentu dapat digunakan sebagai bukti otentik bagi yang bersangkutan maupun pihak ketiga. Pencatatan di bidang kependudukan tersebut meliputi peristiwa pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengesahan anak, pengakuan anak, dan pengangkatan anak yang merupakan bagian regulasi publik

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan kependudukan dan pencatatan sipil menggunakan indikator kinerja dengan capaian sebagaimana tabel 2.26

**Tabel 2.26**  
**Indikator Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019
	<b>Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	85,78	85,97
1	Meningkatnya Kepemilikan KTP el dan KK	Prosentase Penduduk Wajib KTP yang memiliki E-KTP	%	93,08	93,09
		Prosentase Penduduk Wajib KTP yang memiliki KK	%	98,05	98,05

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019
2	Meningkatnya kepemilikan akte kelahiran, akte perkawinan dan akte kematian	Prosentase Kepemilikan Kutipan Akte Kelahiran	%	69,38	72
		Persentase penerbitan Akte perkawinan	%	100	100
		Persentase penerbitan Akte kematian	%	100	100

### **IKM Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil**

IKM tahun 2019 mencapai 85,97 meningkat dibandingkan tahun 2018 dan masuk dalam kategori 'baik'. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semakin meningkat.

#### **Prosentase Penduduk Wajib KTP yang Memiliki E-KTP**

Indikator Kinerja Prosentase Penduduk Wajib KTP yang Memiliki E-KTP adalah salah satu dari 3 (tiga) Indikator Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2019-2025. Untuk mendukung Indikator Dinas Kependudukan dan Catatan sipil yang pertama ini adalah Jumlah kepemilikan KTP dan Jumlah penduduk wajib ber KTP.

**Tabel 2.27**  
**Jumlah Penduduk yang ber KTP**

Uraian	2018	2019
Jumlah penduduk ber KTP	1.319.174	1.314.885
Jumlah penduduk Wajib ber KTP	1.417.322	1.447.926
Kepemilikan KTP (%)	93,08	93,09



Jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan pada tahun 2019 berdasarkan data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1.876.881 orang. Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP pada tahun 2019 mencapai 1.314.883 orang atau 93,09 % dari jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 1.447.926 orang. Persentase ini sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 90,11%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (93,08 %), maka terjadi peningkatan sebesar 0,1 %. Hal ini disebabkan oleh :

- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya KTP sebagai identitas mereka;
- 2) Meningkatnya wajib KTP;
- 3) Meningkatnya usia pemula kepemilikan KTP (17 tahun);
- 4) Meningkatkan dan mendekatkan pelayanan di bidang kependudukan sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan dalam pengurusan KTP. Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan adalah program KENDUREN MAS, PAK LADI (Pelayanan Administrasi Kependudukan Langsung Jadi), PAK SAMIN (Pelayanan Administrasi Kependudukan Sabtu Minggu) dan operasional mobil unit layanan keliling sebanyak 2 (dua) unit tujuan dari penyediaan mobil unit layanan keliling adalah untuk mendekatkan pelayanan kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat melalui system jemput bola, sehingga memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. Dengan adanya program-program inovasi tersebut dapat meningkatkan jumlah kepemilikan KTP serta kepemilikan akta kelahiran

### **Prosentase Penduduk Wajib KTP yang Memiliki KK**

Indikator Kinerja kedua Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Prosentase Penduduk Wajib KTP yang Memiliki KK yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2019-2025.



Untuk mendukung Indikator yang kedua ini adalah Jumlah penduduk yang memiliki KK dan Jumlah penduduk wajib ber KK.

**Tabel 2.28**  
**Jumlah Penduduk yang ber KK**

Uraian	2018	2019
Jumlah penduduk ber-KK	745.851	765.472
Jumlah penduduk wajib ber-KK	759.685	780.674
Persentase Penduduk Wajib KK yang memiliki KK	98,05 %	98,05 %

Dalam urusan kependudukan, kepemilikan KK bagi penduduk yang sudah berkeluarga merupakan salah satu kewajiban masyarakat. Jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan pada tahun 2019 berdasarkan data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai 1.876.881 jiwa. Jumlah penduduk yang telah memiliki KK pada tahun 2019 mencapai 765.472 penduduk atau 98,05% dari jumlah penduduk wajib KK (780.674 penduduk). Persentase ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 96,45%. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat terutama yang baru menikah untuk mengurus KK. Jika dibandingkan dengan jumlah keluarga yang memiliki KK tahun 2018 yang mencapai 745.851 penduduk atau 98,05 % dari jumlah penduduk wajib KK (759.685 penduduk), maka tidak ada peningkatan atau penurunan, namun demikian dengan melihat pertambahan jumlah penduduk pencapaian itu telah melebihi target sebesar 1,60 %. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya KK sebagai dokumen kependudukan yang harus mereka miliki terutama bagi kepala keluarga baru dan juga dikarenakan kebutuhan keluarga yang membutuhkan fasilitas layanan BPJS.





### **Prosentase Kepemilikan Kutipan Akte Kelahiran**

Indikator Kinerja ketiga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2019-2025 adalah Prosentase Penduduk Kepemilikan Kutipan Akte Kelahiran. Untuk mendukung Indikator yang ketiga ini adalah Jumlah penduduk yang memiliki KK dan Jumlah penduduk wajib ber KK, bisa dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.29**  
**Jumlah Penduduk yang ber Akta Kelahiran**

<b>Uraian</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Jumlah Penduduk ber-akta kelahiran	1.272.892	1.314.244
Jumlah Penduduk	1.834.529	1.876.881
Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk	694	720

Jumlah kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk dihitung dengan cara membandingkan jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran dengan jumlah penduduk dan dikalikan 1.000. Kepemilikan akta kelahiran tahun 2019 mencapai 720 per 1000 penduduk. Jika dibandingkan dengan kepemilikan akta kelahiran tahun 2018 sebanyak 694 per 1000 penduduk, maka terjadi peningkatan sebanyak 26 orang per 1000 penduduk. Peningkatan capaian kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Pasuruan ini dikarenakan Kesadaran masyarakat yang semakin meningkat akan pentingnya kepemilikan Akta Kelahiran serta adanya program yang terintegrasi antara Dinas Kependudukan dan Fasilitas pelayanan Kesehatan serta adanya kebijakan satu paket untuk kepengurusan Akte dan Kartu Keluarga secara bersama-sama.



### **Persentase penerbitan Akte perkawinan**

Penerbitan akte perkawinan (nonmuslim) berdasarkan permohonan yang masuk telah mencapai 100% baik di tahun 2018 maupun 2019.

### **Persentase penerbitan Akte kematian**

Penerbitan akte kematian berdasarkan permohonan yang masuk telah mencapai 100% baik di tahun 2018 maupun 2019.

## **7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang memungkinkan masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial dalam upaya memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pada umumnya pemberdayaan masyarakat mencakup inklusi dan partisipasi; akses pada informasi; kapasitas organisasi lokal; dan profesionalitas pelaku pemberdayaan. Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019 sebagai berikut.

**Tabel 2.30**  
**Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019
	Tujuan: Meningkatnya kemandirian desa	Prosentase Desa Mandiri	%	n/a	0,59
	Sasaran :				
1	Mengembangkan potensi desa	Prosentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDES) mandiri	%	n/a	10,4 3
		Prosentase Kelembagaan Masyarakat Desa (LPM) yang Aktif	%	n/a	10,8 5
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosentase Pemerintahan Desa yang berkualitas	%	n/a	14,6 3

### **Persentase Desa Mandiri**

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun



bahwa yang dimaksud dengan Desa Mandiri atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan social, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Pada Kabupaten Pasuruan untuk jumlah Desa Mandiri adalah sebanyak dua (2) desa dari tiga ratus empat puluh satu (341) desa di Kabupaten Pasuruan. Capaian Kinerja untuk Prosentase Desa Mandiri untuk Tahun 2019 sebesar 0,59 %, pencaian ini sudah melebihi dari target yang telah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentukan yaitu 0,29 % ini di karenakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara optimal melakukan fasilitasi dan pembinaan terhadap Desa secara optimal melalui program dan kegiatan yang sudah menjadi tugas pokok fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016.

### **Prosentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDES) Mandiri**

Indikator dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang kedua adalah Prosentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDES) Mandiri. Saat ini jumlah BUMDes yang sudah terbentuk sebanyak 163 unit atau sebanyak 47% dari 341 Desa yang ada di Kabupaten Pasuruan. Guna mendukung indikator ini maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan upaya melalui kegiatan Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan BUMDesa / BUMDesa Bersama Kegiatan ini telah dilaksanakan selama 3 hari yaitu hari Senin sampai dengan Rabu tanggal 30 Juli s/d 1 Agustus 2019 bertempat di Hotel Tretes Raya dan dihadiri oleh 24 unit BUMDes pemilihan dari 24 kecamatan yang masing masing BUMDesa diwakili oleh tiga (3) orang pengurus. Dari kegiatan ini diharapkan dapat



meningkatkan peranan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa serta meningkatkan perekonomian desa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.

### **Prosentase Kelembagaan Masyarakat Desa (LPM) yang Aktif**

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah kelembagaan masyarakat desa (LPM) yang aktif dengan jumlah kelembagaan masyarakat desa (LPM) seluruhnya Tahun 2019. Pada tahun 2019 jumlah kelembagaan masyarakat desa (LPM) yang aktif sebanyak 40 unit.dari 341 unit LPM. Capaian untuk indikator kinerja adalah 10,85, capaian tersebut melebihi dari target yang ditentukan yaitu sebesar 10%.

### **Prosentase Pemerintah Desa yang berkualitas**

Indikator kinerja yang ketiga dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Prosentase Pemerintah Desa Yang Berkualitas. Prosentase capaian kinerja pada indikator ini pada tahun 2019 sebesar 208,59 % atau melebihi target yang ditentukan, Capaian kinerja ini dihitung dari jumlah desa yang memiliki kinerja Pemerintahan desa yang baik yaitu sebanyak 6 Desa dibanding dengan jumlah desa maju sebesar 41 desa. Guna mendukung indikator ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan beberapa upaya yaitu memberikan pembinaan terhadap lembaga pemerintahan desa dan perangkat serta aparatur pemerintahan desa secara optimal dan berkelanjutan.

## **8. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.31

**Tabel 2.31**  
**Capaian Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

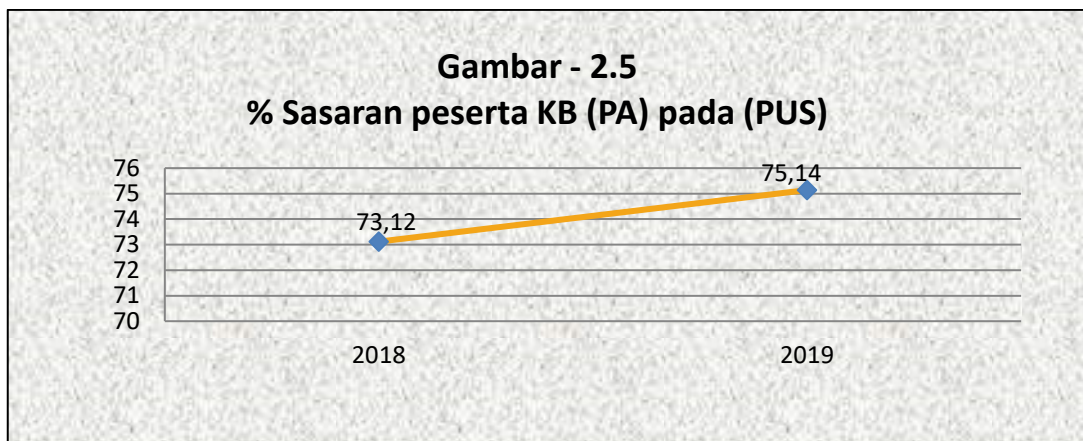
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019
1.	Sasaran 1 : Meningkatnya kesertaan ber-KB	Persentase sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif (PA)	%	73,12	75,14
2.	Sasaran 2 : Meningkatnya keluarga sejahtera yang religius dan berkualitas	Persentase tahapan Keluarga Pra-S dan KS-I	%	40,11	39,72

**Persentase Sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif (PA).**

Pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tingkat keberhasilannya dapat dilihat dari indikator persentase sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif (PA).

Uraian / Data	2018	2019
Jumlah peserta KB aktif (PA)	254.126 pa	273.503 pa
Jumlah pasangan usia subur (PUS)	347.570 pus	363.982 pus
Persentase sasaran pasangan usia Subur yang menjadi peserta KB aktif	73,12 %	75,14 %





Dilihat dari tabel dan grafik diatas, pada tahun 2019 pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif sejumlah 273.503 atau 75,14 % dari Jumlah pasangan usia subur sebanyak 363.982. Capaian tahun 2019 ini melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019 sebesar 73 %. Bila dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar 73,12 %, maka capaian persentase sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta KB Aktif mengalami kenaikan sebesar 2,67 % yang berarti bahwa semakin banyak pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif.

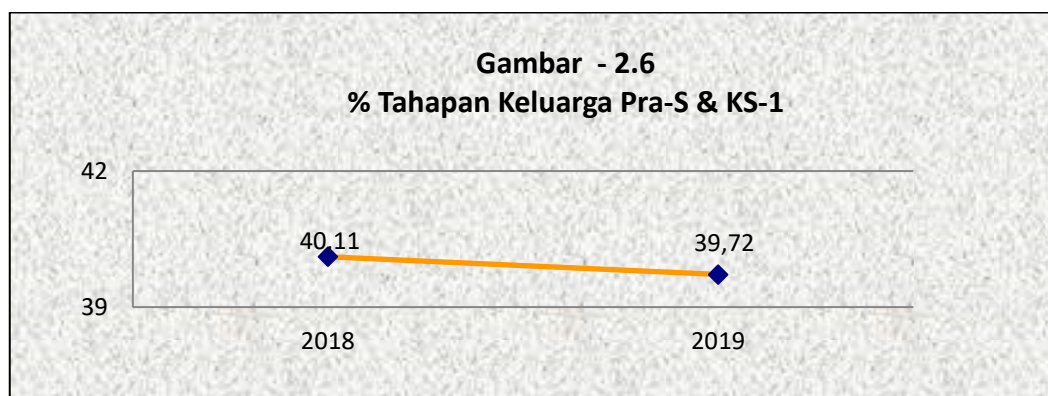
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan jumlah peserta KB aktif bagi pasangan usia subur (PUS) yakni meliputi kegiatan pelayanan KB gratis melalui kegiatan Baksos, KIE Berbagai Media dan MUPEN, Kesatuan Gerak PKK, TNI manunggal KB. Kedepannya Pemerintah daerah akan lebih berkomitmen dan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk lebih meningkatkan peserta KB aktif pada PUS.

#### **Persentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS-I**

Pada indikator Persentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS-I ini menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu keluarga berdasarkan pemenuhan kebutuhan keluarga. Semakin tinggi pada tingkat kesejahteraan suatu keluarga semakin tinggi pula tingkat kebutuhan

keluarga yang dapat dipenuhi. Tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga dibagi ke dalam 5 kategori tahapan yaitu : Pra-sejahtera, KS-I, KS-II, KS-III dan KS-III Plus. Keluarga Pra sejahtera dan keluarga Sejahtera I merupakan pembagian keluarga yang termasuk tingkat pendapatan ekonominya rendah, sehingga target grup penggarapan program KB Nasional, diutamakan pada Keluarga Pra-Sejahtera (Pra-S) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I), keluarga tersebut dalam kategori belum dapat memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) dan social psikologis (*social psychological needs*).

Uraian / Data	2018	2019
Jumlah keluarga Pra-S dan KS-I	197.750 kk	198.286 kk
Jumlah Keluarga	497.809 kk	494.414 kk
Persentase tahapan keluarga sejahtera yang Pra-S dan KS-I	39,72 %	40,11 %



Dilihat dari tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa jumlah keluarga Miskin (Keluarga Pra-S dan KS-I) pada tahun 2019 mencapai 197.750 kk atau 39,72% dari jumlah KK di Kabupaten Pasuruan yaitu sebanyak 497.809 kk. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 40,11 %. Penurunan ini disebabkan karena akseptor KB dari keluarga Pra-S dan KS-1 mendapatkan pelayanan dari program UPPKS (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) sehingga mampu

meningkatkan kesejahteraan akseptor. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan sosial.

## 9. Bidang Perhubungan

Di dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023, dinas Perhubungan menetapkan indikator capaian kinerja menjadi 2 (dua) indikator yaitu prosentase wilayah yang terkoneksi angkutan umum dan prosentase penurunan angka kecelakaan. Adapun besaran capaian indikator kinerja dapat dilihat tabel berikut.

**Tabel 2.32**  
**Capaian Indikator Bidang Perhubungan**

NO	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja 2018		Kinerja 2019	
		Satuan	Realisasi	Target	Realisasi
	Persentase Aksesibilitas Transportasi	%	n/a		
	Prosentase wilayah yang terkoneksi angkutan umum	%	n/a	10,4	7,18
	Prosentase penurunan angka kecelakaan	%	n/a	-2,84	11,16

### **Prosentase Wilayah yang Terkoneksi Angkutan Umum**

Jaringan transportasi memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan perkembangan untuk suatu wilayah, terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi daerah maupun konektivitas antar daerah atau wilayah. Konektivitas jaringan transportasi yang paling dominan digunakan oleh penduduk untuk beraktivitas dan menjadi peranan penting dalam pembangunan wilayah. Oleh karena itu, ketersediaan jaringan penghubung wilayah berupa adanya angkutan umum menjadi tujuan utama dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah. Untuk memenuhi tujuan dari peningkatan aksesibilitas transportasi yang mana target capaian pada tahun 2019





dengan angka 10,4% pelaksanaannya berupa peningkatan koneksi antar wilayah dengan adanya angkutan umum dan realisasinya menunjukkan 7,18% dari target yang akan dicapai. Berdasarkan data diatas belum terpenuhinya layanan akses angkutan umum yang terintergrasi dan mendukung perkembangan pariwisata di Kabupaten Pasuruan. Disamping itu juga, jaringan jalan menjadi salah satu factor penghambat belum terpenuhinya konektivitas antar wilayah. Adapun jumlah trayek angkutan umum yang terdapat di kabupaten Pasuruan sebanyak 49 trayek dan tersebar sebagai berikut :

- Pandaan – Prigen – Tretes
- Pandaan – Baujeng – Sub. Terminal Bangil
- Pandaan – Jetak – Dayurejo
- Kadianyar – Bangil
- Kraton – Bangil – Gempol
- Warung Dowo – Wonorejo – Purwosari – Purwodadi
- Purwodadi – Cowek – Nongkojajar
- Banyu Biru – Ngopak – Sambirejo
- Banyubiru – Winongan – Penataan – Sambirejo
- Lekok – Gejuk Jati – Ngopak – Jarangan
- Ngling – Grati – Jarangan
- Purwodadi – Pandaan – Gempol
- Pandaan – Prigen – Lumbang Rejo
- Pandaan – Sukorejo – Sekarjoho
- Pasrepan – Tosari – Tlogosari (Wisata Bromo)
- Ngadiono – Podokoyo (Wisata Bromo)

#### **Prosentase (%) Penurunan Angka Kecelakaan**

Perkembangan kendaraan sebagai alata transportasi membawa dampak positif bagi pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan manusia, terutama sebagai alat mobilisasi guna memperlancar aktivitas sehari-hari. Akan tetapi, peningkatan jumlah kendaraan bermotor berdampak pada peningkatan jumlah angka kecelakaan. Penyebab keceakaan lalu lintas kendaraan bermotor disebabkan oleh



factor pengendara, kendaraan, lingkungan dan aksesibilitas dari transportasi. Untuk memenuhi target dari penurunan tingkat kecelakaan dari nilai target -2,84% dengan meningkatkan fasilitas keselamatan jalan bagi para pengguna jalan capaian realiasinya 11,16% yang telah terlaksanakan sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dari transportasi di Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan hasil tersebut, kecelakaan akibat kendaraan bermotor masih tinggi. Sehingga masih perlu meningkatkan fasilitas keselamatan pengguna jalan.

## 10. Bidang Komunikasi dan Informatika

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan urusan komunikasi dan informatika dinilai dengan beberapa indikator kinerja dengan capaian sebagaimana Tabel 2.33

**Tabel 2.33**  
**Capaian Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019
1	Tujuan : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap penyebaran informasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	IKM Terhadap Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi	poin	83,77 (baik)	84,20 (baik)
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) - (penilaian KemenPAN-RB)	poin	2,48 (cukup)	2,39 (cukup)
2	Sasaran : Meningkatnya Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi	% Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dan Penyebarluasan Informasi	%	n/a	92
3	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan dan Layanan Publik berbasis TIK	% OPD yang menerapkan e-Gov	%	100	100



## **IKM Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur berdasarkan hasil survey kepada masyarakat atas pelayanan Dinas Kominfo. IKM diukur berdasarkan 9 unsur pelayanan, yaitu persyaratan pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarpras, serta penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Berdasarkan data yang ada terdapat peningkatan angka IKM dari tahun 2018 (83,77) ke tahun 2019 (84,20) yang masuk dalam kategori 'baik'. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya, segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. Media website Pemerintah Kabupaten Pasuruan mempunyai sasaran agar seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pasuruan, dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan Pemerintah Daerah, dan ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet dan teknologi lain yang akan muncul di kemudian hari. Website Pemerintah Kabupaten Pasuruan dibuat untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat, dan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu :

Informasi dapat diperoleh secara mudah, benar, adil, dan luas cakupan;

Materi yang diakses melalui website pemerintah meliputi :

semua bahan yang telah diterbitkan atau bahan-bahan yang telah berada di luar perlindungan hak cipta (boleh diketahui oleh umum);



semua informasi yang dibuat dan dikumpulkan sesuai undang-undang (tunduk kepada pertimbangan-pertimbangan kepekaan komersial dan rahasia pribadi);

semua dokumen yang diperlukan bagi kepentingan masyarakat.

Pada tahun 2019 jumlah pengunjung website sejumlah 36.000 pengunjung, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 675.000 pengunjung, sehingga mengalami penurunan yang sangat besar. Hal ini antara lain karena banyak masyarakat yang ingin mengakses informasi tentang penerimaan CPNS baru.

### **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penilaian indeks SPBE dilakukan oleh KemenPAN-RB dengan menggunakan 3 (tiga) domain yaitu: (1) kebijakan (tata kelola dan layanan).; (2) Tata Kelola (kelembagaan, strategi dan perencanaan, serta TIK); (3) Layanan (administrasi pemerintahan dan pelayanan publik).

Indeks SPBE Kabupaten Pasuruan tahun 2019 mencapai 2,39, sedangkan tahun 2018 mencapai 2,48 atau sedikit mengalami penurunan tetapi masih tetap pada kategori 'cukup'.

### **Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi**

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi didapat dari data masyarakat yang menerima pelayanan dan penyebarluasan informasi dibanding dengan masyarakat yang puas. Persentase kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dan Penyebarluasan Informasi pada tahun 2019 sebesar 92%.



## 11. Koperasi, usaha kecil dan menengah

Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (UKM) dalam melaksanakan bidang urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.34

**Tabel 2.34**  
**Capaian Kinerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019
	Tujuan :				
1.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Omset Usaha Mikro dan Koperasi	Rp. (000)	1.295.048.000	1.697.507.779
	Sasaran :				
1	Terwujudnya Kelembagaan Koperasi sesuai dengan jati diri Koperasi	Jumlah Koperasi yang berkualitas	Unit	49	179
		Persentase masyarakat yang berkoperasi	%	9.29	12.87
2	Terwujudnya Usaha Mikro dan koperasi yang Mandiri, Kuat dan Berdaya Saing	Jumlah peningkatan omset usaha mikro dan koperasi	Rp. (000)	17.453.000	392.578.779

### **Jumlah Omset Usaha Mikro dan Koperasi**

Jumlah Omset Usaha Mikro dan Koperasi dengan target tahun 2019 sebesar Rp. 1.312.681.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.697.507.779,- yang berarti telah mencapai target. Selain itu juga meningkat dibanding tahun 2018.

### **Jumlah koperasi yang berkualitas**

Indikator jumlah koperasi yang berkualitas tahun 2019 ditarget sebesar 60 unit dan terealisasi sebesar 179 unit yang berarti telah



mencapai target. Sedangkan dibanding tahun 2018 juga mengalami peningkatan.

### **Persentase masyarakat yang berkoperasi**

Persentase masyarakat yang berkoperasi dengan target pada tahun 2019 yaitu 9.34 % dan terealisasi sebesar 12,87 % untuk jumlah anggota koperasi dibandingkan jumlah masyarakat yang ber-KTP. Capaian tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2018.

### **Jumlah peningkatan omset usaha mikro dan koperasi**

Target tahun 2019 jumlah peningkatan omset usaha mikro dan koperasi sebesar Rp. 17.633.000.000,- dan realisasinya melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.392.578.779.000,- serta meningkat signifikan dibandingkan tahun 2018.

## **12. Penanaman Modal**

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu diukur dengan beberapa indikator yang berkenaan dengan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan. Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu pada tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.35

**Tabel 2.35**  
**Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu**

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019
	Tujuan : Mewujudkan pelayanan terpadu yang berkualitas dalam meningkatkan investasi daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	84,73	84,93
	Sasaran : meningkatnya nilai investasi daerah	Jumlah nilai investasi yang terealisasi	T	9,66	18,94

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mendukung misi keempat dalam RPJMD, yaitu memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola

pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi. Dalam pelaksanaannya, DPMPT mempunyai tujuan mewujudkan pelayanan terpadu yang berkualitas dalam meningkatkan investasi daerah dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dari tujuan tersebut, DPMPT menetapkan sasaran meningkatnya nilai investasi daerah yang diukur melalui indikator jumlah nilai investasi yang teralisasi.

### **Indeks Kepuasan Masyarakat**

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pada tahun 2019, IKM DPMPT mencapai 84,93% melebihi target sebesar 2,43 dari 82,5%. Pencapaian tersebut mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2018 sebesar 0,21 dari 84,72%. Hal ini menunjukkan bahwa DPMPT melakukan kinerjanya dengan baik dalam hal pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan perijinan. Pelayanan perijinan yang digunakan DPMPT Kabupaten Pasuruan adalah Online Single Submission (OSS) yaitu perijinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

### **Jumlah nilai investasi yang terealisasi**

Perkembangan investasi merupakan salah satu indikator kemajuan ekonomi di daerah, dimana investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jumlah investasi yang terealisasi pada tahun 2019 sebesar 18,94 T atau

sebesar 210,44% dari target 9 T dan mengalami peningkatan sebesar 9,28T dari tahun 2018

### 13. Kepemudaan dan Olahraga

Keberhasilan pencapaian kinerja Urusan Pemuda dan Olah Raga diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu Jumlah Pemuda Berprestasi dan Jumlah Atlit Berprestasi . Capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga tahun 2019 dalam melaksanakan kegiatan Bidang Urusan Pemuda dan Olah Raga ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.36**  
**Capaian Kinerja Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

NO	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja 2018 - 2019			
		Satuan	2018	Target 2019	Realisasi
1	Jumlah Pemuda berprestasi	orang	13	13	13
2	Jumlah Atlit Berprestasi	orang	36	30	38

Pada tahun 2019 jumlah pemuda berprestasi sebanyak 13 orang. Capaian tersebut sama dengan tahun sebelumnya, dan sudah memenuhi target yang ditentukan (13 orang). Capaian ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan sudah selektif dalam mengirimkan duta pemuda, jangan sampai kegiatan organisasi pemuda yang muncul keberadaannya dianggap tidak sesuai dengan peraturan, norma atau budaya Indonesia mengingat banyak sekali kegiatan organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia dianggap tidak sesuai dengan peraturan dan norma yang ada.

Adapun upaya Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk dapat menghasilkan bibit-bibit pemuda prestasi antara lain dengan melaksanakan kegiatan :





1. Pembinaan organisasi kepemudaan.
2. Seleksi siswa pasukan Paskibraka.
3. Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda.
4. Pemuda pelopor.
5. Penyelenggaraan kompetisi olahraga.
6. Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat.
7. Pelatihan pendidikan pendahuluan bela negara.

Pada tahun 2019 atlet yang berprestasi berjumlah 38 orang, capaian ini melebihi target yang ditentukan yaitu 30 orang. Bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 36 orang atlet, maka mengalami peningkatan sebanyak 2 orang atlet.

#### **14. Statistik**

Data statistik merupakan komponen sekaligus instrumen strategis dalam sebuah pemerintahan, bahkan disebut pula statistik menentukan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan UU nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 mengharuskan perencanaan pembangunan didasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data statistik itu bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan dan ada masa waktunya, sesuai dengan kebutuhan dalam hal penentuan kebijakan pemerintah. Selain itu, statistik juga berguna untuk mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan yaitu berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan perlu indikator kualitatif dan kuantitatif. Pembangunan di bidang statistik diarahkan pada upaya penyediaan data dan informasi statistik

yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manajemen kebijakan. Kewenangan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 adalah statistik sektoral, sedangkan statistik dasar menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan statistik yang diampu Dinas Kominfo menggunakan indikator “persentase pemenuhan data statistik daerah” yang merupakan indikator kinerja hasil dari Program Pengembangan /Data /Informasi/ Statistik Daerah. Capaian indikator kinerja bidang urusan statistik sebagaimana Tabel 2.37

**Tabel 2.37**  
**Capaian pada Bidang Urusan Statistik**

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019
1	Pengembangan /Data/ Informasi/ Statistik Daerah	% pemenuhan data statistik daerah	%	n/a	80,00

Pemenuhan data statistik daerah tahun 2019 mencapai 80.% sama dengan target yang ditetapkan. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa belum semua data statistik daerah terpenuhi. Hal ini disebabkan antara lain : belum jelasnya juknis data statistik sektoral. Dalam pengelolaan data statistik sektoral telah dibuat sistem informasi data statistik sektoral namun masih diperlukan koordinasi dengan OPD selaku produsen data untuk mengoptimalkan keterisian datanya.

## 15. Persandian

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan persandian yang diampu Dinas Kominfo menggunakan indikator “persentase pemenuhan standar keamanan informasi” yang merupakan indikator

kinerja keluaran dari Kegiatan Persandian dan Keamanan TIK. Capaian indikator kinerja bidang urusan persandian sebagaimana tabel 2.38

**Tabel 2.38**  
**Capaian pada Bidang Urusan Statistik**

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019
1	Persandian dan Keamanan TIK	% pemenuhan standar keamanan informasi	%	n/a	100

## 16. Kebudayaan

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan kebudayaan yang diampu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menggunakan indikator kinerja dengan capaian sebagaimana tabel III.1.22-1.

**Tabel 2.39**  
**Capaian Kinerja Bidang Kebudayaan**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019
1	Sasaran:				
	Terpeliharanya seni dan budaya lokal	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	jenis	14	15
			Kelompok	n/a	420

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pada tahun 2019 terdapat 15 jenis karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi, yaitu terdiri dari:

1. Benda : 1 jenis
2. Bangunan : 10 jenis
3. Struktur : 1 jenis
4. Situs : 2 jenis
5. Kawasan Situs : 2 jenis

Sedangkan jumlah kelompok kesenian yang sudah diinventarisasi pada tahun 2019 sebanyak 420 kelompok dengan rincian sebagai berikut :



1. Kesenian jaranan : 66 kelompok
2. Kesenian campursari : 5 kelompok
3. Kesenian kuda lumping : 46 kelompok
4. Tari tradisional (sanggar) : 32 kelompok
5. Bantengan : 32 kelompok
6. Pencak kembangan/  
pencak silat : 36 kelompok
7. Ludruk : 4 kelompok
8. Wayang : 24 kelompok
9. Reog : 9 kelompok
10. Orkes melayu : 128 kelompok
11. Al Banjari : 24 kelompok
12. Bale Ganjur : 2 kelompok
13. Samroh : 25 kelompok

## 17. Perpustakaan

Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip dalam melaksanakan bidang urusan perpustakaan tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.40

**Tabel.2.40**  
**Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019
1	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan Perpustakaan	nilai	83 (baik)	83 (baik)
2	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	orang	329.80 0	351.45 0

### IKM Layanan Perpustakaan

Kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan berdasarkan hasil survey memperoleh nilai 83 (kategori baik), sama dengan yang dicapai tahun 2018.

### Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan ditunjukkan dengan jumlah pengunjung perpustakaan. Tahun 2019 jumlah



pengunjung perpustakaan meningkat 6,56% dibandingkan tahun 2018.

## 18. Kearsipan

Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip dalam melaksanakan urusan kearsipan tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.41

**Tabel 2.41**  
**Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip**  
**Urusan Kearsipan**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan	nilai	62,15 (cukup)	70 (cukup)

### Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan.

Nilai audit arsip yang dilakukan tahun 2019 memperoleh nilai 70 (cukup), meningkat dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 62,15 (cukup). Penilaian audit arsip dikelompokkan menjadi 5 (lima), yaitu : 1. Nilai 91 s/d 100 dengan kategori “Sangat Baik; 2. Nilai 76 s/d 90 dengan kategori Baik; 3. Nilai 61 s/d 75 dengan kategori “Cukup; 4. Nilai 51 s/d 60 dengan kategori “Kurang; dan 5. Nilai dibawah atau sama dengan 50 dengan kategori “Buruk. Parameter yang diukur dalam audit kearsipan adalah: ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; program kearsipan; pengolahan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun; penyusutan arsip; pengelolaan arsip statis; SDM kearsipan; kelembagaan; prasarana dan sarana kearsipan.

## URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

### 1. Bidang Kelautan dan Perikanan

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan secara rinci sebagaimana Tabel 2.42



**Tabel 2.42**  
**Capaian Indikator Urusan Perikanan**

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019
Tujuan : Meningkatkan produktivitas sub sektor perikanan dengan mendorong perkembangan ekonomi kreatif	PDRB sub sektor perikanan	Milyar Rupiah	729,38	782,31
Sasaran : Meningkatnya produksi perikanan berbasis potensi lokal yang berdaya saing	% produksi perikanan	%	3% (40.800,34 ton)	5,59% (43.084,52 ton)
Terwujudnya usaha agribisnis perikanan	% pelaku usaha perikanan yang mandiri	%	0,80	3,35

Adapun capaian masing-masing indikator kinerja utama pada urusan Perikanan tahun 2019 dijelaskan sebagai berikut :

**1. PDRB Sub Sektor Perikanan**

Pada tahun 2019 PDRB Sub Sektor Perikanan mencapai 782,31 milyar rupiah. Hal ini menunjukkan capaian yang telah melampaui Target sebesar 802,34 milyar rupiah atau sebesar 97,50 % dibandingkan tahun 2018 sebesar 729,38 milyar rupiah.

**2. Persentase produksi perikanan**

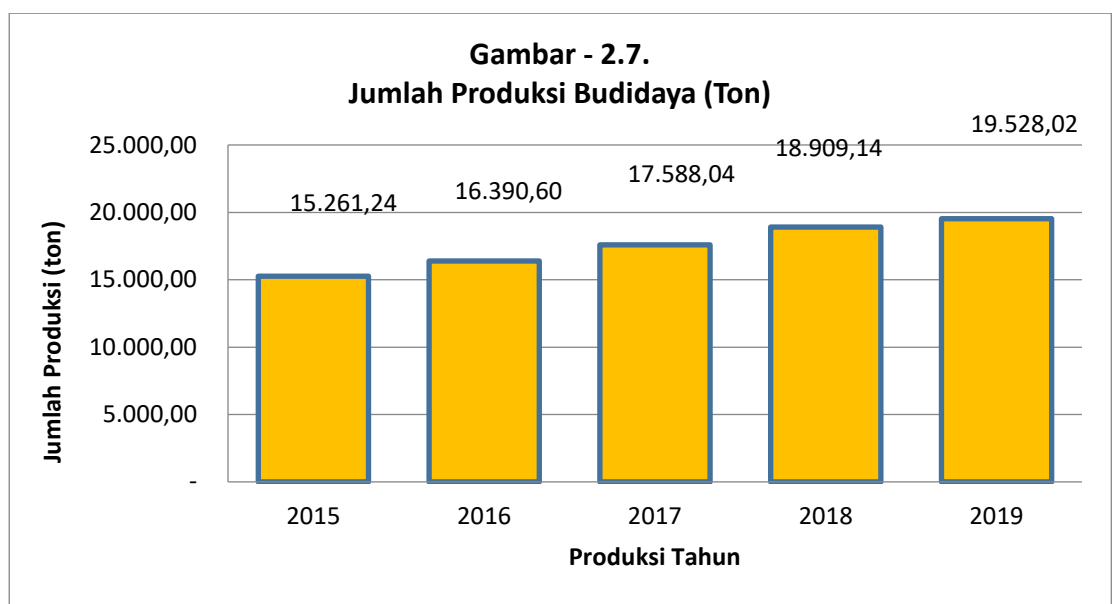
Produksi perikanan pada tahun 2019 mencapai 43.084,52 ton yang berarti 2.284,18 ton atau 5,59% lebih tinggi dibanding tahun 2018 sebesar 40.800,34 ton. Target peningkatan produksi perikanan yang ditetapkan adalah 3%, sehingga capaian produksi perikanan tahun 2019 mencapai lebih dari 100% yaitu 102,52 %. Formulasi dari produksi perikanan ini adalah jumlah dari produksi perikanan



budidaya dan produksi perikanan tangkap. Penjelasan dari masing-masing capaian adalah sebagai berikut :

### **Produksi perikanan budidaya**

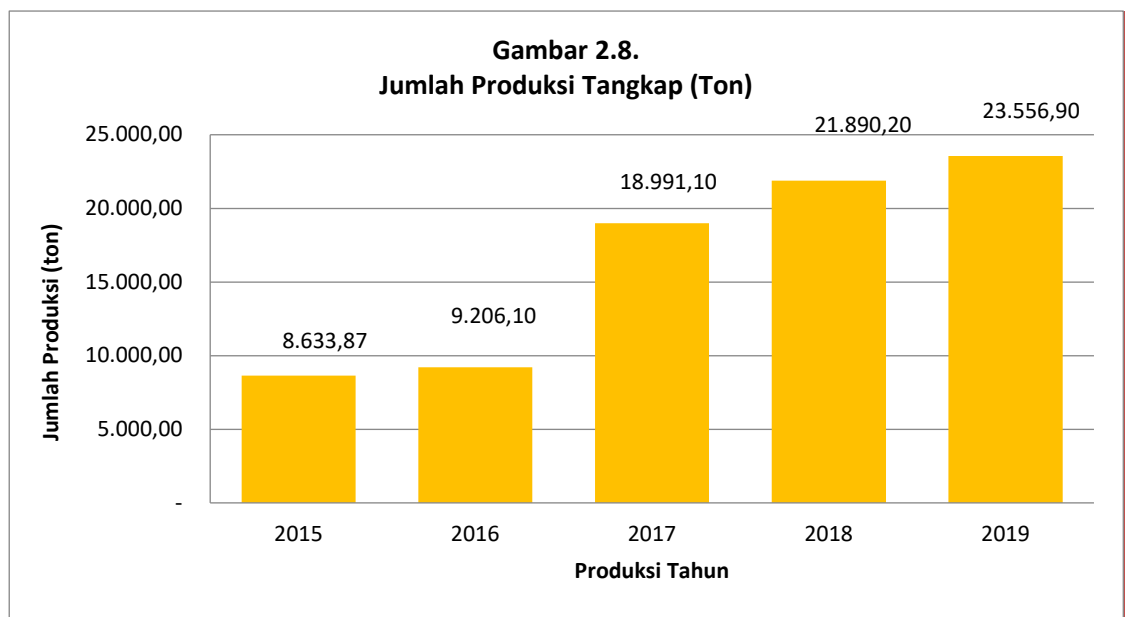
Produksi perikanan budidaya tahun 2019 mencapai 19.528,02 ton atau lebih tinggi 618,88 ton atau 3,27% dibanding tahun 2018 sebesar 18.909,14 ton. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan sebesar 3% telah tercapai 109,1%. Peningkatan produksi perikanan budidaya selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Dari grafik dapat di lihat bahwa selama 5 tahun produksi perikanan budidaya menunjukkan tren yang positif (meningkat). Peningkatan produksi perikanan budidaya ini menunjukkan bahwa pengembangan program dan kegiatan pada usaha perikanan budidaya air tawar dan air payau di beberapa wilayah cukup berhasil dalam meningkatkan hasil perikanan budidaya. Peningkatan teknologi budidaya, sarana prasarana produksi dan produktivitas budidaya perikanan serta peningkatan SDM pelaku usaha perikanan budidaya merupakan faktor pendukung dari peningkatan produksi perikanan budidaya.

### **Produksi perikanan tangkap**

Dari produksi perikanan tangkap tahun 2019 mencapai 23.556,50 ton. Capaian produksi perikanan tangkap tahun 2019 adalah memenuhi target sebesar 104,47% dari yang ditetapkan yaitu 22.547,94 ton. Jika dibandingkan dengan realisasi produksi perikanan tangkap tahun 2018 yang mencapai 21.891,2 ton terjadi peningkatan hasil produksi sebesar 1.665,50 ton atau 7,61%. Peningkatan produksi perikanan tangkap tahun 2019 ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumberdaya perikanan mulai berpengaruh positif terhadap kuantitas penangkapan ikan oleh nelayan baik di laut maupun di perairan umum yang selanjutnya akan meningkatkan jumlah produksi perikanan tangkap. Produksi perikanan tangkap memberikan kontribusi terhadap produksi perikanan sebesar 54,68%. Peningkatan produksi perikanan tangkap pada tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



### **Persentase pelaku usaha perikanan yang mandiri**

Persentase pelaku usaha perikanan yang mandiri pada tahun 2019 mencapai 3,35 meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2018



yaitu 0,80. Hal ini menunjukkan bahwa capaian tahun 2019 telah melampaui Target sebesar 1 atau sebesar 335,20% dari target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Tahun 2018 - 2023 . Pelaku usaha perikanan yang mandiri adalah indikator untuk mengetahui jumlah pelaku usaha perikanan yang telah mempunyai legalitas usaha dan melakukan kemitraan dan atau kerjasama baik pemasaran maupun permodalan. Pada tahun 2019 jumlah pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar perikanan) yang sudah terdaftar sebanyak 15.185 orang, dan jumlah pelaku usaha perikanan yang mandiri sebanyak 509 orang atau sebesar 3,35%. Capaian ini lebih besar 357 orang dari yang ditargetkan yaitu 152 orang atau 1,00%. Capaian IKU sebesar 335,20% dari target menunjukkan bahwa sumberdaya, program dan kegiatan pendukung IKU tersebut telah diberdayakan semaksimal mungkin. Namun ke depan masih ada 96,65% pelaku usaha yang belum mandiri. Hal ini disebabkan antara lain :

- Keterbatasan tenaga teknis dalam pendampingan, pembinaan dan penyuluhan kepada pelaku usaha sehingga masih ada masih ada beberapa pelaku usaha yang dimungkinkan belum terdata dan atau belum melaporkan apabila sudah melakukan kerjasama/kemitraan dengan pihak ketiga.
- Lemahnya akses permodalan dan pasar dalam rangka pengembangan usaha
- Masih rendahnya nilai tambah produk hasil perikanan
- Kurangnya kepatuhan/ketaatan penerapan standar mutu pada usaha perikanan budidaya dan pengolahan/pemasaran dalam pemenuhan *food safety* dan jaminan mutu usahanya
- Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan daerah dengan pelaku usaha/perusahaan perikanan.



Solusi dalam rangka mengoptimalkan pencapaian indikator ini pada tahun yang akan datang dan memaksimalkan tercapainya pelaku usaha perikanan yang mandiri, Dinas Perikanan perlu melakukan langkah-langkah antara lain :

1. Mengoptimalkan tenaga teknis yang ada serta perlu adanya tambahan tenaga teknis perikanan, mengingat luas wilayah binaan yang cukup luas.
2. Meningkatkan posisi tawar dan daya saing produk unggulan disertai legalitas usaha dan sertifikasi produk
3. Meningkatkan ketrampilan kewirausahaan bagi pengolah dan pemasar hasil perikanan
4. Fasilitasi untuk mendapatkan bantuan permodalan dari lembaga keuangan dan perluasan jaringan pemasaran produk perikanan di dalam dan luar daerah
5. Peningkatan distribusi, pasca panen dan nilai tambah produk konsumsi dan non-pangan
6. Menciptakan iklim investasi yang mendukung pertumbuhan dan kemitraan usaha perikanan

## 2. Bidang Pariwisata

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2019 – 2023 maka Indikator Kinerja Bidang Kepariwisata adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.43**  
**Capaian Indikator Urusan Pariwisata**

NO	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja 2019		
		Satuan	Target	Realisasi
1.	Jumlah Kunjungan wisatawan			2.687.987
2.	jumlah ODTW yang terstandarisasi	ODTW	10	7
3.	Jumlah pelaku usaha jasa yang tersertifikasi	org	100	100



Secara umum jumlah wisatawan yang berkunjung tahun 2019 tercatat sebanyak 2.687.987 orang dan meningkat 6,09% dari 2018. Jumlah kunjungan tersebut tersebar di beberapa obyek wisata yang ada di Kabupaten Pasuruan. Hal ini dikarenakan upaya-upaya standarisasi ODTW dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan melakukan penilaian terhadap beberapa komponen yaitu toilet bersih, ruang laktasi, fasilitas untuk disabilitas, klinik/poli, pelayanan prima, dan penerapan sapta pesona.

### 3. Bidang Pertanian

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dengan capaian Kinerja dapat dijelaskan sebagaimana Tabel III.2.27.1-1

**Tabel 2.44**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2019**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019
1	Tujuan : Meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan dengan mendorong perkembangan ekonomi kreatif	PDRB Subsektor pertanian			
		ADHB	Rp.Juta	4.270.836,7	4.325.856,18
		ADHK	Rp.Juta	2.766.939,5	2.740.506,41
		PDRB Subsektor perkebunan			
		ADHB	Rp.Juta	1.460.384,1	1.518.458,15
		ADHK	Rp.Juta	1.032.851,6	1.067.208,43
2	Sasaran : Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	% peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%	n/a	4,19
		% peningkatan produksi tanaman	%	n/a	17,59
		% peningkatan produksi tanaman buah tahunan	%	n/a	0,62

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019
		% peningkatan produksi tanaman sayur	%	n/a	1,16
		% peningkatan produksi tanaman hias	%	n/a	0,60
		% peningkatan produksi tanaman perkebunan	%	n/a	0,82
3	Meningkatnya usaha pertanian dan perkebunan yang terstandarisasi	Jumlah produk hasil pertanian/agribisnis yang terstandarisasi	macam	3	4

### 1. PDRB Subsektor pertanian

PDRB subsektor pertanian tahun 2018 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp.4.270.836,7 Juta dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Rp.2.766.939,5 Juta. Tahun 2019 PDRB ADHB subsektor pertanian meningkat tapi PDRB ADHK subsektor pertanian menurun.

### 2. PDRB Subsektor Perkebunan

PDRB subsektor perkebunan tahun 2018 Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp.1.460.384,1 Juta dan Atas Dasar Harga Konstan Rp.1.032.851,6 Juta. Tahun 2019 PDRB subsektor perkebunan meningkat, baik ADHB maupun ADHK

### 3. Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

#### a. Persentase peningkatan produksi tanaman pangan

Peningkatan produksi tanaman pangan tahun 2019 meningkat 7,59% . Realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan 0,30%.

#### b. Persentase peningkatan produksi tanaman buah tahunan

Persentase peningkatan produksi tanaman buah tahunan tahun 2019 adalah sebesar 0,62%, capaian ini telah



melampaui dari target sebesar 0,30% yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 atau sebesar 266,67%. Produksi tanaman buah tahunan ini didukung oleh tiga komoditas utama yaitu apel, mangga dan durian.

Produksi Apel pada tahun 2019 sebesar 289.688 ton meningkat dibandingkan tahun 2018 dengan produksi sebesar 285.934 ton, Produksi Durian pada tahun 2019 sebesar 107.215 ton meningkat dibandingkan tahun 2018 dengan produksi sebesar 106.912 ton, dan Produksi Mangga pada tahun 2019 sebesar 246.010 ton meningkat dibandingkan tahun 2018 dengan produksi sebesar 245.352 ton. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan Luas panen dan produktivitas pada ketiga komoditas tersebut. Keberhasilan pembuahan diluar musim (Off session) pada tanaman mangga, bantuan bibit mangga dan durian yang bersumber dari APBD kabupaten, bantuan pupuk organik pada tanaman apel serta kestabilan harga durian yang membuat petani durian termotivasi membudidayakan tanaman durian secara intensif merupakan alasan kenaikan produksi tanaman buah tahunan.

c. Persentase peningkatan produksi tanaman sayur

Persentase peningkatan produksi tanaman sayur tahun 2019 adalah sebesar 1,16%, capaian ini telah jauh melampaui dari target sebesar 0,30% yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 atau sebesar 376,67%. Produksi tanaman sayuran ini didukung oleh komoditas Kentang dan Paprika.



Produksi Kentang pada tahun 2019 sebesar 228.757 ton meningkat dibandingkan tahun 2018 dengan produksi sebesar 227.600 ton dan Produksi Paprika pada tahun 2019 sebesar 9.448 ton meningkat dibandingkan tahun 2018 dengan produksi sebesar 9.281 ton. Peningkatan produksi utamanya didukung oleh peningkatan Luas panen pada kedua komoditas tanaman sayuran. Peningkatan luas panen disebabkan bantuan benih unggul bersertifikat pada tanaman kentang serta penggunaan sistem irigasi tetes (Drip Irrigation) pada tanaman Paprika yang bersumber dari APBD Kabupaten.

d. Persentase peningkatan produksi tanaman hias

Persentase peningkatan produksi tanaman hias tahun 2019 adalah sebesar 0,60%, capaian ini telah dua kali lipat melampaui dari target yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 yaitu sebesar 0,30% atau 200%. Komoditas unggulan tanaman hias kabupaten Pasuruan meliputi komoditas krisan dan sedap malam.

Produksi Bunga Krisan pada tahun 2019 sebesar 93.752.963 tangkai meningkat dibandingkan tahun 2018 dengan produksi sebesar 93.300.435 tangkai dan Produksi Bunga Sedap Malam pada tahun 2019 sebesar 90.091.503 tangkai meningkat dibandingkan tahun 2018 dengan produksi sebesar 89.457.858 tangkai. Peningkatan produksi utamanya disebabkan meningkatnya Luas panen pada kedua komoditas tersebut. Adapun peningkatan luas panen dikarenakan harga yang cukup menjanjikan serta peningkatan permintaan pasar terhadap Komoditas Krisan dan Sedap Malam.

e. Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan



Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan tahun 2019 adalah sebesar 0,82%, capaian ini telah melampaui dari target sebesar 0,30% yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 atau sebesar 273,33%. Produksi tanaman perkebunan unggulan di Kabupaten Pasuruan meliputi Kopi, Cengkeh, Tebu dan Kelapa.

Produksi Kopi pada tahun 2019 sebesar 1.365,43 ton meningkat dibandingkan tahun 2018 dengan produksi sebesar 1.355,55 ton, Produksi Cengkeh pada tahun 2019 sebesar 367,65 ton meningkat dibandingkan tahun 2018 dengan produksi sebesar 366,21 ton, Produksi Tebu pada tahun 2019 sebesar 24.299,93 ton meningkat dibandingkan tahun 2018 dengan produksi sebesar 23.835,24 ton dan Produksi Kelapa pada tahun 2019 sebesar 2.643,76 ton meningkat dibandingkan tahun 2018 dengan produksi sebesar 2.638,56 ton. Peningkatan tersebut disebabkan adanya peningkatan Luas panen pada keempat komoditas unggulan sebagai output dari bantuan bibit secara kontinyu, sekolah lapang pengendalian hama terpadu serta bimtek cara budidaya tanaman perkebunan

## **2. Jumlah produk hasil pertanian/agribisnis yang terstandarisasi**

Produk pertanian baik dalam bentuk segar maupun olahan perlu distandarisasikan sebagai jaminan atas mutu produk yang dihasilkan. Berdasarkan target RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2023 produk pertanian/agribisnis yang terstandarisasi adalah sejumlah 4 macam. Capaian dari indikator ini adalah sebesar 100% dengan telah



terstandarisasinya komoditas Padi, kopi, buah dan sayur dari lembaga sertifikasi organik seloliman (LeSOS)

Sertifikasi organik ini merupakan sarana untuk memberikan jaminan bahwa produk organik memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam standar melalui kegiatan inspeksi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Organik.

#### 4. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan dalam Tahun 2019 mempunyai Target dan Realisasi sebagaimana table dibawah ini :

**Tabel 2.45**  
**Capaian Kinerja Bidang Perdagangan**

Indikator Kinerja	Kinerja 2019		
	Satuan	Target	Realisasi
Indeks Daya Beli		70,94	
Nilai transaksi perdagangan	Juta Rp	858.500.000	1.964.493.500
Nilai SKM Disperindag	Range Interval %	80,00-81,25	90,55

Pada tahun 2019 nilai transaksi perdagangan mengalami peningkatan sebesar 1,36% dibandingkan tahun 2018. Dan apabila dibandingkan dengan target tercapai 228,83% (target 2019 sebesar RP.858.500.000,-). Hasil perolehan transaksi berasal dari omzet pelaksanaan pasar murah, pameran dan promosi dagang, baik lokal, regional, dan nasional. Sedangkan nilai SKM merupakan hasil kuesioner yang dibagikan kepada 200 orang responden yaitu pemilik alat ukur yang wajib tera ulang di 24 kecamatan dan 14 pasar rakyat. Kuesioner tersebut meliputi 9 (sembilan) unsur pelayanan, yaitu: 1. kesesuaian persyaratan pelayanan, 2. kemudahan prosedur pelayanan, 3.kecepatan pelayanan, 4, kesesuaian biaya pelayanan, 5. kesesuaian produk layanan, 6. kemampuan petugas, 7. perilaku petugas, 8.kualitas sarpras, dan 9. pengaduan layanan. Pengambilan





data kuesioner dilakukan pada saat kegiatan sidang tera ulang. Hasil yang diperoleh tahun 2019 sebesar 90,55 meningkat dibandingkan tahun 2018.

### 5. Bidang Perindustrian

Capaian bidang urusan Perindustrian tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.46.

**Tabel 2.46**  
**Capaian Kinerja Bidang Perindustrian**

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019
1	Tujuan: meningkatkan pertumbuhan sektor Perindustrian	Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	%	6,72	6,46
2	Sasaran : Meningkatnya produksi sektor Perindustrian	Jumlah Produksi Sektor Industri (PDRB ADHB sektor industri pengolahan)	Rp. Juta	77.472.236,7	84.142.842,2

Pertumbuhan PDRB industri pengolahan tahun 2019 tumbuh 6,46 % mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2018 yang tumbuh 6,72%.Sedangkan volume PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2019 meningkat sebesar 8,61% dibandingkan tahun 2018 .

### Bidang Transmigrasi

Kinerja dalam melaksanakan bidang urusan transmigrasi tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.47

**Tabel 2.47**  
**Capaian Bidang Transmigrasi**

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019
1	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah Calon transmigran yang diberangkatkan	orang	4	4
2	Transmigrasi Lokal	Jumlah Calon transmigran yang di berikan penyuluhan	orang	480	480



Perubahan Undang-undang No 29 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan transmigrasi, peran pemerintah daerah lebih dipertegas mulai dari penyediaan kawasan, pembangunan kawasan sampai dengan pengembangan kawasan transmigrasi. Ketentuan tentang penyerahan pembinaan Permukiman Transmigrasi dari Pemerintah kepada pemerintah daerah ditiadakan. Peran serta masyarakat, baik perorangan, kelompok masyarakat, maupun badan usaha dalam pelaksanaan transmigrasi perlu terus didorong. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah memberikan fasilitasi dan kemudahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Jumlah calon transmigran Kab Pasuruan yang diberangkat tahun 2019 sama dengan tahun 2018, yaitu 4 orang. Sedangkan penyuluhan kepada calon transmigran tahun 2019 sebanyak 60 orang, meningkat signifikan dari tahun 2018.

## UNSUR PENDUKUNG

### 1. Sekretariat Daerah

Kinerja Sekretariat Daerah sebagaimana tersebut pada tabel 2.48

**Tabel 2.48**  
**Capaian Kinerja Sekretariat Daerah**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019
Tujuan : Meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Nilai	72,7 (BB)	75,02 (BB)
Sasaran : Meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Hasil Evaluasi atas LPPD	nilai	3,4589 (Sangat Tinggi )	n/a
	Persentase Perangkat Daerah yang berkinerja sangat baik/Nilai SAKIP minimal BB	%	23,21	35,71
	Persentase OPD yang ber IKM minimal baik	%	44,64	100
	Persentase produk Kebijakan daerah yang	%	85,84	97,58



	diterbitkan sesuai dengan kebutuhan daerah			
Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan pada Pimpinan dan Kesekretariatan Daerah	Persentase ketersediaan kebutuhan Pimpinan dan Kesekretariatan daerah	%	100	98,24

## 2. Sekretariat DPRD

Kinerja Sekretariat DPRD dalam melaksanakan unsur pendukung urusan pemerintahan tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.49

**Tabel 2.49**  
**Capaian Kinerja Sekretariat DPRD**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019
1	Tujuan :				
	Mewujudkan Pelayanan Sekretariat DPRD yang Berkualitas	IKM / SKM layanan sekretariat DPRD	Nilai	88,51	88,75
2	Sasaran :				
	Meningkatnya Fasilitasi Terhadap Keluhan Masyarakat	Prosentase Keluhan Masyarakat ke DPRD yang Berhasil Difasilitasi	%	100	100

Indeks kepuasan layanan masyarakat atas pelayanan Sekretariat DPRD tahun 2018 dan 2019 menunjukkan nilai yang relatif tetap dengan predikat 'sangat baik'. Demikian pula dengan layanan berupa fasilitasi terhadap keluhan masyarakat ke DPRD telah mencapai 100%. Jumlah keluhan yang tercatat di tahun 2018 sebanyak 73 kali dan tahun 2019 meningkat menjadi 116 kali.

## UNSUR PENUNJANG

### 1. Perencanaan

Tolok ukur keberhasilan pada unsur penunjang urusan pemerintahan perencanaan, dilakukan dengan penilaian yang menggunakan indikator kinerja dengan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut.



**Tabel 2.50**  
**Capaian Indikator Kinerja Unsur Penunjang Perencanaan**

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019
1	Tujuan : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	Nilai SAKIP Perencanaan	nilai	22,75	23,62
2	Sasaran: Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	%	n/a	85

## 2. Keuangan

Kinerja Keuangan dalam melaksanakan unsur penunjang bidang urusan pemerintahan keuangan tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.51

**Tabel 2.51**  
**Capaian Kinerja Badan Keuangan Daerah (BKD)**

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019
	Tujuan :				
1	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel dan Transparan	Laporan Keuangan Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	%	100%	100%
	Sasaran :				
2	Meningkatkan tata kelola Keuangan dan Aset Daerah	1. Jumlah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	614 M	655 M
		2. Prosentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standart akuntansi Pemerintahan	%	100	100



Pada Badan Keuangan Daerah mempunyai tujuan yaitu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan dengan indikator kinerja utama yaitu Laporan Keuangan Daerah yang sesuai standart Akuntansi Pemerintahan dengan capaian tahun 2018 dan 2019 sebesar 100%. Adapun sasarannya adalah meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah, dengan 2 indikator kinerja, yaitu 1. Jumlah Peningkatan Informasi Daerah dengan capaian kinerja pada tahun 2018 Rp. 614.000.000.000,- dan pada tahun 2019 yang mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 655.000.000.000,- dan yang ke - 2 yaitu Prosentase Laporan Perangkat Daerah sesuai standart Akuntansi Pemerintah antara tahun 2018 dan 2019 sudah tercapai 100 %

### **3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

Fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pasuruan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan dengan kedudukan sebagai pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian serta perumusan Kebijakan teknis kepegawaian. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023 untuk Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah melaksanakan 6 (enam) indikator kinerja yaitu :



**Tabel 2.52**  
**Capaian Indikator Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Daerah**

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2018	2019	
				target	realisasi
1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	%	–	70	70,2
2	Prosentase Pegawai yang lulus Diklat	%	–	61	61,5
3	Prosentase pelanggaran Disiplin	%	–	0,19	0,18
4	Prosentase Peningkatan Kinerja ASN dalam Penilaian SKP	%	–	99	99
5	Prosentase ASN yang memiliki kualifikasi S1/S2/S3	%	69	64	64,89
6	Prosentase ASN yang lulus ujian tingkat 1,2,dan penyesuaian Ijazah	%	100	72	72,86

### **1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara**

Profesionalitas dalam birokrasi merupakan suatu hal yang sudah tidak dapat ditawar lagi, karena dengan profesional maka birokrasi dapat menciptakan kinerja yang efektif dan efisiensi menuju layanan pemerintahan yang semakin berkualitas. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu hal yang sangat penting untuk mengetahui potensi setiap ASN dalam pendidikan, pengalaman, pelatihan teknis dan kepemimpinannya agar disesuaikan dengan rencana pengembangan SDM yang jelas. Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Secara teknis, kriteria Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari jenjang paling tinggi sampai jenjang



paling rendah, dan diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan Pengukuran. Sementara dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dan diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS, dan diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. Adapun instrumen Pengukuran pada dimensi disiplin bobot penilaiannya adalah: bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; bobot nilai sebesar 3 (tiga) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan; bobot nilai sebesar 2 (dua) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; dan bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Adapun Indeks Profesionalitas ASN diperoleh dari :

<b>Jml PNS</b>	<b>Kualifikasi</b>	<b>Kompetensi</b>	<b>Kinerja</b>	<b>Disiplin</b>	<b>Total</b>
9370	12.26	27.95	25	4.99	70.2

## **2. Prosentase Pegawai yang Lulus Diklat**

Indikator ini pada tahun 2018 dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Prosentase Jumlah Pegawai yang lulus diklat structural dan Prosentase jumlah pegawai yang lulus diklat teknis fungsional. Selain itu pada tahun 2018 indikator tersebut mengukur persentase peserta yang lulus dibanding dengan peserta yang ikut diklat. Pada tahun 2019 2 (dua) indikator tersebut di jadikan



satu yaitu Prosentase Pegawai yang lulus Diklat dengan menghitung persentase pegawai yang lulus mengikuti diklat dibanding dengan total seluruh pegawai. Untuk capaian kinerja pada tahun 2019 indikator ini mencapai 61,5 % atau naik 0,5% dibandingkan dengan target sebesar 61% yang di tentukan oleh Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan. Untuk mencapai target yang ditentukan Badan Kepegawaian dan Pendidikan, Pelatihan Daerah melakukan beberapa cara yaitu menyelenggarakan diklat struktural pada tahun 2019 adalah diklat kepemimpinan IV dan diklat teknis fungsional yaitu diklat sertifikasi barang dan jasa. Selain itu juga mengikutkan pegawai dalam diklat yang diselenggarakan diluar Pemerintah Kabupaten Pasuruan seperti diklat yang diselenggarakan Pemerintah Pusat maupun Perguruan Tinggi.

### **3. Prosentase Pelanggaran Disiplin**

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase pelanggaran disiplin oleh Aparatur Sipil Negara. Indikator ini baru disusun dalam RPJMD 2019-2023 dengan tujuan untuk mengukur tingkat kedisiplinan pegawai sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan. Pada tahun 2019 capaian kinerja sebesar 0,18% atau turun 0,01% dari target yang ditetapkan sebesar 0,19%. Hal ini adalah upaya Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menegakkan disiplin aparatur melalui kegiatan antara lain :

- a. Melaksanakan pembinaan rutin pegawai yang dilakukan oleh masing-masing pimpinan OPD maupun yang dilakukan oleh BKPPD bekerjasama dengan Inspektorat.





- b. Melaksanakan penanganan masalah kepegawaian dengan melakukan sidak, kunjungan lapangan dan sidang penanganan pelanggaran disiplin untuk menentukan penjatuhan hukuman disiplin.

#### **4. Prosentase peningkatan kinerja ASN dalam penilaian SKP**

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian Kinerja Pegawai Sipil (PNS), Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Pasal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Sipil (PNS) berbunyi “Penilaian Kinerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip a. Objektif; b. Terukur; c. Akutanbel; d. Partisipatif; dan e. Transparan,”. Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Sipil (PNS), dilaksanakan dalam suatu Sistem Manajemen Kinerja PNS yang terdiri atas: a. Perencanaan Kinerja; b. Pelaksanaan, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja; c. Penilaian kinerja; d. Tindak lanjut; dan e. Sistem Informasi Kinerja PNS. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perencanaan Kinerja terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dengan memperhatikan Perilaku Kerja. Proses penyusunan SKP yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), dilakukan dengan memperhatikan: a. Perencanaan strategis Instansi Pemerintah; b.



Perjanjian kinerja; c. Organisasi dan tata kerja; d. Uraian jabatan; dan/atau e. SKP atasan langsung. “SKP sebagaimana dimaksud memuat kinerja utama yang harus dicapai seorang PNS setiap tahun. Selain kinerja utama sebagaimana dimaksud, SKP dapat memuat kinerja tambahan,” demikian bunyi Pasal 9 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). SKP bagi pejabat pimpinan tinggi, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Sipil (PNS) ini, disusun berdasarkan perjanjian kinerja Unit Kerja yang dipimpinnya dengan memperhatikan: a. Rencana strategis; dan b. Rencana kerja tahunan. Pada tahun 2019 capaian indikator kinerja Prosentase Peningkatan Kinerja ASN dalam penilaian SKP sebesar 99% atau sama dengan target. Hal ini karena upaya Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam membina Aparatur karena penilaian kinerja merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi.

##### **5. Prosentase ASN yang memiliki Kualifikasi ijazah S1/S2/S3**

Indikator ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak Pegawai Negeri Sipil memiliki kualifikasi pendidikan mulai dari Strata 1, Strata 2 dan Strata 3, hal ini dimaksud agar semua Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan harus meningkatkan kompetensinya baik itu kompetensi ketrampilan maupun kompetensi ilmu pengetahuan. Dengan meningkatnya kualifikasi pendidikan diharapkan seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat meningkatkan kecakapan dalam pelayanan masyarakat. Pada tahun 2019 realisasi persentase jumlah pegawai yang memiliki ijazah S1, S2 dan S3 sebesar 64,89% atau naik sebesar 0,19% bila dibandingkan tahun 2018 yaitu 64,70%, apabila



dibandingkan dengan target yang ditetapkan naik sebesar 0,89% dari nilai yang ditetapkan yaitu sebesar 64%. Keberhasilan ini selain upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yaitu Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah melalui program kegiatan tugas belajar yang dibiayai penuh oleh Pemerintah Pusat juga diberikan ijin belajar kepada pegawai yang biayanya ditanggung sendiri oleh pegawai tersebut, tetapi sebagai wujud komitmen peningkatan kualifikasi pendidikan pegawainya, Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga memberikan beasiswa kepada pegawai yang melanjutkan pendidikannya tersebut

#### **6. Prosentase ASN yang lulus ujian tingkat 1,2 dan penyesuaian ijazah**

Indikator ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak pegawai yang telah mengikuti ujian dinas kenaikan pangkat tingkat I, tingkat II dan penyesuaian ijazah. Ujian dinas kenaikan pangkat tingkat I dan tingkat II adalah suatu rangkaian kegiatan ujian kenaikan pangkat reguler yang diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk dapat dinaikkan pangkatnya, disamping memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan sedangkan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah ujian kenaikan pangkat pilihan yang diperuntukan Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat telah memenuhi syarat administrasi dan memiliki ijazah lebih tinggi dari pangkat sebelumnya. Tahun 2019 realisasi persentase ASN yang lulus ujian tingkat 1, 2 dan penyesuaian ijazah sebesar 72,86% atau naik 0,86% dari target yang ditetapkan sebesar 72%. Pada tahun 2018 realisasi capaian sebesar 100%. Perbedaan yang terjadi bukan berarti penurunan tetapi berbeda formula capaiannya dimana tahun 2018 formula



capaiannya adalah peserta yang lulus dibanding dengan peserta yang ikut ujian dinas sedangkan pada tahun 2019 formula capaiannya adalah aparatur yang lulus ujian dinas dan diakui secara kepangkatan dibanding jumlah seluruh pegawai.

#### 4. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan bidang unsur pendukung urusan pemerintahan tahun 2019 yang diampu Bappeda sebagaimana Tabel 2.53

**Tabel 2.53**  
**Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019
1	Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan daerah	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	%	80	100

### **UNSUR PENGAWASAN**

#### **Inspektorat**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Menyebutkan bahwa yang dimaksud Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP meliputi tahapan kegiatan:



- a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
- d. Berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
- e. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah meliputi:

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- d. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan, menyebutkan bahwa Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pembinaan atas



penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Instansi, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

### **UNSUR KEWILAYAHAN** (24 kecamatan)

Sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, camat memiliki kewenangan atributif dan delegatif. Hal ini berarti bahwa camat memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota dalam menjaga keutuhan NKRI.

## **1. Capaian Kinerja**

### **a. Capaian Indikator Kinerja**

Seiring Kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggara pelayanan public dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan layanan. Pelayanan public di lakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. **Survey Kepuasan Masyarakat** (SKM) menjadi satu agenda yang harus segera diterapkan oleh semua instansi penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan sebagai upaya mengukur kinerja dan kualitas pelayanan publik secara terus menerus dan berkelanjutan. Metode perhitungan survey kepuasan masyarakat adalah :

- Mengembangkan Kuisisioner
- Menetapkan Jumlah Responden
- Rencana Kerja



**Tabel 2.54**  
**Interval Nilai SKM**

<b>NO</b>	<b>NILAI INTERVAL KONVERSI SKM</b>	<b>MUTU PELAYANAN</b>	<b>KINERJA UNIT PELAYANAN</b>
1	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	76,61 - 88,30	B	Baik
4	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

**SAKIP** adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi:

- Perencanaan Kinerja
- Pengukuran Kinerja
- Pelaporan Kinerja
- Evaluasi Internal dan
- Pencapaian Kinerja

**Tabel 2.55**  
**Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP SKPD**

<b>NO</b>	<b>KATEGORI</b>	<b>NILAI ANGKA</b>	<b>INTERPRETASI</b>
1	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 - 90	Memuaskan
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 - 30	Sangat Kurang

Pada RPJMD Kabupaten Pasuruan untuk Tahun 2018-2023 Kecamatan memiliki 2 (dua) indikator Kinerja Utama yaitu Nilai



Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan, dan Nilai Satuan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan. Capaian dari 2 (dua) indikator Kinerja Utama tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.56**  
**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan dan**  
**Nilai Satuan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah**  
**(SAKIP) Kecamatan Tahun 2018 dan Tahun 2019**

No	Kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan		Nilai Satuan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan	
		2018	2019	2018	2019
1	Purwodadi	80 (Baik)	80 (Baik)	60,62	60,78
2	Tutur	77,56 (Baik)	80,60 (Baik)	61,91	62,1
3	Puspo	82 (Baik)	83 (Baik)	62	65,35
4	Tosari	87,36 (Baik)	87,36 (Baik)	60,21	60,53
5	Lumbang	83 (Baik)	86,8 (Baik)	63,31	63,57
6	Pasrepan	85 (baik)	86,05(Baik)	60,04	61,77
7	Kejayan	82,36 (Baik)	83,25 (Baik)	61,58	61,77
8	Wonorejo	73,25 (Baik)	81,91 (Baik)	60,2	61,16
9	Purwosari	80,79 (Baik)	87 (Baik)	61,64	62,33
10	Prigen	84,16 (Baik)	87,16 (Baik)	60,02	60,02
11	Sukorejo	86,93 (Baik)	88,03 (Baik)	63,70	68,14
12	Pandaan	85,14 (Baik)	86,54 (Baik)	64,18	60,34
13	Gempol	84,16 (Baik)	85,09 (Baik)	61,88	63,98
14	Beji	85,81(Baik)	85,81(Baik)	61,36	62,18
15	Bangil	75 (Baik)	87 (Baik)	61,93	63,36
16	Rembang	85,97 (Baik)	85,97 (Baik)	61,69	6017
17	Kraton	.....	91,37 (Sangat Baik)	.....	63,16
18	Pohjentrek	86,8 (Baik)	86,97 (Baik)	60,2	63,44
19	Gondangwetan	82 (Baik)	85(Baik)	67,97	68,2
20	Rejoso	78,57	81,58 (Baik)	65,17	63,61





No	Kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan		Nilai Satuan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan	
		2018	2019	2018	2019
		(Baik)			
21	WInongan	85 (Baik)	86,67 (Baik)	69	61,24
22	Grati	79,47 (Baik)	90,22 (Sangat Baik)	63,02	63,28
23	Lekok	85 (Baik)	82,71 (Baik)	61,00	61,33
24	Nguling	84,75 (Baik)	84,97 (Baik)	62,06	64,83

Pencapaian Indikator Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan pada tahun 2019 keseluruhan dari 24 kecamatan mendapat kategori “Sangat Baik”, nilai tertinggi adalah 91-88. Nilai tersebut di capai oleh Kecamatan Kraton (91,37), Grati (90,22) dan yang lain termasuk kategori “Baik”. Apabila dibanding dengan pencapaian indikator Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan pada Tahun 2019 mengalami peningkatan karena pada Tahun 2018 capaian untuk 24 Kecamatan hanya mendapat kategori “Baik”

## **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**

### **Kesatuan Bangsa dan Politik**

Fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri diarahkan pada upaya peningkatan stabilitas ideologi, politik, ekonomi, sosial, agama, budaya, pertahanan, dan keamanan serta peningkatan pengetahuan aparatur pemerintah, Ormas, Orpol, LSM, dan seluruh komponen masyarakat dalam bidang kesatuan bangsa dan politik. Indikator Kinerja dari Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :



**Tabel 2.57**  
**Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	Target 2019	Capaian 2019
1	Persentase potensi konflik yang dapat dicegah	%	N/A	100	100
2	Persentase konflik yang dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat	%	N/A	100	100

### **Prosentase Potensi Konflik yang dapat dicegah**

Indikator Pertama yang tertuang pada RPJMD Tahun 2019- 2023 untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Prosentase Potensi Konflik yang dapat di cegah. Pada indikator ini membandingkan antara Potensi konflik yang dapat dicegah terhadap potensi konflik yang akan terjadi. Pada tahun 2019 indikator ini tercapai sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 di Kabupaten Pasuruan tidak ada potensi konflik yang mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan.

### **Prosentase konflik yang dapat di selesaikan melalui musyarah mufakat**

Indikator yang kedua adalah Prosentase konflik yang dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Indikator ini membandingkan antara konflik yang dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat dengan konflik yang terjadi. Pada tahun 2019 pada capaian indikator ini juga sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 di Kabupaten Pasuruan tidak terjadi konflik yang harus diselesaikan secara musyawarah dengan melibatkan banyak unsur dan Pimpinan Daerah. Pada Urusan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa tahun 2019 ini didukung oleh 8 (delapan) program utama yaitu : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program Pengembangan Wawasan



Kebangsaan, Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT), Program Pendidikan Politik Masyarakat, Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM, Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Program Peningkatan Kerukunan Beragama.



## 2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah

### 2.2.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Sasaran Daerah

No	Sasaran Daerah	Permasalahan
1	Meningkatnya produktivitas sektor-sektor unggulan dengan mendorong perkembangan ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya branding produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan, sehingga banyak produk unggulan yang diklaim oleh daerah lain.</li> <li>b. Belum optimalnya kelembagaan dan kerja sama antar pelaku usaha ekonomi kreatif, sehingga kurang siap untuk memenuhi permintaan dalam jumlah besar.</li> <li>c. Kurangnya inovasi pemasaran produk-produk unggulan dan produk ekonomi kreatif Kabupaten Pasuruan.</li> </ul>
2.	Meningkatnya kunjungan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum optimalnya infrastruktur penunjang, pengelolaan kawasan wisata, dan kurangnya promosi wisata serta penyelenggaraan even-even wisata sehingga berdampak pada kurangnya minat wisatawan untuk berkunjung</li> <li>b. Belum bersinerginya antar kelembagaan pariwisata (kelompok sadar wisata)</li> <li>c. Kurangnya kualitas dan kompetensi profesi pelaku usaha pariwisata, serta lemahnya pengelolaan daya tarik wisata Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi maupun Kabupaten/Kota</li> <li>d. Belum terakomodirnya pelaku ekonomi kreatif serta kurangnya kualitas SDM peningkatan inovasi usaha kreatif dan industri kreatif sebagai pendukung pengembangan pariwisata.</li> </ul>
3.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masih banyak lembaga ekonomi masyarakat yang belum memiliki legalitas.</li> <li>b. Sebagian besar lembaga ekonomi masyarakat yang ada dalam kondisi mati suri, tidak memiliki kegiatan yang pasti.</li> </ul>
4.	Meningkatnya Kemandirian Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan pemerintahan desa belum optimal</li> <li>b. Pengelolaan potensi desa belum optimal</li> <li>c. Masih kurangnya sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi desa.</li> </ul>
5.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masih kurangnya sarana prasarana produksi baik di sektor pertanian, peternakan maupun perikanan.</li> <li>b. Rantai distribusi pasar masih dikuasai tengkulak.</li> <li>c. Rendahnya nilai tawar petani terhadap pembeli/konsumen.</li> <li>d. Semakin menurunnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian, peternakan dan perikanan.</li> <li>e. Masih rendahnya penghasilan masyarakat yang berusaha di sector pertanian, utamanya pertanian tanaman pangan dan nelayan.</li> </ul>
6.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masih banyak masyarakat yang masih berpenghasilan kurang dari kebutuhan hidup minimal.</li> <li>b. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Pasuruan masih berpendidikan setara sekolah dasar.</li> <li>c. Kurangnya ketrampilan yang dimiliki oleh masyarakat untuk berwiraswasta maupun mengisi posisi lowongan kerja yang ada.</li> </ul>
7.	Meningkatkan Kesempatan Lapangan Kerja Baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tingginya angkatan kerja tidak diimbangi dengan kompetensi SDM pencari kerja yang dibutuhkan oleh penyedia lapangan kerja.</li> <li>b. Belum adanya kesesuaian antara Kurikulum SMK dengan Kompetensi SDM yang dibutuhkan (<i>Link and Match</i>) di dunia kerja</li> </ul>
8.	Meningkatnya	Penurunan jumlah PMKS (Penyandang Masalah



	Penanggulangan PMKS	Kesejahteraan Sosial) tidak signifikan
9.	Meningkatnya Penanganan Pelanggaran Perda	Kurangnya personil pendukung penegakan Perda.
10.	Menurunnya Konflik Sara	Masih mudahnya masyarakat terhasut isu-isu terkait SARA.
11.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masih kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga lingkungan hidup.</li> <li>b. Masih banyak industri besar maupun industri rumah tangga yang langsung membuang limbahnya ke lingkungan tanpa proses pengolahan.</li> <li>c. Belum adanya pengolahan limbah B3 di Kabupaten Pasuruan.</li> <li>d. Kurangnya ketegasan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dalam menegakkan hukum lingkungan dan memberikan sanksi kepada pelanggarnya.</li> </ul>
12.	Menurunnya Dampak Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Semakin beragamnya jenis bencana, akibat perubahan iklim dan bentang alam.</li> <li>b. Masih banyak masyarakat yang hidup di daerah rawan bencana.</li> <li>c. Kurangnya pengetahuan, ketrampilan dan kesiapsiagaan masyarakat saat terjadinya bencana.</li> <li>d. Penanggulangan banjir Kali Kedunglarangan, Kali Welang dan Kali Rejoso.</li> </ul>
13.	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laju tingkat kerusakan jalan yang cukup tinggi, akibat kendaraan yang lewat melebihi kapasitas jalan dan adanya bencana banjir.</li> <li>b. Masih banyak badan jalan yang tidak dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung jalan yaitu drainase jalan dan turap/plengsengan. Hal ini juga mempercepat laju kerusakan jalan.</li> <li>c. Penanganan badan/ruas jalan yang tidak menyeluruh atau sebagian, mengakibatkan kondisi jalan tidak mantap.</li> </ul>
14.	Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masih sedikit ruas jalan maupun wilayah di Kabupaten Pasuruan yang terlayani angkutan umum orang maupun barang.</li> <li>b. Semakin berkurangnya jumlah maupun trayek angkutan umum yang melayani wilayah Kabupaten Pasuruan.</li> <li>c. Semakin berkurangnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum, sehingga beralih menggunakan kendaraan pribadi.</li> <li>d. Kondisi angkutan umum yang rusak, sehingga mengurangi kenyamanan dan keamanan pengguna angkutan umum.</li> </ul>
15.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Semakin menurunnya jumlah dan debit sumber air.</li> <li>b. Masih banyak sumber air yang dikuasai oleh perorangan, desa atau badan/lembaga, karena terletak di lahan pada wilayah pengusaannya.</li> <li>c. Semakin meningkatnya kerusakan wilayah pada daerah resapan air dan daerah aliran sungai.</li> <li>d. Semakin besarnya gap ketersediaan/debit air saat kemarau dan penghujan. Ketika kemarau krisis air/rawan air dan ketika penghujan krisis air bersih dan banjir.</li> <li>e. Penanggulangan banjir di wilayah Kabupaten Pasuruan.</li> </ul>
16.	Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya pemahaman masing-masing Perangkat Daerah tentang Tugas dan fungsinya.</li> <li>b. Penilaian yang dilakukan masih sebatas kelengkapan administrasi, belum menyentuh pada isi substansi</li> </ul>



		masing-masing dokumen.
17.	Meningkatnya kualitas Sistem Keuangan Daerah	Belum terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan dengan sistem keuangan daerah.
18.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana prasarana masih kurang memenuhi syarat.</li> <li>b. Kurangnya jumlah dan kualitas personil pelayanan publik.</li> <li>c. Kurangnya kompetensi SDM dengan bidang pelayanan yang diampu.</li> <li>d. Akses dan sistem pelayanan publik masih sulit dijangkau masyarakat.</li> </ul>
19.	Meningkatnya Profesionalitas ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak adanya pembekalan maupun pembinaan pada calon ASN sebelum ditempatkan pada PD tertentu.</li> <li>b. Tidak diterapkannya sanksi maupun reward, sebagai tolok ukur penilaian kinerja ASN.</li> <li>c. Kurang jelasnya tolok ukur kinerja ASN.</li> </ul>
20.	Meningkatnya Pelayanan Dasar Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masih tingginya angka kejadian penyakit menular dan tidak menular yang disebabkan belum optimalnya pola hidup bersih dan sehat.</li> <li>b. Masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan, khususnya dokter, dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Pasuruan.</li> <li>c. Masih belum meratanya kualitas sarana prasarana kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat.</li> <li>d. Kurangnya program/kegiatan yang bersifat preventif, sebagian besar program/kegiatan di bidang kesehatan masih focus pada kuratif/pengobatan.</li> </ul>
21.	Meningkatnya Pelayanan Dasar Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan (PAUD dan Pendidikan Dasar), seperti Laboratorium IPA dan perlengkapannya, alat peraga pendidikan belummenuhi SPM pendidikan dasar.</li> <li>b. Masih kurangnya tenaga pendidik dan kependidikan terutama di lembaga pendidikan yang berlokasi di daerah perdesaan.</li> <li>c. Masih terdapat guru dan kepala sekolah/madrasah yang belum memenuhi kualifikasi S.1 atau D.IV dan bersertifikat pendidik.</li> </ul>
22.	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masih banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah.</li> <li>b. Masih banyak profesi/pekerjaan menghasilkan pendapatan yang rendah.</li> <li>c. Kebutuhan pokok yang semakin mahal, mengakibatkan masyarakat hanya mampu memenuhi kebutuhan pokoknya saja.</li> </ul>
23.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masih banyak masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni.</li> <li>b. Masih ada wilayah/kawasan kumuh di Kabupaten Pasuruan.</li> <li>c. Masih banyak wilayah yang tidak mendapatkan akses air bersih dan tidak terlayani angkutan sampah.</li> <li>d. Masih banyak permukiman yang tidak dilengkapi prasarana sanitasi/jamban dan drainase lingkungan.</li> <li>e. Masih adanya permukiman yang tidak beraturan dan berhimpitan, utamanya pada kawasan pesisir.</li> <li>f. Masih banyak masyarakat yang menempati hunian/permukiman pada lahan illegal atau bantaran sungai.</li> </ul>
24.	Meningkatnya Kesetaraan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang isu kesetaraan gender.</li> <li>b. Kecenderungan jumlah kasus kekerasan terhadap</li> </ul>



		perempuan dan anak masih tinggi. c. Pemenuhan hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas belum optimal.
25.	Meningkatnya Peran Serta dan Eksistensi Pemuda	a. Belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan. b. Belum adanya pembinaan yang optimal secara berjenjang dan berkelanjutan.

Permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran daerah adalah permasalahan yang bersifat strategis dan harus diselesaikan pada tahun 2021 atau isu-isu strategis. Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan potensi daerah, capaian kinerja pemerintah daerah serta prioritas nasional dan provinsi. Identifikasi isu strategis didasarkan pada hasil pemetaan sasaran daerah yang berkorelasi dengan prioritas daerah tahun 2021, dapat dilihat pada uraian di bawah.

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah		
1.	Peningkatan Konektivitas Wilayah	Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Meningkatnya aksesibilitas transportasi	Menurunnya dampak bencana

Isu strategis terkait prioritas daerah di atas adalah :

1. Peningkatan aksesibilitas transportasi guna mendukung aktifitas ekonomi produktif, serta kelancaran distribusi barang, jasa dan orang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Peningkatan manajemen kebencanaan sebagai langkah pencegahan dini dan kesiapan dalam menghadapi bencana.
3. Peningkatan kapasitas, pengetahuan, ketrampilan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kejadian bencana.
4. Penanganan bencana non alam pandemic Covid-19.

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah		
2.	Peningkatan produktifitas sektor-sektor unggulan dan ekonomi kreatif	Meningkatnya produktifitas sektor-sektor unggulan dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif	Meningkatnya kunjungan wisata	Meningkatnya kualitas kelembagaan ekonomi masyarakat

Isu strategis terkait prioritas daerah di atas adalah :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi wilayah dan pengembangan ekonomi kreatif, serta peningkatan kualitas kelembagaan ekonomi masyarakat dalam rangka membangun ketahanan ekonomi daerah.
2. Penumbuhan sektor pariwisata sebagai sektor basis dalam menggerakkan perekonomian daerah.
3. Penurunan aktifitas ekonomi akibat bencana non alam pandemi Covid-19.

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah		
3.	Pembangunan manusia berbasis keluarga dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya pelayanan dasar kesehatan	Meningkatnya penanggulangan PMKS	Meningkatnya daya beli masyarakat
		Meningkatnya kemandirian desa	Meningkatkan kesempatan lapangan kerja baru	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman

Isu strategis terkait prioritas daerah di atas adalah :

1. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
2. Pengentasan kemiskinan dan penanganan PMKS secara terpadu dan holistic.
3. Peningkatan ketrampilan dan kapasitas tenaga kerja sector formal maupun informal.
4. Peningkatan kelembagaan desa dalam mengelola potensi desa guna membangun ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan.
5. Peningkatan akses air bersih, sanitasi dan rumah layak huni bagi masyarakat.

Prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2021 dan isu-isu strategis yang akan ditangani pada tahun 2021, telah sesuai dan mendukung prioritas pembangunan nasional (sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024) yaitu :



1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (prioritas nasional ke-1).
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing (prioritas nasional ke-3).
3. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (prioritas nasional ke-5).
4. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahan bencana dan perubahan iklim (prioritas nasional ke-6).

### **2.2.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

#### **A. Urusan Pemerintahan Wajib**

##### **A.1 Pelayanan Dasar**

##### **A.1.1 Bidang Urusan Pendidikan**

Permasalahan pada bidang urusan pendidikan adalah :

1. Kurikulum pendidikan Kabupaten Pasuruan belum memuat pendidikan karakter.
2. Proses pembelajaran kurang memenuhi standar mutu karena kualifikasi dan kompetensi pendidikan masih dibawah standar, pengelola PAUD belum terlatih, penilik selaku pengawas dijalur PNF jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah lembaga yang ada.
3. Masih kurangnya tenaga pendidik dan kependidikan terutama di lembaga pendidikan yang berlokasi di daerah pedesaan.
4. Masih terdapat guru dan kepala sekolah/madrasah yang belum memenuhi kualifikasi S.1 atau D.IV dan bersertifikat pendidik.

##### **A.1.2 Bidang Urusan Kesehatan**

Permasalahan pada bidang urusan kesehatan adalah :

1. Pelayanan dasar kesehatan masyarakat masih kurang, terlebih dengan adanya pandemi Covid 19 pada tahun 2020.
2. Masih tingginya angka kejadian penyakit menular dan tidak menular yang disebabkan belum optimalnya pola hidup bersih dan sehat.

3. Jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Pasuruan yang bebas dari Buang Air Besar sembarangan (ODF) masih sebesar 16% dari 365 desa/kelurahan.
4. Masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan, khususnya dokter di wilayah Kabupaten Pasuruan.

#### A.1.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pada bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah :

1. Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Air.
2. Menurunnya ketersediaan air baku akibat kerusakan daerah tangkapan airnya.
3. Masih adanya beberapa wilayah di Kabupaten Pasuruan yang tidak memiliki sumber air.
4. Tingkat kerusakan prasarana jaringan irigasi yang cukup tinggi, disebabkan kurangnya jumlah dan kualitas SDM pengelola jaringan irigasi, serta kurangnya partisipasi petani dalam pengelolaan jaringan irigasi.
5. Kondisi jalan yang ada belum mantap, serta tingginya tingkat kerusakan jalan akibat penggunaan sarana prasarana jalan yang tidak sesuai ketentuan.
6. Belum seluruh masyarakat dapat mengakses layanan air minum dan sanitasi (jamban dan pengelolaan sampah).
7. Pembangunan infrastruktur wilayah belum sesuai dengan rencana peruntukkan ruang.

Sedangkan permasalahan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang antara lain :

1. Adanya peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyusunan rencana penataan ruang, pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional, perubahan iklim yang berakibat terhadap perubahan potensi bencana, serta perlunya penetapan LP2B.
2. Ada beberapa program yang bernilai “strategis” yang diamanatkan dalam RTRW Kabupaten Pasuruan yang belum terlaksana secara optimal.

3. Tuntutan terhadap aspek pengendalian pemanfaatan ruang (hukum) saat ini sudah menjadi perhatian di tingkat Nasional terutama terkait penegakkan hukumnya.
4. Belum terpenuhinya penyediaan/luasan Ruang Terbuka Hijau publik (RTH) perkotaan.

#### A.1.4 Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pada bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman adalah :

1. Masih banyak kawasan permukiman kumuh di wilayah Kabupaten Pasuruan.
2. Masih banyak kawasan perumahan dan permukiman yang belum didukung sarana prasarana dan utilitas yang memadai.
3. Masih adanya kawasan permukiman illegal pada bantaran sungai.
4. Belum tercapainya target *universal access* untuk pemenuhan air minum dan sanitasi.

#### A.1.5 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Permasalahan pada bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah:

1. Masih tingginya tingkat kriminalitas dan pelanggaran ketertiban umum.
2. Masih tingginya tingkat kejadian bencana di wilayah Kabupaten Pasuruan (banjir, tanah longsor, rawan air/kekeringan, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan).
3. Belum optimalnya manajemen penanganan bencana serta kurangnya dukungan prasarana.
4. Masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana belum terlatih menghadapi bencana.
5. Adanya bencana non alam Covid 19 pada tahun 2020 yang ditetapkan sebagai bencana nasional.

#### A.1.6 Bidang Urusan Sosial



Permasalahan pada bidang urusan sosial adalah:

1. Penanganan PMKS yang belum optimal.
2. Adanya kecenderungan naiknya jumlah PMKS akibat bencana non alam pandemi Covid 19 pada tahun 2020.

#### A.2 Non Pelayanan Dasar

##### A.2.1 Bidang Urusan Ketenagakerjaan

Permasalahan pada bidang urusan ketenagakerjaan adalah:

1. Tingginya angkatan kerja tidak diimbangi dengan kompetensi SDM pencari kerja yang dibutuhkan oleh penyedia lapangan kerja. Belum adanya kesesuaian antara Kurikulum SMK dengan Kompetensi SDM yang dibutuhkan (*Link and Match*) di dunia kerja.
2. Masih terjadinya konflik ketenagakerjaan yang disebabkan kurangnya kesepahaman antara Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah Daerah.
3. Belum keseluruhan angkatan kerja memiliki sertifikat kompetensi.
4. Adanya kecenderungan meningkatnya angka pengangguran yang disebabkan banyaknya PHK serta karyawan yang dirumahkan akibat bencana non alam pandemi Covid 19.

##### A.2.2 Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pada bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah:

1. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang isu kesetaraan gender.
2. Kecenderungan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi.
3. Pemenuhan hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas belum optimal.

##### A.2.3 Bidang Urusan Ketahanan Pangan

Permasalahan pada bidang urusan pangan adalah:

1. Ketergantungan masyarakat terhadap pangan dari beras masih tinggi, hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan



survei Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 87,2% (belum mencapai 100%).

2. Dari hasil uji laboratorium beberapa sampel pangan, masih ditemukan bahan makanan tambahan yang berbahaya pada produk pangan olahan dan residu pestisida pada produk pangan segar.

#### A.2.4 Bidang Urusan Pertanahan

Permasalahan pada bidang urusan pertanahan adalah :

1. Administrasi pertanahan di desa masih belum terlaksana dengan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku dikarenakan keterbatasan tenaga/ Sumber Daya Manusia.
2. Masih banyaknya tanah negara maupun tanah aset Pemerintah Kabupaten di wilayah Kabupaten Pasuruan yang belum teridentikasi, serta belum memiliki sertifikat hak milik.
3. Proses sertifikasi tanah aset pemerintah belum bisa memenuhi target disebabkan masih ada dokumen sebagai syarat sertifikasi yang belum bisa dipenuhi. Oleh karena itu akan dilakukan koordinasi secara lebih intensif dengan pihak terkait untuk percepatan sertifikasi.

#### A.2.5 Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan bidang urusan lingkungan hidup adalah :

1. Menurunnya kualitas dan kuantitas air permukaan karena tidak terjaganya *catchment area* maupun daerah aliran sungai.
2. Masih ada kegiatan usaha yang tidak memenuhi ijin lingkungan.
3. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat dan dunia usaha, yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup.
4. Belum optimalnya pengelolaan limbah dan sampah oleh Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha.

#### A.2.6 Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah :

Belum semua penduduk memiliki Kartu Identitas Kependudukan (KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga).

#### A.2.7 Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Pengelolaan pemerintahan desa belum optimal.
2. Peran lembaga kemasyarakatan desa belum optimal.
3. Kurangnya kapasitas SDM Pemerintahan Desa dan lembaga masyarakat desa.
4. Pengelolaan potensi desa belum optimal.

#### A.2.8 Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga

1. Angka kepesertaan KB MKJP masih rendah.
2. Angka *unmet need* (PUS yang tidak ber KB) masih tinggi.
3. Rendahnya kepesertaan KB Pria.
4. Masih terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
5. Penurunan angka keluarga Pra-Sejahtera dan KS-1 belum signifikan.

#### A.2.9 Bidang Urusan Perhubungan

Permasalahan bidang urusan perhubungan adalah :

1. Banyak pemilik kendaraan angkutan jalan yang tidak melakukan perpanjangan izin trayek akan tetapi kenyataan dilapangan pemilik angkutan yang tidak melakukan perpanjangan izin trayek tersebut tetap beroperasi.
2. Prasarana angkutan umum yang ada banyak yang kurang layak kondisinya, sehingga menurunkan minat pengguna.

3. Sebagian besar ruas jalan dan wilayah di Kabupaten Pasuruan belum terlayani dan terkoneksi trayek layanan angkutan umum.

#### A.2.10 Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan bidang urusan komunikasi dan informatika adalah :

1. Kurang optimalnya penggunaan teknologi informatika dalam pelayanan pemerintahan, promosi potensi daerah maupun penyebaran informasi kepada masyarakat dan dunia usaha.
2. Kurangnya kemampuan SDM yang menguasai teknologi informatika.
3. Masih adanya wilayah Kabupaten Pasuruan yang belum terjangkau sinyal komunikasi (Blank Spot) dikarenakan kondisi geografisnya.

#### A.2.11 Bidang Urusan Koperasi dan UKM

Permasalahan bidang urusan koperasi dan Usaha Mikro adalah :

1. Masih rendahnya daya saing dan nilai tawar badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha lainnya, disebabkan belum optimalnya penggunaan teknologi informasi, inovasi produk, dan pengelolaan kelembagaan.
2. SDM anggota koperasi belum sepenuhnya memahami jati diri koperasi, sehingga ditemukan banyak koperasi yang tidak aktif.
3. Masih belum meratanya dan belum terstandarisasinya kapasitas SDM pengelola koperasi dan usaha mikro.
4. Terbatasnya akses pemasaran dan permodalan usaha mikro, serta partisipasi mitra pemerintah daerah dalam mengoptimalkan fungsi *pentahelix* dalam peningkatan kapasitas usaha mikro dan menumbuhkan wirausaha pemula.

#### A.2.12 Bidang Urusan Penanaman Modal

Permasalahan bidang urusan penanaman modal adalah :



1. Upah minimum Kabupaten Pasuruan termasuk di ring 1 di Jawa Timur sehingga investasi yang masuk ke Kabupaten Pasuruan cenderung padat modal.
2. Belum adanya peta potensi investasi sektoral Kabupaten Pasuruan.

#### A.2.13 Bidang Urusan Pemuda dan Olahraga

Permasalahan bidang urusan pemuda dan olah raga adalah:

1. Belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan.
2. Belum adanya pembinaan yang optimal secara berjenjang dan berkelanjutan.
3. Masih kurangnya pelestarian olahraga tradisional di kalangan masyarakat.

#### A.2.14 Bidang Urusan Statistik

Permasalahan bidang urusan statistik adalah :

1. Belum ada Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan pelaksanaan statistik sektoral (Perpres dan Permen tentang satu data terbit akhir tahun 2019) sehingga belum terbentuk forum satu data.
2. Masih minimnya ketersediaan data sektoral dan kualitas akurasi data sektoral sebagai bahan acuan perencanaan pembangunan.

#### A.2.15 Bidang Urusan Pesandian

Permasalahan bidang urusan persandian adalah :

Belum optimalnya pengamanan sistem sandi daerah.

#### A.2.16 Bidang Urusan Kebudayaan

1. Semakin turunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah, sehingga proses regenerasi pelaku seni budaya belum optimal.
2. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya.
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas para seniman dan budayawan.

#### A.2.17 Bidang Urusan Perpustakaan





1. Belum adanya penggalian, pengelolaan dan pelestarian bahan pustaka naskah kuno.
2. Belum adanya penyusunan Bibliografi daerah.
3. Koleksi bahan pustaka (cetak dan digital) masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

#### A.2.18 Bidang Urusan Kearsipan

1. Belum adanya pegawai yang secara fungsional bertugas sebagai pengelola arsip di unit kerja.
2. Kurang tertibnya penanganan arsip di Pemerintah Daerah dan kesalahan persepsi mengenai arsip dan tanggung jawab kearsipan.
3. Kurangnya sarana prasarana kearsipan (Rak arsip, lemari arsip, *scanner* peta, Depo yang kurang memadai dan representatif), jika dibandingkan dengan arsip yang selalu bertambah dan belum adanya teknologi otomasi kearsipan.
4. Belum adanya Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif sebagai pedoman Perangkat daerah melakukan penyusutan arsip.

### B. Urusan Pemerintahan Pilihan

#### B.1. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan bidang urusan kelautan dan perikanan adalah :

1. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM maupun pengurangan tingkat kemiskinan.
2. Keamanan pangan produk hasil pengolahan ikan yang belum memenuhi persyaratan mutu yaitu bebas dari bahan tambahan yang dilarang seperti formalin merupakan salah satu permasalahan dalam rangka peningkatan mutu hasil pengolahan perikanan.
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan baik dari segi penangkapan ikan maupun budidaya perikanan serta belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung pemasaran hasil olahan produk perikanan.

4. Pengelolaan TPI belum optimal. Hal ini disebabkan pengelola TPI yaitu Koperasi Perikanan tidak aktif dan tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

#### B.2. Bidang Urusan Pariwisata

Permasalahan bidang urusan pariwisata adalah :

1. Belum optimalnya infrastuktur penunjang, pengelolaan kawasan wisata, dan kurangnya promosi wisata serta penyelenggaraan even-even wisata sehingga berdampak pada kurangnya minat wisatawan untuk berkunjung.
2. Belum bersinerginya antar kelembagaan pariwisata (kelompok sadar wisata).
3. Kurangnya kualitas dan kompetensi profesi pelaku usaha pariwisata, serta lemahnya pengelolaan daya tarik wisata Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
4. Belum terakomodirnya pelaku ekonomi kreatif serta kurangnya kualitas SDM peningkatan inovasi usaha kreatif dan industri kreatif sebagai pendukung pengembangan pariwisata.

#### B.3. Bidang Urusan Pertanian

Permasalahan bidang urusan pertanian adalah :

1. Lemahnya kelembagaan petani, sehingga pengembangan usaha pertanian yang berbasis agribisnis belum optimal.
2. Penanganan pasca panen/olahan pangan untuk komoditas pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan serta perikanan) belum optimal sehingga pada saat terjadi panen raya nilai tambah komoditas pertanian secara umum kurang maksimal yang berpengaruh terhadap harga jual komoditas.
3. Harga pakan konsentrat yang cukup mahal disebabkan harga bahan bakunya juga mahal sehingga mengurangi keuntungan peternak.

4. Ancaman beberapa penyakit ternak strategis seperti brucellosis, avian influenza, anthrax dan rabies.
5. Ancaman penurunan populasi ternak besar dan kecil akibat masih adanya pemotongan ternak betina produktif dan pengeluaran ternak antar kabupaten yang tidak terpantau.

#### B.4. Bidang Urusan Perdagangan

Permasalahan bidang urusan perdagangan adalah :

1. Belum terpenuhinya permintaan pasar dalam jumlah besar dengan kualitas yang sama disebabkan hasil produk usaha mikro dan Industri Kecil Menengah (IKM) belum terstandarisasi.
2. Pola kemitraan antara pengusaha besar (toko modern) dengan pengusaha mikro kecil menengah belum berjalan optimal.
3. Berlakunya *Free Trade Area* berdampak pada membanjirnya produk dari luar negeri dengan harga yang lebih murah.
4. Cakupan layanan meterologi legal belum mampu menjangkau seluruh pelaku usaha perdagangan yang mempergunakan alat ukur.

#### B.5. Bidang Urusan Perindustrian

Permasalahan bidang urusan perindustrian adalah :

1. Pertumbuhan industri kecil menengah cukup pesat namun belum seluruhnya memiliki kesadaran untuk mengurus perijinan formal.
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia dalam penguasaan teknologi produksi, desain produk, pengemasan, pemasaran, manajemen usaha dan keterbatasan pendanaan membuat kualitas produk yang dihasilkan belum memenuhi Standart Nasional Indonesia (SNI), *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dan *International Standart Operation* (ISO).

## B.6. Bidang Urusan Transmigrasi

Permasalahan bidang urusan transmigrasi adalah :

1. Jumlah transmigran dan lokasi daerah tujuan tidak bisa ditargetkan oleh pemerintah daerah, karena bergantung pada kuota dari pemerintah pusat

## C. Unsur Pendukung

### C.1. Sekretariat Daerah

Permasalahan pada sekretariat daerah adalah :

1. Belum tertatanya sistem administrasi dan kearsipan dengan baik di Sekretariat Daerah;
2. Kurang optimalnya dan tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi serta pelayanan di Sekretariat Daerah;
3. Masih belum terintegrasinya koordinasi lintas sektor.

### C.2. Sekretariat DPRD

Permasalahan sekretariat DPRD adalah :

1. Perlunya peningkatan kemampuan komunikasi dengan Anggota DPRD dan *stakeholders* lain;
2. Kualitas layanan dan fasilitasi terhadap Anggota DPRD harus ditingkatkan;
3. Perlu pemantapan komitmen dan konsistensi dalam memberikan layanan kepada anggota DPRD;
4. Perlunya peningkatan kualitas administrasi terhadap perumusan kebijakan DPRD dan Pemerintah Daerah.

## D. Unsur Penunjang

### D.1. Perencanaan

Permasalahan pada perencanaan adalah :

1. Regulasi antar Kementerian seringkali tidak selaras, sehingga menyulitkan Pemerintah Kabupaten mengaplikasikannya.
2. Belum terintegrasinya antara *E-Planning*, *E-Budgeting* dan *E-Sakip* sehingga belum terwujud perencanaan yang selaras.
3. Perencanaan Pembangunan belum berbasis spasial (peta).



## D.2. Keuangan

Permasalahan pada keuangan adalah :

1. Pencatatan aset tanah dibawah badan saluran belum optimal atau belum tuntas, diperlukan inventarisasi secara bertahap dan proses perhitungan yang membutuhkan data yang akurat.
2. Penyusunan anggaran dengan sistem *e-budgeting* masih belum terimplementasikan.
3. Sistem pembayaran Non tunai dalam penganggaran APBD masih belum sepenuhnya terlaksana.
4. Percepatan dan kemudahan dalam penyusunan pelaporan belum optimal karena Penerapan teknologi informasi dalam prosedur pengelolaan keuangan mulai *e-planning*, *e-budgeting*, *e-Purchasing*, *e-Payment*, *e-Reporting* belum didukung dengan SDM yang berkompetensi dibidang Teknologi Informasi dalam sistem aplikasi yang terintegrasi.

## D.3. Bidang Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan pada kepegawaian, pendidikan dan pelatihan adalah :

1. Kurang efektifnya sarana dan prasarana untuk menunjang pengembangan Sistem Informasi Data Kepegawaian.
2. Lemahnya sinkronisasi dan keakuratan data kepegawaian pada setiap instansi (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dengan data kepegawaian di BKPPD Kabupaten Pasuruan.
3. Masih kurangnya jumlah pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) di Kabupaten Pasuruan dikarenakan analisis beban kerja belum dilaksanakan untuk beberapa jenis Jabatan Fungsional ;
4. Penerapan Surat Menteri PANRB nomor B/2810/M.PAN.RB/08/2016 tentang Penilaian Prestasi Kerja dan Surat Kepala BKN No.K.26-30/V-104-4/99

tentang Pelaporan PPK PNS menggunakan aplikasi e-lapkin, saat ini belum dilaksanakan dikarenakan sistem e-lapkin masih dalam tahap pengembangan.

#### D.4. Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan pada penelitian dan pengembangan adalah:

Belum optimalnya pemanfaatan output kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai dasar pengambilan kebijakan daerah.

#### E. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

##### E.1. Inspektorat

Permasalahan pada inspektorat adalah :

1. Perlunya peningkatan pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah;
2. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN;
3. Implementasi pengendalian intern pada Perangkat Daerah masih belum berjalan dengan baik.

#### F. Unsur Kewilayahan

##### F.1. Kecamatan

Permasalahan pada kecamatan adalah :

1. Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, di Kecamatan dilaksanakan program PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan). Tetapi belum semua kecamatan menerapkan program tersebut.
2. Kurangnya kualitas maupun kuantitas SDM Kecamatan.
3. Sulitnya koordinasi antara kecamatan dan desa, mengakibatkan kurangnya keselarasan pembangunan antara desa dan kabupaten.

#### G. Unsur Pemerintahan Umum

##### G.1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan pada Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

1. Masih tingginya kasus penyalahgunaan Narkoba di wilayah Kabupaten Pasuruan, sementara penyuluhan yang dilakukan belum berjalan dengan baik.
2. Masih terjadi konflik di masyarakat dengan berbagai latar belakang (social, ekonomi, maupun agama).

## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada dasarnya disusun dengan tujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Bab ini menyajikan gambaran kondisi ekonomi makro serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2021.

Bab ini juga membahas tentang perkiraan pendapatan dan kemampuan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas di tahun 2021.

#### **3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH**

Kebijakan ekonomi daerah tahun 2021 tidak dapat terlepas dari kondisi ekonomi sebelumnya. Selain itu, penetapan arah kebijakan ekonomi daerah juga dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi nasional dan regional, namun dengan tetap memperhatikan sumber daya yang dimiliki dan potensi ekonomi daerah yang potensial untuk digali. Kondisi ekonomi Kabupaten Pasuruan ditunjukkan melalui beberapa indikator sebagaimana Tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Kondisi dan Perkiraan Perekonomian**  
**Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023**





Indikator	Kondisi 2018	Kondisi 2019	Perkiraan 2020	Perkiraan 2021	Perkiraan 2022
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,75	5.83	5,75 – 6	5.73-6	5.73-6
PDRB per Kapita (Rp. Milyar)	124.979.9	147.977.000	139.633.556	147.592.669	295.185.338
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,11	5.42	5.08	5.04	5.01
Inflasi (%)	2,31	1,99	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1
Kemiskinan (%)	9,45	8.68	9.35	9.30	9.25

Dari data kondisi 2 tahun sebelumnya dan rencana capaian tahun berjalan, serta proyeksi capaian 2 tahun ke depan maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2021, sebagaimana kebijakan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya, dan dengan mempertimbangkan angka perkiraan nasional maupun regional, serta kondisi ekonomi daerah lima tahun terdahulu, maka pertumbuhan ekonomi diproyeksikan pada kisaran 5,75 – 6 persen pada kondisi normal.
2. Pertumbuhan ekonomi sebagaimana ditetapkan dalam point 1 pada saat ini lajunya mengalami perlambatan, dan bahkan pada beberapa sektor juga mengalami pelemahan. Hal ini terjadi sebagai akibat merebaknya pandemi virus corona (Covid-19) yang secara global dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Pandemi ini tidak hanya terkait langsung dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat



semata, namun sebagai implikasinya juga berdampak signifikan secara ekonomi.

3. Melanjutkan langkah-langkah mitigasi, pencegahan dan penanganan atas pandemi wabah covid-19 seperti yang telah diupayakan di tahun 2020, sertaantisipasi terhadap potensi timbulnya dampak ekonomi lanjutan di tahun 2021. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir korban dan kerugian sebagai akibat dari pelemahan sosial ekonomi atas wabah tersebut.
4. Melanjutkan penajaman target dan sasaran program dan kegiatan melalui upaya *refocussing*, *redistributing* dan pemangkasan anggaran agar tepat sasaran, baik sebagai bagian upaya mitigasi dan penanganan atas dampak lanjutan wabah covid-19 ditetapkan beberapa upaya optimis yang bertujuan meminimalisir dampak wabah. Berbagai upaya dalam bentuk kebijakan daerah yang diambil tersebut, antara lain: Melaksanakan penetapan revisi Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029, dengan tujuan menjadi daya tarik bagi masuknya investasi baru, utamanya bagi tumbuhnya industri manufaktur yang padat karya, serta diharapkan mampu membuka kawasan industri di wilayah timur Kabupaten Pasuruan;
5. Melaksanakan penetapan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) yang terintegrasi dalam penetapan revisi Perda RTRW dengan tujuan mempertahankan dan meningkatkan potensi daerah di sektor pertanian. Sektor ini diharapkan masih ampuh sebagai benteng kuat terhadap ketahanan pangan dan ketahanan sosial ekonomi masyarakat kita, yang terindikasi mulai goyah akibat



wabah pandemik ini. Sektor yang secara luas meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan, serta perkebunan ini memang masih menjadi tumpuan mata pencaharian masyarakat.

6. Penguatan ekonomi lokal sekaligus menjadi upaya mengurangi dampak sosial ekonomi atas wabah covid-19 dengan mengembangkan dan penguatan usaha ekonomi masyarakat seperti Usaha Mikro, Industri Kecil Menengah dan Koperasi. Selain itu, juga digunakan media promosi lain seperti penyelenggaraan pameran, even seni dan budaya, dan pengembangan sentra produk unggulan.
7. Mengoptimalkan pelaksanaan program Pusat Strategi dan Pelayanan Ekonomi Maslahat (Satrya Emas) yang didasarkan pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 52 Tahun 2017 dengan tujuan meningkatkan fungsi dan peran tenaga pendamping sebagai mitra pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Pendampingan diberikan secara komprehensif, yaitu mulai dari proses produksi hingga pemasaran. Selain itu, upaya ini juga diharapkan dapat mengembalikan peran usaha mikro dan kecil sebagai jaring penyelamat ekonomi masyarakat, yang elastis (*resilient*) dan liat (*resilience*) dalam menghadapi dampak wabah ini. UMKM juga diharapkan dapat kembali bergerak dan solutif serta menjadi “vaksin” manjur yang dapat mengatasi dampak ekonomi covid-19, meski masyarakat selaku konsumennya lebih banyak berdiam di rumah.
8. Mendorong peningkatan peran pondok pesantren (salah satu kearifan lokal) sebagai motor dalam pengembangan



ekonomi masyarakat, melalui pembinaan koperasi ponpes dan pelatihan bagi santri (Program “Pelasan”).

### **3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional**

Kebijakan Ekonomi Nasional adalah sebuah kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi. Penerapan arah kebijakan ekonomi di daerah harus selaras dengan arah kebijakan ekonomi nasional. Oleh karena itu, perlu dipahami pokok pokok kebijakan pembangunan umum Nasional yaitu :

1. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 sebesar 5,3% yang mengalami peningkatan atau kenaikan sebesar 0,13% dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 5,17% (Data bersumber pada APBN 2019);
2. Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar 5,3%, namun akibat mewabahnya virus korona yang berimbas pada melemahnya laju pertumbuhan ekonomi, sehingga proyeksinya diturunkan menjadi 4,7%. Jika dibandingkan dengan kuartal I tahun 2019 capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,06%, maka kuartal I tahun 2020 terjadi penurunan menjadi sebesar 4,97% (Data bersumber pada APBN 2019 dan APBN 2020, serta BPS);
3. Dalam upaya memperkuat perlindungan sosial dalam penanganan pandemi Covid-19 dilakukan upaya serius dan komprehensif. Upaya ini dilakukan mengingat dampaknya menyentuh banyak aspek, bukan semata aspek kesehatan, namun juga masalah kemanusiaan yang berdampak pada aspek sosial dan ekonomi yang dapat berpengaruh pada fundamental perekonomian nasional. Dari kondisi darurat



tersebut, maka Pemerintah membutuhkan landasan hukum yang kuat bagi upaya mitigasi, antisipasi, reduksi dan penanganan dampak Covid-19 dengan menerbitkan 3 bentuk peraturan perundang-undangan, yang sekaligus juga berfungsi sebagai stimulus ekonomi. Tiga bentuk peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- c. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

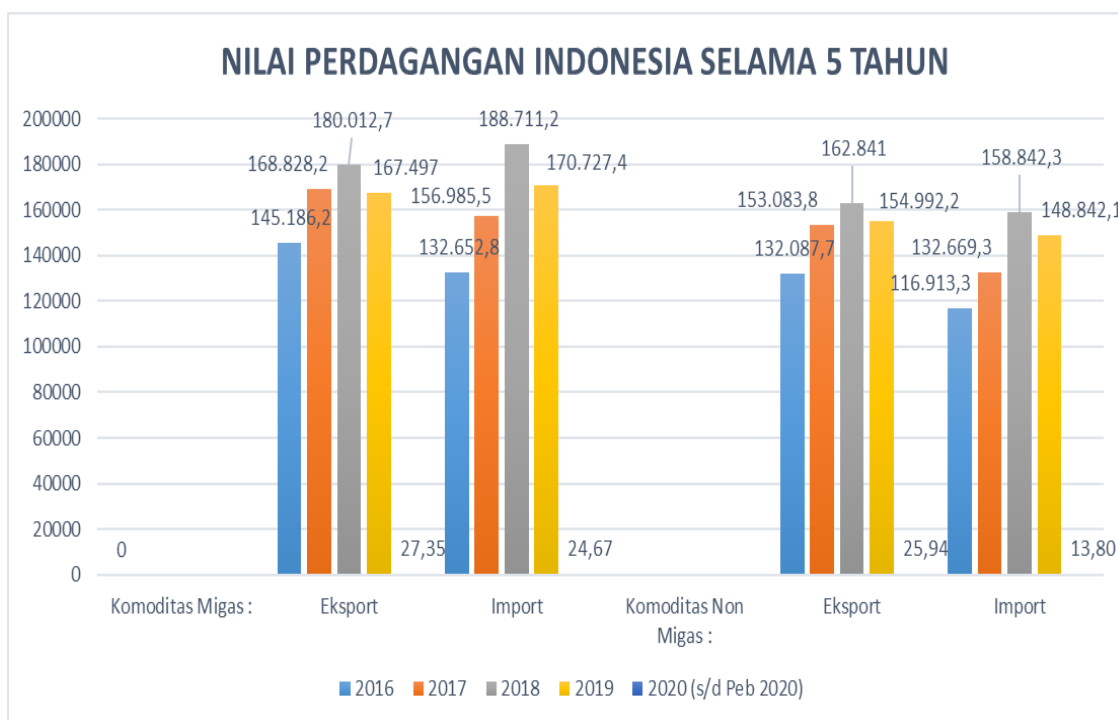
Adapun Neraca Perdagangan Indonesia selama 5 tahun terakhir dapat digambarkan sebagaimana data berikut:

**Tabel 3.2**  
**Neraca Perdagangan Indonesia Selama 5 Tahun**

No	Komoditas	Nilai dalam Juta Dollar
----	-----------	-------------------------



		2016	2017	2018	2019	2020 (s/d Feb 2020)
	Komoditas Migas:					
1.	Ekspor	145.186,2	168.828,2	180.012,7	167.497,0	27,35
2.	Impor	135.652,8	156.985,5	188.711,2	170.727,4	24,67
	Komoditas Non Migas:					
1.	Ekspor	132.080,7	153.083,8	162.841,0	154.992,2	25,94
2.	Impor	116.913,3	132.669,3	158.842,3	148.842,1	13,80



Kecenderungan trend perdagangan migas dan non migas sepanjang 2016 hingga Pebruari 2020 mengalami surplus. Pada tahun 2019 terjadi defisit pada perdagangan migas, namun secara umum di tahun tersebut surplus perdagangan tercapai karena tertutup surplus perdagangan pada komoditi non migas. Trend perdagangan 2 bulan



pertama di tahun 2020 cenderung surplus, namun pandemi wabah covid-2019 di bulan Maret 2020 memaksa perlambatan hingga pelemahan pada kedua komoditas perdagangan tersebut. Adapun Sasaran Pembangunan Indonesia selama 5 tahun terakhir dapat disampaikan dengan penjelasan data sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Sasaran Pembangunan Indonesia Selama 5 Tahun**

No	Sasaran	Target Tahunan Berdasarkan RKP				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,03	5,5 – 5,9	5,2 – 5,6	5,2 – 5,6	5,2 – 5,5
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,2 – 5,5	5,0 – 5,3	5,0 – 5,3	4,8 – 5,2	4,8 – 5,1
3.	Angka Kemiskinan (%)	9,0 – 10,0	8,5 – 9,5	9,5 – 10	8,5 – 9,5	8,5 – 9,0
4.	Rasio Gini (Indeks)	0,41	0,38	0,38	0,38 – 0,39	0,375 – 0,380
5.	Indeks Pembangunan Manusia	70,18	70,81	71,5	71,98	72,51

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat meningkat dari 5,33 persen pada tahun 2016 menjadi 5,5 persen pada tahun 2017 sampai dengan 5.6 persen pada tahun 2018 dan tahun 2019 dan menjadi 5,5 persen sedikit mengalami perlambatan pada triwulan II pada tahun 2020. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia tercatat mengalami penurunan dari 5.5 persen pada tahun 2016 sampai dengan 5.1 persen pada triwulan II di tahun 2020. Penduduk miskin terus menurun dari 9.0 persen di tahun 2016 menjadi 8.5 persen pada triwulan II pada tahun 2020 , Ketimpangan pendapatan terus menurun hal ini ditunjukkan semakin rendahnya ratio gini (Indeks) dari 0.41 persen di tahun 2016 menjadi 0.375 pada triwulan II



di tahun 2020. Serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga tercatat mengalami kenaikan dari 70.18 pada tahun 2016 dan 72.51 pada tahun 2020 di triwulan II , atau masuk dalam status tinggi.

### 3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Sebagai salah satu upaya Kabupaten Pasuruan dalam menyelaraskan dengan arah kebijakan ekonomi Jawa Timur, maka digunakan indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu. Indikator tersebut data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Adapun data PDRB Kabupaten Pasuruan yang digunakan berdasarkan harga berlaku dan dasar konstan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4.**  
**PDRB Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah)**  
**Tahun 2014 – 2018**

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kab. Pacitan	10.492	11.591	12.767	13.810	15.011
2	Kab. Ponorogo	13.394	14.916	16.419	17.760	19.257
3	Kab. Trenggalek	12.297	13.635	14.916	16.117	17.396
4	Kab. Tulungagung	25.781	28.415	31.126	33.740	36.623
5	Kab. Blitar	24.141	26.780	29.335	31.654	34.203
6	Kab. Kediri	27.755	30.498	33.211	35.870	38.722
7	Kab. Malang	65.931	73.842	81.784	89.129	96.998
8	Kab. Lumajang	21.983	24.417	26.652	28.703	30.772
9	Kab. Jember	50.602	56.377	62.513	67.475	72.313





No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
10	Kab. Banyuwangi	53.371	60.179	66.346	72.243	78.037
11	Kab. Bondowoso	13.075	14.486	15.863	17.157	18.527
12	Kab. Situbondo	13.339	14.796	16.281	17.545	18.930
13	Kab. Probolinggo	23.158	25.689	28.067	29.992	32.050
14	<b>Kab. Pasuruan</b>	<b>94.882</b>	<b>104.778</b>	<b>114.883</b>	<b>124.980</b>	<b>135.969</b>
15	Kab. Sidoarjo	131.646	146.081	160.021	174.280	189.282
16	Kab. Mojokerto	53.204	59.185	65.116	70.863	76.769
17	Kab. Jombang	26.339	29.148	31.983	34.940	38.085
18	Kab. Nganjuk	17.244	19.122	21.114	22.892	24.879
19	Kab. Madiun	12.532	13.901	15.227	16.418	17.679
20	Kab. Magetan	12.564	13.880	15.196	16.343	17.673
21	Kab. Ngawi	13.312	14.994	16.530	17.810	19.242
22	Kab. Bojonegoro	50.534	48.606	55.581	64.886	73.889
23	Kab. Tuban	43.802	48.138	52.307	56.501	60.844
24	Kab. Lamongan	25.705	28.746	31.707	34.371	37.333
25	Kab. Gresik	93.798	100.724	107.877	118.619	130.609
26	Kab. Bangkalan	21.709	19.199	20.134	21.675	23.887
27	Kab. Sampang	14.628	14.697	16.245	17.707	19.229
28	Kab. Pamekasan	11.067	12.299	13.528	14.641	15.952
29	Kab. Sumenep	28.311	27.156	28.971	30.578	32.744
30	Kota Kediri	87.704	95.865	106.396	116.060	128.293
31	Kota Blitar	4.354	4.819	5.331	5.802	6.319
32	Kota Malang	46.563	51.824	57.171	62.359	67.935
33	Kota Probolinggo	7.261	8.072	8.888	9.680	10.542
34	Kota Pasuruan	5.346	5.949	6.559	7.125	7.728
35	Kota Mojokerto	4.427	4.882	5.370	5.848	6.354
36	Kota Madiun	9.214	10.192	11.184	12.132	13.190
37	Kota Surabaya	365.351	406.223	451.383	495.026	544.594
38	Kota Batu	10.260	11.510	12.902	14.351	15.801
<b>Provinsi Jawa Timur</b>		<b>1.537,94</b>	<b>1.691,47</b>	<b>1.857,60</b>	<b>2.012,91</b>	<b>2.189,78</b>



**Tabel 3.5.**  
**PDRB Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan**  
**Menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah)**  
**Tahun 2014 – 2018**

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kab. Pacitan	8.582	9.020	9.490	9.963	10.511
2	Kab. Ponorogo	11.105	11.688	12.306	12.933	13.620
3	Kab. Trenggalek	9.999	10.502	11.027	11.580	12.162
4	Kab. Tulungagung	21.265	22.327	23.446	24.637	25.920
5	Kab. Blitar	19.920	20.928	21.991	23.107	24.286
6	Kab. Kediri	22.890	24.008	25.212	26.446	27.789
7	Kab. Malang	52.550	55.318	58.247	61.409	64.823
8	Kab. Lumajang	17.852	18.677	19.555	20.543	21.574
9	Kab. Jember	41.972	44.223	46.534	48.913	51.473
10	Kab. Banyuwangi	42.006	44.530	46.925	49.480	52.371
11	Kab. Bondowoso	10.652	11.180	11.736	12.326	12.953
12	Kab. Situbondo	10.572	11.086	11.641	12.230	12.894
13	Kab. Probolinggo	18.682	19.571	20.504	21.418	22.375
14	<b>Kab. Pasuruan</b>	<b>80.105</b>	<b>84.416</b>	<b>89.011</b>	<b>94.102</b>	<b>99.553</b>
15	Kab. Sidoarjo	106.434	112.013	118.179	125.039	132.599
16	Kab. Mojokerto	44.292	46.792	49.361	52.193	55.248
17	Kab. Jombang	21.793	22.960	24.199	25.497	26.882
18	Kab. Nganjuk	14.143	14.875	15.662	16.486	17.374
19	Kab. Madiun	10.170	10.705	11.269	11.879	12.485
20	Kab. Magetan	10.292	10.824	11.398	11.978	12.607
21	Kab. Ngawi	10.681	11.223	11.808	12.406	13.059
22	Kab. Bojonegoro	39.935	46.893	57.187	63.056	65.835
23	Kab. Tuban	35.520	37.256	39.082	41.038	43.157
24	Kab. Lamongan	21.100	22.317	23.624	24.928	26.300
25	Kab. Gresik	76.336	81.380	85.850	90.856	96.276
26	Kab. Bangkalan	17.369	16.907	17.019	17.619	18.369
27	Kab. Sampang	11.633	11.874	12.607	13.198	13.793
28	Kab. Pamekasan	8.846	9.317	9.816	10.310	10.873
29	Kab. Sumenep	21.477	21.751	22.312	22.950	23.770
30	Kota Kediri	69.233	72.946	76.988	80.946	85.336



No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
31	Kota Blitar	3.650	3.857	4.079	4.315	4.566
32	Kota Malang	39.725	41.952	44.304	46.825	49.502
33	Kota Probolinggo	6.262	6.629	7.018	7.431	7.872
34	Kota Pasuruan	4.561	4.813	5.076	5.354	5.651
35	Kota Mojokerto	3.775	3.991	4.222	4.460	4.719
36	Kota Madiun	7.965	8.455	8.955	9.486	10.052
37	Kota Surabaya	305.948	324.215	343.653	364.715	387.333
38	Kota Batu	8.572	9.146	9.751	10.391	11.066
<b>Provinsi Jawa Timur</b>		<b>1.262,68</b>	<b>1.331,39</b>	<b>1.405,56</b>	<b>1.482,29</b>	<b>1.563,75</b>

Sumber: BPS Jawa Timur dan RPJMD Jatim 2019-2024

**Tabel 3.6.**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan**  
**dan Provinsi Jawa Timur**  
**Tahun 2014 – 2018**

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
PDRB ADHB Kab. Pas (Miliar Rupiah)	94.882	104.778	114.883	124.980	135.969
PDRB ADHK Kab. Pas (Miliar Rupiah)	80.105	84.416	89.011	94.102	99.553
Pertumbuhan Ekonomi Kab. Pasuruan (%)	6,74	5,38	5,44	5,7	5,8
Pertumbuhan Ekonomi Prov. Jawa Timur (%)	5,86	5,44	5,57	5,45	5,50

Pembangunan ekonomi Kabupaten Pasuruan seiring dengan dinamika pembangunan di Jawa Timur. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya besaran angka PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.



### **3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Pasuruan**

Arah kebijakan ekonomi makro Kabupaten Pasuruan tahun 2021 serta strategi umum untuk mencapai arah kebijakan tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis kawasan dan berdaya saing;
2. Upaya optimalisasi perekonomian dengan mendorong pengembangan usaha ekonomi di sektor ekonomi kreatif;
3. Peningkatan infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, terutama yang terkait penggalian dan optimalisasi potensi daerah/kawasan, penguatan regulasi, penguatan sarana dan prasarana;
4. Optimalisasi iklim investasi, utamanya investasi yang bersifat padat karya.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan makro di Kabupaten Pasuruan tahun 2021 terdapat beberapa strategi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 yang terinci sebagai berikut:

1. Memfasilitasi dan menstimulasi tumbuhnya ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan untuk beradaptasi terhadap revolusi industri 4.0;
2. Menciptakan dan menumbuhkembangkan destinasi wisata baru;



3. Mendorong tumbuh kembang dan kemandirian ekonomi kerakyatan dan lembaga ekonomi masyarakat yang terstandarisasi.

### **3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Arah Kebijakan Keuangan Daerah memuat tentang pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

#### **3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Dalam merencanakan pendapatan daerah pada RKPD ini, arahan kebijakan pendapatan Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan *Local Taxing Power* dengan strategi memperluas Basis Pungutan dan Diskresi Penetapan Tarif. Hal ini dapat dilakukan dengan kebijakan yang antara lain meliputi:
  - a. Memperluas Objek (Pajak Hotel, Pajak Restoran);
  - b. Menambah Jenis (Pajak Rokok, BPHTB, PBB-Perkotaan dan Perdesaan);
  - c. Menaikkan Tarif Maksimum (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan);
  - d. Diskresi Penetapan Tarif (daerah bebas menetapkan tarif dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan).
2. Optimalisasi penerimaan dana perimbangan baik yang bersumber dari pemerintah maupun yang bersumber dari pemerintah provinsi, nilai alokasi DAU dan DAK;



3. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, melalui mapping potensi pajak daerah dan retribusi daerah, upaya meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan/mengoptimalkan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah;
4. Meningkatkan upaya pencegahan adanya kebocoran atas pajak dan retribusi daerah melalui mekanisme penyeteroran tepat waktu dan monitoring langsung oleh petugas Badan Keuangan Daerah (BKD) pada sektor-sektor penghasil;
5. Perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana, sumber daya aparatur pengelola. Hal ini dilaksanakan tidak semata-mata didasarkan pada capaian tahun sebelumnya, namun demikian sangat disadari bahwa Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dan retribusi belum sepenuhnya optimal karena peta potensi atas sektor tersebut masih dalam proses up dating dan validasi;
6. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan perangkat daerah penghasil serta Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
7. Mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah;



8. Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pajak sejalan dengan kebijakan pengalihan beberapa pajak pusat dan pajak provinsi menjadi pajak daerah;
9. Mendorong penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah;
10. Melakukan penyesuaian landasan hukum bagi pengenaan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Mengusulkan dan mengajukan formasi pejabat penilai pajak daerah dan PPNS sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan Pemerintah Asli Daerah melalui intensifikasi dan upaya pemutakhiran perhitungan pajak daerah. Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 208/PMK.07/2018 pasal 9;
12. Mempertimbangkan melaksanakan sunset policy di tahun 2021 bagi para penunggak pajak dengan kewajiban mengisikan formulir data tentang diri Wajib Pajak Daerah dikandung maksud juga sebagai upaya menggali alternatif semua potensi penerimaan di daerah. Kebijakan ini dilaksanakan secara periodik dengan jangka waktu pelaksanaan yang panjang dengan waktu pelaksanaan yang tidak dilaksanakan secara beruntun, sehingga azas keadilan tetap dapat diperoleh bagi WPD yang patuh;
13. Penerapan e-informasi dengan membangun aplikasi geotagging yang sudah banyak diterapkan di beberapa daerah. Aplikasi ini dapat menjadi database valid



sebagai upaya peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD), deteksi dini terhadap potensi kenakalan WPD, dan untuk menggali potensi pendapatan daerah, serta sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan strategis;

14. Melaksanakan intensifikasi terhadap penagihan piutang daerah baik melalui upaya penagihan maupun penindakan terhadap piutang daerah yang masih tergambar tinggi pada dokumen RPJMD. Penagihan piutang daerah secara aktif selaras dengan PP No. 12 Tahun 2019 pasal 198;
15. Mempertimbangkan penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam PP No. 12 Tahun 2019;
16. Melaksanakan pemutakhiran data NJOP sehingga dapat diintensifkan perolehan pendapatan dari sisi ini.





**Tabel 3.7**  
**Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**  
**Kabupaten Pasuruan**  
**Tahun 2019 s.d tahun 2023**

NO	URAIAN	Target (Seharusnya realisasi) Tahun 2019	Target (Seharusnya realisasi) Tahun 2020	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target (Dihapus saja) Tahun 2023
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	3.258.476.590.551,6	3.436.524.079.865,0	3.634.630.390.802,7	3.600.069.296.237,2	3.657.246.221.122,8
<b>1.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	643.350.343.365,00	672.658.471.837,22	706.099.741.124,44	741.183.978.602,46	777.992.801.962,77
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	399.618.140.000,00	418.240.000.000,00	440.402.000.000,00	463.672.000.000,00	488.105.000.000,00
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	42.973.842.696,00	43.833.319.549,92	44.709.985.940,92	45.604.185.659,76	46.516.269.372,94
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.222.528.303,00	4.222.528.303,00	4.307.000.000,00	4.393.000.000,00	4.481.000.000,00
1.1.4.	Lain - Lain PAD Yang Sah	196.535.832.366,00	206.362.623.984,30	216.680.755.183,52	227.514.792.942,70	238.890.532.589,83
<b>1.2.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.980.945.604.000,00</b>	<b>1.986.162.862.430,00</b>	<b>1.991.538.246.178,30</b>	<b>1.997.078.634.134,79</b>	<b>2.002.791.238.860,06</b>
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	309.820.375.000,00	315.037.633.430,00	320.413.017.178,30	325.953.405.134,79	331.666.009.860,06
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.222.938.444.000,00	1.222.938.444.000,00	1.222.938.444.000,00	1.222.938.444.000,00	1.222.938.444.000,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	448.186.785.000,00	448.186.785.000,00	448.186.785.000,00	448.186.785.000,00	448.186.785.000,00

NO	URAIAN	Target (Seharusnya realisasi) Tahun 2019	Target (Seharusnya realisasi) Tahun 2020	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target (Dihapus saja) Tahun 2023
1.3.	<b>LAIN -LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>812.228.132.500,00</b>	<b>911.954.403.500,00</b>	<b>936.992.403.500,00</b>	<b>861.806.683.500,00</b>	<b>876.462.180.300,00</b>
1.3.1.	Pendapatan Hibah	156.766.600.000,00	199.530.600.000,00	211.530.600.000,00	122.530.600.000,00	122.530.600.000,00
1.3.2.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi atau Pemda Lain	215.000.000.000,00	217.300.000.000,00	230.338.000.000,00	244.152.280.000,00	258.807.776.800,00
1.3.3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	418.683.517.000,00	418.683.517.000,00	418.683.517.000,00	418.683.517.000,00	418.683.517.000,00
1.3.4.	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda lain	21.778.015.500,00	76.440.286.500,00	76.440.286.500,00	76.440.286.500,00	76.440.286.500,00

## **1.2. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2021 diarahkan pada upaya-upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas;
2. Mengoptimalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
3. Alokasi pengeluaran pembiayaan diprioritaskan untuk pembayaran utang pokok yang jatuh tempo;
4. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun berjalan;
5. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.
6. Mengarahkan pos pembiayaan pada upaya melanjutkan langkah-langkah mitigasi, pencegahan dan penanganan atas pandemi wabah covid-19 seperti yang telah diupayakan di tahun 2020, serta untuk mereduksi potensi timbulnya dampak ekonomi lanjutan pada tahun 2021 agar korban dan kerugian dapat diminimalisir.
7. Pos pembiayaan diarahkan pada upaya *refocussing*, *redistributing* dan pemangkasan agar target dan sasaran dapat meminimalisir dampak lanjutan wabah covid-19 dengan berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

**Tabel 3.15**

**Realisasi, Target, dan Proyeksi Pembiayaan Daerah  
Kabupaten Pasuruan  
Tahun 2019 s.d Tahun 2023**

**(Diganti menjadi Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 s.d Tahun 2022)**

No	URAIAN	Realisasi Tahun 2017 (Dihapus saja)	Target (Seharusnya realisasi) Tahun 2018	Target (seharusnya realisasi) Tahun 2019	Proyeksi (seharusnya realisasi) Tahun 2020	Proyeksi (diganti target saja) Tahun 2021	Target tahun 2022
3.1	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	147.652.902.954,00	71,743,235,917.00	71,743,235,917.00	71,743,235,917.00	71,743,235,917.00	71,743,235,917.00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	150.909.667.037,00	75,000,000,000.00	75,000,000,000.00	75,000,000,000.00	75,000,000,000.00	75,000,000,000.00
3.2	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>						
3.2.1	Penyertaan Modal/ Investasi Pemda	3,256,764,083.00	3,256,764,083.00	3,256,764,083.00	3,256,764,083.00	3,256,764,083.00	3,256,764,083.00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	147.652.902.954,00	71,743,235,917.00	71,743,235,917.00	71,743,235,917.00	71,743,235,917.00	71,743,235,917.00

Sumber : BKD Kabupaten Pasuruan (RPJMD Kab Pasuruan 2018-2023)

## BAB IV

### SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- **Tujuan Dan Sasaran Pembangunan**

Hubungan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang tertera dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dijelaskan sebagaimana dalam Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Hubungan Visi-Misi-Tujuan-Sasaran Pembangunan**  
**dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023**

<b>VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing</b>	
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN/SASARAN</b>
1. Meningkatkan kualitas dan produktifitas sector-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat	TUJUAN 1.1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
	SASARAN 1.1.1. Meningkatnya produktivitas sector-sektor unggulan dengan mendorong perkembangan ekonomi kreatif
	SASARAN 1.1.2. Meningkatnya kunjungan pariwisata
	SASARAN 1.1.3. Meningkatnya kualitas kelembagaan ekonomi masyarakat
	SASARAN 1.1.4. Meningkatnya kemandirian desa
	SASARAN 1.1.5. Meningkatnya ketahanan pangan
	TUJUAN 1.2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

**VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing**

		SASARAN 1.2.1. Meningkatkan kesempatan lapangan kerja baru
		SASARAN 1.2.2. Meningkatnya penanggulangan PMKS
2.	Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial	TUJUAN 2.1. Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum.
		SASARAN 2.1.1. Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda
		SASARAN 2.1.2. Menurunnya konflik SARA
3.	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan.	TUJUAN 3.1. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan
		SASARAN 3.1.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		SASARAN 3.1.2. Menurunnya dampak bencana
		SASARAN 3.1.3. Meningkatnya aksesibilitas wilayah
		SASARAN 3.1.4. Meningkatnya aksesibilitas transportasi
		SASARAN 3.1.5. Meningkatnya pengelolaan sumber daya air
4.	Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi	TUJUAN 4.1. Mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang professional, transparan, akuntabel dan responsif.

**VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing**

	informasi.	SASARAN 4.1.1. Meningkatnya kualitas system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
		SASARAN 4.1.2. Meningkatnya kualitas system keuangan daerah
		SASARAN 4.1.3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
		SASARAN 4.1.4. Meningkatnya profesionalisme ASN
5.	Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan	TUJUAN 5.1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas
		SASARAN 5.1.1. Meningkatnya pelayanan dasar kesehatan
		SASARAN 5.1.2. Meningkatnya pelayanan dasar pendidikan
		SASARAN 5.1.3. Meningkatnya daya beli masyarakat
		SASARAN 5.1.4. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
		SASARAN 5.1.5. Meningkatnya kesetaraan masyarakat
		SASARAN 5.1.6. Meningkatnya peran serta dan eksistensi pemuda

• **Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021**

Prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2021 disusun dengan mengacu dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023, Program Prioritas/Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 – 2029, dan Pokok-pokok pikiran DPRD, serta terjadinya bencana non alam "Pandemi COVID 19" pada tahun 2020 yang ditetapkan sebagai bencana nasional.

#### **4.1. Telaah RPJMN Tahun 2020 -2024**

Dokumen RPJMN 2020-2024 merupakan penerjemahan dari visi-misi dan janji Presiden-Wakil Presiden terpilih. Sehingga dalam penyusunannya perlu memperhatikan dokumen tersebut. Sebagai kelanjutan, percepatan, pengembangan, serta pemajuan dari visi sebelumnya maka dalam periode 5 tahun mendatang maka *Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*. Upaya mewujudkan visi ditempuh dengan sembilan misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam pelaksanaan Misi Nawacita dan dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi yaitu : Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan



Transformasi Ekonomi. Penjabaran dari 5 (lima) arahan utama tersebut adalah :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia.

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

Strategi pencapaian pembangunan SDM melalui peningkatan layanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan produktivitas dan pembangunan karakter.

2. Pembangunan Infrastruktur.

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

Strategi pencapaian pembangunan infrastruktur melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur ekonomi dan pembangunan infrastruktur perkotaan, pembangunan energi ketenagalistrikan, dan pengembangan teknologi informasi

3. Penyederhanaan Regulasi.

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

Strategi pelaksanaan penyederhanaan regulasi melalui penerapan pendekatan *Omnibus Law*, dan pendekatan terhadap regulasi yang akan disusun.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

Strategi pelaksanaan penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan prosedur, penyelenggaraan e-government, reformasi

birokrasi pelayanan publik untuk kegiatan ekspor/impor, kepabeanaan dan kepelabuhan.

5. Transformasi Ekonomi.

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Strategi pelaksanaan transformasi ekonomi melalui industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan rantai produksi global, pengembangan destinasi unggulan, serta penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

Proyek Utama (*Major Project*) yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020 – 2024, antara lain :

1. Sektor Ekonomi

- a. Penyelesaian kawasan pariwisata unggulan yaitu Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok, Labuan Bajo, **Bromo-Tengger-Semeru**, dan Wakatobi.
- b. Penguatan jaminan usaha dan korporasi petani dan nelayan.

2. Sektor Sumber Daya Manusia

- a. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.
- b. Pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.

3. Sektor Infrastruktur

- a. Peningkatan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman.
- b. Penyediaan hunian layak.
- c. Pembangunan akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah).

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial akibat bencana nasional non alam Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020. Dampak pandemi ini sangat dirasakan oleh hampir seluruh sektor ekonomi (industri, pariwisata, jasa dan lain-lain) dan juga berdampak pada sektor

sosial atau kehidupan masyarakat dengan banyaknya PHK, penurunan daya beli masyarakat, dan bertambahnya jumlah orang miskin. Oleh karena itu Tema RKP Tahun 2021 adalah "**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**". Dengan fokus pembangunan :

1. Pemulihan industri, pariwisata dan investasi.
2. Reformasi sistem kesehatan nasional.
3. Reformasi sistem perlindungan sosial.
4. Reformasi sistem ketahanan bencana.

Selain fokus pembangunan di atas, yang juga menjadi perhatian Pemerintah (sebagai antisipasi dampak pandemi Covid-19) adalah Penguatan Sistem Ketahanan Pangan, yang akan dilaksanakan melalui :

- a. Memperkuat korporasi petani dan distribusi pangan.
- b. Bantuan pangan untuk rumah tangga rawan pangan.
- c. Ketersediaan pangan untuk mencukupi kebutuhan/permintaan pangan.
- d. Stabilitas akses pangan.
- e. Meningkatkan lingkungan yang kondusif bagi penembangan industri pangan lokal.

#### **4.2. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024**

Visi pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2019-2024 adalah :

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG"

Dengan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan

Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.

3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, untuk tahun 2021 adalah :

”Peningkatan dan pemerataan kualitas SDM untuk mendukung daya saing daerah untuk menyambut era industri perdagangan dan jasa berbasis agro guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat”

Sedangkan arah kebijakan pembangunan yang merupakan keterpaduan pembangunan antarsektor guna menciptakan daya saing daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah :

1. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan pendidikan, pengembangan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.
2. Pengembangan dan peningkatan sektor unggulan dalam mengembangkan perekonomian yang produktif, efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan, peningkatan nilai tambah sektor primer dengan hilirisasi produk unggulan, peningkatan kerjasama antar daerah dalam pengembangan kawasan, penyederhanaan regulasi untuk kemudahan investasi, peningkatan akses masyarakat terhadap sumber pendanaan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.

3. Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, peningkatan pengelolaan limbah, pengoptimalan dukungan pendanaan pembangunan.

Dalam arahan koridor dan poros pengembangan Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan termasuk dalam rencana Pengembangan Kota Menengah di Madiun-Nganjuk-Kediri-Jombang-Pasuruan-Situbondo (Jalur Tengah dan Utara Tapal Kuda). Selain itu Kabupaten Pasuruan termasuk dalam rencana Wilayah Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo-Tengger-Semeru dengan kegiatan prioritas Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru dan sekitarnya, konektivitas wisata desa (koridor wisata) sekitar Bromo-Tengger-Semeru, dan pengembangan *Tourism Center of Excellence*.

Kesejahteraan masyarakat tercermin dari peningkatan cakupan pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan), pengembangan peningkatan sektor unggulan (pengurangan kemiskinan) dan pemerataan pembangunan antar wilayah. Berdasarkan kondisi sosial ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur, didapatkan prioritas lokasi penanganan kewilayahan Provinsi Jawa Timur dengan fokus Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Pasuruan. Dalam rangka pengembangan wilayah dengan memanfaatkan potensi daerah sehingga meningkatkan nilai tambah pada wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah dan untuk peningkatan keterkaitan kantong-kantong produksi utama di Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran. Selain itu untuk membangun sumber-sumber pertumbuhan baru, dilakukan dengan penciptaan pusat-pusat kegiatan perwilayahan yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur, tidak hanya terpusat pada kawasan utara.

Pusat-pusat kegiatan yang tercipta diharapkan akan mampu memberikan efek penyebaran kegiatan di seluruh wilayah Jawa Timur dan juga dapat memberikan efek positif terciptanya kegiatan – kegiatan ekonomi baru pada pusat – pusat kegiatan dimaksud.

Klaster kewilayahan ditetapkan menjadi dasar sasaran kebijakan pengembangan kewilayahan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya di seluruh wilayah Jawa Timur. Penetapan klaster dirumuskan berdasarkan arah pembangunan kewilayahan Jawa Timur yaitu sebagai Pusat Agrobisnis terkemuka yang disinkronisasikan dengan Agenda Pembangunan Tahun 2019-2024 yang difokuskan pada pemerataan pembangunan melalui penciptaan pusat-pusat pertumbuhan dengan peningkatan dan penyediaan infrastruktur pendukung. Adapun pembagian klaster kewilayahan dan arahan masing-masing strategi kewilayahan dalam rangka penekanan terhadap kondisi kesenjangan wilayah yang terjadi di Jawa Timur, terbagi ke dalam 8 (delapan) klaster. Adapun Kabupaten Pasuruan termasuk dalam Klaster Metropolitan terdiri dari Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan. Klaster ini terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu sektor perdagangan dan jasa serta industri pengolahan.

**Arahan pengembangan pada Klaster Metropolitan adalah:**

- a. Aspek Sosial: Klaster Metropolitan terbentuk dari wilayah yang memiliki latar belakang yang sama yaitu merupakan daerah industrialisasi. Di daerah industri mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat urban dan cenderung heterogen. Masyarakat yang tinggal di daerah kawasan metropolitan ini adalah masyarakat plural yang berasal dari berbagai suku, namun tetap ada suku yang dominan di kawasan Metropolitan. Di Kawasan Metropolitan wilayah Jawa Timur mayoritas didominasi oleh masyarakat Suku Jawa, walaupun ada berbagai macam suku yaitu Madura, Batak, Bali, Sunda, dan Sulawesi serta berbagai

macam suku yang ada di Nusantara. Ciri khas masyarakat Metropolitan adalah cenderung mempunyai pemikiran yang rasional dan berdasarkan logika, demokratis, toleran dan suka menolong orang lain, namun demikian masyarakat di kawasan Metropolitan sangat menjunjung tinggi nilai hukum. Semua permasalahan yang ada di masyarakat diselesaikan secara hukum. Di kawasan Metropolitan aspek sosial dan ekonomi masyarakatnya bergerak dinamis karena wilayah Metropolitan merupakan tujuan bagi masyarakat dari daerah perdesaan. Program dan kegiatan yang mementingkan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia lebih diutamakan dari pada program dan kegiatan yang bersifat peningkatan materi. Hal itu dikarenakan masyarakat di wilayah ini cenderung mempunyai sifat yang mandiri dan tidak ada ketergantungan dengan pihak manapun sehingga beberapa Industri Kecil Menengah atau Usaha Mikro Kecil Menengah tumbuh di wilayah ini. Di daerah klaster Metropolitan ini, terdapat beberapa kondisi, sisi positifnya yaitu penduduk di klaster ini memiliki pergerakan perekonomian yang cukup tinggi sehingga pertumbuhan ekonomi juga tinggi selanjutnya indeks pembangunan manusia tinggi, namun demikian di sisi yang lain kebanyakan penduduk di wilayah ini mempunyai tingkat pengangguran yang tinggi disertai dengan kesenjangan pendapatan yang tinggi pula, oleh karena itu diperlukan beberapa alternatif kebijakan seperti Pembentukan kerjasama antar dinas terkait dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat; Pengembangan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja; dan pengembangan program penanggulangan kemiskinan yang terpadu, lintas dan antar sektor.

- b. Aspek Ekonomi : Penyederhanaan regulasi untuk mendorong kemudahan investasi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan; Pengembangan koridor 4.0 Surabaya-Malang;

Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber pendanaan untuk meningkatkan akses terhadap produksi, teknologi informasi, pemasaran maupun akses permodalan; dan Peningkatan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif dan pengendalian tingkat inflasi daerah; dan

- c. Aspek Infrastruktur : Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik; Peningkatan pengelolaan berbagai limbah yang mempengaruhi kelestarian daerah aliran sungai; dan Pengoptimalan dukungan pendanaan pembangunan serta operasi dan pemeliharaan infrastruktur melalui kemitraan stakeholder.

Selain itu, dalam rencana pengembangan kawasan strategis prioritas pembangunan ekonomi Jawa Timur, **Kabupaten Pasuruan termasuk dalam beberapa kawasan rencana, yaitu : kawasan peruntukan industri, kawasan pertanian terpadu berbasis korporasi, dan kawasan agropolitan klaster Bromo-Tengger-Semeru (BTS).**

#### **4.3. Telaah Proyek Strategis Nasional**

Pada tahun 2019 Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Timur, yang merupakan bagian integral perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Percepatan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan lintas selatan merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Rencana induk ini merupakan upaya optimasi konektivitas infrastruktur dan pemerataan ekonomi,



arah pembangunan nasional telah berorientasi pada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berdaya saing; pembangunan berbasis kewilayahan guna mengurangi kesenjangan; peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter; serta penguatan infrastruktur yang berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah.

Kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Timur melalui pemantapan sistem perkotaan PKN sebagai kawasan metropolitan dan peningkatan keterkaitan dengan sentra-sentra produksi utama di Provinsi Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagai inti pengembangan sistem agropolitan dan minapolitan. Berdasarkan hal tersebut, maka Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi (RIPPE) Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan telah sejalan dengan arah pembangunan nasional, arah kebijakan umum dalam RPJMD 2019-2024, dan RTRW 2011-2031 khususnya terkait peningkatan konektivitas dan sistem transportasi antar wilayah dan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mengingat dinamika kewilayahan yang mempengaruhi perubahan arah pengembangan wilayah dalam perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan wilayah, maka akan dilakukan penyesuaian rencana tata ruang wilayah dengan RIPPE Jawa Timur.

Guna mendukung percepatan pembangunan ekonomi, penguatan konektivitas antar wilayah dilakukan oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, yang diwujudkan dalam bentuk:

- a. Merealisasikan sistem yang terintegrasi antara logistik nasional, sistem transportasi wilayah, pengembangan wilayah, serta sistem komunikasi dan informasi;
- b. Identifikasi simpul- simpul transportasi (transportation hubs) dan distribution centers untuk memfasilitasi kebutuhan logistik bagi komoditi utama dan penunjang;

- c. Penguatan konektivitas intra dan antar pusat-pusat kegiatan ekonomi serta konektivitas nasional dan internasional; dan
- d. Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, dan sektor pendidikan.

Selain penguatan konektivitas, percepatan pembangunan ekonomi dilakukan melalui optimalisasi pusat kegiatan ekonomi yang telah ada di Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan cara penguatan infrastruktur. Penguatan infrastruktur dilakukan untuk kawasan-kawasan yang sudah memiliki pusat-pusat ekonomi terbangun, namun dapat ditingkatkan kontribusinya melalui penambahan infrastruktur. Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru dilakukan dengan dukungan infrastruktur yang telah ada ditambah dengan infrastruktur tambahan untuk mendukung pusat pertumbuhan baru. Pengembangan dilakukan untuk kawasan-kawasan yang aktivitas ekonominya belum optimal, dan perlu didorong untuk menciptakan kesejahteraan dan memajukan pemerataan ekonomi.

Terdapat dua pendekatan yang akan diterapkan dalam percepatan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Timur, yaitu pendekatan untuk pusat pertumbuhan yang telah ada dan pendekatan pengembangan pusat pertumbuhan baru. Pendekatan pusat pertumbuhan yang telah ada memerlukan penguatan infrastruktur, dilakukan pada kawasan-kawasan yang sudah memiliki pusat-pusat ekonomi terbangun, yang dapat ditingkatkan kontribusinya melalui penambahan infrastruktur. Pendekatan ini diterapkan untuk:

- a. Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila, meliputi Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Tuban dengan fokus pada bidang industri, khususnya yang bersifat capital-intensive serta memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) terdidik dan terlatih, dan hub arus barang dan orang. Kawasan Prioritas

Gerbangkertosusila didorong dengan pengembangan kawasan pendukung yaitu Kawasan Pendukung Madura dan Kepulauan. Kawasan Pendukung Madura dan Kepulauan, meliputi Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Sumenep dengan fokus pengembangan pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pengelolaan energi, dan pariwisata;

- b. **Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru, meliputi Kabupaten Pasuruan**, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Batu, Kota Malang, dan Kota Probolinggo dengan **fokus utama pada sektor pariwisata, dan agroproduksi dan agroindustri**. Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru didorong dengan pengembangan Kawasan Pendukung Selingkar Ijen. Kawasan Pendukung Selingkar Ijen, meliputi Kabupaten Jember, Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo dengan fokus pengembangan pada sektor pariwisata, pertanian, dan perkebunan; dan
- c. Kawasan Prioritas Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, meliputi Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Pacitan dengan fokus utama agroproduksi dan agroindustri, serta sektor pariwisata.

Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru (BTS) merupakan kawasan yang terdiri atas wilayah inti dan kawasan pendukung yang ada di sekitarnya, dimana secara administrasi terdiri atas 3 (tiga) kota dan 4 (empat) kabupaten, yaitu Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Pasuruan.

Wilayah inti Kawasan BTS adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN BTS) yang didasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 178/ Menhut-II/2005 tanggal 29 Juni 2005 seluas 50.276,2 hektar.

Wilayah TN BTS terletak di dataran tinggi dengan karakter wilayah pegunungan yang terdiri dari kompleks Pegunungan Tengger di utara dan kompleks Gunung Jambangan di sebelah selatan. Secara geografis wilayah TN BTS terletak antara 7'54' - 8'13' LS dan 112"51' - 113"04' BT. Wilayah ini memiliki karakter khas berupa padang pasir, serta ekologi alam pegunungan dan budaya masyarakat setempat (Suku Tengger). Oleh sebab itu kawasan ini merupakan destinasi wisata yang khas dan menarik untuk ditingkatkan pengembangan destinasi wisatanya. Kawasan BTS beriklim tropis, dengan suhu udara rata-rata 21 - 31 derajat Celcius. Wilayah Kabupaten Malang mempunyai suhu udara relatif lebih sejuk, sedangkan untuk Kabupaten Probolinggo memiliki usaha paling tinggi. Curah hujan rata-rata kurang lebih 1.700 mm/tahun. Potensi ketersediaan air di Kawasan BTS saat ini bergantung pada air permukaan berupa sungai yang merupakan bagian dari Wilayah Sungai Brantas, Wilayah Sungai Welang Rejoso, Wilayah Sungai Pekalen Sampean dan Wilayah Sungai Bondoyudo Bedadung. Kawasan BTS dikelilingi oleh beberapa gunung api aktif sehingga termasuk dalam kawasan rawan bencana gunung api. Sektor unggulan di Kawasan BTS adalah potensi-potensi wisata yang beragam dan menyebar, baik wisata alam dan wisata budaya misalnya, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN BTS) memiliki potensi sumber daya alam yang menonjol, seperti keberadaan flora langka yang menarik dan endemic, ekosistem yang khas gunung berapi yang aktif, habitat satwa migran, fenomena/gejala alam yang unik dan menakjubkan seperti kaldera di dalam kaldera, ranu/danau yang sangat luas dan indah di atas pegunungan, keunikan Kaldera Tengger dengan laut pasirnya, budaya dan adat istiadat khas masyarakat Suku Tengger. Pemandangan kawah Bromo yang indah dan mempesona disaksikan secara dekat maupun dari titik penanjakan, kemudian adanya lautan pasir dan padang savanna yang mempesona. Di bidang Agropolitan memiliki panorama alam yang unik, seperti lahan pertanian di Tosari, Argosari, dan lain-lain. Sektor budaya memiliki event tradisi budaya yang melembaga di

masyarakat (terutama masyarakat Tengger), seperti: Karo, Yadnya Kasodo, Entas-entas, Unan-unan, Pujan Mubeng, dan lain-lain. Permukiman Suku Tengger yang memiliki ciri khas khusus sehingga bisa dijadikan sebagai objek tujuan wisata yang memiliki arsitektur vernacular. Selain itu fasilitas rekreasi yang beraneka ragam seperti taman rekreasi, kolam renang tempat berkemah, lapangan golf, dan lain-lain yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dan dapat membantu mengurangi kelebihan pengunjung di TN BTS, dimana di beberapa tempat telah melebihi kapasitas daya dukung lahan.

Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang berdampak pada diprioritaskannya program-program pembangunan di wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur maupun program peningkatan kegiatan ekonomi yang mendukung kegiatan pariwisata telah menjadi prioritas dalam perencanaan K/ L.

Pengembangan ekonomi berbasis pengembangan kawasan ekonomi tematik berupa Agropolitan (termasuk agrowisata) dan Minapolitan, serta pengembangan Koridor dan Gugus Wisata, merupakan konsep yang tepat terutama terkait upaya pemerataan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Pengembangan Agropolitan dan Minapolitan dapat menjangkau wilayah-wilayah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan.

Sebagai destinasi wisata alam, wilayah TN BTS harus dijaga keberlanjutannya agar tidak terjadi degradasi lingkungan yang tentunya mempengaruhi kualitas obyek wisata tersebut. Dengan demikian daya dukung lingkungan menjadi salah satu parameter untuk membatasi kegiatan yang dilakukan di wilayah TN BTS. Di sisi lain, obyek wisata lainnya seperti wisata agro maupun budaya menjadi potensi untuk lebih ditingkatkan. Keberagaman jenis obyek wisata tersebut menjadi potensi untuk lebih mengembangkan kegiatan pariwisata di Kawasan BTS;

Kawasan BTS yang mempunyai peran sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang terletak di Kota Malang dan pada Sistem Perkotaan

meliputi kawasan Kota Malang - Kota Sidoarjo - Kota Mojokerto. Selain itu untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada di Kota Probolinggo. Serta Pusat Kegiatan Lokal berada di Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan dan Kota Batu.

Berdasarkan kondisi saat ini dan arah perkembangan ekonomi di Kawasan BTS, pembangunan Kawasan BTS akan diprioritaskan pada kegiatan pariwisata baik di wilayah inti TN BTS maupun kawasan sekitarnya. Selain itu, dengan memanfaatkan potensi perkebunan di sekitarnya, pembangunan di Kawasan BTS juga akan diprioritaskan pada kegiatan agroproduksi dan agroindustri dengan memanfaatkan pusat kegiatan pariwisata sebagai pusat distribusi hasil dari agroproduksi dan agroindustri.

Kegiatan ekonomi yang layak menjadi pemicu pertumbuhan di Kawasan BTS adalah Pariwisata, baik melalui Pengembangan area inti dan hinterland KSPN BTS, maupun pengembangannya di wilayah terpilih BOP BTS, Pembangunan Bromo Vulcanic Park, **Tengger Culture Centre**, Ranu Pane dan Ranu Gumbolo serta banyaknya air terjun seperti Madakaripura atau Kampung Sewu. Area hinterland BTS juga sampai kepada wilayah Batu yang juga kuat dalam pengembangan Agrowisata dan termasuk KEK Singhasari untuk mendukung kegiatan ekonomi.

Program agropolitan/minapolitan yang mendukung percepatan Kawasan BTS memiliki berapa sasaran kegiatan di antaranya: Pengembangan Agropolitan Poncokusumo - Tirtoyudo - Ampelgading, Pengembangan Agropolitan Wajak Tumpang - Jabon - Kabupaten Malang, Sub Terminal Agrobis - Kabupaten Malang, Minapolitan Sendangbiru - Kabupaten Malang, Pengembangan Agropolitan Senduro-Candipuro- Pasrujambe-Gucialit - Kabupaten Lumajang, Pengembangan Agropolitan Sukapura-Lumbang-Sumber - Kabupaten Probolinggo, Pengembangan Agropolitan Krucil - Kabupaten Probolinggo, **Pengembangan Agropolitan Tosari-Tutur-Puspo - Purwosari - Kabupaten Pasuruan, Pengembangan Agropolitan Wonosari -**

***Andonosari - Kabupaten Pasuruan, Penataan dan Pengembangan kawasan minapolitan - Kabupaten Pasuruan, Penataan dan pengembangan wisata edukasi peternakan Purwosari dan Penataan Kawasan Pusat Pelayanan Peternakan (UPA) - Kabupaten Pasuruan, Pengembangan Agropolitan Kota Probolinggo - Kota Probolinggo, Pembangunan Pasar Agro dan Pasar Tradisional Triwung Kidul - Kota Probolinggo, Revitalisasi/Pembangunan Rumah Khusus Nelayan - Kota Pasuruan, Pembangunan Gudang dan Cold Storage Pertanian - Kota Batu, Pengembangan Pertanian Organik Berbasis Potensi Unggulan Desa - Kota Batu, Pengembangan Integrated Farming - Kota Batu serta Agrowisata Batu Kota Batu.***

#### **4.4. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pasuruan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, serta arah pembangunan daerah dari tahun 2018 sampai 2023. RPJMD ini lebih lanjut setiap tahun dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan merupakan rencana pembangunan tahunan daerah.

Dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 tertuang Visi Bupati dan Wakil Bupati adalah *"Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing"* yang dijabarkan dalam 5 (lima) Misi, 6 (enam) tujuan dan 24 (dua puluh empat) sasaran. Dalam rangka mengimplementasikan Visi dan Misi pembangunan daerah agar lebih menarik, mudah dikenal dan diingat oleh masyarakat, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan telah menetapkan beberapa program unggulan yang dijadikan sebagai 'JARGON' pembangunan yaitu :

- a. Satria Emas (Pusat Strategi dan Layanan Ekonomi Maslahat)
- b. Pelasan (Pelatihan Santri)
- c. Perwira Keluarga (Perempuan Wirausaha Berbasis Keluarga)

- d. Gerakan Yuk Nonggo (Ayo Tuku nang Tonggo)
- e. Agawe (Ayo ng-Gawe WC)
- f. Pasuruan Podo Roso
- g. Kenduren Mas (Kendaraan Urun Rembug Perencanaan Masyarakat)
- h. Kemisan (Koordinasi Pengentasan Kemiskinan)
- i. SDSB (Satu Desa Satu Bank Sampah)
- j. Pemuda Pelopor Pembangunan Desa (P3D)
- k. Sakera Jempol
- l. Adus Kali (Menelusuri Potensi Sungai dari Hulu sampai Hilir)
- m. Rumahku Surgaku
- n. Wak Moqidin (Waktune Kumpul Mbangun TPQ dan Madin)
- o. ODHA LINK
- p. Pusaka
- q. Surya Mas Jelita
- r. Pasuruan Gumuyu

Panduan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pasuruan lima tahun ke depan guna mengoptimalkan pencapaian tujuan dituangkan dalam bentuk arah kebijakan. Selain sebagai panduan pelaksanaan pembangunan, arah kebijakan digunakan sebagai pedoman dalam menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode tahun 2018 – 2023. Arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

**Tabel 4.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 – 2023**

Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Pembangunan Berbasis Keluarga dan Pendidikan Karakter	Peningkatan Kualitas SDM dan Pelayanan Publik	<b>Konektivitas Infrastruktur</b>	Kelembagaan Ekonomi Desa	Nilai Tambah Ekonomi dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan



#### **4.5. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 – 2029**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 – 2029 tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010, yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata serta selaras dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemerataan pembangunan.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Pasuruan meliputi :

1. Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah kabupaten.
2. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah kabupaten.
3. Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis kabupaten.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah memuat: kebijakan pengembangan struktur ruang, strategi pengembangan pusat pelayanan, dan strategi pengembangan prasarana wilayah. Strategi pengembangan pusat pelayanan memuat :

1. Mendorong pertumbuhan wilayah perdesaan yang lebih mandiri.
2. Meningkatkan aksesibilitas antar perdesaan dan perkotaan.
3. Mengintegrasikan pusat pengembangan baru dan lama sebagai satu sistem perkotaan khususnya sekitar pintu jalan tol dan pusat industri.
4. Membangun, mengembangkan dan mengintegrasikan jalur kawasan tujuan pariwisata dan daya tarik wisata secara optimal dan sinergi dengan perkembangan wilayah.
5. Mengembangkan kawasan agrowisata, ekowisata, agropolitan dan minapolitan sebagai andalan pengembangan kawasan perdesaan di

wilayah Kabupaten Pasuruan.

Dalam lampiran Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 – 2029, tertuang tahapan pelaksanaan pembangunan (indikasi program). Beberapa indikasi program yang berkaitan dengan tahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 antara lain:

- a. Pengembangan agrowisata dan sistem agropolitan pada kawasan potensial.
- b. Pengembangan pusat desa berhierarki.
- c. Pengembangan produk unggulan perdesaan.
- d. Pengembangan kawasan lahan abadi pertanian pangan.
- e. Pengembangan sistem minapolitan pada kawasan potensial.

#### **4.6. Telaah Pokok-pokok Pikiran DPRD**

Dalam rangka penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021, diperlukan pandangan dari pihak legislatif yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD. Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Pasuruan untuk RKPD Tahun 2021 adalah:

1. Agar Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyelesaikan program-program yang belum tuntas pada periode sebelumnya baik yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana, pengurangan disparitas wilayah, revisi tata ruang, lingkungan hidup maupun kepariwisataan.
2. Mengoptimalkan program pembangunan dengan memperhatikan potensi lokal, posisi strategis di tingkat regional maupun nasional serta sinergitas dengan daerah lain.
3. Program-program pembangunan yang dikemas dengan berbagai jargon, pengembangan Kabupaten Layak Anak, penyelenggaraan angkutan sekolah gratis dan lain-lain, harus ditransformasikan menjadi aksi nyata sesuai kondisi riil di lapangan dan permasalahan

yang dihadapi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan sangat mendukung dan terus mendorong penerapan aplikasi dan konektivitas dalam perencanaan dan penganggaran melalui E-Planning, E-Budgeting, E-Pokir dan aplikasi lainnya.
5. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan profesional, hendaknya diawali dengan penataan personil yang berkompeten di bidangnya serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan panduan, indikator dan ukuran yang jelas.
6. Kualitas pelayanan terutama yang terkait dengan kebutuhan fisik dasar dan kebutuhan administrasi dasar agar terus diperbaiki dengan menciptakan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang didukung oleh sistem dan prosedur yang cepat, mudah, murah dan tidak berbelit.
7. Peningkatan dan penyebarluasan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat, terkait penyelenggaraan pemerintahan dan program-program pembangunan, hasil yang dicapai maupun permasalahan yang dihadapi sehingga dapat diakses langsung oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan, saran dan solusi secara langsung dan terbuka.
8. Kebijakan yang berkaitan dengan investasi, utamanya tentang Tata Ruang Wilayah, agar segera direalisasikan agar Kabupaten Pasuruan dapat menangkap peluang-peluang potensi investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **4.7. Prioritas Pembangunan Daerah**

Prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan atau Tema Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 ditentukan dengan memperhatikan dan mengacu pada Tema RKP Tahun 2021 dan Tema RKPDP Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2013, RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 – 2029 dan

dokumen proyek strategis nasional (Perpres Nomor 80 Tahun 2019), serta eksistensi kondisi dan potensi daerah Kabupaten Pasuruan, memperhatikan hasil evaluasi, isu strategis (*khususnya terjadinya pandemi Covid 19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional*), rancangan kerangka ekonomi kerangka pendanaan serta dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan tahun 2021, maka tema/fokus pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2021 adalah:

***”Peningkatan Konektivitas Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Dasar, dalam rangka Percepatan Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat”***

Persandingan Tema RKP Tahun 2021, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 dan Tema RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 4.3.**  
**Persandingan Tema RKP, RKPD Provinsi Jawa Timur dan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2021**

Tema RKP Tahun 2021	Tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021	Tema RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2021
Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat, dengan Fokus pada Industri, Pariwisata, Investasi, dan Penguatan Sistem Kesehatan Nasional	Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Pemulihan Industri, Pariwisata, Investasi, Kesehatan, dan Infrastruktur di Jawa Timur	Peningkatan Konektivitas Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Dasar, dalam rangka Percepatan Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat

Konektivitas infrastruktur memiliki arti bahwa pembangunan infrastruktur tidak berdiri sendiri, tetapi harus terkait dengan kawasan produktif seperti kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan

pertanian, kawasan pariwisata, dan kawasan ekonomi lainnya. Selain itu, arti dari konektivitas infrastruktur, utamanya untuk infrastruktur utama yaitu prasarana jalan dan prasarana SDA, pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten harus disambungkan dengan sistem yang menjadi kewenangan provinsi dan pusat. Dalam arti pembangunan infrastruktur yang dilakukan bersifat saling terkait dalam satu sistem dan tidak dilakukan secara partial. Mengacu pada isu-isu strategis nasional, regional maupun lokal, maka pembangunan infratraktur di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021 diprioritaskan pada infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi produktif dan menghubungkan antar kawasan ekonomi, infrastruktur penunjang pelayanan dasar, serta terkait atau berkesinambungan dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Selain infrastruktur utama, prasarana jalan dan SDA, dalam rangka pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat konektivitas infrastruktur juga harus memprioritaskan pengembangan konektivitas transportasi antar kawasan ekonomi, serta infrastruktur teknologi informasi (IT) guna mendukung pengembangan promosi potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik.

Sedangkan pelayanan dasar adalah pelayanan publik yang harus disediakan oleh Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pelayanan dasar terdiri atas pendidikan, kesehatan, perumahan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Beberapa pelayanan dasar di Kabupaten Pasuruan masih belum mencapai hasil yang memuaskan, diantaranya adalah pencapaian akses air minum, akses sanitasi layak, penyediaan permukiman layak huni (masih ada beberapa wilayah yang termasuk kategori permukiman kumuh), juga akses pelayanan kesehatan dan ketersediaan sarana prasarana kesehatan yang terjangkau masyarakat.

Terjadinya pandemi Covid 19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional, dimana untuk mencegah penyebarannya Pemerintah Indonesia

menerapkan kebijakan phisycal distancing dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sedangkan beberapa negara menerapkan kebijakan *lock down* atau penutupan wilayah (sebagian maupun keseluruhan negara). Phisycal distancing adalah pembatasan pertemuan-pertemuan dan kerumunan masyarakat, sedangkan PSBB selain pembatasan pertemuan dan kerumunan masyarakat, juga dilakukan pembatasan bahkan penghentian pada beberapa aktifitas ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang diambil ini mengakibatkan menurunnya atau berhentinya aktifitas perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal ini berdampak pada terjadinya sebagian karyawan yang dirumahkan untuk sementara waktu dan pemutusan hubungan kerja (PHK), yang mengakibatkan naiknya angka pengangguran dan angka kemiskinan, serta menurunnya daya beli masyarakat.

Salah satu ***upaya dalam meningkatkan ketahanan ekonomi*** adalah dengan *menggerakkan roda ekonomi melalui ekonomi kreatif* yakni sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan menciptakan ide dan gagasan yang bisa dikembangkan guna meningkatkan perekonomian. Oleh karena itu, ***salah satu prioritas*** yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada ***tahun 2021*** adalah ***membangkitkan kembali aktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi kawasan, khususnya usaha mikro, pariwisata dan ekonomi kreatif***. Selain itu juga harus ***menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif dalam upaya membangkitkan sektor industri dan manufaktur***.

Berdasarkan dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2021 adalah :

1. *Peningkatan sistem kesehatan dan pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat*, dengan lebih mengedepankan upaya preventif dan promotif melalui penguatan gerakan masyarakat melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (air bersih, sanitasi, cuci tangan

pakai sabun, olahraga, kesehatan lingkungan, kawasan sehat), penguatan protokol kesehatan dan penguatan sumber daya kesehatan. Didukung dengan peningkatan akses sanitasi/jamban keluarga melalui gerakan “Ayo ng-Gawe WC”, peningkatan akses air bersih, pengelolaan sampah berbasis keluarga dengan gerakan 3-R dan SDSB (pembentukan bank sampah pada tiap-tiap desa), dan fasilitasi rehab rumah tidak layak huni.

2. *Penguatan ketahanan pangan* melalui penguatan korporasi petani dan distribusi pangan, bantuan pangan untuk rumah tangga rawan pangan, menjamin ketersediaan untuk mencukupi kebutuhan/permintaan pangan, stabilitas akses pangan, dan meningkatkan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan industri pangan lokal, serta menggalakkan pemanfaatan pekarangan rumah sebagai area budi daya pertanian (sayur mayur, buah, ikan, ternak) atau dikenal sebagai KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari). Dalam penguatan ketahanan pangan hal yang tidak kalah penting harus diperhatikan adalah dukungan pelayanan dan prasarana irigasi (pengairan) yang baik, peningkatan SDM petani (pangan, hortikultura, petani ikan dan peternak) serta ketersediaan saprodi dalam jumlah yang cukup dan terjangkau.
3. *Pemulihan sektor ekonomi produktif berbasis masyarakat* (peningkatan dan pengembangan sektor usaha mikro dan kecil, serta industri kecil) melalui peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha mikro/kecil dan industri kecil, penguatan kelembagaan pelaku usaha dan fasilitasi kerja sama antar pelaku usaha, inovasi produk, branding produk, pemanfaatan media sosial/teknologi informasi untuk pemasaran maupun transaksi online, fasilitasi pemasaran dan pembiayaan usaha oleh pemerintah (stimulus bantuan modal). Selain itu, untuk wilayah perdesaan perlu didorong pembentukan BUMDES dan kerja sama BUMDES antar desa sebagai roda penggerak ekonomi perdesaan.

#### 4. *Pemulihan sektor pariwisata*

Dalam pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat, sektor wisata diharapkan bisa menjadi sektor penggerak dan pengungkit kegiatan ekonomi kreatif di masyarakat. Pemulihan sektor wisata dilakukan melalui pengembangan destinasi wisata baru berbasis potensi wilayah/desa, penumbuhan desa wisata, maupun pengembangan destinasi wisata yang sudah ada, peningkatan SDM pariwisata, peningkatan kapasitas masyarakat sebagai salah satu pengelola wisata, peningkatan kunjungan wisatawan domestic (local dan nusantara), peningkatan promosi dan pemasaran wisata secara konservatif melalui kerja sama dengan biro perjalanan dan pameran wisata, peningkatan penggunaan teknologi informasi sebagai sarana promosi wisata maupun pelayanan wisatawan (pemesanan tiket, akomodasi, pemandu wisata, dan transportasi), peningkatan event wisata dan penyusunan kalender wisata, dan percepatan persiapan pertunjukan untuk wisatawan. Pengembangan wisata harus didukung oleh peningkatan konektivitas transportasi (angkutan umum maupun angkutan wisata) dan ketersediaan akomodasi wisata (hotel, homestay, restoran/rumah makan) serta pusat oleh-oleh produk unggulan Kabupaten Pasuruan atau souvenir.

5. *Pemulihan investasi* melalui promosi investasi terarah, peningkatan pelayanan investasi dan perijinan, peningkatan kepastian usaha dan percepatan integrasi sistem perijinan. Untuk kemudahan dan kecepatan waktu pelayanan diperlukan dukungan sistem pelayanan perijinan dan promosi investasi berbasis teknologi informasi serta dibangunnya gedung *Mall Pelayanan Publik*. Peningkatan kepastian usaha dan investasi membutuhkan kepastian peruntukan tata ruang, oleh karena itu pada tahun 2021 akan diupayakan penetapan dokumen rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten Pasuruan dan dokumen rencana detail tata ruang.



6. *Penguatan sistem perlindungan sosial*

Dalam upaya mengatasi dampak social pandemi Covid 19, perlu tetap dilakukan upaya-upaya pemulihan kehidupan sosial masyarakat baik perlindungan dari guncangan ekonomi, sosial, akibat bencana alam, permasalahan kesehatan, maupun perubahan iklim. Perlindungan social masyarakat bisa dilakukan melalui pemberian jaring pengaman sosial (JPS) maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusianya. Tetapi untuk menjamin pemberian JPS tepat sasaran maka perlu dilakukan peningkatan kualitas data masyarakat penyandang kesejahteraan sosial maupun masyarakat terdampak bencana melalui sistem pendataan dan pemutakhiran terintegrasi. Untuk memenuhi kebutuhan data masyarakat terdampak bencana, Pemerintah Kabupaten bisa melakukan pendataan masyarakat penyandang kesejahteraan sosial yang tidak masuk dalam DTKS yang dikeluarkan oleh Kementerian social, bekerja sama dengan Pemerintah Desa.

7. *Penguatan sistem ketahanan bencana* dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM aparat dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, penguatan manajemen bencana berbasis masyarakat, meningkatkan investasi pengurangan resiko bencana, penyusunan Rencana Kontijensi, Rencana Operasi, dan strategi lainnya sebagai SOP penanganan bersama kejadian bencana, penguatan manajemen krisis terpadu dan multisektor, dan memperkuat sistem logistik (terutama pangan) dan jaring pengaman sosial.

**Tabel 4.4.**  
**Persandingan Prioritas Pembangunan Tahun 2021 dalam RKP, RKPD**  
**Provinsi Jawa Timur dan RKPD Kabupaten Pasuruan**

Prioritas RKP Tahun 2021	Prioritas RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021	Prioritas RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2021
1. Pemulihan industri, pariwisata dan investasi.	1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata.	1. Peningkatan sistem kesehatan dan pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat.
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional.	2. Penguatan konektivitas antar wilayah dan upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatakn layanan infrastruktur.	2. Penguatan ketahanan pangan.
3. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.	3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktifitas dan daya saing ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja, serta pengentasan kemiskinan.	3. Pemulihan sektor ekonomi produktif berbasis masyarakat.
4. Reformasi Sistem	4. Peningkatan	4. Pemulihan sektor

Prioritas RKP Tahun 2021	Prioritas RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021	Prioritas RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2021
Ketahanan Bencana.	kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. 5. Peningkatan kemandirian pangan, dan pengelolaan sumber daya energi. 6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup. 7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.	pariwisata. 5. Pemulihan investasi. 6. Penguatan sistem perlindungan sosial. 7. Penguatan sistem ketahanan bencana.

Dalam upaya merealisasikan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021, beberapa program prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Program Prioritas pendukung prioritas daerah Peningkatan Sistem Kesehatan dan Pelayanan Dasar Kesehatan kepada Masyarakat
  - a. Dinas Kesehatan dan RSUD :

- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
  - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
  - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
  - Program Pembinaan Lingkungan Sosial
  - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
  - Program Peningkatan Kualitas Pelayanan RSUD
- b. Dinas Lingkungan Hidup
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- c. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman :
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi
  - Program Pengembangan Perumahan

Program unggulan (jargon) terkait prioritas pembangunan pertama adalah PUSAKA, ODHA LINK, SURYA MAS JELITA, RUMAHKU SURGAKU, AGAWE, SDSB.

2. Program Prioritas pendukung Prioritas Daerah Penguatan Ketahanan Pangan
- a. Dinas Pertanian
- Program Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
  - Program Produksi Tanaman Perkebunan
- b. Dinas Perikanan
- Program Usaha Perikanan
  - Program Perikanan Budidaya
  - Program Kenelayanan
- c. Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan
- Program Peningkatan Produksi Peternakan
  - Program Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Program Perdagangan
- e. Dinas Pekerjaan Umum SDA dan Tata Ruang
- Program Pengelolaan Sumber Daya Air

- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya.

Program unggulan (jargon) terkait prioritas pembangunan kedua adalah PASURUAN PODO ROSO, SATRYA EMAS.

3. Program Prioritas pendukung Prioritas Daerah Pemulihan Sektor Ekonomi Produktif Berbasis Masyarakat

a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- Program Peningkatan Industri
- Program Pembinaan Industri
- Program Pembinaan Lingkungan Sosial

b. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

- Program Pengembangan Usaha Koperasi
- Program Pengembangan Usaha Mikro
- Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
- Program Fasilitasi dan Pembiayaan
- Program Pembinaan Lingkungan Sosial

c. Dinas Tenaga Kerja

- Program Pembinaan Lingkungan Sosial

d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Program Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan

e. Dinas Pertanian

- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Perkebunan

f. Dinas Perikanan

- Program Pembinaan Lingkungan Sosial

g. Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan

- Program Usaha Peternakan
- Program Pembinaan Lingkungan

Program unggulan (jargon) terkait prioritas pembangunan ketiga adalah SATRYA EMAS, PERWIRA KELUARGA, PELASAN.

4. Program Prioritas pendukung Prioritas Daerah Pemulihan Sektor Wisata

a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

- Program Promosi Pariwisata
- Program Destinasi Wisata
- Program Industri Pariwisata
- Program Seni dan Budaya

b. Dinas Perhubungan

- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum

c. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

- Program Pembangunan Jalan dan Infrastruktur Pendukung
- Program Pemeliharaan Jalan dan Infrastruktur Jalan

Program unggulan (jargon) terkait prioritas pembangunan keempat adalah PASURUAN PODO ROSO.

5. Program Prioritas pendukung Prioritas Daerah Pemulihan Investasi

a. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu

- Program Penanaman Modal
- Program Layanan Perizinan
- Program Layanan Non Perizinan

b. Dinas Tenaga Kerja

- Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas

c. Dinas PU SDA dan Tata Ruang

- Program Perencanaan Tata Ruang
- Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Program Pembangunan, Pembinaan dan Pengaturan Bangunan Gedung

e. Dinas Komunikasi dan Informatika

- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program unggulan (jargon) terkait prioritas pembangunan kelima adalah PASURUAN PODO ROSO.

6. Program Prioritas pendukung Prioritas Daerah Penguatan Sistem Perlindungan Sosial

a. Dinas Sosial

- Program Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial

b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
- Program Pengelolaan Informasi Kependudukan

c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial
- Program Kesatuan Bangsa

Program unggulan (jargon) terkait prioritas pembangunan keenam adalah PASURUAN GUMUYU, KEMISAN.

7. Program Prioritas pendukung Prioritas Daerah Penguatan Sistem Ketahanan Bencana

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
- Program Tanggap Darurat Bencana

b. Dinas PU SDA dan Tata Ruang

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air

c. Dinas Lingkungan Hidup

- Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- Program Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup

Program unggulan (jargon) terkait prioritas pembangunan ketujuh adalah PASURUAN GUMUYU, ADUS KALI.

## BAB V

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan daerah tahun 2021 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Program prioritas pembangunan, disusun untuk merealisasikan arah kebijakan tahun ketiga pembangunan tahun 2018-2023 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dan arah kebijakan dan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional.

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pasuruan sebagaimana diuraikan pada Bab IV, perumusan program dan kegiatan prioritas RKPD tahun 2021 diharapkan dapat mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan tahun 2018-2023. Rekap program prioritas dan anggaran yang berdasarkan 7 (tujuh) prioritas daerah tahun 2021 disajikan pada tabel 5.1 dibawah ini.

**Tabel 5. 1 Rekapitulasi Program dan Anggaran Berdasarkan Prioritas Daerah**

No	PROGRAM PRIORITAS	Perangkat Daerah	Anggaran
1	Program Prioritas pendukung prioritas daerah Peningkatan Sistem Kesehatan dan Pelayanan Dasar Kesehatan kepada Masyarakat		
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Rp. 98.205.235.286,11
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		Rp. 1.996.344.700,00
	Program Promosi		Rp. 929.244.760,00



No	PROGRAM PRIORITAS	Perangkat Daerah	Anggaran
	Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	RSUD Bangil	Rp. 22.137.883.168,00
		Dinas Kesehatan	Rp. 82.177.794.766,00
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Rp. 9.007.171.755,00
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan RSUD		Rp. 2.996.706.714,00
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	Rp. 6.024.724.800,00
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp. 6.695.231.000,00
	Program Pengembangan Perumahan		Rp. 35.122.144.000,00
2	Program Prioritas pendukung Prioritas Daerah Penguatan Ketahanan Pangan		
	Program Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Pertanian	Rp. 1.947.374.390,00
	Program Produksi Tanaman Perkebunan	Dinas Pertanian	Rp. 1.271.553.660,00
	Program Usaha Perikanan	Dinas Perikanan	Rp. 558.331.000,00
	Program Perikanan Budidaya		Rp. 1.307.287.850,00
	Program Kenelayanan		Rp. 660.590.000,00
	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan	Rp. 3.391.853.952,00
	Program Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian		Rp. 3.208.347.638,00
	Program Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp. 560.000.000,00
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan	Rp. 16.970.000.000,00

No	PROGRAM PRIORITAS	Perangkat Daerah	Anggaran
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya	Umum SDA dan Tata Ruang	
3	Program Prioritas pendukung Prioritas Daerah Pemulihan Sektor Ekonomi Produktif Berbasis Masyarakat		
	Program Peningkatan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp. 1.000.000.000,00
	Program Pembinaan Industri		Rp. 27.223.765,00
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial		Rp. 2.917.359.375,00
	Program Pengembangan Usaha Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Rp. 500.000.000,00
	Program Pengembangan Usaha Mikro		Rp. 250.000.000,00
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi		Rp. 917.358.000,00
	Program Fasilitasi dan Pembiayaan		Rp. 250.000.000,00
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial		Rp. 1.300.000.000,00
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Dinas Tenaga Kerja	Rp. 1.600.000.000,00
	Program Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Perkebunan	Dinas Pertanian	Rp. 874.042.928,00
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Dinas Perikanan	Rp. 350.000.000,00
	Program Usaha Peternakan	Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan	Rp. 465.931.058,00
	Program Pembinaan Lingkungan		Rp. 500.000.000,00
4	Program Prioritas pendukung Prioritas Daerah Pemulihan Sektor Wisata		

No	PROGRAM PRIORITAS	Perangkat Daerah	Anggaran
	Program Promosi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp. 775.000.000,00
	Program Destinasi Wisata		Rp. 1.100.000.000,00
	Program Industri Pariwisata		Rp. 694.050.000,00
	Program Seni dan Budaya		Rp. 1.180.311.163,75
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum	Dinas Perhubungan	Rp. 1.315.000.000,00
	Program Pembangunan Jalan dan Infrastruktur Pendukung	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Rp. 4.414.818.355,00
	Program Pemeliharaan Jalan dan Infrastruktur Jalan		Rp. 44.166.000.000,00
5	Program Prioritas pendukung Prioritas Daerah Pemulihan Investasi		
	Program Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Rp. 869.460.000,00
	Program Layanan Perizinan		Rp. 147.546.400,00
	Program Layanan Non Perizinan		Rp. 2.553.437.500,00
	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas	Dinas Tenaga Kerja	Rp. 583.456.596,15
	Program Perencanaan Tata Ruang	Dinas PU SDA dan Tata Ruang	Rp. 1.075.000.000,00
	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Rp. 1.400.000.000,00
6	Program Prioritas pendukung Prioritas Daerah Penguatan Sistem Perlindungan Sosial		
	Program Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	Rp. 826.000.000,00
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Rp. 608.231.820,00
	Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial		Rp. 548.000.000,00
	Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran	Dinas Kependudukan dan	Rp. 2.900.417.300,00

No	PROGRAM PRIORITAS	Perangkat Daerah	Anggaran
	Penduduk	Pencatatan Sipil	
	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil		Rp. 1.932.609.700,00
	Program Pengelolaan Informasi Kependudukan		Rp. 644.363.600,00
	Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 729.680.000,00
	Program Kesatuan Bangsa		Rp. 351.786.000,00
7	Program Prioritas pendukung Prioritas Daerah Penguatan Sistem Ketahanan Bencana		
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 612.620.000,00
	Program Tanggap Darurat Bencana		Rp. 334.800.000,00
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas PU SDA dan Tata Ruang	Rp.16.970.000.000,00
	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	Rp. 207.000.000,00
	Program Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup		Rp. 45.000.000,00

Rencana program memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab serta memiliki indikator yang jelas dan dapat diukur pada tingkat capaiannya. Indikasi rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah secara rinci disajikan pada Tabel 5.2.

Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2021 ini, pemerintah daerah juga melakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Permendagri Nomor 90

Tahun 2019 sebagai dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS Tahun 2021 dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021. Hasil pemetaan dimaksud disajikan pada Lampiran II Dokumen RKPD ini.

## **BAB VI**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Penetapan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan memberikan panduan pencapaian kinerja tahunan, baik indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator kinerja kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Capaian indikator kinerja utama tahun 2019 dan target indicator kinerja utama tahun 2020 dan 2021, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 sebagaimana dalam Tabel 6.1.

**Tabel 6.1.**  
**Capaian IKU Tahun 2019 dan**  
**Target IKU Tahun 2020 dan 2021**  
**(sesuai RPJMD Kab. Pasuruan Tahun 2018-2023)**

No	IKU	Satuan	Capaian Tahun 2019	Proyeksi Capaian Tahun 2020	Target Tahun 2021
1	Angka pertumbuhan ekonomi	%	5,83	5,73 - 6	5,73 - 6
2	Angka kemiskinan	%	8,68	9,35	9,30
3	Indeks toleransi masyarakat	-	62,40	62,40	62,50
4	Indeks kesenjangan wilayah (Williamson)	-	0,2583	0,255	0,250
5	Indeks reformasi birokrasi	-	68 (B)	64,00	66,00
6	Indeks pembangunan manusia	-	68,29	68,90	69,61

RPJMD Kab. Pasuruan Tahun 2018 – 2023

**Tabel 6.2.**  
**Capaian IKD Tahun 2019 dan**  
**Target IKU Tahun 2020 dan 2021**

Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Tahun 2019	Prediksi Capaian Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021
Aspek Kesejahteraan Masyarakat			

PDRB (Rp)	147.977,000 M	139.633,556 M	147.592,669 M
Persentase PMKS	6,11%	6,0	5,7
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,42	5,08	5,04
Persentase Desa Mandiri	0,59	0,88	2,05

Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Tahun 2019	Prediksi Capaian Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>			
Nilai SAKIP	75,02 (BB)	80,00 (BB)	81,00 (A)
Opini BPK	WTP	WTP	WTP
IKM	84,50 (Baik)	83,00 (Baik)	83,50 (Baik)
Indeks Profesionalitas ASN	70,2	71	72
Indeks Kesehatan	76,85	76,89	76,94
Indeks Pendidikan	57,89	59,09	60,05
Indeks Daya Beli	70,94	71,98	72,99
Indeks Pemberdayaan Gender	90,68	90,91	91,07
Persentase Penegakan Perda	91,24%	92%	93%
Indeks Permukiman Layak Huni	71,46	81,18	85,60
Indeks Ketahanan Pangan	69,38	67,5	68
Indeks Ketahanan Air	77,68	77,68	77,68
<b>Aspek Daya Saing</b>			
Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	2.687.987	2.780.200	2.900.400
Jumlah Omset Usaha Mikro Dan Koperasi (Rp. 000)	1.697.507.779	1.330.491.000	1.348.471.000
Jumlah Konflik Sara	0	0	0
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,38	59,73	61,34
Indeks Resiko Bencana	179,39	210	208

Indeks Aksesibilitas Wilayah	1,20	1,30	1,35
Persentase Aksesibilitas Transportasi	7,18	11,29	12,17
Rasio Pemuda Berprestasi	11,64	25	30

RPJMD Kab. Pasuruan Tahun 2018 – 2023 dan LKPJ Tahun 2020

Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada tahun 2019, masih ada beberapa indikator yang tidak mencapai target dan ada beberapa indikator yang capaiannya melebihi target. Hal tersebut harus menjadi perhatian dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program / kegiatan tahun 2020 dan juga akan berpengaruh terhadap capaian kinerja tahun 2020.

Proses penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2020, telah mempertimbangkan program-program prioritas pendukung tema pembangunan maupun ketercapaian indikator kinerja utama (IKU) tahun 2020. Tetapi dengan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, maka pasti akan berpengaruh terhadap ketercapaian target kinerja tahun 2020 maupun tahun 2021. Prediksi dampak Covid-19 pada kinerja pemerintah tahun 2020 antara lain :

1. Perlambatan pertumbuhan ekonomi.
2. Peningkatan pengangguran.
3. Peningkatan kerawanan sosial / kriminalitas.
4. Naiknya angka kemiskinan.
5. Rawan pangan.
6. Kesenjangan sosial ekonomi meningkat.
7. Penurunan kontribusi dari sektor pariwisata, industri, dan jasa pada pertumbuhan ekonomi.
8. Peningkatan inflasi.
9. Pembangunan infrastruktur terhambat.

Sedangkan prediksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada rancangan RKP Tahun 2021 tentang kondisi ekonomi makro nasional adalah :



- Pertumbuhan Ekonomi : (-0,4) – 2,3 %
- Angka kemiskinan : 9,7 – 10,2 %
- Angka pengangguran : 7,8 – 8,5 %
- Kunjungan wisatawan : turun 3 juta orang

Di Kabupaten Pasuruan dampak dari pandemi Covid-19 dan pembatasan aktifitas masyarakat dirasakan hampir di semua sektor ekonomi. Bencana pandemi Covid-19 menyebabkan ditutupnya tempat-tempat tujuan wisata yang berdampak juga terhadap sektor hotel dan restoran, serta omset usaha kecil dan ekonomi kreatif. Di samping itu, pembatasan aktifitas dan pemberlakuan PSBB maupun lock down di beberapa wilayah dan Negara, berdampak pada melambatnya perdagangan antar wilayah/Negara dan menurunnya permintaan, yang mengakibatkan terjadinya karyawan yang di-PHK atau dirumahkan, penurunan jam kerja karyawan, serta banyak industry / usaha yang gulung tikar.

Sampai dengan bulan Mei 2020, di wilayah kabupaten Pasuruan telah terjadi

Berdasarkan data-data di atas, maka perlu dilakukan review atau perhitungan kembali target kinerja tahun 2020 maupun tahun 2021, baik untuk indikator kinerja utama maupun indikator kinerja daerah. Karena target kinerja tersebut ditetapkan berdasarkan asumsi kondisi normal dan prediksi pendapatan yang tetap atau meningkat. Sedangkan pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19, telah dilakukan rasionalisasi anggaran program/kegiatan sebesar 50%. Selain itu, pada tahun 2020 dan 2021 diprediksi terjadinya penurunan pendapatan daerah maupun nasional dikarenakan berhentinya sektor-sektor ekonomi. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, prediksi capaian kinerja dan target kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun 2020 dan 2021 sebagaimana table berikut :

**Tabel 6.3.**  
**Capaian IKU Tahun 2019 dan**  
**Proyeksi Target IKU Tahun 2020 dan 2021**

No	IKU	Satuan	Capaian Tahun 2019	Proyeksi Capaian Tahun 2020	Target Tahun 2021
1.	<i>Angka pertumbuhan ekonomi</i>	%	5,83	2,93	5,14 – 5,5
2.	<i>Angka kemiskinan</i>	%	8,68	9,38	8,5 – 9,2
3.	Indeks toleransi masyarakat	-	62,40	62,40	62,50
4.	Indeks kesenjangan wilayah (Williamson)	-	0,2583	0,255	0,250
5.	Indeks reformasi birokrasi	-	68 (B)	64,00	66,00
6.	<i>Indeks pembangunan manusia</i>	-	68,29	68,09	68,98-69,61
7.	<i>Tingkat Inflasi</i>	%	-	1,99	2,0 – 4,0
8.	<i>Tingkat Pengangguran Terbuka</i>	%	5,42	7,2	6,6 – 7,0

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2020

## **BAB VI**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Penetapan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan memberikan panduan pencapaian kinerja tahunan, baik indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator kinerja kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Capaian indikator kinerja utama tahun 2019 dan target indicator kinerja utama tahun 2020 dan 2021, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 sebagaimana dalam Tabel 6.1.

**Tabel 6.1.**  
**Capaian IKU Tahun 2019 dan**  
**Target IKU Tahun 2020 dan 2021**  
**(sesuai RPJMD Kab. Pasuruan Tahun 2018-2023)**

No	IKU	Satuan	Capaian Tahun 2019	Proyeksi Capaian Tahun 2020	Target Tahun 2021
1	Angka pertumbuhan ekonomi	%	5,83	5,73 - 6	5,73 - 6
2	Angka kemiskinan	%	8,68	9,35	9,30
3	Indeks toleransi masyarakat	-	62,40	62,40	62,50
4	Indeks kesenjangan wilayah (Williamson)	-	0,2583	0,255	0,250
5	Indeks reformasi birokrasi	-	68 (B)	64,00	66,00
6	Indeks pembangunan manusia	-	68,29	68,90	69,61

RPJMD Kab. Pasuruan Tahun 2018 – 2023

**Tabel 6.2.**  
**Capaian IKD Tahun 2019 dan**  
**Target IKU Tahun 2020 dan 2021**

Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Tahun 2019	Prediksi Capaian Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021
Aspek Kesejahteraan Masyarakat			

PDRB (Rp)	147.977,000 M	139.633,556 M	147.592,669 M
Persentase PMKS	6,11%	6,0	5,7
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,42	5,08	5,04
Persentase Desa Mandiri	0,59	0,88	2,05

Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Tahun 2019	Prediksi Capaian Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>			
Nilai SAKIP	75,02 (BB)	80,00 (BB)	81,00 (A)
Opini BPK	WTP	WTP	WTP
IKM	84,50 (Baik)	83,00 (Baik)	83,50 (Baik)
Indeks Profesionalitas ASN	70,2	71	72
Indeks Kesehatan	76,85	76,89	76,94
Indeks Pendidikan	57,89	59,09	60,05
Indeks Daya Beli	70,94	71,98	72,99
Indeks Pemberdayaan Gender	90,68	90,91	91,07
Persentase Penegakan Perda	91,24%	92%	93%
Indeks Permukiman Layak Huni	71,46	81,18	85,60
Indeks Ketahanan Pangan	69,38	67,5	68
Indeks Ketahanan Air	77,68	77,68	77,68
<b>Aspek Daya Saing</b>			
Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	2.687.987	2.780.200	2.900.400
Jumlah Omset Usaha Mikro Dan Koperasi (Rp. 000)	1.697.507.779	1.330.491.000	1.348.471.000
Jumlah Konflik Sara	0	0	0
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,38	59,73	61,34
Indeks Resiko Bencana	179,39	210	208

Indeks Aksesibilitas Wilayah	1,20	1,30	1,35
Persentase Aksesibilitas Transportasi	7,18	11,29	12,17
Rasio Pemuda Berprestasi	11,64	25	30

RPJMD Kab. Pasuruan Tahun 2018 – 2023 dan LKPJ Tahun 2020

Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada tahun 2019, masih ada beberapa indikator yang tidak mencapai target dan ada beberapa indikator yang capaiannya melebihi target. Hal tersebut harus menjadi perhatian dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program / kegiatan tahun 2020 dan juga akan berpengaruh terhadap capaian kinerja tahun 2020.

Proses penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2020, telah mempertimbangkan program-program prioritas pendukung tema pembangunan maupun ketercapaian indikator kinerja utama (IKU) tahun 2020. Tetapi dengan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, maka pasti akan berpengaruh terhadap ketercapaian target kinerja tahun 2020 maupun tahun 2021. Prediksi dampak Covid-19 pada kinerja pemerintah tahun 2020 antara lain :

1. Perlambatan pertumbuhan ekonomi.
2. Peningkatan pengangguran.
3. Peningkatan kerawanan sosial / kriminalitas.
4. Naiknya angka kemiskinan.
5. Rawan pangan.
6. Kesenjangan sosial ekonomi meningkat.
7. Penurunan kontribusi dari sektor pariwisata, industri, dan jasa pada pertumbuhan ekonomi.
8. Peningkatan inflasi.
9. Pembangunan infrastruktur terhambat.

Sedangkan prediksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada rancangan RKP Tahun 2021 tentang kondisi ekonomi makro nasional adalah :

- Pertumbuhan Ekonomi : (-0,4) – 2,3 %
- Angka kemiskinan : 9,7 – 10,2 %
- Angka pengangguran : 7,8 – 8,5 %
- Kunjungan wisatawan : turun 3 juta orang

Di Kabupaten Pasuruan dampak dari pandemi Covid-19 dan pembatasan aktifitas masyarakat dirasakan hampir di semua sektor ekonomi. Bencana pandemi Covid-19 menyebabkan ditutupnya tempat-tempat tujuan wisata yang berdampak juga terhadap sektor hotel dan restoran, serta omset usaha kecil dan ekonomi kreatif. Di samping itu, pembatasan aktifitas dan pemberlakuan PSBB maupun lock down di beberapa wilayah dan Negara, berdampak pada melambatnya perdagangan antar wilayah/Negara dan menurunnya permintaan, yang mengakibatkan terjadinya karyawan yang di-PHK atau dirumahkan, penurunan jam kerja karyawan, serta banyak industry / usaha yang gulung tikar.

Sampai dengan bulan Mei 2020, di wilayah kabupaten Pasuruan telah terjadi

Berdasarkan data-data di atas, maka perlu dilakukan review atau perhitungan kembali target kinerja tahun 2020 maupun tahun 2021, baik untuk indikator kinerja utama maupun indikator kinerja daerah. Karena target kinerja tersebut ditetapkan berdasarkan asumsi kondisi normal dan prediksi pendapatan yang tetap atau meningkat. Sedangkan pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19, telah dilakukan rasionalisasi anggaran program/kegiatan sebesar 50%. Selain itu, pada tahun 2020 dan 2021 diprediksi terjadinya penurunan pendapatan daerah maupun nasional dikarenakan berhentinya sektor-sektor ekonomi. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, prediksi capaian kinerja dan target kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun 2020 dan 2021 sebagaimana table berikut :

**Tabel 6.3.**  
**Capaian IKU Tahun 2019 dan**  
**Proyeksi Target IKU Tahun 2020 dan 2021**

No	IKU	Satuan	Capaian Tahun 2019	Proyeksi Capaian Tahun 2020	Target Tahun 2021
1.	<i>Angka pertumbuhan ekonomi</i>	%	5,83	2,93	5,14 – 5,5
2.	<i>Angka kemiskinan</i>	%	8,68	9,38	8,5 – 9,2
3.	Indeks toleransi masyarakat	-	62,40	62,40	62,50
4.	Indeks kesenjangan wilayah (Williamson)	-	0,2583	0,255	0,250
5.	Indeks reformasi birokrasi	-	68 (B)	64,00	66,00
6.	<i>Indeks pembangunan manusia</i>	-	68,29	68,09	68,98-69,61
7.	<i>Tingkat Inflasi</i>	%	-	1,99	2,0 – 4,0
8.	<i>Tingkat Pengangguran Terbuka</i>	%	5,42	7,2	6,6 – 7,0

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2020

## **BAB VII PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 adalah dokumen rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan, RKPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya KUA-PPAS menjadi dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2021.

Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023, dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019, serta mempertimbangkan isu strategis dampak pandemi Covid-19, maka tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2021 adalah ***“Peningkatan Konektivitas Infrastruktur dan Peningkatan Pelayanan Dasar dalam rangka Percepatan Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat”***. Gambaran dari tema tersebut adalah program-program yang dilakukan guna meningkatkan konektivitas infrastruktur wilayah maupun pelayanan dasar, ditujukan untuk percepatan pemulihan ekonomi daerah dan masyarakat serta pemulihan kehidupan sosial masyarakat yang mengalami tekanan dan penurunan akibat pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020.

Guna mewujudkan tema RKPD tahun 2021 tersebut, maka ditetapkan prioritas daerah tahun 2021 yaitu :

1. Peningkatan sistem kesehatan dan pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat



2. Penguatan ketahanan pangan
3. Pemulihan sektor ekonomi produktif berbasis masyarakat
4. Pemulihan sektor pariwisata
5. Pemulihan investasi
6. Penguatan sistem perlindungan sosial
7. Penguatan sistem ketahanan bencana

Dimana dalam pelaksanaan 7 (tujuh) prioritas daerah tersebut, semua jajaran Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Pasuruan tetap berpedoman dan mengacu pada pencapaian target kinerja indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator kinerja daerah (IKD) untuk tahun 2021 yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023.

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

H.M. IRSYAD YUSUF



2		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>100%</b>			<b>Rp 645.000.000</b>	
				Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional		Rp -	
				Pengadaan Mobil Jabatan		Rp -	
				pengadaan mebeleur		Rp 20.000.000	
				Pengadaan peralatan gedung kantor		Rp 50.000.000	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor		Rp 50.000.000	
				Pemeliharaam rutin/berkala mobil jabatan		Rp -	
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas atau operasional		Rp 340.000.000	
				Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor		Rp 185.000.000	
3		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>100%</b>			<b>Rp 60.000.000</b>	
				Pendidikan dan Pelatihan formal		Rp 60.000.000	
				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			
				pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			
				pengadaan pakaian kerja lapangan			
4		<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>100%</b>			<b>Rp 30.000.000</b>	

				penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SIPKD		Rp 30.000.000	
<b>5</b>		<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum</b>	<b>100%</b>			<b>Rp 1.315.000.000</b>	
				penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		Rp 275.000.000	
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten		Rp 400.000.000	
				Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp 40.000.000	
				Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor		Rp 600.000.000	
				Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor			
				Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
				identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji			
				Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
				Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			

				Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraaan Bermotor			
<b>6</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA &amp; PRASARANA FASILITAS PERHUBUNGAN</b>				<b>Rp 730.000.000</b>	
				pengembangan sarana dan prasarana terminal		Rp -	
				Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana terminal		Rp -	
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala		Rp -	
				Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Rp -	
				Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota		Rp 500.000.000	
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten		Rp 150.000.000	
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
				Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal tipe c			
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Rp 80.000.000	

				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Rp	-
<b>7</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN JALAN</b>	<b>100%</b>			<b>Rp</b>	<b>1.040.000.000</b>
				Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		Rp	40.000.000
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten		Rp	300.000.000
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Rp	400.000.000
				Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		Rp	-
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan kab/kota		Rp	-
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan kab/kota		Rp	300.000.000
				koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin		Rp	-
<b>8</b>		<b>PROGRAM PENGAMANAN LALU LINTAS</b>	<b>100%</b>			<b>Rp</b>	<b>4.480.000.000</b>
				Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten		Rp	300.000.000
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		Rp	40.000.000

				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraab dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Rp 3.140.000.000	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp 1.000.000.000	
						<b>Rp 10.788.150.000</b>	

Pasuruan, 15 Juli 2020  
Kepala Dinas Perhubungn

Ttd.

Drs. AGUS HARI WIBAWA  
NIP. 19690816 196908 1 002

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS PU SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG**

No	Urusan	Program	Outcome / Target	Kegiatan	Output / Target	Pagu Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan pelayanan kantor ( 80 persen )			4.700.900.000,00	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, air & listrik yang terbayar (8 rekening)	120.000.000,00	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pembayaran pajak kendaraan (50 unit)	30.000.000,00	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan (36 org/bln)	193.500.000,00	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian ATK (1 kali)	120.000.000,00	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan & penggandaan (1 kali)	91.000.000,00	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan perlengkapan kantor rutin (1 kali)	58.000.000,00	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat (12 kali)	100.000.000,00	
				Rapat-rapat Kordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah (156 org/kali)	200.000.000,00	
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Honor tenaga kontrak / THL (PTT (52 org) ; THL (24 org)) (157 org/bln)	3.628.400.000,00	
				Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah peserta bimtek (110 org)	100.000.000,00	
				Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja (Lakip, LPPD, Renja) (3 dok)	60.000.000,00	
2	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana kondisi baik ( 75 persen )			1.073.000.000,00	
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung/kantor (5 unit)	50.000.000,00	



				Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor (2 unit)	200.000.000,00	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas / ops (50 unit)	566.000.000,00	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor (20 unit/kali)	100.000.000,00	
				Pemeliharaan Rutin Meubelair	Jumlah pemeliharaan meubelair (60 unit/kali)	32.000.000,00	
				Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas	Jumlah rehab rumah dinas (2 unit)	125.000.000,00	
<b>3</b>	<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR</b>	<b>Meningkatnya volume ketersediaan air baku (2.065.900.104 m3/thn)</b>			<b>9.274.255.201,76</b>	
				Operasi Jaringan Irigasi	Penyusunan dokumen rencana tata tanam global (RTTG) (4 dok)	300.000.000,00	
				Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jumlah jaringan irigasi yang dilakukan pemeliharaan (4 UPT)	2.500.000.000,00	
				Normalisasi Saluran	Jumlah jaringan irigasi yang dilakukan normalisasi (60 JI)	3.176.755.201,76	
				Pendataan dan Identifikasi Sumber Daya Air	Jumlah dokumen hasil pendataan dan identifikasi SDA (1 dok)	400.000.000,00	
				Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Air	Jumlah pendampingan yang dilakukan (1 dok)	202.500.000,00	
				Pengendalian Daya Rusak Air	Jumlah lokasi yang dilakukan pemasangan darurat (11 lokasi)	2.250.000.000,00	
				Partisipasi Masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Air	Jumlah kegiatan partisipasi masyarakat (1 kali)	295.000.000,00	
				Perencanaan Pengadaan Tanah	Jumlah perencanaan pengadaan tanah yg dilakukan (1 lokasi)	100.000.000,00	
				Pengendalian Kualitas Air pada Saluran Irigasi	Jumlah saluran irigasi yang ditingkatkan kualitasnya (5 lokasi)	50.000.000,00	
<b>4</b>	<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN &amp; PENGEMBANGAN IRIGASI</b>	<b>Meningkatnya panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik ( 64,2 persen )</b>			<b>1.445.000.000,00</b>	
				Perencanaan jaringan irigasi	Jumlah perencanaan jaringan irigasi yg dilakukan (6 dok)	640.000.000,00	
				Rehabilitasi jaringan irigasi	Jumlah panjang JI yang dilakukan rehabilitasi (130.000 mtr)	-	
				Inventarisasi aset irigasi	Jumlah jaringan irigasi yang dilakukan inventarisasi (27 JI)	575.000.000,00	

				Pemantauan Jaringan Irigasi Tambak & Irigasi Kecil	Jumlah jaringan irigasi yang dipantau (11 JI)	100.000.000,00	
				Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi	Jumlah kegiatan partisipasi masyarakat / HIPPA / GHIPPA ( 25 Kel)	130.000.000,00	
				Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)	Jumlah panjang JI yang dilakukan rehabilitasi (Dana DAK) (4.000 mtr)	-	
<b>5</b>	<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DANA DBHCHT)</b>	<b>Meningkatnya panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik ( 64,2 persen )</b>			<b>18.250.000.000,00</b>	
				Penyediaan / Pemeliharaan Saluran Irigasi (Pemeliharaan Saluran Irigasi)	Jumlah panjang JI yang dilakukan rehabilitasi (Dana DBHCHT) (16.000 mtr)	18.250.000.000,00	
<b>6</b>	<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG</b>	<b>Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang dibutuhkan ( 17 persen )</b>			<b>875.000.000,00</b>	
				Sosialisasi / Publikasi peraturan perundangan tentang Rencana Tata Ruang	Jumlah sosialisasi / publikasi peraturan perundangan yang dilakukan (1 kali)	125.000.000,00	
				Penyusunan RDTR BWP / Perkotaan	Jumlah Penyusunan RDTR BWP/Perkotaan yang dilakukan (1 dok)	100.000.000,00	
				Persetujuan Substansi Raperda tentang RDTR BWP / Perkotaan / Revisi	Jumlah persetujuan substansi Raperda RDTR BWP / Perkotaan / Revisi yang dilakukan (4 dok)	600.000.000,00	
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang	Jumlah Pelaporan Monev Rencana Tata Ruang yang dilakukan (1 kali)	50.000.000,00	
<b>7</b>	<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG</b>	<b>Meningkatnya proses rekomendasi pengendalian dan pemanfaatan ruang yang dilakukan ( 25 persen )</b>			<b>575.000.000,00</b>	
				Fasilitasi tentang pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah koordinasi tentang pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan (3 kali)	300.000.000,00	

				Survey dan pemetaan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah kawasan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang disurvei (1 kali)	100.000.000,00	
				Sistem Informasi & Komunikasi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Jumlah informasi & komunikasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang (1 web)	75.000.000,00	
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah Pelaporan Monev pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan (1 kali)	100.000.000,00	
<b>8</b>	<b>Urusan Pertanahan</b>	<b>PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN &amp; PEMANFAATAN TANAH</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi pertanahan sesuai ketentuan ( 100 persen )</b>			<b>990.000.000,00</b>	
				Pembenahan administrasi pertanahan desa	Jumlah desa yang dibenahi administrasinya sesuai ketentuan (4 desa)	150.000.000,00	
				Identifikasi & pemetaan tanah negara selain oloran	Jumlah wilayah yang teridentifikasi sesuai ketentuan (5 lokasi)	100.000.000,00	
				Bimtek administrasi pertanahan	Jumlah peserta bimtek pertanahan (100 org)	120.000.000,00	
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan pertanahan	Jumlah monev pertanahan sesuai ketentuan (2 lokasi)	205.000.000,00	
				Pengawasan dan Pengendalian Tanah Pengairan	Jumlah tanah pengairan yang dilakukan pengawasan (100 lokasi)	415.000.000,00	
<b>9</b>		<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>12.887.921.000,00</b>	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>				<b>50.071.076.201,76</b>	

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

<b>NO</b>	<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>OUTCOME/ TARGET</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT/ TARGET</b>	<b>PAGU KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dg Pelayanan Dasar	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan kantor/ 100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon, internet, air dan listrik selama 12 bulan/ 25 rekening-bulan	276.600.000	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat penatausahaan keuangan dan kegiatan/ 25 orang-bulan	214.020.000	
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara/ 10 unit	30.000.000	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor/ 10 jenis	39.167.000	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis kebutuhan barang cetak dan penggandaan/ 1 jenis	22.691.000	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor/ 20 jenis	14.838.000	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat/ 900 kotak	30.000.000	
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah orang/ kali perjalanan dinas luar daerah/ 12 org/ kali	200.000.000	
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak dan THL yang terbayar/ 52 orang	1.254.050.000	

				Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparaturnya yang mengikuti diklat/ 50 orang	100.000.000	
				Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja/ 8 dokumen	20.000.000	
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik/ 100%	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara/ 1 gedung	15.000.000	
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara/ 5 unit	180.000.000	
3		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase kinerja pengelolaan persampahan/ 54%	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tersedia/ 5 paket	83.000.000	
				Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara/ 7 paket	5.335.000.000	
				Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan	Jumlah extrafooding petugas kebersihan/ 238 orang	100.724.800	
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah peserta sosialisasi atau pembinaan/ 1000 orang	486.000.000	
				Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3	Jumlah rekomentek pengelolaan limbah B3/ 35 rekomentek	20.000.000	
4		Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup/ 7,43%	Operasional Laboratorium Lingkungan	Jumlah pengujian kualitas air yang dilayani/ 230 pelanggan	162.000.000	
				Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pemrakarsa yang mengelola lingkungan/ 50 orang	15.000.000	
				Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan usaha yang dibina/ 50 kegiatan/ usaha	15.000.000	
				Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah penambahan luasan revegetasi lahan kritis/ 5 Ha	15.000.000	

5		Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase terpenuhinya sarana prasarana pendukung	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Industri (Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Alat Uji Kualitas Air, Tanah dan Udara, Emisi dan Ambien)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium/ 100%	610.631.424	
				Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan)	Jumlah titik pantau air dan udara/ 108 dan 96 titik	161.874.650	
				Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (Pengujian Limbah Industri)	Jumlah pengujian limbah industri/ 1 paket	135.045.657	
				Penyediaan/ Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih (Pembangunan/ Penyediaan Tempat Pembuangan Akhir)	Jumlah sarana dan prasarana TPA baru/ 12 paket	3.702.266.595	
				Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengelolaan/ Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH))	Luas RTH yang dikelola/ Ha	6.614.645.674	
6		Program Penataan Lingkungan Hidup	Persentase rekomendasi perencanaan penataan LH yang diimplementasikan/ 100%	Hari Lingkungan Hidup	Jumlah peserta partisipasi HLH/ 2000 orang	-	
				Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan atau evaluasi lingkungan/ 8 dokumen	15.000.000	

				Kajian Dampak Lingkungan Hidup	Persentase permohonan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup yang diproses/ 100%	15.000.000		
				Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Persentase pemanfaatan RTH publik wilayah perkotaan/ 8,25%	1.296.909.200		
7		Program Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan/ 30,28%	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang diselesaikan/ 5 kasus	15.000.000		
					Penegakan Hukum Lingkungan	Persentase penegakan hukum atas kegiatan usaha yang diawasi/ 100%	15.000.000	
						Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Jumlah penghargaan lingkungan yang diterima/ 4 penghargaan	15.000.000
						<b>21.224.464.000</b>		

Pasuruan, .....  
Kepala (Perangkat Daerah)

.....  
NIP. ....

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			Gaji Pegawai		5.425.673.000,00	
2	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan pelayanan perkantoran : 100%				
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia : 150 buah	3.000.000,00	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia : 12 rek-bln	489.000.000,00	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia : 49 jenis-kali	58.894.500,00	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia : 20 jenis-kali	55.038.980,00	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia : 9 unit	7.642.000,00	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia : 30 unit	34.176.000,00	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia : 1000 orang	48.050.000,00	
				Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah : 50 laporan	250.000.000,00	
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah jasa tenaga perkantoran yang tersedia : 11 org-bln	1.176.037.370,00	



				Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang dikembangkan : 54 org	30.000.000,00	
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun : 12 laporan	200.000.000,00	
<b>3</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>% sarpras kondisi baik : 100%</b>				
				Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan : 2 unit	2.000.000.000,00	
				Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan : 17 unit	63.000.000,00	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara rutin / berkala : 34 unit/kali	395.000.000,00	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair	Jumlah mebelair yang dipelihara rutin / berkala : 15 unit/kali	5.000.000,00	
				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara rutin / berkala : 58 unit/kali	60.000.000,00	
<b>4</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN SANITASI</b>	<b>% RT yang terlayani air bersih : 89,96%</b>				
			<b>% RT yang terlayani sanitasi : 89,2%</b>				
				Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Jumlah KK yang terlayani air minum : 15000 KK	1.000.000.000,00	
				Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Jumlah KK yang terlayani akses sanitasi : 422864 KK	1.000.000.000,00	
				Pembangunan Saluran Drainase Permukiman	luas genangan yang tertangani : 5 Ha	1.000.000.000,00	
				Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman (Reguler)	Jumlah KK yang terlayani akses sanitasi : 675 KK	-	
				Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (Penugasan)	Jumlah KK yang terlayani akses sanitasi : 1050 KK	-	

				Perluasan SPAM Perpipaan Melalui Pemanfaatan Idle Capacity System Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun (penugasan)	Jumlah KK yang terlayani air minum : 7360 KK	3.695.231.000,00	
				Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan / atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM terbangun (penugasan)	Jumlah KK yang terlayani air minum : 600 KK	-	
<b>5</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	<b>PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>% pengurangan kawasan kumuh : 30,72%</b>				
				Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	Luas wilayah permukiman kumuh yang ditangani : 0	1.500.000.000,00	
				Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Perkotaan	Panjang jalan lingkungan perkotaan yang ditangani : 9900 m'	850.000.000,00	
<b>6</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>% peningkatan rumah layak huni : 27,12%</b>				
				Fasilitasi dan Stimulasi Pengembangan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Kurang Mampu	Jumlah pelaporan pendampingan kegiatan pengembangan rumah swadaya : 2000 unit	33.675.000.000,00	
				Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah keg. koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan dan kaw. permukiman yang dilakukan : 3 kali	100.000.000,00	
				Kegiatan Penyusunan Database Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah database perumahan dan kawasan permukiman yang disusun : 6 paket	800.000.000,00	
				Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah sosialisasi kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan : 1 kali	100.000.000,00	
				Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah peraturan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang disusun dan ditetapkan : 1 peraturan	-	

				Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi keempat indikator kelayakan rumah	Jumlah pelaporan pendampingan kegiatan pengembangan rumah swadaya : 210 unit	147.144.000,00	
				Fasilitas Penyediaan Rumah Akibat Relokasi Program Pemerintah Daerah	Presentase fasilitasi penyediaan rumah akibat relokasi program Pemerintah Daerah : 53,76 %	300.000.000,00	
<b>7</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL</b>	<b>% jalan lingkungan perkotaan yang ditangani : 7,27%</b>				
				Kegiatan Penyediaan / Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih (Pembangunan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase)	Luas genangan yang tertangani : 5 Ha	1.832.607.926,00	
				Kegiatan Penyediaan / Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih (Pembangunan / Penyediaan Sumur Air Bersih)	Jumlah KK yang terlayani air minum : 0	2.500.000.000,00	
				Kegiatan Penyediaan / Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih (Penyediaan Sarana Pengelolaan Air Limbah)	Jumlah KK yang terlayani akses sanitasi : 0	1.000.000.000,00	
				Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan / atau Jembatan, Pasar, Sarana / Prasarana Pendukung Pariwisata (Pembangunan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan)	% jalan lingkungan perkotaan yang ditangani : 0	7.000.000.000,00	
<b>8</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMBINAAN DAN PENGATURAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>% peningkatan jumlah Bangunan Gedung yang terstandarisasi SLF : 99,989%</b>				
				Pembangunan Gedung	Jumlah gedung kantor yang dibangun : 5 unit	40.450.000.000,00	
				Pembangunan Gedung	Jumlah gedung kantor yang dibangun : 3 unit	8.156.162.500,00	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung	Jumlah rumah dinas / gedung kantor yang direhab : 6 unit	6.125.000.000,00	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Gedung	Jumlah gedung kantor yang dipelihara : 3 unit	500.000.000,00	

				Penertiban SLF dan Penetapan TAGB	Jumlah SLF yang diterbitkan : 25 berkas	100.000.000,00	
				Sosialisasi Perda Bangunan Gedung	Jumlah sosialisasi Perda bangunan gedung : 100 org	200.000.000,00	
				Monitoring Evaluasi Bangunan Gedung	Jumlah kawasan yang di monev bangunan gedungnya : 4 kec	100.161.150,00	
						<b>122.431.818.426</b>	

Pasuruan, Juli 2020  
KEPALA DINAS PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Ttd.

Ir. HARI APRIYANTO  
NIP. 19630430199203 1006

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>KOMINFO</b>	<b>Program Pengelolaan aplikasi informatika</b>	<b>100% aplikasi berjalan dan terintegrasi</b>			<b>Rp 2.789.800.000</b>	
				Pemberdayaan SDM bidang TIK	0 orang	Rp 31.060.000	
				Pengelolaan dan Pengembangan aplikasi TIK	5 aplikasi	Rp 510.800.000	
				Pengembangan infrastruktur TIK	10 unit	Rp 163.156.500	
				Pemeliharaan infrastruktur TIK	6 unit	Rp 292.146.400	
				Penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan nama domain dan e-government (SPBE)	22 unit	Rp 42.000.000	
				Layanan akses internet, intranet, dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 tahun	Rp 1.750.637.100	
2	<b>PERSANDIAN</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah</b>	<b>80 % terpenuhi standart indeks KAMI</b>			<b>Rp 671.000.000</b>	
				Persandian dan keamanan TIK	60% terdapat tersusun standar keamanan informasi	Rp -	

				Peningkatan kapasitas teknologi keamanan informasi	update lisensi firewall	Rp	587.000.000	
				Penerapan sistem manajemen pengamanan informasi	assesment ISO 27001	Rp	50.000.000	
				Pengembangan layanan keamanan informasi	50% terpenuhi layanan keamanan informasi pemerintah daerah	Rp	34.000.000	
3	<b>KOMINFO</b>	<b>Program Kerjasama Informasi dan Media Massa</b>	<b>80%</b>			<b>Rp</b>	<b>1.900.800.000</b>	
				Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	1 kali/tahun	Rp	-	
				Penyebarluasan informasi luar ruangan	3.300m2	Rp	50.000.000	
				Pembinaan dan Operasional radio	12 bulan operasional	Rp	356.000.000	
				Pengumpulan Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah	300 informasi	Rp	344.800.000	
				Produksi Konten Informasi Publik	180 konten	Rp	50.000.000	
				Penyebarluasan Informasi Publik melalui media	240 informasi/th	Rp	1.000.000.000	
				Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah	500 eks/bln	Rp	100.000.000	
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	2x	Rp	-	
4	<b>KOMINFO</b>	<b>Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai</b>	<b>75%</b>				<b>Rp</b>	<b>1.350.000.000</b>

				penyampaian informasi ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat / pemangku kepentingan	65%	Rp	1.350.000.000	
5	<b>KOMINFO</b>	<b>Program Pengembangan dan Pemberdayaan Komunikasi Publik</b>	65%			<b>Rp</b>	<b>581.600.000</b>	
				Penguatan tugas PPID dan PPID Pembantu	45%	Rp	181.600.000	
				Pembinaan dan Pengembangan pemberdayaan KIM	70%	Rp	150.000.000	
				Pengembangan dan pemberdayaan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat (dialog publik)	48 konten		200.000.000	
				pengembangan dan pemberdayaan seni pertura	10 kegiatan		-	
				Koordinasi pelaksanaan informasi dan komunikasi publik	80%	Rp	50.000.000	
				Pembinaan dan Operasional Telecenter	0%	Rp	-	
6	<b>STATISTIK</b>	<b>Program Penyelenggaraan statistik sektoral</b>	<b>50%</b>			<b>Rp</b>	<b>200.000.000</b>	
				Pengumpulan Data Statistik Sektoral	65 OPD	Rp	25.000.000	
				Pengolahan Data Statistik Sektoral	1 dokumen	Rp	25.000.000	
				Analisis Data Statistik Sektoral	1 dokumen	Rp	25.000.000	
				Membangun metadata statistik sektoral	1 dokumen	Rp	25.000.000	

				Diseminasi Data statistik sektoral	1 buku	Rp	25.000.000	
				Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	45 orang	Rp	25.000.000	
				Pengembangan Infrastrukur	1 aplikasi	Rp	25.000.000	
				Koordinasi Statistik Sektoral	2 kali	Rp	25.000.000	
7	<b>KOMINFO</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>			<b>Rp</b>	<b>5.768.847.000</b>	
				Belanja Tidak Langsung	1 tahun	Rp	3.721.597.000	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22 rekening	Rp	1.000.000.000	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	19 orang	Rp	110.000.000	
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	60 unit	Rp	30.000.000	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	40 jenis	Rp	125.000.000	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15 jenis	Rp	40.000.000	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 jenis	Rp	30.000.000	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	456 eks/bln	Rp	40.000.000	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	Rp	95.000.000	
				Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	120 orang	Rp	255.650.000	
				Penyediaan Jasa Perkantoran	10 orang	Rp	249.600.000	
				Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	0 kendaraan	Rp	-	



				Penyediaan Jasa kebersihan kantor	3 orang	Rp	72.000.000	
				Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	0 unit	Rp	-	
				Penyediaan peralatan rumah tangga	0 unit	Rp	-	
				Penyediaan bahan logistik kantor	0 unit	Rp	-	
				Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	0 laporan	Rp	-	
				Pengembangan Sumber Daya Aparatur	0 OT	Rp	-	
8	<b>KOMINFO</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>			<b>Rp</b>	<b>330.000.000</b>	
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	1 unit	Rp	-	
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	10 unit	Rp	300.000.000	
				Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor	10 unit	Rp	30.000.000	
				Pembangunan gedung kantor	Rp	-	Rp	-
				Pengadaan kendaraan dinas /operasional	0 unit	Rp	-	

				pengadaan perlengkapan gedung kantor	0 unit	Rp	-	
				Pengadaan peralatan gedung kantor	0	Rp	-	
				pengadaan mebeleur	0%	Rp	-	
				pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0 unit	Rp	-	
JUMLAH						<b>Rp</b>	<b>13.592.047.000</b>	

Mengetahui,

Plt. KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN PASURUAN

.....

Pasuruan, 18 Juni 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PASURUAN

Ttd.

**Drs. SYAIFUDIN AHMAD, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691010 198903 1 013

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS PU BINA MARGA**

<b>NO</b>	<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>OUTCOME/ TARGET</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT/ TARGET</b>	<b>PAGU KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	Urusan Wajib			Gaji dan Tunjangan		5.707.989.000	
	Bidang Urusan Pekerjaan Umum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan kantor	1 Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi , Sumberdaya air dan listrik yang tersedia	32.425.990.000	
				2 Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang dilaksanakan	354.900.000	
				3 Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang dibayarkan	435.000.000	
				4 Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kebutuhan ATK yang tersedia	128.000.000	
				5 Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan Barang Cetak yang tersedia	25.000.000	
				6 Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan & Perlengkapan Kantor yang tersedia		
				7 Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan minuman rapat yang tersedia	15.000.000	
				8 Kegiatan : Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya dana perjalanan dinas untuk rapat dan konsultasi ke luar daerah	200.000.000	
				9 Kegiatan : Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah Jasa perkantoran yang tersedia	966.110.000	

				10 Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jml laporan dan realisasi kinerja OPD yg tersusun		
				11 Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Prognosis Semesteran dan Realisasi Keuangan Akhir Tahun	Jml laporan prognosis semesteran dan realisasi keuangan akhir tahun yg disusun		
				12 Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jml Sumber Daya Aparatur yg mengikuti Diklat formal		
				13 Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Kontruksi	Jml masyarakat yg mengikuti sosialisasi peraturan Perundang - undangan Jasa Konstruksi		
				14 Kegiatan : Penyelenggaraan Bimtek Tenaga Trampil Kontruksi	Jml masy yg mengikuti Bimtek Tenaga Terampil jasa Kontruksi		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana kondisi baik	1 Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jml Kendaraan Dinas operasional yg diadakan		
				2 Kegiatan : Pengadaan Mebelair	Jml Mebelair yg diadakan		
				3 Kegiatan : Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yg diadakan		
				4 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor		
				5 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yg dipelihara	450.000.000	
				6 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/berkala Mebelair	Jumlah Mebelair yg dipelihara		
				7 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yg dipelihara		

				8 Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah JasaPemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang tersedia	-	
		Program Perencanaan dan Pengendalian Jaringan Jalan	Prosentase dokumen perencanaan dan pengendalian yang ditindaklanjuti	1. Kegiatan : Penyusunan Perencanan Umum dan Teknis	Jml dok perencanaan umum dan teknis yg dihasilkan		
				2. Kegiatan : Penyelenggaraan Study Kelayakan Jaringan Jalan	Jumlah Dokumen hasil Study Kelayakan Jaringan Jalan		
				3. Kegiatan : Persiapan dan Perencanaan Pengadaan Tanah	Jumlah dokumen persiapan pengadaan tanah		
				4. Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan Tanah / Jalan Lintas Selatan / Exit Tol Rembang / Exit Tol Grati	Luas tanah yang dibeli		
				5. Kegiatan : Pengendalian Kondisi Jalan dengan SIMANJA	Jml laporan kerusakan jalan yang ditindaklanjuti		
				6. Kegiatan : Pengelolaan Laboratorium	Jml permohonan pegujian yg ditindaklanjuti/diproses		
				7. Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jml Laporan pelaksanaan Monev Jalan dan infrstruktur pendukung		
				8. Kegiatan : Inspeksi Kondisi Jalan	Jumlah dokumen kondisi jalan		
				9. Kegiatan : Inspeksi Kondisi Jembatan	Jumlah dokumen kondisi jembatan		
				10. Kegiatan : Inspeksi Pendukung Jalan	Jumlah dokumen pendukung jalan		

		Program Pembangunan Jalan dan Infrastruktur Pendukung	1. Prosentase panjang jaringan jalan yang berkategori rusak yang dilakukan peningkatan	1. Kegiatan : Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan pembangunan/ peningkatan		
			2. Prosentase pemenuhan jaringan jalan yang dibutuhkan	Pembangunan Jalan ( Peningkatan Exit Tol Rembang)			
			3. Prosentase pemenuhan infrstruktur pendukung jalan	Pembangunan Jalan ( Peningkatan Jalan Lingkar Selatan)			
				2. Kegiatan : Peningkatan Jalan (DAU, DAK, BK Propinsi, Hibah)	Panjang Jalan yang dilakukan peningkatan		
				Peningkatan Jalan (DAU)		1.564.818.355	
				Peningkatan Jalan (DAK)			
				Peningkatan Jalan (BK Propinsi)		2.850.000.000	
				3. Kegiatan : Pembangunan Jembatan	Jml Jembatan yang dibangun		
				4. Kegiatan : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jalan	Panjang drainase / gorong - gorong yang dibangun		
				5. Kegiatan : Pembangunan Turap/talud/bronjong	Panjang turap/talud/bronjong yang dibangun		
				6. Kegiatan : Pembangunan / Peningkatan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Jumlah LPJU yang dibangun/ditingkatkan		
		Program : Pemeliharaan Jalan dan Infrastruktur Jalan	1. Prosentase Panjang jaringan jalan berkategori rusak yang dilakukan pemeliharaan	1. Kegiatan : Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan (Rutin)	Panjang jalan yg dilakukan pemeliharaan	8.500.000.000	

			2. Prosentase pemeliharaan infrastruktur pendukung jalan	2. Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Skala Periodik (Berkala Jalan)	Panjang jalan yg dilakukan pemeliharaan skala periodik/berkala		
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Skala Periodik (Berkala Jalan) (DAU)	Panjang jalan yg dilakukan pemeliharaan skala periodik/berkala	1.000.000.000	
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Skala Periodik (Berkala Jalan) (Hibah)	Panjang jalan yg dilakukan pemeliharaan skala periodik/berkala	33.166.000.000	
				3. Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan			
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan (DAU)	Jumlah jembatan yang dipelihara		
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan ( BK Propinsi)	Jumlah jembatan yang dipelihara		
				4. Pemeliharaan Jalan/Jembatan untuk menunjang Karya Bhakti TNI	Jumlah jembatan yang dipelihara		
				5. Kegiatan : Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Jumlah LPJU yang dipelihara	1.500.000.000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Prosentase Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	1 Kegiatan : Pengadaan Alat Berat	Jumlah alat berat dan peralatan yang diadakan		
				2 Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat	Jumlah alat - alat berat yang dipelihara		
				3 Kegiatan : Pemeliharaan Median Jalan	Panjang median yang dilakukan pemeliharaan		
				4 Kegiatan : Pemeliharaan Trotoar Jalan	Panjang trotoar yang dilakukan pemeliharaan		
				5 Kegiatan :Rehabilitasi /Pemeliharaan Alat alat Berat	Jumlah alat berat yang dipelihara		

				6 Kegiatan : Pemeliharaan Monumen dan Tugu Batas	Jumlah Monumen Tugu Batas yang dipelihara		
				7 Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Laboratorium	Jml Gedung Lab yang dilakukan pemeliharaan		
				8 Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat	Jml Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat yg dilakukan pemeliharaan		
				9 Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan gedung workshop	Jml gedung workshop yg dilakukan pemeliharaan		
				10 Kegiatan : Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium	Jml Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium yg diadakan		
				11 Kegiatan : Monev dan Pelaporan LPJU	Jml Lap. Monev dan Pelaporan LPJU		
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial	1. Prosentase panjang jaringan jalan yang berkategori rusak yang dilakukan peningkatan	1 Pemb/rehab/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong)	Panjang drainase/gorong-gorong yang dibangun		-
			2. Prosentase panjang jaringan jalan yang berkategori rusak yang dilakukan pemeliharaan	2 Pemb/rehab/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (Pembangunan Turap/Talud/Bronjong)	Panjang turap/talud/bronjong yang dibangun		-
				3 Pemb/rehab/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (Peningkatan Jalan)	Panjang jalan yang ditingkatkan	18.391.800.000	



				4 Pemb/rehab/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan)	Jumlah jembatan yang direhabilitasi/dipelihara	2.700.000.000	
				5 Pemb/rehab/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (Pemeliharaan Skala Periodik/Berkala Jalan)	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan skala periodik/berkala jalan	4.192.000.000	
						<b>114.572.607.355</b>	

Pasuruan, 2020  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga  
Kabupaten Pasuruan

Ttd.

**Ir. HANUNG WIDYA SASANGKA**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19641025 199103 1 010

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

<b>NO</b>	<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>OUTCOME / TARGET</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT / TARGET</b>	<b>PAGU ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air dan listrik	Rp 141.000.000	
				2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan	Rp 87.420.000	
				3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian Alat Tulis Kantor	Rp 25.215.000	
				4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	Rp 8.731.850	
				5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 1.825.000	
				6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pembelian peralatan rumah tangga	Rp 4.993.000	
				7 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu	Rp 10.300.000	
				8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Rp 117.900.000	

1	2	3	4		6	7	8
				9 Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah pembayaran Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL)	Rp 396.200.000	
				10 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Laporan kinerja triwulan dan tahunan	Rp 12.730.000	
2	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Rp 119.860.000	
				3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	Rp 17.900.000	
3	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	Persentase kelompok masyarakat yang memahami hukum dan HAM	1 Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Yang Menjamin Penegakan Hukum dan HAM	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan koordinasi dan kerjasama yang menjamin penegakan hukum dan HAM	Rp 40.960.000	
				2 Pelaksanaan RANHAM di Kabupaten Pasuruan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan RANHAM di Kabupaten Pasuruan	Rp 36.660.000	

1	2	3	4		6	7	8
4	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Persentase Ormas, LSM dan partai politik yang terfasilitasi	1 Fasilitasi dan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah perwakilan partai politik yang mengikuti verifikasi bantuan keuangan partai politik	Rp 16.880.000	
				2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Ormas/LSM dan partai politik yang dimonitor	Rp 9.880.000	
				3 Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Pemberdayaan Ormas/LSM	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dan fasilitasi pemberdayaan Ormas/LSM	Rp 75.320.000	
5	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase daerah rawan konflik yang dibina	1 Pembinaan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini Terhadap Konflik Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik masyarakat	Rp 598.130.000	
				2 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Rp 131.550.000	

1	2	3	4		6	7	8
6	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program Kesatuan Bangsa	Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan konflik yang terfasilitasi	1 Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat di Kabupaten Pasuruan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan bagi masyarakat di Kabupaten Pasuruan	Rp 288.546.000	
				2 Peningkatan Toleransi dan Pemantapan Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Pasuruan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan toleransi dan pemantapan pembauran kebangsaan di Kabupaten Pasuruan	Rp 63.240.000	
7	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program Pengembangan Etika dan Budaya Politik	Persentase kelompok masyarakat dan partai politik yang terfasilitasi pengembangan etika dan budaya politik	1 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kesadaran Pemahaman Etika dan Budaya Politik	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kesadaran pemahaman etika dan budaya politik	Rp 54.990.000	
						<b>Rp 2.260.230.850</b>	

Pasuruan, Juli 2020

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PASURUAN

Ttd.

**BAKTI JATI PERMANA, S.Sos, MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19741031 199311 1 001

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH : BKPPD**

<b>NO</b>	<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>OUTCOME/ TARGET</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT/ TARGET</b>	<b>PAGU KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja	10.000.000,00	APBD
				Administrasi Keuangan	Tersedianya Kebutuhan Keuangan Kantor	511.360.000,00	
				Administrasi Umum	Tersedianya Kebutuhan Umum Kantor	1.786.368.572,00	
				Peningkatan disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Tingkat Kedisiplinan ASN	12.878.600,00	
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan Kepegawaian Daerah	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Terkelolanya Data Informasi ASN	66.372.500,00	
				Administrasi Kepegawaian	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian	1.119.032.800,00	
				Peningkatan Kapasitas ASN	Meningkatnya Kompetensi ASN	1.208.899.193,00	
				Pengembangan Karir ASN	Terpenuhinya jumlah pejabat adminisrator dan pengawas	378.520.000,00	
				Pembinaan ASN	Terlaksananya Pembinaan Pengembangan ASN	154.228.000,00	
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Kompetensi ASN	Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terwujudnya Pengembangan Kompetensi ASN	1.835.294.500,00	
<b>JUMLAH</b>						<b>7.082.954.165,00</b>	

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

<b>NO</b>	<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>OUTCOME/ TARGET</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT/ TARGET</b>	<b>PAGU KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	Urusan : Wajib Pelayanan Dasar	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran listrik/air/telepon	22.320.000	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan	63.300.000	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor jasa kebersihan	9.000.000	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian ATK	35.000.000	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	26.500.000	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan kantor	13.400.000	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu	41.350.000	
				Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	146.578.500	
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Honor tenaga kontrak/THL	283.000.000	

				Penyediaan Pakaian Kerja	Jenis pengadaan pakaian kerja lapangan	37.780.000	
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan dokumen kinerja	25.550.000	
		Prpgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat perawatan	438.000.000	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang mendapat pemeliharaan	59.250.000	
				Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	40.140.000	
		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana yang dibentuk di kawasan rawan bencana	Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Jumlah desa / kelurahan tangguh bencana yang dibentuk	256.240.000	
				Sosialisasi Antisipasi Bencana	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	124.600.000	
				Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penanggulangan Bencana dan Gladi Mekanisme Tanggap Darurat Bencana	Jumlah relawan yang mengikuti pelatihan	127.140.000	
				Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kajian/RPB yang disusun	104.640.000	
		Program Tanggap Darurat	Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Penyediaan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pangan, Sandang, Air Bersih, Huntara dan Sanitasi Darurat	Jenis bantuan yang diberikan pada korban bencana	249.800.000	



				Pusdalops Penanggulangan Bencana	Jenis bencana yang dilaporkan	85.000.000	
		Program Rehabilitasi dan Rekontruksi	Persentase usulan pemulihan daerah terdampak yang ditindaklanjuti	Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Masa Pemulihan	Jenis bantuan material bahan bangunan	158.750.000	
<b>TOTAL</b>						<b>2.347.338.500</b>	

Pasuruan, Juli 2020  
Kepala Pelaksana BPBD  
Kabupaten Pasuruan,

Ttd.

**TECTONA JATI KHM., S.STP., M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750807 199511 1 002

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Belanja Tidak Langsung	Belanja gaji dan tunjangan ASN			4.439.279.000,00	
		<b>Belanja Langsung</b>				<b>10.275.564.431,79</b>	
1		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah persentase jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani			3.071.506.831,79	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25 lokasi / bulan	321.400.706,00	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	68 jenis barang	105.000.000,00	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	50.000.000,00	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40 jenis barang	41.000.000,00	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	100.000.000,00	
				Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50 kali	170.000.000,79	
				penyediaan Jasa Perkantoran	78 THL dan 15 org ptgs	1.799.106.125,00	

				Pengembangan Sumber Daya Aparatur	133 org	250.000.000,00	
				Fasilitasi operasional pelayanan administrasi kependudukan di 24 kecamatan	24 kec	200.000.000,00	
				Laporan Kinerja dan Keuangan	100%	35.000.000,00	
2		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia		100%	1.295.000.000,00	
				Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	1 unit R2 dan 1 unit R4	430.000.000,00	
				Pengadaan Meubelair	unit	65.000.000,00	
				Pengadaan Peralatan Kantor	unit	350.000.000,00	
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	lokasi	105.000.000,00	
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas / operasional	12 bulan	280.000.000,00	
				Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan kantor	12 bulan	65.000.000,00	
3		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Tercapainya database kependudukan			431.667.000,00	
				Penyediaan Informasi yang dapat di akses masyarakat	24 kec	146.667.000,00	
				Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	24 kec	285.000.000,00	

4		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan			2.900.417.300,00	
				Pendataan Dokumen kependudukan bagi tenaga kerja WNI / WNA	0	150.000.000,00	
				Fasilitasi penerbitan KIA	0	185.000.000,00	
				Penerbitan dokumen kependudukan	0	2.565.417.300,00	
5		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL			0	1.932.609.700,00	
			Peningkatan cakupan perkawinan, perceraian dan akta pencatatan sipil lainnya		0	100.000.000,00	
			Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0	1.667.609.700,00	
			Koordinasi dan Konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan		Kali	165.000.000,00	
6		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang valid dan akurat		0	644.363.600,00	

				Evaluasi dan Monitoring Petugas Registran	365 desa	62.960.000,00	
				Sosialisasi kebijakan kependudukan	500 peserta	250.000.000,00	
				Kerjasama Lintas sektoral, fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	MOU	100.000.000,00	
				Gerakan Pasuruan Sadar Administrasi Kependudukan	24 kec	231.403.600,00	
					<b>Total</b>	<b>14.714.843.431,79</b>	

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PASURUAN**

<b>NO</b>	<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>OUTPUT/ TARGET</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT/ TARGET</b>	<b>PAGU KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemerintahan Daerah yang terlayani  Target : 100%	1 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah laporan tribulanan dan tahunan  Target : 5 Laporan	50.000.000,00	
				2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima gaji  Target : 34 Orangbulan	4.186.974.000,00	
				3 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honor Tenaga Kontrak / THL  Target : 12 Orangbulan	287.322.000,00	
				4 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Telepon, Air dan Internet selama 12 bulan  Target : 12 Bulan	60.400.000,00	
				5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan, Kegiatan dan Pelaku Pengadaan Barang / Jasa  Target : 13 Orangbulan	65.460.000,00	

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar				6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Pembayaran Honor Jasa Kebersihan	61.000.000,00	
					Target : 2 Orangbulan		
				7 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor	40.000.000,00	
					Target : 52 Jenis		
				8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	65.000.000,00	
					Target : 14 Jenis		
				9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.000.000,00	
					Target : 14 Jenis		
				10 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Konsumsi Tamu dan Rapat	55.000.000,00	
					Target : 1 Keg		
				11 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan Perjalanan dinas luar daerah	165.000.000,00	
					Target : 1 Paket		
				12 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	235.588.164,63	
	Target : 17 Unit						
13 Pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	5.000.000,00					
	Target : 4 Jenis						

				14 Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara Target : 10 Unit	20.000.000,00	
				15 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Orang yang mengikuti Diklat Target : 5 Orang	20.000.000,00	
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Pembinaan Lingkungan Sosial	Prosentase BUMDes yang mengikuti pelatihan Target : 24 Desa	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah Desa yang diberdayakan melalui pembinaan dan pelatihan kerja bagi masyarakat Target : 24 Desa	500.000.000,00	
3	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Penataan Desa	Prosentase Desa yang sarana prasarananya Target : 125 Desa	1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang sarana prasarananya bertambah Target : 125 Desa	55.000.000,00	
4	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa yang Administrasinya Baik Target : 24 Kec	1 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang pengelolaan administrasinya tertib Target : 24 Desa	85.000.000,00	
				2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangan Desa Tertib dan Terinventarisasi Aset Desa Target : 341 Desa	275.000.000,00	
				3 Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	Jumlah BPD yang kapasitasnya meningkat Target : 24 Desa	55.000.000,00	



				4 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Desa yang menyelenggarakan Musrenbangdes/kel Target : 365 Desa/Kel	31.312.500,00	
				5 Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah terbentuknya BUMDesa Bersama Kawasan Perdesaan Target : 1 BUMDesa bersama kawasan	40.000.000,00	
				6 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa yang dilantik Target : 54 Desa	900.000.000,00	
				7 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa	Jumlah Desa yang Perkembangannya Meningkat Target : 341 Desa	60.431.000,00	
5	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Prosentase Kelembagaan Masyarakat Baik Target : 341 Desa	1 Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa yang aktif Target : 1 Lembaga Masyarakat Desa	25.000.000,00	
				2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah Desa/Kel Yang Kelembagaan Masyarakatnya aktif Target : 75 Kelembagaan Desa	105.756.500,00	

				3 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah lembaga yang usaha Ekonomi Masyarakatnya Berkembang	20.000.000,00	
					Target : 40 Lembaga		
				4 Jatim Puspa	Jumlah Desa yang Mendapatkan Bantuan Jatim Puspa	50.000.000,00	
					Target : 7 Desa		
					<b>TOTAL</b>	<b>7.635.244.164,63</b>	

Pasuruan, 15 Juli 2020  
KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KAB. PASURUAN

Ttd.

**NURUL HUDA, S.Sos,MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700302 199003 1 002

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN PASURUAN**

<b>NO</b>	<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>OUTCOME/ TARGET</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT/ TARGET</b>	<b>PAGU KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan	Terpenuhinya dana administrasi keuangan		
				1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN setiap Bulan	4.636.161.100	BELANJA TIDAK LANGSUNG
				2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Anggaran Honor Administrasi Tugas	310.000.000	HONOR THL dan Gaji PTT
				Kegiatan Administrasi Umum	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran		
				1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terkirim melalui jasa pengiriman	5.000.000	
				2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya dana pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik setiap bulan	100.000.000	
				3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya dana pembayaran jasa administrasi keuangan	85.000.000	
				4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor	100.000.000	
				5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan	100.000.000	
				6 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000	

		7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20.000.000	
		8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan Makanan & Minuman	70.000.000	
		9	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	887.933.887	
		10	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diasuransikan	50.000.000	
		11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan	15.000.000	
		12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	300.000.000	
		13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung/Kantor	80.000.000	
		14	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		
		15	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terlaksananya Pengadaan pakaian Dinas Khusus Inspektorat	40.000.000	
		16	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya SDM Aparatur Pengawasan	900.000.000	
		17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tenaga yang mengikuti Bintek, PKS, Penjurusan pejabat fungsional, penilaian angka kredit dan FGD	208.500.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase LHP tepat waktu dan tindak lanjut atas rekomendasi		
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tercapainya pemeriksaan pada obyek pemeriksaan (obrik)	
		1	Audit Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Audit Kinerja dan keuangan	3.000.000.000	

			2	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya Frekuensi Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	21.000.000	
			3	Review Kinerja dan Keuangan	Jumlah Review kinerja dan keuangan	225.000.000	
			4	Penilaian ZI menuju WBK/WBBM	ZI Berpredikat WBK	45.000.000	
			5	Pengawasan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Terlaksananya PUG	33.500.000	
			6	Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	Terlaksananya Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar	1.050.000.000	
			7	Survey Penilaian Integritas	Terlaksananya Survey penilaian Integritas	150.000.000	
			8	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Laporan PMRB Kabupaten dan Reviu PMRB OPD	45.000.000	
						<b>12.487.094.987</b>	

Pasuruan, 15 Juli 2020

Plt INSPEKTUR KABUPATEN PASURUAN

Ttd.

**Dra. NINUK IDA SURYANI, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19651205 198903 2 011

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN**

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDIDIKAN	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Presetase pemenuhan layanan kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	888.312.000	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan, pengelola aset, pelaku pengadaan barang/ jasa, pelaksana verifikasi pajak, gaji, sertifikasi, akuntansi, SPM, juru bayar, pengurus barang, pembantu pengurus barang, bendahara penerimaan	703.080.000	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian ATK	100.000.000	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	90.000.000	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat listrik yang direalisasikan	169.000.000	
					Jumlah pembelian meterai		
					Jumlah pembelian alat kebersihan		
					Jumlah pembelian perlengkapan rumah tangga		
					Jumlah pembelian mesin hitung uang, rak buku, komputer, printer, audio mixer		
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah konsumsi rapat dan tamu	137.363.300
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi	100.000.000				
	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak dan THL	35.433.400.000				
2	PENDIDIKAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Presentase sarana prasarana kondisi baik	Pengadaan Mebelair	Jumlah pembelian Mebelair	-	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor yang direalisasikan	100.000.000	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor yang direalisasikan	550.088.000	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas yang direalisasikan	100.000.000	
				Pengadaan Tanah	Jumlah lembaga yang menerima pengadaan tanah	-	
4	PENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	APK PAUD Persentase peningkatan jumlah ruang kelas pendidikan anak usia dini Persentase Guru Paud yang bersertifikat (terlatih) untuk mengajar	Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah gedung PAUD yang dibangun		
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah lembaga penerima APE	160.000.000	
				Pengadaan Mebelair Sekolah	Jumlah mebelair yang diterima		
				Rehabilitasi Sedang/berat Bangunan Sekolah TK	Jumlah gedung TK pembina dan TK swasta yang direhab	440.000.000	
				Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Jumlah lembaga yang diikutsertakan dalam Bimtek Tenaga Pendidik RA		
				Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah siswa yang diikutsertakan dalam Lomba Siswa RA		
				Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah pendidik PAUD dan TK yang menerima insentif	10.173.600.000	
				Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah peserta Bimtek Pendidikan Karakter PAUD untuk guru PAUD	-	
					Jumlah peserta Bimtek Pendidikan Karakter Dikmas untuk guru PNF		
					Jumlah peserta bimtek pengembangan kurikulum PAUD		
Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah peserta rakor 3 komponen PAUD	-					
Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah peserta seleksi lomba HAN dan puncak HAN	-					
Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga PAUD	Jumlah peserta bimtek akreditasi lembaga PAUD	-					
5	PENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Persentase Tutor dan penyelenggara/ pengelola PNF yang bersertifikat Jumlah lembaga pendidikan Jumlah lembaga kursus dan pelatihan menjadi rujukan	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	Jumlah peserta bintek pembinaan kursus dan kelembagaan		
				Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Jumlah peserta bimtek pengembangan pendidikan keaksaraan		
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal	Jumlah sarana dan prasarana (server)	-	
					Jumlah sarana dan prasarana (modul paket A, B dan C)		
					Jumlah sarana dan prasarana (komputer)		
	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal	Jumlah peserta HAI dan Jambore PNF	-				

				Penyelenggraan Paket A Setara SD	Jumlah penerima honor tutor kejar paket A	47.250.000	
					Jumlah Cetak ujian semester ganjil dan genap		
					Jumlah penerima konsumsi ujian semester ganjil/genap		
				Penyelenggraan Paket B Setara SMP	Jumlah penerima honor tutor kejar paket B	850.650.000	
					Jumlah Cetak ujian semester ganjil dan genap		
					Jumlah penerima konsumsi ujian semester ganjil/genap		
				Penyelenggraan Paket C Setara SMU	Jumlah penerima honor tutor kejar paket C	1.537.200.000	
					Jumlah Cetak ujian semester ganjil dan genap		
					Jumlah penerima konsumsi ujian semester ganjil/genap		
				Perencanaan dan Penyusunan Pendidikan Non Formal	Jumlah kegiatan peningkatan IPM Paud dan Dikmas	368.928.530	
				Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Pendidikan Non Formal	Jumlah peserta bimtek akreditasi lembaga PNF	-	
5	PENDIDIKAN	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	APM SD/MI APM SMP/MTs  Presentase peningkatan jumlah ruang kelas pendidikan dasar dan RPL a. SD/MI b. SMP/MTs Presentase Guru SD/SMP yang bersertifikat dan terlatih Angka Pendidikan Yang Ditamatkan : a. SD, SMP b. MI, MTs	Peningkatan Sarana/Prasarana Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Kelas Baru dan perabot ruang kelas baru SD	16.668.287.000	
					Jumlah Rehabilitasi Rusak Sedang Berang Ruang Kelas dan SPL		
					Jumlah Lembaga Penerima Pagar Keliling		
				Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Jumlah peserta Kegiatan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar (SD/SMP)	-	
				Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	Terlaksananya Kegiatan Lomba Siswa MI dan MTs	-	
				Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Terlaksananya Kegiatan Bimtek Penyusunan Kurikulum	-	
				Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (bos) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	Jumlah Peserta Lomba Motivasi Belajar Mandiri (SMP)	-	
					Jumlah Peserta Try Out SD Kelas VI		
					Jumlah Scanning LJK Try Out dan US Kelas VI		
					Jumlah Peserta Ujian TSM Semester Genap Kelas I - VI		
					Jumlah Peserta Ujian TSM Semester Ganjil Kelas I - VI		
					Jumlah Peserta USBN dan US Kelas VI		
					Jumlah penerima honor tim penyusun naskah US I dan II MI/MTs		
				Penyediaan Biaya Operasional Madrasah	Jumlah penerima honor tim penyusun naskah UAM MI/MTs	-	
					Jumlah peserta US I, US II dan UAM MI/MTs		
				Penyediaan dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	Jumlah Peserta dan scanning LJK Try Out SMP Kelas 9	-	
					Jumlah Peserta Ujian Semeseter Genap 7,8,9		
					Jumlah Peserta Ujian Semeseter Ganjil 7,8,9		
					Jumlah Siswa yang mengikuti lomba dan olimpiade (SD/SMP)		
					Jumlah Peserta Sosialisasi Implementasi Kurikulum 2013		
					Jumlah Penerima Guru dan Tenaga Kependidikan di Daerah Terpencil		
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti lomba dan olimpiade SD	-	
					Jumlah Siswa yang mengikuti lomba dan olimpiade SMP		
				Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta Sosialisasi Implementasi Kurikulum 2013	-	
					Jumlah Peserta Sosialisasi Implementasi Kurikulum 2013		
				Penyelenggaraan Multi-grade Teaching Di Daerah Terpencil	Jumlah Penerima Guru dan Tenaga Kependidikan di Daerah Terpencil	1.272.000.000	
				Biaya Operasional BPPDGS	Tersedianya BOP BPPDGS	-	
6	PENDIDIKAN	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase peningkatan guru berpendidikan S1/D.IV :  a. PAUD  b. SD/MI  c. SMP/MTs  Presentase GTK yang bersertifikat dan terlatih	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Jumlah Guru yang diikutkan Sosialisasi Sertifikasi Guru	-	
					Jumlah Guru Bersertifikat Pendidik yang diikutkan Pembinaan		
				Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Kepala Sekolah yang diikutkan Diklat Penguatan KS	-	
					Jumlah Staf yang diikutkan Diklat Pengolah Administrasi Perpustakaan Sekolah		
					Jumlah Staf yang diikutkan Diklat Pengolah Administrasi Laboratorium Sekolah		
				Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	Jumlah Guru yang diikutkan Seleksi dan Diklat calon pengawas Sekolah	-	

			untuk meningkatkan kompetensi Rasio Kebutuhan GTK terhadap lembaga : a. PAUD FORMAL b. SD c. SMP		Jumlah penilik yang iikutkan Diklat Peningkatan Mutu		
					Jumlah Pengawas Sekolah yang diikutkan Diklat Peningkatan Mutu		
					Jumlah Guru yang diikutkan PPG		
				Pembinaan Kelompok Kerja Guru (kkg)	Jumlah Guru TK/KB yang diikutkan Optimalisasi KKG Guru	-	
				Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah GTK PNS dan Non PNS yang diikutkan Pembinaan	7.140.600.000	
					Jumlah Guru TK yang diikutkan Bimtek Pembelajaran Kreatif Siswa		
					Terpenuhinya Jasa Tenaga Honorer K2 (GTK )		
				Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Tenaga Administrasi yang diikutkan Pendataan	-	
				Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	Jumlah GTK Yang dikutkan pembinaan, Penilaian Angka Kredit Guru dan Kenaikan pangkat PNS	-	
					Jumlah GTK yang Mengikuti Seleksi GTK Berprestasi		
					Jumlah GTK yang diikutkan Sosialisasi/Implementasi Peraturan Kepegawaian		
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Sekolah yang dilakukan monitoring Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan	-	
7	PENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIKAN BERKARAKTER	Rasio TPQ yang berstandar Rasio Madin yang berstandar APM TPQ APM Madin Presentase guru TPQ/Madin yang bersertifikat	Penyelenggaraan Pendidikan Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ)	Jumlah peserta bimtek penyelenggaraan TPQ	157.118.000	
				Penyelenggaraan Pendidikan Madin/ Pontren	Jumlah peserta bimtek penyelenggaraan Madin/Pontren	242.882.000	
8	PENDIDIKAN	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	IKM Layanan Pendidikan	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen Kegiatan Forum SKPD, SAKIP, dan RKS SD/SMP	246.000.000	
				Pengendalian dan Pengawasan Penerapan Azas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan dana Dekonsentrasi dan dana Pembantuan	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi BOS	52.800.000	
					Jumlah dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Workshop BOS		
				Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Jumlah dokumen pendataan dan informasi pendidikan	1.127.963.000	
				Penerapan dan Penyebarluasan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Jumlah dokumen pelaksanaan implementasi SPM Pendidikan Dasar (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan)	-	
9	PENDIDIKAN	PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)	IKM Layanan Pendidikan	BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 BANGIL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	1.205.600.000	
				BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 BANGIL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	1.021.900.000	
				BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 BANGIL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	895.400.000	
				BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 BANGIL SATU ATAP	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	224.400.000	
				BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 BEJI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	1.193.500.000	
				BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 BEJI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	812.900.000	
				BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 GEMPOL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	1.270.500.000	
				BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 GEMPOL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	920.700.000	
				BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 GEMPOL SATU ATAP	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	179.300.000	
				BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 GONDANGWETAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	814.000.000	
				BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 GONDANGWETAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	444.400.000	
				BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 GRATI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	902.000.000	
				BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 GRATI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	699.600.000	
				BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 GRATI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	143.000.000	
				BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	309.100.000	
				BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	270.600.000	
				BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 KRATON	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	554.400.000	
				BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 KRATON	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	740.300.000	
				BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 LEKOK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	548.900.000	
				BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 LUMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	196.900.000	
				BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 LUMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	320.100.000	
				BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 LUMBANG SATU ATAP	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	132.000.000	
				BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 LUMBANG SATU ATAP	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	86.900.000	



BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 NGULING	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	743.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 NGULING	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	984.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 NGULING	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	398.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 NGULING	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	203.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 PANDAAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	1.182.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 PANDAAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	1.244.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 PASREPAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	316.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 PASREPAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	196.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 PASREPAN SATU ATAP	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	95.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 PASREPAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	181.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 POHJENTREK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	305.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 PRIGEN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	645.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 PRIGEN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	561.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	618.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	442.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	492.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	1.062.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	298.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 PURWOSARI SATU ATAP	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	331.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 PUSPO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	300.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 PUSPO SATU ATAP	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	235.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 PUSPO SATU ATAP	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	196.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 PUSPO SATU ATAP	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	94.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 REJOSO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	345.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 REJOSO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	359.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 REMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	597.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 REMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	276.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 SUKOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	1.003.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 SUKOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	529.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 TOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	290.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 TOSARI SATU ATAP	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	95.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 TOSARI SATU ATAP	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	79.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 TOSARI SATU ATAP	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	70.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 TUTUR	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	742.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 TUTUR	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	189.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 TUTUR SATU ATAP	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	104.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 WINONGAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	738.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 WINONGAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	227.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 WONOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	699.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 WONOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	203.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BENDOMUNGAL I BANGIL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	100.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BENDOMUNGAL II BANGIL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	76.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DERMO I BANGIL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	456.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DERMO II BANGIL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	113.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEMPENG I BANGIL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	218.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEMPENG II BANGIL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	116.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIANYAR I BANGIL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	99.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIANYAR II BANGIL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	84.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIREJO BANGIL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	497.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KAUMAN BANGIL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	190.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KERSIKAN I BANGIL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	207.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KERSIKAN II BANGIL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	99.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KIDULDALEM I BANGIL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	477.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KIDULDALEM III BANGIL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	301.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KIDULDALEM IV BANGIL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	120.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KOLURSARI I BANGIL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	109.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KOLURSARI II BANGIL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	268.200.000	

BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LATEK BANGIL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	222.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MANARUWI I BANGIL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	168.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MANARUWI II BANGIL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	147.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MASANGAN BANGIL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	103.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN POGAR I BANGIL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	231.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN POGAR II BANGIL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	230.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN POGAR III BANGIL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	181.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN RACI I BANGIL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	207.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN RACI II BANGIL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	132.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMBAKAN BANGIL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	116.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BAUJENG I BEJI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	123.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BAUJENG II BEJI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	277.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BEJI I BEJI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	237.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BEJI II BEJI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	130.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BEJI IV BEJI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	189.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CANGKRINGMALANG I BEJI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	112.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CANGKRINGMALANG II BEJI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	423.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CANGKRINGMALANG III BEJI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	86.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GAJAH BENDO BEJI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	151.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GLANGGANG I BEJI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	125.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GLANGGANG II BEJI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	165.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GUNUNGGANGSIR I BEJI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	507.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GUNUNGGANGSIR II BEJI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	257.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GUNUNGGANGSIR III BEJI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	185.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GUNUNGSARI I BEJI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	51.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GUNUNGSARI II BEJI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	82.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDUNGBOTO BEJI BEJI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	162.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDUNGRINGIN I BEJI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	135.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDUNGRINGIN II BEJI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	127.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDUNGRINGIN III BEJI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	275.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDUNGRINGIN IV BEJI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	82.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KENEP BEJI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	72.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGEMBE I BEJI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	251.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PAGAK BEJI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	121.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SIDOWAYAH BEJI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	107.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERSARI I BEJI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	263.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERSARI II BEJI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	199.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BULUSARI I GEMPOL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	354.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BULUSARI II GEMPOL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	131.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CARAT I GEMPOL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	266.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CARAT II GEMPOL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	306.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEMPOL I GEMPOL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	128.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEMPOL II GEMPOL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	135.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEMPOL III GEMPOL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	441.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JERUK PURUT I GEMPOL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	136.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JERUK PURUT II GEMPOL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	193.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGREJO I GEMPOL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	166.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGREJO II GEMPOL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	383.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGREJO III GEMPOL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	196.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEJAPANAN I GEMPOL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	227.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEJAPANAN II GEMPOL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	331.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEJAPANAN III GEMPOL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	162.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEJAPANAN IV GEMPOL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	299.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEJAPANAN V GEMPOL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	268.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEPULUNGAN I GEMPOL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	297.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEPULUNGAN II GEMPOL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	169.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEPULUNGAN III GEMPOL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	245.700.000	

BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGERONG GEMPOL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	240.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PANDEREJO GEMPOL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	194.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN RANDUPITU GEMPOL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	327.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERSUKO I GEMPOL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	216.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERSUKO II GEMPOL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	165.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATUKOSEK GEMPOL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	211.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WINONG I GEMPOL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	138.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WINONG II GEMPOL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	184.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOSARI GEMPOL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	82.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOSUNYO I GEMPOL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	163.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOSUNYO II GEMPOL	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	81.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BAJANGAN GONDANGWETAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	225.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BAYEMAN I GONDANGWETAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	183.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BAYEMAN II GONDANGWETAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	83.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BRAMBANG GONDANGWETAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	151.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GAYAM I GONDANGWETAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	180.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GONDANGREJO GONDANGWETAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	166.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GONDANGWETAN I GONDANGWETAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	258.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GONDANGWETAN II GONDANGWETAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	54.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GROGOL GONDANGWETAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	160.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIREJO GONDANGWETAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	153.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGSENTUL I GONDANGWETAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	431.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEBONCANDI GONDANGWETAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	144.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KERSIKAN GONDANGWETAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	191.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LAJUK GONDANGWETAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	79.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PATEGUHAN GONDANGWETAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	138.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PEKANGKUNGAN GONDANGWETAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	153.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN RANGGEH GONDANGWETAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	72.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEKARPUTIH GONDANGWETAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	146.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TEBAS GONDANGWETAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	247.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TENGGILISREJO GONDANGWETAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	215.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOJATI GONDANGWETAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	211.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOSARI GONDANGWETAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	249.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CUKURGONDANG I GRATI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	160.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CUKURGONDANG II GRATI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	190.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GRATI I GRATI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	293.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GRATI II GRATI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	136.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GRATI IV GRATI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	76.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIPANG I GRATI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	158.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIPANG II GRATI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	225.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KAMBINGANREJO GRATI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	174.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGKLIWON GRATI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	176.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGLO I GRATI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	197.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGLO II GRATI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	98.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEBONREJO I GRATI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	151.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEBONREJO II GRATI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	139.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDAWUNGKULON I GRATI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	148.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDAWUNGKULON II GRATI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	166.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDAWUNGKULON III GRATI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	96.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDAWUNGWETAN I GRATI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	265.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDAWUNGWETAN II GRATI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	144.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDAWUNGWETAN III GRATI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	122.400.000	

BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDAWUNGWETAN IV GRATI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	147.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PLOSOSARI I GRATI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	116.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PLOSOSARI II GRATI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	170.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PLOSOSARI III GRATI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	171.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN RANUKLINDUNGAN I GRATI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	121.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN RANUKLINDUNGAN II GRATI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	177.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN REBALAS I GRATI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	131.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN REBALAS II GRATI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	130.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN REBALAS III GRATI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	183.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERAGUNG I GRATI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	179.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERAGUNG II GRATI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	146.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERDAWESARI I GRATI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	393.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERDAWESARI III GRATI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	154.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERDAWESARI IV GRATI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	123.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TREWUNG GRATI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	195.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN AMBAL-AMBIL II KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	185.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN AMBAL-AMBIL I KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	157.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BENERWOJO KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	100.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN COBANJOYO I KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	148.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN COBANJOYO II KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	71.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDEMUNGAN I KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	190.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDEMUNGAN II KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	62.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDUNG PENGARON I KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	98.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDUNG PENGARON II KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	60.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEJAYAN KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	313.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEPUH KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	29.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KETANGIREJO I KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	90.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KETANGIREJO II KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	90.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KLANGRONG I KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	97.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KLANGRONG II KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	156.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KLINTER KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	120.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KURUNG I KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	145.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KURUNG II KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	66.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LINGGO KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	120.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LOROKAN I KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	88.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LOROKAN II KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	101.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LUWUK KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	128.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ORO-ORO PULE KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	90.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PACARKEKELING I KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	183.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PACARKEKELING II KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	85.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PATEBON KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	188.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN RANDUGONG KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	102.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SLADI KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	220.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERBANTENG KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	163.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERSUKO KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	138.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TANGGULANGIN KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	186.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TUNDOSORO KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	152.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WANGKALWETAN KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	96.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WRATI I KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	130.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WRATI II KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	97.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WRATI III KEJAYAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	77.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ASEMKANDANG KRATON	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	144.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BENDUNGAN KRATON	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	481.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CURAHDUKUH I KRATON	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	155.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CURAHDUKUH II KRATON	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	64.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DHOMPO I KRATON	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	146.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DHOMPO II KRATON	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	92.700.000	

BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GAMBIRKUNING KRATON	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	308.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GERONGAN KRATON	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	201.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JERUK KRATON	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	157.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIREJO KRATON	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	328.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGANYAR I KRATON	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	232.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGANYAR II KRATON	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	102.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEBOTOHAN KRATON	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	192.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KLAMPISREJO KRATON	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	144.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KRATON KRATON	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	137.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MULYOREJO KRATON	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	114.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGABAR KRATON	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	188.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGEMPIT KRATON	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	210.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PLINGGISAN I KRATON	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	367.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PUKUL KRATON	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	169.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PULOKERTO KRATON	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	113.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN REJOSARI I KRATON	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	195.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SELOTAMBAK KRATON	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	159.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEMARE KRATON	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	212.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SIDOGIRI KRATON	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	322.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SLAMBRIK KRATON	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	169.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMBAKREJO KRATON	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	247.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMBAKSARI KRATON	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	170.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ALASTLOGO I LEKOK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	150.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ALASTLOGO II LEKOK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	140.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ALASTLOGO III LEKOK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	112.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BALUNGANYAR LEKOK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	297.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BRANANG I LEKOK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	141.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BRANANG II LEKOK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	217.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEJUGJATI I LEKOK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	72.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEJUGJATI II LEKOK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	126.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEJUGJATI III LEKOK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	173.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JATIREJO I LEKOK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	167.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JATIREJO II LEKOK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	247.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PASINAN I LEKOK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	183.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PASINAN II LEKOK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	79.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PASINAN III LEKOK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	63.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ROWOGEMPOL I LEKOK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	178.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ROWOGEMPOL II LEKOK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	288.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ROWOGEMPOL III LEKOK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	114.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEMEDUSARI I LEKOK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	83.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMBAKLEKOK I LEKOK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	240.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMBAKLEKOK III LEKOK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	214.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMPUNG I LEKOK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	117.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMPUNG II LEKOK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	131.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATES I LEKOK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	264.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATES III LEKOK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	206.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BANJARIMBO I LUMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	68.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BANJARIMBO II LUMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	55.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BULUKANDANG I LUMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	102.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BULUKANDANG II LUMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	109.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CUKURGULING I LUMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	114.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CUKURGULING II LUMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	99.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CUKURGULING III LUMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	125.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGASEM I LUMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	54.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGASEM II LUMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	93.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGJATI I LUMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	156.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGJATI II LUMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	38.700.000	

BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KRONTO I LUMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	161.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KRONTO III LUMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	130.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LUMBANG I LUMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	32.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LUMBANG III LUMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	79.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PANCUR I LUMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	50.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PANCUR II LUMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	99.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PANCUR III LUMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	42.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PANDITAN I LUMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	144.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PANDITAN II LUMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	98.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATULUMBUNG II LUMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	142.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATULUMBUNG III LUMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	66.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATULUMBUNG IV LUMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	65.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WELULANG I LUMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	62.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WELULANG II LUMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	9.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOREJO I LUMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	90.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOREJO II LUMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	61.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DANDANGGENDIS I NGULING	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	220.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KAPASAN I NGULING	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	221.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KAPASAN II NGULING	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	136.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDAWANG I NGULING	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	221.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDAWANG II NGULING	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	73.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MLATEN I NGULING	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	288.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGULING I NGULING	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	273.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGULING II NGULING	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	244.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGULING III NGULING	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	199.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PENUNGGUL NGULING	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	139.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN RANDUATI NGULING	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	167.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SANGANOM I NGULING	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	109.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SANGANOM II NGULING	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	129.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEBALONG NGULING	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	124.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEDARUM I NGULING	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	224.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEDARUM II NGULING	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	95.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUDIMULYO I NGULING	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	103.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERANYAR I NGULING	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	158.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERANYAR II NGULING	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	243.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERANYAR III NGULING	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	109.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERANYAR IV NGULING	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	144.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATESTANI I NGULING	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	171.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATESTANI IV NGULING	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	77.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATUPRAPAT I NGULING	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	169.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATUPRAPAT II NGULING	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	95.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATUPRAPAT III NGULING	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	140.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WOTGALIH I NGULING	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	223.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WOTGALIH II NGULING	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	104.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BANJARKEJEN PANDAAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	60.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BANJARSARI PANDAAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	117.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DURENSEWU I PANDAAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	287.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DURENSEWU II PANDAAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	126.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JOGOSARI I PANDAAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	570.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JOGOSARI II PANDAAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	224.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGJATI I PANDAAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	186.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGJATI II PANDAAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	168.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGJATI III PANDAAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	173.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEBON WARIS I PANDAAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	416.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEMIRISEWU I PANDAAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	171.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEMIRISEWU II PANDAAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	241.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KUTOREJO I PANDAAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	196.200.000	

BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KUTOREJO II PANDAAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	377.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NOGOSARI I PANDAAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	146.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PANDAAN I PANDAAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	146.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PANDAAN II PANDAAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	240.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PETUNGASRI I PANDAAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	302.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PETUNGASRI III PANDAAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	323.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PLINTAHAN I PANDAAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	189.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PLINTAHAN II PANDAAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	96.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEBANI I PANDAAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	222.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBEREJO I PANDAAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	203.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBEREJO II PANDAAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	181.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERGEDANG I PANDAAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	225.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERGEDANG II PANDAAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	143.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERGEDANG III PANDAAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	99.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAWANGREJO I PANDAAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	291.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAWANGREJO II PANDAAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	323.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TUNGGUL WULUNG I PANDAAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	51.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TUNGGUL WULUNG II PANDAAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	139.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WEDORO I PANDAAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	183.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WEDORO II PANDAAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	82.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GALIH I PASREPAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	99.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MANGGUAN I PASREPAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	133.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MANGGUAN II PASREPAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	79.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGANTUNGAN I PASREPAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	61.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGANTUNGAN II PASREPAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	85.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PASREPAN I PASREPAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	315.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN POHGADING PASREPAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	180.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SIBON I PASREPAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	101.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SIBON II PASREPAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	158.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TEMPURAN II PASREPAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	112.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN AMPELSARI I PASREPAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	68.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN AMPELSARI III PASREPAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	102.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CENKONG PASREPAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	158.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GALIH II PASREPAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	139.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JOGOREPUH PASREPAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	109.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KLAKAH PASREPAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	45.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LEMAHBANG PASREPAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	69.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PASREPAN III PASREPAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	54.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PETUNG I PASREPAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	170.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PETUNG II PASREPAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	145.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PETUNG III PASREPAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	52.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN POHGEDANG PASREPAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	77.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN REJOSALAM I PASREPAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	92.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN REJOSALAM II PASREPAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	106.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SAPULANTE PASREPAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	98.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMBAKREJO PASREPAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	159.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TEMPURAN I PASREPAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	162.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TEMPURAN III PASREPAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	75.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LOGOWOK I POHJENTREK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	177.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PARASREJO I POHJENTREK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	146.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PARASREJO II POHJENTREK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	126.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PLERET I POHJENTREK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	144.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PLERET II POHJENTREK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	55.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PLERET III POHJENTREK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	91.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUKOREJO POHJENTREK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	186.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUNGIKULON POHJENTREK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	198.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUNGIWETAN POHJENTREK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	182.700.000	

BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUSUKANREJO I POHJENTREK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	186.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUSUKANREJO III POHJENTREK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	97.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TIDU I POHJENTREK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	134.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WARUNGOWO I POHJENTREK	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	437.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BULUKANDANG I PRIGEN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	185.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BULUKANDANG II PRIGEN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	194.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CANDIWATES I PRIGEN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	189.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CANDIWATES II PRIGEN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	100.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DAYUREJO I PRIGEN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	102.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DAYUREJO II PRIGEN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	211.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DAYUREJO III PRIGEN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	181.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DAYUREJO IV PRIGEN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	171.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GAMBIRAN I PRIGEN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	318.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GAMBIRAN III PRIGEN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	118.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JATIARJO I PRIGEN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	111.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JATIARJO II PRIGEN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	81.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KETANIRENG PRIGEN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	104.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LEDUG I PRIGEN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	235.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LEDUG II PRIGEN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	172.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LUMBANGREJO I PRIGEN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	156.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LUMBANGREJO II PRIGEN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	108.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PECALUKAN I PRIGEN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	294.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PECALUKAN IV PRIGEN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	164.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PECALUKAN V PRIGEN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	44.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PRIGEN I PRIGEN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	322.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PRIGEN II PRIGEN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	88.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEKARJOHO I PRIGEN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	166.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEKARJOHO II PRIGEN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	84.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUKOLILLO I PRIGEN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	168.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUKOLILLO II PRIGEN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	65.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUKORENO I PRIGEN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	174.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUKORENO II PRIGEN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	169.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUKORENO III PRIGEN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	100.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATUAGUNG I PRIGEN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	99.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATUAGUNG II PRIGEN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	115.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GERBO I PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	216.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CAPANG I PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	141.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CAPANG II PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	28.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN COWEK I PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	200.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN COWEK II PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	81.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN COWEK III PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	91.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DAWUHAN SENGON I PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	85.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DAWUHAN SENGON III PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	99.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DAWUHAN SENGON IV PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	92.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DAWUHAN SENGON II PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	99.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GAJAHREJO I PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	87.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GAJAHREJO II PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	89.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GERBO V PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	118.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GERBO II PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	128.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GERBO III PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	76.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GERBO IV PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	93.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GERBO VI PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	83.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JATISARI I PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	89.100.000	



BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JATISARI II PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	89.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JATISARI III PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	58.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JATISARI IV PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	170.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LEBAKREJO I PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	156.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LEBAKREJO II PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	139.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LEBAKREJO III PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	130.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LEBAKREJO IV PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	36.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PAREREJO I PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	189.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PAREREJO II PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	170.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PAREREJO III PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	164.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PUCANGSARI I PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	87.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PUCANGSARI II PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	178.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PURWODADI I PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	193.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PURWODADI II PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	132.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PURWODADI III PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	124.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEMUT PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	100.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SENTUL I PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	195.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SENTUL II PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	94.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMBAKSARI I PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	245.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMBAKSARI III PURWODADI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	127.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BAKALAN I PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	152.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BAKALAN II PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	90.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BAKALAN III PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	41.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CENDONO I PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	139.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CENDONO II PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	74.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGREJO I PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	90.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGREJO II PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	45.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KAYOMAN PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	181.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KERTOSARI I PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	146.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KERTOSARI II PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	183.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MARTOPURO I PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	410.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MARTOPURO II PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	149.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MARTOPURO III PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	67.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MARTOPURO IV PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	28.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MARTOPURO V PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	92.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PAGER I PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	255.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PAGER II PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	111.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PUCANGSARI I PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	206.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PUCANGSARI II PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	144.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PURWOSARI I PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	435.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PURWOSARI II PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	97.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PURWOSARI III PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	89.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEKARMOJO I PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	81.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEKARMOJO II PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	97.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEKARMOJO III PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	99.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SENGON I PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	224.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SENGON II PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	187.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUKODERMO PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	160.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBEREJO I PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	100.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBEREJO II PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	110.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBEREJO III PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	201.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERSUKO I PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	186.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERSUKO II PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	103.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TEJOWANGI I PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	152.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TEJOWANGI II PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	32.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TEJOWANGI III PURWOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	84.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JANJANGWULUNG I PUSPO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	58.500.000	

BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JANJANGWULUNG II PUSPO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	69.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JANJANGWULUNG III PUSPO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	108.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JIMBARAN I PUSPO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	198.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JIMBARAN II PUSPO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	180.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JIMBARAN III PUSPO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	59.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JIMBARAN IV PUSPO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	91.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDUWUNG I PUSPO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	95.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDUWUNG II PUSPO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	83.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEMIRI PUSPO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	149.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PALANGSARI II PUSPO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	39.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PALANGSARI I PUSPO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	115.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PALANGSARI III PUSPO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	87.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PUSPO I PUSPO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	189.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PUSPO III PUSPO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	116.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PUSPO IV PUSPO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	59.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PUSPO V PUSPO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	81.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PUSUNGMALANG I PUSPO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	144.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PUSUNGMALANG II PUSPO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	127.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ARJOSARI I REJOSO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	114.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ARJOSARI II REJOSO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	151.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JARANGAN I REJOSO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	126.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JARANGAN II REJOSO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	73.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KAWISREJO REJOSO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	163.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDUNGBAKO REJOSO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	98.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEMANTRENREJO I REJOSO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	139.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEMANTRENREJO II REJOSO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	156.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KETEGAN REJOSO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	121.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MANIKREJO REJOSO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	82.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PANDANREJO I REJOSO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	88.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PANDANREJO II REJOSO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	137.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PATUGURAN I REJOSO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	89.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PATUGURAN II REJOSO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	81.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN REJOSO KIDUL I REJOSO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	191.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN REJOSOLOR I REJOSO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	95.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN REJOSOLOR II REJOSO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	98.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SADENGREJO REJOSO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	179.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SAMBIREJO I REJOSO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	75.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SAMBIREJO II REJOSO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	133.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEGOROPURO REJOSO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	218.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TOYANING I REJOSO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	83.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TOYANING II REJOSO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	95.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GENENG WARU REMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	168.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KALISAT I REMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	156.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KANIGORO REMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	135.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDUNG BANTENG I REMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	176.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDUNG BANTENG II REMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	110.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KRENGIH REMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	118.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MOJOPARON REMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	196.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN OROBULU REMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	133.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ORO-ORO OMBO KULON I REMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	145.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ORO-ORO OMBO KULON II REMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	254.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ORO-ORO OMBO WETAN I REMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	349.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ORO-ORO OMBO WETAN III REMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	80.100.000	

BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ORO-ORO OMBO WETAN IV REMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	135.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PAJARAN I REMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	186.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PAJARAN II REMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	128.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PANDEAN I REMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	143.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PANDEAN II REMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	63.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PEJANGKUNGAN I REMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	128.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PEJANGKUNGAN II REMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	77.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PEKOREN I REMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	318.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PEKOREN III REMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	147.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN REMBANG I REMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	340.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SIYAR REMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	199.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBER GLAGAH REMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	99.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMPUNG I REMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	163.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMPUNG II REMBANG	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	117.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CANDIBINANGUN I SUKOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	233.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CANDIBINANGUN II SUKOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	52.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CANDIBINANGUN IV SUKOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	119.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CURAHREJO I SUKOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	72.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CURAHREJO II SUKOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	48.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DUKUHSARI SUKOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	73.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GLAGAHSARI I SUKOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	370.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GLAGAHSARI III SUKOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	207.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GUNTING I SUKOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	174.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GUNTING II SUKOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	57.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIREJO I SUKOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	65.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIREJO II SUKOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	93.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIREJO III SUKOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	70.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGSONO SUKOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	252.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KENDURUAN I SUKOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	99.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KENDURUAN II SUKOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	101.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LECARI SUKOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	118.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LEMAHBANG I SUKOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	115.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LEMAHBANG II SUKOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	146.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MOJOTENGAH I SUKOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	86.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MOJOTENGAH II SUKOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	168.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGADIMULYO SUKOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	293.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PAKUKERTO I SUKOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	119.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PAKUKERTO II SUKOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	153.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEBANDUNG I SUKOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	121.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEBANDUNG II SUKOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	69.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUKORAME SUKOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	63.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUKOREJO I SUKOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	181.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUKOREJO III SUKOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	149.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUKOREJO IV SUKOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	65.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUWAYUWO I SUKOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	187.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUWAYUWO II SUKOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	245.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TANJUNGARUM SUKOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	250.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOKERTO SUKOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	184.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BALEDONO II TOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	41.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BALEDONO I TOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	119.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KANDANGAN I TOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	75.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KANDANGAN II TOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	16.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MOROREJO II TOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	57.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MOROREJO I TOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	96.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGADIWONO I TOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	133.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGADIWONO II TOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	68.400.000	

BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PODOKOYO I TOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	63.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PODOKOYO II TOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	104.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PODOKOYO III TOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	24.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEDAENG I TOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	188.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEDAENG II TOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	25.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TOSARI I TOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	114.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TOSARI II TOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	104.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOKITRI TOSARI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	209.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ANDONOSARI I TUTUR	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	63.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ANDONOSARI II TUTUR	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	14.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ANDONOSARI III TUTUR	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	27.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ANDONOSARI IV TUTUR	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	42.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BLARANG I TUTUR	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	87.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BLARANG II TUTUR	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	118.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BLARANG III TUTUR	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	75.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GENDRO I TUTUR	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	47.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GENDRO II TUTUR	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	157.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIPUCANG I TUTUR	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	36.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIPUCANG II TUTUR	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	138.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIPUCANG III TUTUR	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	85.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KAYUKEBEK I TUTUR	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	117.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KAYUKEBEK III TUTUR	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	24.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGADIREJO I TUTUR	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	70.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGADIREJO II TUTUR	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	16.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGEMBAL I TUTUR	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	164.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGEMBAL II TUTUR	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	181.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGEMBAL III TUTUR	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	45.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGEMBAL IV TUTUR	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	115.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NONGKOJAAR I TUTUR	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	188.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PUNGGING TUTUR	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	98.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERPITU I TUTUR	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	157.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERPITU II TUTUR	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	71.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TLOGOBODOSARI I TUTUR	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	81.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TLOGOBODOSARI II TUTUR	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	94.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TUTUR I TUTUR	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	182.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TUTUR II TUTUR	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	56.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOSARI I TUTUR	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	165.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOSARI II TUTUR	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	59.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BANDARAN I WINONGAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	114.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BANDARAN II WINONGAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	67.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GADING I WINONGAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	164.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GADING II WINONGAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	77.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JELADRI I WINONGAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	127.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JELADRI II WINONGAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	25.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KANDUNG WINONGAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	116.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGTENGAH WINONGAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	137.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDUNGREJO WINONGAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	119.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LEBAK WINONGAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	152.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MENDALAN II WINONGAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	187.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MENYARIK WINONGAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	234.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MINGGIR WINONGAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	184.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PENATAAN WINONGAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	130.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PRODO WINONGAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	113.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SIDEPAN WINONGAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	56.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SRUWI WINONGAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	145.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBEREJO WINONGAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	135.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN UMBULAN WINONGAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	124.200.000	

BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WINONGAN KIDUL WINONGAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	98.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WINONGAN LOR I WINONGAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	237.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WINONGAN LOR II WINONGAN	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	155.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN COBANLIMBING I WONOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	138.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN COBANLIMBING II WONOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	93.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JATIGUNTING I WONOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	235.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JATIGUNTING II WONOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	91.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGASEM WONOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	193.500.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGJATIANYAR I WONOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	81.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGJATIANYAR II WONOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	95.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGJATIANYAR III WONOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	151.200.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGMENGGAH WONOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	271.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGSONO WONOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	208.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KENDANGDUKUH WONOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	153.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KLUWUT WONOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	111.600.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LEBAKSARI WONOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	162.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PAKIJANGAN I WONOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	272.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PAKIJANGAN II WONOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	107.100.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN REBONO I WONOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	167.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN REBONO II WONOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	123.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SAMBISIRAH I WONOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	131.400.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SAMBISIRAH II WONOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	182.700.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMANSARI WONOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	244.800.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOREJO I WONOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	231.300.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOREJO IV WONOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	243.000.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOREJO V WONOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	90.900.000	
BOS UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOSARI WONOREJO	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	197.100.000	
		<b>209.970.121.830</b>	

Pasuruan,  
PLT Kepala Dinas Pendidikan

Ttd.

**Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si**  
NIP. 19660214 198602 1 003

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH : BADAN KEUANGAN DAERAH**

<b>NO</b>	<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>OUTCOME/ TARGET</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT/ TARGET</b>	<b>PAGU KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	<b>Urusan Penunjang</b>						
		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Prosentase Pemenuhan pelayanan kantor / 100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirm melalui jasa kurir / 480 Pucuk surat	1.815.300,00	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan rekening telp, listrik dan air / 312 rek/bln	138.883.488,69	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor / 20 Unit	16.896.585,49	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan Pengelola Keuangan / 340 org/bln	127.231.351,50	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor / 20 Jenis-kali	43.689.732,75	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemenuhan cetakan, foto copy dan pengadaan / 20 Exemplar	48.295.632,93	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu / 810 kali	56.049.426,69	

				Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah / 200 orang-kali	156.509.294,78	
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah tenaga Kontrak/THL / 53 org/bln	113.613.576,00	
				Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan kinerja triwulan dan tahunan / 5 Dokumen	27.076.409,70	
				Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek / 2 org	116.330.475,00	
				Fasilitasi Optimalisasi Fungsi PPKD	Jumlah proposal dana bantuan / 12.500 proposal	114.242.880,00	
		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Prosentase Sarpras Kondisi Baik / 100%	Pengadaan kendaraan dinas	Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas / 1 unit	25.000.000,00	
				Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor / 7 Unit	300.000.000,00	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor / 3 Unit-Kali	28.439.700,00	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas/operasional / 335 Unit-Kali	181.860.384,60	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	Jumlah pemeliharaan Peralatan Kantor / 525 Unit-kali	49.325.431,72	

		<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Ketepatan penetapan APBD / 100%	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan P-APBD	Jumlah Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD,P-APBD dan R-perkada / 4 Peraturan	1.921.886.940,23	
				Penatausahaan Pengelolaan Gaji PNS dan Non PNS	Prosentase pembayaran gaji PNS dan Non PNS / 100 %	666.652.704,45	
				Optimalisasi Fungsi BUD	Jumlah OPD yang telah di verikasi oleh BUD / 56 OPD	165.573.513,00	
		<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH</b>	Ketepatan Laporan keuangan daerah / 100%	Peningkatan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah OPD yang telah memahami tentang akuntansi,dokumen rencana kerja dan tindak lanjut bidang Akuntansi / 56 opd	75.718.049,88	
				Pengendalian Realisasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi / 4 Dokumen	35.324.936,24	
				Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Raperda serta Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terlaksananya penyusunan LKPD dan penyusunan Raperda serta Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD / 12 bln	207.572.580,62	
		<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	prosentase laporan BMD sesuai standar / 100%	Pengamanan dan Penghapusan Aset Daerah	Jumlah tanah yang bersertifikat danPenghapusan aset usulan skpd / 15 Berkas / 15 SK	231.923.249,78	



				Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen dan tindak lanjut tentang penertiban Penggunaan dan pemanfaatan BMD serta jumlah opd yang telah mengikuti rapat / 50 Dokumen	52.553.479,59	
				Perencanaan dan Penyusunan RKBMD	Jumlah Dokumen OPD rencana kerja dan tindak lanjut tentang Perencanaan dan Penyusunan RKBMD /124 Dokumen	42.673.467,30	
				Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang paham tentang BMD dan jumlah Dokumen pelaporan BMD / 65 opd dan Dokumen	381.042.013,26	
		<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK DAERAH</b>	SKM/IKM layanan pajak daerah	Penatausahaan Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Penerimaan Bg Hsl Ke Pst & Laporan tertib Adm. Penerimaan Pendapatan / 53 Laporan	458.052.860,93	
				Penyampaian SPOPD	Jumlah formulir yang disampaikan ke Wajib Pajak tentang PBB / 750000 WP	1.146.742.908,74	
				Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Pendaftaran & Pendataan Oby Pjk Daerah /755000 OP	955.472.402,25	

				Penetapan dan Perhitungan Pajak Daerah	Jumlah penetapan SKP dan Nota perhitung / 27504 WP	520.158.603,42	
		<b>PROGRAM PENINGKATAN PAJAK DAERAH</b>	Prosentase peningkatan pajak daerah / 8%	Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Wilayah yang di Monitoring / 16 Wilayah	119.182.037,79	
				Sosialisasi dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah sosialisasi tentang PAD / 8 kali	415.293.167,48	
				Penagihan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah desa yang di opsir / 282 desa	556.041.978,89	
				Peningkatan dan Pengembangan PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I	Jumlah Prosentase Intensifikasi Penerimaan PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I / 100 %	83.012.156,25	
				Peningkatan dan Pengembangan PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II	Jumlah Prosentase Intensifikasi Penerimaan PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II / 100 %	61.104.510,75	
<b>JUMLAH</b>						<b>9.641.241.230,71</b>	

Pasuruan,  
Kepala Badan Keuangan Daerah  
Kabupaten Pasuruan

Ttd.

Drs. Luly Noermadiono  
NIP. 19600702 198603 1 017

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wajib Bukan Pelayanan Dasar	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor (100%)	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik / air / telepon / internet (12 Bulan)	35.400.000	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian ATK (36 Item)	38.954.500	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetak dan penggandaan (11 item)	62.737.750	
				Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor ( 28item )	45.861.000	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makan rapat dan makan tamu ( 12 Bulan)	28.650.000	
				Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas luar daerah (100 kali)	100.000.000	
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah pembayaran honor pengelola kegiatan dan keuangan, tenaga kontrak dan harian lepas serta pembayaran belanja surat kabar dan publikasi (12 Bulan)	310.240.000	
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya (18 Unit)	13.500.000	
				Penyusunan laporan kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja OPD yang tersusun (4 Laporan)	126.213.500	
				Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan (4 orang)	85.000.000	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor (100%)	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor (11 item)	169.570.000	

				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah sarana gedung/ kantor yang dipelihara (1 Unit)	60.140.000	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (18 unit)	207.000.000	
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Jumlah peralatan mebelair yang dipelihara (65 unit)	7.500.000	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara (85 unit)	81.100.000	
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI</b>	<b>Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi (1,25%)</b>	Pengembangan Usaha Koperasi Sektor Industri, Perdagangan dan Aneka Usaha	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan (180 orang)	275.000.000	
				Pengembangan Usaha Koperasi Sektor Perikanan dan Peternakan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan (90 orang)	100.000.000	
				Pengembangan Usaha Koperasi Sektor Pertanian dan Perkebunan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan (90 orang)	125.000.000	
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO</b>	<b>Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro (2,00)</b>	Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Usaha	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan (120 orang)	50.000.000	
				Penyelenggaraan Fasilitasi Pemasaran dan Jaringan Usaha	Jumlah even promosi yang diikuti (2 even )	150.000.000	
				Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan (60 orang)	50.000.000	
		<b>PROGRAM FASILITASI DAN PEMBIAYAAN</b>	<b>Persentase KSP/USP yang sehat (44,63 %)</b>	Sosialisasi dan fasilitasi Permodalan	Jml. peserta yang mengikuti kegiatan, Jml. koperasi yang mengikuti kegiatan (600 orang)	50.000.000	
				Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan (500 orang)	50.000.000	
				Pengendalian, Pemantauan dan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan (400 orang)	150.000.000	
		<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi Yang bersertifikat NIK ( 31,77% )</b>	Pengawasan dan Akuntabilitas Koperasi	Jml. peserta yang mengikuti kegiatan, Jml. koperasi yang diperingkat, Jml. koperasi yang diusulkan ( 145 orang, 70 koperasi, 10 koperasi )	321.461.000	
				Penguatan Organisasi dan Tatalaksana	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan (200 orang)	121.000.000	

				Penyuluhan, fasilitasi dan pendampingan hukum dan advokasi koperasi	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan (400 orang)	57.539.000	
				Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	417.358.000	
		<b>PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Penumbuhan Wirausaha Baru (5,00%)</b>	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pelatihan Kewirausahaan)	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan (330 orang)	505.000.000	
				Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pembinaan / pelatihan manajemen kewirausahaan)	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan (150 orang)	245.000.000	
				Fasiltasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jumlah even promosi yang dikuti (10 even)	550.000.000	
					<b>Total</b>	<b>4.589.224.750</b>	

Pasuruan, .....

KEPALA DINAS KOPERASI  
DAN USAHA MIKRO  
KABUPATEN PASURUAN

Ttd.

**Drs. AKHMAD KHASANI, Msi**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660214 198602 1 003

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS PERIKANAN**

<b>NO</b>	<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>OUTCOME/ TARGET</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT/ TARGET</b>	<b>PAGU KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	Urusan Pilihan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan kantor (100%)	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan rekening telepon, air, listrik dan internet yang tepat waktu (19 rekening/bulan)	117.500.000,00	DAU
				Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kebersihan (34 item)	10.000.000,00	DAU
				Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor (40 item)	50.000.000,00	DAU
				Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan (22 item)	45.000.000,00	DAU
				Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan suku cadang listrik (20 item)	4.000.000,00	DAU
				Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah rapat koordinasi dan tamu (10 kali)	20.375.000,00	DAU
				Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah laporan perjalanan dinas luar daerah (40 laporan)	175.613.166,91	DAU
				Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah honorarium pengelolaan keuangan daerah dan pegawai non pns (396 orang bulan)	743.935.000,00	DAU
				Kegiatan Pengembangan Sumberdaya Aparatur	Jumlah peserta bimtek yang mendapatkan pemahaman (4 orang)	20.000.000,00	DAU

				Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan kinerja tribulan dan tahunan (10 dokumen)	91.600.000,00	DAU
					Jumlah dokumen perencanaan keuangan (4 dokumen)		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik (100%)	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan (2 unit)	10.000.000,00	DAU
				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor (1 gedung)	20.000.000,00	DAU
				Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas (47 unit)	210.000.000,00	DAU
				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (5 unit)	10.000.000,00	DAU
				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Mebelair	Jumlah pemeliharaan mebelair (5 unit)	2.000.000,00	DAU
				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor (20 unit)	10.000.000,00	DAU
		Program Perikanan Budidaya	Persentase Produksi Perikanan Budidaya (7 %)	Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah Benih Ikan (3.026.000 ekor)	306.175.000,00	DAU
					Nilai IKM BBI (83,3)		
				Kegiatan Pengelolaan Kawasan dan Sarana Prasarana Budidaya	Jumlah sarana dan prasarana budidaya yang terfasilitasi program (200 Ha)	325.560.100,00	DAU
					Jumlah pembudidaya yang dibina (1000 org)		
				Kegiatan Budidaya dan Perbenihan	Jumlah pembudidaya yang bersertifikat CBIB (15 org)	356.403.750,00	DAU
					Jumlah paket budidaya yang diberikan (12 paket)		
					Jumlah pembudidaya yang dibina (150 org)		

				Kegiatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya	Jumlah pembudidaya yang dibina (330 org)	319.149.000,00	DAU
					Persentase penurunan luasan lahan produksi yang terserang hama penyakit (10 %)		
					Jumlah kaji terap teknologi yang dilakukan (3 kaji terap)		
		Program Kenelayanan	Persentase Produksi Perikanan Tangkap (7%)	Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan	Jumlah benih ikan yang ditebar (300.000 ekor)	217.350.000,00	DAU
					Persentase kualitas sumberdaya air yang memenuhi syarat (60%)		
				Kegiatan Pengembangan Teknologi dan Sentra Nelayan	Jumlah nelayan yang terfasilitasi program (300 org)	178.532.000,00	DAU
					Prosentase penurunan penggunaan alat tangkap terlarang (2 %)		
				Kegiatan Pemberdayaan Nelayan	Jumlah nelayan yang dibina (310 orang)	264.708.000,00	DAU
					Jumlah penumbuhan KUB baru (5 KUB)		
		Program Usaha Perikanan	Nilai Omzet Usaha Hasil Perikanan (Rp 17 Milyar)	Kegiatan Pelayanan Usaha Perikanan	Jumlah jenis produk olahan hasil perikanan yang bersertifikat (25 item)	295.444.000,00	DAU
					Jumlah gelar produk perikanan yang dilaksanakan (3 kali)		
					Jumlah masyarakat yang mengikuti kampanye gemarikan (675 org)		
					Jumlah TDUP yang diterbitkan (50 usaha)		



				Kegiatan Kemitraan dan Pengembangan Usaha Perikanan	Jumlah pelaku usaha perikanan non konsumsi yang dibina (120 org)	157.124.000,00	DAU
					Jumlah pelaku usaha perikanan yang melakukan kerjasama/ kemitraan (20 org)		
					Jumlah produksi garam rakyat (16.150 ton)		
				Kegiatan Pengelolaan TPI dan Hasil Perikanan	Jumlah pelaku usaha perikanan yang dibina (120 org)	105.763.000,00	DAU
					Persentase temuan produk perikanan berbahan tambahan pangan terlarang (60%)		
					Jumlah transaksi ikan yang ada di TPI (8.000 ton)		
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase Jumlah Peserta Pelatihan Yang Menjadi Wirausaha (2 %)	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pembinaan/ Pelatihan Keterampilan Bagi Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan)	Jumlah masyarakat dan pengolah perikanan yang dibina (450 orang)	200.000.000,00	DBHCHT
				Bantuan Sarana Produksi dan Ternak Bani Masyarakat/ Kelompok Masyarakat (Bantuan Alat Pertanian/ Perkebunan/ Perikanan/ Peternakan untuk Masyarakat/ Kelompok Masyarakat)	Jumlah kelompok usaha perikanan yang terfasilitasi program (4 kelompok)	150.000.000,00	DBHCHT

		BELANJA TIDAK LANGSUNG					3.440.964.000,00
					BL		4.416.232.016,91
					DAU		4.066.232.016,91
					DBHCHT		350.000.000,00
					<b>TOTAL</b>		<b>7.857.196.016,91</b>

Pasuruan, Juli 2020  
Kepala Dinas Perikanan

Ttd.

Ir. SLAMET NURHANDOYO  
NIP. 1962111519992031008

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>9.600.328.000</b>	
	Urusan Pemerintah Pilihan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor/100%	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Listrik, Air, Telepon dan Internet/54 rekening-bln	267.336.000	
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor/26 jenis	90.120.600	
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pembayaran Honor Pengelola Keuangan, Pengelola Aset, Pelaku Pengadaan Barang/Jasa/33 org-bln	66.571.200	
				Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor/40 jenis	64.276.200	
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan/15 jenis	93.891.780	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan Rapat dan Tamu	73.081.440	
				Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi	130.613.345	
				Penyediaan jasa perkantoran	Jumlah Pembayaran Honor Tenaga Kontrak dan THL/232 org-bln	3.272.814.326	

				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Rencana dan Laporan Kerja SKPD/5 dokumen	91.200.000	
		Program Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarpras Kondisi Baik/100%	Pengadaan Mebelair	Jumlah Pengadaan Mebelair/3 unit	20.160.000	
				Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor/3 unit	170.895.690	
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor/3 unit	47.233.779	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional/8 unit-kali	270.845.640	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor/24 unit-kali	30.960.000	
		Program Peningkatan Industri	Persentase Peningkatan IKM Yang Terbina/2,28%	Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	Peningkatan Produktifitas IKM/10%	126.666.666	
				Pembinaan Industri Agro	Jumlah Industri Agro Yang Terbina/21 IKM	246.666.667	
				Pembinaan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka	Jumlah Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Yang Terbina/21 IKM	376.666.667	
				Pembinaan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Jumlah Industri Logal, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Yang Terbina/21 IKM	250.000.000	
		Program Pembinaan Industri	Peningkatan Jumlah Industri Hasil Tembakau Yang Terbina/30 IHT	Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok Sigaret dan Pemberian Sertifikat/Kode Registrasi Mesin Pelinting Rokok	Jumlah IHT Yang Memiliki Legalitas/30 IHT	9.923.765	

				Pengembangan Industri hasil Tembakau dengan kadar tar dan Nikotin Rendah melalui Fasilitasi Pengujian Tar dan Nikotin Bagi Industri Kecil dan Menengah, serta Pelatihan dan Penerapan Good Manufacturing Practices bagi Industri Hasil Tembakau	Uji Kadar Tar dan Nikotin bagi IHT/30 IHT	17.300.000	
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Peningkatan Wirausaha Baru/750 org	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pembinaan/ Pelatihan Kewirausahaan)	Jumlah Kelompok Yang Dibina/63 IKM	1.606.409.375	
				Bantuan sarana produksi dan ternak bagi masyarakat/ kelompok masyarakat (Bantuan peralatan untuk usaha mandiri bagi masyarakat)	Jumlah Bantuan Peralatan Produksi/14 Kel Masy/Yayasan	1.310.950.000	
		Program Kmetrologian Legal	Rasio Pelayanan Tera/ Tera Ulang yang Diterbitkan terhadap Seluruh Pengajuan/1 Rasio (17.898)	Standarisasi dan Pelayanan Kmetrologian Legal	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah/17.898 Unit	100.000.000	
				Pengawasan dan Penyidikan Kmetrologian Legal	Jumlah UTTP yang diawasi dan diamati/17.898 Unit	50.000.000	
				Sarana dan Penyuluhan Kmetrologian Legal	Data Pemilik UTTP/50 titik lokasi	50.000.000	
		Program Perdagangan	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal/2,53%	Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	Kontribusi Hasil Perdagangan Dalam Daerah/9%	120.000.000	
				Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	Peningkatan Nilai Ekspor/2%	120.000.000	
				Fasilitasi dan Kemitraan	Jml pelaku IKM yang mengikuti promosi dagang/192 pelaku IKM	320.000.000	

		Program Pengelolaan Pasar	Jumlah Pasar Rakyat Berbasis Elektronik/3 unit	Peningkatan Operasional dan Pemanfaatan Pasar	Operasional dan Pemanfaatan Pasar Yang Menjadi Kewenangan/14 pasar rakyat	250.000.000	
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Jml sarpras pasar rakyat yang akan direvitalisasi/464 kios & los	250.000.000	
				Pembinaan dan Ketertiban Pasar	Terciptanya Pasar Rakyat Yang Tertib dan Tertata Sesuai Zonasi/14 pasar rakyat	50.000.000	
						<b>19.544.911.140</b>	

Pasuruan, .....  
Kepala (Perangkat Daerah)

.....  
NIP. ....

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN**

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN : PERTANIAN</b>	<b>Program Peningkatan Produksi Peternakan</b>	Outcome :Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;'- Daging: 27922,90(ton),'- Telur: 17128,43(ton),'- Susu: 115914 (ton)	Kegiatan Pengelolaan UPTD Budidaya Ternak	Output : - jumlah kelahiran ternak: 10 ekor	1.992.961.459	<b><u>3.391.853.952</u></b>
					- jumlah penerima manfaat(PKL/magang/BM): 100 org		
				Kegiatan Pengembangan Perbibitan Ternak	Output : - jumlah akseptor yang dilayani: 45.000(ekor)	302.495.000	
				Penyebaran dan Pengembangan Ternak	Output : '- Jml peternak yang dibina: 800 org	770.888.068	
				Peningkatan produksi dan introduksi teknologi pakan ternak	Output :Jml sampel pakan yang diuji: 80	325.509.425	
					Output :Jml peserta pelatihan introduksi teknologi pakan: 150 org		
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN : PERTANIAN</b>	<b>Program Usaha Peternakan</b>	Outcome : Peningkatan Jumlah Kelompok Ternak Mandiri: 5 KT	Kegiatan Peningkatan pasca panen dan promosi	Output :Jumlh. Even yang diikuti: 5 even	651.639.620	<b><u>1.096.210.061</u></b>
					Output :Jumlh. Peserta yang mengikuti pelatihan pasca panen: 60		
				Kegiatan Bina Usaha dan Pembiayaan	Output : Jmlh. Kelompok yang memiliki PIRT	119.307.620	

					Output : Jmlh. Peternak yang mengikuti sosialisasi lembaga pembiayaan		
				Kegiatan Optimalisasi potensi sumberdaya dan kawasan	Output : Jlmh. populasi ternak	130.617.200	
					Output : Jlmh. Kawasan ternak		
				Kegiatan Pengembangan Kawasan Agropolitan	Output : Jumlah kelompok yang dibina	194.645.621	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN : PERTANIAN</b>	<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	Out come : Peningkatan jumlah kel tani yg memiliki usaha pengolahan hasil ternak	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (Pembinaan/Pelatihan Pengolahan Hasil Ternak)	Out come : - Jlmh. Kelompok yang dibina	500.000.000	<b><u>500.000.000</u></b>
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN : PERTANIAN</b>	<b>Program Kesehatan Hewan</b>	Outcome : Prosentase kematian ternak : besar, kecil, unggas(%)	Kegiatan Pengamatan, Pencegahan Penyakit dan pengawasan obat hewan	Out put : Jumlah money pengawasan peredaran obat hewan	328.211.741	<b><u>1.408.459.328</u></b>
			Jumlah usaha hasil ternak yang terbina (unit)		Jumlah sampel darah		
				Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan	Out put : Jumlah rekomendasi/sertifikat kesehatan hewan	61.945.000	
				Kegiatan Pembinaan Kesmavet	Output : Jmlh. Rekomendasi/sertifikat PAH yang ASUH	364.420.041	
					- jumlah unit usaha produk asal hewan yang dibina		
				Pelayanan UPTD Rumah Pemotongan Hewan	Out put : Jmlh. Ternak sapi yang dipotong	337.480.000	
				Kegiatan Pelayanan UPTD Pusat Kesehatan Hewan	Out put : Jumlah ternak yang dilayani	316.402.546	



	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR :</b>	<b>Program Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian</b>	Output: -Pencapaian skor pola pangan harapan dan Jumlah petani yg naik kelas	Pengembangan Panganekaragam Konsumsi dan Keamanan Pangan	Out put: '- Jumlah kawasan rumah pangan lestari yang dibina	667.933.106	<b>3.208.347.638</b>
					Out put: '- Jumlah bimtek mutu keamanan pangan		
					Out put: '- Jumlah bimtek olahan pangan		
				Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan	Out put: jumlah lembaga distribusi pangan masyarakat yang dibina	763.540.508	
				Pengembangan Ketersediaan dan penanganan rawan pangan	Out put : jenis data yang disusun (NBM, Data Pangan, FSVA, SKPG)	278.647.008	
					Out put : jumlah bimtek kawasan mandiri pangan		
				Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh dan penerapan teknologi pertanian	Out put : Jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan	770.415.508	
					Out put : Jumlah kaji terap yang dilaksanakan		
				Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Out put : Jumlah kelompok tani yang dibina	727.811.508	
					Out put : Jumlah pelatihan yang diikuti penyuluh		
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR : PANGAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Outcome : Prosentase pemenuhan pelayanan kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	out put : jumlah pembayaran listrik, telpon dan air	186.000.000	<b>2.349.063.351</b>
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	out put : jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan	164.940.000	

				Penyediaan Alat Tulis Kantor	out put : Jumlah pembelian atk	80.233.000	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	out put : Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	61.000.000	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	out put : Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	50.600.000	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	out put : Jumlah rapat dan tamu	114.730.000	
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	out put : Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	216.660.350,65	
				Penyediaan Jasa Perkantoran	out put : Honor tenaga kontrak / thl	1.403.900.000	
				Bimbingan teknis aparatur	out put : jumlah peserta bimtek	25.000.000	
				Penyusunan Laporan Kinerja & Keuangan	out put : laporan kinerja tribulan dan tahunan	46.000.000	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR : PANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Outcome : Prosentase sarana dan prasarana yang memenuhi syarat terhadap sarpras yang harus tersedia	Pengadaan Mebelair	out put : Jumlah pengadaan mebelair	133.280.000	<b><u>1.380.737.075</u></b>
				Pengadaan Peralatan Kantor	out put : Jumlah pengadaan peralatan kantor	56.450.000	
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	out put : Jumlah pemeliharaan gedung kantor	937.400.000	
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	out put : Jumlah pemeliharaan kendaraan	208.607.075	

				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	out put : Jumlah pemeliharaan peralatangedung kantor	20.000.000	
				Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	out put : Jumlah pengadaan kendaraan	25.000.000	
						<b>(total)</b>	<b>13.334.671.404,65</b>

Pasuruan, .....  
Kepala Dinas Peternakan dan  
Ketahanan Pangan

Ttd.

drh. IRIANTO, MM

NIP. 196301311989031010

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PASURUAN**

<b>NO</b>	<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>OUTCOME/ TARGET</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT/ TARGET</b>	<b>PAGU KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	TENAGA KERJA	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Pucuk	Rp. 45.000.000,00	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Rp. 400.000.000,00	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Unit	Rp. 100.000.000,00	
				Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	15 Kendaraan	Rp. 40.000.000,00	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	Rp. 152.240.000,00	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	4 Kali	Rp. 85.000.000,00	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2000 Eksemplar	Rp. 65.000.000,00	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	300 kotak	Rp. 38.000.000,00	
				Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	50 Kali	Rp. 150.000.000,00	
				Penyediaan Jasa Perkantoran	12 Bulan	Rp. 728.500.000,00	



		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS	80%	Peningkatan Pelatihan Kerja	32 Peserta	Rp.	190.000.000,00	
				Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	32 Peserta	Rp.	200.000.000,00	
				Pelayanan Sertifikasi Tenaga Kerja dan Akreditasi LPK	12 LPK, 32 Peserta	Rp.	93.456.596,15	
				Forum CSR	50 Perusahaan	Rp.	100.000.000,00	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	80%	Penempatan dan Bursa Kerja	3000 Orang	Rp.	342.172.500,00	
				Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja	32 Peserta	Rp.	150.000.000,00	
				Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2 KK, 2 Kali	Rp.	193.500.000,00	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGAKERJA	80%	Koordinasi dan Upaya Upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100 Kasus	Rp.	400.000.000,00	
				Pelayanan dan Pembinaan Persyaratan Kerja dan Kelembagaan	20 Pendaftar	Rp.	428.000.000,00	

				Koordinasi dan Pembinaan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1 Usulan	Rp. 134.696.000,00	
					<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 6.092.565.096,15</b>	

Pasuruan, 2020  
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan

Ttd.

**Drs. TRI AGUS BUDIHARTO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196708\*3 198602 1 002

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

note : mohon untuk tidak menambah/mengurangi kolom yg ada

**PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN**

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>5.719.389.000</b>	
	<b>Urusan Pemerintah Pilihan</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor</b>		<b>100%</b>	<b>1.704.517.780</b>	
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Listrik, Air, Telepon dan Internet	465.000.000	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian ATK	29.350.500	
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jml pembelian barang cetakan dan penggandaan	38.869.500	
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jml pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	34.912.500	
				Penyediaan makanan dan minuman	Jml Kegiatan rapat dan tamu	21.570.280	
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jml perjalanan dinas ke luar daerah	125.000.000	
				Penyediaan jasa perkantoran	Honor tenaga kontrak/THL	879.815.000	
				Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Jml peralatan yang diperbaiki	45.000.000	
				Penyusunan laporan kinerja dan keuangan	Laporan kinerja tribulanan dan tahunan	65.000.000	
		<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>% sarpras kondisi baik</b>		<b>100%</b>	<b>276.957.582</b>	
				Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya Gudang	25.000.000	
				Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	12.257.582	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	209.700.000	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	30.000.000	



		<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN DAN PERKEBUNAN</b>	<b>% Peningkatan kelompok tani agribisnis</b>		<b>12%</b>	<b>262.456.048</b>	
			<b>% kelompok tani yang memiliki jangkauan pemasaran tingkat nasional</b>		<b>0,8%</b>	<b>611.586.880</b>	
				Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan di bidang agribisnis	58.317.000	
				Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah kelompok tani agribisnis pertanian (horti dan pangan) yang naik kelas	104.435.000	
				Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah peserta pelatihan pasca panen dan pengolahan hasil	99.704.048	
				Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/perkebunan Unggul Daerah	Frekuensi promosi produk unggulan pertanian dan perkebunan tingkat nasional dan regional	611.586.880	
		<b>PROGRAM SARANA DAN PRASARANA HASIL PERTANIAN</b>	<b>% Penurunan Lahan Marginal</b>		<b>1,18%</b>	<b>1.641.053.660</b>	
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Sarpras Pertanian	Dokumen Laporan Monitoring dan evaluasi	46.330.000	
				Pengelolaan Lahan dan Air	Dokumen Laporan Perencanaan Pengelolaan Lahan dan Air	75.303.660	
				Optimalisasi Alat Mesin Pertanian	Jumlah Alsintan yang diberikan kepada KT	120.650.000	
				Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah irigasi tanah dangkal yang dibangun/direhab	776.170.000	
				Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier	Panjang irigasi tersier yang dibangun/direhab	230.530.000	
				Sekolah Lapang Tata Guna Air (SL-TGA)	Jumlah peserta SL TGA	6.130.000	
				Pembangunan/Rehabilitasi jalan usaha tani	Panjang jalan usaha tani yang dibangun/direhab	259.165.000	
				Fasilitasi LP2B	Dokumen pelaporan LP2B	126.775.000	

		<b>PROGRAM PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN</b>	<b>% Peningkatan produksi Tanaman Perkebunan</b>		<b>0,5%</b>	<b>1.271.553.660</b>	
				Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan (SL PHT tan Perkebunan tahunan)	Jml klpk tani peserta SL PHT tanaman perkebunan tahunan	89.100.000	
				Sekolah Lapang Agensi hayati (SL AH) tanaman perkebunan	Jml klpk tani peserta SL PHT tanaman perkebunan tahunan	46.000.000	
				Pengembangan tanaman perkebunan	Jml klpk tani peserta SL AH tanaman perkebunan semusim	1.136.453.660	
		<b>PROGRAM PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>	<b>% Peningkatan produksi Tanaman pangan dan hortikultura</b>		<b>0,5%</b>	<b>1.947.374.390</b>	
				Pengembangan Perbenihan/perbibitan	Tersedianya Benih Padi, Palawija	170.000.000	
				Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	Jml klpk tani penerima kegiatan intensifikasi Tanaman Pangan	115.095.890	
				Pengembangan Tanaman Sayuran Organik	Jml kelompok tani penerima pengembangan sayuran organik	53.439.500	
				Pengembangan agribis hortikultura	Jml Bibit yang diberikan ke masyarakat	592.970.000	
				Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian	Jumlah Benih kentang yang bersertifikasi	530.000.000	
				Pengelolaan Kebun Bibit Dinas Hortikultura	Jml Kebun dinas hortikultura yang dikelola	109.750.000	
				Sekolah Lapang tanaman pangan dan horti	Jumlah KT peserta SL	127.500.000	
				Pelatihan Penerapan Teknologipertanian/perkebunan Modern Bercocok Tanam	Jml kelompok tani peserta pelatihan metode tanam SRI	203.619.000	
				Sekolah Lapang Iklim	Jumlah Kelompok tani peserta Sekolah Lapang Iklim	45.000.000	

		<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU</b>	<b>% Peningkatan Petani Tembakau yang terlatih</b>		<b>25%</b>	<b>467.970.000</b>	
				Penerapan Budidaya Tembakau yang baik	Jumlah peserta pelatihan penerapan grade tembakau	171.026.000	
				Penanganan Panen dan Pasca Panen	Terselenggaranya SL, temu usaha, terbentuknya asosiasi petani tembakau	181.978.000	
				Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tembakau	Jumlah sarana prasarana tanaman tembakau	114.966.000	
						<b>13.902.859.000</b>	

Pasuruan, .....  
Kepala (Perangkat Daerah)

.....  
NIP. ....

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASURUAN**

<b>NO</b>	<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>OUTCOME/ TARGET</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT/ TARGET</b>	<b>PAGU KEGIATAN</b>	<b>KETERA NGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Urusan Pilihan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	350.000.000	DAU
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	52 jenis	65.000.000	DAU
				Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	21 jenis	115.000.000	DAU
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30 jenis	80.000.000	DAU
				Penyediaan makanan dan minum	2,880 orang	100.000.000	DAU
				Rapat - rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150 OH	250.000.000	DAU
				Penyediaan jasa perkantoran	70 org/thn	1.275.000.000	DAU
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	200.000.000	DAU

2	Urusan Pilihan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Pengadaaan Peralatan Kantor	18 unit	70.000.000	DAU
				Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	5 gedung	140.000.000	DAU
				Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	21 unit	280.000.000	DAU
				Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor	7 jenis	45.000.000	DAU
3	Urusan Pilihan	Progam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	-	-	DAU
4	Urusan Pilihan	Program Promosi Pariwisata	2.780.200 org	Peningkatan informasi wisata dan budaya	7 kegiatan	375.000.000	DAU
				Peningkatan Promosi dan Kerjasama	10 kegiatan	400.000.000	DAU
5	Urusan Pilihan	Program Destinasi Wisata	14 ODTW	Pengembangan Daya Tarik Wisata	14 kegiatan	700.000.000	DAU
				Pemberdayaan masyarakat dan tata kelola destinasi pariwisata	200 org	400.000.000	DAU & PHJD
6	Urusan Pilihan	Program Industri Pariwisata	110 org	Pengawasan dan pengendalian usaha jasa dan sarana pariwisata	4 kegiatan	250.000.000	DAU
				Pengembangan SDM Usaha Jasa Industri Pariwisata	400 org	444.050.000	DAU & DAK Non Fisik

7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Progam Seni dan Budaya	20 Jenis	Pelestarian Sejarah dan Kepurbakalaan	5 keg	300.000.000	DAU
				Pelestarian Budaya dan Kesenian	20 kegiatan	880.311.163,75	DAU
						<b>6.719.361.163,75</b>	

note : mohon untuk tidak menambah/mengurangi kolom yg ada

Pasuruan, 10 Juni 2020  
Plt. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan  
Kabupaten Pasuruan

Ttd.

SUHARTO, S.H., M.Si  
NIP. 19610706 198603 1 022

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN PASURUAN**

<b>NO</b>	<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>OUTCOME/ TARGET</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT/ TARGET</b>	<b>PAGU KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>			Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik	Output: Terbayarnya Rekening telepon,internet, Listrik dan Sumber Daya Air/ Target: 12 Bulan	288.000.000	
2				Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan	Output: Terbayarnya honorarium pengelola Keuangan/ Target: 12 Bulan	100.080.000	
3				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output: Terbayarnya honorarium Jasa kebersihan Kantor/ Target: 12 Bulan	76.018.000	
4				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output: Terlaksananya Pengadaan alat tulis kantor/ Target: 78 Jenis	72.072.250	
5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output: Terlaksananya Pengadaan barang cetakan dan Penggandaan/ Target: 45 Jenis	32.602.430	
6				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output: Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor/ Target: 14 Jenis	4.425.000	

7		<p style="text-align: center;"><b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Outcome: Terselesaiannya Pelayanan Administrasi Perkantoran, tepat waktu/ Target: 100%</b></p>	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Output: Terbayarnya Makanan dan Minuman Rapat/tamu/ Target: 1750 Paket	28.500.000	
8				Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	Output: Terbayarnya Perjalanan Dinas luar Daerah/ Target: 50 Orang	50.000.000	
9				Penyediaan Jasa Perkantoran	Output: Terbayarnya Honorarium pegawai PTT, THL dan tersedianya surat/ Target: 14 Bulan	447.800.000	
10				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Output: Terbayarnya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor/ Target: 1 Paket	0	
11				Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Output: Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan SDM aparatur/ Target: 50 Orang	0	
12				Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan iktisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Output: Jumlah Dokumen laporan tribulan dan semester/ Target: 5 Dokumen	15.690.000	
13				Pengadaan peralatan kantor	Output: Tersedianya peralatan kantor/ Target: 10 Unit	0	
14				Penyediaan Seragam Dinas	Output: Tersedianya Seragam Dinas/ Target: 50 Orang	0	



16		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA dan PRASARANA APARATUR</b>	<b>Outcome: Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur/ Target 100%</b>	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Output: Terpeliharanya Gedung Kantor/ Target: 1 Paket	0	
17				Pemeliharaan Rutin berkala kendaraan Dinas Operasional	Output: Terpeliharanya kendaraan dinas operasional/ Target: 17 Unit	168.350.000	
18				Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan kantor	Output: Terpeliharanya peralatan Kantor/ Target: 60 Unit	9.000.000	
19				Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelir	Output: Terpeliharanya meubelair/ Target: 1 Paket	0	
20		<b>PROGRAM LAYANAN NON PERIZINAN</b>	<b>Outcome: Persentase Izin permohonan nonperizinan/ Target: 100%</b>	Pelayanan pelaku usaha perseorangan	Output: Jumlah permohonan non perizinan Bidang Perizinan Usaha/ Target: 1000 Dokumen	0	
21				Pelayanan pelaku usaha non perseorangan	Output: Jumlah permohonan non perizinan Bidang Perizinan Lainnya/ Target: 200 Dokumen	53.437.500	
22				Fasilitasi Pelayanan Publik	Output: Jumlah pemohon yang dilayani/ Target: 2000 Pemohon	2.500.000.000	
23				Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PM	Output: Jumlah kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan PM/ Target: 12 Kali	59.450.000	
24				Pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal	Output: Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan/ Target: 4 Kali	84.900.000	

25		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENGELOLAAN DATA INFORMASI DAN PENGADUAN</b>	<b>Outcome: Persentase Penganduan yang tertangani/ Target: 100%</b>	Penyusunan data investasi	Output: Jumlah buku yang disusun/ Target: 285 Buku	54.550.000	
26				Pengembangan sistem informasi penanaman modal	Output: Jumlah kegiatan pengembangan sistem Informasi penanaman modal/ Target: 1 Kali	0	
27				Pelayanan terpadu dan pengaduan	Output: Jumlah rapat koordinasi untuk menjembatani penanganan pengaduan dan peningkatan pelayanan informasi/ Target: 4 Kali	77.347.500	
28				Penyusunan Legalitas PM	Output: Jumlah Dokumen Legalitas PM/ Target: 1 Dokumen	100.000.000	
29				Gelar potensi dan investasi Daerah terpadu	Output: Jumlah Kegiatan Gelar Potensi dan Investasi daerah/ Target: 3 Kali	530.930.000	

31		<b>PROGRAM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Outcome: Jumlah pengusaha yang melakukan pengembangan/ Target: 35 Pengusaha</b>	Penyusunan peta peluang investasi kabupaten pasuruan	Output: Jumlah peta potensi dan peluang investasi/ Target: 1 Paket	100.000.000	
32				Identifikasi Potensi dan Peluang Investasi	Output: Jumlah kegiatan identifikasi potensi dan peluang investasi/ Target: 4 Kegiatan	0	
33				Peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang Penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Output: Jumlah perusahaan yang diundang/ Target: 25 Perusahaan	88.530.000	
34		<b>PROGRAM LAYANAN PERIZINAN</b>	<b>Outcome: Persentase Izin yang diterbitkan/ Target: 80%</b>	Pelayanan Perizinan Fisik dan Ruang	Output: Jumlah permohonan perizinan fisik dan ruang/ Target: 500 Dokumen	91.548.900	
35				Pelayanan Perizinan perekonomian dan sosial	Output: Jumlah permohonan perizinan perekonomian dan sosial/ Target: 500 Dokumen	55.997.500	

Pasuruan, Juli 2020  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu  
Kabupaten Pasuruan

Ttd.

**Drs. EDDY SUPRIYANTO, M.M**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19651220 199303 1 007

## PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

Nama OPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan

No	Urusan	Program	Outcome /Target	Kegiatan	Output/Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Urusan Pemerintahan Wajib pelayanan dasar</b>					
	<b>Bidang Urusan Kesehatan</b>					<b>354.887.892.725,53</b>
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>99.508.627.000</b>
		<b>Belanja Langsung</b>				<b>255.379.265.725,53</b>
1		P1. PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	Pertolongan persalinan oleh nakes : 99.01	Pelayanan Kesehatan Anak	Jumlah Pembinaan kesehatan anak dan kesehatan remaja : 6 kali	152.142.050
			Persentase Cakupan pelayanan balita : 81	Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Bayi/ Jampersal (DAK)	Jumlah penerima jampersal : 300	4.262.690.000
2		P1. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Presentase balita Stunting : 24	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	Jumlah Balita yang mendapat PMT : 350	675.954.460
			Persentase balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan : 100		Jumlah Bumil yang mendapat PMT : 150 bumil	
				Bantuan Operasional Kesehatan UKM Sekunder kegiatan Gizi(DAK)	Jumlah pertemuan kegiatan gizi : 24 kali	750.000.000
				Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Cakupan Pemberian tablet tambah darah pada bumil : 92	148.865.300
3		P1. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Persentase Penyakit menular wabah yang dilakukan PE : 100	Bantuan Operasional Kesehatan UKM Sekunder Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DAK)	Jumlah Puskesmas yang melaporkan penemuan kasus HIV : 33 puskesmas	210.000.000

			Persentase Desa UCI : 100	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah fasyankes Puskesmas Inisiasi ARV (pemberian obat ARV pada ODHA) : 4 fasyankes	461.500.000
			Cakupan penemuan dan penanganan penyakit TBC : 100		Prevalensi kusta : 1,3	
			Cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD : 100	Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Zoonosis	jumlah pengamatan PES di Puskesmas : 5 puskesmas	117.050.000
				Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Jumlah Kader pencegahan penyakit (P2) yang dilatih : 300 org	500.000.000
				Pelayanan penanggulangan penyakit TB	Jumlah Penderita TBC ditangani : 2700 org	257.794.700
				Bantuan Operasional Kesehatan UKM Sekunder imunisasi dan surveylance (DAK)	jumlah tenaga kesehatan yang dilatih kegiatan imunisasi : 33 nakes	200.000.000
					Jumlah Puskesmas yang melakukan Penyelidikan epidemiologi Penyakit menular wabah : 33 puskesmas	
				Peningkatan Imunisasi	Persentase bayi yang diimunisasi dasar lengkap : 98 %	250.000.000
4	P1.PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase Rumah tangga Sehat : 51		Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Persentase Puskesmas yang melakukan Promosi Kesehatan : 100 %	440.308.260
				Pengembangan UKBM (DDL prop)	jumlah taman posyandu yang dibina : 360	370.936.500
				Bantuan Operasional Kesehatan UKM Sekunder Promkes	Jumlah jenis UKBM yang dibina : 8 jenis	118.000.000
5	P1. PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Persentase kualitas kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat : 91		Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah sampel air yang diperiksa : 415 sampel	233.309.600

				Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	Persentase TPM & TTU yang diperiksa : 91 %	72.924.846
				Bantuan Operasional Kesehatan UKM Sekunder Penyehatan Lingkungan (DAK)	% Jumlah Desa yg dilakukan pemicuan STBM : 95 %	226.634.360
				Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Pos UKK (Absolut) : 30 pos	125.500.000
					Persentase Puskesmas Melaksanakan Tes Kebugaran pada kelompok masyarakat (%) : 98 %	
6		P1. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	Persentase screening usia lanjut (> 65th) sesuai standart : 76	Bantuan Operasional Kesehatan UKM Sekunder pelayanan Kesehatan Lansia (DAK)	Jumlah Posyandu Lansia : 365 posyandu	235.607.000
7		P1.PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	Persentase Pemeriksaan kesehatan Penduduk usia > 15 tahun yg diperiksa dalam satu tahun : 81	Peningkatan pelayanan Penanganan Kasus Jiwa dan NAPZA	persentase Penemuan dan Penanganan Kasus kesehatan jiwa : 100%	538.395.000
				Bantuan Operasional Kesehatan UKM Sekunder PTM dan Kesehatan Jiwa (DAK)	Jumlah Pembinaan PTM & Kesehatan Jiwa : 33 kali	216.907.640
8		P1. PROGRAM PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Persentase Ketersediaan obat dan Perbekalan obat : 96	Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Jumlah jenis kebutuhan (macam) sesuai Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan : 370 jenis	16.119.825.245
				Peningkatan Mutu Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kerasionalan Penggunaan Obat : 86	271.757.800
				Distribusi obat dan eLogistic (DAK)	jumlah distribusi obat ke puskesmas : 24 kecamatan	103.027.000
				Peningkatan Mutu Farmasi, makanan dan Minuman	Jumlah sarana farmakmin yang dibina : 150 sarana	430.397.960
9		P1. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase sarana dan prasarana puskesmas sesuai standart : 70	Rehabilitasi Puskesmas (DAK)	Jumlah Puskesmas yang dibangun : 1 unit	2.700.000.000
				Pengadaan Alat Kesehatan Dasar (DAK)	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan : 12 %	3.326.979.500

10		P1. PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	1, Persentase Cakupan pelayanan Kesehatan Dasar : 70	Kegiatan Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif (Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi)	Persentase Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani : 94 %	546.173.660
			2. Persentase maskin dibiayai jaminan Kesehatan : 83	Kegiatan Pelayanan kesehatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif (Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan)	Persentase screening usia lanjut (> 65th) sesuai standart : 81 %	90.900.000
			Persentase rumah tangga/ KK yang menggunakan jamban sehat : 83	Kegiatan Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif (Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat)	Persentase tatanan rumah tangga yang disurvey PHBS : 25 %	158.019.550
			Persentase Ketersediaan obat dan Perbekalan kesehatan : 78	Kegiatan Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif (Penanggulangan Penyakit DBD)	Jumlah desa Endemis DBD : 65 desa	550.000.000
			Persentase sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan sesuai standart : 96	Kegiatan Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif (Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penaggulangan Wabah	Jumlah Penyakit menular wabah yang dilakukan Penyelidikan epidemiologi : 14	335.307.500
				Kegiatan Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif (Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit Tidak menular)	Jumlah pembinaan posbindu di Puskesmas : 33 puskesmas	350.000.000

				Kegiatan Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif (Peningkatan Kesehatan Tradisional	Persentase penyelenggaraan Kesehatan Tradisional di puskesmas : 30 %	379.192.000
				Kegiatan Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif (Penanggulangan Krisis Kesehatan	Persentase Tertanganinya Krisis Kesehatan di daerah Potensi Krisis Kesehatan (24 Kec) : 100 %	415.000.000
				Kegiatan Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif (Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan)	Persentase UKBM yang dibina : 100%	527.668.440
				Kegiatan Pelayanan Kesehatan baik kegiatan Promotif/Preventif maupun Kuratif/rehabilitatif (Peyelenggaraan Penyehatan Lingkungan)	% Jumlah Desa yg dilakukan pemicuan STBM.: 95 %	1.948.532.940
				Pelatihan Tenaga Kesehatan dan atau tenaga administratif pada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan (Pendidikan dan Pelatihan Formal)	jumlah tenaga kesehatan yang dilatih : 90 orang	564.893.000
				Penyediaan/Peningkatan /Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu)	Jumlah pustu yang direhab : 5 unit	2.253.820.000



				Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ( Pengadaan Alat Kesehatan dan Lab, Pengadaan Alat Farmasi)	Jumlah pengadaan alat kesehatan : 2 paket	5.184.750.785
				Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi yang terkena pemutusan hubungan kerja (Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan)	Jumlah peserta PBID : 65.000 orang	28.956.626.991
				Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Rehabilitasi Puskesmas)	Jumlah Puskesmas yang direhab : 9 unit	13.014.365.000
				Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ( Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan)	Jumlah jenis obat : 370 jenis	6.000.000.000

				Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Pembangunan Rumah Sakit Grati)	Jumlah Gedung yang dibangun : 1 unit	18.152.544.900
				Pembayaran tindakan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan/atau orang tidak mampu	Jumlah maskin yang dibiayai pelayanan kesehatannya : 50 maskin	2.000.000.000
				Kegiatan Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif (Pengelolaan pelayanan Kesehatan gizi Masyarakat)	Jumlah PMT Balita dan Bumil : 500 paket	750.000.000
11		11. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase mutu pelayanan kesehatan sesuai standart : 100 %	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar	Jumlah Pelaksanaan PKP : 33 puskesmas	542.926.000
				Akreditasi Puskesmas (DAK)	Jumlah Puskesmas terakreditasi minimal madya : 30 puskesmas	1.945.375.000
				Pengembangan PONKESDES dan PUSTU Layanan Gawat Darurat	Persentase Ponkesdes sesuai standart : 75 %	1.448.275.000
				Peningkatan pelayanan Kesehatan (DDL prop)	Jumlah perawat ponkesdes dan dokter icon : 80 org	2.265.279.000
				Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase Terbentuknya sistem Rujukan RS dan Puskesmas : 100 %	2.755.316.755
				Bantuan Operasional Kesehatan UKM Sekunder Kesehatan Tradisional (DAK)	jumlah pembinaan penyelenggaraan Kesehatan Tradisional : 33 pusk	50.000.000
				Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat miskin	Jumlah Maskin yang dibiayai Non PBID : 12	-

12		P2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan sesuai kompetensi jabatan fungsional : 90 %	Peningkatan Profesionalisme dan pengembangan karier tenaga kesehatan	Jumlah ijin nakes yang diterbitkan : 1000	303.496.490
					penilaian Angka Kredit (PAK) tenaga Kesehatan : 250	
13		P.3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi : 90 %	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional dinkes (DAK)	jumlah pengadaan kendaraan : 2 unit	1.050.000.000
				Pengadaan Mebelair dinkes	Jumlah pengadaan mebelair : 1 paket	150.000.000
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dinkes	Jumlah pengadaan peralatan : 1 paket	226.335.200
				Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor dinkes	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor : 1 paket	200.000.000
				Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional dinkes	Jumlah pemeliharaan kendaraan operasional dinas : 30 unit	594.008.190
				Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan gedung Kantor dinkes	Jumlah peralatan rumah tangga yang dipelihara : 1 paket	269.148.400
				Rehabilitasi sedang/ berat Rumah Dinas	Jumlah rehab bangunan gedung dinkes : 2 unit	351.134.000
14		P3.PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan layanan kantor : 81 %	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dinkes	Jumlah pembayaran listrik / air / telepon : 12 bulan	964.019.940
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dinkes	Jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan : 12 bulan	220.000.000
				Penyediaan Alat Tulis Kantor dinkes	Jumlah pembelian ATK : 1 paket	199.679.825
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dinkes	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan : 1 paket	147.000.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dinkes	jumlah pembelian peralatan kantor : 100 %	250.000.000
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dinkes	jumlah pembelian peralatan rumah tangga : 100%	223.830.590
				Penyediaan Makanan dan Minuman dinkes	Jumlah kegiatan rapat dan tamu : 12 bulan	109.015.200

				Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dinkes	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah : 12 bulan	152.489.000
				Penyediaan Jasa Perkantoran dinkes	Honor tenaga kontrak/THL : 12 bulan	6.665.035.148,42
				Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Manajemen Kesehatan : 7 dokumen	400.658.000
15		P1.PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	Rata- rata Nilai hasil Kinerja Puskesmas : 71	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Purwodadi	Cakupan Kunjungan rawat jalan kapitasi JKN : 71	2.472.398.461
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Nongkoaijar	Cakupan Kunjungan rawat jalan kapitasi JKN : 71	833.323.325
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Sumberoitu	Cakupan Kunjungan rawat jalan kapitasi JKN : 71	304.120.530
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Puspo	Cakupan Kunjungan rawat jalan kapitasi JKN : 71	1.194.820.710
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Tosari	Cakupan Kunjungan rawat jalan kapitasi JKN : 71	525.402.520
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Lumbang	Cakupan Kunjungan rawat jalan kapitasi JKN : 71	1.838.326.270
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Pasrepan	Cakupan Kunjungan rawat jalan kapitasi JKN : 71	2.367.261.625
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Keiavan	Cakupan Kunjungan rawat jalan kapitasi JKN : 71	2.232.356.425
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Ambal-ambil	Cakupan Kunjungan rawat jalan kapitasi JKN : 71	764.105.930
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Wonoreio	Cakupan Kunjungan rawat jalan kapitasi JKN : 71	2.919.399.050
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Purwosari	Cakupan Kunjungan rawat jalan kapitasi JKN : 71	2.588.438.120

				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Karangreio	Cakupan Kunjungan rawat jalan kapitasi JKN : 71	458.593.200
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Prigen	Cakupan Kunjungan rawat jalan kapitasi JKN : 71	872.389.555
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Bulukandang	Cakupan Kunjungan rawat jalan kapitasi JKN : 71	441.918.020
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Sukorejo	Cakupan Kunjungan rawat jalan kapitasi JKN : 71	1.919.934.420
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Pandaan	Cakupan Kunjungan rawat jalan kapitasi JKN : 71	2.108.945.620
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Sebani	Cakupan Kunjungan rawat jalan kapitasi JKN : 71	409.229.620
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Gempol	Cakupan Kunjungan rawat jalan kapitasi JKN : 71	2.239.270.490
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Kepulungan	Cakupan Kunjungan rawat jalan kapitasi JKN : 71	520.703.290
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Beji	Cakupan Kunjungan rawat jalan kapitasi JKN : 71	2.414.005.300
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Bangil	Cakupan Kunjungan rawat jalan kapitasi JKN : 71	1.593.787.685
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Raci	Cakupan Kunjungan rawat jalan kapitasi JKN : 71	548.855.215
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Rembang	Cakupan Kunjungan rawat jalan kapitasi JKN : 71	2.399.527.810
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Kraton	Cakupan Kunjungan rawat jalan kapitasi JKN : 71	1.891.918.410

				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Ngempit	Cakupan Kunjungan rawat jalan kapitasi JKN : 71	1.539.487.070
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Pohientrek	Cakupan Kunjungan rawat jalan kapitasi JKN : 71	1.109.184.370
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Gondangwetan	Cakupan Kunjungan rawat jalan kapitasi JKN : 71	2.666.773.130
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Reioso	Cakupan Kunjungan rawat jalan kapitasi JKN : 71	2.158.139.680
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Winongan	Cakupan Kunjungan rawat jalan kapitasi JKN : 71	2.615.292.230
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Grati	Cakupan Kunjungan rawat jalan kapitasi JKN : 71	2.857.094.740
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Kedawungwetan	Cakupan Kunjungan rawat jalan kapitasi JKN : 71	1.018.998.100
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Lekok	Cakupan Kunjungan rawat jalan kapitasi JKN : 71	3.683.766.920
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas Nguling	Cakupan Kunjungan rawat jalan kapitasi JKN : 71	3.217.210.755
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Purwodadi	Nilai IKM Puskesmas : 81.1	1.178.952.040
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Nongkojajar	Nilai IKM Puskesmas : 81.1	265.734.480
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Sumberpitu	Nilai IKM Puskesmas : 81.1	28.418.370
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Puspo	Nilai IKM Puskesmas : 81.1	41.183.135
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tosari	Nilai IKM Puskesmas : 81.1	87.441.140

				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Lumbang	Nilai IKM Puskesmas : 81.1	51.572.235
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pasrepan	Nilai IKM Puskesmas : 81.1	204.086.785
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kejayan	Nilai IKM Puskesmas : 81.1	132.631.810
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ambal-ambil	Nilai IKM Puskesmas : 81.1	44.499.270
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wonorejo	Nilai IKM Puskesmas : 81.1	202.598.425
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Purwosari	Nilai IKM Puskesmas : 81.1	896.926.240
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Karangrejo	Nilai IKM Puskesmas : 81.1	26.246.550
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Prigen	Nilai IKM Puskesmas : 81.1	278.557.250
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Bulukandang	Nilai IKM Puskesmas : 81.1	39.117.885
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Sukorejo	Nilai IKM Puskesmas : 81.1	373.920.220
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pandaan	Nilai IKM Puskesmas : 81.1	1.184.335.780
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Sebani	Nilai IKM Puskesmas : 81.1	22.026.395
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gempol	Nilai IKM Puskesmas : 81.1	563.978.480
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kepulungan	Nilai IKM Puskesmas : 81.1	64.178.515

				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Beji	Nilai IKM Puskesmas : 81.1	360.030.450
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Bangil	Nilai IKM Puskesmas : 81.1	281.943.390
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Raci	Nilai IKM Puskesmas : 81.1	96.689.615
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Rembang	Nilai IKM Puskesmas : 81.1	98.371.280
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton	Nilai IKM Puskesmas : 81.1	107.370.460
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngempit	Nilai IKM Puskesmas : 81.1	937.524.410
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pohientrek	Nilai IKM Puskesmas : 81.1	73.384.670
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondangwetan	Nilai IKM Puskesmas : 81.1	606.523.960
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Rejoso	Nilai IKM Puskesmas : 81.1	300.935.315
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Winongan	Nilai IKM Puskesmas : 81.1	520.639.040
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Grati	Nilai IKM Puskesmas : 81.1	106.420.080
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kedawungwetan	Nilai IKM Puskesmas : 81.1	65.580.850
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Lekok	Nilai IKM Puskesmas : 81.1	600.037.955
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Nguling	Nilai IKM Puskesmas : 81.1	917.521.690
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas UPTD Labkesda	Nilai IKM Labkesda : 81.1	264.494.580



				Pelayanan Kesehatan Dijamin Pemda di Puskesmas Purwodadi	Cakupan Kunjungan rawat jalan umum dijamin Pemda : 76	299.238.990,19
				Pelayanan Kesehatan Dijamin Pemda di Puskesmas Nongkojajar	Cakupan Kunjungan rawat jalan umum dijamin Pemda : 76	207.041.800
				Pelayanan Kesehatan Dijamin Pemda di Puskesmas Sumberpitu	Cakupan Kunjungan rawat jalan umum dijamin Pemda : 76	220.242.855
				Pelayanan Kesehatan Dijamin Pemda di Puskesmas Puspo	Cakupan Kunjungan rawat jalan umum dijamin Pemda : 76	207.041.670
				Pelayanan Kesehatan Dijamin Pemda di Puskesmas Tosari	Cakupan Kunjungan rawat jalan umum dijamin Pemda : 76	267.883.200
				Pelayanan Kesehatan Dijamin Pemda di Puskesmas Lumbang	Cakupan Kunjungan rawat jalan umum dijamin Pemda : 76	246.588.870
				Pelayanan Kesehatan Dijamin Pemda di Puskesmas Pasrepan	Cakupan Kunjungan rawat jalan umum dijamin Pemda : 76	271.040.665
				Pelayanan Kesehatan Dijamin Pemda di Puskesmas Kejayan	Cakupan Kunjungan rawat jalan umum dijamin Pemda : 76	247.020.555
				Pelayanan Kesehatan Dijamin Pemda di Puskesmas Ambal-ambil	Cakupan Kunjungan rawat jalan umum dijamin Pemda : 76	222.467.355
				Pelayanan Kesehatan Dijamin Pemda di Puskesmas Wonorejo	Cakupan Kunjungan rawat jalan umum dijamin Pemda : 76	299.389.695
				Pelayanan Kesehatan Dijamin Pemda di Puskesmas Purwosari	Cakupan Kunjungan rawat jalan umum dijamin Pemda : 76	296.114.785
				Pelayanan Kesehatan Dijamin Pemda di Puskesmas Karangrejo	Cakupan Kunjungan rawat jalan umum dijamin Pemda : 76	219.065.790
				Pelayanan Kesehatan Dijamin Pemda di Puskesmas Prigen	Cakupan Kunjungan rawat jalan umum dijamin Pemda : 76	195.559.255

				Pelayanan Kesehatan Dijamin Pemda di Puskesmas Bulukandang	Cakupan Kunjungan rawat jalan umum dijamin Pemda : 76	218.435.340
				Pelayanan Kesehatan Dijamin Pemda di Puskesmas Sukorejo	Cakupan Kunjungan rawat jalan umum dijamin Pemda : 76	335.506.415
				Pelayanan Kesehatan Dijamin Pemda di Puskesmas Pandaan	Cakupan Kunjungan rawat jalan umum dijamin Pemda : 76	366.823.055
				Pelayanan Kesehatan Dijamin Pemda di Puskesmas Sebani	Cakupan Kunjungan rawat jalan umum dijamin Pemda : 76	228.798.465
				Pelayanan Kesehatan Dijamin Pemda di Puskesmas Gempol	Cakupan Kunjungan rawat jalan umum dijamin Pemda : 76	272.139.300
				Pelayanan Kesehatan Dijamin Pemda di Puskesmas Kepulungan	Cakupan Kunjungan rawat jalan umum dijamin Pemda : 76	215.495.220
				Pelayanan Kesehatan Dijamin Pemda di Puskesmas Beji	Cakupan Kunjungan rawat jalan umum dijamin Pemda : 76	274.306.370
				Pelayanan Kesehatan Dijamin Pemda di Puskesmas Bangil	Cakupan Kunjungan rawat jalan umum dijamin Pemda : 76	217.060.175
				Pelayanan Kesehatan Dijamin Pemda di Puskesmas Raci	Cakupan Kunjungan rawat jalan umum dijamin Pemda : 76	254.466.845
				Pelayanan Kesehatan Dijamin Pemda di Puskesmas Rembang	Cakupan Kunjungan rawat jalan umum dijamin Pemda : 76	282.564.835
				Pelayanan Kesehatan Dijamin Pemda di Puskesmas Kraton	Cakupan Kunjungan rawat jalan umum dijamin Pemda : 76	202.857.395
				Pelayanan Kesehatan Dijamin Pemda di Puskesmas Ngempit	Cakupan Kunjungan rawat jalan umum dijamin Pemda : 76	271.783.910
				Pelayanan Kesehatan Dijamin Pemda di Puskesmas Pohjentrek	Cakupan Kunjungan rawat jalan umum dijamin Pemda : 76	200.651.605
				Pelayanan Kesehatan Dijamin Pemda di Puskesmas Gondangwetan	Cakupan Kunjungan rawat jalan umum dijamin Pemda : 76	336.153.075

				Pelayanan Kesehatan Dijamin Pemda di Puskesmas Rejoso	Cakupan Kunjungan rawat jalan umum dijamin Pemda : 76	244.991.720
				Pelayanan Kesehatan Dijamin Pemda di Puskesmas Winongan	Cakupan Kunjungan rawat jalan umum dijamin Pemda : 76	214.799.575
				Pelayanan Kesehatan Dijamin Pemda di Puskesmas Grati	Cakupan Kunjungan rawat jalan umum dijamin Pemda : 76	213.484.855
				Pelayanan Kesehatan Dijamin Pemda di Puskesmas Kedawungwetan	Cakupan Kunjungan rawat jalan umum dijamin Pemda : 76	241.654.070
				Pelayanan Kesehatan Dijamin Pemda di Puskesmas Lekok	Cakupan Kunjungan rawat jalan umum dijamin Pemda : 76	248.770.880
				Pelayanan Kesehatan Dijamin Pemda di Puskesmas Nguling	Cakupan Kunjungan rawat jalan umum dijamin Pemda : 76	230.143.600
				Pelayanan Kesehatan Dijamin Pemda di UPTD Labkesda	Cakupan Kunjungan labkesda : 76	463.328.750
				Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Purwodadi	jumlah spm yang dikerjakan puskesmas : 12 indikator	768.351.300
				Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Nongkojajar	jumlah spm yang dikerjakan puskesmas : 12 indikator	825.454.020
				Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Sumberpitu	jumlah spm yang dikerjakan puskesmas : 12 indikator	702.166.940
				Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Puspo	jumlah spm yang dikerjakan puskesmas : 12 indikator	776.377.750
				Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Tosari	jumlah spm yang dikerjakan puskesmas : 12 indikator	671.664.850
				Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Lumbang	jumlah spm yang dikerjakan puskesmas : 12 indikator	636.030.140
				Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Pasrepan	jumlah spm yang dikerjakan puskesmas : 12 indikator	651.066.500

				Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Kejayan	jumlah spm yang dikerjakan puskesmas : 12 indikator	626.280.970
				Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Ambal-ambil	jumlah spm yang dikerjakan puskesmas : 12 indikator	566.921.070
				Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Wonorejo	jumlah spm yang dikerjakan puskesmas : 12 indikator	605.915.910
				Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Purwosari	jumlah spm yang dikerjakan puskesmas : 12 indikator	594.736.940
				Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Karangrejo	jumlah spm yang dikerjakan puskesmas : 12 indikator	681.828.050
				Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Prigen	jumlah spm yang dikerjakan puskesmas : 12 indikator	795.987.940
				Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Bulukandang	jumlah spm yang dikerjakan puskesmas : 12 indikator	525.355.550
				Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Sukorejo	jumlah spm yang dikerjakan puskesmas : 12 indikator	764.344.950
				Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Pandaan	jumlah spm yang dikerjakan puskesmas : 12 indikator	757.618.750
				Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Sebani	jumlah spm yang dikerjakan puskesmas : 12 indikator	545.669.870
				Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Gempol	jumlah spm yang dikerjakan puskesmas : 12 indikator	627.136.640
				Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Kepulungan	jumlah spm yang dikerjakan puskesmas : 12 indikator	624.899.000
				Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Beji	jumlah spm yang dikerjakan puskesmas : 12 indikator	647.051.270

				Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Bangil	jumlah spm yang dikerjakan puskesmas : 12 indikator	662.121.800
				Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Raci	jumlah spm yang dikerjakan puskesmas : 12 indikator	612.909.750
				Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Rembang	jumlah spm yang dikerjakan puskesmas : 12 indikator	679.045.740
				Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Kraton	jumlah spm yang dikerjakan puskesmas : 12 indikator	701.122.130
				Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Ngempit	jumlah spm yang dikerjakan puskesmas : 12 indikator	686.781.760
				Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Pohjentrek	jumlah spm yang dikerjakan puskesmas : 12 indikator	769.662.600
				Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Gondangwetan	jumlah spm yang dikerjakan puskesmas : 12 indikator	612.514.730
				Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Rejoso	jumlah spm yang dikerjakan puskesmas : 12 indikator	671.296.820
				Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Winongan	jumlah spm yang dikerjakan puskesmas : 12 indikator	673.052.330
				Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Grati	jumlah spm yang dikerjakan puskesmas : 12 indikator	652.496.310
				Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Kedawungwetan	jumlah spm yang dikerjakan puskesmas : 12 indikator	524.687.540
				Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Lekok	jumlah spm yang dikerjakan puskesmas : 12 indikator	528.091.850
				Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Nguling	jumlah spm yang dikerjakan puskesmas : 12 indikator	554.831.230
16		P1.PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN RSUD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD : 76	80.Peningkatan mutu dan pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD Grati	BOR : 62	-

			81.Pengadaan sarpras dan alat kesehatan (DAK)	BOR : 62	2.996.706.714
			82.Pelayanan BLUD Grati	Terakreditasi Madya : 100 %	17.000.000.000

Mengetahui

Plt. Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Pasuruan

Ttd.

dr. Ani Latifah, M.Kes  
Pembina Tk.I / IV b  
Nip. 196609161996022001

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**DINAS SOSIAL KAB. PASURUAN**

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KETERANGAN
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Prosentase pemenuhan layanan kantor</b>			<b>1.116.740.000,00</b>	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang terkirim	5.500.000,00	
				Penyediaan Jasa KomuniSeksi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, air, telpon yang terbayar	158.800.000,00	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	25.000.000,00	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran honor adminitrasi keuangan yang terbayar	364.740.000,00	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	49.000.000,00	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan	25.000.000,00	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah tersedianya Makan dan Minuman Rapat	45.000.000,00	
				Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	175.000.000,00	
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah terbayarnya gaji Honorer	168.700.000,00	
				Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM Diklat Teknis Bagi Aparatur	20.000.000,00	
				Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Pelaksanaan Forum OPD, Penyusunan Renja dan Laporan OPD, Musrenbang	80.000.000,00	
				Penyediaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pembelian Pakaian Kerja	0,00	

<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Prosentase sarana dan prasarana kondisi baik</b>			<b>583.600.000,00</b>	
				Pengadaan Mebelair	Jumlah Pengadaan Mebelair	0,00	
				Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	28.600.000,00	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung dan Kantor	0,00	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin /Berkala kendaraan Dinas/Oprasional	245.000.000,00	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung dan Kantor	10.000.000,00	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		300.000.000,00	
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB</b>	<b>PROGRAM FAKIR MISKIN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Prosentase Pilar-Pilar yang aktif dalam penanganan PMKS</b>			<b>826.000.000,00</b>	
				Pemberdayaan WRSE (Monev Jadub dan RTLH)	Jumlah WRSE Yang Berdayaguna	5.000.000,00	
				Pemeliharaan dan Rehab Taman Makam Pahlawan (TMP)	Jumlah pemeliharaan dan rehab TMP	64.300.000,00	
				Penghargaan dan Bantuan Sosial Bagi Pahlawan, Perintis dan Pejuang (Sarasehan dan Bansos)	Jumlah penghargaan yg diberikan bagi pahlawan dan perintis	75.700.000,00	
				Pemantapan Pekerja Sosial Masyarakat Terkait Dengan Pendataan PMKS	Jumlah peserta Pembinaan dan Pemberdayaan pendataan PMKS	351.000.000,00	
				Pembinaan dan Pemberdayaan Karang Taruna	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pemberdayaan Karang Taruna	75.000.000,00	
				Verval BDT	Jumlah pendataan verval BDT tepat sasaran	100.000.000,00	
				Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah pendataan PMKS dan PSKS	0,00	
				Pemberdayaan Keluarga Rentan (Pendampingan KUBE)	Jumlah Pembentukan dan Penilaian KUBE	5.000.000,00	



				Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Fakir Miskin (BPNT)	Jumlah pendataan verval BDT tepat sasaran	50.000.000,00	
				Operasional Sembako	Jumlah pendistribusian sembako tepat sasaran	100.000.000,00	
<b>4</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Prosentase PMKS yang direhabilitasi</b>			<b>548.000.000,00</b>	
				Pelayanan Panti Anak	Jumlah pendayagunaan patra penyandang cacat dan eks trauma	10.000.000,00	
				Pelayanan dan Bimbingan Sosial Anak Terlantar	Jumlah bimbingan lanjut eks klien	95.000.000,00	
				Tetirah Anak	umlah Anak Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	0,00	
				Pelayanan dan Rehabilitasi PMKS Hasil Razia (Gelandangan, Pengemis, Tuna Sosial dan Ank Jalanan)	Jumlah Anak Penanganan Lanjut Usia Terlantar	220.000.000,00	
				Penanganan Lansia dan Peringatan HALUN	Jumlah Penanganan Lanjut Usia Terlantar	80.000.000,00	
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Bimbingan Lanjut eks. Klien	Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	140.000.000,00	
				Rehabilitasi eks. Narapidana	jumlah eks narapida yg di berangkatkan dan dibina	3.000.000,00	
<b>5</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Prosentase keluarga penerima manfaat yang graduasi</b>			<b>608.231.820,00</b>	
				Pengembangan dan Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah Sosialisasi KPM PKH	228.231.820,00	
				Penyuluhan dan PubliSeksi Kesejahteraan Sosial	Jumlah penyuluhan masalah kesos	100.000.000,00	
				Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	Jumlah pelaksanaan kebencanaan di kampung siaga bencana	200.000.000,00	
				Perlindungan Sosial bagi pekerja migran bermasalah dan korban tindak kekerasan / perlakuan salah	Jumlah pemulihan trauma pasca kebencanaan	10.000.000,00	

				Penanganan dan perlindungan sosial bagi orang terlarang	Terlaksananya Pembinaan Bagi Petugas dan Pendampingan Sosial	20.000.000,00	
				Pemulihan dan Perlindungan Sosial eks. Korban Bencana	Jumlah perlindungan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental lansia tidak potensia serta perdagangan	50.000.000,00	
<b>JUMLAH TOTAL</b>						<b>3.682.571.820,00</b>	

Pasuruan, Juli 2020

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN PASURUAN

Ttd.

**H.M. SUWITO ADI, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tingkat I/IVb  
NIP. 19650311 198603 1 012

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD**

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kantor / 100 %			<b>2.110.237.280</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim melalui jasa kurir / 1000 pucuk surat	8.000.000	
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik Telepon	Jumlah pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet selama 12 bulan / 276 rekening bulan	151.776.000	
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya / 672 unit	44.023.200	
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya/24 unit	30.000.000	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honorarium pejabat piñata usaha keuangan, kegiatan dan pelaku pengadaan barang/jasa / 168 orang bulan	49.254.240	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah pembayaran honor jasa kebersihan / 84 orang bulan	80.000.000	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor / 168 jenis kali	144.765.840	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetak dan penggandaan/72 jenis kali	79.850.000	
				Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah pembelian komponen/288 unit	26.000.000	

				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat/12.580 orang	377.400.000	
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak dan THL/480 orang bulan	928.000.000	
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pembelian barang bacaan dan peraturan perundang-undangan/1.800 eksemplar	104.768.000	
				Penyediaan pakaian kerja	Jumlah pakaian kerja/150 stel	86.400.000	
<b>2</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Prosentase Sarana Prasarana Kondisi Baik/100 %</b>			<b>3.680.641.600</b>	
				Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	40.000.000	
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor / 6 unit kali	3.045.000.000	
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional / 180 unit kali	479.641.600	
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor/168 unit kali	116.000.000	
<b>3</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>	<b>Prosentase Fasilitasi Fungsi DPRD / 100 %</b>			<b>26.109.327.259</b>	
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda yang dibahas/12 raperda	921.400.000	
				Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi/24 laporan	342.168.000	

				Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah laporan hasil rapat Paripurna/28 la	2.477.054.800	
				Kegiatan Reses	Jumlah laporan kegiatan reses/tahun/ 3 kali	945.000.000	
				Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	Jumlah laporan hasil kunjungan kerja/208 la	20.446.404.459	
				Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah laporan BIMTEK/4 laporan	749.760.000	
				Pelantikan Antar Waktu DPRD Kabupaten Pasuruan	Jumlah PAW/tahun / 2 kali PAW	77.520.000	
				General Check Up DPRD Kabupaten Pasuruan	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang m	42.000.000	
				LKPJ Bupati	Jumlah laporan rapat Paripurna LKPJ/2 kali laporan	108.020.000	
					TOTAL	<b>31.900.206.139</b>	

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH**

<b>NO</b>	<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>OUTCOME/ TARGET</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT/ TARGET</b>	<b>PAGU KEGIATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	Urusan pendukung	<b>Non Program / BTL</b>	Persentase Kebijakan Lingkup Bidang Kesejahteraan Sosial yang Difasilitasi / 100 %	<b>Hibah Masjid/Musholla/Ponpes./Pura /Lembaga Keagamaan dan Sosial</b>	<b>673 Lembaga</b>	<b>15.648.000.000,00</b>
			Persentase Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN/ 100%	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>157 orang</b>	<b>15.906.570.000,00</b>
			Persentase Terbayarnya Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH/100%	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH</b>	<b>1 LS</b>	<b>1.231.587.376,22</b>
					<b>Total Belanja PD</b>	<b>32.786.157.376,22</b>
1	<b>UNSUR PENDUKUNG</b>	<b>PROGRAM OTONOMI DAERAH DAN KEWILAYAHAN</b>	Outcome : Persentase Hasil evaluasi IKK yang ditindaklanjuti/100%	Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen LPPD /70 buku	125.980.000
				Fasilitasi Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan koordinasi fasilitasi pemerintahan daerah / 12 laporan koordinasi	139.270.000
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan administrasi Kecamatan dan Kelurahan yang ditindaklanjuti / 12 laporan koordinasi	70.950.000

				Fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah	Jumlah koordinasi dengan OPD dan Forkompimda / 4 laporan koordinasi	84.750.000
			Outcome : Jumlah Penetapan dan penegasan batas wilayah (Akumulasi s.d Th. N) / 11 wilayah	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah serta Pembakuan Nama Rupabumi	Jumlah koordinasi kegiatan batas wilayah dan pembakuan nama rupa bumi / 12 laporan koordinasi	247.930.000
				Fasilitasi Permasalahan Kewilayahan dan Pertanahan	Jumlah koordinasi permasalahan Kewilayahan dan Pertanahan / 6 laporan koordinasi	31.120.000
					<b>Total Belanja PD</b>	<b>700.000.000</b>
2		<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA</b>	Outcome : Prosentase Peningkatan Kerjasama/100%	Penyusunan dan Pembahasan Draft Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama / 24 laporan	68.425.000
				Koordinasi dan Penjajakan Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah / 17 laporan	186.180.000
				Koordinasi dan Penjajakan Kerjasama Perbatasan Wilayah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Perbatasan Wilayah / 20 laporan	57.000.000
				Koordinasi dan Penjajakan Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Pihak Ketiga / 20 laporan	112.575.000
				Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Antar Daerah, Kerjasama Perbatasan Wilayah, Kerjasama Pihak Ketiga	Jumlah Monev Kerjasama Daerah yang ditandatangani / 6 daerah , 3 pihak ketiga	121.870.000

				Workshop, Sosialisasi, Seminar dan Sarasehan Kerjasama Daerah	Jumlah peserta workshop, spsialisasi, seminar dan sarasehan Kerjasama Daerah / 2 kali / kegiatan	53.950.000
					<b>Total Belanja PD</b>	<b>600.000.000</b>
3		<b>PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	Outcome : Persentase fasilitasi pembentukan produk hukum, penyebarluasan informasi hukum dan bantuan hukum / 100%	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah laporan pendampingan kasus hukum / 40 Laporan	331.820.700
				Legislasi Rancangan Peraturan Perundang -undangan	Jumlah produk hukum yang diterbitkan sesuai kewenangan daerah / 1000 produk hukum	335.636.300
				Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi, Penyuluhan dan Temu Sadar Hukum / 25 kali	165.434.000
				Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah produk hukum kegiatan di Bagian Hukum yang dipublikasikan melalui website JDIIH Kabupaten Pasuruan / 70 produk	167.109.000
					<b>Total Belanja PD</b>	<b>1.000.000.000</b>
4		<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN FASILITASI BIDANG PEREKONOMIAN</b>	<b>Prosentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti / 85%</b>	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketersediaan dan Penyaluran Sapropdi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan monev sapropdi / 16 laporan	32.000.000
				Fasilitasi Pengembangan BUMD	Jumlah laporan hasil fasilitasi dan koordinasi pengembangan BUMD / 10 laporan	146.000.000



				Fasilitasi KUR dan Pengembangan KUMKM/IKM	Jumlah laporan hasil koordinasi fasilitasi KUR dan pengembangan KUMKM /10 laporan	108.000.000
				Fasilitasi Pemasaran melalui Promosi Potensi Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi dan fasilitasi promosi potensi daerah / 20 laporan	149.000.000
				Koordinasi dan Monev Penggunaan Energi dan SDA	Jumlah laporan hasil koordinasi dan monev penggunaan energi dan SDA / 16 laporan	84.000.000
				Koordinasi dan Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi pengendalian inflasi daerah /12 laporan	81.000.000
					<b>TOTAL</b>	<b>600.000.000</b>
		<b>PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI</b>	<b>Prosentase peningkatan capaian kinerja pelaksanaan DBHCHT oleh perangkat daerah/ 85%</b>	Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Cukai	Jumlah Laporan Koordinasi Pemanfaatan DBHCHT / 16 laporan	480.825.000
					<b>TOTAL</b>	<b>480.825.000</b>
					<b>Total Belanja PD</b>	<b>1.080.825.000</b>
5		<b>PROGRAM PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH</b>	Outcome : Prosentase paket pengadaan barang/jasa pemerintah yang berhasil ditenderkan / 300 paket	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah paket PBJ yang berhasil ditenderkan / 300 paket	622.867.500
				Pendampingan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		58.197.500
				Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Desa	Jumlah desa yang dimonitor dan dievaluasi / 85 desa	60.295.000
				Pembinaan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah personil pelaku PBJ yang berhasil dibina / 400 orang	133.640.000

				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah kegiatan pengembangan sistem informasi yang dilakukan / 2 kali	125.000.000
					<b>Total Belanja PD</b>	<b>1.000.000.000</b>
6		<b>PROGRAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	1.Outcome : Prosentase kebijakan bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan yang ditindaklanjuti / 80%	Fasilitasi perencanaan pembangunan dan litbang	Jumlah laporan fasilitasi perencanaan pembangunan dan litbang / 10 Laporan	20.710.600
			2.Outcome : Prosentase kegiatan yang tertib administrasi / 80%			
				Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah Buku Standar Satuan Harga yang disusun / 250 Buku	118.472.000
				Penyusunan Analisa Standar Belanja	Jumlah Buku Analisa Standar Belanja yang disusun / 250 Buku	79.250.000
				Monitoring & Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Jumlah paket proyek yang dimonitoring / 750 Paket	119.114.800
				Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Jumlah Buku Pelaporan yang disusun / 285 Buku	162.558.100
				Sosialisasi Pembangunan Fisik	Jumlah laporansosialisasi proyek fisik 24 kecamatan / 24 Laporan	10.000.000
				Penyusunan dan Penerapan Buku Pedoman Pelaksanaan APBD dan Buku Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Buku Pelaporan yang disusun / 750 Buku	189.894.500
					<b>Total Belanja PD</b>	<b>700.000.000</b>

7	Urusan Pendukung	<b>Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</b>	Persentase Kebijakan Lingkup Bidang Kesejahteraan Sosial yang Difasilitasi / 100 %	Pelaksanaan Kegiatan Rutin Keagamaan	Jumlah laporan kegiatan rutin keagamaan / 4 Laporan	493.900.700
				Pelaksanaan Kegiatan Amaliah Ramadhan	Jumlah laporan kegiatan Amaliah Ramadhan / 5 Laporan	222.463.000
				Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam / 6 Laporan	91.526.300
				Pelaksanaan Kegiatan Pasuruan Bersholawat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pasuruan Bersholawat / 1 Laporan	-
				Pelaksanaan Kegiatan Dzikir Akbar	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Dzikir Akbar / 1 Laporan	-
				Pelaksanaan Kegiatan Hari Santri	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Hari Santri / 1 Laporan	102.500.000
				Pelaksanaan Kegiatan Khotmil Qur'an oleh Khufad	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Khotmil Qur'an oleh Khufad / 1 Laporan	-
				Penyelenggaraan dan pembinaan MTQ	Jumlah Penyelenggaraan dan pembinaan MTQ / 3 Laporan	1.108.795.000
				Pelayanan Kegiatan Ibadah Haji	Jumlah Pelayanan Kegiatan Ibadah Haji / 2 Laporan	670.815.000
				Koordinasi administratif sosial budaya	Jumlah Koordinasi administratif sosial budaya / 15 Laporan	170.000.000

				Monitoring dan Evaluasi hibah / bantuan sosial	Jumlah Monitoring dan Evaluasi hibah / bantuan sosial / 673 Laporan	10.000.000
				Koordinasi Administratif Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Koordinasi Administratif Kesejahteraan Rakyat / 15 Laporan	30.000.000
					<b>Total Belanja PD</b>	<b>2.900.000.000</b>
8		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN</b>	<b>Outcome : Prosentase Jumlah Realisasi Anggaran / 87%</b>			
			<b>Outcome : Prosentase Fasilitasi Perlengkapan yang Terpenuhi Terhadap Rencana Kebutuhan Barang/Jasa / 92%</b>	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Kerja Setda.	Jumlah Dokumen / 2 dokumen	Rp 33.624.250
				Koordinasi dan Fasilitasi Keuangan	1. Jumlah pembayaran honor Pengelola Keuangan dan PTT, / 1112 OB	Rp 1.617.010.000
					2. Jumlah Kegiatan koordinasi dan Konsultasi keuangan / 4 Kali	
				Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian ATK, barang cetakan dan Fotocopy / 65 Jenis	Rp 51.267.875
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / 1 unit	Rp 36.207.500
				Pengadaan Mebelair	Jumlah Pengadaan Meubelair / 10 unit	Rp 6.207.500

				Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor / 1 unit	Rp	13.267.875
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan / 1 unit	Rp	11.207.500
				Penyediaan Jasa Perkantoran Sekretariat Daerah	Jumlah Jasa Perkantoran yang terbayarkan / 5 jenis	Rp	30.000.000
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana	1. Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor / 4 unit kali	Rp	201.207.500
					2. Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor / 100 unit		
					3. Jumlah pemeliharaan meubelair / 50 unit kali		
					4. Jumlah pemeliharaan peralatan kantor dan kendaraan kantor / 219 unit kali		
				<b>Total Belanja PD</b>			<b>2.000.000.000</b>
9		<b>PROGRAM OPTIMALISASI FASILITASI REFORMASI BIROKRASI</b>	Outcome : Persentase pelaporan kinerja perangkat daerah tepat waktu / 97%	Koordinasi Pelaksanaan SAKIP Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan SAKIP / 4 laporan		332.240.000
				Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Budaya Kinerja (KBK)	Jumlah Unit Kerja yang mengikuti bimtek KBK / 65 unit kerja		55.110.000
				Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Setda	Jumlah dokumen kepegawaian setda / 10 dokumen		4.900.000

			<b>Outcome : Presentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran / 100%</b>	Evaluasi Penataan dan Penetapan SOTK Kelembagaan OPD	Jumlah Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Kelembagaannya / 56 perangkat daerah	89.300.000
				Penyusunan Analisa Jabatan/Analisa Beban Kerja/SKJ/EvJab	Jumlah laporan/dokumen klasifikasi Jabatan / 56 dokumen	400.200.000
			<b>Outcome : Persentase perangkat daerah yang mempunyai standart pelayanan / 94%</b>	Pembinaan Kinerja Lembaga Pelayanan Publik	Jml unit kerja yang dibina Yanblik / 65 unit kerja	477.650.000
				Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan/dokumen hasil koordinasi / 3 laporan	74.600.000
				Pembinaan Ketatalaksanaan Unit Kerja	Jumlah unit kerja yang dibina ketatalaksanaan pemerintahan / 65 unit kerja	66.000.000
					<b>Total Belanja PD</b>	<b>1.500.000.000</b>
10		<b>10.1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Outcome : Prosentase kegiatan / laporan selesai tepat waktu / 90%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jml rek tlp, air, listrik yang terbayar / 87 rek-bln	1.096.800.000
				Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapn Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg disewa / 6 Kegiatan	104.000.000

				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1. Jumlah pembayaran honor petugas kebersihan yang terbayarkan / 12 bulan	976.800.000
					2. Jumlah pembelian alat kebersihan /	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah ATK yang tersedia / 30 jenis	10.000.000
				Penyediaan Brg Cetakan & Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan / 6 jenis	50.000.000
				Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor / 35 jenis	85.000.000
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pembelian peralatan rumah tangga / 35 jenis	90.000.000
				Penyediaan Makanan & Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu / 150 kegiatan	1.790.375.000
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah laporan perjalanan dinas luar Setda / 360 laporan	1.000.000.000
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah honor THL yang terbayarkan / 12 bulan	1.194.625.000
					Jumlah jasa perkantoran yang terbayarkan /	
		<b>10.2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Outcome : Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik / 85%	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	Jumlah pengadaan belanja modal peralatan rumah dinas / 4 jenis	300.000.000

				Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumdin yang dipelihara / 2 unit	251.000.000
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil jabatan yang terpelihara / 4 kendaraan	355.000.000
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional Setda yang dipelihara / 51 kendaraan	1.965.000.000
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dipelihara / 9 jenis	176.400.000
		<b>10.3 PROGRAM PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH</b>	Outcome : Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik / 85%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas Bupati & Wabup / 4 stel	55.000.000
				Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pengadaan pakaian dinas Bupati & Wabup / 4	35.000.000
				Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu Bupati dan Wabup / 8 stel	60.000.000
				Dialog/Audensi dengan Tokoh - tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	Jumlah kegiatan dialog / audensi / 24 acara	50.000.000
				Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Jumlah kunjungan tamu ke Kab. Pasuruan / 12 kegiatan	25.000.000



				Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam daerah / 60 laporan	240.000.000
				Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah laporan perjalanan dinas luar negeri KDH / 1 laporan	-
				Penyediaan Pelayanan Kesehatan	Pelayanan kesehatan KDH/WKDH	90.000.000
					<b>Total Belanja Langsung</b>	<b>10.000.000.000</b>
					<b>Total Belanja SETDA</b>	<b>54.266.982.376,22</b>

Pasuruan,  
Pj. SEKRETARIS DAERAH

2020

Ttd.

Ir. MISBAH ZUNIB,M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19610807 199003 1  
013

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN PASURUAN**

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Belanja Tidak Langsung</b>			<b>Gaji dan Tunjangan</b>		<b>4.561.348.000</b>	
	<b>Belanja Langsung</b>						
1.	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar : <b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan</b>	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan jumlah anggaran yang responsif gender : 50 %  presentase Kekerasan perempuan yang terselesaikan : 100%  presentase Kekerasan anak yang terselesaikan : 100%	Pelaksanaan KIE tentang keadilan dan kesetaraan gender (KKG)  Pelatihan peningkatan ketrampilan bagi organisasi perempuan dan masyarakat  Fasilitasi perlindungan perempuan Fasilitasi perlindungan anak Fasilitasi kabupaten layak anak	Jumlah kegiatan KIE KKG : 5 keg  Jumlah organisasi perempuan dan masyarakat yang mendapat pelatihan : 5 kelompok  Jumlah perempuan yang terfasilitasi : 50 orang Jumlah anak yang terfasilitasi : 50 orang Jumlah OPD yang tersosialisasi tentang KLA : 56 OPD	145.000.000  30.000.000  35.000.000 35.000.000 70.000.000	
2.	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar : <b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	Program Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk	Peningkatan Jumlah Akseptor : 7755 Akseptor	KIE dan pelayanan KB  Biaya operasional KB  Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana pelayanan dan penyuluhan KB  Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD  Pencatatan pelaporan dan pendataan keluarga	Jumlah kegiatan pelayanan KIE dan pelayanan KB : 24 keg  Jumlah biaya BOKB : 12 bulan  Jumlah sarana prasarana penyuluhan dan pelayanan KB : 4 jenis  Jumlah kegiatan pembinaan kader : 12 bln  Jumlah kegiatan pencatatan pelaporan dan PK : 1 keg	75.000.000  6.030.336.000 1.923.000.000 802.120.000 5.000.000	  dak non fisik dak fisik

				Pembinaan Koalisi Kependudukan	Jumlah kegiatan koalisi Kependudukan : 1 keg	5.000.000	
				Sosialisasi Dimensi Kependudukan	Jumlah sosialisasi dimensi kependudukan: 1 keg	5.000.000	
		Program Ketahanan Kesejahteraan Keluarga dan Penggerakan	Penurunan jumlah keluarga pra sejahtera dan KS 1 : 1100 KK	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Jumlah kegiatan Pusyan Gatra : 2 keg	20.000.000	
			Peningkatan Jumlah Desa Yang memiliki kelompok Tribina : 20 Kelompok	KIE Berbagai Media dan Mupen	Jumlah kegiatan KIE berbagai Media Mupen : 12 keg	20.000.000	
				Pengembangan pusat layanan informasi dan konseling KRR	Jumlah kegiatan PIK/KRR : 2 keg	20.000.000	
				pembinaan tri bina (BKB, BKR, BKL) dan UUPKS	Jumlah pembinaan tribina dan UPPKS : 2 keg	20.000.000	
				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tk. Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga : 12 bulan	500.000.000	
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Prosentase Meningkatnya Pembinaan Lingkungan Sosial : 100%	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja : 14 Keg	375.000.000	
3.	Urusan : Rutin Penunjang	Program pelayanan administrasi perkantoran	Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran : 100 %	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik / air / telepon / internet : 12 bln	90.000.000	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran honor pengelola keuangan, pengelola aset, pelaku pengadaan barang / jasa : : 12 bln	25.000.000	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pembelian ATK : 12 bln	20.000.000	

			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan Penggandaan : 12 bln	10.000.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor : 12 bln	2.000.000	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan rapat dan tamu : 12 bln	24.923.700	
			Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak dan THL : 12 bln	880.956.300	
			Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi : 12 bln	25.000.000	
			Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan	Jumlah kegiatan Forum Perangkat Daerah : 1 Kegiatan	35.000.000	
			Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah Kegiatan Bimtek ASN dan SDM : 12 bln	5.000.000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur : 100%	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah pembangunan gedung : 1 paket	5.000.000	
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor : 1 paket	5.000.000	
			Pengadaan Mebelair	Jumlah pengadaan mebelair : 1 paket	5.000.000	
			Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor : 1 keg	5.000.000	
			Pengadaan Tanah	Jumlah pengadaan tanah : 2 kegiatan	185.000.000	
			Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor : 12 bln	10.000.000	
			Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional : 12 bln	120.000.000	
			Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor : 12 bln	10.000.000	

				<b>Jumlah Belanja Langsung</b>	<b>11.578.336.000</b>	
				<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung</b>	<b>4.561.348.000</b>	
				<b>Total Belanja OPD (BTL + BL)</b>	<b>16.139.684.000</b>	

Pasuruan, Juli 2020  
Kepala Dinas KB dan PP  
Kabupaten Pasuruan

Ttd.

**drg. Loembini Pedjati Lajoeng**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19632606 199102 2 001

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

<b>NO</b>	<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>OUTCOME/ TARGET</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT/ TARGET</b>	<b>PAGU KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Program Perpustakaan	Persentase perpustakaan yang terakreditasi A	Pengembangan Minat budaya Baca	Jumlah layanan perpustakaan dan promosi/pengembangan minat baca / 100 Kegiatan-Kali	92.556.000	
			7%	Penyediaan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang tersedia / 1500 Eks	66.478.000	
				Supervisi Pembinaan dan Simulasi Perpustakaan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan/Workshop perpustakaan, baik laki-laki maupun perempuan / 200 Orang	40.500.000	
		Program Kearsipan	Kategori pengelolaan Arsip Statis	Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Jumlah pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip / 2 Jenis	1.440.000	
			60 (Cukup)	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah arsip yang dilakukan pendataan dan penataan / 50 ML	27.991.000	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	Jumlah pemeliharaan rutin arsip daerah / 14 Kegiatan	75.000.000	
				Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip	Jumlah kegiatan penyediaan sarana layanan informasi arsip / 2 Kegiatan	1.920.000	

				Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan, sosialisasi/penyuluhan kearsipan, baik laki-laki maupun perempuan / 200 Orang	87.858.000	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air, dan internet selama 12 bulan / 408 Rekening-bulan	326.200.000	
			100%	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor / 45 Jenis-kali	82.703.000	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan foto copy / 30 Jenis-kali	67.515.000	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor / 30 Jenis-Kali	65.675.000	
				Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat / 650 Orang	63.195.000	
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah/ 15 Laporan	100.000.000	
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak/THL / 468 Orang-bulan	1.198.145.000	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah laporan kinerja tribulan dan tahunan/ 1 Laporan	34.996.850	

		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan / 1 Unit	325.000.000	
			100%	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor / 6 Set	74.513.000	
				Pengadaan Mebelair	jumlah pembelian barang meubelair 2 Unit	5.000.000	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasi yang terpelihara / 39 unit-bln	53.900.000	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor / 5 Unit-Kali	165.000.000	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair	Jumlah barang meubelair yang terpelihara / 10 unit-Kali	5.000.000	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara / 35 unit-Kali	58.000.000	
						<b>3.018.585.850</b>	

Pasuruan, Juli 2020  
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Pasuruan

Drs. MOH. RIDWAN, MM.  
NIP. 19640828 198802 1 001



**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

PERANGKAT DAERAH :        DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI		<b>Belanja Gaji dan Tunjangan</b>	1 Tahun			
			Gaji Pokok PNS	1 Tahun	827.185.700			
			Tunjangan Keluarga	1 Tahun	70.862.000			
			Tunjangan Umum	1 Tahun	33.110.000			
			Tunjangan Struktural	1 Tahun	111.230.000			
			PBL	1 Tahun	21.000			
			Tunjangan Beras	1 Tahun	34.367.356			
			PPh 21	1 Tahun	7.848.944			
			<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>					
			TPPD	1 Tahun	1.207.361.000			
				<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung (Ga</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>2.291.986.000</b>		
		<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>10.900.300.960</b>		
		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kantor / 100%</b>			<b>1.711.780.850</b>	<b>2.213.930.850</b>	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik, telepon dan internet / 4 Lokasi	256.600.000		
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Biaya Pengelola Keuangan /26 Orang	124.020.000		
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang dibeli / 2 paket	45.000.000		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak, penggandaan dan foto copy yang dibayar / 3 paket	51.000.000		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli/ 4 paket	55.560.850		
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah belanja Makan Minum / 1 tahun	68.000.000		

				Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Belanja Perjalanan Dinas luar daerah /1 tahun	310.000.000	
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah honorarium THL, PTT / 27 org, 2 org PTT	722.700.000	
				Penyusunan Laporoan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan yang di buat / 14 Laporan	78.900.000	
		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik</b>			<b>502.150.000</b>	
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pembelian Kendaraan Dinas/Operasional / 1 Pic Up	0	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / 10 Unit	204.800.000	
				Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah pembangunan Gudang / 1 unit	0	
				Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor / 7 paket	43.600.000	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung/Kantor	Jumlah Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor / 1 tahun	180.000.000	
				Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung/Kantor	Jumlah peralatan kantor / 3 paket	73.750.000	
				Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibeli / 1 paket	0	
		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN</b>	<b>Prosentase Organisasi Kepemudaan yang di Bina / 90 %</b>			<b>1.374.000.000</b>	
				Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang di bina / 16 organisasi	500.000.000	Hibah
				Training Of Trainer Pelatih dan Pembina Paskibraka	Jumlah peserta bimtek paskibraka / 50 orang	100.000.000	
				Seleksi Pemuda Pelopor	Jumlah hasil seleksi Pemuda Pelopor / 50 orang	0	
				Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda	jumlah peserta pelatihan/sosialisasi / 100 pemuda	0	
				Jambore Pemuda	jumlah peserta pelatihan / 100 pemuda	0	
				Pelatihan Bela Negara Bagi Pemuda	Jumlah Peserta pelatihan / 50 pemuda	0	
				Seleksi Paskibraka	Jumlah Pemuda hasil seleksi Paskibraka / 76 siswa	774.000.000	
				Festival Pemuda Pasuruan	jumlah peserta Festival Pemuda Pelopor / 50 orang	0	
		<b>PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA</b>	<b>Prosentase Pemuda yang aktif Berwirausaha</b>			<b>0</b>	
				Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	0	0	
				Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda	Jumlah Peserta pelatihan / 50 pemuda	0	
		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN</b>	<b>Presentase Atlit yang Berprestasi / 90%</b>			<b>6.776.425.110</b>	

				Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Jumlah pembinaan dan seleksi atlit / 13 cabor	3.000.000.000	Hibah
				Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Jumlah pemassalan & pembinaan olahraga melalui olahraga bersama / 500 orang	200.000.000	
				Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah Kompetisi olahraga kabupaten pasuruan / 4 paket	3.000.000.000	Hibah
				Pemasalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Olahraga untuk Masyarakat Kabupaten Pasuruan / 9 kegiatan	300.000.000	
				Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi	Jumlah Biaya penghargaan olahragawan berprestasi /	76.425.110	
				Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat	Jumlah hasil seleksi dan pembinaan atlit lanjut usia dan penyandang cacat / 25 atlit	100.000.000	
				Peningkatan Jumlah Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga	Jumlah peserta peningkatan kualitas pelatih, juri dan wasit olahraga / 120 orang	100.000.000	
		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Berkualitas / 100%</b>			<b>200.000.000</b>	
				Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Gedung Sarpras Olahraga / 2 Lokasi	100.000.000	
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	jumlah sarpras olahraga / 2 Lokasi	100.000.000	
		<b>PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan / 100%</b>			<b>335.945.000</b>	
				Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pembinaan/Pelatihan Kewirausahaan)	Jumlah peserta Pelatihan / 50 pemuda	150.000.000	
				Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pembinaan/Pelatihan Managemen Kewirausahaan)	Jumlah peserta Pelatihan / 50 pemuda	185.945.000	
	<b>TOTAL</b>					<b>13.192.286.960</b>	

Pasuruan, Juni 2020  
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

Ttd.

**HASBULLAH, S.Pd**

Pembina TK. I

NIP. 19640807 198403 1 002

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH : RSUD BANGIL**

<b>NO</b>	<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>OUTCOME/ TARGET</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT/ TARGET</b>	<b>PAGU KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	Urusan Kesehatan	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	- Jumlah pemenuhan SPM bidang mutu	Peningkatan Mutu Pelayanan & Pendukung Pelayanan	Meningkatnya IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	127.800.000.000	PAD/BLUD
			- Jumlah pemenuhan SPM bidang keselamatan				
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial	- Jumlah capaian prosentase pemenuhan SPM bidang mutu	(A) Penyediaan / Peningkatan / Pemeliharaan Sarana / Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Pengadaan Obat-obatan RSUD Bangil)	Jumlah penambahan obat-obatan yang sering digunakan	6.000.000.000	DBHCHT
			- Jumlah capaian prosentase pemenuhan SPM bidang keselamatan	(B) Penyediaan / Peningkatan / Pemeliharaan Sarana / Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Pengadaan Sarana Penunjang Gedung RSUD Bangil)	Jumlah penambahan sarana penunjang gedung	233.500.000	DBHCHT

				(C) Penyediaan / Peningkatan / Pemeliharaan Sarana / Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran RSUD Bangil)	Jumlah penambahan alat kedokteran dan alat kesehatan	737.000.000	DBHCHT
				(D) Penyediaan / Peningkatan / Pemeliharaan Sarana / Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan & Alat Kedokteran RSUD Bangil)	Jumlah kegiatan pemeliharaan alat kedokteran dan alat kesehatan RSUD Bangil	2.000.000.000	DBHCHT
				(E) Penyediaan / Peningkatan / Pemeliharaan Sarana / Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Pengadaan Bahan dan Alat Habis Pakai RSUD Bangil)	Jumlah kegiatan bahan dan alat habis pakai RSUD Bangil	4.673.633.168	DBHCHT
				(F) Penyediaan / Peningkatan / Pemeliharaan Sarana / Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Pengadaan Peralatan Penunjang RSUD Bangil)	Jumlah penambahan peralatan penunjang	-	DBHCHT

				(G) Penyediaan / Peningkatan / Pemeliharaan Sarana / Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Pengadaan Sarana Transportasi Rujukan RSUD Bangil)	Jumlah penambahan transportasi rujukan	700.000.000	DBHCHT
				(H) Penyediaan / Peningkatan / Pemeliharaan Sarana / Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Pengadaan Gedung Pelayanan dan Penunjang RSUD Bangil)	Jumlah pengadaan gedung dan penunjang RSUD Bangil	6.800.000.000	DBHCHT
				(I) Penyediaan / Peningkatan / Pemeliharaan Sarana / Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarpras Gedung dan Penunjang RSUD Bangil)	Jumlah gedung yang dilakukan pemeliharaan	793.750.000	DBHCHT
				(J) Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (di RSUD Bangil)	Jumlah tenaga kesehatan dan/atau administratif yang mendapat pelatihan	200.000.000	DBHCHT

				(K) Kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif/ maupun kuratif/rehabilitatif (di RSUD Bangil)	Jumlah kegiatan di RSUD Bangil	-	DBHCHT
		Program Pengadaan, Peningkatan Ssrana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	- Jumlah cakupan sarana dan prasarana bidang mutu yang berkualitas baik	Pengadaan alat-alat Rumah Sakit	Jumlah penambahan alat kedokteran dan alat kesehatan	13.250.142.286	DAK
			- Jumlah cakupan sarana dan prasarana bidang keselamatan yang berkualitas baik				DAK
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Jumlah capaian persentase pemenuhan layanan kantor	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	65.000.000	DAU
						<b>163.253.025.454</b>	

Pasuruan, Juli 2020  
DIREKTUR RSUD BANGIL

Ttd.

**dr. ARMA ROOSALINA, M.KES**  
NIP. 19701224 200212 2 003

## PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

### PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>URUSAN PENUNJANG</b>						
	<b>PAGU INDIKATIF</b>						
						<b>13.783.354.086</b>	
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>						
						<b>4.803.558.000</b>	
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>						
						<b>8.979.796.086</b>	
		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>100%</b>			<b>1.748.010.490,00</b>	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96 rekening- bulan	141.399.000,00	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	360 orang- bulan	276.772.650	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 unit	19.250.000	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	46 jenis-kali	Rp 63.409.500	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25 jenis-kali	Rp 94.280.340	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	168 eksemplar	Rp 13.090.000	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	4700 orang	Rp 133.980.000	





		<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>100%</b>			<b>Rp 1.695.388.996</b>	
				Penyusunan Rancangan RKPD	2 Dokumen	Rp 398.730.100	
				Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	2 Dokumen	Rp 537.897.900	
				Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	80 buku	Rp 292.600.000	
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	4 Laporan	Rp 138.119.196	
				Pengelolaan Sistim Informasi Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Rp 77.000.000	
				Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencanaan	65 Orang	Rp -	
				Penyusunan RPJMD	1 Dokumen	Rp 110.000.000	
				Penyusunan KUA-PPAS dan KUA-P PAPS-P	4 dokumen	Rp -	
				Fasilitasi KENDUREN MAS	24 Laporan	Rp 141.041.800	
		<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI</b>	<b>100%</b>			<b>Rp 635.913.200</b>	

				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Subbidang Pertanian	14 Laporan	Rp	116.149.000	
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Subbidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Mikro	16 laporan	Rp	116.087.450	
				Penyusunan perencanaan pembangunan sub bidang pariwisata, penanaman modal dan ketenagakerjaan	4 Dokumen	Rp	287.174.650	
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Subbidang Kepariwisata, Penanaman modal dan Ketenagakerjaan	10 Laporan	Rp	116.502.100	
		<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA</b>	<b>92%</b>			<b>Rp</b>	<b>968.216.400</b>	
				Koordinasi Perencanaan Pemabangunan Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	4 OPD	Rp	146.375.800	
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Subbidang Pendidikan dan Kepemudaan	3 OPD	Rp	110.786.400	
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	31 OPD	Rp	161.264.800	

				Fasilitasi Forum Kabupaten Sehat	12 Laporan	Rp	127.949.000	
				Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	1 Dokumen	Rp	150.000.000	
				Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kepemudaan	3 Dokumen	Rp	-	
				Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	3 Dokumen	Rp	150.000.000	
				Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	12 Laporan	Rp	121.840.400	
		<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH</b>	<b>86%</b>			<b>Rp</b>	<b>1.432.327.000</b>	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	Rp. -	Rp	-	
				Koordinasi Perencanaan Pengembangan Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pasuruan	24 Laporan	Rp	250.065.000	

				Koordinasi Perencanaan Pengembangan Sarana Prasarana Wilayah di Kabupaten Pasuruan	24 Laporan	Rp	250.062.000	
				Koordinasi Pelaksanaan Program Hibah Jalan Daerah Kabupaten Pasuruan	4 Laporan	Rp	10.000.000	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Sarana Prasarana Wilayah	Rp. -	Rp	-	
				Koordinasi Kebijakan Pengembangan Wilayah, SD Air dan Kebencanaan	24 Laporan	Rp	773.500.000	
				Evaluasi Pemetaan Spasial Pengembangan Wilayah	1 Dokumen	Rp	148.700.000	
		<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>90%</b>			<b>Rp</b>	<b>2.136.500.000</b>	
				Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	12 Laporan	Rp	144.000.000	
				Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan	6 Dokumen	Rp	568.500.000	
				Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan	6 Dokumen	Rp	730.000.000	

				Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Pasuruan	3 Laporan	Rp 694.000.000	

Pasuruan,  
KEPALA BAPPEDA

Ttd.

Ir. IHWAN, M.Si  
NIP. 19630203 198903 1 015

TABEL T-C.34  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020  
Dan Prakiraan Maju Tahun 2021  
Kabupaten Pasuruan

SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>Belanja Pegawai</b>			<b>7.575.672.000</b>			
		<b>Belanja Gaji dan Tunjangan</b>			<b>3.965.899.000</b>			
		Gaji Pokok PNS			3.136.571.000			
		Tunjangan Keluarga			329.542.000			
		Tunjangan Jabatan			155.666.000			
		T. Fungsional Umum			123.000.000			
		Tunjangan Beras			212.996.000			
		Tunjangan PPh			7.896.000			
		Pembulatan Gaji			228.000			
		<b>Tambahan Penghasilan ASN</b>			<b>3.609.773.000</b>			
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja			1.732.483.800			
		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja			722.300.000			
		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja			1.154.989.200			
1.05.03.21	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>	<b>Prosentase Penyelenggaraan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.</b>	<b>Kab. Pasuruan</b>	<b>100%</b>	<b>519.850.000</b>		<b>100%</b>	<b>632.924.000</b>
1.05.03.21.01	Penjagaan dan Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas Pejabat Daerah	<b>Input:</b> - Bel. Pegawai - - Bel. Barang dan Jasa 385.700.000 - Bel. Modal - <b>Dana: 385.700.000</b> <b>Output:</b> - Obyek vital dan aset daerah yang dijaga dan diamankan.	Rumdin Bupati, Wabup, Ketua DPRD, Kantor Pemkab, Kantor Raci		<b>385.700.000</b>			466.406.000
1.05.03.21.02	Pengamanan dan Pengawasan Pejabat Serta Kegiatan Insidentil lainnya.	<b>Output:</b> - Obyek vital dan aset daerah yang dijaga dan diamankan. <b>Outcome:</b> - Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor dan aset Pemerintah Kabupaten <b>Input:</b> - Bel. Pegawai - - Bel. Barang dan Jasa 134.150.000 - Bel. Modal - <b>Dana: 134.150.000</b> <b>Output:</b> - Jumlah keg. Pejabat dan keg. Insidentil yang dikawal dan diamankan. <b>Outcome:</b> - Terlaksananya kegiatan pengamanan dan pengawasan pejabat.	Kab. Pasuruan		<b>134.150.000</b>			166.518.000
							5 obyek	
							12 bulan	
							120 kegiatan	
							12 bulan	

1.05.03.17	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase anggota linmas yang teregister KTA</b>	Kab. Pasuruan	100%	946.340.950		100% / 25 kegiatan	2.587.193.000
1.05.03.17.09	Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Melalui Siskamswakarsa.	<b>Persentase penanganan kejadian kebakaran</b> <b>Input:</b> - Bel. Pegawai - - Bel. Barang dan Jasa - - Bel. Modal - <b>Dana:</b> - <b>Output:</b> - Jumlah kegiatan pemberdayaan siskamling melalui siskamswakarsa <b>Outcome:</b> - Terciptanya pemberdayaan masyarakat dalam penanganan sistim keamanan lingkungan kampung	Kab. Pasuruan		-		27 kegiatan	262.450.000
1.05.03.17.01	Peran Satlinmas terhadap tanggap darurat bencana	<b>Input:</b> - Bel. Pegawai - - Bel. Barang dan Jasa - - Bel. Modal 56.952.000 <b>Dana:</b> 56.952.000 <b>Output:</b> - Jumlah kegiatan Satlinmas dalam penanganan bencana <b>Outcome:</b> - Terciptanya ketertiban dan keamanan wilayah dampak bencana	Kab. Pasuruan		56.952.000	12 kegiatan 12 kec	24 kegiatan 24 kec	23.341.000
1.05.03.17.02	Pembinaan dan Pelatihan Anggota Sat Linmas.	<b>Input:</b> - Bel. Pegawai - - Bel. Barang dan Jasa 160.568.950 - Bel. Modal - <b>Dana:</b> 160.568.950 <b>Output:</b> - Jumlah anggota Sat Linmas yang dilatih dan dibina. <b>Outcome:</b> - Terciptanya anggota Linmas dalam menjaga ketertiban dan keamanan	Kab. Pasuruan		160.568.950	1584 orang 30,55%	1584 orang 47,45%	594.259.000
1.05.03.17.03	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	<b>Input:</b> - Bel. Pegawai - - Bel. Barang dan Jasa 708.570.000 - Bel. Modal - <b>Dana:</b> 708.570.000 <b>Output:</b> - Kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran dalam pelayanan bahaya kebakaran <b>Outcome:</b> - Terselenggaranya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Kab. Pasuruan		708.570.000	12 bulan 100%	12 bulan 100%	1.532.490.000



1.05.03.17.04	Penanganan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	<b>Input:</b> - Bel. Pegawai - - Bel. Barang dan Jasa 20.250.000 - Bel. Modal - <b>Dana: 20.250.000</b> <b>Output:</b> - Kegiatan penanganan dan pengendalian terhadap bahaya kebakaran 48 kegiatan <b>Outcome:</b> - Terselenggaranya kegiatan pengendalian bahaya kebakaran 1 tahun	Kab. Pasuruan		20.250.000		34 unit	1 tahun	79.248.000
1.05.03.17.05	Penyuluhan pencegahan Bahaya Kebakaran	<b>Input:</b> - Bel. Pegawai - - Bel. Barang dan Jasa - - Bel. Modal - <b>Dana: -</b> <b>Output:</b> - Jumlah penyuluhan pencegahan abahaya kebakaran 0 kegiatan <b>Outcome:</b> - Terselenggaranya kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran 1 tahun	Kab. Pasuruan		-		6 kegiatan	1 tahun	95.405.000
1.05.03.16	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT</b>	<b>Prosentase gangguan tibus tranmas yang ditangani</b>	Kab. Pasuruan	<b>64,9%</b>	<b>1.698.210.000</b>		<b>64,9%</b>		<b>2.107.119.000</b>
1.05.03.16.01	Operasi dan Penanganan terhadap PKL dan Reklame	<b>Input:</b> - Bel. Pegawai 6.000.000 - Bel. Barang dan Jasa 57.760.000 - Bel. Modal - <b>Dana: 63.760.000</b> <b>Output:</b> - Jumlah kegiatan operasi PKL dan Reklame yang dilakukan. 48 kegiatan <b>Outcome:</b> - Jumlah PKL dan Reklame yang ditangani 100%	Kab. Pasuruan		<b>63.760.000</b>		36 kegiatan		145.920.000
1.05.03.16.02	Patroli Rutin dan Antisipasi terhadap Pelanggaran Perda dan Gangguan Trantibum.	<b>Input:</b> - Bel. Pegawai 12.000.000 - Bel. Barang dan Jasa 1.566.650.000 - Bel. Modal - <b>Dana: 1.578.650.000</b> <b>Output:</b> - Jumlah patroli rutin yang dilakukan. 369 keg <b>Outcome:</b> - Jumlah temuan pelanggaran perda dan gangguan trantibum. 100%	Kab. Pasuruan		<b>1.578.650.000</b>		365 keg	100%	1.715.226.000
1.05.03.16.03	Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	<b>Input:</b> - Bel. Pegawai - - Bel. Barang dan Jasa - - Bel. Modal - <b>Dana: -</b> <b>Output:</b> - Jumlah pembinaan tibus tranmas 0 kegiatan <b>Outcome:</b> - Terselenggaranya pembinaan tibus tranmas 100%	Kab. Pasuruan		-		15 kegiatan	100%	26.500.000

1.05.03.16.04	Peningkatan Hubungan Kerjasama dalam rangka penyelenggaraan tibus dan tranmas	<u>Input:</u> - Bel. Pegawai - - Bel. Barang dan Jasa - - Bel. Modal - <u>Dana:</u> - <u>Output:</u> - Jumlah kerjasama antar Sat Pol PP dan informasi peran Sat Pol <u>Outcome:</u> - Terlaksananya hubungan kerjasama dan informasi peran sat Pol PP	Kab. Pasuruan	0 kegiatan 100%	-	5 kegiatan 100%	60.897.000
1.05.03.16.05	Operasi Penanganan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Masalah Sosial Lainnya	<u>Input:</u> - Bel. Pegawai - - Bel. Barang dan Jasa 55.800.000 - Bel. Modal - <u>Dana:</u> 55.800.000 <u>Output:</u> - Jumlah Operasi Penanganan dan Pemberantasan PSK, Minuman Keras dan PMKS <u>Outcome:</u> - Mencegah gangguan trantibus di wilayah Kabupaten Pasuruan.	Kab. Pasuruan	30 Kegiatan 100%	55.800.000	48 Kegiatan 100%	158.576.000
1.05.03.15	<b>PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH</b>	<b>Rasio Penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup</b>	Kab. Pasuruan	100%	128.510.000	100%	707.598.000
1.05.03.15.01	Koordinasi antar aparat penegak hukum.	<u>Input:</u> - Bel. Pegawai - - Bel. Barang dan Jasa - - Bel. Modal - <u>Dana:</u> - <u>Output:</u> - Jumlah Rapat Koordinasi antar Aparat Penegak Hukum (PPNS, Pol PP, Kasi Trantibus Kecamatan, Kepolisian dan Instansi terkait) <u>Outcome:</u> - Penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Pasuruan	0 kegiatan 100%	-	12 kegiatan 100%	19.011.000
1.05.03.15.02	Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Pelanggaran Perda.	<u>Input:</u> - Bel. Pegawai - - Bel. Barang dan Jasa 96.210.000 - Bel. Modal - <u>Dana:</u> 96.210.000 <u>Output:</u> - Jumlah penyidikan dan penindakan yang dilakukan. <u>Outcome:</u> - Penurunan angka pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Pasuruan	105 kegiatan 75%	96.210.000	105 kegiatan 70%	211.900.000

1.05.03.15.03	Pembinaan dan Penyuluhan hukum produk daerah	<u>Input:</u> - Bel. Pegawai - - Bel. Barang dan Jasa - - Bel. Modal - <u>Dana:</u> - <u>Output:</u> - Jumlah pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan.  <u>Outcome:</u> - Kesadaran hukum masyarakat dan paham tentang hukum	Kab. Pasuruan		-			257.664.000
1.05.03.15.04	Pengawasan dan monitoring terhadap Pelaku Usaha dan Kegiatan Usaha.	<u>Input:</u> - Bel. Pegawai - - Bel. Barang dan Jasa 32.300.000 - Bel. Modal - <u>Dana:</u> 32.300.000 <u>Output:</u> - Jumlah kegiatan pengawasan dan monitoring ijin usaha dan kegiatan usaha yang dilakukan.  <u>Outcome:</u> - Pelaku usaha dan kegiatan usaha perijinannya menjadi tertib	Kab. Pasuruan		32.300.000			81.798.000
1.05.03.15.05	Pembinaan dan Penguatan Peran dan Fungsi PPNS	<u>Input:</u> - Bel. Pegawai - - Bel. Barang dan Jasa - - Bel. Modal - <u>Dana:</u> - <u>Output:</u> - Jumlah pembinaan dan koordinasi korwas dan PPNS  <u>Outcome:</u> - Pemahaman terhadap PPNS tentang tugas pokok dan fungsinya	Kab. Pasuruan		-			137.225.000
1.05.03.18	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR.</b>							
1.05.03.18.01	Peningkatan kemampuan ketrampilan dan kesamaptaaan Polisi Pamong Praja	<u>Input:</u> - Bel. Pegawai - - Bel. Barang dan Jasa 27.000.000 - Bel. Modal - <u>Dana:</u> 27.000.000 <u>Output:</u> - Jumlah kegiatan latihan kesamaptaaan  <u>Outcome:</u> - Terlaksananya latihan kesamaptaaan Polisi Pamong Praja	Satpol PP		229.531.000			1.124.299.000
			Satpol pp		27.000.000			511.744.000

1.05.03.18.02	Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan Daerah	<b>Input:</b> - Bel. Pegawai - - Bel. Barang dan Jasa - - Bel. Modal - <b>Dana:</b> - <b>Output:</b> - Jumlah bimtek penanganan trantibum dan penegakan Perda <b>Outcome:</b> - Meningkatnya pengetahuan dan wawasan Aparatur Sat Pol PP	Kab. Pasuruan		-		0orang	1 kegiatan	100%	100%	161.422.000
1.05.03.18.03	Peningkatan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sat Pol PP	<b>Input:</b> - Bel. Pegawai - - Bel. Barang dan Jasa 13.500.000 - Bel. Modal - <b>Dana:</b> 13.500.000 <b>Output:</b> - Terlaksananya Musrenbang Kabupaten <b>Outcome:</b> - Meningkatnya pengetahuan dan wawasan Aparatur Sat Pol PP	Luar Daerah Kab. Pasuruan		13.500.000		1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%	56.180.000
1.05.03.18.04	Pengembangan Wawasan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	<b>Input:</b> - Bel. Pegawai - - Bel. Barang dan Jasa 189.031.000 - Bel. Modal - <b>Dana:</b> 189.031.000 <b>Output:</b> - Jumlah kegiatan HUT Pol PP, Jambore Pol PP dan Gelar Pasukan <b>Outcome:</b> - Terlaksananya kegiatan HUT Pol PP, Jambore dan Gelar Pasukan.	Dalam dan Luar Kab. Pasuruan		189.031.000		4 kegiatan	4 kegiatan	100%	100%	394.953.000
1.05.03.19	<b>PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI</b>	<b>Prosentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi di bidang cukai</b>	Kab. Pasuruan	100%	488.190.000				100%	100%	722.644.000
1.05.03.19.01	Kegiatan Penyampaian Informasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan / atau pemangku kepentingan	<b>Input:</b> - Bel. Pegawai 390.000 - Bel. Barang dan Jasa 480.872.900 - Bel. Modal 6.927.100 <b>Dana:</b> 488.190.000 <b>Output:</b> - Jumlah sosialisasi tentang rokok ilegal yang dilaksanakan. <b>Outcome:</b> - Prosentase penurunan pelanggaran terhadap cukai ilegal	Kab. Pasuruan		488.190.000		25 kegiatan	24 kegiatan	100%	100%	722.644.000

1.05.03.20	<b>PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL</b>	<b>Prosentase pengumpulan dan pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal</b>	Kab. Pasuruan	100%	261.810.000		100% / 25 kegiatan	72.356.000
1.05.03.20.01	Pengumpulan Informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, yang dilekati pita cukai yang salah peruntukannya, dilekati pita cukai bekas diperedaran atau TPE	<b>Input:</b> - Bel. Pegawai - - Bel. Barang dan Jasa 80.300.000 - Bel. Modal - <b>Dana: 80.300.000</b> <b>Output:</b> - Jumlah kegiatan pengumpulan informasi terhadap peredaran dan penjualan rokok ilegal <b>Outcome:</b> - Jumlah wilayah yang dilakukan pengumpulan	Kab. Pasuruan		80.300.000	48 kegiatan	24 kegiatan	72.356.000
	Kegiatan Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Bersama dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/atau Kantor Pelayanan Bea Cukai Setempat Yang Diinisiasi oleh Pemerintah Daerah	<b>Input:</b> - Bel. Pegawai - - Bel. Barang dan Jasa 181.510.000 - Bel. Modal - <b>Dana: 181.510.000</b> <b>Output:</b> - Jumlah kegiatan operasi pemberantasan barang kena cukai <b>Outcome:</b> - Jumlah kegiatan operasi pemberantasan barang kena cukai yang dilakukan	Kab. Pasuruan		181.510.000	7 kegiatan	5 kegiatan	72.356.000
1.05.03.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Prosentase Laporan / Kegiatan Rutin yang diselesaikan tepat waktu</b>	Kab. Pasuruan	100%	2.382.585.700		100%	2.266.322.580
1.05.03.01.02	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	<b>Input:</b> - Bel. Pegawai - - Bel. Barang dan Jasa 181.800.000 - Bel. Modal - <b>Dana: 181.800.000</b> <b>Output:</b> - Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan layanan internet. <b>Outcome:</b> - Tercukupinya penyediaan jasa telepon, air, listrik dan internet.	Kab. Pasuruan		181.800.000	12 bulan	12 bulan	230.562.720
1.05.03.01.07	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	<b>Input:</b> - Bel. Pegawai 113.220.000 - Bel. Barang dan Jasa - - Bel. Modal - <b>Dana: 113.220.000</b> <b>Output:</b> - honorarium petugas <b>Outcome:</b> - Tersedianya honorarium petugas administrasi keuangan dan barang.	Kab. Pasuruan		113.220.000	20 orang	21 orang	120.068.000

1.05.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	<b>Input:</b> - Bel. Pegawai 300.000 - Bel. Barang dan Jasa 62.265.700 - Bel. Modal - <hr/> <b>Dana: 62.565.700</b> <b>Output:</b> - Pembelian alat tulis kantor <b>Outcome:</b> - Tersedianya alat tulis kantor.	Kab. Pasuruan		62.565.700			56.180.000
1.05.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	<b>Input:</b> - Bel. Pegawai - - Bel. Barang dan Jasa 32.000.000 - Bel. Modal - <hr/> <b>Dana: 32.000.000</b> <b>Output:</b> - Belanja barang cetak dan fotocopy. <b>Outcome:</b> - Tersedianya barang cetakan dan fotocopy.	Kab. Pasuruan	1 tahun 100%	32.000.000		1 tahun 100%	23.596.000
1.05.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	<b>Input:</b> - Bel. Pegawai - - Bel. Barang dan Jasa 36.700.000 - Bel. Modal - <hr/> <b>Dana: 36.700.000</b> <b>Output:</b> - Belanja alat listrik, kebersihan dan perlengkapan kantor lainnya. <b>Outcome:</b> - Tersedianya alat-alat listrik, kebersihan dan perlengkapan lainnya.	Kab. Pasuruan	1 tahun 100%	36.700.000		1 tahun 100%	32.830.000
1.05.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	<b>Input:</b> - Bel. Pegawai - - Bel. Barang dan Jasa 45.100.000 - Bel. Modal - <hr/> <b>Dana: 45.100.000</b> <b>Output:</b> - Belanja makanan-minuman rapat dan makanan-minuman tamu <b>Outcome:</b> - Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu.	Kab. Pasuruan	1 tahun 100%	45.100.000	409 buah	424 buah	67.416.000
1.05.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	<b>Input:</b> - Bel. Pegawai - - Bel. Barang dan Jasa 125.000.000 - Bel. Modal - <hr/> <b>Dana: 125.000.000</b> <b>Output:</b> - Belanja perjalanan dinas luar daerah Kabupaten Pasuruan <b>Outcome:</b> - Terlaksananya kegiatan / perjalanan dinas luar daerah.	Luar Daerah	1 tahun 100%	125.000.000	80 kegiatan	85 kegiatan	303.372.000

1.05.03.01.19	Penyediaan jasa perkantoran	<u>Input:</u> - Bel. Pegawai 1.482.100.000 - Bel. Barang dan Jasa 304.100.000 - Bel. Modal - <hr/> <u>Dana:</u> 1.786.200.000 <u>Output:</u> - Belanja materai, surat kabar dan jasa kantor lainnya.  <u>Outcome:</u> - Tersedianya jasa perkantoran.	Kab. Pasuruan		1.786.200.000	1 tahun	1 tahun	1.432.297.860
1.05.03.01.20	Penyediaan pakaian kerja	<u>Input:</u> - Bel. Pegawai - - Bel. Barang dan Jasa - - Bel. Modal - <hr/> <u>Dana:</u> - <u>Output:</u> - Pengadaan pakaian dinas <u>Outcome:</u> - Tersedianya pakaian dinas	Kab. Pasuruan		-	186	186	433.388.000
1.05.03.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR.</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana yang memenuhi syarat terhadap Sarana dan Prasarana yang harus tersedia</b>	Kab. Pasuruan	100%	490.000.000			3.893.621.000
1.05.03.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	<u>Input:</u> - Bel. Pegawai - - Bel. Barang dan Jasa - - Bel. Modal - <hr/> <u>Dana:</u> - <u>Output:</u> - Pengadaan mobil damkar dan mobil linmas <u>Outcome:</u> - Tersedianya mobil damkar dan mobil linmas	Kab. Pasuruan		-	6 unit	1 unit	2.500.000.000
1.05.03.02.10	Pengadaan Meubelair	<u>Input:</u> - Bel. Pegawai - - Bel. Barang dan Jasa - - Bel. Modal - <hr/> <u>Dana:</u> - <u>Output:</u> - Pembelian barang Meubelair <u>Outcome:</u> - Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	Kab. Pasuruan		-	12 unit	29 unit	53.000.000
1.05.03.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor	<u>Input:</u> - Bel. Pegawai - - Bel. Barang dan Jasa - - Bel. Modal 10.000.000 <hr/> <u>Dana:</u> 10.000.000 <u>Output:</u> - Pengadaan Laptop  <u>Outcome:</u> - Tersedianya kebutuhan kantor	Kab. Pasuruan		10.000.000	1 unit	57 unit	569.461.000
				100%			100%	

1.05.03.02.13	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung/Kantor	<u>Input:</u> - Bel. Pegawai - - Bel. Barang dan Jasa - - Bel. Modal - <hr/> <u>Dana:</u> - <u>Output:</u> - Pemeliharaan gedung kantor <u>Outcome:</u> - Terpenuhinya Sarana Prasarana yang mamadai	Kab. Pasuruan	1 ls	-	1 ls	129.624.000
1.05.03.02.15	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	<u>Input:</u> - Bel. Pegawai - - Bel. Barang dan Jasa 419.500.000 - Bel. Modal - <hr/> <u>Dana:</u> 419.500.000 <u>Output:</u> - Pembelian suku cadang, BBM dan servis kendaraan dinas <u>Outcome:</u> - Terpenuhinya Sarana Prasarana yang mamadai	Kab. Pasuruan	100%	419.500.000	100%	536.479.000
1.05.03.02.20	Pemeliharaan rutin/ berkala Mebelair	<u>Input:</u> - Bel. Pegawai - - Bel. Barang dan Jasa - - Bel. Modal - <hr/> <u>Dana:</u> - <u>Output:</u> - Pemeliharaan Mebelair Kantor <u>Outcome:</u> - Terpenuhinya Sarana Prasarana yang mamadai	Kab. Pasuruan	1 tahun	-	1 tahun	22.472.000
1.05.03.02.19	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan Gedung/kantor	<u>Input:</u> - Bel. Pegawai - - Bel. Barang dan Jasa 60.500.000 - Bel. Modal - <hr/> <u>Dana:</u> 60.500.000 <u>Output:</u> - Pemeliharaan mesin foto copy, komputer, printer, isi tabung pemadam kebakaran, ac, ricl, ht, cctv dan kamera. <u>Outcome:</u> - Terpenuhinya Sarana Prasarana yang mamadai	Kab. Pasuruan	100%	60.500.000	100%	82.585.000
		- <i>Jumlah Belanja Pegawai</i> - <i>Jumlah Belanja Barang dan jasa</i> - <i>Jumlah Belanja Modal</i>			1.614.010.000 5.457.138.550 73.879.100		



	- Jumlah Belanja Langsung (DAU)	7.145.027.650	7.145.027.650			13.391.432.580
	- Jumlah Belanja Langsung (Specific Grant)	750.000.000				
	- Jumlah Belanja Langsung			7.145.027.650		
	- Jumlah Belanja Tidak Langsung			7.575.672.000		
	- TOTAL BELANJA			14.720.699.650		

Camat Pandaan

Ttd.  
YUDIANTO, SH, MM  
Pembina  
Tingkat I  
NIP. 19690712 198903 1 004

PLT. PLT.  
KABUPATEN PASURUAN

Ttd.  
ANANG SAIFUL WIJAYA, SH, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671129 198809 1 001

## PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

## PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BANGIL

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Urusan Kewilayahan	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Listrik/Air/Telephone	73.200.000,00	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelola Keuangan	59.280.000,00	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor Jasa Kebersihan	87.000.000,00	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pembelian ATK	20.000.000,00	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	15.025.000,00	
				Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Kegiatan Rapat dan Tamu	61.500.000,00	
				Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar daerah	100.000.000,00	
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Honor Tenaga Kontrak / THL	417.370.000,00	
2	Urusan Kewilayahan	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Rp 49.500.000	

				Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Rp	99.000.000	
				Pengadaan Meubeleir	Jumlah Pengadaan Meubeler	Rp	34.375.000	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan	Rp	85.000.000	
				Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Pemeliharaan	Rp	85.000.000	
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor	Jumlah Pemeliharaan	Rp	8.000.000	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi
				Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang di beli	Rp	45.000.000	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	Rp	31.000.000	Jumlah Kegiatan Fasilitas Pemerintah
3	Urusan Kewilayahan	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	Nilai IKM Kecamatan	Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	Rp	27.100.000	
				Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM	Rp	84.975.000	
				Fasilitas Administrasi Perangkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Fasilitas Pemerintahan Kelurahan	Rp	65.325.000	
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan kiduldalem	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	Rp	333.400.000	
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan kersikan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	Rp	308.200.000	
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan kauman	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	Rp	300.400.000	
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Bendomungal	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	Rp	294.400.000	
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Gempeng	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	Rp	321.400.000	

				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan pogar	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	Rp	319.000.000	
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan kolursari	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	Rp	314.800.000	
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Dermo	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	Rp	302.800.000	
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan kalirejo	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	Rp	302.200.000	
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan latek	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	Rp	302.200.000	
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan kaliayar	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	Rp	308.200.000	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kiduldalem	Jumlah Sarpras Yang di Bangun	Rp	803.152.000	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan kersikan	Jumlah Sarpras Yang di Bangun	Rp	803.152.000	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan kauman	Jumlah Sarpras Yang di Bangun	Rp	725.862.000	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bedomungal	Jumlah Sarpras Yang di Bangun	Rp	914.727.000	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gempeng	Jumlah Sarpras Yang di Bangun	Rp	803.152.000	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan pogar	Jumlah Sarpras Yang di Bangun	Rp	888.739.500	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan kolursari	Jumlah Sarpras Yang di Bangun	Rp	803.152.000	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dermo	Jumlah Sarpras Yang di Bangun	Rp	832.652.000	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan kalirejo	Jumlah Sarpras Yang di Bangun	Rp	822.852.000	

				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Latek	Jumlah Sarpras Yang di Bangun	Rp	696.402.000	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kalianyar	Jumlah Sarpras Yang di Bangun	Rp	803.152.000	
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kiduldalem	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Rp	366.000.000	
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kersikan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Rp	366.000.000	
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kauman	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Rp	443.290.000	
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bedomungal	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Rp	254.425.000	
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gempeng	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Rp	366.000.000	
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan pogar	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Rp	280.412.500	
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kolursari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Rp	366.000.000	
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dermo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Rp	336.500.000	
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kalirejo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Rp	346.300.000	Jumlah Kegiatan
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Latek	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Rp	472.750.000	Jumlah Fasilitas
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalianyar	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Rp	366.000.000	
4	Urusan Kewilayahan	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN</b>	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang di Bina	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan	Rp	48.300.000	
				Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Jumlah Fasilitas	Rp	183.675.000	

5	Urusan Kewilayahan	<b>PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN</b>	Persentase Jumlah Kejadian Sesuai dengan Kewenangan Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi	Rp 93.375.000	
						<b>18.040.672.000,00</b>	

Bangil, Juni 2020  
Camat Bangil

Ttd.

**Drs. AGUS SUPRIYANTO, M.Pd**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19620705 198710 1 001



		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Nilai IKM Kecamatan</b> <b>Nilai SAKIP Kecamatan</b>		<b>87,50</b> <b>62,50</b>	<b>2.562.304.000</b>	
			Jumlah Desa Yang melaksanakan	Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa/Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa / Kelurahan	100%	5.000.000	
			Jumlah Kegiatan	Fasilitasi Administrasi Perangkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	9.000.000	
			Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Pagak	12 Bulan	105.000.000	
			Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Glanggang	12 Bulan	105.000.000	
			Persentase pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pagak	1 Tahun	366.000.000	
			Persentase pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Glanggang	1 Tahun	366.000.000	
			Persentase pembangunan wilayah yang dilaksanakan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pagak	1 Tahun	803.152.000	
			Persentase pembangunan wilayah yang dilaksanakan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Glanggang	1 Tahun	803.152.000	
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN KECAMATAN</b>	<b>Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Dibina</b>		<b>2 Lembaga</b>	<b>10.000.000</b>	
			Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi	Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	2 Kali	10.000.000	
		<b>PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN</b>	<b>Rasio jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan kecamatan</b>		<b>11 Kasus</b>	<b>7.984.000</b>	
			Jumlah rapat evaluasi permasalahan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan	Peningkatan Kerjasama dengan aparat Keamanan dalam Teknik pencegahan Kejahatan	100%	7.984.000	
			Jumlah koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	-	
						<b>3.318.304.000</b>	

Beji,

CAMAT BEJI

Ttd.

**TAUFIKHUL GHONY, SE.,M.Si.**

Pembina

NIP. 19700211 199303 1 006



**Rumusan Rencana Program dan dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022  
Kabupaten Pasuruan**

Nama OPD : KECAMATAN GONDANGWETAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>120090000</b> <b>5.1.1</b>	<b>PENDAPATAN</b> <b>Belanja Tidak Langsung :</b> <b>Belanja Pegawai</b>				<b>3.359.655.000</b>				<b>3.359.655.000</b>
1.20.09.5.1.1.01.01	- Gaji Pokok PNS		Kecamatan Gondang-wetan	100%	1.442.508.000	DAU		100%	1.442.508.000
1.20.09.5.1.1.01.02	- Tunjangan Keluarga				143.802.000				143.802.000
1.20.09.5.1.1.01.03	- Tunjangan Jabatan				124.038.000				124.038.000
1.20.09.5.1.1.01.05	- Tunjangan Fungsional Umum				55.540.000				55.540.000
1.20.09.5.1.1.01.06	- Tunjangan Beras				89.020.000				89.020.000
1.20.09.5.1.1.01.07	- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				6.450.000				6.450.000
1.20.09.5.1.1.01.08	- Pembulatan Gaji				70.000				70.000
1.20.09.5.1.1.02.01	- Tambahan Penghasilan Gaji Berdasarkan Beban Kerja - TPP Berdasar Beban Kerja				898.936.200				898.936.200
1.20.09.5.1.1.02.05	- Tambahan Penghasilan Gaji Berdasarkan Prestasi Kerja - TPP Berdasar Prestasi Kerja				599.290.800				599.290.800
1.20.09.5.2	<b>Belanja Langsung :</b> Urusan : Otda,Pemr.Umum,Adm.Keu Kepegawaian, Persandian				<b>2.149.152.000</b>				<b>1.056.000.000</b>
	<b>1. PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor</b>	<b>Kec. Gondang Wetan</b>	<b>100%</b>	<b>556.350.000</b>				<b>611.985.000</b>
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya listrik dan air, serta koran dan majalah	<b>Input :</b> - Bel. Pega : - - Bel. Bars : 40.000.000 - Bel. Mod : - <b>Dana</b> <b>Output :</b> Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air <b>Outcome :</b> Meningkatnya pelayanan adm.perkantoran		12 Bln	40.000.000	APBD KAB	Rutin	12 bln	44.000.000
	2. Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	<b>Input :</b> - Bel. Pega : 41.400.000 - Bel. Bars : - - Bel. Mod : - <b>Dana</b> <b>Output :</b> Tersedianya honorarium pengelola keuangan <b>Outcome :</b> Meningkatnya pelayanan adm.perkantoran		12 Bln	41.400.000	APBD KAB		12 bln	45.540.000

	3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	<b>Input</b> : - Bel. Pega : - - Bel. Bara : 10.000.000 - Bel. Mod : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Tersedianya Alat Tulis Kantor <b>Outcome</b> : Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kerja			10.000.000	APBD KAB		12 bln	100%	11.000.000
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<b>Input</b> : - Bel. Pega : - - Bel. Bara : 14.750.000 - Bel. Mod : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan <b>Outcome</b> : Meningkatnya pelaya nan adm.perkantoran			14.750.000	APBD KAB		12 Bln	100%	16.225.000
	5	Penyediaan makanan dan minuman Rapat	<b>Input</b> : - Bel. Pega : - - Bel. Bara : 40.000.000 - Bel. Mod : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Tersedianya makanan dan minuman dalam rapat <b>Outcome</b> : Meningkatnya Pelayanan adm. Perkantoran kepada Masy			40.000.000	APBD KAB		12 Bln	100%	44.000.000
	6	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi di luar daerah	<b>Input</b> : - Bel. Pega : - - Bel. Bara : 60.000.000 - Bel. Mod : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Terlaksananya rapat dan konsultasi di luar daerah <b>Outcome</b> : Terwujudnya Koordinasi dalam Pemerintahan			60.000.000	APBD KAB		12 Bln	100%	66.000.000
	7	Penyediaan Jasa Perkantoran	<b>Input</b> : - Bel. Pega : 135.000.000 - Bel. Bara : 215.200.000 - Bel. Mod : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Tersedianya Jasa Perkantoran, THL, dan Tenaga Kontrak PTT yang berkualitas <b>Outcome</b> : Meningkatnya pelaya nan adm.perkantoran			350.200.000	APBD KAB		12 Bln	100%	385.220.000
	<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>Kec. Gondang Wetan</b>	<b>100%</b>	<b>111.400.000</b>					<b>122.540.000</b>
	8	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	<b>Input</b> : - Bel. Pega : - - Bel. Bara : 35.000.000 - Bel. Mod : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Terpeliharanya gedung kantor <b>Outcome</b> : % sarana prasarana kantor yang memadai			35.000.000	APBD KAB		1 paket	100%	38.500.000

	9	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Operasional	<b>Input</b> : - Bel. Pega : - - Bel. Bara : 69.400.000 - Bel. Mod : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional <b>Outcome</b> : % sarana prasarana kantor yang memadai		9 Unit 100%	69.400.000	APBD KAB	8 unit 100%	76.340.000
	10	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	<b>Input</b> : - Bel. Pega : - - Bel. Bara : 7.000.000 - Bel. Mod : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Terpeliharanya peralatan kantor yang memadai <b>Outcome</b> : % sarana prasarana kantor yang memadai		1 Paket 100%	7.000.000	APBD KAB	6 unit 100%	7.700.000
	<b>3</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN GONDANGWETAN</b>	<b>Persentase Kegiatan Pelayanan Pemerintahan</b>	<b>Kec. GondangWetan</b>	<b>100%</b>	<b>1.379.152.000</b>			<b>231.000.000</b>
	11	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	<b>Input</b> : - Bel. Pega : - - Bel. Bara : 5.000.000 - Bel. Mod : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Tersusunnya LAKIP, Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun, Renstra, Renja dan Laporan Aset' <b>Outcome</b> : Nilai SAKIP Kec.		5 Laporan 100%	5.000.000	APBD KAB	1 Laporan 100%	5.500.000
	12	Peningkatan kapasitas Pemerintahan kelurahan GondangWetan	<b>Input</b> : - Bel. Pega : 28.740.000 - Bel. Bara : 101.260.000 - Bel. Mod : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Terlaksananya Kegiatan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan wilayah Kelurahan GondangWetan <b>Outcome</b> : Nilai SAKIP Kec.		1 Tahun 100%	130.000.000	APBD KAB	1 Laporan 100%	143.000.000
	13	Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	<b>Input</b> : - Bel. Pega : - - Bel. Bara : 75.000.000 - Bel. Mod : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Terlaksananya Kegiatan Masyarakat yang difasilitasi oleh Kecamatan <b>Outcome</b> : Nilai SAKIP Kec.		Hari Jadi & HUT Kemerdekaan RI	75.000.000,00	APBD KAB	1 Laporan 100%	82.500.000

	14	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gondangwetan	<b>Input</b> : - Bel. Pega : 16.200.000 - Bel. Bara : 58.090.000 - Bel. Mod : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Kelurahan Gondangwetan <b>Outcome</b> : Nilai SAKIP Kec.			74.290.000	APBD KAB		1 Laporan  100%	81.719.000
	15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gondangwetan	<b>Input</b> : - Bel. Pega : - - Bel. Bara : - - Bel. Mod : 1.094.862.000 <b>Dana</b> <b>Output</b> : Terlaksananya kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Fisik dan Kelurahan Gondangwetan <b>Outcome</b> : Nilai SAKIP Kec.			1.094.862.000	APBD KAB		1 Laporan  100%	1.204.348.200
	<b>4</b>	<b>PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN GONDANGWETAN</b>	<b>Persentase Jumlah kejadian yang Terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan</b>	<b>Kec. Gondang Wetan</b>	<b>100%</b>	<b>8.000.000</b>				<b>8.800.000</b>
	16	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam teknik Pencegahan Kejahatan	<b>Input</b> : - Bel. Pega : - - Bel. Bara : 8.000.000 - Bel. Mod : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Terlaksananya koordinasi dengan Aparat keamanan <b>Outcome</b> : Persentase meningkatnya penyelesaian kasus kejahatan			8.000.000	APBD KAB		4 kasus  100%	8.800.000
	<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/ KELURAHAN KECAMATAN GONDANGWETAN</b>	<b>Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina</b>  <b>Persentase Usulan Musrenbang yang Terfasilitasi</b>	<b>Kec. Gondang Wetan</b>	<b>50%</b> <b>4 Ormas</b>  <b>22%</b>	<b>94.250.000</b>				<b>81.675.000</b>
	17	Forum Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Gondangwetan	<b>Input</b> : - Bel. Pega : 1.800.000 - Bel. Bara : 18.200.000 - Bel. Mod : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Jumlah Kegiatan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan <b>Outcome</b> : Persentase Usulan Musrenbang yang Terfasilitasi			20.000.000	APBD KAB		2 Keg  100%	22.000.000

	18 Fasilitasi Kegiatan Sosial Kecamatan Gondangwetan	<b>Input :</b> - Bel. Pega : - - Bel. Bara : 65.000.000 - Bel. Mod : - <b>Dana</b> <b>Output :</b> Terlaksananya Kegiatan Manaqib, MTQ dan kegiatan sosialisasi <b>Outcome :</b> Jumlah Lembaga masyarakat yang dibina			65.000.000	APBD KAB		1 Tahun	71.500.000
	19 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	<b>Input :</b> - Bel. Pega : - - Bel. Bara : 9.250.000 - Bel. Mod : - <b>Dana</b> <b>Output :</b> Terlaksananya Kegiatan Even Pameran UMKM <b>Outcome :</b> Terwujudnya pelayanan masyarakat yang berkualitas			9.250.000	APBD KAB		1 Tahun	10.175.000
		Jumlah Belanja Tidak Langsung Jumlah Belanja Langsung Jumlah belanja Barang dan Jasa Jumlah Belanja Pegawai Jumlah Belanja Modal			<b>3.359.655.000,00</b> <b>2.149.152.000,00</b> <b>831.150.000,00</b> <b>223.140.000,00</b> <b>1.094.862.000,00</b>				<b>3.359.655.000,00</b> <b>2.364.067.200,00</b>
		<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung</b>			<b>5.508.807.000,00</b>				<b>5.723.722.200,00</b>

Gondangwetan, Juni 2020  
CAMAT GONDANGWETAN

Ttd.

**RACHMAT SYARIFUDDIN, S.Sos.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720103 199201 1 002

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN GRATI**

<b>NO</b>	<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>OUTCOME/ TARGET</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT/ TARGET</b>	<b>PAGU KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Urusan Pemerintahan Wajib	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Program Pelaynan Adminitrasi Perkantoran	Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komuniaksi sumber daya air dan listrik	52.800.000	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	41.476.050	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	23.723.950	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	5.000.000	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12.500.000	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	50.000.000	
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Tersedianya Jasa Perkantoran	250.000.000	

				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50.000.000	
				Penyediaan Pakaian Kerja	Tersedianya pakaian kerja	16.500.000	
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	Terpeliharanya rutin/berkala rumah dinas	15.000.000	
				Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya rutin / berkala gedung kantor	15.000.000	
				Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	75.000.000	
				Pemeliharaan rutin / berkala taman kantor	Terpeliharanya taman kantor	10.000.000	
				Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	15.000.000	
				Pemeliharaan rutin / berkala mebelair	Terpeliharanya mabelair	8.000.000	
3		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kecamatan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan laporan keuangan	tersusunnya lapran capaian kinerja dan laporan keuangan	2.500.000	
				Sosialisasi peraturan perundangan-undangan	terlaksananya sosialisasi peraturan perundangn-undangan	5.000.000	
				Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	meningkatnya pelayana publik dalam bidang kependudukan	5.000.000	
				Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Gratitunon	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Gratitunon	803.152.000	

				Pemberdayaan di Kelurahan Gratitunon	Terlaksananya pemberdayaan di kelurahan gratitunon	366.000.000	
4		Program pemberdayan masyarakat desa/kelurahan kecamatan	terlaksananya pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan	Forum Perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	terlaksananya musrenbang kecamatan	15.000.000	
				Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Terlaksananya koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa / kelurahan	8.000.000	
				Pelaksanaan pembinaan mental spiritual dan kegiatan keagamaan lainnya	terlaksananya manaqib tingkat kecamatan	60.000.000	
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas pemerintahan Kelurahan	304.500.000	
				Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terlaksananya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	10.000.000	
				Bimtek Pengelolaan keuangan desa bagi perangkat desa	terlaksananaya bimtek pengelolaan keuangan desa bagi perangkat desa	50.000.000	
				Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur buaday bangsa	60.000.000	



5		Program Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban umum Kecamatan	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Kemanan dalam Teknik dan Pencegahan Kejahatan	Meningkatnya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	10.000.000	
				Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketetraman dan ketertiban kecamatan	terfasilitasinya dan terkoordinirnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan	10.000.000	
						<b>2.359.152.000</b>	

Pasuruan, 2020  
Plt. Camat Grati

Ttd.

**NANANG MUJI LAKSONO,SH.,M.Hum**  
NIP. 19680313 198910 1 002

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KEJAYAN**

<b>NO</b>	<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>OUTCOME/ TARGET</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT/ TARGET</b>	<b>PAGU KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
15	Urusan Kewilayaan	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor/ 100%	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi Listrik dan Air/ 12 Bulan	45.000.000	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan/ 12 Bulan	6.700.000	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya honorarium jasa administrasi keuangan/ 12 Bulan	33.120.000	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor/ 12 Bulan	25.000.000	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan/ 12 Bulan	7.000.000	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat/ 12 Bulan	35.000.000	
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Terlaksananya Rapat dan Konsultasi Luar Daerah/ 12 Bulan	35.000.000	
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Tersedianya Jasa Tenaga Kontak/ PTT, THL & TPKL yang berkualitas/ 12 Bulan	509.800.000	

		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik/ 100%	Pengadaan Meubelair	Tersedianya Peralatan Kantor (mebelair)/ 1 Paket	10.000.000	
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor/ 1 Paket	10.000.000	
				Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional/ 1 Unit	-	
				Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor/ 12 Bulan	10.000.000	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional/ 1 LS	40.000.000	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas/ 12 Bulan	5.000.000	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	Terpeliharanya Perlengkapan Rumah jabatan/dinas/ 12 Bulan	5.000.000	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor/ 12 Bulan	10.000.000	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan/ 100%	Peningkatan Kapasitas pemerintahan Kecamatan	Terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang berkualitas/ 12 Bulan	15.000.000	
				Koordinasi administrasi Sosial Budaya (hari jadi dan HUT RI)	Terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas/ 1 Kali	10.000.000	
				Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Desa yang Baik/ 1 Kali	10.000.000	

				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Kejayan	Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi Perkantoran Kel. Kejayan/ 12 Bulan	125.880.000	
				Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan kejayan	Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana kel. Kejayan/ 12 Bulan	869.152.000	
				Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Kejayan	Terwujudnya peningkatan Pemberdayaan masyarakat Kel. Kejayan/ 12 Bulan	300.000.000	
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN KECAMATAN	Jumlah Lembaga Masyarakat yang di Bina/ 100%	Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan sosial masyarakat/ 5 Kali	42.500.000	
				Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan/ 2 Kegiatan	10.000.000	
				Sosialisasi Pengembangan UMKM	Peningkatan ekonomi masyarakat/ 1 Kali	10.000.000	
				Pengembangan Materi dan Pelaksanaan Kegiatan tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	Terwujudnya kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)/ 1 Kali	10.000.000	
				Fasilitasi Kegiatan MTQ	Meningkatnya kualitas Keagamaan/ 1 Kali	10.000.000	
				Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani	Meningkatnya kesehatan jasmani dan rohani pegawai kecamatan/ 10 Bulan	10.000.000	

		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN	Rasio Jumlah kejadian yang Terfasilitasi jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan/ 100%	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dengan Muspika/ 1 Kali	10.000.000	
						<b>2.219.152.000</b>	

Pasuruan, Juni 2020  
Camat Kejayan

Ttd.

MOH AGUS MASJHIADY, S.Sos, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700829 199101 1 001

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KRATON**

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Unsur Kewilayaan	<b>Pelayanan Administrsi Perkantoran</b>	<b>Presentase Pemenuhan Pelyanan Kantor</b>		<b>89%</b>	<b>491.188.500</b>	
				Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	40.656.000	
				Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	1 Paket	3.300.000	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	39.930.000	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	26.400.000	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Paket	20.492.500	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	4.400.000	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	8.360.000	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	49.600.000	
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Paket	80.250.000	
				Penyediaan Jasa Perkantoran	12 bulan	213.400.000	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	4.400.000	
		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Presantase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik</b>		<b>89%</b>	<b>306.456.500</b>	
				Pembangunan Gedung Kantor	1 Paket	11.000.000	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	1 Unit	40.425.000	

				Pengadaan Peralatan Kantor	1 Paket	61.500.000	
				Pengadaan Mebelair	1 Paket	15.000.000	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	1 Paket	147.031.500	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	1 Paket	15.000.000	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Paket	16.500.000	
		Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Kraton	<b>1. Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina</b>		<b>89%</b>	<b>200.000.000</b>	
			<b>2. Presentase Usulan Musrenbang yang Terasilitasi</b>				
				Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	5 Keg	165.000.000	
				Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	1 Keg	35.000.000	
		Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan Kraton	<b>Nilai IKM dan Nilai SAKIP Kecamatan</b>		<b>89%</b>	<b>132.955.000</b>	
				Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	5 Keg	100.000.000	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1 Paket	7.500.000	
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1 Keg	8.000.000	
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 Keg	5.500.000	
				Penyusunan Lakip dan Laporan Keuangan	1 Paket	4.455.000	
				Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan	5 Keg	7.500.000	

		Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	<b>Presentase Jumlah Kejadian yan Terfasilitasi Terhadap Jumlah Kejadian Sesuai Kewenangan Kecamatan</b>		<b>89%</b>	<b>79.000.000</b>	
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	12 Bulan	79.000.000	
						<b>1.209.600.000</b>	

Pasuruan, Juni 2020  
Camat Kraton

Ttd.

**RIDWAN HARRIS, SSTP, Msi**  
NIP. 19820825 200012 1 002



**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LEKOK**

<b>NO</b>	<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>OUTCOME/ TARGET</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT/ TARGET</b>	<b>PAGU KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	Urusan Kewilayahan	Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi kantor	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik/air/ telpon/internet	Rp 47.540.000	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai yang diberikan honor	Rp 36.000.000	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah honor yang diberikan	Rp 19.000.000	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor	Rp 13.600.000	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Rp 5.600.000	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan gedung/kantor	Rp 3.000.000	
				penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	Rp 2.160.000	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu	Rp 33.000.000	
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi	Rp 50.000.000	
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak dan THL	Rp 268.800.000	
				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tercukupinya pakaian aparatur	Rp 10.000.000	
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik	Pengadaan Mebelair	Jumlah pengadaan mebelair	Rp 15.000.000	

				Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Rp	15.000.000	
				Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Rp	10.000.000	
				Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Rp	4.000.000	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang kantor yang terpelihara	Rp	40.000.000	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp	60.000.000	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Taman Kantor	Jumlah taman yang dilakukan pemeliharaan	Rp	4.000.000	
		Program penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Nilai SKM Kecamatan	Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan	Terlaksananya koordinasi & pembinaan antara kec & desa	Rp	12.000.000	
				Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan	Terlaksananya kegiatan pelayanan kependudukan & manajemen aset/barang daerah	Rp	12.000.000	
				Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Desa	Terlaksananya koordinasi & pembinaan antara kec & desa	Rp	35.900.000	
		Program pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan Kecamatan	Jumlah lembaga masyarakat yang dibina Prosentase usulan musrenbang yang terfasilitasi	Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Laporan hasil musrenbang kecamatan	Rp	17.800.000	
				Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Terlaksananya kegiatan fasilitasi,MTQ,manaqib	Rp	119.000.000	

				Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Terlaksananya pemilihan dan pelantikan kepala desa	Rp 12.000.000	
				Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan PKK Kecamatan & pelatihan bagi pemuda, pemberdayaan UKM & karangtaruna	Rp 19.600.000	
		Program ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	Rasio jumlah kegiatan yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan	Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan	Persentase kantrantibmas yang ditangani	Rp 10.000.000	
						<b>Rp 875.000.000</b>	

Pasuruan,  
Camat Lekok

2020

Ttd.

FAUZAN, S.Pd, MM

Pembina

NIP. 19670615 198602 1 001

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LUMBANG**

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN	PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor / 100%	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air	27.000.000	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya honorarium pengelola keuangan	39.840.000	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya honorarium jasa kebersihan kantor	18.000.000	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	10.000.000	
				Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	14.800.000	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.300.000	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000	
				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman dalam rapat	32.400.000	
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat dan konsultasi di luar daerah	60.000.000	
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Tersedianya Tenaga Kontrak/ PTT, TPPL, THL yang berkualitas	205.000.000	
				Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik / 100%	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	-	

				Pengadaan Mebelair	Jumlah Pengadaan Mebelair	6.000.000	
				Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	14.822.500	
				Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	11.000.000	
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	73.000.000	
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terpeliharanya peralatan kantor yang memadai	8.000.000	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN LUMBANG	Nilai IKM Kecamatan / 83,50	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP, Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun, Renstra, Renja dan Laporan Aset'	2.500.000	
			Nilai SAKIP Kecamatan / 63	Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan	Meningkatnya kegiatan tata kelola pemerintahan desa	11.800.000	
				Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan	49.297.500	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN KECAMATAN	- Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina / 21,50%	Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	Peningkatan Kegiatan Sosial Masyarakat	87.490.000	
			- Presentase Usulan Musrenbang yang Terfasilitasi / 100%	Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa yang melaksanakan musrenbang tepat waktu	5.805.000	
				Kordinasi pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	8.745.000	

		PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN LUMBANG	Persentase Jumlah kejadian yang Terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan / 100%	Fasilitasi & Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan	Terlaksananya koordinasi dg aparap keamanan	7.200.000	
				Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya Kegiatan	-	
			<b>JUMLAH</b>			<b>700.000.000</b>	

Pasuruan,  
CAMAT LUMBANG

2020

Ttd.

MOH. SUCAHYONO, SE, MMA  
NIP. 196510251986031019

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NGULING**

<b>NO</b>	<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>OUTCOME/ TARGET</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT/ TARGET</b>	<b>PAGU KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Urusan Pemerintahan	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor</b>			<b>529.000.000</b>	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Listrik, Telpon, PDAM & Internet	39.700.000	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honorarium Bagi Pengelola Keuangan	45.500.000	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Jasa / Petugas Kebersihan	36.000.000	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)	10.000.000	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik yang di beli	3.000.000	
				Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Kantor	5.000.000	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Alat Rumah Tangga	5.000.000	

				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan & Minuman Rapat	66.800.000	
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar daerah	35.000.000	
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Tersedianya Honor PTT & THL	273.000.000	
				Penyediaan Pakaian Kerja	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja		
2	Urusan Pemerintahan	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik</b>			<b>151.000.000</b>	
				Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	41.000.000	
				Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubeler	20.000.000	
				Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	5.000.000	
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dilakuka Pemeliharaan	70.000.000	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung/Kantor	Jumlah Taman Kantor Yang Mendapatkan Perawatan	5.000.000	
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang di lakukan Pemerintahan	10.000.000	



3	Urusan Pemerintahan	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Nilai SAKIP KECAMATAN</b>			<b>80.000.000</b>	
				Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Pemerintahan	Tersedianya Koordinasi & Pembinaan Antara Kecamatan & desa	5.000.000	
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya HUT-RI & Hari-hari Jadi Kabupaten Pasuruan	45.000.000	
				Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Forum Tingkat Kecamatan Musrenbang	15.000.000	
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Laporan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan LAKIP & Laporan Keuangan Tepat Waktu	15.000.000	
4	Urusan Pemerintahan	<b>Program Sosial Keagamaan Di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Di Tingkat Kecamatan</b>			<b>110.000.000</b>	
				Pelaksanaan Pembinaan Mental Spiritual dan Kegiatan Keagamaan Lainnya ( Manaqib, dst )	Terlaksananya Kegiatan Manaqib	100.000.000	
				Fasilitas Kegiatan MTQ	Tersedianya Kegiatan PKK & MTQ Kecamatan	10.000.000	
5	Urusan Pemerintahan	<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Desa</b>	<b>Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Desa</b>			<b>5.000.000</b>	

				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kegiatan Kamrantribmas di Wilayah Kecamatan Nguling	5.000.000		
	<b>(Total)</b>						<b>875.000.000</b>	

Pasuruan, .....

CAMAT NGULING

Ttd.

**Drs. BUNARDI**

Pembina Tk.I

NIP. 19680604 198903 1 012

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PASREPAN**

<b>NO</b>	<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>OUTCOME/ TARGET</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT/ TARGET</b>	<b>PAGU KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	Urusan Kewilayahan	Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi kantor	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik/air/ telpon/internet	Rp 47.540.000	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai yang diberikan honor	Rp 36.000.000	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah honor yang diberikan	Rp 19.000.000	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor	Rp 13.600.000	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Rp 5.600.000	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan gedung/kantor	Rp 3.000.000	
				penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	Rp 2.160.000	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu	Rp 33.000.000	
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi	Rp 50.000.000	
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak dan THL	Rp 268.800.000	
				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tercukupinya pakaian aparatur	Rp 10.000.000	
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik	Pengadaan Mebelair	Jumlah pengadaan mebelair	Rp 15.000.000	
				Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Rp 15.000.000	

				Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Rp	10.000.000	
				Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Rp	4.000.000	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang kantor yang terpelihara	Rp	40.000.000	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp	60.000.000	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Taman Kantor	Jumlah taman yang dilakukan pemeliharaan	Rp	4.000.000	
		Program penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Nilai SKM Kecamatan	Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan	Terlaksananya koordinasi & pembinaan antara kec & desa	Rp	12.000.000	
				Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan	Terlaksananya kegiatan pelayanan kependudukan & manajemen aset/barang daerah	Rp	12.000.000	
				Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Desa	Terlaksananya koordinasi & pembinaan antara kec & desa	Rp	35.900.000	
		Program pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan Kecamatan	Jumlah lembaga masyarakat yang dibina Prosentase usulan musrenbang yang terfasilitasi	Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Laporan hasil musrenbang kecamatan	Rp	17.800.000	
				Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Terlaksananya kegiatan fasilitasi,MTQ,manaqib	Rp	119.000.000	
				Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Terlaksananya pemilihan dan pelantikan kepala desa	Rp	12.000.000	

				Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan PKK Kecamatan & pelatihan bagi pemuda, pemberdayaan UKM & karangtaruna	Rp 19.600.000	
		Program ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	Rasio jumlah kegiatan yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan	Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan	Persentase kantrantibmas yang ditangani	Rp 10.000.000	
						<b>Rp 875.000.000</b>	

Pasuruan,  
CAMAT PASREPAN

2020

Ttd.

**ZAKI YAMANI, S.STP, MT**

Pembina

NIP. 19820929 200112 1 002

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PRIGEN**

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PRIGEN</b>						
		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Tingkat Administrasi Pelayanan</b>			<b>568.332.500</b>	
			Jumlah Rekening listrik dan telepon	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan listrik	8 Rekening	47.280.000	
			Jumlah tenaga administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	44.700.000	
			Jumlah alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	28.000.000	
			Jumlah barang cetak dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	8.252.500	
			Jumlah komponen listrik/penerangan kantor	Penyediaan komponen Listrik /penerangan bagian bangunan	12 bulan	5.000.000	
			Jumlah kegiatan rapat dan tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	50.000.000	
			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	1 tahun	30.000.000	
			Jumlah penyediaan jasa perkantoran	Penyediaan Jasa Perkantoran	16 orang	355.100.000	
		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Peningkatan Kapasitas dan kualitas pelayanan sebagai saran dan prasarana</b>			<b>75.220.000</b>	
			Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 tahun	8.000.000	
			Jumlah pengadaan kendaraan dinas	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	10 unit	49.420.000	
			Jumlah peralatan kantor	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan kantor	12 bulan	17.800.000	

		<b>PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Nilai IKM Kecamatan</b>			<b>4.070.323.500</b>	
				Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan	14 Desa/kelurahan	17.250.000	
				Peningkatan Kapasitas kelurahan Prigen	12 bulan	154.397.000	
				Peningkatan Kapasitas kelurahan Pecalukan	12 bulan	221.183.500	
				Peningkatan Kapasitas kelurahan Ledug	12 bulan	170.037.000	
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ledug	1 Tahun	350.745.600	
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pecalukan	1 Tahun	350.745.600	
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prigen	1 Tahun	350.745.600	
				Pembangunan Saran dan Prasarana Kelurahan Ledug	1 Tahun	818.406.400	
				Pembangunan Saran dan Prasarana Kelurahan Pecalukan	1 Tahun	818.406.400	
				Pembangunan Saran dan Prasarana Kelurahan Prigen	1 Tahun	818.406.400	
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN KECAMATAN</b>	<b>Jumlah Lembaga Masyarakat yang di bina</b>			<b>39.130.000</b>	
			Terlaksanannya Musrenbang RKPD tingkat kecamatan	Forum Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan	1 kali	10.480.000	
			Jumlah kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi	Koordinasi pemberdayaan Masyarakat	4 kegiatan	20.700.000	
			Jumlah Fasilitasi	Fasilitasi kegiatan Sosial Masyarakat	2 Kegiatan	7.950.000	
		<b>PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN</b>	<b>Persentase jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan kecamatan</b>			<b>14.450.000</b>	

			Terlaksananya koordinasi dengan aparat keamanan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Kecamatan	12 bulan	14.450.000	
						<b>4.767.456.000</b>	



REVIU RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021  
KABUPATEN PASAUURAN

Perangkat Daerah :Kecamatan Purwodadi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program pelayanan administrasi perkantoran		(outcome) Persentase pemenuhan pelayanan kantor		572.750.000	Program pelayanan administrasi perkantoran		(outcome) Persentase pemenuhan pelayanan kantor		572.750.000	
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(output) Jumlah pembayaran rekening listrik,telepon,PDAM & intrnet		35.400.000	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(output) Jumlah pembayaran rekening listrik,telepon,PDAM & intrnet		35.400.000	
	2	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	(output) tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		10.000.000	2	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	(output) tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		10.000.000	

	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	(output) tersedianya honorarium bagi pengelola adm keuangan		36.000.000	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	(output) tersedianya honorarium bagi pengelola adm keuangan		36.000.000	
	4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	(output) Jumlah alat tulis kantor		25.500.000	4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	(output) Jumlah alat tulis kantor		25.500.000	
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	(output) Jumlah barang cetakan & penggadaan		22.500.000	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	(output) Jumlah barang cetakan & penggadaan		22.500.000	
	6	Penyediaan Makanan dan Minuman	(output) tersedianya makanan & minuman bagi peserta rapat		62.750.000	6	Penyediaan Makanan dan Minuman	(output) tersedianya makanan & minuman bagi peserta rapat		62.750.000	
	7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	(output) Jumlah perjalanan dinas keluar daerah		30.000.000	7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	(output) Jumlah perjalanan dinas keluar daerah		30.000.000	
2	8	Penyediaan Jasa Perkantoran	(output) tersedianya koran harian & honor PTT		345.000.000	8	Penyediaan Jasa Perkantoran	(output) tersedianya koran harian & honor PTT		345.000.000	

	9	Penyediaan peralatan rumah tangga	(output) tersedianya peralatan rumah tangga		5.000.000	9	Penyediaan peralatan rumah tangga	(output) tersedianya peralatan rumah tangga		5.000.000	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>(outcome) Persentas e sarana dan prasarana dalam kondisi baik</b>		<b>160.100.000</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>(outcome) Persentas e sarana dan prasarana dalam kondisi baik</b>		<b>160.100.000</b>	
	1	Pengadaan Peralatan gedung/Kantor	(output) Peralatan kantor yang tersedia		42.500.000	1	Pengadaan Peralatan gedung/Kantor	(output) Peralatan kantor yang tersedia		42.500.000	
	2	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas/Operasional;	(output) Jumlah kendaraan yang dilakukan pemeliharaan		87.600.000	2	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas/Operasional;	(output) Jumlah kendaraan yang dilakukan pemeliharaan		87.600.000	
	3	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	(output) jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan		20.000.000	3	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	(output) jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan		20.000.000	

	4	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kamtor	(output) jumlah mebelair yang dilakukan pemeliharaan		10.000.000	4	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kamtor	(output) jumlah mebelair yang dilakukan pemeliharaan		10.000.000	
	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan Kecamatan Purwodadi</b>		<b>Jumlah lembaga masyarakat yang dibina</b>			<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan Kecamatan Purwodadi</b>		<b>Jumlah lembaga masyarakat yang dibina</b>			
			<b>Persentase Usulan Musrenbang yang terfasilitasi</b>		<b>61.350.000</b>			<b>Persentase Usulan Musrenbang yang terfasilitasi</b>		<b>61.350.000</b>	
	1	peningkatan spiritual manakib	Jumlah kegiatan sosial masyarakat		30.000.000	1	peningkatan spiritual manakib	Jumlah kegiatan sosial masyarakat		30.000.000	
	2	Forum perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	Terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan		21.350.000	2	Forum perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	Terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan		21.350.000	
	3	Koordinasi pembinaan UMKM	terlaksananya koordinasi pembinaan UMKM		10.000.000	3	Koordinasi pembinaan UMKM	terlaksananya koordinasi pembinaan UMKM		10.000.000	

	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan Purwodadi</b>		<b>(outcome) Nilai IKM dan nilai Sakip Kecamatan</b>		<b>35.000.000</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan Purwodadi</b>	<b>(outcome) Nilai IKM dan nilai Sakip Kecamatan</b>		<b>35.000.000</b>	
	2	Koordinasi administrasi sosial budaya/hari jadi dan HUT	(output) Terlaksananya koordinasi sosial budaya		30.000.000	2	Koordinasi administrasi sosial budaya/hari jadi dan HUT	(output) Terlaksananya koordinasi sosial budaya	30.000.000	
	3	Penyusunan Lakip dan Laporan Keuangan	(output) Laporan akhir tahun tepat waktu		5.000.000	3	Penyusunan Lakip dan Laporan Keuangan	(output) Laporan akhir tahun tepat waktu	5.000.000	
	<b>Program Koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>(outcome) Persentase kasus kamtrantibmas yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan</b>		<b>10.800.000</b>	<b>Program Koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>(outcome) Persentase kasus kamtrantibmas yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan</b>		<b>10.800.000</b>	
	1	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan	(output) Koordinasi penyelenggaraan kamtrantibmas		10.800.000	1	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan	(output) Koordinasi penyelenggaraan kamtrantibmas	10.800.000	
					<b>840.000.000</b>				<b>840.000.000</b>	

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PURWOSARI**

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Urusan :	- Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor/ 100 %	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersediaanya Materai dan Surat kabar	7.000.000	APBD KAB.
				2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediaanya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik/ 12 Bulan	45.000.000	APBD KAB.
				3 Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	Tersediaanya Honorarium Pengelola Keuangan/ 12 Bulan	50.100.000	APBD KAB.
				4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersediaanya Bahan Pembersih dan Upah Kerja	8.500.000	APBD KAB.
				5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersediaanya Alat Tulis Kantor	13.010.952	APBD KAB.
				6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersediaanya Peralatan Rumah Tangga	26.000.000	APBD KAB.
				7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersediaanya Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	APBD KAB.
				8 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersediaanya Makanan dan Minuman Rapat/ LS	45.000.000	APBD KAB.
				9 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Terlaksananya Rapat dan Konsultasi Luar Daerah / LS	50.000.000	APBD KAB.
				10 Penyediaan Jasa Perkantoran	Tersediaanya TPKL, THL, dan Tenaga Kontrak PTT yang berkualitas/ 12 Bulan	287.940.000	APBD KAB.
II.		- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik/ 100 %	11 Pengadaan Peralatan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kantor/LS	70.000.000	APBD KAB.
				12 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor/LS	15.000.000	APBD KAB.
				13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional/ 9 Unit	139.000.000	APBD KAB.
				14 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor	12.000.000	APBD KAB.
				15 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor/LS	-	APBD KAB.
III.		- Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kegiatan Pelayanan Pemerintahan/ 100%	16 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP, Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun, Renstra, Renja dan Laporan Aset/ 5 Laporan	27.105.000	APBD KAB.

				17 Peningkatan kapasitas Pemerintahan Kelurahan Purwosari	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Kelurahan Purwosari/ 12 Bulan	97.812.500	APBD KAB.
IV.				18 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwosari	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Kelurahan Purwosari/ Kegiatan Sosialisasi	669.152.000	APBD KAB.
				19 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwosari	Terlaksananya kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Fisik dan Kelurahan Purwosari/ LS	500.000.000	APBD KAB.
		- Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Persentase Jumlah kejadian yang Terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan/ 100 %	20 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam teknik Pencegahan Kejahatan	Terlaksananya Koordinasi dengan Aparat Keamanan / 4 Rakor	24.000.000	APBD KAB.
V.		- Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan Kecamatan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina/ 4 Ormas Persentase Usulan Musrenbang yang Terfasilitasi/ 22 %	21 Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan/ 2 Kegiatan	19.300.000	APBD KAB.
				22 Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya kegiatan Olahraga dan Perkumpulan Pemuda	-	APBD KAB.
				23 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan PHBN, Gender dan Pelatihan UMKM	47.100.000	APBD KAB.
				24 Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Desa/Kelurahan	-	APBD KAB.
				25 Pelaksanaan Pembinaan Mental spiritual dan Kegiatan Keagamaan Lainnya	Terlaksananya ziarah Ke Sunan Ampel	30.000.000	APBD KAB.
				26 Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama	Terlaksananya Manakib, MTQ dan	131.200.000	APBD KAB.
					<b>(TOTAL)</b>	<b>2.324.220.452</b>	

Purwosari, 07 Juli 2020  
CAMAT PURWOSARI

Ttd.

**EKA WARA BREHASPATI, SSTP, MSI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19751023 199402 1 001

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PUSPO

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Urusan : Otoda,Pemr.Umum,Adm.Keu, Kepegawaian, Persandian	- Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor/ 100 %	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik/ 12 Bulan	23.640.000	APBD KAB.
2 Penyediaan Jasa Adm. Keuangan				Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan/ 12 Bulan	28.440.000	APBD KAB.	
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor				Tersedianya Alat Tulis Kantor/ LS	12.000.000	APBD KAB.	
4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan/ LS	12.000.000	APBD KAB.	
5 Penyediaan makanan dan minuman Rapat				Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat/ LS	49.200.000	APBD KAB.	
6 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah				Terlaksananya Rapat dan Konsultasi Luar Daerah / LS	25.660.000	APBD KAB.	
7 Penyediaan Jasa Perkantoran				Tersedianya TPKL, THL, dan Pembelian Materai yang berkualitas/ 12 Bulan	201.600.000	APBD KAB.	
8 Penyediaan Pakaian Kerja				Tersedianya Pakaian Kerja Yang Diadakan	4.000.000	APBD KAB.	
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Yang Diadakan	3.000.000	APBD KAB.	
10 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Diadakan	3.000.000	APBD KAB.	
11 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan				Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan	2.400.000	APBD KAB.	
II.	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik/ 100 %	12 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor/ LS	7.000.000	APBD KAB.	
13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Operasional			Terpeliharanya kendaraan dinas operasional/ 9 Unit	119.000.000	APBD KAB.		



III.				14	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Yang Diadakan	10.800.000	APBD KAB.
				15	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor / LS	9.000.000	APBD KAB.
				16	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor Yang Diadakan	10.000.000	APBD KAB.
				17	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	Terpeliharanya Pmebelair Kantor / LS	1.500.000	APBD KAB.
				18	Pengadaan Mebelair	Tersedianya Peralatan Kantor Yang Diadakan	16.000.000	APBD KAB.
				19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas Kantor/ LS	7.000.000	APBD KAB.
III.	-	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan Puspo	Persentase Kegiatan Pelayanan Pemerintahan/ 100%	20	Penyusunan LAKIP Dam Laporan Keuangan	Tersusunnya LAKIP, Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun, Renstra, Renja dan Laporan Aset/ 5 Laporan	3.560.000	APBD KAB.
				21	Peningkatan kapasitas SDA Kecamatan Desa/Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Puspo / 12 Bulan	4.900.000	APBD KAB.
				22	Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Masyarakat yang difasilitasi oleh Kecamatan/ 2 Kegiatan	59.250.000	APBD KAB.
				23	Koordinasi Dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Perangkat Desa	8.500.000	APBD KAB.
IV.	-	Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Puspo	Persentase Jumlah kejadian yang Terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan/ 100 %	24	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam teknik Pencegahan Kejahatan	Terlaksananya Pemantauan Wilayah dengan Aparat Keamanan	2.000.000	APBD KAB.
				25	Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan	Terlaksananya Koordinasi dengan Aparat Keamanan / 1 Kegiatan	4.500.000	APBD KAB.
V.	-	Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan Kecamatan Puspo	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina/ 4 Ormas Persentase Usulan Musrenbang yang Terfasilitasi/ 22 %	26	Forum Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Puspo	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan/ 1 Kegiatan	8.200.000	APBD KAB.
				27	Fasilitasi Kegiatan Sosial Kecamatan Puspo	Terlaksananya Kegiatan Manaqib	63.850.000	APBD KAB.
<b>(TOTAL)</b>							<b>700.000.000</b>	

CAMAT PUSPO

Ttd.

**KARTONO, SH, M.Hum**

Pembina

NIP. 19650827 199102 1 001

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH :**

<b>NO</b>	<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>OUTCOME/ TARGET</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT/ TARGET</b>	<b>PAGU KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Urusan Kewilayahan	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan administrasi kantor (100%)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik/air/telpon/internet (48 Rekening)	48.450.000	
				Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor (5 Unit)	6.000.000	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai yang diberikan honor (9 Orang/bulan)	36.360.000	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor (39 Jenis)	22.000.000	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan (10 Jenis)	12.500.000	
				Penyediaan Komponen Instalasi List/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan gedung/kantor (6 Jenis)	2.300.000	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor (15 Jenis)	13.000.000	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli (730 Eksemplar)	-	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu (24 Kali)	34.110.000	
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi (10 Laporan)	30.000.000	

				Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak dan THL (10 Orang/bulan)	274.200.000	
				Penyediaan Pakaian Kerja	Tercukupinya pakaian dinas (10 Stel)	10.000.000	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik (100%)	Pengadaan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan yang dibeli (1 Unit)	-	
				Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan / dinas	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas (15 Jenis)	8.000.000	
				Pengadaan Meubelair	Jumlah pengadaan mebelair kantor (2 Unit)	7.000.000	
				Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor (2 Jenis)	10.000.000	
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang kantor yang terpelihara (10 Ruang)	20.000.000	
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional (7 Unit)	80.000.000	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	Nilai SAKIP Kecamatan (75) Nilai SKM Kecamatan (85)	Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan	Peningkatan kegiatan tata kelola pemerintahan desa (3 Kegiatan)	31.305.000	
				Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan	Jumlah Desa yang lunas PBB tepat waktu (16 Desa)	12.500.000	

				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja (12 Laporan)	19.000.000	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN	Jumlah lembaga masyarakat yang dibina (4 Lembaga) prosentase usulan musrenbang yang terfasilitasi (70%)	Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang tepat waktu (16 Desa)	18.265.000	
				Kordinasi pemberdayaan masyarakat	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan organisasi kemasyarakatan (3 Kegiatan)	49.240.000	
				Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	Peningkatan kegiatan sosial masyarakat (3 Kegiatan)	82.375.000	
		PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN	Rasio jumlah kegiatan yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan (80%)	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan	Persentase kantrantibmas yang ditangani (4 Kali)	4.500.000	
				Fasilitasi Penegakan Perda/Perkada	Terlaksananya fasilitasi penegakan perda/perkada (1 Kegiatan)	8.895.000	
<b>TOTAL</b>						<b>840.000.000</b>	

Pasuruan, 2020  
CAMAT REJOSO,

Ttd.

KOMARI, SH, MM  
Pembina  
NIP. 19660904 198702 1 004

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH :** KECAMATAN REMBANG

<b>NO</b>	<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>OUTCOME/ TARGET</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT/ TARGET</b>	<b>PAGU KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	Terbayarnya rekening listrik dan telepon	41.000.000	
				<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</b>	Terbayarnya pajak kendaraan dinas	8.000.000	
				<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b>	Terbayarnya honor jasa pengelola keuangan	41.400.000	
				<b>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</b>	Terbayarnya honor jasa kebersihan kantor	20.400.000	
				<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	Tersedianya ATK	10.000.000	
				<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	Tersedianya barang cetakan penggandaan	6.600.000	
				<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	Tersedianya makanan dan minuman rapat	25.000.000	
				<b>Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</b>	Terselenggaranya rapat di luar daerah	30.000.000	
				<b>Penyediaan Jasa Perkantoran</b>	Terbayarnya honor THL	244.800.000	
				<b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya</b>	Tersedianya pakaian dinas	8.000.000	
				<b>Pengembangan Sumber Daya Aparatur</b>	Bimtek SAKIP	20.000.000	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	<b>Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional</b>	Tersedianya kendaraan dinas	30.000.000	

				<b>Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas</b>	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	10.000.000	
				<b>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</b>	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	10.000.000	
				<b>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</b>	Tersedianya peralatan gedung kantor	25.000.000	
				<b>Pengadaan Mebeleur</b>	Tersedianya mebeleur	9.000.000	
				<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	Terpeliharanya gedung kantor	11.000.000	
				<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	Terpeliharanya kendaraan dinas	69.500.000	
				<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor</b>	Terpeliharanya kendaraan dinas	10.500.000	
				<b>Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor</b>	Terpeliharanya kendaraan dinas	10.000.000	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	Meningkatnya koordinasi kecamatan	<b>Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan</b>	Meningkatnya koordinasi antar desa	6.400.000	
				<b>Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan tingkat Kecamatan</b>	Meningkatnya koordinasi lingkup kecamatan	36.600.000	
				<b>Penyusunan LAKIP dan Laporan Keuangan</b>	Tersedianya laporan kinerja dan laporan keuangan	3.200.000	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN KECAMATAN	Meningkatnya koordinasi antar desa	<b>Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat</b>	Meningkatnya fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	40.000.000	
				<b>Koordinasi pemberdayaan masyarakat</b>	Meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat	18.000.000	

				<b>Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan</b>	Terlaksananya musrenbang	22.500.000	
		PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN	Meningkatnya trantib	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan</b>	Meningkatnya trantib di wilayah kecamatan	17.100.000	
						<b>784.000.000</b>	

Rembang, 7 Juli 2020  
CAMAT REMBANG

Ttd.

Drs. IYO ASHARI  
NIP. 19640219 198902 1 001

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH :** KECAMATAN SUKOREJO

<b>NO</b>	<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>OUTCOME/ TARGET</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT/ TARGET</b>	<b>PAGU KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Urusan Kewilayahan	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan administrasi kantor / 100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik/air/ telpon/internet (rek bulan) / 12 Bulan	50.000.000	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor (unit) / 5 Unit	4.000.000	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai yang diberikan honor (org-bln) / 12 Bulan	36.240.000	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah petugas kebersihan (org-bln) / 12 Bulan	36.000.000	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor (jenis-kali) / 47 Jenis	20.000.000	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan / 1 Paket	10.000.000	
				Penyediaan Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan gedung/kantor / 1 Paket	4.500.000	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor / 5 Unit	5.000.000	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli / 1 Paket	5.000.000	



				Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan makanan dan minuman / 1 Paket	47.018.000	
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi / 1 Paket	30.000.000	
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak dan THL / 12 Bulan	324.000.000	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarpras kondisi baik / 100%	Pengadaan Perlalatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor / 3 Unit	2.000.000	
				Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit) / 1 Paket	174.000.000	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional / 1 Paket	147.425.160	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara (unit) / 1 Paket	7.500.000	
		PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian yang terfasilitasi sesuai dengan Kewenangan Kecamatan / 79%	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Laporan hasil koordinasi / 1 Paket	5.000.000	
				Fasilitasi Penegakan Perda	Jumlah kegiatan fasilitasi / 1 Paket	6.000.000	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	Nilai SKM Kecamatan / 89	Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	jumlah kegiatan pembinaan / 1 Paket	17.166.840	
				Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintah Tingkat Kecamatan	Fasilitasi & koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan / 1 Paket	15.000.000	
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan / 1 Paket	2.650.000	

				Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah peserta bimtek / 2 orang	7.500.000	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN KECAMATAN	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat / 3 kegiatan	Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional / 1 Paket	15.000.000	
				Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan pemberdayaan / 1 Paket	49.000.000	
				Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Jumlah kegiatan sosial masyarakat / 1 Paket	30.000.000	
<b>TOTAL</b>						<b>1.050.000.000</b>	

Pasuruan, 8 Juli 2020  
CAMAT SUKOREJO

Ttd.

**DIANO VELA FERY S, S.Sos., M.A.**  
NIP. 19731116 199203 1 001

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TOSARI**

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Urusan : Otda, Pemr. Umum, Adm. Keu, Kepegawaian, Persandian	- Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor/ 100 %	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik/ 12 Bulan	30.600.000	APBD KAB.
				2 Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan/ 12 Bulan	29.340.000	APBD KAB.
				3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor/ LS	15.000.000	APBD KAB.
				4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan/ LS	10.000.000	APBD KAB.
				5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan/12 Bulan	3.000.000	APBD KAB.
				6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih/ 12 Bulan	5.000.000	APBD KAB.
				7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.300.000	APBD KAB.
				8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	2.460.000	APBD KAB.
				9 Penyediaan makanan dan minuman Rapat	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat/ LS	30.000.000	APBD KAB.
				10 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Terlaksananya Rapat dan Konsultasi Luar Daerah / LS	30.000.000	APBD KAB.
				11 Penyediaan Jasa Perkantoran	Tersedianya TPKL, THL, dan Tenaga Kontrak PTT yang berkualitas/ 12 Bulan	277.350.000	APBD KAB.
				12 Penyediaan Pakaian Kerja	Tersedianya Pakaian Kerja Yang Diadakan	15.000.000	APBD KAB.
II.		- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik/ 100 %	13 Pengadaan Mebelair	Tersedianya Mebelair Yang Diadakan/ 1 Paket	5.000.000	APBD KAB.
				14 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor Yang Diadakan/1 Paket	7.500.000	APBD KAB.
				15 Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor Yang Diadakan/ 1 Paket	32.500.000	APBD KAB.
				16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor/ LS	5.000.000	APBD KAB.
				17 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional/ 9 Unit	140.000.000	APBD KAB.

III.	- Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan Tosari	Persentase Kegiatan Pelayanan Pemerintahan/ 100%	18 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor / LS	5.000.000	APBD KAB.
			19 Pemeliharaan rutin/berkala peralatanMebelair	Terpeliharanya Mebelair Kantor / LS	4.000.000	APBD KAB.
			21 Penyusunan LAKIP dan Laporan Keungan	Tersusunnya LAKIP, Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun, Renstra, Renja dan Laporan Aset/ 5 Laporan	5.000.000	APBD KAB.
			21 Peningkatan kapasitas Pemerintahan kelurahan Tosari	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Kelurahan Tosari/ 1 Kegiatan	7.500.000	APBD KAB.
			22 Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Masyarakat yang difasilitasi oleh Kecamatan/ 2 Kegiatan	51.300.000	APBD KAB.
			23 Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	9.500.000	APBD KAB.
IV.	- Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tosari	Persentase Jumlah kejadian yang Terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan/ 100 %	24 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Perundang-Undangan	7.500.000	APBD KAB.
			25 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam teknik Pencegahan Kejahatan	Terlaksananya Koordinasi dengan Aparat Keamanan / 12 Bulan	5.000.000	APBD KAB.
V.	- Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan Kecamatan Tosari	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina/ 4 Persentase Usulan Musrenbang yang	26 Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi dengan Aparat Keamanan / 1 keg	9.000.000	APBD KAB.
			27 Forum Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tosari	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan/ 2 Kegiatan	10.750.000	APBD KAB.
			28 Fasilitasi Kegiatan Sosial Kecamatan Tosari	Terlaksananya Kegiatan Manaqib, MTQ dan kegiatan sosialisasi/ 13 Kegiatan	30.000.000	APBD KAB.
			29 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Even Pameran UMKM/ 5 Kegiatan	90.400.000	APBD KAB.
<b>(TOTAL)</b>					<b>875.000.000</b>	

Tosari, Juli 2020

CAMAT TOSARI

Ttd.

**HARI HIJROH SAPUTRO, S.STP**

Pembina

NIP. 19790517 199810 1 001

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TUTUR**

<b>NO</b>	<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>OUTCOME/ TARGET</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT/ TARGET</b>	<b>PAGU KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
						<b>550.150.000</b>	
	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi kantor / 100 %</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Listrik / Air/ Telephone / 48 rekening	30.000.000	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran Honor Pengelola Keuangan, Pengelola Aset, Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa / orang / bulan	31.980.000	
				Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Jumlah Pembayaran Honor Jasa Kebersihan Kantor / org/ bln	17.400.000	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pembelian ATK / 45 Jenis	24.000.000	
				Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan / 2 jenis	13.000.000	
				Penyediaan peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor / 22 buah	12.000.000	
				Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah Kegiatan Rapat dan Tamu / org/bln	50.000.000	

				Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah / 12 Laporan	75.570.000	
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah Pembayaran Tenaga Honor Kontrak dan THL / 15 org/bln	296.200.000	
						<b>164.000.000</b>	
		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Presentase sarpras kondisi baik / 100 %</b>	Pemeliharaan Rutin Berkala peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara / 20 Jenis	6.000.000	
				Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara / 5 Unit	70.000.000	
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor / 4 Unit	30.000.000	
				Pemeliharaan rutin berkala Rumah Dinas	Jumlah Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas / 1 unit	15.000.000	
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor / 2 unit	18.000.000	
				Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi Sedan berat rumah gedung kantor / 1 paket	25.000.000	
						<b>10.000.000</b>	
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Nilai SAKIP Kecamatan / 65 Nilai SKM Kecamatan /85</b>	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan, Semesteran, Tahunan dan Laporan SAKIP / 4 Lap	10.000.000	
						<b>146.850.000</b>	

		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN</b>	<b>Jumlah lembaga masyarakat yang dibina / 5 prosentase usulan musrenbang yang terfasilitasi / 75 %</b>	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana/ 2 Keg	27.350.000	
				Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana/ 5 Keg	107.500.000	
				Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan yang terfasilitasi / 1 keg	12.000.000	
						<b>4.000.000</b>	
		<b>PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN</b>	<b>Rasio jumlah kegiatan yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan / 100 %</b>	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Ketenraman dan Ketertiban Kecamatan / 4 Keg	4.000.000	
						<b>875.000.000</b>	

Pasuruan, 08 Juli 2020  
Camat Tuter

Ttd.

**MUJIONO,S.Sos,M.Si**

Pembina Tk.I

NIP.19700507 199101 1 001

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

note : mohon untuk tidak menambah/mengurangi kolom yg ada

**PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN WINONGAN**

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	KEGIATAN	OUTPUT/ TARGET	PAGU KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Unsur Kewilayahan	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, internet dan telpon	46.000.000	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	40.080.000	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	7.200.000	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian ATK	16.500.000	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang betakan dan Penggandaan	10.500.000	
				penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah pembelian koran	1.680.000	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu	41.000.000	
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	50.000.000	
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Honor tenaga kontrak/THL	223.800.000	
				Pengadaan Pakaian Dinas berserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	-	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Presentase sarana dan prasarana kondisi baik	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	
				Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah dinas	1.960.000	
				Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	16.380.000	
				Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	4.200.000	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	-	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional	95.000.000	
		PROGAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	- Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina - Persentase Usulan Musrenbang yang terfasilitasi	Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Peningkatan kegiatan sosial masyarakat	132.000.000	



				Koordinasi pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya pelatihan dan pembinaan	20.800.000	
				Fasilitasi dan koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Peningkatan fasilitas pemerintahan tingkat kecamatan	3.000.000	
				Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang tepat waktu	11.020.000	
		PROGAM KETRENTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Ketrentaman dan Ketertiban Kecamatan Winongan	Persentase kantrantibmas yang ditangani	50.880.000	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	- Nilai IKM Kecamatan - Nilai SAKIP Kecamatan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	12.000.000	
				Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Peningkatan kegiatan tata kelola pemerintahan desa	-	
					<b>JUMLAH</b>	<b>784.000.000</b>	

Winongan, 8 Juli 2020  
CAMAT WINONGAN

Ttd.

**BASMI, S.Pd, MM**  
NIP. 19670204 199802 1 004



		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	NILAI IKM	Fasilitasi Administrasi Perangkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	-	
			NILAI SAKIP				
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / KECAMATAN	Persentase Usulan Musrenbang yang terfasilitasi	Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa Yang mengikuti Musrenbang	-	
			Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Dibina	Pelaksanaan Pembinaan Mental Spiritual dan Kegiatan Keagamaan Lainnya	Jumlah Pembinaan	-	
				Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	-	
						<b>57.655.000</b>	

Pasuruan, Juli 2020  
Camat Gempol

Ttd.

M. NUR KHOLIS,S.STP., MM

Pembina

NIP. 19800506 199912 1 001

**PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

note : mohon untuk tidak menambah/mengurangi kolom yg ada

**PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANDAAN**

<b>NO</b>	<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>OUTCOME/ TARGET</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT/ TARGET</b>	<b>PAGU KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Yang dibayar	49.685.000	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang diberi honor	49.940.000	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor yang diberi honor	58.500.000	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis belanja ATK yang dibeli	20.000.000	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis belanja barang cetakan dan penggandaan yang dilakukan	16.140.000	
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis belanja alat listrik yang dibeli	6.325.000	
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis belanja perlengkapan dan peralatan kantor yang dibeli	30.000.000	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis mamin rapat yang disediakan	110.000.000	
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah aparatur yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah	50.000.000	

				Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah Pegawai Non PNS yang diberi honor	420.200.000	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	3.600.000	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik	Pengadaan Meubelair	Jumlah jenis pengadaan mebeular	7.000.000	
				Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah jenis pengadaan	119.500.000	
				Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan yang dilaksanakan	30.000.000	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jenis kendaraan Dinas yang dipelihara	95.000.000	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara	13.000.000	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN PANDAAN	Nilai IKM dan SAKIP	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Kutorejo	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	228.000.000	
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Jogosari	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	228.000.000	
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Pandaan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	228.000.000	
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Petungasri	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	228.000.000	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel Kutorejo	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	1.070.000.000	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel Jogosari	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	919.152.000	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel Pandaan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	784.083.000	

				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel Petungasri	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	869.000.000	
				Pemberdayaan Masyarakat Kel Kutorejo	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	99.152.000	
				Pemberdayaan Masyarakat Kel Jogosari	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	250.000.000	
				Pemberdayaan Masyarakat Kel Pandaan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	385.069.000	
				Pemberdayaan Masyarakat Kel Petungasri	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	300.152.000	
				Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Jumlah aparatur desa yang memiliki keahlian pengelolaan keuangan desa	44.000.000	
				Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Terlaksananya Kegiatan Peringatan HUT Kemerdekaan RI	50.000.000	
				Penyusunan LAKIP dan Laporan Keuangan	Tersusunnya Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan	20.000.000	
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya pembinaan kepemudaan	28.300.000	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN KECAMATAN PANDAAN	Jumlah lembaga masyarakat yang terbina	Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Manaqib	55.000.000	
			Persentase usulan musrenbang yang terfasilitasi	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan	70.750.000	
				Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya forum perencanaan pembangunan	10.500.000	

				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya partisipasi bulan bakti gotong royong	1.360.000	
		PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN	Rasio Jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan	Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan kejahatan	Jumlah rapat evaluasi permasalahan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan	5.400.000	
				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	33.800.000	
						<b>6.986.608.000</b>	

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

PROGRAM DAN

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>%</b>									
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, air, dan internet selama 12 bulan	144	144 rekening-bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, air, dan internet selama 12 bulan	Administrasi Umum	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<b>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5 01 01 2.03 02
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelaku pengadaan barang/jasa	360	orang-bulan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelaku pengadaan barang/jasa	Administrasi Umum	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<b>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5 01 01 2.03 07
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	20	unit	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	Administrasi Umum	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<b>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5 01 01 2.03 13
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian ATK	46	jenis-kali	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian ATK	Administrasi Umum	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<b>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5 01 01 2.03 10
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	25	jenis-kali	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	Administrasi Umum	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<b>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5 01 01 2.03 11



STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD											PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembelian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	168	eksemplar	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pembelian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Administrasi Umum	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<b>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5 01 01 2.03 15
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat	4700	orang	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat	Administrasi Umum	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<b>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5 01 01 2.03 17
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah	45	laporan	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah	Administrasi Umum	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<b>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5 01 01 2.03 18
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak/THL	140	orang-bulan	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah pembayaran jasa kebersihan	Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran jasa kebersihan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				X XX 01 2.02 02
								Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan		Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan					
				Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pembinaan	63	orang	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan Teknis	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<b>Persentase pemenuhan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<b>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5 01 01 2.04 11
								Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<b>Persentase pemenuhan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<b>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>			5 01 01 2.04 09

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD											PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
				Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja	4	laporan	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				X XX 01 2.01 01
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				X XX 01 2.01 05
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	26	unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5 01 01 2.03 06
				Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah barang yang diasuransikan	26	unit	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah barang yang diasuransikan	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5 01 01 2.03 05
				<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik</b>	<b>100</b>	<b>%</b>									
								Pengadaan mobil jabatan		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
				Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung / kantor	16	unit	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung / kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5 01 01 2.03 24
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	35	unit/kali	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5 01 01 2.03 30

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	83	unit-kali	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5 01 01 2.03 34
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor	2	unit-kali	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5 01 01 2.03 28
	04 01 15	Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan regulasi	100	%					Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan regulasi	Perencanaan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5 01 02
				Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD dan perubahan RKPD	2	Dokumen	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan				5 01 02 2.01 01
				Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Dokumen Musrenbang RKPD	2	Dokumen	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan				5 01 02 2.01 03
Subbid Pendataan dan Pelaporan	04 01 15 03			Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah Dokumen hasil pelaporan	80	buku	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen lkpj	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaporan	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan regulasi			5 01 02 2.03 04



STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
				<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang ekonomi yang mempunyai Dokumen perencanaan yang baik</b>	<b>89</b>	<b>%</b>									
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Subbidang Pertanian	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan subbidang pertanian	4	Dokumen	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan subbidang pertanian	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam yang telah difasilitasi dan termonev	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	<b>Persentase Perangkat Daerah lingkup perekonomian dan sumber daya alam yang mempunyai Dokumen perencanaan yang baik</b>	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5 01 04 2.03 01
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Subbidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Mikro	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sektoral lingkup Subbidang Koperasi, perindustrian dan perdagangan yang sesuai ketentuan	5	Laporan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sektoral lingkup Subbidang Koperasi, perindustrian dan perdagangan yang sesuai ketentuan	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang telah difasilitasi dan termonev	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	<b>Persentase Perangkat Daerah lingkup perekonomian dan sumber daya alam yang mempunyai Dokumen perencanaan yang baik</b>	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5 01 04 2.01 01

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD											PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
				Penyusunan perencanaan pembangunan bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen perencanaan	3	Dokumen	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen perencanaan	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang telah terfasilitasi dan termonev	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	<b>Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam yang mempunyai Dokumen perencanaan yang baik</b>	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5 01 04 2.01 01
				Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang kepariwisataan penanaman modal dan ketenagakerjaan	Jumlah dokumen perencanaan pada sektor lingkup sub bidang kepariwisataan, penanaman modal dan ketenagakerjaan yang sesuai ketentuan	4	Dokumen	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen perencanaan pada sektor lingkup sub bidang kepariwisataan, penanaman modal dan ketenagakerjaan yang sesuai ketentuan	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif yang telah terfasilitasi dan termonev	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	<b>Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam yang mempunyai Dokumen perencanaan yang baik</b>	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5 01 04 2.02 01
				Penyusunan perencanaan pembangunan bidang pertanian	Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian	3	Dokumen	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam yang telah terfasilitasi dan termonev	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	<b>Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam yang mempunyai Dokumen perencanaan yang baik</b>	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5 01 04 2.03 01

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
				<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang sosial budaya yang mempunyai Dokumen perencanaan yang baik</b>	<b>92</b>	<b>%</b>					<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang sosial budaya yang mempunyai Dokumen perencanaan yang baik</b>			
				Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat	12	Laporan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang sosial budaya yang mempunyai Dokumen perencanaan yang baik	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.03.2.03.01
				Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang pendidikan dan kepemudaan	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kepemudaan	12	Laporan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kepemudaan	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kepemudaan	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang sosial budaya yang mempunyai Dokumen perencanaan yang baik	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.03.2.02.01

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD												PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019			
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
				Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang pemerintahan dan aparatur	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan dan aparatur	12	Laporan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan dan aparatur	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan dan aparatur	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang sosial budaya yang mempunyai Dokumen perencanaan yang baik		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.03.2.0 1.01
				Fasilitasi forum kabupaten sehat	Jumlah laporan hasil fasilitasi forum kabupaten sehat	12	laporan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil fasilitasi forum kabupaten sehat	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil fasilitasi forum kabupaten sehat	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang sosial budaya yang mempunyai Dokumen perencanaan yang baik	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.03.2.0 2.02
				Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sub bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang sesuai ketentuan	3	Dokumen	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sub bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang sesuai ketentuan	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sub bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang sesuai ketentuan	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang sosial budaya yang mempunyai Dokumen perencanaan yang baik	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.03.2.0 3.01
				Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kepemudaan	Dokumen perencanaan	3	Dokumen	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang sosial budaya yang mempunyai Dokumen perencanaan yang baik	PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.03.2.0 2.01





STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD											PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
subid. Perkim.				Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen yang disusun sub bidang perumahan dan permukiman	3	Dokumen	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen yang disusun sub bidang perumahan dan permukiman	Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen yang disusun sub bidang perumahan dan permukiman	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	<b>Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang prasarana wilayah yang mempunyai Dokumen perencanaan yang baik</b>			5 01 05 2.01 01
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup		Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN				5 01 05 2.01 02
								Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan		Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN				5 01 05 2.01 02
								02. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan		2.03. Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN				5 01 05 2.03 02

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD											PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
subid. Perkim.				Koordinasi Perencanaan Pengembangan Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil koordinasi sub bidang perumahan dan permukiman	24	laporan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan hasil koordinasi sub bidang perumahan dan permukiman	Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan hasil koordinasi sub bidang perumahan dan permukiman	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	<b>Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang prasarana wilayah yang mempunyai Dokumen perencanaan yang baik</b>			5 01 05 2.01 01
								Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan		Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN				5 01 05 2.01 02
Subid Praswil				Koordinasi Perencanaan Pengembangan Sarana Prasarana Wilayah di Kab. Pas.	Jumlah laporan hasil koordinasi sub bidang prasarana wilayah	24	laporan	01. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN				5 01 05 2.02 01
Subid Praswil				Koordinasi Pelaksanaan Program Hibah Jalan Daerah di Kab. Pas.	Jumlah laporan hasil koordinasi sub bidang prasarana wilayah	4	laporan	01. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN				5 01 05 2.02 01

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
Subid Praswil				Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun sub bidang prasarana wilayah	3	Dokumen	01. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Kebinarmargaan dan Perhubungan		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinarmargaan dan Perhubungan		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN				5 01 05 2.02 01
								02. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Kebinarmargaan dan Perhubungan		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinarmargaan dan Perhubungan		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN				5 01 05 2.02 02
Subid. Tata Ruang Wilayah				Koordinasi Kebijakan Pengembangan Wilayah, SD Air dan Kebencanaan	Jumlah laporan hasil koordinasi sub bidang sumber daya air dan tata ruang wilayah	24	laporan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup		Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN				5 01 05 2.01 01
								Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan		Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN				5 01 05 2.01 02



STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD											PERMENDAGR1 90 TAHUN 2019				
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
Subbid Litbang pembangunan, inovasi, dan teknologi	04 04 15 01			Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen hasil kelitbang	6	Dokumen	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	Jumlah dokumen hasil litbang	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen hasil litbang	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase peningkatan litbang	Penelitian dan Pengembangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5 05 02 1.04 04
Subbid Litbang Sosial dan Ekonomi	04 04 15 02			Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan ( >IKS; >pengelolaan dana desa/kel)	Jumlah dokumen hasil kelitbang	6	dokumen	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen hasil litbang	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen hasil litbang	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase peningkatan litbang	Penelitian dan Pengembangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5 05 02 1.01 02
								Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	Jumlah dokumen hasil litbang	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen hasil litbang	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase peningkatan litbang	Penelitian dan Pengembangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5 05 02 1.02 01
Subbid Litbang Sosial dan Ekonomi	04 04 15 03			Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan ( >lahan pasar agro purwodadi pasca jalan tol ; >IKW)	Jumlah dokumen hasil kelitbang	6	dokumen	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen hasil litbang	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil litbang	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase peningkatan litbang	Penelitian dan Pengembangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5 05 02 1.03 02
Subbid Litbang Sosial dan Ekonomi	04 04 15 04			Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil FGD	3	laporan	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah dokumen hasil litbang	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen hasil litbang	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase peningkatan litbang	Penelitian dan Pengembangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5 05 02 1.01 13

SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENCANA PD										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	Renstra	TARGET	Renstra	SATUAN	PAGU	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Bidang Urusan Penanaman Modal	Belanja tidak langsung (gaji)	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai sesuai Kualifikasi		100		%	3.716.930.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai sesuai Kualifikasi	Administrasi Keuangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN dan non ASN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Bidang Urusan Penanaman Modal	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	X XX 01 2.02 01
	2.12.2.12.01.01			Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselesainya Pelayanan Administrasi Perkantoran tepat waktu	Prosentase pemenuhan administrasi kantor	100		%	1.115.187.680									
	2.12.2.12.01.01.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terbayarnya Rekening telepon, internet, Listrik dan Sumber Daya Air.	Jumlah pembayaran listrik/air/telepon/internet	12	5 rekening/bulan	Bulan	288.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terbayarnya Rekening telepon, internet, Listrik dan Sumber Daya Air.	Administrasi Umum	Terlaksananya kegiatan administrasi umum dan kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan Daerah	Bidang Urusan Penanaman Modal		2 18 01 2.03 02
	2.12.2.12.01.01.07			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honorarium pengelola Keuangan	Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan, pengelola asset, pelaku pengadaan barang/jasa	12	10 orang/bulan	Bulan	100.080.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honorarium pengelola Keuangan	Administrasi Umum	Terlaksananya kegiatan administrasi umum dan kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2 18 01 2.03 07
	2.12.2.12.01.01.08			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya honorarium Jasa kebersihan Kantor	Jumlah pembayaran honor jasa kebersihan	12	3 orang/bulan	Bulan	76.018.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya honorarium Jasa kebersihan Kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya kegiatan administrasi umum dan kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2 18 01 2.03 08
	2.12.2.12.01.01.10			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Pengadaan alat tulis kantor	Jumlah pembelian ATK	78	78 jenis-kali	Jenis	72.072.250	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Pengadaan alat tulis kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya kegiatan administrasi umum dan kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2 18 01 2.03 10
	2.12.2.12.01.01.11			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Pengadaan barang cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	45	60 jenis	Jenis	32.602.430	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Pengadaan barang cetakan dan Penggandaan	Administrasi Umum	Terlaksananya kegiatan administrasi umum dan kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2 18 01 2.03 11
	2.12.2.12.01.01.13			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	14		Jenis	4.425.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya kegiatan administrasi umum dan kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2 18 01 2.03 13
	2.12.2.12.01.01.17			Penyediaan Makanan Dan Minuman	Terbayarnya Makanan dan Minuman Rapat/tamu	Terbayarnya makanan dan minuman rapat/tamu *	1750		Paket	28.500.000	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Terbayarnya Makanan dan Minuman Rapat/tamu	Administrasi Umum	Terlaksananya kegiatan administrasi umum dan kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2 18 01 2.03 17
	2.12.2.12.01.01.18			Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	Terbayarnya Perjalanan Dinas luar Daerah	Terbayarnya perjalanan dinas luar daerah	50	Orang / kali	Orang	50.000.000	Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	Terbayarnya Perjalanan Dinas luar Daerah	Administrasi Umum	Terlaksananya kegiatan administrasi umum dan kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2 18 01 2.03 18
	2.12.2.12.01.01.19			Penyediaan Jasa Perkantoran	Terbayarnya Honorarium pegawai PTT, THL dan tersedianya surat	Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak dan THL	14	18 bulan	Bulan	447.800.000	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Terbayarnya Honorarium pegawai PTT, THL dan tersedianya surat	Administrasi Keuangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN dan non ASN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2 18 01 2.02 02





										Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	Terbayarnya pajak kendaraan Dinas Operasional	Administrasi Umum	Terlaksananya kegiatan administrasi umum dan kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2 18 01 2.03 06
										Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya dinas operasional	Administrasi Umum	Terlaksananya kegiatan administrasi umum dan kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2 18 01 2.03 30
	2.12.2.12.01.02.29			Pemeliharaan Rutin/berkala meubeler	Terpeliharanya meubelair		1	Paket	-	Pemeliharaan Rutin/berkala meubeler	Terpeliharanya meubelair	Administrasi Umum	Terlaksananya kegiatan administrasi umum dan kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2 18 01 2.03 35
	2.12.2.12.01.02.30			Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan kantor	Terpeliharanya peralatan Kantor	Jumlah permohonan peralatan kantor	60	Unit	9.000.000	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan Kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya kegiatan administrasi umum dan kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2 18 01 2.03 34
	2.12.2.12.01.18			Program Layanan Non Perizinan	Persentase Izin permohonan nonperizinan	Persentase permohonan yang dilayani di Bidang Perizinan	100	%	2.553.437.500										
	2.12.2.12.01.18.01			Pelayanan pelaku usaha perseorangan	Jumlah permohonan non perizinan Bidang Perizinan Usaha	Jumlah pelayanan non Perizinan Usaha perseorangan yang terverifikasi	1000	Dokumen	-	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik,	Jumlah permohonan non perizinan Bidang Perizinan Usaha	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/ Kota	Jumlah permohonan perizinan dan nonperizinan yang terlayani dan terpantau pemenuhan komitmennya	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase layanan Penanaman Modal	Bidang Urusan Penanaman Modal			2 18 04 2.01 01
	2.12.2.12.01.18.02			Pelayanan pelaku usaha non perseorangan	Jumlah permohonan non perizinan Bidang Perizinan Lainnya	Jumlah pelayanan non Perizinan usaha non perseorangan yang terverifikasi	200	Dokumen	53.437.500	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah permohonan non perizinan Bidang Perizinan Lainnya	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/ Kota	Jumlah permohonan perizinan dan nonperizinan yang terlayani dan terpantau pemenuhan komitmennya	Program Pelayanan Penanaman Modal					2 18 04 2.01 02
	2.12.2.12.01.18.03			fasilitasi pelayanan publik	Jumlah pemohon yang dilayani		2000	Pemohon	2.500.000.000	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik,	Jumlah pemohon yang dilayani	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/ Kota	Jumlah permohonan perizinan dan nonperizinan yang terlayani dan terpantau pemenuhan komitmennya	Program Pelayanan Penanaman Modal					2 18 04 2.01 01
	2.12.2.12.01.21			Program Layanan Perizinan	Persentase Izin yang diterbitkan	Persentase ijin yang di terbitkan	80	%	147.546.400										
	2.12.2.12.01.21.01			Pelayanan Perizinan Fisik dan Ruang	Jumlah permohonan perizinan fisik dan ruang	Jenis perizinan fisik dan ruang yang dilayani jenis perizinan yang tepat waktu	500	Dokumen	91.548.900	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah permohonan perizinan fisik dan ruang	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/ Kota	Jumlah permohonan perizinan dan nonperizinan yang terlayani dan terpantau pemenuhan komitmennya	Program Pelayanan Penanaman Modal					2 18 04 2.01 02





STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Belanja tidak langsung (gaji)				4.446.019.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Dan Tunjangan yang dibayarkan	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	4.446.019.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan kantor	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.01.2.02.01
<b>KEPALA SEKRETARIS</b>		<b>Pilihan</b>	<b>Pariwisata</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor</b>	<b>100 %</b>		<b>2.435.000.000</b>										
Sub Bag Umum Dan Kepegawaian		Pilihan	Pariwisata	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pembayaran rek listrik, telp	12 bln		350.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pembayaran rek listrik, telp	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	350.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kantor	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.01.2.03.02
Sub Bag Penyusunan Program Dan Pelaporan				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor yang tersedia	52 jenis		65.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	65.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kantor	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.01.2.03.10
Sub Bag Penyusunan Program Dan Pelaporan				Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan Penggandaan yang tersedia	21 jenis		115.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	115.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kantor	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.01.2.03.11
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga yang tersedia	30 jenis		80.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	60.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kantor	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.01.2.03.14
													20.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kantor	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.01.2.03.25
				Penyediaan Makanan Dan Minuman	Makanan dan minuman yang tersedia	2880 org		100.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	100.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kantor	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.01.2.03.17
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah orang hari (OH) Perjalanan koordinasi luar daerah yang terpenuhi	150 OH		250.000.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah orang hari (OH) Perjalanan koordinasi luar daerah yang terpenuhi	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	250.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kantor	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.01.2.03.18
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Jasa Perkantoran yang tersedia	70 org/thn		1.275.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Administrasi yang dibayarkan	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	975.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kantor	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.01.2.02.02
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honor Pengelola Keuangan yang dibayarkan				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honor Pengelola Keuangan yang dibayarkan	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	110.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kantor	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.01.2.03.07
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor Jasa Kebersihan Kantor yang dibayarkan				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor Jasa Kebersihan Kantor yang dibayarkan	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	162.500.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kantor	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.01.2.03.08
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Bacaan yang tersedia				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Bacaan yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	27.500.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kantor	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.01.2.03.15
Sub Bag Penyusunan Program Dan Pelaporan		Pilihan	Pariwisata	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	4 laporan		200.000.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	55.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kantor	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.01.2.02.06
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan yang tersusun				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan yang tersusun	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	3.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kantor	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.01.2.02.09
				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang tersusun				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang tersusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Dan Evaluasi kinerja	37.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kantor	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.01.2.01.01
				Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan yang tersusun				Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan yang tersusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Dan Evaluasi kinerja	15.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kantor	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.01.2.01.02
				Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang tersusun				Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang tersusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Dan Evaluasi kinerja	5.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kantor	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.01.2.01.03
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Dan Evaluasi kinerja	68.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kantor	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.01.2.01.04

										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang tersusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Dan Evaluasi kinerja	17.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kantor	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.01.2.01.05
		Pilihan	Pariwisata	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Sarana Prasarana Kondisi Baik</b>	<b>100 %</b>		<b>535.000.000</b>											
		Pilihan	Pariwisata	Pengadaan Peralatan Kantor	Peralatan Kantor yang tersedia	18		70.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	44.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kantor	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.01.2.03.13	
									Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Gedung Kantor Yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	26.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kantor	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.01.2.03.22	
		Pilihan	Pariwisata	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang terpelihara dengan baik	5		140.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	30.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kantor	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.01.2.03.12	
									Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang terpelihara dengan baik	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	80.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kantor	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.01.2.03.28	
									Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara dengan baik	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	30.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kantor	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.01.2.03.32	
		Pilihan	Pariwisata	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Kendaraan dinas/ operasional yang mendapat pemeliharaan dengan baik	21		280.000.000	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang diurus/diarsikan	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	28.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kantor	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.01.2.03.05	
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	17.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kantor	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.01.2.03.06	
									Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	235.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kantor	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.01.2.03.30	
									Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	30.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kantor	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.01.2.03.09	
									Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair	Mebelair yang terpelihara dengan baik	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	15.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kantor	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.01.2.03.35	
		Pilihan	Pariwisata	<b>Progam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur</b>														
				Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0		-	0	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kantor	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.01.2.04.09
<b>BIDANG INDUSTRI PARIWISATA</b>		Pilihan	Pariwisata	<b>Program Industri Pariwisata</b>	<b>Jumlah pelaku usaha pariwisata yang tersertifikasi</b>	<b>110</b>	<b>org</b>	<b>694.050.000</b>											
Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Usaha Jasa Dan Sarana Pariwisata		Pilihan	Pariwisata	Pengawasan dan pengendalian usaha jasa dan sarana pariwisata	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian usaha jasa dan sarana pariwisata	4		250.000.000	Monitoring dan evaluasi pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Monitoring Dan Evaluasi yang dilaksanakan	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah ODTW yang terstandarisasi	75.000.000	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah kawasan ODTW yang sesuai standart	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.02.2.01.04	
									Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring Dan Evaluasi yang dilaksanakan	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan kawasan strategis pariwisata	100.000.000	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah kawasan ODTW yang sesuai standart	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.02.2.02.05	
									Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring Dan Evaluasi yang dilaksanakan	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Destinasi Pariwisata	75.000.000	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah kawasan ODTW yang sesuai standart	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.02.2.03.05	
Seksi Pengembangan SDM usaha jasa industri pariwisata		Pilihan	Pariwisata	Pengembangan SDM usaha jasa industri pariwisata	Pelaku usaha jasa industri pariwisata yang ditingkatkan	400		444.050.000	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata yang terstandarisasi	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi	120.000.000	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Sumber Daya yang dikembangkan	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.05.2.01.01	



Seksi Informasi Wisata Dan Budaya		Pilihan	Pariwisata	Peningkatan informasi wisata dan budaya	Jumlah informasi wisata dan budaya yang tersampaikan	7	keg	375.000.000	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Promosi melalui media pemasaran yang terlaksana	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasaran Dalam dan Luar Negeri	100.000.000	Program Pemasaran Pariwisata	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.03.2.01.01	
									Penyediaan Data Dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	jumlah data dan penyebaran informasi pariwisata yang tersedia	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasaran Dalam dan Luar Negeri	275.000.000	Program Pemasaran Pariwisata	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.03.2.01.03	
Peningkatan promosi dan kerjasama		Pilihan	Pariwisata	Peningkatan promosi dan kerjasama	Jumlah Promosi dan Kerja Sama yang terlaksana	10	keg	400.000.000	Facilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kegiatan Pemasaran baik dalam dan luar negeri yang terfasilitasi	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasaran Dalam dan Luar Negeri	200.000.000	Program Pemasaran Pariwisata	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.03.2.01.02	
									Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kerja sama dan kemitraan yang terlaksana	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasaran Dalam dan Luar Negeri	150.000.000	Program Pemasaran Pariwisata	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.03.2.01.04	
									Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Kemitraan masyarakat yang diberdayakan	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi	50.000.000	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Sumber Daya yang dikembangkan	Pariwisata	Pemerintahan Pilihan	3.26.05.2.01.02	
<b>BIDANG SINI DAN BUDAYA</b>		<b>Urusan Wajib Bukan</b>	<b>Kebudayaan</b>	<b>Progam Seni Dan Budaya</b>	<b>Seni dan budaya yang terpelihara</b>	<b>20</b>	<b>Jenis</b>	<b>1.180.311.163,75</b>											
Seksi Pelestarian Sejarah dan Kepurbakalaan		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pelestarian Sejarah dan Kependidikan	Jumlah cagar budaya yang terpelihara	5	keg	300.000.000	Register Cagar Budaya	Jumlah Cb yang terregister	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	jumlah Cb yang ditetapkan	25.000.000	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cb yang dilestarikan	Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2.22.03.1.01.01	
									Pencegahan dan penanggulangan dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan cagar budaya	Jumlah Cb dengan kondisi baik	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	jumlah Cb yang ditetapkan	50.000.000	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cb yang dilestarikan	Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2.22.03.1.01.02	
									Peningkatan potensi nilai, informasi dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya	Jumlah informasi, promosi dan pemanfaatan Cb yang diberikan	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	jumlah Cb yang ditetapkan	40.000.000	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cb yang dilestarikan	Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2.22.03.1.01.03	
									Peningkatan mutu dan kapasitas tenaga cagar budaya	Jumlah tenaga Cb yang terlatih	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	jumlah Cb yang ditetapkan	40.000.000	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cb yang dilestarikan	Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2.22.03.1.01.05	
									Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Terpadu	Jumlah koleksi Cb yang terlindungi	Pengelolaan Museum Provinsi	jumlah Koleksi yang dikelola dimuseum	100.000.000	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pengelolaan koleksi museum	Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2.22.06.1.01.01	
									Peningkatan mutu dan kapasitas sumber daya manusia permuseuman	Jumlah tenaga permuseuman yang terlatih	Pengelolaan Museum Provinsi	jumlah Koleksi yang dikelola dimuseum	30.000.000	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pengelolaan koleksi museum	Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2.22.06.1.01.02	
									Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum	Jumlah Sarana Dan Prasarana Museum dengan kondisi baik	Pengelolaan Museum Provinsi	jumlah Koleksi yang dikelola dimuseum	25.000.000	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pengelolaan koleksi museum	Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2.22.06.1.01.04	
				Pelestarian Budaya dan Kesenian	Jumlah event budaya dan kesenian yang terselenggara	20	keg	880.311.163,75	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Kebudayaan Yang Dikembangkan serta pemanfaatannya	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pelestarian kesenian	580.311.163,75	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Kebudayaan Yang Dikembangkan	Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2.22.02.1.02.01	
									Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, Dan Pranata Tradisional	Pembinaan SDM, Lembaga, Dan Pranata Tradisional yang dilaksanakan	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pelestarian kesenian	100.000.000	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Kebudayaan Yang Dikembangkan	Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2.22.02.1.02.02	
									Peningkatan Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah SDM Kesenian yang terlatih	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pembinaan SDM seni	200.000.000	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Kesenian Tradisional Yang Dikembangkan	Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2.22.03.1.01.01	





BIDANG SARANA DAN PRASARANA HASIL PERTANIAN		Pilihan	Pertanian	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA HASIL PERTANIAN	% Penurunan Lahan Marginal	1,18	%										
Seksi Perlindungan dan Tata Guna Lahan				Pembangunan / rehabilitasi jalan usaha tani	Panjang jalan usaha tani yang dibangun/direhab	3300	m	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan usaha tani yang dibangun/direhab	Pembangunan Prasarana Pertanian	Panjang jalan usaha tani yang dibangun/direhab	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	% Penurunan Lahan Marginal	Pertanian	Pilihan		3 27 03 2.02 03
				Fasilitasi LP2B	Dokumen pelaporan LP2B	1	dokumen	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B	Dokumen pelaporan LP2B	Pengembangan Prasarana Pertanian	Dokumen pelaporan LP2B	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	% Penurunan Lahan Marginal	Pertanian	Pilihan		3 27 03 2.01 01
Seksi Irigasi				Pembangunan / rehabilitasi irigasi air tanah	Jumlah irigasi tanah dangkal yang dibangun/direhab	12	paket	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah irigasi tanah dangkal yang dibangun/direhab	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah irigasi tanah dangkal yang dibangun/direhab	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	% Penurunan Lahan Marginal	Pertanian	Pilihan		3 27 03 2.02 09
				Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier	Panjang irigasi tersier yang dibangun/direhab	2400	m	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Panjang irigasi tersier yang dibangun/direhab	Pembangunan Prasarana Pertanian	Panjang irigasi tersier yang dibangun/direhab	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	% Penurunan Lahan Marginal	Pertanian	Pilihan		3 27 03 2.02 01
				Sekolah Lapang Tata Guna Air (SL-TGA)	Jumlah peserta SL TGA	40	orang	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah peserta SL TGA	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Pertanian	Pilihan		3 27 02 2 01 02
				Pengelolaan Lahan dan Air	Dokumen Laporan Perencanaan Pengelolaan Lahan dan Air	2	dokumen	Koordinasi dan sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dokumen Laporan Perencanaan Pengelolaan Lahan dan Air	Pengembangan Prasarana Pertanian	Dokumen Laporan Perencanaan Pengelolaan Lahan dan Air	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	% Penurunan Lahan Marginal	Pertanian	Pilihan		3 27 03 2.01 03
				Sekolah Lapang Iklim	Jumlah Kelompok tani peserta Sekolah Lapang Iklim	2	klpk tani	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Kelompok tani peserta Sekolah Lapang Iklim	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok tani peserta Sekolah Lapang Iklim	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	% Penurunan Lahan Marginal	Pertanian	Pilihan		3 27 05 2.01 02
Seksi Sarana Produksi dan Alat Mesin Pertanian				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Sarpras Pertanian	Dokumen Laporan Monitoring dan evaluasi	1	dokumen	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dokumen Laporan Monitoring dan evaluasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Dokumen Laporan Monitoring dan evaluasi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	% Penurunan Lahan Marginal	Pertanian	Pilihan		3 27 02 2.01 01
				Optimalisasi Alat Mesin Pertanian	Jumlah Anggota KT yang memiliki ketrampilan pengoperasian Alsintan	40	orang	Koordinasi dan sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Anggota KT yang memiliki ketrampilan pengoperasian Alsintan	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Anggota KT yang memiliki ketrampilan pengoperasian Alsintan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	% Penurunan Lahan Marginal	Pertanian	Pilihan		3 27 03 2 01 03
BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN		Pilihan	Pertanian	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN	% kelompok tani yang memiliki jangkauan pemasaran tingkat nasional	0,8	%										
Seksi Pengembangan Usaha				Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan di bidang agribisnis	40	orang	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan di bidang agribisnis	Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan di bidang agribisnis	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	Pertanian	Pilihan		3 27 06 2.01 03
				Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah kelompok tani agribisnis pertanian (horti dan pangan) yang naik kelas	2	klpk tani	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan desa	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan di bidang agribisnis	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Pertanian	Pilihan		3 27 07 2 01 02
Sesi Pengolahan				Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah peserta pelatihan pasca panen dan pengolahan hasil	75	orang	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah peserta pelatihan pasca panen dan pengolahan hasil	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Pertanian	Pilihan		3 27 02 2 01 02

Seksi Pemasaran				Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/perkebunan Unggul Daerah	Frekuensi promosi produk unggulan pertanian dan perkebunan tingkat nasional dan regional	20	kali	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Frekuensi promosi produk unggulan pertanian dan perkebunan tingkat nasional dan regional	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Pertanian	Pilihan	3 27 02 2 01 02
BIDANG PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		Pilihan	Pertanian	PROGRAM PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	% Peningkatan produksi Tanaman pangan dan hortikultura	0,5	%									
Seksi Produksi Tanaman Pangan				Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	Jml klpk tani penerima kegiatan intensifikasi kedelai	0	klpk tani									
				Pengembangan Perbinaan/perbibitan	Tersedianya Benih Padi, Palawija	600	kg	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Tersedianya Benih Padi, Palawija	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Pertanian	Pilihan	3 27 02 2 01 01
				Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	Jml klpk tani penerima kegiatan intensifikasi Tanaman Pangan	4	klpk tani	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jml klpk tani penerima kegiatan intensifikasi Tanaman Pangan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Pertanian	Pilihan	3 27 02 2 01 01
				Pelatihan Penerapan Teknologipertanian/perkebunan Modern Bercocok Tanam	Jml kelompok tani peserta pelatihan metode tanam SRI	13	klpk tani	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jml kelompok tani peserta pelatihan metode tanam SRI	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Pertanian	Pilihan	3 27 02 2 01 02
Seksi Produksi Tanaman Hortikultura				Pengembangan Tanaman Sayuran Organik	Jml kelompok tani penerima pengembangan sayuran organik	2	klpk tani	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jml kelompok tani penerima pengembangan sayuran organik	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Pertanian	Pilihan	3 27 02 2 01 01
				Pengembangan agribis hortikultura	Jml Bibit yang diberikan ke masyarakat	14.000	batang	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jml Bibit yang diberikan ke masyarakat	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Pertanian	Pilihan	3 27 02 2 01 01
				Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian	Jumlah Benih kentang yang bersertifikasi	75.000	knol	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Benih kentang yang bersertifikasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Pertanian	Pilihan	3 27 02 2 01 01
				Fasilitas Pengembangan Kawasan Agropolitan	Jumlah peserta Pelatihan Perbanyak Bibit tanaman hortikultura	0	orang									
				Sosialisasi Penggunaan Benih Unggul Bersertifikat Tanaman Hortikultura	Jumlah Bibit kentang Bersertifikat yang diserahkan kpd masyarakat	0	knol									
				Pengelolaan Kebun Bibit Dinas Hortikultura	Jml Kebun dinas hortikultura yang dikelola	2	unit	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jml Kebun dinas hortikultura yang dikelola	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Pertanian	Pilihan	3 27 02 2 01 01



STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Belanja tidak langsung (gaji)				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				X XX 01 2.02 01
				<b>Program Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja</b>	<b>% Rasio Penduduk yang bekerja</b>	<b>86</b>	<b>%</b>									
				Penempatan dan Bursa Kerja	Jumlah Peserta Pencari Kerja	4500 Pencari Kerja	Orang	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota						2 07 04 2.01 01
								Pelayanan antar Kerja								2 07 04 2.01 02
								Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja								2 07 04 2.01 03
								Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan								2 07 04 2.01 04
								Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						2 07 04 2.02 01
								Pengawasan dan Pengendalian LPTKS								2 07 04 2.02 02
								Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						2 07 04 2.03 01
								Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online								2 07 04 2.03 02
								Job Fair/Bursa Kerja								2 07 04 2.03 03
				Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Peserta Pelatihan	120 Orang	Peserta	Pelayanan antar Kerja								2 07 04 2.04 01
				Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Transmigrasi		2	KK	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				2 07 04 2.04 01
								Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran								2 07 04 2.04 02
								Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan								2 07 04 2.04 03
								Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi						3 32 02 2.01 01



				<b>Program Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase penanganan kasus hubungan industrial yang diselesaikan/anjuran</b>	<b>80</b>	<b>%</b>											
				Koordinasi dan Upaya Upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Kasus yang di tangani	100 Kasus	Kasus	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					2 07 05 2.02 01	
								Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										2 07 05 2.02 02
				Pelayanan dan Pembinaan Peryaratan Kerja dan Kelembagaan	Jumlah Pelayanan Ketenagakerjaan	12 Bulan	Pendaftar	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							2 07 05 2.01 01	
								Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan										2 07 05 2.01 02
								Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja										2 07 05 2.01 03
				Koordinasi dan Pembinaan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Usulan UMK dan Survey KHL	Usulan UMK, 12 Kali	Usulan	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota										
				<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	<b>Persentase Peserta Pelatihan yang menjadi wirausaha baru</b>	<b>10</b>	<b>%</b>											
					<b>% Peserta Pelatihan yang lulus uji Kompetensi</b>													
				Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Kelembagaan Pelatihan	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Sarana Prasarana	1 Unit	Pelayanan UPT LKD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						



				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran listrik/air / telepon	12 Bulan	Bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				X XX 01 2.03 02
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit	Unit	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				X XX 01 2.03 07
				Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pembayaran pajak kendaraan	15 Kendaraan	Kendaraan	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				X XX 01 2.03 10
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan pengelola kegiatan	12 Bulan	Bulan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				X XX 01 2.03 11
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pembelian ATK	4 Kali	Kali	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				X XX 01 2.03 13
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	2000 Eksemplar	Eksemplar	Penyediaan Makanan dan Minuman		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				X XX 01 2.03 17
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan Rapat dan Tamu	15 Kali	kotak	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				X XX 01 2.03 18
				Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar daerah	50 Kali	Kali									
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Honor Tenaga Kontrak/THL	12 Bulan	Bulan									
				Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah Peserta Bimtel	5 orang	orang									
				Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Laporan Kinerja Tribunal dan Tahunan	1 DPA, 1 RENJA, 1 LAKIP	Dokumen									
				<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Sarpras Kondisi Baik</b>	<b>100</b>	<b>%</b>									
				Pengadaan Mebelair	Jumlah Pengadaan Mebelair	<b>3 Unit</b>	Unit	Pengadaan Mebeleur		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				X XX 01 2.03 25
				Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	<b>1 Kali</b>	Kali	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				X XX 01 2.03 28
				Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas	<b>12 Kali</b>	Kali	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				X XX 01 2.03 30





STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	PAGU PROGRAM	URUSAN	KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Belanja tidak langsung (gaji)					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Administrasi Keuangan		17.506.657.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					X XX 01 2.02 01
<b>Sekretariat</b>																				
Kasubag Sungram									Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		41.000.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		41.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
									Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah											
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
<b>Sekretariat</b>				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Outcome : Prosentase pemenuhan pelayanan kantor	100	%													
Subag Umum dan Kepegawaian		Pilihan	Pertanian	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah pembayaran listrik, telpon dan air	63	rek/bln		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah pembayaran listrik, telpon dan air	186.000.000	Administrasi Umum		552.682.350	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pertanian		Pilihan	5.01.01.2.03.02
Subag Keuangan		Pilihan	Pertanian	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan	33	org/bln		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan	115.000.000	Administrasi Umum			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pertanian		Pilihan	X.XX.01.2.03.07
Subag Umum dan Kepegawaian		Pilihan	Pertanian	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian atk	24	jenis		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian atk	30.000.000	Administrasi Umum			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pertanian		Pilihan	X.XX.01.2.03.10
Subag Umum dan Kepegawaian		Pilihan	Pertanian	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	14	jenis		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	25.000.000	Administrasi Umum			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pertanian		Pilihan	X.XX.01.2.03.11
Subag Umum dan Kepegawaian		Pilihan	Pertanian	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	5	jenis		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	60.000.000	Administrasi Umum			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pertanian		Pilihan	X.XX.01.2.03.13
Subag Umum dan Kepegawaian		Pilihan	Pertanian	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah rapat dan tamu	48	kali		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah rapat dan tamu	30.000.000	Administrasi Umum			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pertanian		Pilihan	X.XX.01.2.03.17
Subag Umum dan Kepegawaian		Pilihan	Pertanian	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	120	laporan		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	106.682.350	Administrasi Umum			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pertanian		Pilihan	X.XX.01.2.03.18



Seksi Perbibitan		Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pengembangan Perbibitan Ternak	jumlah akseptor yang dilayani (ekor)	45000	ekor		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	jumlah akseptor yang dilayani (ekor)	140.000.000	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah akseptor yang dilayani (ekor)	140.000.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Pertanian		Pilihan	3 27 02
									Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan		25.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota		90.500.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Pertanian		Pilihan	3 27 02
									Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan		65.500.000									
									Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak		60.000.000	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota		60.000.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Pertanian		Pilihan	3 27 03
Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak		Pilihan	Pertanian	Penyebaran dan Pengembangan Ternak	Jml peternak yang dibina	800 orang			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Output : - Jml peternak yang dibina	150.000.000	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jml peternak yang dibina	230.000.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Pertanian		Pilihan	3 27 02
									Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		80.000.000									
									Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum		71.500.000	Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum		71.500.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Pertanian		Pilihan	3 27 03
Seksi Pakan dan teknologi ternak		Pilihan	Pertanian	Peningkatan produksi dan introduksi teknologi pakan ternak	Jml sampel pakan yang diuji	80	sampel		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jml sampel pakan yang diuji	65.180.968	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jml sampel pakan yang diuji	245.180.968	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Pertanian		Pilihan	3 27 02



		Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pengembangan Kawasan Agropolitan	Jumlah kelompok yang dibina	10	kelompok		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP 2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/K P2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L CP2B	Output : Jumlah kelompok yang dibina	99.908.384	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah kelompok yang dibina	99.908.384	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Pertanian		Pilihan	3 27 03
		Pilihan	Pertanian	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Peningkatan jumlah kel. tani yg memiliki usaha pengolahan hasil ternak	5	kelompok													
Kasi Pasca panen dan promosi		Pilihan	Pertanian	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (Pembinaan/Pelatihan Pengolahan Hasil Ternak)	Jlmh. Kelompok yang dibina	10	kelompok		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Pembinaan/Pelatihan Pengolahan Hasil Ternak)	Jumlh. Peserta yang mengikuti pelatihan pasca panen	500.000.000		Jumlh. Peserta yang mengikuti pelatihan pasca panen	500.000.000	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Pangan		Wajib	2.09 03
<b>Bidang Kesehatan Hewan</b>		Pilihan	Pertanian	Program Kesehatan Hewan	Prosentase kematian ternak : besar, kecil, unggas(%)	< 0,2 % < 0,3 % < 2,0 %				Prosentase kematian ternak : besar, kecil, unggas(%)			Prosentase kematian ternak : besar, kecil, unggas(%)							
					Jumlah usaha hasil ternak yang terbina (unit)	40				Jumlah usaha hasil ternak yang terbina (unit)			Jumlah usaha hasil ternak yang terbina (unit)							
Seksi Pengamatan, pencegahan dan pengawasan obat hewan		Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pengamatan, Pencegahan Penyakit dan pengawasan obat hewan	Jumlah movev pengawasan peredaran obat hewan	40	kegiatan		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Out put : Jumlah movev pengawasan peredaran obat hewan	187.625.000	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah movev pengawasan peredaran obat hewan	187.625.000	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Pertanian		Pilihan	3 27 04
									Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan		2.000.000	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer		2.000.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Pertanian		Pilihan	3 27 02

Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan		Pilihan	Pertanian	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah rekomendasi/sertifikat kesehatan hewan	240	sertifikat		Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Output : Jumlah rekomendasi/sertifikat kesehatan hewan	125.450.000	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi/ sertifikat kesehatan hewan	145.910.000	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Pertanian		Pilihan	3 27 04
									Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan		20.460.000									
Seksi Kesmavet		Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pembinaan Kesmavet	Output : Jmlh. Rekomendasi/sertifikat PAH yang ASUH	120	sertifikat		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Output : Jmlh. Rekomendasi/sertifikat PAH yang ASUH	11.175.291	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Output : Jmlh. Rekomendasi/sertifikat PAH yang ASUH	117.530.291	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Pertanian		Pilihan	3 27 04
					- jumlah unit usaha produk asal hewan yang dibina	40	unit		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	- jumlah unit usaha produk asal hewan yang dibina	80.355.000									
									Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner		26.000.000									
UPTD Rumah Pemotongan Hewan		Pilihan	Pertanian	Pelayanan UPTD Rumah Pemotongan Hewan	Output : Jmlh. Ternak sapi yang dipotong	6700	ekor		Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jmlh. Ternak sapi yang dipotong	351.375.000	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jmlh. Ternak sapi yang dipotong	351.375.000	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Pertanian		Pilihan	3 27 04
UPTD Pusat Kesehatan Hewan		Pilihan	Pertanian	Kegiatan Pelayanan UPTD Pusat Kesehatan Hewan	Jumlah ternak yang dilayani	25.000	ekor		Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah ternak yang dilayani	33.405.000	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ternak yang dilayani	150.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Pertanian		Pilihan	3 27 04
									Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		116.595.000									
<b>Bidang Ketahanan Pangan</b>		Wajib	Pangan	Program Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian	Pencapaian skor pola pangan harapan dan Jumlah kel tani yg naik kelas	85 45 kel				Pencapaian skor pola pangan harapan dan Jumlah kel tani yg naik kelas			Pencapaian skor pola pangan harapan dan Jumlah kel tani yg naik kelas							

Seksi Pengankaragaman dan konsumsi pangan		Wajib	Pangan	Pengembangan Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Jumlah kawasan rumah pangan lestari yang dibina	25	desa		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah kawasan rumah pangan lestari yang dibina	5.547.000	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah kawasan rumah pangan lestari yang dibina	234.000.000	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Pangan		Wajib	2.09 03
					Jumlah bimtek mutu keamanan pangan	7	unit		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah bimtek mutu keamanan pangan	228.453.000		Jumlah bimtek mutu keamanan pangan							
					Jumlah bimtek olahan pangan B2SA	8	unit													
									Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		16.000.000	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		16.000.000	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Pangan		Wajib	2.09 05
Seksi Ketersediaan, kerawanan dan distribusi pangan		Wajib	Pangan	Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan	jumlah lembaga distribusi pangan masyarakat yang dibina	10	unit		Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	jumlah lembaga distribusi pangan masyarakat yang dibina	-	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga distribusi pangan masyarakat yang dibina	25.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		Pangan		Wajib	2.09 01
									Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur		-									
									Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		-									
									Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan		25.000.000									
									Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		27.023.000	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan		133.785.333	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Pangan		Wajib	2.09 03



									Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan		33.153.000									
									Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia		73.609.333									
		Wajib	Pangan	Pengembangan Ketersediaan dan penanganan rawan pangan	jenis data yang disusun (NBM, Data Pangan, FSVA, SKPG)	4	laporan		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	jenis data yang disusun (NBM, Data Pangan, FSVA, SKPG)	-	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	jenis data yang disusun (NBM, Data Pangan, FSVA, SKPG)	-	PROGRAM PENANGANAN KERAWANGAN PANGAN		Pangan		Wajib	2,09 04
					jumlah bimtek kawasan mandiri pangan	4	desa		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah bimtek kawasan mandiri pangan	91.580.000	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah bimtek kawasan mandiri pangan	91.580.000			Pangan		Wajib	
Seksi Bina Penyuluhan		Pilihan	Pertanian	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh dan penerapan teknologi pertanian	Jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan	120	orang		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan	-	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan	-	3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Pertanian		Pilihan	
					Out put : Jumlah kaji terap yang dilaksanakan	14	kegiatan		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah kaji terap yang dilaksanakan	-	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah kaji terap yang dilaksanakan	-	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Pertanian		Pilihan	3 27 03
Seksi Bina Penyuluhan		Pilihan	Pertanian	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Out put : Jumlah kelompok tani yang dibina	40	kelompok		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah pelatihan yang diikuti penyuluh	158.530.000	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelatihan yang diikuti penyuluh	904.000.000	3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Pertanian		Pilihan	3 27 07
					Out put : Jumlah pelatihan yang diikuti penyuluh	52	kegiatan		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang dibina	745.470.000		Jumlah kelompok tani yang dibina							
									Pembentukan Badan Usaha Milik Petani		-									
									Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya		-	Pembangunan Prasarana Pertanian		-	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Pertanian		Pilihan	3 27 03

7.434.000.000

7.434.000.000

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	PAGU URUSAN	URUSAN	KODE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Belanja tidak langsung (gaji)				9.600.328.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	9.600.328.000	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	12.936.982.326	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan		Urusan Pemerintah Pilihan	XXX 01 2.02 01
SEKRETARIAT	3.06.3.06.01.01.01	Sekretariat		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	100	%	4.149.904.891							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	14.290.328.000	Urusan Pemerintah Pilihan	XXX 01 2.03
SUBBAG. UMUM & KEPPEG	3.06.3.06.01.01.01.02	Sekretariat	Perdagangan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Listrik, Air, Telepon dan Internet	54	rekening-bin	267.336.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Listrik, Air, Telepon dan Internet	267.336.000	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	1.325.985.674	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan		Urusan Pemerintah Pilihan	X.XX.01.2.03.02
SUBBAG. UMUM & KEPPEG	3.06.3.06.01.01.01.03	Sekretariat	Perdagangan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26	jenis	90.120.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.120.600	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	1.325.985.674	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan		Urusan Pemerintah Pilihan	XXX 01 2.03 13
SUBBAG. UMUM & KEPPEG	3.06.3.06.01.01.01.07	Sekretariat	Perdagangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pembayaran Honor Pengelola Keuangan, Pengelola Aset, Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa	33	org-bin	66.571.200	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran Honor Pengelola Keuangan, Pengelola Aset, Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa	66.571.200	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	1.325.985.674	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan		Urusan Pemerintah Pilihan	XXX 01 2.03 07
SUBBAG. UMUM & KEPPEG	3.06.3.06.01.01.01.10	Sekretariat	Perdagangan	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor	40	jenis	64.276.200	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor	64.276.200	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	1.325.985.674	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan		Urusan Pemerintah Pilihan	XXX 01 2.03 10
SUBBAG. UMUM & KEPPEG	3.06.3.06.01.01.01.11	Sekretariat	Perdagangan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	15	jenis	93.891.780	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	93.891.780	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	1.325.985.674	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan		Urusan Pemerintah Pilihan	XXX 01 2.03 11
SUBBAG. UMUM & KEPPEG	3.06.3.06.01.01.01.17	Sekretariat	Perdagangan	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan Rapat dan Tamu	49	kali	73.081.440	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan Rapat dan Tamu	73.081.440	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	1.325.985.674	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan		Urusan Pemerintah Pilihan	XXX 01 2.03 17
SUBBAG. UMUM & KEPPEG	3.06.3.06.01.01.01.18	Sekretariat	Perdagangan	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi	245	laporan	130.613.345	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi	130.613.345	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	1.325.985.674	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan		Urusan Pemerintah Pilihan	XXX 01 2.03 18
SUBBAG. UMUM & KEPPEG	3.06.3.06.01.01.01.10	Sekretariat	Perdagangan	Penyediaan jasa perkantoran	Jumlah Pembayaran Honor Tenaga Kontrak dan THL	232	org-bin	3.272.814.326	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honor Tenaga Kontrak dan THL	3.272.814.326	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	12.936.982.326	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan		Urusan Pemerintah Pilihan	XXX 01 2.02 02
SUBBAG. PENYUSUNAN PROG & PELAPORAN	3.06.3.06.01.01.01.21	Sekretariat	Perdagangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Rencana dan Laporan Kerja SKPD	2	dokumen	91.200.000	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Renstra dan Renja	9.120.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	27.360.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan		Urusan Pemerintah Pilihan	XXX 01 2.01 01
									Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Penyusunan Program dan Kegiatan	9.120.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	27.360.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan		Urusan Pemerintah Pilihan	XXX 01 2.01 02
									Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	9.120.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	27.360.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan		Urusan Pemerintah Pilihan	XXX 01 2.01 03

SUBBAG. KEUANGAN	3.06.3.06.01.01.01.21	Sekretariat	Perdagangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Rencana dan Laporan Kerja SKPD	2	dokumen		Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Verifikasi	9.120.000	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	12.936.982.326	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	-	Urusan Pemerintah Pilihan	XX 01 2.02 03
									Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	9.120.000	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	12.936.982.326	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	-	Urusan Pemerintah Pilihan	XX 01 2.02 04
									Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Pemeriksaan Laporan Keuangan	9.120.000	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	12.936.982.326	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	-	Urusan Pemerintah Pilihan	XX 01 2.02 05
									Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.120.000	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	12.936.982.326	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	-	Urusan Pemerintah Pilihan	XX 01 2.02 06
									Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Bulanan/Semesteran	9.120.000	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	12.936.982.326	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	-	Urusan Pemerintah Pilihan	XX 01 2.02 07
									Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	9.120.000	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	12.936.982.326	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	-	Urusan Pemerintah Pilihan	XX 01 2.02 08
									Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	9.120.000	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	12.936.982.326	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	-	Urusan Pemerintah Pilihan	XX 01 2.02 09
SEKRETARIAT	3.06.3.06.01.01.02	Sekretariat		Program Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarpras Kondisi Baik	100	%	540.095.109							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	-	Urusan Pemerintah Pilihan	XX 01 2.03
SUBBAG. UMUM & KEPPEG	3.06.3.06.01.01.02.10	Sekretariat	Perdagangan	Pengadaan Mebelair	Jumlah Pengadaan Mebelair	3	unit	20.160.000	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebelair	20.160.000	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	1.325.985.674	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	-	Urusan Pemerintah Pilihan	XX 01 2.03 25
SUBBAG. UMUM & KEPPEG	3.06.3.06.01.01.02.11	Sekretariat	Perdagangan	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	3	unit	170.895.690	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	170.895.690	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	1.325.985.674	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	-	Urusan Pemerintah Pilihan	XX 01 2.03 13
SUBBAG. UMUM & KEPPEG	3.06.3.06.01.01.02.22	Sekretariat	Perdagangan	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	7	unit	47.233.779	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	47.233.779	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	1.325.985.674	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	-	Urusan Pemerintah Pilihan	XX 01 2.03 28
SUBBAG. UMUM & KEPPEG	3.06.3.06.01.01.02.11	Sekretariat	Perdagangan	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	8	unit-kali	270.845.640	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	270.845.640	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	1.325.985.674	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	-	Urusan Pemerintah Pilihan	XX 01 2.03 30
SUBBAG. UMUM & KEPPEG	3.06.3.06.01.01.02.30	Sekretariat	Perdagangan	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	24	unit-kali	30.960.000	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	30.960.000	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	1.325.985.674	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	-	Urusan Pemerintah Pilihan	XX 01 2.03 34
		Urusan Pemerintahan Pilihan																		
BIDANG INDUSTRI	3.06.3.06.01.01.28	Urusan Perindustrian	Perindustrian	Program Peningkatan Industri	Persentase Peningkatan IKM Yang Terbina	2,28	%	1.000.000.000							PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan IKM yang Terbina	Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian	1.000.000.000	Perindustrian	3 31 02



	3.06.3.06.01.01.24.02	Usuran Perindustrian	Perindustrian	Bantuan Sarana Produksi, Bibit/ Benih Perkebunan, Ternak bagi Masyarakat/ Kelompok Masyarakat (Bantuan Peralatan untuk Usaha Mandiri bagi Masyarakat)	Jumlah Bantuan Peralatan Produksi	14	kelompok masyarakat/ yayasan	1.310.950.000												
		Usuran Pemerintahan Pilihan																		
<b>BIDANG PERDAGANGAN</b>	3.06.3.06.01.01.29	Usuran Perdagangan		<b>PROGRAM PERDAGANGAN</b>	<b>Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal</b>	2,53	%	<b>560.000.000</b>										<b>120.000.000</b>	Perdagangan	3 30 04
																		<b>390.000.000</b>	Perdagangan	3 30 05
																		<b>50.000.000</b>	Perdagangan	3 30 07
SEKSI PENINGKATAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	3.06.3.06.01.01.29.01	Usuran Perdagangan		Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	Kontribusi Hasil Perdagangan Dalam Daerah	9	%	<b>120.000.000</b>	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Kegiatan Pengawasan Bapokting	<b>60.000.000</b>	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Kegiatan Pengawasan Bapokting	<b>60.000.000</b>	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	Usuran Pemerintah Bidang Perdagangan	-	Perdagangan	3 30 04 3 30 04 2.02 3 30 04 2.02 01
									Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Kegiatan Pengawasan Pupuk Bersubsidi	<b>60.000.000</b>	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi	<b>60.000.000</b>	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	Usuran Pemerintah Bidang Perdagangan	-	Perdagangan	3 30 04 3 30 04 2.03 3 30 04 2.03 03
SEKSI PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	3.06.3.06.01.01.29.02	Usuran Perdagangan		Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	Peningkatan Nilai Ekspor	2	%	<b>120.000.000</b>	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan pelatihan ekspor bagi eksportir pemula	<b>70.000.000</b>	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelatihan ekspor bagi eksportir pemula	<b>390.000.000</b>	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Peningkatan Nilai Ekspor	Usuran Pemerintah Bidang Perdagangan	-	Perdagangan	3 30 05 3 30 05 2.01 3 30 05 2.01 01
									Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah peserta kegiatan isu-isu perdagangan internasional	<b>50.000.000</b>	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan isu-isu perdagangan internasional	<b>390.000.000</b>	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Peningkatan Nilai Ekspor	Usuran Pemerintah Bidang Perdagangan	-	Perdagangan	3 30 05 3 30 05 2.01 3 30 05 2.01 06
SEKSI FASILITASI DAN KEMITRAAN	3.06.3.06.01.01.29.03	Usuran Perdagangan		Fasilitasi dan Kemitraan	Peningkatan Pelaku Usaha Dalam Pengembangan Pasar	10	%	<b>320.000.000</b>	Pameran Dagang Nasional	Jumlah peserta pameran nasional	<b>150.000.000</b>	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pameran nasional	<b>390.000.000</b>	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Pelaku IKM Yang Mengikuti Promosi Dagang	Usuran Pemerintah Bidang Perdagangan	-	Perdagangan	3 30 05 3 30 05 2.01 3 30 05 2.01 02
									Pameran Dagang Lokal	Jumlah peserta pameran lokal	<b>100.000.000</b>	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pameran lokal	<b>390.000.000</b>	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Pelaku IKM Yang Mengikuti Promosi Dagang	Usuran Pemerintah Bidang Perdagangan	-	Perdagangan	3 30 05 3 30 05 2.01 3 30 05 2.01 03

										Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah peserta kegiatan misi dagang (TEI)	20.000.000	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan misi dagang (TEI)	390.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Pelaku KM Yang Mengikuti Promosi Dagang	Usuran Pemerintah Bidang Perdagangan		-	Perdagangan	3 30 05 3 30 05 2.01 3 30 05 2.01 04
										Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan peningkatan kemitraan bagi pelaku usaha kecil	25.000.000	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah kegiatan peningkatan kemitraan bagi pelaku usaha kecil	50.000.000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan omzet pemasaran produk dalam negeri	Usuran Pemerintah Bidang Perdagangan		-	Perdagangan	3 30 07 3 30 07 2.01 3 30 07 2.01 02
										Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan pembinaan PKL	25.000.000	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah kegiatan pembinaan PKL	50.000.000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan omzet pemasaran produk dalam negeri	Usuran Pemerintah Bidang Perdagangan		-	Perdagangan	3 30 07 3 30 07 2.01 3 30 07 2.01 02
<b>BIDANG PENGELOLAAN PASAR</b>	<b>3.06.3.06.01.01.30</b>	<b>Usuran Perdagangan</b>	<b>Perdagangan</b>	<b>Program Pengelolaan Pasar</b>	<b>Jumlah Pasar Rakyat Berbasis Elektronik</b>	<b>3</b>	<b>unit</b>	<b>550.000.000</b>								PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase peningkatan hak sewa tempat pasar dan pusat perbelanjaan yang menjadi kewenangan	Usuran Pemerintah Bidang Perdagangan		50.000.000	Perdagangan	3 30 02
																PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah pasar rakyat yang berbasis elektronik	Usuran Pemerintah Bidang Perdagangan		500.000.000	Perdagangan	3 30 03
SEKSI PENINGKATAN OPERASIONAL DAN PEMANFAATAN PASAR	3.06.3.06.01.01.30.01	Usuran Perdagangan	Perdagangan	Peningkatan Operasional dan Pemanfaatan Pasar	Operasional dan Pemanfaatan Pasar Yang Menjadi Kewenangan	14	pasar rakyat	250.000.000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pedagang yang mengajukan hak sewa tempat pasar dan pusat perbelanjaan yang menjadi kewenangan	200.000.000	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Jumlah unit pasar yang mengajukan hak sewa tempat pasar dan pusat perbelanjaan yang menjadi kewenangan	250.000.000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar Rakyat Berbasis Elektronik	Usuran Pemerintah Bidang Perdagangan		-	Perdagangan	3 30 03 3 30 03 2.02 3 30 03 2.02 01	
										Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik	Jumlah pedagang pasar yang dibina	50.000.000	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah unit pasar yang terbina	50.000.000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase peningkatan hak sewa tempat pasar dan pusat perbelanjaan yang menjadi kewenangan	Usuran Pemerintah Bidang Perdagangan		-	Perdagangan	3 30 02 3 30 02 2.01 3 30 02 2.01 01
SEKSI PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PASAR	3.06.3.06.01.01.30.02	Usuran Perdagangan	Perdagangan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah Pasar Rakyat Yang Berdaya Saing	2	unit	250.000.000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarpras Pasar Rakyat yang akan di Revitalisasi	250.000.000	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang direvitalisasi	250.000.000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar Rakyat Berbasis Elektronik	Usuran Pemerintah Bidang Perdagangan		-	Perdagangan	3 30 03 3 30 03 2.01 3 30 03 2.01 01	
SEKSI PEMBINAAN DAN KETERTIBAN PASAR	3.06.3.06.01.01.30.03	Usuran Perdagangan	Perdagangan	Pembinaan dan Ketertiban Pasar	Terciptanya Pasar Rakyat Yang Tertib dan Tertata Sesuai Zonasi	14	pasar rakyat	50.000.000	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pedagang yang tertib dan tertata	50.000.000	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Jumlah unit pasar yang tertib dan tertata	250.000.000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar Rakyat Berbasis Elektronik	Usuran Pemerintah Bidang Perdagangan		-	Perdagangan	3 30 03 3 30 03 2.02 3 30 03 2.02 02	
<b>BIDANG METROLOGI LEGAL</b>	<b>3.06.3.06.01.01.31</b>	<b>Usuran Perdagangan</b>	<b>Perdagangan</b>	<b>Program Kemetrolgian Legal</b>	<b>Rasio Pelayanan Tera/ Tera Ulang yang Diterbitkan terhadap Seluruh Pengajuan</b>	<b>1</b>	<b>Rasio</b>	<b>200.000.000</b>								PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase layanan tera tera ulang terhadap potensi UTPP di Kabupaten	Usuran Pemerintah Bidang Perdagangan		200.000.000	Perdagangan	3 30 06
SEKSI STANDARISASI DAN PELAYANAN KEMETROLOGIAN LEGAL	3.06.3.06.01.01.31.01	Usuran Perdagangan	Perdagangan	Standarisasi dan Pelayanan Kemetrolgian Legal	Jumlah UTPP Bertanda Tera Sah	17.898	uttp	100.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah layanan tera tera ulang	100.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah unit UTPP yang tertera	200.000.000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase layanan tera tera ulang terhadap potensi UTPP di Kabupaten	Usuran Pemerintah Bidang Perdagangan		-	Perdagangan	3 30 06 3 30 06 2.01 3 30 06 2.01 01	

SEKSI PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN KEMETROLOGIAN LEGAL	3.06.3.06.01.01.31.02	Urusan Perdagangan	Perdagangan	Pengawasan dan Penyidikan Kemetrologian Legal	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap Penggunaan Alat Ukur	24	kecamatan	50.000.000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pengawasan UTTP	50.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah unit UTTP yang terawasi	200.000.000	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase layanan tera ulang terhadap potensi UTTP di Kabupaten	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	-	Perdagangan	3 30 06 3 30 06 2.01 3 30 06 2.01 02
SEKSI SARANA DAN PENYULUHAN KEMETROLOGIAN LEGAL	3.06.3.06.01.01.31.03	Urusan Perdagangan	Perdagangan	Sarana dan Penyuluhan Kemetrologian Legal	Data Pemilik UTTP	50	titik lokasi	50.000.000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah penyuluhan terhadap wajib tera ulang (WTU)	50.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah wajib tera ulang (WTU) tersosialisasi	200.000.000	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase layanan tera ulang terhadap potensi UTTP di Kabupaten	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	-	Perdagangan	3 30 06 3 30 06 2.01 3 30 06 2.01 02
								19.544.911.140			16.600.328.000							16.600.328.000		

## SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

## PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bidang Perikanan Budidaya				Program Perikanan Budidaya	Persentase produksi perikanan budidaya	7	%					<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Persentase produksi perikanan budidaya	03.	25.	03.
						20.232,78	ton									
UPT Budidaya Air Tawar				Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah benih ikan	3.026.000,00	ekor	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah benih ikan; Nilai IKM BBI	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah laporan pengelolaan pembudidayaan ikan yang disusun			03.	25.	03. 2.04 07
					Nilai IKM BBI	83,30										
Seksi Pengelolaan Kawasan dan Sarana Prasarana Budidaya				Kegiatan Pengelolaan Kawasan dan Sarana Prasarana Budidaya	Jumlah sarana dan prasarana budidaya yang terfasilitasi program	200	ha	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah prasarana budidaya yang terfasilitasi program	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah laporan pengelolaan pembudidayaan ikan yang disusun			03.	25.	03. 2.04 06
					Jumlah sarana dan prasarana BBI yang dibangun/ direhabilitasi	2.543,00	unit	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana budidaya yang terfasilitasi program	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah laporan pengelolaan pembudidayaan ikan yang disusun			03.	25.	03. 2.04 02
					Jumlah pembudidaya ikan yang dibina	2,00	orang									
Seksi Budidaya dan Perbenihan				Kegiatan Budidaya dan Perbenihan	Jumlah pembudidaya yang bersertifikat CBIB	900,00	orang	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya yang bersertifikat CBIB	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah laporan pemberdayaan pembudaya ikan yang disusun			03.	25.	03. 2.02 01
					Jumlah paket bantuan budidaya yang diberikan	15,00	paket	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pembudidaya yang terfasilitasi program	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah laporan pengelolaan pembudidayaan ikan yang disusun			03.	25.	03. 2.04 03
					Jumlah pembudidaya yang dibina	19,00	orang	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data dan informasi pembudidayaan yang disusun	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah laporan pengelolaan pembudidayaan ikan yang disusun			03.	25.	03. 2.04 01



Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya				Kegiatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya	Persentase penurunan luasan lahan produksi yang terserang hama penyakit	10,00	%	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan luasan lahan produksi yang terserang hama penyakit	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah laporan pengelolaan pembudidayaan ikan yang disusun			03.	25.	03. 2.04 04
					Jumlah kaji terap teknologi perikanan budidaya yang dilakukan	5,00	kaji terap	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah transfer teknologi yang tersampaikan	Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil	Jumlah laporan pemberdayaan pembudaya ikan ikan yang disusun			03.	25.	03. 2.02 04
					Jumlah pembudidaya yang dibina	390,00	orang									
Bidang Kenelayanan				Program Kenelayanan	Persentase produksi perikanan tangkap	7,00	%					<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	Persentase produksi perikanan tangkap	03.	25.	02.
						23.423,58	ton									
Seksi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan				Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan	Jumlah benih ikan yang ditebar	745.000,00	ekor	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan yang diberikan	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah perairan umum yang disusun			03.	25.	02. 2.01 01
					Persentase kualitas sumberdaya perairan yang memenuhi syarat	65,00	%	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah laporan data dan informasi sumberdaya ikan yang disusun	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah perairan umum yang disusun			03.	25.	04. 2.01 02
Seksi Pengembangan Teknologi dan Sentra Nelayan				Kegiatan Pengembangan Teknologi dan Sentra Nelayan	Jumlah nelayan yang terfasilitasi program	1.055,00	orang	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok nelayan yang terfasilitasi program	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah perairan umum yang disusun			03.	25.	02. 2.02 03
					Prosentase penurunan penggunaan alat tangkap terlarang	2,00	%							03.	25.	02. 2.01 03



Seksi Pengelolaan TPI dan Hasil Perikanan				Kegiatan Pengelolaan TPI dan Hasil Perikanan	Jumlah pelaku usaha perikanan yang dibina	60,00	orang	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase penurunan temuan produk perikanan berbahan tambahan pangan terlarang	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah laporan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil yang disusun			03.	25.	05. 2.02 01	
					Persentase temuan produk perikanan berbahan tambahan pangan terlarang	60,00	%										
					Jumlah transaksi ikan yang ada di TPI	8.000,00	ton	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah transaksi ikan yang ada di TPI	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah laporan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil yang disusun			03.	25.	02. 2.03 02	
Program Pembinaan Lingkungan Sosial				Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase Jumlah Peserta Pelatihan Yang Menjadi Wirausaha	2,00	%										Program/kegiatan DBHCHT nomenklatur di atur dalam PMK
Seksi Pengelolaan TPI dan Hasil Perikanan				Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pembinaan/ Pelatihan Keterampilan Bagi Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan)	Jumlah masyarakat dan pengolah perikanan yang dibina	390,00	orang	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pembinaan/ Pelatihan Keterampilan Bagi Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan)	Jumlah masyarakat dan pengolah perikanan yang dibina								
								Bantuan Sarana Produksi dan Ternak Bani Masyarakat/ Kelompok Masyarakat (Bantuan Alat Pertanian/ Perkebunan/ Perikanan/ Peternakan untuk Masyarakat/ Kelompok Masyarakat)	Jumlah kelompok usaha perikanan yang terfasilitasi program								
Sekretaris				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	100,00	%										PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai SAKIP dan Nilai IKM OPD

Sub Bag Umum Kepegawaian dan Keuangan				Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan rekening telepon, air, listrik dan internet	19,00	rekening/ bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan rekening telepon, air, listrik dan internet	Administrasi Umum	Jumlah laporan administrasi umum yang tepat waktu			x	xx	01. 2.03 02
Sub Bag Umum Kepegawaian dan Keuangan				Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kebersihan	34,00	item	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kebersihan	Administrasi Umum	Jumlah laporan administrasi umum yang tepat waktu			x	xx	01. 2.03 08
Sub Bag Umum Kepegawaian dan Keuangan				Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	46,00	item	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	Administrasi Umum	Jumlah laporan administrasi umum yang tepat waktu			x	xx	01. 2.03 10
Sub Bag Umum Kepegawaian dan Keuangan				Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan	22,00	item	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan	Administrasi Umum	Jumlah laporan administrasi umum yang tepat waktu			x	xx	01. 2.03 11
Sub Bag Umum Kepegawaian dan Keuangan				Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan suku cadang listrik	20,00	item	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan suku cadang listrik	Administrasi Umum	Jumlah laporan administrasi umum yang tepat waktu			x	xx	01. 2.03 12
Sub Bag Umum Kepegawaian dan Keuangan				Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga	20,00	unit	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga	Administrasi Umum	Jumlah laporan administrasi umum yang tepat waktu			x	xx	01. 2.03 14
Sub Bag Umum Kepegawaian dan Keuangan				Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah rapat koordinasi dan tamu	10,00	kali	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah rapat koordinasi dan tamu	Administrasi Umum	Jumlah laporan administrasi umum yang tepat waktu			x	xx	01. 2.03 17
Sub Bag Umum Kepegawaian dan Keuangan				Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah laporan perjalanan dinas ke luar daerah	60,00	kali	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah laporan perjalanan dinas ke luar daerah	Administrasi Umum	Jumlah laporan administrasi umum yang tepat waktu			x	xx	01. 2.03 18
Sub Bag Umum Kepegawaian dan Keuangan				Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah honorarium pengelolaan keuangan daerah dan pegawai non pns	408,00	orang/ bulan	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah honorarium pengelolaan keuangan daerah dan pegawai non pns	Administrasi Umum	Jumlah laporan administrasi umum yang tepat waktu			x	xx	01. 2.03 07
Sub Bag Umum Kepegawaian dan Keuangan				Kegiatan Pengembangan Sumberdaya Aparatur	Jumlah peserta bimtek yang mendapat pemahaman	40,00	orang	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta bimtek yang mendapat pemahaman	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat pelatihan			x	xx	01. 2.04 10
								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta bimtek yang mendapat pemahaman	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat pelatihan			x	xx	01. 2.04 11
Sub Bag Penyusunan Program dan Pelaporan				Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan kinerja tribulan dan tahunan (dokumen)	10,00	dokumen	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan keuangan (dokumen)	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan yang tepat waktu			x	xx	01. 2.01 02

					Jumlah dokumen perencanaan keuangan (dokumen)	4,00	dokumen	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja tribulan dan tahunan (dokumen)	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan yang tepat waktu			x	xx	01. 2.01 05	
Sekretaris				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik	100,00	%										01.
Sub Bag Umum Kepegawaian dan Keuangan				Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	20,00	unit	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	Administrasi Umum	Jumlah laporan administrasi umum yang tepat waktu			x	xx	01. 2.03 23	
Sub Bag Umum Kepegawaian dan Keuangan				Kegiatan Pengadaan Mebelair	Jumlah mebelair yang diadakan	2,00	unit	Pengadaan Mebelair	Jumlah mebelair yang diadakan	Administrasi Umum	Jumlah laporan administrasi umum yang tepat waktu			x	xx	01. 2.03 25	
Sub Bag Umum Kepegawaian dan Keuangan				Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	5,00	unit	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	Administrasi Umum	Jumlah laporan administrasi umum yang tepat waktu			x	xx	01. 2.03 24	
Sub Bag Umum Kepegawaian dan Keuangan				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	2,00	gedung	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Administrasi Umum	Jumlah laporan administrasi umum yang tepat waktu			x	xx	01. 2.03 29	
Sub Bag Umum Kepegawaian dan Keuangan				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	47,00	unit	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	Administrasi Umum	Jumlah laporan administrasi umum yang tepat waktu			x	xx	01. 2.03 31	
Sub Bag Umum Kepegawaian dan Keuangan				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	10,00	gedung	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Administrasi Umum	Jumlah laporan administrasi umum yang tepat waktu			x	xx	01. 2.03 33	
Sub Bag Umum Kepegawaian dan Keuangan				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Mebelair	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	10,00	unit	Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	Administrasi Umum	Jumlah laporan administrasi umum yang tepat waktu			x	xx	01. 2.03 36	
Sub Bag Umum Kepegawaian dan Keuangan				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung/ Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	20,00	unit	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung/ Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Jumlah laporan administrasi umum yang tepat waktu			x	xx	01. 2.03 35	

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	PAGU PROGRAM	URUSAN	KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	
<b>KEPALA</b>																				
<b>SEKRETARIS</b>																				
SUB BAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN				<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Persentase Sarana Prasarana Kondisi Baik	100	%													
				Penyusunan laporan kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja OPD yang tersusun	4	Laporan	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Tersusun dokumen RKA/RKAP dan DPA/DPPA	50.499.500	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan Pelaporan OPD	126.213.500	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.414.940.750	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 17 01 2.01 2.01 02	
								Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja OPD	75.714.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan Pelaporan OPD		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 17 01 2.01 2.01 03	
SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	2.11 . 2.11.01 . 01	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	100	%													
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik / air / telepon / internet	12	bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik / air / telepon / internet	35.400.000	Administrasi Umum	Jumlah pembayaran listrik / air / telepon / internet	983.653.250	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 17 01 2.03 2.03 02	
				Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	32	item	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	24.800.000	Administrasi Umum	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 17 01 2.03 2.03 03	
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah pembayaran pajak kendaraan	18	unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		13.500.000	Administrasi Umum			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 17 01 2.03 2.03 06	
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan	12	bulan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan	91.920.000	Administrasi Umum	Jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 17 01 2.03 2.03 07	
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan	12	bulan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah pembayaran honor tenaga kebersihan kantor	16.800.000	Administrasi Umum	Jumlah pembayaran honor tenaga kebersihan kantor		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 17 01 2.03 2.03 08	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian ATK Kantor	40	item	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian ATK	38.954.500	Administrasi Umum	Jumlah pembelian ATK		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 17 01 2.03 2.03 10	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	11	item	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	62.737.750	Administrasi Umum	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 17 01 2.03 2.03 11	

				Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	32	item		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	21.061.000	Administrasi Umum	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 17 01 2 17 01 2.03 2 17 01 2.03 02
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah pembayaran honor panita pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan	12	bulan		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan selama 1 tahun	24.520.000	Administrasi Umum	Jumlah penyediaan bahan bacaan selama 1 tahun		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 17 01 2 17 01 2.03 2 17 01 2.03 15
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu	12	bulan		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu	28.650.000	Administrasi Umum	Jumlah kegiatan rapat dan tamu		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 17 01 2 17 01 2.03 2 17 01 2.03 17
				Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	100	kali		Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 17 01 2 17 01 2.03 2 17 01 2.03 18
				<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Persentase Sarana Prasarana Kondisi Baik	100	%													
				Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	8	item		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	169.570.000	Administrasi Umum	Jumlah pengadaan peralatan kantor		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Sarana Prasarana Kondisi Baik	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 17 01 2 17 01 2.03 2 17 01 2.03 24
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	unit		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	60.140.000	Administrasi Umum	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Sarana Prasarana Kondisi Baik	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 17 01 2 17 01 2.03 2 17 01 2.03 28
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	18	unit		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	207.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Sarana Prasarana Kondisi Baik	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 17 01 2 17 01 2.03 2 17 01 2.03 30
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebelair	Jumlah Mebelair yang dipelihara	65	unit		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebelair yang dipelihara	7.500.000	Administrasi Umum	Jumlah Mebelair yang dipelihara		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Sarana Prasarana Kondisi Baik	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 17 01 2 17 01 2.03 2 17 01 2.03 35
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	85	unit		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	81.100.000	Administrasi Umum	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Sarana Prasarana Kondisi Baik	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 17 01 2 17 01 2.03 2 17 01 2.03 34
				Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jml. peserta yang mengikuti kegiatan	3	orang		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jml. peserta yang mengikuti kegiatan	85.000.000	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jml. peserta yang mengikuti kegiatan	85.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 17 01 2 17 01 2.04 17 01 2.04.09 2
SUB BAG KEUANGAN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	4.043.074.000	Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	4.220.074.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 17 01 2 17 01 2.02 2 17 01 2.02 01
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah pembayaran gaji THL	12	bulan		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran honor pelaksana tugas ASN	177.000.000	Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran gaji pelaksana tugas ASN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 17 01 2 17 01 2.02 2 17 01 2.02 02





BIDANG FASILITASI DAN PEMBIAYAAN	2.11 . 2.11.01 . 21		Program Fasilitasi dan Pembiayaan	Persentase peningkatan Usaha Mikro dan Koperasi yang memperoleh permodalan	5	%													
KASI PERMODALAN	2.11 . 2.11.01 . 21 . 01		Sosialisasi dan fasilitasi Permodalan	Jml. peserta yang mengikuti kegiatan, Jml. koperasi yang mengikuti kegiatan	600	orang													
BIDANG USAHA KOPERASI			Program Pengembangan Usaha Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	1,5	%													
KASI KOPERASI PERDAGANGAN, INDUSTRI DAN ANEKA USAHA	2.11 . 2.11.01 . 15 . 20		Pengembangan Usaha Koperasi Sektor Industri, Perdagangan dan Aneka Usaha	Jml. peserta yang mengikuti kegiatan	180	orang	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	Jml. peserta yang mengikuti kegiatan	600.000.000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jml. peserta yang mengikuti kegiatan	600.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	600.000.000	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 17 06 2 17 06 2.01 2 17 06 2.01 01	
KASI KOPERASI PERIKANAN DAN PETERNAKAN	2.11 . 2.11.01 . 15 . 21		Pengembangan Usaha Koperasi Sektor Perikanan dan Peternakan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	90	orang													
KASI KOPERASI PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	2.11 . 2.11.01 . 15 . 22		Pengembangan Usaha Koperasi Sektor Pertanian dan Perkebunan	Jml. peserta yang mengikuti kegiatan	90	orang													
BIDANG USAHA MIKRO	2.11 . 2.11.01 . 20		Program Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro	2	%													
KASI PRODUKSI	2.11 . 2.11.01 . 20 . 01		Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Usaha	Jml. peserta yang mengikuti kegiatan	120	orang	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jml. peserta yang mengikuti kegiatan	50.000.000	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jml. peserta yang mengikuti kegiatan	250.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	250.000.000	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 17 06 2 17 07 2.01 17 07 2.01 03	2
KASI PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA	2.11 . 2.11.01 . 20 . 02		Penyelenggaraan Fasilitasi Pemasaran dan Jaringan Usaha	Jml. even promosi yang diikuti	2	even	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jml. peserta yang mengikuti kegiatan	150.000.000	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jml. peserta yang mengikuti kegiatan		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 17 06 2 17 07 2.01 17 07 2.01 02	2

KASI KEWIRAUSAHA	2.11 . 2.11.01 . 20 . 03		Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jml. peserta yang mengikuti kegiatan	24	orang		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jml. peserta yang mengikuti kegiatan	50.000.000	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jml. peserta yang mengikuti kegiatan		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro</b>	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 17 06 2 17 07 2.01 17 07 2.01 01	2
	2.11 . 2.11.01 . 19		<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	<b>Persentase Penumbuhan Wirausaha Baru</b>	5	%														
KASI KEWIRAUSAHA	2.11.01 . 19 . 02		Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pelatihan Kewirausahaan)	Jumlah peserta yang memahami materi pelatihan	330	orang		Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jml. peserta yang mengikuti kegiatan	1.300.000.000	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jml. peserta yang mengikuti kegiatan	1.300.000.000	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Persentase Penumbuhan Wirausaha Baru</b>	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.300.000.000	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 17 08 2 17 08 2.01 17 08 2.01 01	2
KASI PRODUKSI	2.11.01 . 19 . 05		Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pembinaan / Pelatihan Manajemen Kewirausahaan)	Jumlah peserta yang memahami materi kegiatan	150	orang														
KASI PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA	2.11 . 2.11.01 . 19 . 06		Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jml. even promosi yang diikuti	10	even														

8.632.298.750

8.632.298.750

8.632.298.750

**RENCANA PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2021 (PEMETAAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019)**

**FORMAT PEMETAAN**

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA BKD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kepala																
Sekretaris																
Subbag Umum dan Kepegawaian	4.04.05 . 01	Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		100	%					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Sekretariat	Keuangan	5 02 01
Subbag Umum dan Kepegawaian	4.04.05 . 01 . 01	Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim melalui jasa kurir	480	Pucuk surat			Administrasi Umum		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Sekretariat	Keuangan	5 02 01 2.03
Subbag Umum dan Kepegawaian	4.04.05 . 01 . 02	Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan rekening telp, listrik dan air	312	rek/bln	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim melalui jasa kurir	Administrasi Umum	Jumlah surat yang dikirim melalui jasa kurir	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Sekretariat	Keuangan	5 02 01 2.03 01
Subbag Umum dan Kepegawaian	4.04.05 . 01 . 03	Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	20	Unit	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan rekening telp, listrik dan air	Administrasi Umum	Jumlah pembayaran tagihan rekening telp, listrik dan air	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Sekretariat	Keuangan	5 02 01 2.03 02
Subbag Penyusunan Program dan Pelaporan	4.04.05 . 01 . 07	Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan Pengelola Keuangan	340	org/bln	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	Administrasi Umum	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Sekretariat	Keuangan	5 02 01 2.03 03
Subbag Umum dan Kepegawaian	4.04.05 . 01 . 10	Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor	20	Jenis-kali	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan Pengelola Keuangan	Administrasi Umum	Jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan Pengelola Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Sekretariat	Keuangan	5 02 01 2.03 07
Subbag Umum dan Kepegawaian	4.04.05 . 01 . 11	Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan cetakan, foto copy dan pengadaan	20	Exemplar	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor	Administrasi Umum	Jumlah pembelian alat tulis kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Sekretariat	Keuangan	5 02 01 2.03 10
Subbag Umum dan Kepegawaian	4.04.05 . 01 . 17	Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu	810	kali	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan cetakan, foto copy dan pengadaan	Administrasi Umum	Pemenuhan cetakan, foto copy dan pengadaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Sekretariat	Keuangan	5 02 01 2.03 11
Subbag Penyusunan Program dan Pelaporan	4.04.05 . 01 . 18	Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah	200	orang-kali	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	Administrasi Umum	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Sekretariat	Keuangan	5 02 01 2.03 13
Subbag Umum dan Kepegawaian	4.04.05 . 01 . 19	Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah tenaga Kontrakr/THL	53	org/bln	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Administrasi Umum	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Sekretariat	Keuangan	5 02 01 2.03 14
Subbag Penyusunan Program dan Pelaporan	4.04.05 . 01 . 21	Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan kinerja triwulan dan tahunan	5	Dokumen	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu	Administrasi Umum	Jumlah kegiatan rapat dan tamu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Sekretariat	Keuangan	5 02 01 2.03 17

Subbag Umum dan Kepegawaian	4.04.05 . 01 . 22	Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti bintek	2	orang	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah	Administrasi Umum	Jumlah Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Sekretariat	Keuangan	5 02 01 2.03 18	
Subbag Keuangan	4.04.05 . 01 . 23	Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Fasilitasi Optimalisasi Fungsi PPKD	Jumlah proposal dana bantuan	12.500	proposal	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas	Administrasi Umum	Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Sekretariat	Keuangan	5 02 01 2.03 20	
<b>Subbag Umum dan Kepegawaian</b>	4.04.05 . 02	<b>Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>	<b>Keuangan</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Prosentase Sarpras Kondisi Baik</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Sekretariat	Keuangan	5 02 01 2.03 24	
Subbag Umum dan Kepegawaian	4.04.05 . 02 . 10	Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Pengadaan kendaraan dinas	Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas	1	unit	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	Administrasi Umum	Jumlah Pengadaan Mebeleur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Sekretariat	Keuangan	5 02 01 2.03 25	
Subbag Umum dan Kepegawaian	4.04.05 . 02 . 11	Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	7	unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Administrasi Umum	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Sekretariat	Keuangan	5 02 01 2.03 28	
Subbag Umum dan Kepegawaian	4.04.05 . 02 . 22	Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	3	Unit-Kali	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi Umum	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Sekretariat	Keuangan	5 02 01 2.03 30	
Subbag Umum dan Kepegawaian	4.04.05 . 02 . 24	Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas/operasional	335	Unit-Kali	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Jumlah pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Sekretariat	Keuangan	5 02 01 2.03 34	
Subbag Umum dan Kepegawaian	4.04.05 . 02 . 30	Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	Jumlah pemeliharaan Peralatan Kantor	525	Unit-Kali	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah pemeliharaan Mebeleur	Administrasi Umum	Jumlah pemeliharaan Mebeleur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Sekretariat	Keuangan	5 02 01 2.03 35	
											<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Jml. peserta yang mengikuti kegiatan</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Sekretariat	Keuangan	<b>5 02 01 2.04</b>
								Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Sekretariat	Keuangan	5 02 01 2.04 03
								Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jml. peserta yang mengikuti kegiatan		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jml. peserta yang mengikuti kegiatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Sekretariat	Keuangan	5 02 01 2.04 09
											<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>Sekretariat</b>	<b>Keuangan</b>	
								Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja OPD		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Sekretariat	Keuangan	5 02 01 2.01 01
								Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Tersusun dokumen RKA/RKAP dan DPA/DPPA		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusun dokumen RKA/RKAP dan DPA/DPPA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Sekretariat	Keuangan	5 02 01 2.01 02

								Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja OPD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Sekretariat	Keuangan	5 02 01 2.01 03
								Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Sekretariat	Keuangan	5 02 01 2.01 04
										<b>Administrasi Keuangan</b>		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Sekretariat	Keuangan	
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan dengan baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Sekretariat	Keuangan	5 02 01 2.02 01
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran honor pelaksana tugas ASN	Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan dengan baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Sekretariat	Keuangan	5 02 01 2.02 02
								Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Jumlah dokumen verifikasi	Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan dengan baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Sekretariat	Keuangan	5 02 01 2.02 03
<b>Badan Keuangan Daerah</b>	<b>4.04.05.01.17</b>	<b>Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>	<b>Keuangan</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Ketepatan penetapan APBD</b>	<b>100%</b>	<b>Tepat Waktu</b>					<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Ketepatan penetapan APBD dan Ketepatan Laporan Keuangan Daerah</b>	<b>Anggaran dan Belanja Daerah</b>		<b>5 02 02</b>
Badan Keuangan Daerah	4.04.05.01.17.100	Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan P-APBD	Jumlah Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD,P-APBD dan R-perkada	4	Peraturan			<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Tersusunnya rancangan anggaran daerah</b>					<b>5 02 02 2.01</b>
								Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA-PPAS	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya rancangan anggaran daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan penetapan APBD/P-APBD dan Ketepatan Laporan Keuangan Daerah	Anggaran dan Belanja Daerah	Keuangan	5 02 02 2.01 01
								Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan	Tersusunnya Perubahan KUA-PPAS	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya rancangan anggaran daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan penetapan APBD/P-APBD dan Ketepatan Laporan Keuangan Daerah	Anggaran dan Belanja Daerah	Keuangan	5 02 02 2.01 02
								Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	Jumlah RKA OPD yang telah di reuiu	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya rancangan anggaran daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan penetapan APBD/P-APBD dan Ketepatan Laporan Keuangan Daerah	Anggaran dan Belanja Daerah	Keuangan	5 02 02 2.01 03
								Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	Jumlah DPA OPD yang telah di reuiu	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya rancangan anggaran daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan penetapan APBD/P-APBD dan Ketepatan Laporan Keuangan Daerah	Anggaran dan Belanja Daerah	Keuangan	5 02 02 2.01 04
								Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Penyusunan Perda & Perbup tentang APBD yang terbit	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya rancangan anggaran daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan penetapan APBD/P-APBD dan Ketepatan Laporan Keuangan Daerah	Anggaran dan Belanja Daerah	Keuangan	5 02 02 2.01 05

								Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Penyusunan Perda & Perbup tentang APBP Perubahan yang terbit	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya rancangan anggaran daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan penetapan APBD/P-APBD dan Ketepatan Laporan Keuangan Daerah	Anggaran dan Belanja Daerah	Keuangan	5 02 02 2.01 06
										<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan penetapan APBD/P-APBD dan Ketepatan Laporan Keuangan Daerah			<b>5 02 02 2.02</b>
Badan Keuangan Daerah	4.04.05.01.17.101	Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Penatausahaan Pengelolaan Gaji PNS dan Non PNS	Prosentase pembayaran gaji PNS dan Non PNS	100	%	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Jumlah penerbitan SKPP	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan penetapan APBD/P-APBD dan Ketepatan Laporan Keuangan Daerah	Anggaran dan Belanja Daerah	Keuangan	5 02 02 2.02 05
Badan Keuangan Daerah	4.04.05.01.17.102	Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Optimalisasi Fungsi BUD	Jumlah OPD yang telah di verifikasi oleh BUD	56	OPD	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Pengelolaan kas daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan penetapan APBD/P-APBD dan Ketepatan Laporan Keuangan Daerah	Anggaran dan Belanja Daerah	Keuangan	5 02 02 2.02 01
								Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan penetapan APBD/P-APBD dan Ketepatan Laporan Keuangan Daerah	Anggaran dan Belanja Daerah	Keuangan	5 02 02 2.02 03
								Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Jumlah SP2D yang terbit	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan penetapan APBD/P-APBD dan Ketepatan Laporan Keuangan Daerah	Anggaran dan Belanja Daerah	Keuangan	5 02 02 2.02 04
								Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan penetapan APBD/P-APBD dan Ketepatan Laporan Keuangan Daerah	Anggaran dan Belanja Daerah	Keuangan	5 02 02 2.02 06
								Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Terlaksanakannya Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan penetapan APBD/P-APBD dan Ketepatan Laporan Keuangan Daerah	Anggaran dan Belanja Daerah	Keuangan	5 02 02 2.02 07
								Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Jumlah peserta rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan penetapan APBD/P-APBD dan Ketepatan Laporan Keuangan Daerah	Anggaran dan Belanja Daerah	Keuangan	5 02 02 2.02 08
								Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	Tersusunnya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan penetapan APBD/P-APBD dan Ketepatan Laporan Keuangan Daerah	Anggaran dan Belanja Daerah	Keuangan	5 02 02 2.02 09
								Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah penerbitan SPD	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan penetapan APBD/P-APBD dan Ketepatan Laporan Keuangan Daerah	Anggaran dan Belanja Daerah	Keuangan	5 02 02 2.02 10

Badan Keuangan Daerah	4.04.05.01.18	Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH</b>	Ketepatan Laporan keuangan daerah	100%	Tepat Waktu			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Ketepatan penetapan APBD/P-APBD dan Ketepatan Laporan Keuangan Daerah	Akuntansi	Keuangan	5 02 02 2.03
Badan Keuangan Daerah	4.04.05.01.18.1	Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Peningkatan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah OPD yang telah memahami tentang akuntansi,dokumen rencana kerja dan tindak lanjut bidang Akuntansi	56	OPD	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksanakannya Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan penetapan APBD/P-APBD dan Ketepatan Laporan Keuangan Daerah	Akuntansi	Keuangan	5 02 02 2.03 01
Badan Keuangan Daerah	4.04.05.01.18.2	Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Pengendalian Realisasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	4	Dokumen	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	Jumlah peserta rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan penetapan APBD/P-APBD dan Ketepatan Laporan Keuangan Daerah	Akuntansi	Keuangan	5 02 02 2.03 07
Badan Keuangan Daerah	4.04.05.01.18.3	Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Raperda serta Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terlaksananya penyusunan LKPD dan penyusunan Raperda serta Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	12	Bulan	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan penetapan APBD/P-APBD dan Ketepatan Laporan Keuangan Daerah	Akuntansi	Keuangan	5 02 02 2.03 04
								Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan penetapan APBD/P-APBD dan Ketepatan Laporan Keuangan Daerah	Akuntansi	Keuangan	5 02 02 2.03 05
								Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah peserta Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan penetapan APBD/P-APBD dan Ketepatan Laporan Keuangan Daerah	Akuntansi	Keuangan	5 02 02 2.03 12
Badan Keuangan Daerah	4.04.05.01.19	Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	prosentase laporan BMD sesuai standar	94	%					<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>		ASET	Keuangan	5 02 03
										<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		Program Pengelolaan Barang Milik daerah		ASET	Keuangan	5 02 03 2.01
Badan Keuangan Daerah	4.04.05.01.19.3	Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Perencanaan dan Penyusunan RKBMD	Jumlah Dokumen OPD rencana kerja dan tindaklanjut tentang Perencanaan dan Penyusunan RKBMD	124	Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik daerah		ASET	Keuangan	5 02 03 2.01 03
Badan Keuangan Daerah	4.04.05.01.19.2	Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen dan tindak lanjut tentang penertiban Penggunaan dan pemanfaatan BMD serta jumlah opd yang telah mengikuti rapat	50	Dokumen	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik daerah		ASET	Keuangan	5 02 03 2.01 09





Badan Keuangan Daerah	4.04.05.01.21	Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	PROGRAM PENINGKATAN PAJAK DAERAH	Prosentase peningkatan pajak daerah	8	%									
Badan Keuangan Daerah	4.04.05.01.21.1	Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Wilayah yang di Monitoring	16	Wilayah	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tersusunnya Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Tersusunnya Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	SKM/IKM layanan dan Prosentase peningkatan pajak daerah	Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan	Keuangan	5 02 04 2.01 02
Badan Keuangan Daerah	4.04.05.01.21.4	Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Peningkatan dan Pengembangan PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I	Jumlah Prosentase Intensifikasi Penerimaan PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I	100	%	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Obyak pajak yang dimonitoring	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Jumlah Obyak pajak yang dimonitoring	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	SKM/IKM layanan dan Prosentase peningkatan pajak daerah	Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan	Keuangan	5 02 04 2.01 11
Badan Keuangan Daerah	4.04.05.01.21.5	Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Peningkatan dan Pengembangan PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II	Jumlah Prosentase Intensifikasi Penerimaan PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II	100	%									
Badan Keuangan Daerah	4.04.05.01.21.3	Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Penagihan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah desa yang di opsir	282	Desa	Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah Pemeriksaan Pajak Daerah	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Jumlah Pemeriksaan Pajak Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	SKM/IKM layanan dan Prosentase peningkatan pajak daerah	Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan	Keuangan	5 02 04 2.01 10
Badan Keuangan Daerah	4.04.05.01.21.2	Pemerintahan Fungsi Penunjang	Keuangan	Sosialisasi dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah sosialisasi tentang PAD	8	Kali	Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Tersusunnya Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Tersusunnya Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	SKM/IKM layanan dan Prosentase peningkatan pajak daerah	Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan	Keuangan	5 02 04 2.01 01
								Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	Tersusunnya Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Tersusunnya Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	SKM/IKM layanan dan Prosentase peningkatan pajak daerah	Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan	Keuangan	5 02 04 2.01 05
								Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tersusunnya Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Tersusunnya Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	SKM/IKM layanan dan Prosentase peningkatan pajak daerah	Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan	Keuangan	5 02 04 2.01 03

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	PAGU PROGRAM	URUSAN	KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
BAGIAN OTONOMI DAERAH	5.02.16	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah	<b>PROGRAM OTONOMI DAERAH DAN KEWILAYAHAN</b>	1.1. Persentase Hasil evaluasi IKK yang ditindaklanjuti	100	persen	Rp 420.950.000													
	16.01			1.1.1. Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen LPPD	70	buku	Rp 125.980.000	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen LPPD	125.980.000	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Hasil evaluasi IKK yang ditindaklanjuti	Rp 700.000.000	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SEKRETARIAT DAERAH	700.000.000	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.02.2.01.01	
	16.02			1.1.2. Fasilitasi Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan koordinasi fasilitasi pemerintahan daerah	12	laporan koordinasi	Rp 139.270.000	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah laporan koordinasi fasilitasi pemerintahan daerah	139.270.000	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Hasil evaluasi IKK yang ditindaklanjuti		<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SEKRETARIAT DAERAH		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.02.2.01.01	
	16.03			1.1.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan administrasi Kecamatan dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	12	laporan	Rp 70.950.000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah laporan administrasi Kecamatan dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	70.950.000	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Penetapan dan penegasan batas wilayah (Akumulasi s.d Th. N)		<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SEKRETARIAT DAERAH		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.02.2.01.02	
					1.2. Jumlah Penetapan dan penegasan batas wilayah (Akumulasi s.d Th. N)	11	Wilayah	Rp 279.050.000													
	16.05			1.2.1. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah serta Pembakuan Nama Rupabumi	Jumlah koordinasi kegiatan batas wilayah dan pembakuan nama rupa bumi	12	laporan koordinasi	Rp 247.930.000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah koordinasi kegiatan batas wilayah dan pembakuan nama rupa bumi	247.930.000	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Penetapan dan penegasan batas wilayah (Akumulasi s.d Th. N)		<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SEKRETARIAT DAERAH		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.02.2.01.02	
	16.06			1.2.2. Fasilitasi Permasalahan Kewilayahan	Jumlah koordinasi permasalahan Kewilayahan	6	laporan koordinasi	Rp 31.120.000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah koordinasi permasalahan Kewilayahan	31.120.000	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Penetapan dan penegasan batas wilayah (Akumulasi s.d Th. N)		<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SEKRETARIAT DAERAH		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.02.2.01.02	
				<b>PROGRAM OTONOMI DAERAH DAN KEWILAYAHAN</b>	1.1. Persentase Hasil evaluasi IKK yang ditindaklanjuti																
	16.04			1.1.4. Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah koordinasi dengan OPD dan Forkompinda	4	laporan koordinasi	Rp 84.750.000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah koordinasi dengan OPD dan Forkompinda	84.750.000	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Hasil evaluasi IKK yang ditindaklanjuti		<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SEKRETARIAT DAERAH		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.02.2.01.03	
BAGIAN KERJASAMA DAN KEPENDUDUKAN	05.02.15			<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH</b>	Prosentase Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti	100	persen														
	15.01			Kegiatan : Penyusunan dan Pembahasan Draft Kerjasama Daerah, Pihak Ketiga dan Perbatasan Wilayah	Jumlah laporan koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar daerah, perbatasan wilayah dan pihak ketiga	24	laporan	Rp 121.870.000	Penyusunan dan Pembahasan Draft Kerjasama Daerah, Pihak Ketiga dan Perbatasan Wilayah	Jumlah laporan koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar daerah, perbatasan wilayah dan pihak ketiga		Penyusunan dan Pembahasan Draft Kerjasama Daerah, Pihak Ketiga dan Perbatasan Wilayah	Jumlah laporan koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar daerah, perbatasan wilayah dan pihak ketiga		<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH</b>	Prosentase Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti	SEKRETARIAT DAERAH		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH	4 01 03 25 08	
	15.02			Koordinasi dan Penjajakan Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah	17	laporan	Rp 186.180.000	Koordinasi dan Penjajakan Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah		Koordinasi dan Penjajakan Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah		<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH</b>	Prosentase Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti	SEKRETARIAT DAERAH		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH	4 01 03 25 22	
	15.03			Koordinasi dan Penjajakan Kerjasama Perbatasan Wilayah	Jumlah laporan koordinasi dan fasilitasi Kerjasama Perbatasan Wilayah	20	laporan	Rp 57.000.000	Koordinasi dan Penjajakan Kerjasama erbatasan Wilayah	Jumlah laporan koordinasi dan fasilitasi Kerjasama Perbatasan Wilayah		Koordinasi dan Penjajakan Kerjasama erbatasan Wilayah	Jumlah laporan koordinasi dan fasilitasi Kerjasama Perbatasan Wilayah		<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH</b>	Prosentase Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti	SEKRETARIAT DAERAH		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH	4 01 03 25 23	



	4 01 03 2.04 01			Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketersediaan dan Penyaluran Saprodi		16	laporan	32.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	32.000.000	Pemantauan Kebijakan terkait Sumber Daya Alam	Prosentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang ditindak lanjut	Rp 116.000.000					4 01 03 2.04 01		
	4 01 03 2.04 03			Kegiatan : Koordinasi dan Monev Penggunaan Energi dan SDA	Jumlah laporan hasil koordinasi dan monev penggunaan energi dan SDA	16	laporan	84.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	84.000.000								4 01 03 2.04 03		
			SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Kebijakan Perekonomian yang ditindak lanjut	100	persen	480.825.000												PMK Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT	
	4 01 03 2.01 02			Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Laporan Koordinasi Pemanfaatan DBHCHT	16	laporan	480.825.000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan hasil koordinasi pengendalian dan distribusi perekonomian	480.825.000	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Prosentase Kebijakan Perekonomian yang ditindak lanjut	Rp 480.825.000	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	480.825.000	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH	4 01 03 2.01 02	DBHCHT
	05 02 21			PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI	% fasilitas pemanfaatan DBHCHT	100	persen														
	21 01			Kegiatan : Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan di Bidang Cukai	Jumlah Laporan Koordinasi Pemanfaatan DBHCHT	16	laporan		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Koordinasi Pemanfaatan DBHCHT		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Laporan Koordinasi Pemanfaatan DBHCHT		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Kebijakan Perekonomian yang ditindak lanjut		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH	4 01 03 2.01 02	
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	05.02.22	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah	PELAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH	1.1. Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berhasil ditenderkan	99	persen														
	22.01			1.1.1. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah paket PBJ yang berhasil ditenderkan	300	paket	622.867.500	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket PBJ yang berhasil ditenderkan	622.867.500	Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket PBJ yang berhasil ditenderkan	Rp 1.000.000.000	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.1.1. Persentase paket pengadaan barang/jasa pemerintah yang berhasil ditenderkan		SEKRETARIAT DAERAH	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4 01 03 2.03 01	
	22.03			1.1.2. Pendampingan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah pembinaan dan konsultasi permasalahan hukum bagi pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah	2	kali	58.197.500	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pembinaan dan konsultasi permasalahan hukum bagi pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah	58.197.500	Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pembinaan dan konsultasi permasalahan hukum bagi pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.1.1. Persentase paket pengadaan barang/jasa pemerintah yang berhasil ditenderkan		SEKRETARIAT DAERAH	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4 01 03 2.03 03	
	22.02			1.1.3. Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Desa	Jumlah desa yang dimonitor dan dievaluasi	68	desa	60.295.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah desa yang dimonitor dan dievaluasi	60.295.000	Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah desa yang dimonitor dan dievaluasi		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.1.1. Persentase paket pengadaan barang/jasa pemerintah yang berhasil ditenderkan		SEKRETARIAT DAERAH	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4 01 03 2.03 03	
	22.04			1.1.4. Pembinaan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah personil pelaku PBJ yang berhasil dibina	400	orang	133.640.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah personil pelaku PBJ yang berhasil dibina	133.640.000	Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah personil pelaku PBJ yang berhasil dibina		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.1.1. Persentase paket pengadaan barang/jasa pemerintah yang berhasil ditenderkan		SEKRETARIAT DAERAH	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4 01 03 2.03 03	
	22.05			1.1.5. Penyusunan Buku Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa yang dicetak	100	buku	-	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa yang dicetak	-	Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa yang dicetak		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.1.1. Persentase paket pengadaan barang/jasa pemerintah yang berhasil ditenderkan		SEKRETARIAT DAERAH	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4 01 03 2.03 01	
	22.06			1.1.6. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah kegiatan pengembangan sistem informasi yang dilakukan	2	kali	125.000.000	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah kegiatan pengembangan sistem informasi yang dilakukan	125.000.000	Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kegiatan pengembangan sistem informasi yang dilakukan		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.1.1. Persentase paket pengadaan barang/jasa pemerintah yang berhasil ditenderkan		SEKRETARIAT DAERAH	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4 01 03 2.03 02	

BAGIAN PEMBANGUNAN	5.02	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.1. Persentase Kebijakan Bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Yang Ditindaklanjuti	80	persen													
				1.1.1. Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan dan Litbang	Jumlah laporan koordinasi fasilitasi perencanaan pembangunan dan litbang	10	laporan	20.710.600	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	10	20.710.600	Administrasi Pembangunan	Jumlah laporan koordinasi fasilitasi perencanaan pembangunan dan litbang	Rp 700.000.000	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.1. Persentase Kebijakan Bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Yang Ditindaklanjuti	SEKRETARIAT DAERAH		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.03.2.02.01
					1.2. Persentase Kegiatan Yang Tertib Administrasi	80	persen													
				1.1.2. Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah buku Standar Satuan Harga	250	buku	123.472.000	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	250	123.472.000	Administrasi Pembangunan	Jumlah buku Standar Satuan Harga		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.2. Persentase Kegiatan Yang Tertib Administrasi	SEKRETARIAT DAERAH		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.03.2.02.01
				1.1.3. Penyusunan Analisa Standar Belanja	Jumlah buku Analisa Standar Belanja	250	buku	84.250.000	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	250	84.250.000	Administrasi Pembangunan	Jumlah buku Analisa Standar Belanja		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.2. Persentase Kegiatan Yang Tertib Administrasi	SEKRETARIAT DAERAH		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.03.2.02.01
				1.1.4. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Jumlah paket proyek fisik yang dimonitoring	750	paket	119.114.800	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	750	119.114.800	Administrasi Pembangunan	Jumlah paket proyek fisik yang dimonitoring		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.2. Persentase Kegiatan Yang Tertib Administrasi	SEKRETARIAT DAERAH		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.03.2.02.02
				1.1.5. Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Jumlah buku pelaporan yang disusun	285	buku	162.558.100	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	285	162.558.100	Administrasi Pembangunan	Jumlah buku pelaporan yang disusun		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.2. Persentase Kegiatan Yang Tertib Administrasi	SEKRETARIAT DAERAH		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.03.2.02.03
				1.1.6. Sosialisasi Pembangunan Fisik	Jumlah laporan sosialisasi proyek fisik 24 kecamatan	24	laporan	-	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	24	-	Administrasi Pembangunan	Jumlah laporan sosialisasi proyek fisik 24 kecamatan		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.2. Persentase Kegiatan Yang Tertib Administrasi	SEKRETARIAT DAERAH		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.03.2.02.02
				1.1.7. Penyusunan dan Penerapan Buku Pedoman Pelaksanaan APBD dan Buku Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah buku Pedoman dan buku Panduan Teknis yang disusun	750	buku	189.894.500	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	750	189.894.500	Administrasi Pembangunan	Jumlah buku Pedoman dan buku Panduan Teknis yang disusun		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.2. Persentase Kegiatan Yang Tertib Administrasi	SEKRETARIAT DAERAH		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.03.2.02.01
Bagian Kesejahteraan Sosial	05 02 23	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase Kebijakan Lingkup Bidang Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	100	persen	Rp 2.900.000.000												
	05 02 23 01	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Rutin Keagamaan					Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah laporan kegiatan rutin keagamaan					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Lingkup Bidang Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4 01 02 2.02 01	
	05 02 23 02	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Amaliah Ramadhan	Jumlah laporan kegiatan rutin keagamaan	4	Laporan	493.900.700	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah laporan kegiatan Amaliah Ramadhan	2.690.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp 2.900.000.000	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Lingkup Bidang Kesejahteraan Sosial	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4 01 02 2.02 01	
	05 02 23 03	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam	Jumlah laporan kegiatan Amaliah Ramadhan	5	Laporan	222.463.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Islam					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Lingkup Bidang Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4 01 02 2.02 01	
	05 02 23 04	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Pasuruan Bersholawat	Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Islam	6	Laporan	91.526.300	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah laporan kegiatan Pasuruan Bersholawat					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Lingkup Bidang Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4 01 02 2.02 01	
	05 02 23 05	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Dzikir Akbar	Jumlah laporan kegiatan Pasuruan Bersholawat	1	Laporan	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah laporan kegiatan Dzikir Akbar					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Lingkup Bidang Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4 01 02 2.02 01	

	05 02 23 06	Pemerintah Umum	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Hari Santri	Jumlah laporan kegiatan Dzikir Akbar	1	Laporan	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah laporan kegiatan Hari Santri									PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Lingkup Bidang Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4 01 02 2.02 01	
	05 02 23 07	Pemerintah Umum	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Khotmil Qur'an oleh Khufad	Jumlah laporan kegiatan Hari Santri	1	Laporan	102.500.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah laporan kegiatan Khotmil Qur'an oleh Khufad									PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Lingkup Bidang Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4 01 02 2.02 01	
	05 02 23 08	Pemerintah Umum	Sekretariat Daerah	Penyelenggaraan dan pembinaan MTQ	Jumlah laporan kegiatan Khotmil Qur'an oleh Khufad	12	Laporan	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah laporan kegiatan penyelenggaraan dan pembinaan MTQ									PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Lingkup Bidang Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4 01 02 2.02 01	
	05 02 23 09	Pemerintah Umum	Sekretariat Daerah	Pelayanan Kegiatan Ibadah Haji	Jumlah laporan kegiatan penyelenggaraan dan pembinaan MTQ	3	Laporan	1.108.795.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah laporan kegiatan ibadah Haji									PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Lingkup Bidang Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4 01 02 2.02 01	
	05 02 23 10	Pemerintah Umum	Sekretariat Daerah	Koordinasi administratif sosial budaya	Jumlah laporan pelayanan kegiatan Ibadah Haji	2	Laporan	615.315.000	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Laporan hasil koordinasi administrasi sosial budaya									PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Lingkup Bidang Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4 01 02 2.02 02	
	05 02 23 11	Pemerintah Umum	Sekretariat Daerah	Monitoring dan Evaluasi hibah / bantuan sosial	Jumlah Laporan hasil koordinasi administrasi sosial budaya	15	Laporan	170.000.000	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada lembaga penerima hibah / bantuan sosial									PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Lingkup Bidang Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4 01 02 2.02 02	
	05 02 23 12	Pemerintah Umum	Sekretariat Daerah	Koordinasi Administratif Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada lembaga penerima hibah / bantuan sosial	673	Laporan	10.000.000	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Laporan hasil koordinasi administrasi kesejahteraan rakyat									PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Lingkup Bidang Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4 01 02 2.02 02	
					Jumlah Laporan hasil koordinasi administrasi kesejahteraan rakyat	15	Laporan	30.000.000																
BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	05.02.24	Pemerintah umum	Sekretariat Daerah	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	Presentase jumlah realisasi anggaran	87%		Rp -		Presentase Jumlah realisasi anggaran									PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Presentase jumlah realisasi anggaran	SEKRETARIAT DAERAH	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4.01.04	
					Presentase fasilitasi perlengkapan yang terpenuhi terhadap Rencana Kebutuhan Barang/Jasa	92%		Rp 2.000.000.000		Presentase fasilitasi perlengkapan yang terpenuhi terhadap Rencana Kebutuhan Barang/Jasa	Rp 2.000.000.000								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase fasilitasi perlengkapan yang terpenuhi terhadap Rencana Kebutuhan Barang/Jasa			4.01.01	
	24.07			1.Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Kerja Setda	Jumlah Dokumen	2	dokumen	Rp 33.624.250	Pengelolaan Perencanaan	Jumlah Dokumen	Rp 33.624.250	Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Dokumen						PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Jumlah Dokumen			4.01.04.2.04.01	
	24.01			2. Koordinasi dan Fasilitasi Keuangan	2.1 Jumlah pembayaran honor Pengelola Keuangan dan PTT	1112	OB	Rp 1.617.010.000	Pengelolaan Keuangan	2.1 Jumlah pembayaran honor Pengelola Keuangan dan PTT	Rp 1.617.010.000	Perencanaan dan Keuangan	2.1 Jumlah pembayaran honor Pengelola Keuangan dan PTT							PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	2.1 Jumlah pembayaran honor Pengelola Keuangan dan PTT			4.01.04.2.04.02
					2.2 Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keuangan	4	kali		Pengelolaan Keuangan	2.2 Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keuangan		Perencanaan dan Keuangan	2.2 Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keuangan							PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	2.2 Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keuangan			4.01.04.2.04.02
	24.02			3. Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian ATK, barang cetakan dan fotocopy	65	jenis	Rp 51.267.875	1. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian ATK, barang cetakan dan fotocopy	Rp 51.267.875	Administrasi Umum	Jumlah pembelian ATK, barang cetakan dan fotocopy							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah pembelian ATK, barang cetakan dan fotocopy			4.01.01.2.03.10
									2. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan			Administrasi Umum												4.01.01.2.03.11

24.03				4. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan	1	unit	Rp	36.207.500	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan	Rp	36.207.500	Administrasi Umum	Jumlah kendaraan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah kendaraan				4.01.01.2.03.20	
24.04				5. Pengadaan mebelair	Jumlah mebelair	10	unit	Rp	6.207.500	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebelair	Rp	6.207.500	Administrasi Umum	Jumlah mebelair		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah mebelair				4.01.01.2.03.25	
24.05				6. Pengadaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor	1	unit	Rp	13.267.875	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor	Rp	13.267.875	Administrasi Umum	Jumlah peralatan kantor		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah peralatan kantor				4.01.01.2.03.13	
24.06				7. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	1	unit	Rp	11.207.500	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Rp	11.207.500	Administrasi Umum	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan				4.01.01.2.03.22	
24.08				8. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana	8.1 Jumlah gedung kantor yang dipelihara	4	unit kali	Rp	201.207.500	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Rp	201.207.500	Administrasi Umum	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				4.01.01.2.03.28	
					8.2 Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	100	unit kali			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor			Administrasi Umum	Jumlah pemeliharaan gedung kantor		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor				4.01.01.2.03.32	
					8.3 Jumlah pemeliharaan mebelair	50	unit kali			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah pemeliharaan mebelair			Administrasi Umum	Jumlah pemeliharaan mebelair		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah pemeliharaan mebelair				4.01.01.2.03.35	
					8.4 Jumlah pemeliharaan peralatan kantor dan kendaraan kantor	219	unit kali			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor dan kendaraan kantor			Administrasi Umum	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor dan kendaraan kantor		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor dan kendaraan kantor				4.01.01.2.03.30	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				Administrasi Umum								4.01.01.2.03.34	
				9. Penyediaan Jasa Perkantoran Sekretariat Daerah	Jumlah Jasa Perkantoran Setda yang tersedia	5	jenis	Rp	30.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Perkantoran Setda yang tersedia	Rp	30.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Jasa Perkantoran Setda yang tersedia		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Jasa Perkantoran Setda yang tersedia					4.01.01.2.03.02
										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Administrasi Umum								4.01.01.2.03.03	
										Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Administrasi Keuangan								4.01.01.2.02.02	
				<b>Belanja Tidak Langsung ( Gaji)</b>				Rp	15.906.570.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp	15.906.570.000	Administrasi Keuangan			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					4.01.01.2.02.01	
<b>BAGIAN ORGANISASI</b>	5.02.17	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah	<b>PROGRAM OPTIMALISASI FASILITASI REFORMASI BIROKRASI</b>	1.1. Persentase Pelaporan Kinerja Perangkat daerah tepat waktu	97	persen					Rp	1.359.400.000										
	17.01			1.1.1. Koordinasi Pelaksanaan SAKIP Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan SAKIP	4	laporan			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4	Rp	332.240.000	Penataan Organisasi	Jumlah laporan hasil pembinaan SAKIP		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	1.1. Persentase Pelaporan Kinerja Perangkat daerah tepat waktu	SEKRETARIAT DAERAH		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.04.2.02.03	
	17.01				Jumlah laporan hasil pembinaan SAKIP setda	1	dokumen			Penatausahaan pelaporan	Jumlah laporan hasil pembinaan SAKIP setda			Perencanaan dan Keuangan	Jumlah laporan hasil pembinaan SAKIP setda		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.04.2.02.04	
	17.02			1.1.2. Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Budaya Kinerja (KBK)	Jumlah Unit Kerja yang mengikuti bimtek KBK	65	unit kerja			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	65	Rp	55.110.000	Penataan Organisasi	Jumlah Unit Kerja yang mengikuti bimtek KBK		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	1.1. Persentase Pelaporan Kinerja Perangkat daerah tepat waktu	SEKRETARIAT DAERAH		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.04.2.02.03	

	17.03			1.1.3. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Setda.	Jumlah dokumen kepegawaian setda.	10	dokumen		10	Rp	4.900.000	Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah dokumen kepegawaian setda.		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	1.1. Persentase Pelaporan Kinerja Perangkat daerah tepat waktu	SEKRETARIAT DAERAH		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.04.2.01.01
					1.2. Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	95	persen													
	17.04			1.2.1. Evaluasi Penataan dan Penetapan SOTK Kelembagaan OPD	Jumlah perangkat daerah yg dievaluasi Kelembagaannya	56	perangkat darah		56	Rp	89.300.000	Penataan Organisasi	Jumlah perangkat daerah yg dievaluasi Kelembagaannya		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	1.2. Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	SEKRETARIAT DAERAH		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.04.2.02.01
				1.2.2. Penyusunan Analisa Jabatan/ Analisa Beban Kerja/SKJ/ Evjab	Jumlah dokumen klasifikasi jabatan perangkat daerah	56	dokumen		56	Rp	400.200.000	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen klasifikasi jabatan perangkat daerah		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	1.2. Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	SEKRETARIAT DAERAH		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.04.2.02.01
	17.05				1.3. Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai standart pelayanan	94	persen													
	17.06			1.3.1. Pembinaan Kinerja Lembaga Pelayanan Publik	Jumlah unit kerja yang dibina pelayanan publik	65	unit kerja		65	Rp	477.650.000	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen klasifikasi jabatan perangkat daerah		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	1.3. Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai standart pelayanan	SEKRETARIAT DAERAH		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.04.2.02.02
	17.07			1.3.2. Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan / dokumen hasil koordinasi	3	laporan		3			Penataan Organisasi	Jumlah dokumen klasifikasi jabatan perangkat daerah		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	1.3. Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai standart pelayanan	SEKRETARIAT DAERAH		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.04.2.02.03
									Jumlah laporan / dokumen hasil RB Setda			Perencanaan dan Keuangan	Jumlah laporan / dokumen hasil RB Setda							
	17.08			1.3.3. Pembinaan Ketatalaksanaan Unit Kerja	Jumlah unit kerja yang dibina ketatalaksanaan pemerintahan	65	unit kerja		65	Rp	74.600.000	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen klasifikasi jabatan perangkat daerah		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	1.3. Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai standart pelayanan	SEKRETARIAT DAERAH		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.04.2.02.02
BAGIAN UMUM	00.00.01	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	100	persen	6.397.600.000			6.397.600.000			Rp	6.397.600.000					
	01.02			1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah rekening tip, air minum & listrik yg terbayar	83	rek-bulan	1.096.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening tip, air minum & listrik yg terbayar	1.096.800.000	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	Rp	1.096.800.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4.01.03.01.02
	01.03			2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor	20	kegiatan	104.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor	104.000.000	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	Rp	104.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4.01.03.01.03
	01.08			3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah pembayaran honor petugas kebersihan yang terbayarkan dan pembelian alat kebersihan	4	jenis	976.800.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah pembayaran honor petugas kebersihan yang terbayarkan dan pembelian alat kebersihan	976.800.000	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	Rp	976.800.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4.01.03.01.08
	01.10			4. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor	30	jenis	10.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor	10.000.000	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	Rp	10.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4.01.03.01.10
	01.11			5. Kegiatan : Penyediaan Brg Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan & penggandaan	6	jenis	50.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan & penggandaan	50.000.000	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	Rp	50.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4.01.03.01.11
	01.13			6. Kegiatan : Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	35	jenis	85.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	85.000.000	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	Rp	85.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4.01.03.01.13
	01.14			6. Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pembelian peralatan rumah tangga	35	jenis	90.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pembelian peralatan rumah tangga	90.000.000	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	Rp	90.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4.01.03.01.14



01.17			7. Kegiatan : Penyediaan Makanan & Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu	150	kegiatan	1.790.375.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu	1.790.375.000	Administrasi Umum	Presentase pemenuhan administrasi umum	Rp 1.790.375.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4.01.03.01.17
01.18			8. Kegiatan : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan perjalanan dinas luar Setda	250	laporan	1.000.000.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan perjalanan dinas luar Setda	1.000.000.000	Administrasi Umum	Presentase pemenuhan administrasi umum	Rp 1.000.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4.01.03.01.18
01.19			9. Kegiatan : Penyediaan Jasa Parkir Kantor	Jumlah jenis jasa perkantoran yang terbayarkan	12	bulan	1.194.625.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jenis jasa perkantoran yang terbayarkan	1.194.625.000	Administrasi Umum	Presentase pemenuhan administrasi umum	Rp 1.194.625.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4.01.03.01.19
00.00.02			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kondisi baik	100	persen	3.047.400.000			3.047.400.000			Rp 3.047.400.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	
02.16			1. Kegiatan : Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah dinas / jabatan	4	jenis	300.000.000	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah dinas / jabatan	300.000.000	Administrasi Umum	Presentase pemenuhan administrasi umum	Rp 300.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4.01.03.02.08
02.11			2. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumdin yang dipelihara	2	unit	251.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumdin yang dipelihara	251.000.000	Administrasi Umum	Presentase pemenuhan administrasi umum	Rp 251.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4.01.03.02.20
02.14			3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	3	unit	355.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	355.000.000	Administrasi Umum	Presentase pemenuhan administrasi umum	Rp 355.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4.01.03.02.23
02.15			4. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional Setda yang dipelihara	51	unit	1.965.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional Setda yang dipelihara	1.965.000.000	Administrasi Umum	Presentase pemenuhan administrasi umum	Rp 1.965.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4.01.03.02.24
02.16			5. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara	-	-	-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara	-	Administrasi Umum	Presentase pemenuhan administrasi umum	Rp -	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4.01.03.02.31
05.02.25			6. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dipelihara	10	jenis	176.400.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dipelihara	176.400.000	Administrasi Umum	Presentase pemenuhan administrasi umum	Rp 176.400.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	
25.06			PROGAM PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase tercapainya target kinerja output	100	persen	555.000.000			555.000.000			Rp 555.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4.01.03.49.01
05.07			1. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati	4	stel	55.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati	55.000.000	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase tercapainya peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 55.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4.01.03.49.02
25.08			2. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan	250	orang	35.000.000	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan	35.000.000	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase tercapainya peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 35.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4.01.03.49.03
25.01			3. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian olah raga	6	stel	60.000.000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian olah raga	60.000.000	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase tercapainya peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 60.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4.01.03.49.04
25.02			4. Kegiatan : Dialog/Audensi dengan Tokoh - tokoh Masyarakat Pimpinan/Anggota Oras & Masyarakat	Jumlah kegiatan dialog/audensi	24	acara	50.000.000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah kegiatan dialog/audensi	50.000.000	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Presentase tercapainya target protokol dan komunikasi pimpinan	Rp 50.000.000	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase tercapainya target administrasi umum	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4.01.03.49.05
25.03			5. Kegiatan : Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri	Jumlah kunjungan tamu ke Kabupaten Pasuruan	12	kegiatan	25.000.000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah kunjungan tamu ke Kabupaten Pasuruan	25.000.000	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Presentase tercapainya target protokol dan komunikasi pimpinan	Rp 25.000.000	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase tercapainya target administrasi umum	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4.01.03.49.06
25.04			6. Kegiatan : Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam daerah KDH dan WKDH serta patwal	120	laporan	240.000.000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam daerah KDH dan WKDH serta patwal	240.000.000	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Presentase tercapainya target protokol dan komunikasi pimpinan	Rp 240.000.000	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase tercapainya target administrasi umum	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4.01.03.49.07
25.05			7. Kegiatan : Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah laporan perjalanan dinas luar daerah KDH dan WKDH	60	laporan	-	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan perjalanan dinas luar daerah KDH dan WKDH	-	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Presentase tercapainya target protokol dan komunikasi pimpinan	Rp -	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase tercapainya target administrasi umum	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4.01.03.49.08
			8. Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis pelayanan kesehatan KDH dan WKDH	2	jenis	90.000.000	Pengelolaan Rumah Tangga	Jumlah jenis pelayanan kesehatan KDH dan WKDH	90.000.000	Pelaksanaan Administrasi Umum	Presentase tercapainya target pelayanan kesehatan KDH dan WKDH	Rp 90.000.000	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase tercapainya target administrasi umum	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	

**PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA 2021							PERMENDAGRI 90/2019								
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				BTL GAJI SETWAN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				4 02 01 02.02 02
				BTL GAJI DPRD				Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN				4 02 02 2.02 01
SEKRETARIAT DPRD	05 03 15	Pemerintahan Umum	Sekretariat DPRD	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Prosentase Fasilitasi Fungsi DPRD	100	persen					PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4 02 03
	05 03 15 01			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda yang dibahas			Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Raperda yang dibahas	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah perda dan peraturan dprd yang dibentuk	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4 02 03 02.01 02

	05 03 15 02		Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan masyarakat	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase kelengkapan laporan anggota DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4 02 03 02.04 06
	05 03 15 03		Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah laporan hasil rapat Paripurna			Fasilitasi Rapat DPRD	Jumlah notulen hasil rapat	Layanan Administrasi DPRD	Persentase pemenuhan administrasi	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Persentase pemenuhan layanan adm dan keuangan	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4 02 02 02..01 02
	05 03 15 04		Kegiatan Reses	Jumlah laporan kegiatan reses/tahun			Pelaksanaan Reses	Jumlah laporan hasil reses	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase kelengkapan dokumen aspirasi masyarakat	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4 02 03 02.05 03
	05 03 15 05		Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	Jumlah laporan hasil kunjungan kerja			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah laporan hasil Konsultasi & Koordinasi	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase kelengkapan laporan anggota DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4 02 03 02.08 01
	05 03 15 06		Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah laporan BIMTEK			Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah anggota DPRD mengikuti bimtek	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase kelengkapan laporan anggota DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4 02 03 02.04 02
	05 03 15 07		Pelantikan Antar Waktu DPRD Kabupaten Pasuruan	Jumlah PAW/tahun			Fasilitasi Rapat DPRD	Jumlah PAW/tahun	Layanan Administrasi DPRD	Persentase pemenuhan administrasi	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Persentase pemenuhan layanan adm dan keuangan	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4 02 02 02..01 02

	05 03 15 08		General Check Up DPRD Kabupaten Pasuruan	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan check-up			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah anggota DPRD mengikuti medical check up	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase pemenuhan keuangan dan kesejahteraan	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Persentase pemenuhan layanan adm dan keuangan	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4 02 02 02..02 03
	05 03 15 09		LKPJ Bupati	Jumlah laporan rapat Paripurna LKPJ			Fasilitasi Rapat DPRD	Jumlah notulen hasil rapat Paripurna LKPJ	Layanan Administrasi DPRD	Persentase pemenuhan administrasi	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Persentase pemenuhan layanan adm dan keuangan	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4 02 02 02..01 02
	05 03 01		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	100	persen					<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4 02 01
	05 03 01 01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim melalui jasa kurir	1.000	surat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim melalui jasa kurir	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4 02 01 02.03 01
	05 03 01 02		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik Telepon	Jumlah pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet selama 12 bulan	276	rek-bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet selama 12 bulan	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4 02 01 02.03 02

	05 03 01 03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	672	unit	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4 02 01 02.03 03
	05 03 01 04		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	24	unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4 02 01 02.03 06
	05 03 01 05		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honorarium pejabat piñata usahaan keuangan, kegiatan dan pelaku pengadaan barang/jasa	168	org-bulan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honorarium pejabat piñata usahaan keuangan, kegiatan dan pelaku pengadaan barang/jasa	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4 02 01 02.03 07
	05 03 01 06		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah pembayaran honor jasa kebersihan	84	org-bulan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah pembayaran honor jasa kebersihan	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4 02 01 02.03 08

	05 03 01 07		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor	168	jenis-kali	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4 02 01 02.03 10
	05 03 01 08		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	72	jenis-kali	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4 02 01 02.03 11
	05 03 01 09		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah pembelian komponen	288	unit	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pembelian komponen	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4 02 01 02.03 12
	05 03 01 10		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat	12.580	orang	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4 02 01 02.03 17
	05 03 01 11		Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak dan THL	480	org-bulan	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak dan THL	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4 02 01 02.02 02



	05 03 02 03		Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	10	unit	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4 02 01 02.03 24
	05 03 02 04		Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	6	unit-kali	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4 02 01 02.03 28
	05 03 02 05		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	228	unit-kali	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4 02 01 02.03 30
	05 03 02 06		Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	168	unit-kali	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4 02 01 02.03 34

**Pasuruan, 9 Juli 2020**  
**SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PASURUAN**

Ttd.

**Drs. ABDUL MUNIF AR, SH. M.pd**  
**Pembina Utama Muda/ IVc**  
**NIP. 19630607 198303 1 007**



DIISIKAN SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAM YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH								DIISIKAN PROGRAM,KEGIATAN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PERANGKAT DAERAH							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan kantor	100	%									
				1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia	12	bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.01.2.03.02
				2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jml Jasa administrasi keuangan yang dilaksanakan	12	bulan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jml Jasa administrasi keuangan yang dilaksanakan	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.01.2.03.07
				3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jml Jasa Kebersihan Kantor yang dibayarkan	12	bulan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jml Jasa Kebersihan Kantor yang dibayarkan	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.01.2.03.08
				4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kebutuhan ATK yang tersedia	12	bulan	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kebutuhan ATK yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.01.2.03.10
				5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jml kebutuhan Barang Cetak yang tersedia	12	bulan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jml kebutuhan Barang Cetak yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.01.2.03.11
				6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan & Perlengkapan Kantor yang tersedia	12	Buah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan & Perlengkapan Kantor yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.01.2.03.13
				7. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jml Makanan dan minuman rapat yang tersedia	12	bulan	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jml Makanan dan minuman rapat yang tersedia	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.01.2.03.17
				8. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan dinas untuk rapat dan konsultasi ke luar daerah	12	bulan	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan dinas untuk rapat dan konsultasi ke luar daerah	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.01.2.03.18
				9. Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah Jasa perkantoran yang tersedia	12	bulan	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah pembayaran jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/perikatan	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.01.2.02.02
				10. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jml laporan dan realisasi kinerja OPD yg tersusun	12	lap	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jml laporan dan realisasi kinerja OPD yg tersusun	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.01.2.02.06
				11. Penyusunan Pelaporan Prognosis Semesteran dan Realisasi Keuangan Akhir Tahun	Jml laporan prognosis semesteran dan realisasi keuangan akhir tahun yg disusun	2	lap	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jml laporan prognosis semesteran dan realisasi keuangan akhir tahun yg disusun	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.01.2.02.08

				12	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jml SDA yg mengikuti Diklat formal	15	orang	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jml aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (kode?)	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.01.2.04.09
				13	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi	Jml masyarakat yg mengikuti sosialisasi peraturan Perundang - undangan Jasa Konstruksi	100	orang	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jml masyarakat yg mengikuti sosialisasi peraturan Perundang - undangan Jasa Konstruksi	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.01.2.04.10
				14	Penyelenggaraan Bimtek Tenaga Terampil Kontruksi	Jml masy yg mengikuti Bimtek Tenaga Terampil jasa Kontruksi	100	orang	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jml masy yg mengikuti Bimtek Tenaga Terampil jasa Kontruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jml masy yg mengikuti Bimtek Tenaga Terampil jasa Kontruksi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.11.2.01.04
01.03.13			SEKRETARIAT		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana kondisi baik	42	%									
				1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jml Kendaraan Dinas operasional yg diadakan			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jml Kendaraan Dinas operasional yg diadakan	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.01.2.03.20
				2	Pengadaan Mebelair	Jml Mebelair yg diadakan	6	unit	Pengadaan Mebeleur	Jml Mebelair yg diadakan	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.01.2.03.25
				3	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yg diadakan	11	unit	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah Peralatan Kantor yg diadakan	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.01.2.03.24
				4	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yg dipelihara	1	unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yg dipelihara	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.01.2.03.28
				5	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yg dipelihara	10	unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yg dipelihara	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.01.2.03.30
				6	Pemeliharaan Rutin/berkala Mebelair	Jumlah Mebelair yg dipelihara	1	buah	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebelair yg dipelihara	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.01.2.03.35
				7	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yg dipelihara	4	buah	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yg dipelihara	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.01.2.03.34
01.03.03			PERENCANAAN		Program Perencanaan dan Pengendalian Jaringan Jalan	Prosentase Perencanaan dan Pengendalian yang ditindaklanjuti	100	%									
				1	Penyusunan Perencanaan Umum dan Teknis	Jml dok perencanaan umum dan teknis yg dihasilkan	285	dok/12keg	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	Jml dok perencanaan umum dan teknis yg dihasilkan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun / ditingkatkan	PROGRAM PENYELenggaraAN JALAN	Persentase jalan yang dibangun / ditingkatkan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.10.2.01.01
				2	Penyelenggaraan Study Kelayakan Jaringan Jalan	Jumlah Dokumen hasil Study Kelayakan Jaringan Jalan	1	dok	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	Jumlah Dokumen hasil Study Kelayakan Jaringan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun / ditingkatkan	PROGRAM PENYELenggaraAN JALAN	Persentase jalan yang dibangun / ditingkatkan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.10.2.01.01





				- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan (DAU)	Jumlah jembatan yang dipelihara	11	bh	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun / ditingkatkan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan yang dibangun / ditingkatkan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.10.2.01.20
				- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan ( BK Propinsi)	Jumlah jembatan yang dipelihara	11	bh	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun / ditingkatkan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan yang dibangun / ditingkatkan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.10.2.01.20
				4 Pemeliharaan Jalan / Jembatan untuk menunjang Karya Bhakti TNI	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan	1.25	km	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun / ditingkatkan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan yang dibangun / ditingkatkan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.10.2.01.10
				5 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Jumlah LPJU yang dipelihara	4.000	titik	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah LPJU yang dipelihara	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun / ditingkatkan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan yang dibangun / ditingkatkan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.10.2.01.11
01.03.04			PEMELIHARAAN	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	Prosentase Peningkatan Sarana & Prasarana Kebinarmargaan	92,00%										
				1. Pengadaan Alat Berat	Jumlah alat berat dan peralatan yang diadakan	1	unit	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jml Kendaraan Dinas operasional yg diadakan	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.01.2.03.20
				2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat	Jumlah alat - alat berat yang dipelihara	1	pk	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah alat - alat berat yang dipelihara	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun / ditingkatkan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan yang dibangun / ditingkatkan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.10.2.01.11
				3. Pemeliharaan Median Jalan	Panjang median yang dilakukan pemeliharaan	10	km	Rehabilitasi Jalan	Panjang median yang dilakukan pemeliharaan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun / ditingkatkan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan yang dibangun / ditingkatkan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.10.2.01.09
				4. Pemeliharaan Trotoar Jalan	Panjang trotoar yang dilakukan pemeliharaan	3	km	Rehabilitasi Jalan	Panjang trotoar yang dilakukan pemeliharaan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun / ditingkatkan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan yang dibangun / ditingkatkan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.10.2.01.09
				5. Rehabilitasi /Pemeliharaan Alat alat Berat	Jumlah alat berat yang dipelihara	2	unit	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah alat berat yang dipelihara	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun / ditingkatkan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan yang dibangun / ditingkatkan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.10.2.01.11
				6. Pemeliharaan Monumen dan Tugu Batas	Jumlah Monumen Tugu Batas yang dipelihara	4	bh	Rehabilitasi Jalan	Jumlah Monumen Tugu Batas yang dipelihara	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun / ditingkatkan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan yang dibangun / ditingkatkan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.10.2.01.09
				7. Rehabilitasi / Pemeliharaan Laboratorium	Jml Gedung Lab yang dilakukan pemeliharaan	1	unit	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jml Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium yg diadakan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun / ditingkatkan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan yang dibangun / ditingkatkan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.10.2.01.04
				8. Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat	Jml Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat yg dilakukan pemeliharaan	2	unit	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jml Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat yg dilakukan pemeliharaan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun / ditingkatkan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan yang dibangun / ditingkatkan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.10.2.01.11
				9. Rehabilitasi/Pemeliharaan gedung workshop	Jml gedung workshop yg dilakukan pemeliharaan	1	unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yg dipelihara	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.01.2.03.28
				10. Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium	Jml Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium yg diadakan	1	pk	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jml Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium yg diadakan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun / ditingkatkan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan yang dibangun / ditingkatkan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.10.2.01.04

				11	Monev dan Pelaporan LPJU	Lap. Monev dan Pelaporan LPJU	12	bln/lap	Pemeliharaan Rutin Jalan	Lap. Monev dan Pelaporan LPJU	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun / ditingkatkan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan yang dibangun / ditingkatkan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.10.2.01.11
01.03.05			PEMBANGUNAN	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	1. Prosentase panjang jaringan jalan yang berkategori rusak yang dilakukan peningkatan	10,50%											
					2. Prosentase panjang jaringan jalan yang berkategori rusak yang dilakukan pemeliharaan	9,04%											
				1.	Pemb/rehab/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong)	Panjang drainase/gorong-gorong yang dibangun	-	km	Rehabilitasi Jalan	Panjang drainase / gorong - gorong yang dibangun	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun / ditingkatkan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan yang dibangun / ditingkatkan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.10.2.01.09
				2.	Pemb/rehab/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (Pembangunan Turap/Talud/Bronjong)	Panjang turap/talud/bronjong yang dibangun	-	m	Pembangunan Jalan	Panjang turap/talud/bronjong yang dibangun	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun / ditingkatkan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan yang dibangun / ditingkatkan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.10.2.01.09
				3.	Pemb/rehab/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (Peningkatan Jalan)	Panjang jalan yang ditingkatkan	6,5	km	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun / ditingkatkan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan yang dibangun / ditingkatkan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.10.2.01.08
				4.	Pemb/rehab/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan)	Jumlah jembatan yang direhabilitasi/dipelihara	11	bh	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi/dipelihara	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun / ditingkatkan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan yang dibangun / ditingkatkan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.10.2.01.18
				5.	Pemb/rehab/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (Pemeliharaan Skala Periodik/Berkala Jalan)	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan skala periodik/berkala jalan	7,10	km	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan skala periodik/berkala jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun / ditingkatkan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan yang dibangun / ditingkatkan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.10.2.01.10

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

ORGANISASI	RENSTRA / RENJA							SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN									
BPBD	1.05	Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Wajib Pelayanan Dasar	1.05
	5.2.01			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan kantor</b>	<b>100</b>	<b>%</b>									
	5.2.01.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik / air / telepon	24	rek-bln	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik / air / telepon	Administrasi Umum	Jumlah pembayaran listrik / air / telepon	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan kantor</b>			01.2.03.02
	5.2.01.07			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan	144	org-bln	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan	Administrasi Umum	Jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan kantor</b>			01.2.03.07
	5.2.01.08			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor jasa kebersihan	12	org-bln	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor jasa kebersihan	Administrasi Umum	Honor jasa kebersihan	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan kantor</b>			01.2.03.08
	5.2.01.10			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian ATK	50	jenis-kali	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian ATK	Administrasi Umum	Jumlah pembelian ATK	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan kantor</b>			01.2.03.10
	5.2.01.11			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	23.200	eks.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	Administrasi Umum	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan kantor</b>			01.2.03.11
	5.2.01.13			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan kantor	430	unit	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan kantor	Administrasi Umum	Jumlah pembelian peralatan kantor	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan kantor</b>			01.2.03.13
	5.2.01.17			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu	60	kali	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu	Administrasi Umum	Jumlah kegiatan rapat dan tamu	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan kantor</b>			01.2.03.17

	5.2.01.18			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	170	org-kali	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Administrasi Umum	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan kantor			01.2.03.18
	5.2.01.19			Penyediaan Jasa Perkantoran	Honor tenaga kontrak/THL	48	org-kali	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan kantor			02.02.01.080
	5.2.01.19			Penyediaan Pakaian Kerja	Jenis pengadaan pakaian kerja lapangan	40	buah	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jenis pengadaan pakaian kerja lapangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jenis pengadaan pakaian kerja lapangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan kantor			01.2.04.03
	5.2.01.22			Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4	orang	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan kantor			01.2.04.09
	5.2.01.23			Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Laporan kinerja tribulanan dan tahunan	1	dokumen	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja tribulanan dan tahunan	Administrasi Keuangan	Laporan kinerja tribulanan dan tahunan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan kantor			01.2.02.06
	5.2.02			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarpras kondisi baik</b>	<b>100</b>	<b>%</b>									
	5.2.02.11			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	3	unit	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Administrasi Umum	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarpras kondisi baik			01.2.04.09
	5.2.02.11			Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	6	unit	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	Administrasi Umum	Jumlah pengadaan peralatan kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarpras kondisi baik			01.2.03.24
	5.2.02.22			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	Luas gedung yang dapat pemeliharaan	370	m2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luas gedung yang dapat pemeliharaan	Administrasi Umum	Luas gedung yang dapat pemeliharaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarpras kondisi baik			01.2.03.28
	5.2.02.24			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	16	unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	Administrasi Umum	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarpras kondisi baik			01.2.03.30
	5.2.02.30			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jenis peralatan kantor yang mendapat pemeliharaan	5	jenis	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jenis peralatan kantor yang mendapat pemeliharaan	Administrasi Umum	Jenis peralatan kantor yang mendapat pemeliharaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarpras kondisi baik			01.2.03.34





5.2.23.01			Penyediaan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pangan, Sandang, Air Bersih, Huntara dan Sanitasi Darurat Bencana	Jenis bantuan yang diberikan pada korban bencana	4	jenis	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jenis bantuan yang diberikan pada korban bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jenis bantuan yang diberikan pada korban bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar			03.2.03.04
5.2.23.04			Pusdalops Penanggulangan Bencana	Jenis bencana yang dilaporkan	5	jenis	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota	Jenis bencana yang dilaporkan	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jenis bencana yang dilaporkan	Program Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar			03.2.02.03
							Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jenis bencana yang dilaporkan	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jenis bencana yang dilaporkan	Program Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar			03.2.03.02
							Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jenis bencana yang dilaporkan	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jenis bencana yang dilaporkan	Program Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar			03.2.03.03
5.2.23.05			Pengadaan Perlengkapan Logistik, serta Sarana dan Prasarana Peralatan Penanggulangan Bencana	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	1	perahu cano	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar			03.2.02.04
5.2.24			<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>	<b>Persentase usulan pemulihan daerah terdampak yang ditindaklanjuti</b>	100	%									
5.2.24.01			Penyusunan Program, Rencana dan Evaluasi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Jumlah dokumen rencana dan evaluasi RR yang disusun	1	dok	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana dan evaluasi RR yang disusun	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah dokumen rencana dan evaluasi RR yang disusun	Program Penanggulangan Bencana	Persentase usulan pemulihan daerah terdampak yang ditindaklanjuti			03.2.02.07
5.2.24.02			Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Masa Pemulihan	Jenis bantuan material	5	jenis	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jenis bantuan material	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jenis bantuan material	Program Penanggulangan Bencana	Persentase usulan pemulihan daerah terdampak yang ditindaklanjuti			03.2.02.07

Pasuruan, 2020  
Kepala Pelaksana BPBD  
Kabupaten Pasuruan,

Ttd.

**TECTONA JATI KHM., S.STP., M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19750807 199511 1 002

Struktur Organisasi	Renstra/Renja PD							Permendagri 90 Tahun 2019											
	Kode	Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Keg	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Kode			
Sekretariat	2.09.2.09.01.01	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	BELANJA TIDAK LANGSUNG										Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.01.1.02.01			
				Belanja Pegawai				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Administrasi Keuangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	100	persen							Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
	.02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayar	12	bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayar	Administrasi Umum	jumlah rekening yang dibayar	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.01.1.03.02
	.05						Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	jumlah kendaraan yang di asuransikan	10	kendaraan	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	jumlah kendaraan yang di asuransikan	Administrasi Umum	jumlah kendaraan yang di asuransikan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.01.1.03.05
	.06						Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	jumlah kendaraan yang telah berizin	36	kendaraan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	jumlah kendaraan yang telah berizin	Administrasi Umum	jumlah kendaraan yang telah berizin	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.01.1.03.06
	.07						Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah pengelolaan keuangan	12	bulan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah pengelolaan keuangan	Administrasi Umum	jumlah pengelolaan keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.01.1.03.07
	.10						Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah / jenis pengadaan	12	bulan	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah / jenis pengadaan	Administrasi Umum	jumlah / jenis pengadaan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.01.1.03.10
	.11						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah/unit pengadaan	12	bulan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah/unit pengadaan	Administrasi Umum	jumlah/unit pengadaan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.01.1.03.11
	.12						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	jumlah pembelian komponen	10	jenis	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	jumlah pembelian komponen	Administrasi Umum	jumlah pembelian komponen	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.01.1.03.12
	.13						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah/unit pengadaan	12	bulan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah/unit pengadaan	Administrasi Umum	jumlah/unit pengadaan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.01.1.03.13
	.14						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah pembelian peralatan rumah tangga	10	jenis	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah pembelian peralatan rumah tangga	Administrasi Umum	jumlah pembelian peralatan rumah tangga	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.01.1.03.14
	.17						Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah orang yang terlayani mamin	12	bulan	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah orang yang terlayani mamin	Administrasi Umum	jumlah orang yang terlayani mamin	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.01.1.03.17

kuncinya output

	.18			Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	jumlah laporan hasil koordinasi	12 bulan	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	jumlah laporan hasil koordinasi	Administrasi Umum	jumlah laporan hasil koordinasi	Program Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.01.1.03.18	
	.19			Penyediaan Jasa Perkantoran	jumlah tenaga kontrak yang dipersyaratkan	12 bulan	penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	jumlah pembayaran jasa keberishan	Administrasi keuangan	jumlah pembayaran jasa keberishan	Program Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.01.1.02.02	
								jumlah pembayaran jasa petugas kegiatan kantor/lapangan melalui perjanjian/perikatan		jumlah pembayaran jasa petugas kegiatan kantor/lapangan melalui perjanjian/perikatan						
	.22			Pengembangan Sumber Daya Aparatur	jumlah aparatur yang melaksanakan bimtek dan diklat	80 orang								Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	SUDAH ADA	
sekretariat	2.09.2.09.01.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	presentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100 %							Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
	.05			Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	jumlah kendaraan yang diadakan	6 unit	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Administrasi Umum	jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Program Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	presentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.01.1.03.21	
								Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan yang diadakan		Jumlah kendaraan jabatan yang diadakan					2.15.01.1.03.20
	.10			Pengadaan Mebelair	jumlah mebelair yang diadakan	50 unit		jumlah mebelair yang diadakan	Administrasi Umum	jumlah mebelair yang diadakan	Program Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	presentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.01.1.03.26	
	.11			Pengadaan Peralatan Kantor	jumlah/jenis peralatan kantor yang diadakan	25 unit	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah/jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	Administrasi Umum	jumlah/jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	Program Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	presentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.01.1.03.25	
	.22			Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 lokasi	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	Administrasi Umum	jumlah gedung kantor yang dipelihara	Program Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	presentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.01.1.03.29	
	.24			Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan yang dipelihara	36 kendaraan	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	jumlah kendaraan yang dipelihara	Administrasi Umum	jumlah kendaraan yang dipelihara	Program Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	presentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.01.1.03.30	
							Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas atau operasional	jumlah kendaraan yang dipelihara	Administrasi Umum	jumlah kendaraan yang dipelihara						2.15.01.1.03.31

	30			Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	jumlah peralatan kantor yang dipelihara	65	unit	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Administrasi Umum	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Program Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	presentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.01.1.03.35		
sekretariat	2.09.2.09.01.05	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>														
	.01			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peserta Diklat	10	orang	Pendidikan dan Pelatihan formal	Jumlah Peserta Diklat	peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Peserta Diklat	Program Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase kelulusan aparatur yang mengikuti	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.01.1.04.09		
	.03			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek	50	orang	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimtek	peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Peserta Bimtek	Program Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase kelulusan aparatur yang mengikuti	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.01.1.04.11		
				pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Yang diadakan	125	stel	pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Yang diadakan	peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Pakaian Yang diadakan	Program Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan atribut dan seragam aparatur	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.01.1.04.02		
				pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian Yang diadakan	30	stel	pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian Yang diadakan	peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Pakaian Yang diadakan	Program Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan atribut dan seragam aparatur	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.01.1.04.03		
	2.09.2.09.01.06			<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Prosentase Capaian Kinerja Yang dicapai													
	.01			penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SIPKD	Meningkatnya capaian kinerja pegawai dishub	70	%	penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SIPKD	Meningkatnya capaian kinerja pegawai dishub	Administrasi Keuangan	penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SIPKD	Program Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan atribut dan seragam aparatur	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.01.1.02.06		
Bidang Angkutan	2.09.2.09.01.23	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM</b>	presentase angkutan umum yang melayani wilayah wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kab/kota	11,29	%							Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
Seksi Pembinaan dan Keselamatan, Seksi Angkutan Laut	.01			Fasilitas Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Angkutan	jumlah sosoaliasi yang diadakan	6	layan	penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	jumlah sosoaliasi yang diadakan	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sosoaliasi yang diadakan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	% wilayah yang terkoneksi Angkutan Umum	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.02.2.11.02		

Seksi Angkutan Darat	.02	Pelayanan Dasar	Perhubungan	Kegiatan Penciptaan Layanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah	jumlah siswa/masyarakat yang menggunakan angkutan umum	98,304	orang	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten	jumlah siswa/masyarakat yang menggunakan angkutan umum	Penyediaan Angkutan umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah siswa/masyarakat yang menggunakan angkutan umum	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	% wilayah yang terkoneksi Angkutan Umum	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.02.2.09.01		
Seksi Pembinaan dan Keselamatan, Seksi Angkutan Laut	.02			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Angkutan	jumlah laporan monev angkutan	11	laporan	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah laporan monev angkutan	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan monev angkutan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	% wilayah yang terkoneksi Angkutan Umum	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.02.2.14.02		
UPT-PKB	.04	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan	jumlah kendaraan yang lulus uji	12	unit	Registrasi Kendaraan Wajib UjiBerkala Kendaraan Bermotor	jumlah kendaraan yang lulus uji	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah kendaraan yang lulus uji	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	% wilayah yang terkoneksi Angkutan Umum	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.02.2.05.03		
								Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor	jumlah kendaraan yang lulus uji		jumlah kendaraan yang lulus uji						2.15.02.2.05.04	
								Sosialisasi Standar Operaional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah kendaraan yang lulus uji			jumlah kendaraan yang lulus uji						2.15.02.2.05.05
								identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	jumlah kendaraan yang lulus uji			jumlah kendaraan yang lulus uji						2.15.02.2.05.06
								Koordinasi Penyelenggaran Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah koordinasi yang dilaksanakan			jumlah koordinasi yang dilaksanakan						2.15.02.2.05.08
								Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	kesesuaian tarif retribusi			kesesuaian tarif retribusi						2.15.02.2.05.09
								Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaran Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah monev yang dilaksanakan			jumlah monev yang dilaksanakan						2.15.02.2.05.10
Bidang Pengembangan Transportasi	2.09.2.09.01.24			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA &amp; PRASARANA FASILITAS PERHUBUNGAN</b>	presentase rekomendasi dokumen bidang perhubungan yang terimplementasi	30	%						Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				

Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan sarpras	.01	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	jumlah sarana fasilitas perhubungan yang di terpelihara	3	lokasi	jumlah sarana fasilitas perhubungan yang di terpelihara	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	% wilayah yang terkoneksi Angkutan Umum	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.02.2.03.03	
				Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana terminal	jumlah sarana fasilitas perhubungan yang di terpelihara	3	lokasi	jumlah sarana fasilitas perhubungan yang di terpelihara	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	% wilayah yang terkoneksi Angkutan Umum	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.02.2.03.04	
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah sarana fasilitas perhubungan yang di terpelihara	3	lokasi	jumlah sarana fasilitas perhubungan yang di terpelihara	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	% wilayah yang terkoneksi Angkutan Umum	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.02.2.03.04	
Seksi Pengelolaan Data Transportasi	.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	jumlah laporan monev	12	laporan	jumlah laporan monev	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	% wilayah yang terkoneksi Angkutan Umum	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.02.2.01.03	
Seksi Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi	.03			Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	jumlah titik pemasangan alat penurun kecelakaan	5	lokasi	jumlah titik pemasangan alat penurun kecelakaan	Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	% wilayah yang terkoneksi Angkutan Umum	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.02.2.02.02
Seksi Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi	.05			Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	jumlah dokumen perencanaan yang dibuat	1	dokumen	jumlah dokumen perencanaan yang dibuat	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	% wilayah yang terkoneksi Angkutan Umum	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.02.2.01.01
						Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perencanaan yang dibuat	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.15.02.2.11.01		
						Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal tipe c	jumlah dokumen perencanaan yang dibuat		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				2.15.02.2.03.01	
Seksi Pengembangan Sarana & Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	.06	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Pengembangan Sarana & Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	jumlah alat uji yang di rehabilitasi dan diadakan	16 dan 2	unit	jumlah alat uji yang di rehabilitasi dan diadakan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	% wilayah yang terkoneksi Angkutan Umum	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.02.2.05.07	
								Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah alat uji yang di rehabilitasi dan diadakan					2.15.02.2.05.01
Bidang LLAJ	2.09.2.09.01.25					<b>PROGRAM PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN JALAN</b>	presentasi fasilitas LLAJ yang terpasang	36,36	%				Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Seksi Manajemen Rekayasa	.01	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keselamatan Jalan	jumlah laporan hasil monev	12	laporan	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	jumlah laporan hasil monev	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	jumlah laporan hasil monev	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	% wilayah yang terkoneksi Angkutan Umum	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.02.2.06.04
Seksi Pembangunan Fasilitas Keselamatan dan Penyelenggara	.02			Pembangunan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	jumlah fasilitas keselamatan jalan yang terpasang	5	jenis	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	jumlah fasilitas keselamatan jalan yang terpasang	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/kota	jumlah fasilitas keselamatan jalan yang terpasang	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	% wilayah yang terkoneksi Angkutan Umum	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.02.2.02.02
Seksi Pemeliharaan dan Keselamatan LLAJ	.03			Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	jumlah fasilitas keselamatan jalan yang terpelihara	65	lokasi	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	jumlah fasilitas keselamatan jalan yang terpelihara	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/kota	jumlah fasilitas keselamatan jalan yang terpelihara	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	% wilayah yang terkoneksi Angkutan Umum	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.02.2.02.03
Seksi Pemeliharaan dan Keselamatan LLAJ	.04			Evaluasi Kinerja Pelayanan Ruas Jalan dan Simpang	jumlah kinerja ruas jalan dan simpang yang dievaluasi	1 dan 1	ruas dan simpang	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	jumlah kinerja ruas jalan dan simpang yang dievaluasi	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	jumlah kinerja ruas jalan dan simpang yang dievaluasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	% wilayah yang terkoneksi Angkutan Umum	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.02.2.06.04
Seksi Penanggulangan Kecelakaan	.05			Evaluasi Daerah Rawan Kecelakaan	jumlah daerah rawan kecelakaan yang dievaluasi	1	ruas	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan kab/kota	jumlah daerah rawan kecelakaan yang dievaluasi	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	jumlah daerah rawan kecelakaan yang dievaluasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	% wilayah yang terkoneksi Angkutan Umum	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.02.2.06.01
Seksi Manajemen Rekayasa	.06			Koordinasi Peningkatan Keselamatan LLAJ	jumlah laporan hasil koordinasi	4	giat laporan	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan kab/kota	jumlah laporan hasil koordinasi	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	jumlah laporan hasil koordinasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	% wilayah yang terkoneksi Angkutan Umum	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.02.2.06.01
								koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	jumlah laporan hasil koordinasi andalalin	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan kabupaten/kota	jumlah laporan hasil koordinasi andalalin					2.15.02.2.07.03
Bidang Pengendalian dan Operasional	2.09.2.09.01.26			<b>PROGRAM PENGAMANAN LALU LINTAS</b>										Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalin	.01			Pelayanan Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas	jumlah laporan hasil pengaturan dan pengamanan lalu lintas	311	laporan	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten	jumlah laporan hasil pengaturan dan pengamanan lalu lintas	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	jumlah laporan hasil pengaturan dan pengamanan lalu lintas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	% wilayah yang terkoneksi Angkutan Umum	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.02.2.06.04
Seksi Terminal dan Perparkiran	.02			Pengelolaan Terminal	jumlah laporan terminal yang dikelola	12	bulan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	jumlah laporan terminal yang dikelola	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	jumlah laporan terminal yang dikelola					2.15.02.2.08.03



Seksi Terminal dan Perparkiran	.03	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Pengelolaan Perparkiran	jumlah laporan parkir yang dikelola	12	bulan	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraab dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah laporan parkir yang dikelola	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	jumlah laporan parkir yang dikelola	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	% wilayah yang terkoneksi Angkutan Umum	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.15.02.2.04.02
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jasa sharing yang dilaksanakan		Jasa sharing yang dilaksanakan					

sarana : kereta api  
angkutan  
jalan  
mobil pick  
up  
bus  
dll

prasarana :  
rambu  
jalan  
jalan  
halte  
APILL  
dll

DIISIKAN SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

DIISIKAN PROGRAM KEGIATAN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/ RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SEKRETARIAT				BELANJA TIDAK LANGSUNG				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	Perencanaan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	2.11.01.2.02.01
	2.05.02.01	Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	100	%									
	2.05.02.01.02	Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon, internet, air dan listrik selama 12 bulan	25	rekening-bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon, internet, air dan listrik selama 12 bulan	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	Perencanaan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	2.11.01.2.03.02
	2.05.02.01.07	Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat penatausahaan keuangan dan kegiatan	25	orang-bulan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelaku pengadaan barang/ jasa	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	Perencanaan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	2.11.01.2.03.07
	2.05.02.01.09	Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	10	unit	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	Perencanaan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	2.11.01.2.03.13
	2.05.02.01.10	Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor	60	jenis	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian ATK	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	Perencanaan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	2.11.01.2.03.10
	2.05.02.01.11	Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis kebutuhan barang cetak dan penggandaan	15	jenis	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetak dan penggandaan	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	Perencanaan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	2.11.01.2.03.11
	2.05.02.01.13	Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	42	jenis	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	Perencanaan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	2.11.01.2.03.13
								Pengadaan Mebeleur	Jumlah pembelian mebeleur	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	Perencanaan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	2.11.01.2.03.25
	2.05.02.01.17	Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat	900	kotak	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	Perencanaan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	2.11.01.2.03.17
	2.05.02.01.18	Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah orang/ kali perjalanan dinas luar daerah	12	org/ kali	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	Perencanaan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	2.11.01.2.03.18

	2.05.02.01.19	Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan	Lingkungan Hidup	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak dan THL yang terbayar	52	orang	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah pembayaran jasa kebersihan	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	Perencanaan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	2.11.01.2.02.02
									Jumlah pembayaran jasa petugas penunjang kegiatan kantor/ lapangan melalui perjanjian/ perikatan							
	2.05.02.01.22	Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	300	orang	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	Perencanaan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	2.11.01.2.04.11
								Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	Perencanaan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	2.11.01.2.04.10
								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	Perencanaan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	2.11.01.2.04.09
	2.05.02.01.23	Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja	8	dokumen	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	Perencanaan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	2.11.01.2.01.01
								Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	Perencanaan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	2.11.01.2.01.02
								Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	Perencanaan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	2.11.01.2.01.03
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	Perencanaan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	2.11.01.2.01.05
								Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen akuntansi dan laporan keuangan	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	Perencanaan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	2.11.01.2.02.04
								Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan realisasi kinerja	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	Perencanaan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	2.11.01.2.02.06
	2.05.02.02	Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik</b>	100	%									
	2.05.02.02.22	Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	3	gedung	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	Perencanaan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	2.11.01.2.03.28

								Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	Perencanaan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	2.11.01.2.03.32
								Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	Perencanaan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	2.11.01.2.03.34
								Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	Perencanaan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	2.11.01.2.03.35
	2.05.02.02.24	Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	5	unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan yang dipeihara dan dibayarkan pajaknya	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	Perencanaan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	2.11.01.2.03.06
								Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah barang yang diasuransikan	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	Perencanaan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	2.11.01.2.03.05
								Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	Perencanaan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	2.11.01.2.03.30
BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, LIMBAH B3 DAN NON B3	2.05.02.01.15	Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Persentase kinerja pengelolaan persampahan</b>	<b>54</b>	<b>%</b>									
	2.05.02.01.15.02	Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tersedia	20	paket	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan		Pengelolaan Sampah		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase kinerja pengelolaan persampahan	Lingkungan Hidup	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	2.11.11.2.01.05
								Penyediaan Sarana Persampahan		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan		Pekerjaan Umum	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03.04.2.01.06
								Pembangunan TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R dan TPS		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan		Pekerjaan Umum	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03.04.2.01.03
	2.05.02.01.15.04	Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	7	paket	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota		Pengelolaan Sampah		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase kinerja pengelolaan persampahan	Lingkungan Hidup	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	2.11.11.2.01.03
	2.05.02.01.15.07	Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan	Jumlah extrafooding untuk petugas kebersihan	238	orang	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota		Pengelolaan Sampah		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase kinerja pengelolaan persampahan	Lingkungan Hidup	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	2.11.11.2.01.03

	2.05.02.01.15.11	Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan	5605	orang	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Pengelolaan Sampah		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase kinerja pengelolaan persampahan	Lingkungan Hidup	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	2.11.11.2.01.04
								Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		Pengelolaan Sampah		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase kinerja pengelolaan persampahan	Lingkungan Hidup	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	2.11.11.2.01.02
	2.05.02.01.15.17	Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3	Jumlah rekomtek pengelolaan limbah B3	35	rekomtek	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah rekomtek penyimpanan limbah B3	Penyimpanan Sementara Limbah B3		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Lingkungan Hidup	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	2.11.05.2.01.01
								Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3		Penyimpanan Sementara Limbah B3		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Lingkungan Hidup	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	2.11.05.2.01.02
								Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Lingkungan Hidup	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	2.11.05.2.02.01
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/ atau Penimbunan		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Lingkungan Hidup	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	2.11.05.2.02.02
BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LH	2.05.02.01.16	Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	Persentase penurunan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	7,43	%									
	2.05.02.01.16.22	Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Operasional Laboratorium Lingkungan	Jumlah pengujian kualitas air yang dilayani	230	pelanggan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan		Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Lingkungan Hidup	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	2.11.03.2.01.01
	2.05.02.01.16.43	Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pemrakarsa yang mengelola lingkungan	200	orang	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan		Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Lingkungan Hidup	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	2.11.03.2.01.01





	2.05.02.01.32.01	Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang diselesaikan	5	kasus	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang diselesaikan	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang diselesaikan	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan	Lingkungan Hidup	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	2.11.10.2.01.01
		Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup					Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/ atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang diselesaikan	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang diselesaikan	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan	Lingkungan Hidup	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	2.11.10.2.01.02
	2.05.02.01.32.02	Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Penegakan Hukum Lingkungan	Persentase penegakan hukum atas kegiatan usaha yang diawasi	100	%	Pengawasan Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan	Lingkungan Hidup	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	2.11.06.2.01.03
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan	Lingkungan Hidup	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	2.11.06.2.01.04
	2.05.02.01.32.03	Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Jumlah penghargaan lingkungan yang diterima	4	penghargaan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		Lingkungan Hidup	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	2.11.08.2.01.01
								Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		Lingkungan Hidup	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	2.11.08.2.01.02



								Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Lingkungan Hidup	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	2.11.09.2.01.01
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	---	--	------------------	---	-----------------





12a	1.04 . 1.04.05 . 29 . 01	Usuran Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sub Usuran Bangunan Gedung	Pembangunan Gedung	Indikator Kegiatan : Jumlah gedung kantor yang dibangun	5	unit	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahtsua, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten / Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten / kota yang diselenggarakan	Program Penataan Bangunan Gedung	% tercapainya penataan bangunan gedung	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usuran Pemerintahan	1 03 08 2.01 02	48
12b	1.04 . 1.04.05 . 29 . 03	Usuran Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sub Usuran Bangunan Gedung	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung	Indikator Kegiatan : Jumlah rumah dinas / gedung kantor yang direhab	6	unit	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahtsua, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah rumah dinas / gedung kantor yang direhab	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten / Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten / kota yang diselenggarakan	Program Penataan Bangunan Gedung	% tercapainya penataan bangunan gedung	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usuran Pemerintahan	1 03 08 2.01 02	49
12c	1.04 . 1.04.05 . 29 . 04	Usuran Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sub Usuran Bangunan Gedung	Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Gedung	Indikator Kegiatan : Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3	unit	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahtsua, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten / Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten / kota yang diselenggarakan	Program Penataan Bangunan Gedung	% tercapainya penataan bangunan gedung	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usuran Pemerintahan	1 03 08 2.01 02	50
12d	1.04 . 1.04.05 . 29 . 05	Usuran Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sub Usuran Bangunan Gedung	Penerbitan SLF dan Penetapan TAGB	Indikator Kegiatan : Jumlah SLF yang diterbitkan	25	berkas	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta	Jumlah SLF yang diterbitkan	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten / Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung yang diterbitkan	Program Penataan Bangunan Gedung	% tercapainya penataan bangunan gedung	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usuran Pemerintahan	1 03 08 2.01 01	51
12e	1.04 . 1.04.05 . 29 . 06	Usuran Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sub Usuran Bangunan Gedung	Monitoring Evaluasi Bangunan Gedung	Indikator Kegiatan : Jumlah kawasan yang di monev bangunannya	4	kec	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kawasan yang di monev bangunannya	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten / Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung yang diterbitkan	Program Penataan Bangunan Gedung	% tercapainya penataan bangunan gedung	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usuran Pemerintahan	1 03 08 2.01 05	52

RINGKASAN PEMETAAN PROGRAM/KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019

OPD	RENSTRA/RENYA PERANGKAT DAERAH							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.10	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% pemenuhan administrasi kantor	100	%					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan penunjang urusan administrasi pemerintahan daerah	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16
	2.10	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah pembayaran listrik/air/telepon	13	rekening	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah pembayaran listrik/air/telepon	Administrasi Umum	jumlah pembayaran listrik/air/telepon	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan penunjang urusan administrasi pemerintahan daerah	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.01.2.03.02
	2.10	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah pembayaran honor panitian pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan	19	orang	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah pembayaran honor panitian pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan	Administrasi Umum	jumlah pembayaran honor panitian pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan penunjang urusan administrasi pemerintahan daerah	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.01.2.03.07
	2.10	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jumlah peralatan yang diperbaiki	60	unit	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jumlah peralatan yang diperbaiki	Administrasi Umum	jumlah peralatan yang diperbaiki	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan penunjang urusan administrasi pemerintahan daerah	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.01.2.03.09
	2.10	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah pembelian ATK	40	jenis	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah pembelian ATK	Administrasi Umum	jumlah pembelian ATK	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan penunjang urusan administrasi pemerintahan daerah	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.01.2.03.10
	2.10	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	15	jenis	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	Administrasi Umum	jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan penunjang urusan administrasi pemerintahan daerah	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.01.2.03.11
	2.10	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15	jenis	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	Administrasi Umum	jumlah pembelian peralatan kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan penunjang urusan administrasi pemerintahan daerah	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.01.2.03.12
	2.10	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah pembelian buku/surat kabar	456	eks/bln	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah pembelian buku/surat kabar	Administrasi Umum	jumlah pembelian buku/surat kabar	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan penunjang urusan administrasi pemerintahan daerah	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.01.2.03.15
	2.10	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah kegiatan rapat dan tamu	12	bulan	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah kegiatan rapat dan tamu	Administrasi Umum	jumlah kegiatan rapat dan tamu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan penunjang urusan administrasi pemerintahan daerah	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.01.2.03.17
	2.10	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah perjalanan dinas keluar daerah	120	orang	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah perjalanan dinas keluar daerah	Administrasi Umum	jumlah perjalanan dinas keluar daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan penunjang urusan administrasi pemerintahan daerah	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.01.2.03.18

	2.10	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah pembayaran jasa kebersihan	8	orang	Penyediaan administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah pembayaran jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui perjanjian/perikatan	Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui perjanjian/perikatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan penunjang urusan administrasi pemerintahan daerah	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.01.2.02.02
	2.10	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	jumlah barang yang diasuransi	2	kendaraan	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	jumlah barang yang diasuransi	Administrasi Umum	jumlah barang yang diasuransi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan penunjang urusan administrasi pemerintahan daerah	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.01.2.03.05
	2.10	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran jasa kebersihan	3	orang	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran jasa kebersihan	Administrasi Umum	Jumlah pembayaran jasa kebersihan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan penunjang urusan administrasi pemerintahan daerah	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.01.2.03.08
	2.10	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	jumlah pembelian komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	60	unit	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	jumlah pembelian komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Administrasi Umum	jumlah pembelian komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan penunjang urusan administrasi pemerintahan daerah	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.01.2.03.12
	2.10	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah pembelian peralatan rumah tangga	10	unit	Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah pembelian peralatan rumah tangga	Administrasi Umum	jumlah pembelian peralatan rumah tangga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan penunjang urusan administrasi pemerintahan	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.01.2.03.14
	2.10	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah pembelian bahan logistik	60	unit	Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah pembelian bahan logistik	Administrasi Umum	jumlah pembelian bahan logistik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan penunjang urusan administrasi pemerintahan daerah	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.01.2.03.16
	2.10	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	laporan kinerja tribulan dan tahunan	5	laporan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja tribulan dan tahunan	Administrasi Keuangan	Jumlah laporan kinerja tribulan dan tahunan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan penunjang urusan administrasi pemerintahan daerah	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.01.2.02.06
								Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan penunjang urusan administrasi pemerintahan daerah	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.01.2.01.01
								Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi OPD	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen evaluasi OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan penunjang urusan administrasi pemerintahan daerah	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.01.2.01.04
	2.10	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas SDM aparatur dan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informasi	8	OT	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan kapasitas SDM aparatur dan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informasi	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas SDM aparatur dan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan penunjang urusan administrasi pemerintahan daerah	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.01.2.04.11
								Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan kapasitas SDM aparatur dan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informasi	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas SDM aparatur dan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan penunjang urusan administrasi pemerintahan daerah	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.01.2.04.09
	2.10	Urusan wajib bukan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% sarpras kondisi baik	100	%					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan administrasi kantor	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.01

	2.10	Usuran wajib bukan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	jumlah pemeliharaan gedung kantor	1	unit	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Administrasi Umum	jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan penunjang urusan administrasi pemerintahan daerah	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.01.2.03.28
	2.10	Usuran wajib bukan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	8	unit	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Administrasi Umum	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan penunjang urusan administrasi pemerintahan daerah	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.01.2.03.30
	2.10	Usuran wajib bukan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah pemeliharaan gedung kantor	54	unit	Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan penunjang urusan administrasi pemerintahan daerah	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.01.2.03.34
	2.10	Usuran wajib bukan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah pengadaan kendaraan	1	unit	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Administrasi Umum	jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan penunjang urusan administrasi pemerintahan daerah	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.01.2.03.20
	2.10	Usuran wajib bukan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	12	bulan	pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Administrasi Umum	jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan penunjang urusan administrasi pemerintahan daerah	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.01.2.03.22
	2.10	Usuran wajib bukan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	0	0	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan penunjang urusan administrasi pemerintahan daerah	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.01.2.03.24
	2.10	Usuran wajib bukan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	pengadaan mebeleur	jumlah pengadaan mebeleur	0	%	pengadaan mebeleur	jumlah pengadaan mebeleur	Administrasi Umum	jumlah pengadaan mebeleur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan penunjang urusan administrasi pemerintahan daerah	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.01.2.03.25
	2.10	Usuran wajib bukan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah pemeliharaan mebeleur	12	bulan	pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah pemeliharaan mebeleur	Administrasi Umum	jumlah pemeliharaan mebeleur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan penunjang urusan administrasi pemerintahan daerah	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.01.2.03.35
	2.10	Usuran wajib bukan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	<b>Program Pengelolaan aplikasi informatika</b>	<b>% aplikasi informatika OPD yang terintegrasi</b>	<b>60</b>	<b>% aplikasi berjalan dan terintegrasi</b>					<b>Program Aplikasi Informatika</b>	<b>% aplikasi informatika OPD yang terintegrasi</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	<b>Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar</b>	<b>2.16.03</b>
	2.10	Usuran wajib bukan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Pemberdayaan SDM bidang TIK	jumlah SDM bidang TIK yang telah dibina	130	orang	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	jumlah SDM bidang TIK yang telah dibina	Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM bidang TIK yang telah dibina	Program Aplikasi Informatika	% aplikasi informatika OPD yang terintegrasi	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.03.2.02.06
	2.10	Usuran wajib bukan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan dan Pengembangan aplikasi TIK	Jumlah aplikasi TIK yang dikelola dan dikembangkan	5	aplikasi	Pengembangan Aplikasi dan proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi TIK yang dikelola dan dikembangkan	Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi TIK yang dikelola dan dikembangkan	Program Aplikasi Informatika	% aplikasi informatika OPD yang terintegrasi	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.03.2.02.07
	2.10	Usuran wajib bukan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Pengembangan infrastruktur TIK	Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur TIK	3 server, 1 power backup, 2 router manageble, pembangunan Ruang server	3 server, 1 power backup, 2 router manageble, pembangunan Ruang data center	Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	% Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur TIK	Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur TIK	Program Aplikasi Informatika	% aplikasi informatika OPD yang terintegrasi	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.03.2.02.10

	2.10	Usuran wajib bukan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Pemeliharaan infrastruktur TIK	% Jumlah infrastruktur TIK yang terpelihara	80	% infrastruktur yang terpelihara	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	% Terpeliharanya Layanan Network Aplikasi	Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	% Jumlah infrastruktur TIK yang terpelihara	Program Aplikasi Informatika	% aplikasi informatika OPD yang terintegrasi	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.03.2.02.03
	2.10	Usuran wajib bukan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan nama domain dan e-government (SPBE)	jumlah SOP tentang layanan e government (SPBE)	10	SOP	Sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	jumlah SOP tentang layanan e government (SPBE)	Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SOP tentang layanan e government (SPBE)	Program Aplikasi Informatika	% aplikasi informatika OPD yang terintegrasi	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.03.2.02.02
	2.10	Usuran wajib bukan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Layanan akses internet, intranet, dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang terlayani akses internet, intranet, dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	65	OPD	Penyelenggaraan Sistem komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang terlayani akses internet, intranet, dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang terlayani akses internet, intranet, dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Program Aplikasi Informatika	% aplikasi informatika OPD yang terintegrasi	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.03.2.02.04
	2.10	Usuran Pemerintahan Bidang Persandian	Usuran Pemerintahan Bidang Persandian	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (keamanan Informasi)	80	% terpenuhi standart indeks KAMI					Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi	Indeks KAMI (keamanan Informasi)	Usuran Pemerintahan Bidang Persandian	wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.21.02
	2.10	Usuran Pemerintahan Bidang Persandian	Usuran Pemerintahan Bidang Persandian	Terpenuhinya standart keamanan informasi	Terpenuhinya standart keamanan informasi	60	% terdapat tersusun standart keamanan informasi	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya standart keamanan informasi	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya standart keamanan informasi	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi	Indeks KAMI (keamanan Informasi)	Usuran Pemerintahan Bidang Persandian	wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.21.02.2.01.04
	2.10	Usuran Pemerintahan Bidang Persandian	Usuran Pemerintahan Bidang Persandian	Peningkatan kapasitas teknologi keamanan informasi	hardware & software pengamanan data	update lisensi firewall	update lisensi firewall	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	hardware & software pengamanan data	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	hardware & software pengamanan data	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi	Indeks KAMI (keamanan Informasi)	Usuran Pemerintahan Bidang Persandian	wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.21.02.2.01.03
	2.10	Usuran Pemerintahan Bidang Persandian	Usuran Pemerintahan Bidang Persandian	Penerapan sistem manajemen pengamanan informasi	terpenuhinya standart/sertifikasi keamanan informasi	assesment ISO 27001	assesment ISO 27001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terpenuhinya standart/sertifikasi keamanan informasi	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	terpenuhinya standart/sertifikasi keamanan informasi	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi	Indeks KAMI (keamanan Informasi)	Usuran Pemerintahan Bidang Persandian	wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.21.02.2.01.01
	2.10	Usuran Pemerintahan Bidang Persandian	Usuran Pemerintahan Bidang Persandian	Pengembangan layanan keamanan informasi	jumlah peserta sosialisasi keamanan informasi	50	orang	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah peserta sosialisasi keamanan informasi	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah peserta sosialisasi keamanan informasi	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi	Indeks KAMI (keamanan Informasi)	Usuran Pemerintahan Bidang Persandian	wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.21.02.2.01.02
	2.10	Usuran wajib bukan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	% peningkatan kerjasama dengan media berkualitas	75	%					Program Informasi dan Komunikasi Publik	% pemanfaatan saluran media komunikasi publik	Komunikasi dan Informatika	wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.02
	2.10	Usuran wajib bukan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Penyelenggaraan Pameran dan Keikutsertaan pameran	3	kali/tahun	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terselenggaranya Pameran dan Keikutsertaan Pameran	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pameran dan Keikutsertaan Pameran	Program Informasi dan Komunikasi Publik	% pemanfaatan saluran media komunikasi publik	Komunikasi dan Informatika	wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.02.2.01.05
	2.10	Usuran wajib bukan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyebarluasan informasi luar ruangan	jumlah luas balihoo, spanduk	3,3	m2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Volume Baloho yang Terpasang	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Volume Baloho yang Terpasang	Program Informasi dan Komunikasi Publik	% pemanfaatan saluran media komunikasi publik	Komunikasi dan Informatika	wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.02.2.01.05



	2.10	Urusan wajib bukan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Pembinaan dan Operasional radio	Terpenuhinya Operasional Radio Suara Pasuruan	12	bulan operasional radio	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terkelolanya Media Informasi melalui Radio	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Media Informasi melalui Radio	Program Informasi dan Komunikasi Publik	% pemanfaatan saluran media komunikasi publik	Komunikasi dan Informatika	wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.02.2.01.05
	2.10	Urusan wajib bukan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Pengumpulan Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah	jumlah informasi dan kebijakan yang diliput/tahun	300	informasi	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah	Program Informasi dan Komunikasi Publik	% pemanfaatan saluran media komunikasi publik	Komunikasi dan Informatika	wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.02.2.01.01
	2.10	Urusan wajib bukan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Produksi Konten Informasi Publik	jumlah konten yang dihasilkan	180	konten	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terpublikasikannya Konten Informasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpublikasikannya Konten Informasi Publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	% pemanfaatan saluran media komunikasi publik	Komunikasi dan Informatika	wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.02.2.01.04
	2.10	Urusan wajib bukan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyebarluasan Informasi Publik melalui media	jumlah informasikan melalui media	240	informasi /Th	Pelayanan Informasi Publik	Tersampainya Informasi Publik Melalui Media	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersampainya Informasi Publik Melalui Media	Program Informasi dan Komunikasi Publik	% pemanfaatan saluran media komunikasi publik	Komunikasi dan Informatika	wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.02.2.01.06
	2.10	Urusan wajib bukan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah	jumlah majalah yang tercetak	500	Eks/Th	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terdistribusikannya Media Komunikasi Milik Pemerintah	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terdistribusikannya Media Komunikasi Milik Pemerintah	Program Informasi dan Komunikasi Publik	% pemanfaatan saluran media komunikasi publik	Komunikasi dan Informatika	wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.02.2.01.05
	2.10	Urusan wajib bukan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah pers conference yang dilaksanakan	2	Kali/Th	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Program Informasi dan Komunikasi Publik	% pemanfaatan saluran media komunikasi publik	Komunikasi dan Informatika	wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.02.2.01.12
				<b>Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai</b>	<b>% peserta yang memahami ketentuan perundang undangan bidang cukai</b>	<b>78</b>	<b>%</b>									
				penyampaian informasi ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat / pemangku kepentingan	Jumlah media yang menginformasikan peraturan perundang undangan di bidang cukai	65	%									
	2.10	Urusan wajib bukan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	<b>Program Pengembangan dan Pemberdayaan Komunikasi Publik</b>	<b>% pemanfaatan saluran media komunikasi publik</b>	65	%					<b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>% pemanfaatan saluran media komunikasi publik</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	<b>wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar</b>	<b>2.16.02</b>
	2.10	Urusan wajib bukan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Penguatan tugas PPID dan PPID Pembantu	% OPD yang telah melaksanakan keterbukaan Informasi Publik	45	%	Pelayanan Informasi Publik	Tercapainya Tata Kelola Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Tata Kelola Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	% pemanfaatan saluran media komunikasi publik	Komunikasi dan Informatika	wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.02.2.01.06
						75	%	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Tercapainya kegiatan monitoring opini dan aspirasi publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya kegiatan monitoring opini dan aspirasi publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	% pemanfaatan saluran media komunikasi publik	Komunikasi dan Informatika	wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.02.2.01.02

	2.10	Urusan wajib bukan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Pembinaan dan Pengembangan pemberdayaan KIM	% KIM yang berdaya	70	%	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Pemberdayaan KIM	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Pemberdayaan KIM	Program Informasi dan Komunikasi Publik	% pemanfaatan saluran media komunikasi publik	Komunikasi dan Informatika	wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.02.2.01.08
	2.10	Urusan wajib bukan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Pengembangan dan pemberdayaan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat (dialog publik)	jumlah dialog publik yang dilaksanakan	7	kegiatan	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat (Dialog Publik)	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat (Dialog Publik)	Program Informasi dan Komunikasi Publik	% pemanfaatan saluran media komunikasi publik	Komunikasi dan Informatika	wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.02.2.01.10
	2.10	Urusan wajib bukan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	pengembangan dan pemberdayaan seni pertura	pemberdayaan seni pertura	7	kegiatan	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengembangan dan pemberdayaan Seni Pertura	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan pemberdayaan Seni Pertura	Program Informasi dan Komunikasi Publik	% pemanfaatan saluran media komunikasi publik	Komunikasi dan Informatika	wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.02.2.01.05
	2.10	Urusan wajib bukan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Koordinasi pelaksanaan informasi dan komunikasi publik	% pengaduan yang ditindaklanjuti	80	%	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Tercapainya Tata Kelola Pelayanan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Tata Kelola Pelayanan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat	Program Informasi dan Komunikasi Publik	% pemanfaatan saluran media komunikasi publik	Komunikasi dan Informatika	wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.16.02.2.01.03
	2.10	Urusan wajib bukan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Pembinaan dan Operasional Telecenter	terlaksananya pembinaan operasional telecenter	0	0									
	2.10	Urusan wajib bukan pelayanan dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Program Penyelenggaraan statistik sektoral	% ketersediaan data statistik sektoral	50	%					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	% ketersediaan data statistik sektoral	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.20.02
	2.10	Urusan wajib bukan pelayanan dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Pengumpulan Data Statistik Sektoral	jumlah OPD yang mengumpulkan data Statistik sektoral	65	orang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	jumlah OPD yang mengumpulkan data Statistik sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah OPD yang mengumpulkan data Statistik sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	% ketersediaan data statistik sektoral	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.20.02.2.01.01
	2.10	Urusan wajib bukan pelayanan dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Pengolahan Data Statistik Sektoral	jumlah data statistik sektoral yang diolah	1	dokumen	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah proposal survey Statistik Sektoral yang di verifikasi	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah proposal survey Statistik Sektoral yang di verifikasi	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	% ketersediaan data statistik sektoral	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.20.02.2.01.06
	2.10	Urusan wajib bukan pelayanan dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Membangun metadata statistik sektoral	jumlah metadata statistik sektoral yang berhasil dirumuskan	1	dokumen	Membangun metadata statistik sektoral	jumlah metadata statistik sektoral yang berhasil dirumuskan	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah metadata statistik sektoral yang berhasil dirumuskan	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	% ketersediaan data statistik sektoral	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.20.02.2.01.03
								Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	jumlah diklat/kursus/bimtek Statistik dan pengolahan data yang diikuti	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah diklat/kursus/bimtek Statistik dan pengolahan data yang diikuti	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	% ketersediaan data statistik sektoral	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.20.02.2.01.04
	2.10	Urusan wajib bukan pelayanan dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	jumlah peserta bimtek yang memahami statistik sektoral	45	orang	Peningkatan kapasitas SDM Penda dalam peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	jumlah peserta bimtek yang memahami statistik sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah peserta bimtek yang memahami statistik sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	% ketersediaan data statistik sektoral	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.20.02.2.01.02
	2.10	Urusan wajib bukan pelayanan dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Pengembangan Infrastruktur	jumlah aplikasi yang dibuat dan dikembangkan	1	aplikasi	Pengembangan Infrastruktur	jumlah aplikasi Statistik sektoral yang dibuat dan dikembangkan	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah aplikasi yang dibuat dan dikembangkan	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	% ketersediaan data statistik sektoral	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.20.02.2.01.05



**PEMETAAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, & NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN & KEUANGAN DAERAH KAB / KOTA SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

OPD : DINAS PU SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG

Struktur Organisasi	Renstra/Renja PD							Permendagri 90 Tahun 2019								
	Kode	Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Keg	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan	Kode
Sekretariat	1.03.05.01 .01	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	80	persen									
Sekretariat	.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, air & listrik yang terbayar	12	bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, air & listrik yang terbayar	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.1.203.2
Sekretariat								Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diasuransikan	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.1.203.5
Sekretariat	.06	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pembayaran pajak kendaraan	50	unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pembayaran pajak kendaraan	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.1.203.6
Sekretariat	.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan	36	org/bln	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.1.203.7
Sekretariat	.10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian ATK	1	kali	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian ATK	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.1.203.10
Sekretariat	.11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan & penggandaan	1	kali	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan & penggandaan	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.1.203.11
Sekretariat	.13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan perlengkapan kantor rutin	1	kali	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan perlengkapan kantor rutin	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.1.203.13
Sekretariat	.17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat	12	kali	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.1.203.17
Sekretariat	.18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	156	org/kali	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.1.203.18
Sekretariat	.19	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan Jasa Perkantoran	Honor tenaga kontrak / THL (PTT (52 org) ; THL (24 org))	78	org/bln	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor tenaga kontrak / THL (PTT (52 org) ; THL (24 org))	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.1.202.2

Sekretariat	.21	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah peserta bimtek	110	org	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta bimtek	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin & kapasitas sbr daya aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.1.204.11
Sekretariat	.22	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja (Lakip, LPPD, Renja)	3	dokumen	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja (Lakip, LPPD, Renja)	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.1.202.6
Sekretariat	.23	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Fasilitasi Operasional UPTD Pandaan	Pelaksanaan kegiatan sekretariat UPT	12	bulan	Cat : Masuk sesuai rekening belanja di sekretariat	-	-	-	-	-	-	-	
Sekretariat	.24	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Fasilitasi Operasional UPTD Kejayan	Pelaksanaan kegiatan sekretariat UPT	12	bulan	Cat : Masuk sesuai rekening belanja di sekretariat	-	-	-	-	-	-	-	
Sekretariat	.25	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Fasilitasi Operasional UPTD Grati	Pelaksanaan kegiatan sekretariat UPT	12	bulan	Cat : Masuk sesuai rekening belanja di sekretariat	-	-	-	-	-	-	-	
Sekretariat	.26	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Fasilitasi Operasional UPTD Purwosari	Pelaksanaan kegiatan sekretariat UPT	12	bulan	Cat : Masuk sesuai rekening belanja di sekretariat	-	-	-	-	-	-	-	
Sekretariat	1.03.05.01 .02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana kondisi baik	75	%									
Sekretariat	.05	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan gedung	3	unit	Cat : Bisa dimasukkan ke Sub Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	
Sekretariat	.05	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas / ops	3	unit	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas / ops	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.1.203.20
Sekretariat	.09	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengadaan Meubelair	Jumlah pengadaan meubelair	3	unit	Pengadaan Meubelair	Jumlah pengadaan meubelair	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.1.203.25
Sekretariat	.09	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung/kantor	33	unit	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung/kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.1.203.24
Sekretariat	.22	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	2	unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.1.203.28
Sekretariat	.24	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas / ops	50	unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas / ops	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.1.203.30
Sekretariat	.28	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	20	unit/kali	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.1.203.34
Sekretariat	.29	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Rutin Meubelair	Jumlah pemeliharaan meubelair	60	unit/kali	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah pemeliharaan meubelair	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.1.203.35

Sekretariat	.30	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas	Jumlah rehab rumah dinas	2	unit	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah rehab rumah dinas	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.1.203.37
Sekretariat	.31	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengadaan alat berat	Jumlah alat berat yang dibeli	2	unit	Cat : Bisa dimasukkan ke Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	-	-	-	-	
Sekretariat	.32	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi / pemeliharaan Alat-alat Berat	Jumlah alat berat yang dipelihara	5	unit	Cat : Bisa dimasukkan ke Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	-	-	-	-	
Bidang Operasi & Pemeliharaan	1.03.05.01 .38	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Meningkatnya volume ketersediaan air baku	2,07E+09	m3/thn	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen penyusunan pola & rencana yang dilakukan	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan SDA & Bangunan Pengaman Pantai	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.201.4
Bidang Operasi & Pemeliharaan	.01	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi Jaringan Irigasi	Penyusunan dokumen rencana tata tanam global (RTTG)	4	dok	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air yang dibangun	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan SDA & Bangunan Pengaman Pantai	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.201.6
Bidang Operasi & Pemeliharaan	.02	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jumlah jaringan irigasi yang dilakukan pemeliharaan	4	UPT	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah bangunan perkuatan tebing yang dibangun	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan SDA & Bangunan Pengaman Pantai	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.201.10
Bidang Operasi & Pemeliharaan	.03	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Saluran	Jumlah jaringan irigasi yang dilakukan normalisasi	60	Jl	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah stasiun pompa banjir yang dibangun	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan SDA & Bangunan Pengaman Pantai	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.201.13
Bidang Operasi & Pemeliharaan	.04	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pendataan dan Identifikasi Sumber Daya Air	Jumlah dokumen hasil pendataan dan identifikasi SDA	n/a	dok	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah polder/kolam retensi yang dibangun	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan SDA & Bangunan Pengaman Pantai	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.201.14
Bidang Operasi & Pemeliharaan	.05	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Air	Jumlah pendampingan yang dilakukan	n/a	kali	Pembangunan Check Dam	Jumlah check dam yang dibangun	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan SDA & Bangunan Pengaman Pantai	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.201.16
Bidang Operasi & Pemeliharaan	.06	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengendalian Daya Rusak Air	Jumlah lokasi yang dilakukan pemasangan darurat	11	lokasi	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah FFWS yang dibangun	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan SDA & Bangunan Pengaman Pantai	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.201.19
Bidang Operasi & Pemeliharaan	.07	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Partisipasi Masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Air	Jumlah kegiatan partisipasi masyarakat	n/a	kali	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang direhab	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan SDA & Bangunan Pengaman Pantai	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.201.21

Bidang Operasi & Pemeliharaan	.08	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemakaian kawasan hutan	Jumlah BA kerjasama yang dibuat terkait pemakaian kawasan hutan	1	kali	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Jumlah panjang tanggul sungai yang direhab	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan SDA & Bangunan Pengaman Pantai	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.201.24
Bidang Operasi & Pemeliharaan	.08	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Pengadaan Tanah	Jumlah perencanaan pengadaan tanah yg dilakukan	1	lokasi	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah bangunan perkuatan tebing yang direhab	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan SDA & Bangunan Pengaman Pantai	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.201.25
Bidang Operasi & Pemeliharaan	.09	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persiapan Pengadaan Tanah	Jumlah sosialisasi dlm rangka persiapan pengadaan tanah	1	kali	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air / bendung pengendali banjir yang direhab	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan SDA & Bangunan Pengaman Pantai	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.201.26
Bidang Operasi & Pemeliharaan	.10	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	Jumlah lahan yang dibebaskan utk pembangunan embung	7	lokasi	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah stasiun pompa banjir yang direhab	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan SDA & Bangunan Pengaman Pantai	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.201.28
Bidang Operasi & Pemeliharaan	.11	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	Jumlah pengadaan tanah yang disertifikatkan	7	lokasi	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Jumlah polder / kolam retensi yang direhab	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan SDA & Bangunan Pengaman Pantai	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.201.29
Bidang Operasi & Pemeliharaan	.12	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengendalian Kualitas Air pada Saluran Irigasi	Jumlah saluran irigasi yang ditingkatkan kualitasnya	5	lokasi	Rehabilitasi Check Dam	Jumlah check dam yang direhab	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan SDA & Bangunan Pengaman Pantai	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.201.31
								Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Jumlah panjang pemeliharaan sungai yang dinormalisasi	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan SDA & Bangunan Pengaman Pantai	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.201.46
								Pembangunan Infrastruktur untuk Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air	Jumlah infrastruktur utk perlindungan dan pemeliharaan mata air yang dibangun	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan SDA & Bangunan Pengaman Pantai	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.201.47
								Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang dipelihara	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan SDA & Bangunan Pengaman Pantai	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.201.49
								Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah stasiun pompa banjir yang dipelihara	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan SDA & Bangunan Pengaman Pantai	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.201.55
								Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah polder / kolam retensi yang dipelihara	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan SDA & Bangunan Pengaman Pantai	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.201.56

								Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Jumlah check dam yang dipelihara	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan SDA & Bangunan Pengaman Pantai	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.201.58
								Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen terkait hidrologi dan kualitas air yang dilakukan	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan SDA & Bangunan Pengaman Pantai	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.201.60
								Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA yang dilakukan	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan SDA & Bangunan Pengaman Pantai	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.201.61
								Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah evaluasi dan rekomtek yang ditindaklanjuti	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan SDA & Bangunan Pengaman Pantai	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.201.62
								Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah monev terkait peningkatan kapasitas kelembagaan SDA yang dilakukan	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan SDA & Bangunan Pengaman Pantai	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.201.63
Bidang Perencanaan & Pengembangan Irigasi	1.03.05.01 .39	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PERENCANAAN & PENGEMBANGAN IRIGASI	Meningkatnya panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	64,2	persen	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen rentek & dokling yg tersusun	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan & pengeloan sistem irigasi kewenangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.202.1
Bidang Perencanaan & Pengembangan Irigasi	.01	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan jaringan irigasi	Jumlah perencanaan jaringan irigasi yg dilakukan	6	dok	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan & pengeloan sistem irigasi kewenangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.202.2
Bidang Perencanaan & Pengembangan Irigasi	.02	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi jaringan irigasi	Jumlah panjang JI yang dilakukan rehabilitasi	130.000	meter	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang dibangun	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan & pengeloan sistem irigasi kewenangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.202.3
Bidang Perencanaan & Pengembangan Irigasi	.03	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Inventarisasi aset irigasi	Jumlah jaringan irigasi yang dilakukan inventarisasi	27	Jl	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	Jumlah panjang jaringan irigasi tambak yang dibangun	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan & pengeloan sistem irigasi kewenangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.202.5



Bidang Perencanaan & Pengembangan Irigasi	.04	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemantauan Jaringan Irigasi Tambak & Irigasi Kecil	Jumlah jaringan irigasi yang dipantau		Jl	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan & pengeloaan sistem irigasi kewenangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.202.8
Bidang Perencanaan & Pengembangan Irigasi	.05	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi	Jumlah kegiatan partisipasi masyarakat / HIPPA / GHIPPA	25	Kelompok	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang ditingkatkan	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan & pengeloaan sistem irigasi kewenangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.202.9
Bidang Perencanaan & Pengembangan Irigasi	.06	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)	Jumlah panjang Jl yang dilakukan rehabilitasi (Dana DAK)	110.000	meter	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Jumlah panjang jaringan irigasi tambak yang ditingkatkan	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan & pengeloaan sistem irigasi kewenangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.202.11
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah panjang jaringan irigasi permukaan yang direhab	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan & pengeloaan sistem irigasi kewenangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.202.14
								Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang direhab	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan & pengeloaan sistem irigasi kewenangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.202.15
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Jumlah panjang jaringan irigasi tambak yang direhab	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan & pengeloaan sistem irigasi kewenangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.202.17
								Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah sumur jaringan irigasi air tanah yang direhab	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan & pengeloaan sistem irigasi kewenangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.202.18
								Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah panjang jaringan irigasi air tanah yang direhab	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan & pengeloaan sistem irigasi kewenangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.202.19

								Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah panjang jaringan irigasi permukaan yang dipelihara	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan & pengeloaan sistem irigasi kewenangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.202.21
								Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang dipelihara	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan & pengeloaan sistem irigasi kewenangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.202.22
								Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	Jumlah panjang jaringan irigasi tambak yang dipelihara	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan & pengeloaan sistem irigasi kewenangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.202.24
								Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah sumur jaringan irigasi air tanah yang dipelihara	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan & pengeloaan sistem irigasi kewenangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.202.25
								Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah panjang jaringan irigasi air tanah yang dipelihara	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan & pengeloaan sistem irigasi kewenangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.202.26
								Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah movey yang dilakukan oleh pengelola irigasi	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan & pengeloaan sistem irigasi kewenangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.202.27
								Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi yang dilakukan	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan & pengeloaan sistem irigasi kewenangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan SDA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.2.202.28
Bidang Bina Manfaat Irigasi & Tata Ruang	1.03.05.01 .32	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang dibutuhkan	17	persen	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW yang tersusun	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Persentase dokumen RTWR & RRTR yang tersusun	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.12.201.1
Bidang Bina Manfaat Irigasi & Tata Ruang	.03	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sosialisasi / Publikasi peraturan perundangan tentang Rencana Tata Ruang	Jumlah sosialisasi / publikasi peraturan perundangan yang dilakukan	1	kali	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RRTR yang tersusun	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Persentase dokumen RTWR & RRTR yang tersusun	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.12.201.2

Bidang Bina Manfaat Irigasi & Tata Ruang	.06	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyusunan RDTR BWP / Perkotaan	Jumlah Penyusunan RDTR BWP/Perkotaan yang dilakukan	-	dok	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah peraturan terkait penataan ruang yang tersusun	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Persentase dokumen RTWR & RRTR yang tersusun	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.12.201.3	
Bidang Bina Manfaat Irigasi & Tata Ruang	.06	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyusunan Peninjauan Kembali (PK) RDTR BWP / Perkotaan	Jumlah PK RDTR BWP / Perkotaan yang dilakukan	-	dok	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah sosialisasi terkait penataan ruang yang dilakukan	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Persentase dokumen RTRW & RRTR yang tersusun	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.12.201.4	
Bidang Bina Manfaat Irigasi & Tata Ruang	.06	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyusunan rancangan Perda tentang RDTR BWP / Perkotaan / Revisi	Jumlah penyusunan Raperda RDTR BWP / Perkotaan yang dilakukan	-	dok	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi & sinkronisasi penyusunan RTRW yang dilakukan	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan tata ruang tersusun	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.12.202.1	
Bidang Bina Manfaat Irigasi & Tata Ruang	.23	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persetujuan Substansi Raperda tentang RDTR BWP / Perkotaan / Revisi	Jumlah persetujuan substansi Raperda RDTR BWP / Perkotaan / Revisi yang dilakukan	4	dok	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi & sinkronisasi penyusunan RRTR yang dilakukan	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan tata ruang tersusun	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.12.202.2	
Bidang Bina Manfaat Irigasi & Tata Ruang	.24	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Fasilitasi & koordinasi tentang perencanaan tata ruang	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan	1	kali	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah pendampingan terkait penataan ruang yang dilakukan	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan tata ruang tersusun	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.12.202.3	
Bidang Bina Manfaat Irigasi & Tata Ruang	.15	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang	Jumlah Pelaporan Monev Rencana Tata Ruang yang dilakukan	1	kali	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah koordinasi & sinkronisasi terkait rekomendasi yang dikeluarkan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi yang dikeluarkan terkait pemanfaatan tata ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.12.203.1	
Bidang Bina Manfaat Irigasi & Tata Ruang	1.03.05.01 .40	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Meningkatnya proses rekomendasi pengendalian dan pemanfaatan ruang yang dilakukan	25	persen	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah sistem informasi yang dibuat	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi yang dikeluarkan terkait pemanfaatan tata ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.12.203.2	
Bidang Bina Manfaat Irigasi & Tata Ruang	.01	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyusunan kebijakan tentang pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah kebijakan yang dilakukan	1	dok	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemberian insentif & disinsentif yang dilakukan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian terkait rekomendasi yang dikeluarkan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.12.204.1	
Bidang Bina Manfaat Irigasi & Tata Ruang	.02	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Fasilitasi tentang pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi tentang pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan	3	kali	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penertiban & gakum yang dilakukan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian terkait rekomendasi yang dikeluarkan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.12.204.2	
Bidang Bina Manfaat Irigasi & Tata Ruang	.03	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Survey dan pemetaan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah kawasan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang disurvei	1	kali	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang	Honorarium PPNS bidang penataan ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian terkait rekomendasi yang dikeluarkan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.12.204.3	
Bidang Bina Manfaat Irigasi & Tata Ruang	.04	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sistem Informasi & Komunikasi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Jumlah informasi & komunikasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	-	web	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah koordinasi pelaksanaan penataan ruang yang dibutuhkan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian terkait rekomendasi yang dikeluarkan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.3.12.204.4	
Bidang Bina Manfaat Irigasi & Tata Ruang	.05	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah Pelaporan Monev pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan	1	kali										
Bidang Bina Manfaat Irigasi & Tata Ruang	1.03.05.01 .36	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN & PEMANFAATAN TANAH	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi pertanahan sesuai ketentuan	100	persen	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa, konflik & perkara pertanahan yang dilakukan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	PROGRAM PENYELESAIAN SENSKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.4.201.1	

Bidang Bina Manfaat Irigasi & Tata Ruang	.01	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembenahan administrasi pertanahan desa	Jumlah desa yang dibenahi administrasinya sesuai ketentuan	4	desa	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah mediasi terkait sengketa, konflik & perkara pertanahan yang dilakukan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.4.201.2
Bidang Bina Manfaat Irigasi & Tata Ruang	.02	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Identifikasi & pemetaan tanah negara selain oloran	Jumlah wilayah yang teridentifikasi sesuai ketentuan	5	lokasi	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan yang dilakukan	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penyelesaian ganti kerugian & santunan tanah	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian & santunan tanah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.5.201.1
Bidang Bina Manfaat Irigasi & Tata Ruang	.03	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bimtek administrasi pertanahan	Jumlah peserta bimtek pertanahan	100	org	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi & sinkronisasi terkait masalah pertanahan yang dilakukan	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penyelesaian ganti kerugian & santunan tanah	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian & santunan tanah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.5.201.2
Bidang Bina Manfaat Irigasi & Tata Ruang	.05	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pertanahan	Jumlah monev pertanahan sesuai ketentuan	2	lokasi	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah inventarisasi subyek & obyek redistribusi tanah yang dilakukan	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah yg dilakukan	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah yg dilakukan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.6.201.1
Bidang Bina Manfaat Irigasi & Tata Ruang	.06	Urusan Wajib	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengawasan dan Pengendalian Tanah Pengairan	Jumlah tanah pengairan yang dilakukan pengawasan	100	lokasi	Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah inventarisasi dan rekomendasi obyek redistribusi tanah yang dilakukan	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah yg dilakukan	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah yg dilakukan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.6.201.2
								Koordinasi Penyelenggaraan redistribusi Tanah Obyek Reforma agraria dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah yg dilakukan	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah yg dilakukan	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah yg dilakukan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.6.201.3
								Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	Jumlah koordinasi & sinkronisasi penataan akses dlm pemanfaatan redistribusi tanah yg dilakukan	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah yg dilakukan	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah yg dilakukan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.6.201.4
								Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koordinasi & sinkronisasi penyelesaian tanah kosong yg dilakukan	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Persentase penyelesaian masalah tanah kosong	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengelolaan tanah kosong yang dilakukan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.8.201.1
								Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah inventarisasi tanah kosong yang dilakukan	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase inventarisasi & pemanfaatan tanah kosong	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengelolaan tanah kosong yang dilakukan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.8.202.1
								Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah pemanfaatan tanah kosong	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase inventarisasi & pemanfaatan tanah kosong	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengelolaan tanah kosong yang dilakukan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.8.202.2
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase izin membuka tanah yang dikeluarkan	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase rekomendasi pengelolaan izin membuka tanah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.9.201.1



STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KEPALA	2.13	UrusanWajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Keolaraagan	Bidang Kepemudaan dan keolaraagan	Meningkatnya peran serta dan eksistensi Pemuda	Rasio Pemuda Berprestasi		%						Rasio Pemuda Berprestasi	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
SEKRETARIS	2.13 2.13.01 01			PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	100	%	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2 19 01 01 2.03
SUB BAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN	2.13 2.13.01 01 02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya jasa listrik, telepon dan internet	1	Tahun	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa listrik, telepon dan internet	Administrasi Umum	Tersedianya jasa listrik, telepon dan internet					2 19 01 2.03 02
SUB BAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	2.13 2.13.01 01 07			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	1	tahun	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Administrasi Umum	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan					2 19 01 2.03 07
	2.13 2.13.01 01 10			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya atk	1	tahun	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya atk	Administrasi Umum	Tersedianya atk					2 19 01 2.03 10
	2.13 2.13.01 01 11			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1	paket	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Administrasi Umum	Tersedianya barang cetak dan penggandaan					2 19 01 2.03 11
	2.13 2.13.01 01 13			Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Umum	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor					2 19 01 2.03 13
	2.13 2.13.01 01 17			Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya Makan Minum	12	Bulan	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan Minum	Administrasi Umum	Tersedianya Makan Minum					1 19 01 2.03 17
	2.13 2.13.01 01 18			Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya Dana Transportasi Perjalanan Dinas	12	Bulan	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya Dana Transportasi Perjalanan Dinas	Administrasi Umum	Tersedianya Dana Transportasi Perjalanan Dinas					2 19 01 2.03 18
	2.13 2.13.01 01 19			Penyediaan Jasa Perkantoran	Tersedianya jasa perkantoran	1	tahun	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya pembayaran Honor untuk Tenaga Kontrak Dan THL	Administrasi Keuangan	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					2 19 01 2.02 02
	2.13 2.13.01 01 23			Penyusunan Laporan Kinerja Dan Keuangan	Tersedianya Kinerja dan keuangan	1	tahun	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Kinerja dan keuangan	Administrasi Keuangan	Tersedianya Kinerja dan keuangan					2 19 01 2.02 06
	2.13 2.13.01 02			PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase Sarana dan Prasarana kondisi baik	100	%					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase Sarana dan Prasarana kondisi baik	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB	
	2.13 2.13.01 02 05			Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas	1	unit	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas	Administrasi Umum	Tersedianya Kendaraan Dinas					2 19 01 2.03 20
	2.13 2.13.01 02 10			Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung/Kantor	1	Unit	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung/Kantor	Administrasi Umum	Tersedianya Peralatan Gedung/Kantor					2 19 01 2.03 24
	2.13 2.13.01 02 11			Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	7	paket	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	Administrasi Umum	Tersedianya Mebeleur					2 19 01 2.03 25

	2.13 2.13.01 02 22			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	1	paket	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	Administrasi Umum	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor					2 19 01 2.03 28
	2.13 2.13.01 02 24			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1	tahun	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi Umum	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional					2 19 01 2.03 30
	2.13 2.13.01 02 30			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor	1	tahun	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor	Administrasi Umum	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor					2 19 01 2.03 34
<b>BIDANG PEMUDA</b>	<b>2.13 2.13.01 16</b>			PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	90	%				Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB	
SEKSI PENGEMBANGAN ORGANISASI PEMUDA	2.13 2.13.01 16 01			Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Organisasi yang Aktif	16	Organisasi	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi yang Aktif	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi yang Aktif					2 19 02 2.02 02
SEKSI PENGEMBANGAN AKTIFITAS PEMUDA	2.13 2.13.01 16 10			Seleksi Paskibraka	Terlaksananya Seleksi Paskibraka	76	Siswa	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Terlaksananya Seleksi Paskibraka	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Seleksi Paskibraka					2 19 02 2.01 08
SEKSI PENGEMBANGAN ORGANISASI PEMUDA	2.13 2.13.01 16 11			Pelatihan Bela Negara Bagi Pemuda	Terlaksananya Pelatihan Bela Negara Bagi Pemuda	1	Kegiatan	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Terlaksananya Pelatihan Bela Negara Bagi Pemuda	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Bela Negara Bagi Pemuda					2 19 02 2.01 08
SEKSI PENGEMBANGAN AKTIFITAS PEMUDA	2.13 2.13.01 16 16			Training Of Trainer Pelatih dan Pembina Paskibraka	Terlaksananya bimtek pelatih paskibraka	80	Org	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Terlaksananya bimtek pelatih paskibraka	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya bimtek pelatih paskibraka					2 19 02 2.01 01
SEKSI PENGEMBANGAN ORGANISASI PEMUDA	2.13 2.13.01 16 18			Seleksi Pemuda Pelopor	Terlaksananya Seleksi Pemuda Pelopor	50	Org	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Terlaksananya Seleksi Pemuda Pelopor	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Seleksi Pemuda Pelopor					2 19 02 2.01 01
	2.13 2.13.01 16 19			Festival Pemuda Pasuruan	Mengembangkan Potensi Pemuda dalam Festival	50	Org	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	Mengembangkan Potensi Pemuda dalam Festival	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Mengembangkan Potensi Pemuda dalam Festival					2 19 02 2.01 03
	2.13 2.13.01 16 20			Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda	Tersedianya Pemuda Penggiat Anti Narkoba	40	Org	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Tersedianya Pemuda Penggiat Anti Narkoba	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tersedianya Pemuda Penggiat Anti Narkoba					2 19 02 2.02 02

	2.13.2.13.01 16 21			Jambore Pemuda	Terlaksananya Kegiatan Jambore Pemuda	40	Org	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	Terlaksananya Kegiatan Jambore Pemuda	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Jambore Pemuda					2 19 02 2.01 03
	2.13.2.13.01 17			PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	Persentase Pemuda yang Aktif Berwirausaha	90	%					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang Aktif Berwirausaha	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB	
SEKSI PENGEMBANGAN ORGANISASI PEMUDA	2.13.2.13.01 17 01			Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	50	Org	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan					2 19 022.01 02
	2.13.2.13.01 17 02			Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda	Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan	50	Org	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan					2 19 022.01 02
	2.13.2.13.01 22			PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Prosentase Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan	100	%				Prosentase Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan					
SEKSI PENGEMBANGAN ORGANISASI PEMUDA	2.13.2.13.01 22 01			Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pembinaan/Pelatihan/Peningkatan Produktivitas Budidaya Jamur)	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Budidaya Jamur	50	Orang	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Budidaya Jamur	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Budidaya Jamur					2 19 022.01 02
	2.13.2.13.01 22 02			Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Tata Rias)	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Tata Rias	50	Orang	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Tata Rias	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Tata Rias					2 19 022.01 02
	2.13.2.13.01 22 02			Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pelatihan Pembuatan Tas Rajut)	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Pembuatan Tas Rajut	50	Orang	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Pembuatan Tas Rajut	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Pembuatan Tas Rajut					2 19 022.01 02
	2.13.2.13.01 22 01			Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pembinaan/Pelatihan Manajemen)	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan (Pemuda)	50	Orang	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan (Pemuda)	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan (Pemuda)					
BIDANG OLAHRAGA	2.13.2.13.01 20			PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	Persentase Atlit yang Berprestasi	90	%					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLARAGAAN	Persentase Atlit yang Berprestasi	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB	



SEKSI PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI	2.13 2.13.01 20 03			Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Terselenggaranya pembinaan & seleksi atlet	13	Cabor	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terselenggaranya pembinaan & seleksi atlet					2 19 03 203 03
SEKSI PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI	2.13 2.13.01 20 05			Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Meningkatnya pola pemassalan & pembinaan melalui olahraga bersama	50	Org	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Meningkatnya pola pemassalan & pembinaan melalui olahraga bersama					2 19 03 2.05 01
SEKSI PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI	2.13 2.13.01 20 06			Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Meningkatnya pola kompetisi olahraga	14	Cabor	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pola kompetisi olahraga					2 19 03 2.02 03
SEKSI PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI	2.13 2.13.01 20 07			Pemasalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Olahraga untuk Masyarakat Kabupaten Pasuruan	9	Kegiatan	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Kegiatan Olahraga untuk Masyarakat Kabupaten Pasuruan					2 19 03 2.05 01
SEKSI PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI	2.13 2.13.01 20 08			Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi	Meningkatkan kesejahteraan bagi perilaku olahraga yang berprestasi	1	Paket	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatkan kesejahteraan bagi perilaku olahraga yang berprestasi					2 19 03 2.03 04
SEKSI PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI	2.13 2.13.01 20 10			Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat	Terlaksananya seleksi dan pembinaan atlet penyandang cacat	25	Org	Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya seleksi dan pembinaan atlet penyandang cacat					2 19 03 2.04 03
SEKSI PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI	2.13 2.13.01 20 13			Peningkatan Jumlah Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga	Terlaksananya kualitas pelatih, juri/wasit olahraga	12	Org	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan ( <i>Sport Science</i> )		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya kualitas pelatih, juri/wasit olahraga					2 19 03 2.03 02
	<b>2.13 2.13.01 21</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA</b>	Prosentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Berkualitas	90	%				Prosentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Berkualitas					
SEKSI PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI	2.13 2.13.01 21 02			Peningkatan Pembangunan Saran dan Prasarana Olahraga	Gedung Sarpras Olahraga	6	Paket	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Gedung Sarpras Olahraga					2 19 03 2.01 03
	2.13 2.13.01 21 07			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Terpeliharanya sarpras olahraga	2	Unit	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terpeliharanya sarpras olahraga					2 19 03 2.05 04

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA OPD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KEPALA		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar PERPUSTAKAAN														
		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar KEARSIPAN														
SEKRETARIS				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	100	%					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2
SUB BAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air, dan internet selama 12 bulan	360	rekening bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air, dan internet selama 12 bulan	Administrasi Umum	Jumlah pembayaran telepon, air, dan internet selama 12 bulan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.01.1.03.02
SUB BAG UMUM, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor	45	jenis-kali	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor	Administrasi Umum	Jumlah pembelian alat tulis kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.01.1.03.10
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	30	jenis-kali	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	Administrasi Umum	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.01.1.03.11
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	30	jenis-kali	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	Administrasi Umum	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.01.1.03.13
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat	650	Orang Bulan	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat	Administrasi Umum	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.01.1.03.17
				Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah	20	laporan	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah	Administrasi Umum	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.01.1.03.18
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak/THL	468	orang bulan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak/THL	Administrasi Umum	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.01.01.1.02.2
				Penyusunan laporan kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja tribulan dan tahunan	5	laporan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja tribulan dan tahunan	Administrasi Keuangan	Jumlah laporan kinerja tribulan dan tahunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.01.1.02.06

				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	%					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
				2.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan	1	unit	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan	Administrasi Umum	Jumlah pengadaan kendaraan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.01.1.03.21
				2.2. Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	6	unit	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	Administrasi Umum	Jumlah pengadaan peralatan kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.01.1.03.25
				2.3. Pengadaan Mebelair	Jumlah pengadaan mebelair	5	unit	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebelair	Administrasi Umum	Jumlah pengadaan mebelair	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.01.1.03.26
				2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	39	unit-bln	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Administrasi Umum	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.01.1.03.31
				2.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	unit-kali	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Administrasi Umum	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.01.1.03.29
				2.6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	10	unit-kali	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Administrasi Umum	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.01.1.03.36
				2.7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	35	unit-kali	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Administrasi Umum	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.01.1.03.35
				BIDANG PERPUSTAKAAN	Urusan Perpustakaan	7	%					PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang terakreditasi A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
				Seksi Pelayanan dan Promosi	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	400	keg.kali	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah layanan perpustakaan dan promosi/pengembangan minat baca	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan dan promosi/pengembangan minat baca	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang terakreditasi A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.02.2.02.01

Seksi Pengelolaan				Penyediaan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang tersedia	4000	eks	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang tersedia	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bahan pustaka yang tersedia	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang terakreditasi A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.02.2.01.09
Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan				Supervisi Pembinaan dan Simulasi Perpustakaan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan/Workshop perpustakaan, baik laki-laki maupun perempuan	200	org	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan/Workshop perpustakaan, baik laki-laki maupun perempuan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan/Workshop perpustakaan, baik laki-laki maupun perempuan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang terakreditasi A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23.02.2.01.04
<b>BIDANG KEARSIPAN</b>			Urusan Kearsipan	Program kearsipan	Kategori Pengelolaan Arsip Statis	<b>60,00</b>						PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kategori Pengelolaan Arsip Statis	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
KEPALA SEKSI AKUISISI, PENYIMPANAN & PENGELOLAAN ARSIP				Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Jumlah pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	2	jenis	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kategori Pengelolaan Arsip Statis	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.02.2.02.02
				Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah arsip yang dilakukan pendataan dan penataan	50	ML	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip yang dilakukan pendataan dan penataan	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dilakukan pendataan dan penataan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kategori Pengelolaan Arsip Statis	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.02.2.02.02
KEPALA SEKSI PELAYANAN & DOKUMENTASI				Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	14	kegiatan	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kategori Pengelolaan Arsip Statis	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.02.2.01.02
				Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip	Jumlah kegiatan penyediaan sarana layanan informasi arsip	2	kegiatan	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Jumlah kegiatan penyediaan sarana layanan informasi arsip	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyediaan sarana layanan informasi arsip	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kategori Pengelolaan Arsip Statis	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.02.2.03.01
KEPALA SEKSI PEMBINAAN & PENGEMBANGAN KEARSIPAN				Sosialisasi/penyuluh kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan/sosialisasi kearsipan baik laki-laki maupun perempuan	200	orang	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan/sosialisasi kearsipan baik laki-laki maupun perempuan	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan/sosialisasi kearsipan baik laki-laki maupun perempuan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kategori Pengelolaan Arsip Statis	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.02.2.03.02

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Belanja tidak langsung (gaji)				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				X.XX.01.2.02.01
<b>SUBBAG. UMUM</b>	<b>1.01.1.01.01.01</b>			<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Presetase pemenuhan layanan kantor</b>	100	%									
	1.01.1.01.01.01.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	12	Bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	Administrasi Umum	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presetase pemenuhan layanan kantor			X.XX.01.2.03.02
	1.01.1.01.01.01.07			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan, pengelola aset, pelaku pengadaan barang/ jasa, pelaksana verifikasi pajak, gaji, sertifikasi, akuntansi, SPM, juru bayar, pengurus barang, pembantu pengurus barang, bendahara penerimaan	150	orang	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan, pengelola aset, pelaku pengadaan barang/ jasa, pelaksana verifikasi pajak, gaji, sertifikasi, akuntansi, SPM, juru bayar, pengurus barang, pembantu pengurus barang, bendahara penerimaan	Administrasi Umum	Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan, pengelola aset, pelaku pengadaan barang/ jasa, pelaksana verifikasi pajak, gaji, sertifikasi, akuntansi, SPM, juru bayar, pengurus barang, pembantu pengurus barang, bendahara penerimaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presetase pemenuhan layanan kantor			X.XX.01.2.03.07
	1.01.1.01.01.01.10			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian ATK	54	jenis	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian ATK	Administrasi Umum	Jumlah pembelian ATK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presetase pemenuhan layanan kantor			X.XX.01.2.03.10
	1.01.1.01.01.01.11			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Administrasi Umum	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presetase pemenuhan layanan kantor			X.XX.01.2.03.11
	1.01.1.01.01.01.13			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat listrik yang direalisasikan	36	unit	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat listrik yang direalisasikan	Administrasi Umum	Jumlah alat listrik yang direalisasikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presetase pemenuhan layanan kantor			X.XX.01.2.03.07
					Jumlah pembelian meterai	750	buah		Jumlah pembelian meterai		Jumlah pembelian meterai					
					Jumlah pembelian alat kebersihan	28	jenis		Jumlah pembelian alat kebersihan		Jumlah pembelian alat kebersihan					
					Jumlah pembelian perlengkapan rumah tangga	1	jenis		Jumlah pembelian perlengkapan rumah tangga		Jumlah pembelian perlengkapan rumah tangga					
					Jumlah pembelian mesin hitung uang, rak buku, komputer, printer, audio mixer	17	unit		Jumlah pembelian mesin hitung uang, rak buku, komputer, printer, audio mixer		Jumlah pembelian mesin hitung uang, rak buku, komputer, printer, audio mixer					
					Jumlah pembelian kelengkapan komputer	45	jenis		Jumlah pembelian kelengkapan komputer		Jumlah pembelian kelengkapan komputer					
	1.01.1.01.01.01.17			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah konsumsi rapat dan tamu	12	Bulan	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah konsumsi rapat dan tamu	Administrasi Umum	Jumlah konsumsi rapat dan tamu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presetase pemenuhan layanan kantor			X.XX.01.2.03.17
	1.01.1.01.01.01.18			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi	12	Bulan	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi	Administrasi Umum	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presetase pemenuhan layanan kantor			X.XX.01.2.03.18
	1.01.1.01.01.01.19			Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak dan THL	12	Bulan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak dan THL	Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak dan THL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presetase pemenuhan layanan kantor			X.XX.01.2.02.02
<b>SUBBAG. UMUM</b>	<b>1.01.1.01.01.02</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Presentase sarana prasarana kondisi baik</b>	100	%									
	1.01.1.01.01.02.05			Pengadaan Mebeleur	Jumlah pembelian Mebeleur	44	unit	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pembelian Mebeleur	Administrasi Umum	Jumlah pembelian Mebeleur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase sarana prasarana kondisi baik			X.XX.01.2.03.25
	1.01.1.01.01.02.22			Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang direalisasikan	12	Bulan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang direalisasikan	Administrasi Umum	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang direalisasikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase sarana prasarana kondisi baik			X.XX.01.2.03.28

	1.01.1.01.10.02.24		Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor yang direalisasikan	12	Bulan	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor yang direalisasikan	Administrasi Umum	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor yang direalisasikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase sarana prasarana kondisi baik			X.XX.01.2.03.30		
	1.01.1.01.01.02.30		Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas yang direalisasikan	12	Bulan	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas yang direalisasikan	Administrasi Umum	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas yang direalisasikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase sarana prasarana kondisi baik			X.XX.01.2.03.34		
			Pengadaan Tanah	Jumlah lembaga yang menerima pengadaan tanah			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah lembaga yang menerima pengadaan tanah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang menerima pengadaan tanah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Presentase sarana prasarana kondisi baik			1.01.02.2.02.01		
BIDANG PERGURAG	1.01.1.01.01.09		PROGRAM PENDIDIKAN BERKARAKTER	Rasio TPQ yang berstandar	1:2	rasio											
				Rasio Madin yang berstandar	1:2	rasio											
				APM TPQ	50	%											
				APM Madin	76.08	%											
				Presentase guru TPQ/Madin yang bersertifikat	20	%											
Seksi TPQ/Madfin	1.01.1.01.01.09.01		Penyelenggaraan Pendidikan Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ)	Jumlah peserta bimtek penyelenggaraan TPQ	1488	orang	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal dan kesetaraan	Jumlah peserta bimtek penyelenggaraan TPQ	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah peserta bimtek penyelenggaraan TPQ	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio TPQ yang berstandar			1.01.02.2.04.16		
Seksi TPQ/Madfin	1.01.1.01.01.09.02		Penyelenggaraan Pendidikan Madin/ Pontren	Jumlah peserta bimtek penyelenggaraan Madin/Pontren	9216	orang	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal dan kesetaraan	Jumlah peserta bimtek penyelenggaraan Madin/Pontren	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah peserta bimtek penyelenggaraan Madin/Pontren	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio Madin yang berstandar			1.01.02.2.04.16		
												APM TPQ					
												APM Madin					
												Presentase guru TPO/Madin yang bersertifikat					
Bidang PAUD dan Dikmas	1.01.1.01.01.15		PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	APK PAUD													
				Persentase peningkatan jumlah ruang kelas pendidikan anak usia dini dan RPL berkondisi baik													
				Persentase Guru Paud yang bersertifikat (terlatih) untuk mengajar													
Seksi Sarpras PAUD dan Dikmas	1.01.1.01.01.15.01		Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah gedung PAUD yang dibangun	7	lembaga	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah gedung PAUD yang dibangun	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah gedung PAUD yang dibangun	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.03.01		
Seksi Sarpras PAUD dan Dikmas	1.01.1.01.01.15.18		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah lembaga penerima APE	28	paket	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah lembaga penerima APE	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah lembaga penerima APE		Persentase peningkatan jumlah ruang kelas pendidikan anak usia dini dan RPL berkondisi baik	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.03.12		

Seksi Sarpras PAUD dan Dikmas	1.01.1.01.01.15.19		Pengadaan Mebelair Sekolah	Jumlah mebelair yang diterima	78	paket	Pengadaan Mebeluer PAUD	Jumlah mebelair yang diterima	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah mebelair yang diterima
Seksi Sarpras PAUD dan Dikmas	1.01.1.01.01.15.42		Rehabilitasi Sedang/berat Bangunan Sekolah TK	Jumlah gedung TK pembina dan TK swasta yang direhab	27	lembaga	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah gedung TK pembina dan TK swasta yang direhab	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah gedung TK pembina dan TK swasta yang direhab
Seksi RA/BA/TA (BIDANG PERGURAG)	1.01.1.01.01.15.57		Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Jumlah lembaga yang diikutsertakan dalam Bimtek Tenaga Pendidik RA	428	orang	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah lembaga yang diikutsertakan dalam Bimtek Tenaga Pendidik RA	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah lembaga yang diikutsertakan dalam Bimtek Tenaga Pendidik RA
Seksi RA/BA/TA (BIDANG PERGURAG)	1.01.1.01.01.15.58		Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah siswa yang diikutsertakan dalam Lomba Siswa RA	180	orang	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah siswa yang diikutsertakan dalam Lomba Siswa RA	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah siswa yang diikutsertakan dalam Lomba Siswa RA
Seksi Peserta Didik kelembagaan PAUD dan Dikmas	1.01.1.01.01.15.59		Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah pendidik PAUD dan TK yang menerima insentif	3.890	orang	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah pendidik PAUD dan TK yang menerima insentif	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah pendidik PAUD dan TK yang menerima insentif
				Jumlah peserta Bimtek Pendidikan Karakter PAUD untuk guru PAUD				Jumlah peserta Bimtek Pendidikan Karakter PAUD untuk guru PAUD		Jumlah peserta Bimtek Pendidikan Karakter PAUD untuk guru PAUD
				Jumlah peserta Bimtek Pendidikan Karakter Dikmas untuk guru PNF				Jumlah peserta Bimtek Pendidikan Karakter Dikmas untuk guru PNF		Jumlah peserta Bimtek Pendidikan Karakter Dikmas untuk guru PNF
Seksi kurikulum PAUD dan Dikmas	1.01.1.01.01.15.62		Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah peserta bimtek pengembangan kurikulum PAUD	150	orang	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah peserta bimtek pengembangan kurikulum PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah peserta bimtek pengembangan kurikulum PAUD

Persentase Guru Paud yang bersertifikat (terlatih) untuk mengajar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.03.07
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.03.03
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.03.16
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.03.17
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.03.16
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.03.16

kurikulum	1.01.1.01.01.15.63		Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah peserta rakor 3 komponen PAUD	2	keg	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah peserta rakor 3 komponen PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah peserta rakor 3 komponen PAUD		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.03.16	
Seksi Peserta Didik kelembagaan PAUD dan Dikmas	1.01.1.01.01.15.65		Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah peserta seleksi lomba HAN dan puncak HAN	100	orang	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah peserta seleksi lomba HAN dan puncak HAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah peserta seleksi lomba HAN dan puncak HAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.03.17	
Seksi Peserta Didik kelembagaan PAUD dan Dikmas	1.01.1.01.01.15.77		Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga PAUD	Jumlah peserta bimtek akreditasi lembaga PAUD	150	orang	Penyiapan dan tindak lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah peserta bimtek akreditasi lembaga PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah peserta bimtek akreditasi lembaga PAUD		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.03.14	
<b>BIDANG PENDIDIKAN DASAR</b>	1.01.1.01.01.16		<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN</b>	<b>APM SD/MI</b>											
				<b>APM SMP/MTs</b>											
				<b>Persentase peningkatan jumlah ruang kelas pendidikan dasar dan RPL berkondisi baik :</b>											
				<b>a. SD/MI</b>											
				<b>b. SMP/MTs</b>											
				<b>Persentase Guru SD/SMP yang bersertifikat dan terlatih untuk mengajar</b>											
				<b>Angka Pendidikan Yang Ditamatkan :</b>											
				<b>a. SD, SMP</b>											
				<b>b. MI, MTs</b>											
Seksi Sarana Prasarana Dikdas	1.01.1.01.01.16.41		Peningkatan Sarana/Prasarana Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Kelas Baru dan perabot ruang kelas baru SD			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Ruang Kelas Baru dan perabot ruang kelas baru SD	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Kelas Baru dan perabot ruang kelas baru SD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD/MI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.01.01
							Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			APM SMP/MTs	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.02.01



Jumlah Rehabilitasi Rusak Sedang Berang Ruang Kelas dan SPL	24	Ruang	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Rehabilitasi Rusak Sedang Berang Ruang Kelas dan SPL	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Rehabilitasi Rusak Sedang Berang Ruang Kelas dan SPL		
			Penambahan Ruang Kelas Baru		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
Jumlah Lembaga Penerima Pagar Keliling			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Lembaga Penerima Pagar Keliling	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga Penerima Pagar Keliling		
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			

Persentase peningkatan jumlah ruang kelas pendidikan dasar dan RPL ber kondisi baik :	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.02
a. SD/MI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.02
b. SMP/MTs	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.03
Persentase Guru SD/SMP yang bersertifikat dan terlatih untuk mengajar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.03
Angka Pendidikan Yang Ditamatkan :	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.04
a. SD, SMP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.04

			Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

b. MI, MTs

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.05
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.05
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.06
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.07
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.09

			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.01.08
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.02.14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.01.09
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.02.21
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.01.04
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.02.16

			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.01.11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.02.17
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.01.12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.02.24
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.01.13
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.02.21

			Pengadaan Mebeluer Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
			Pengadaan Mebeluer Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
			Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.01.14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.02.25
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.01.15
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.02.26
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.01.16
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.02.27

							Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
							Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
Seksi Kurikulum Dikdas	1.01.1.01.01.16.57		Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Jumlah peserta Kegiatan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar (SD/SMP)	12	bln	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta Kegiatan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar (SD/SMP)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta Kegiatan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar (SD/SMP)
				Jumlah peserta Kegiatan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar (SD/SMP)			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta Kegiatan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar (SD/SMP)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta Kegiatan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar (SD/SMP)
Seksi MI/MTs (BIDANG PERGURAG)	1.01.1.01.01.16.58		Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	Terlaksananya Kegiatan Lomba Siswa MI	3	keg	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya Kegiatan Lomba Siswa MI	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Kegiatan Lomba Siswa MI
				Terlaksananya Kegiatan Lomba Siswa MTs			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya Kegiatan Lomba Siswa MTs	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Kegiatan Lomba Siswa MTs

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERIN TAHAN WAJIB YANG BERKAIT AN DENGAN PELAYAN AN DASAR	1.01.02.2.01.22
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERIN TAHAN WAJIB YANG BERKAIT AN DENGAN PELAYAN AN DASAR	1.01.02.2.02..35
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERIN TAHAN WAJIB YANG BERKAIT AN DENGAN PELAYAN AN DASAR	1.01.02.2.01.27
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERIN TAHAN WAJIB YANG BERKAIT AN DENGAN PELAYAN AN DASAR	1.01.02.2.02.40
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERIN TAHAN WAJIB YANG BERKAIT AN DENGAN PELAYAN AN DASAR	1.01.02.2.01.25
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERIN TAHAN WAJIB YANG BERKAIT AN DENGAN PELAYAN AN DASAR	1.01.02.2.02.38

Seksi MI/MTs <b>(BIDANG PERGURAG)</b>	1.01.1.01.01.16.59		Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Terlaksananya Kegiatan Bimtek Penyusunan Kurikulum	7	keg	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Terlaksananya Kegiatan Bimtek Penyusunan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Terlaksananya Kegiatan Bimtek Penyusunan Kurikulum	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
Seksi Kurikulum Dike	1.01.1.01.01.16.63		Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (bos) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	Jumlah Peserta Try Out SD Kelas VI	12	bln	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Try Out SD Kelas VI	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Try Out SD Kelas VI	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Jumlah Scanning LJK Try Out dan US Kelas VI				Jumlah Scanning LJK Try Out dan US Kelas VI		Jumlah Scanning LJK Try Out dan US Kelas VI	
				Jumlah Peserta Ujian TSM Semester Genap Kelas I - VI				Jumlah Peserta Ujian TSM Semester Genap Kelas I - VI		Jumlah Peserta Ujian TSM Semester Genap Kelas I - VI	
				Jumlah Peserta Ujian TSM Semester Ganjil Kelas I - VI				Jumlah Peserta Ujian TSM Semester Ganjil Kelas I - VI		Jumlah Peserta Ujian TSM Semester Ganjil Kelas I - VI	
				Jumlah Peserta USBN dan US Kelas VI				Jumlah Peserta USBN dan US Kelas VI		Jumlah Peserta USBN dan US Kelas VI	
Seksi MI/MTs <b>(BIDANG PERGURAG)</b>	1.01.1.01.01.16.64		Penyediaan Biaya Operasional Madrasah	Jumlah penerima honor tim penyusun naskah US I dan II MI	7	keg	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah penerima honor tim penyusun naskah US I dan II MI	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah penerima honor tim penyusun naskah US I dan II MI	
				Jumlah penerima honor tim penyusun naskah US I dan II MTs			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah penerima honor tim penyusun naskah US I dan II MTs	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah penerima honor tim penyusun naskah US I dan II MTs	
				Jumlah penerima honor tim penyusun naskah UAM MI			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah penerima honor tim penyusun naskah UAM MI	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah penerima honor tim penyusun naskah UAM MI	
				Jumlah penerima honor tim penyusun naskah UAM MTs			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah penerima honor tim penyusun naskah UAM MTs	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah penerima honor tim penyusun naskah UAM MTs	

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERIN TAHAN WAJIB YANG BERKAIT AN DENGAN PELAYAN AN DASAR	1.01.03.2.01.04
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERIN TAHAN WAJIB YANG BERKAIT AN DENGAN PELAYAN AN DASAR	1.01.02.2.01.23
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERIN TAHAN WAJIB YANG BERKAIT AN DENGAN PELAYAN AN DASAR	1.01.02.2.01.23
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERIN TAHAN WAJIB YANG BERKAIT AN DENGAN PELAYAN AN DASAR	1.01.02.2.02.36
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERIN TAHAN WAJIB YANG BERKAIT AN DENGAN PELAYAN AN DASAR	1.01.02.2.01.23
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERIN TAHAN WAJIB YANG BERKAIT AN DENGAN PELAYAN AN DASAR	1.01.02.2.02.36

				Jumlah peserta US I, US II dan UAM MI			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peserta US I, US II dan UAM MI	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta US I, US II dan UAM MI
				Jumlah peserta US I, US II dan UAM MTs			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peserta US I, US II dan UAM MTs	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta US I, US II dan UAM MTs
Seksi Kurikulum Dike	1.01.1.01.01.16.66		Penyediaan dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	Jumlah Peserta dan scanning LJK Try Out SMP Kelas 9	12	bln	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta dan scanning LJK Try Out SMP Kelas 9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta dan scanning LJK Try Out SMP Kelas 9
				Jumlah Peserta Ujian Semester Genap 7,8,9				Jumlah Peserta Ujian Semester Genap 7,8,9		Jumlah Peserta Ujian Semester Genap 7,8,9
				Jumlah Peserta Ujian Semester Ganjil 7,8,9				Jumlah Peserta Ujian Semester Ganjil 7,8,9		Jumlah Peserta Ujian Semester Ganjil 7,8,9
Seksi Kesiswaan, Kesenian dan Kelembagaan	1.01.1.01.01.16.70		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti lomba dan olimpiade SD	Jumlah Siswa yang mengikuti lomba dan olimpiade (SD/SMP)	Jumlah Siswa yang mengikuti i lomba dan olimpiade (SD/SMP )	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti lomba dan olimpiade SD	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang mengikuti lomba dan olimpiade SD
				Jumlah Siswa yang mengikuti lomba dan olimpiade SMP			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti lomba dan olimpiade SMP	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang mengikuti lomba dan olimpiade SMP
Seksi Kurikulum Dike	1.01.1.01.01.16.73		Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta Sosialisasi Implementasi Kurikulum 2013	6	bln	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Peserta Sosialisasi Implementasi Kurikulum 2013	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Sosialisasi Implementasi Kurikulum 2013

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.01.23
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.02.36
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.0236
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.01.25
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.02.38
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.01.28



				Jumlah Peserta Sosialisasi Implementasi Kurikulum 2013			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Peserta Sosialisasi Implementasi Kurikulum 2013	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Sosialisasi Implementasi Kurikulum 2013		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.02.41	
Seksi Kesiswaan, Kesenian dan Kelembagaan	1.01.1.01.01.16.77		Penyelenggaraan Multi-grade Teaching Di Daerah Terpencil	Jumlah Penerima Guru dan Tenaga Kependidikan di Daerah Terpencil	971	Orang	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Penerima Guru dan Tenaga Kependidikan di Daerah Terpencil	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Penerima Guru dan Tenaga Kependidikan di Daerah Terpencil		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.01.27	
				Jumlah Penerima Guru dan Tenaga Kependidikan di Daerah Terpencil			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penerima Guru dan Tenaga Kependidikan di Daerah Terpencil	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penerima Guru dan Tenaga Kependidikan di Daerah Terpencil		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.02.2.02.40	
Seksi Madin/Pontren (BIDANG PERGURAG)	1.01.1.01.01.16.81		Biaya Operasional BPPDGS	Jumlah peserta sosialisasi penerima BOP BPPDGS (MADIN)	624	org	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal dan Kesetaraan	Jumlah peserta sosialisasi penerima BOP BPPDGS (MADIN)	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah peserta sosialisasi penerima BOP BPPDGS (MADIN)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio Madin yang berstandar		1.01.02.2.04.16	
BIDANG PAUD dan Dikmas	1.01.1.01.01.18		PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Persentase Tutor dan penyelenggara/pengelola PNF yang bersertifikat Jumlah lembaga kursus dan pelatihan menjadi rujukan TUK meningkat											
Seksi Peserta Didik kelembagaan PAUD dan Dikmas	1.01.1.01.01.18.03		Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	Jumlah peserta bintek pembinaan kursus dan kelembagaan	200	orang	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta bintek pembinaan kursus dan kelembagaan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta bintek pembinaan kursus dan kelembagaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Tutor dan penyelenggara/pengelola PNF yang bersertifikat/Jumlah lembaga pendidikan terakreditasi A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.1.02.2.04.16
Seksi Peserta Didik kelembagaan PAUD dan Dikmas	1.01.1.01.01.18.04		Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Jumlah peserta bintek pengembangan pendidikan keaksaraan	300	orang	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta bintek pengembangan pendidikan keaksaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta bintek pengembangan pendidikan keaksaraan		Jumlah lembaga kursus dan pelatihan menjadi rujukan TUK meningkat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.1.02.2.04.16

Seksi Sarpras PAUD dan Dikmas	1.01.1.01.01.18.06		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal	Jumlah sarana dan prasarana (server)	2	unit	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sarana dan prasarana (server)	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sarana dan prasarana (server)
				Jumlah sarana dan prasarana (modul paket A, B dan C)	150	orang	Jumlah sarana dan prasarana (modul paket A, B dan C)	Jumlah sarana dan prasarana (modul paket A, B dan C)		
				Jumlah sarana dan prasarana (komputer)	40	unit	Jumlah sarana dan prasarana (komputer)	Jumlah sarana dan prasarana (komputer)		
Seksi Kurikulum PAUD dan Dikmas	1.01.1.01.01.18.11		Perencanaan dan Penyusunan Pendidikan Non Formal	Jumlah peserta bimtek orientasi teknis pendidikan keaksaraan	150	orang	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta bimtek orientasi teknis pendidikan keaksaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta bimtek orientasi teknis pendidikan keaksaraan
Seksi Peserta Didik kelembagaan PAUD dan Dikmas	1.01.1.01.01.18.12		Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal	Jumlah peserta HAI dan Jambore PNF	355	orang	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah peserta HAI dan Jambore PNF		Jumlah peserta HAI dan Jambore PNF
Seksi Kurikulum PAUD dan Dikmas	1.01.1.01.01.18.14		Penyelenggaraan Paket C Setara SMU	Jumlah penerima honor tutor kejar paket C	690	orang	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah penerima honor tutor kejar paket C		Jumlah penerima honor tutor kejar paket C
				Jumlah Cetak ujian semester ganjil dan genap	350.000	lbr		Jumlah Cetak ujian semester ganjil dan genap		Jumlah Cetak ujian semester ganjil dan genap
				Jumlah penerima konsumsi ujian semester ganjil/genap	936	ok		Jumlah penerima konsumsi ujian semester ganjil/genap		Jumlah penerima konsumsi ujian semester ganjil/genap
Seksi Kurikulum PAUD dan Dikmas	1.01.1.01.01.18.20		Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah penerima honor tutor kejar paket B	266	orang	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah penerima honor tutor kejar paket B	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah penerima honor tutor kejar paket B
				Jumlah Cetak ujian semester ganjil dan genap	254.000	lbr	Jumlah Cetak ujian semester ganjil dan genap	Jumlah Cetak ujian semester ganjil dan genap		
				Jumlah penerima konsumsi ujian semester ganjil/genap	660	ok	Jumlah penerima konsumsi ujian semester ganjil/genap	Jumlah penerima konsumsi ujian semester ganjil/genap		

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.1.02.2.04.09
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.1.02.2.04.15
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.1.02.2.04.16
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.1.02.2.04.12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.1.02.2.04.12

Seksi Kurikulum PAUD dan Dikmas	1.01.1.01.01.18.21		Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Jumlah penerima honor tutor kejar paket A	10	orang	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah penerima honor tutor kejar paket A	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah penerima honor tutor kejar paket A			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN TAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.1.02.2.04.12
				Jumlah Cetak ujian semester ganjil dan genap	33.120	Lbr	Jumlah Cetak ujian semester ganjil dan genap	Jumlah Cetak ujian semester ganjil dan genap							
				Jumlah penerima konsumsi ujian semester ganjil/genap	138	ok	Jumlah penerima konsumsi ujian semester ganjil/genap	Jumlah penerima konsumsi ujian semester ganjil/genap							
Seksi Peserta Didik kelembagaan PAUD dan Dikmas	1.01.1.01.01.18.22		Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Pendidikan Non Formal	Jumlah peserta bimtek akreditasi lembaga PNF	150	orang	Penyiapan dan tindak lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan NonFormal/Keaksaraan	Jumlah peserta bimtek akreditasi lembaga PNF	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta bimtek akreditasi lembaga PNF			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN TAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.1.02.2.04.13
<b>BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>1.01.1.01.01.20</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Persentase peningkatan guru berpendidikan S1/D.IV :</b> <b>a. PAUD</b> <b>b. SD/MI</b> <b>c. SMP/MTs</b> <b>Presentase GTK yang bersertifikat dan terlatih untuk meningkatkan kompetensi</b> <b>Rasio Kebutuhan GTK terhadap lembaga :</b> <b>a. PAUD FORMAL</b> <b>b. SD</b> <b>c. SMP</b>											
Seksi Tenaga Kependidikan Dinas, GTK SMP dan Pengawas SMP	1.01.1.01.01.20.01		Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Jumlah Guru yang diikutkan Sosialisasi Sertifikasi Guru	750	orang	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Guru yang diikutkan Sosialisasi Sertifikasi Guru	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Guru yang diikutkan Sosialisasi Sertifikasi Guru	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase peningkatan guru berpendidikan S1/D.IV :	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN TAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.04.2.01.01
				Jumlah Guru Bersertifikat Pendidik yang diikutkan Pembinaan	1250	orang	Jumlah Guru Bersertifikat Pendidik yang diikutkan Pembinaan	Jumlah Guru Bersertifikat Pendidik yang diikutkan Pembinaan							
Seksi Tenaga Kependidikan Dinas, GTK SMP dan Pengawas SMP	1.01.1.01.01.20.02		Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Kepala Sekolah yang diikutkan Diklat Penguatan KS	200	orang	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kepala Sekolah yang diikutkan Diklat Penguatan KS	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kepala Sekolah yang diikutkan Diklat Penguatan KS	a. PAUD b. SD/MI c. SMP/MTs	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN TAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.04.2.01.01	
				Jumlah Staf yang diikutkan Diklat Pengolah Administrasi Perpustakaan Sekolah	60	orang	Jumlah Staf yang diikutkan Diklat Pengolah Administrasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Staf yang diikutkan Diklat Pengolah Administrasi Perpustakaan Sekolah							

				Jumlah Staf yang diikuti Diklat Pengolah Administrasi Laboratorium Sekolah	60	orang		Jumlah Staf yang diikuti Diklat Pengolah Administrasi Laboratorium Sekolah		Jumlah Staf yang diikuti Diklat Pengolah Administrasi Laboratorium Sekolah
Seksi GTK SD dan Pengawas Sekolah SD	1.01.1.01.01.20.03		Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	Jumlah Guru yang diikuti Seleksi dan Diklat calon pengawas Sekolah	40	orang	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Guru yang diikuti Seleksi dan Diklat calon pengawas Sekolah	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Guru yang diikuti Seleksi dan Diklat calon pengawas Sekolah
				Jumlah penilik yang diikuti Diklat Peningkatan Mutu	16	orang		Jumlah penilik yang diikuti Diklat Peningkatan Mutu		Jumlah penilik yang diikuti Diklat Peningkatan Mutu
				Jumlah Pengawas Sekolah yang diikuti Diklat Peningkatan Mutu	90	orang		Jumlah Pengawas Sekolah yang diikuti Diklat Peningkatan Mutu		Jumlah Pengawas Sekolah yang diikuti Diklat Peningkatan Mutu
				Jumlah Guru yang diikuti PPG	500	orang		Jumlah Guru yang diikuti PPG		Jumlah Guru yang diikuti PPG
Seksi GTK SD dan Pengawas Sekolah SD	1.01.1.01.01.20.04		Pembinaan Kelompok Kerja Guru (kkg)	Jumlah Guru TK/KB yang diikuti Optimalisasi KKG Guru	250	orang	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Guru TK/KB yang diikuti Optimalisasi KKG Guru	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Guru TK/KB yang diikuti Optimalisasi KKG Guru
Seksi GTK PAUD, Pengawas Sekolah TK dan Penilik	1.01.1.01.01.20.08		Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah GTK PNS dan Non PNS yang diikuti Pembinaan	5000	orang	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah GTK PNS dan Non PNS yang diikuti Pembinaan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah GTK PNS dan Non PNS yang diikuti Pembinaan
				Jumlah Guru TK yang diikuti Bimtek Pembelajaran Kreatif Siswa	330	orang		Jumlah Guru TK yang diikuti Bimtek Pembelajaran Kreatif Siswa		Jumlah Guru TK yang diikuti Bimtek Pembelajaran Kreatif Siswa
				Terperuhinya Jasa Tenaga Honorir K2 (GTK )	534	orang		Terperuhinya Jasa Tenaga Honorir K2 (GTK )		Terperuhinya Jasa Tenaga Honorir K2 (GTK )
Seksi GTK PAUD, Pengawas Sekolah TK dan Penilik	1.01.1.01.01.20.09		Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Tenaga Administrasi yang diikuti Pendataan	850	keg	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga Administrasi yang diikuti Pendataan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga Administrasi yang diikuti Pendataan

Presentase GTK yang bersertifikat dan terlatih untuk meningkatkan kompetensi				
Rasio Kebutuhan GTK terhadap lembaga :	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1.01.04.2.01.01
a. PAUD FORMAL				
b. SD				
c. SMP				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1.01.04.2.01.01
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1.01.04.2.01.01
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1.01.04.2.01.01

Seksi Tenaga Kependidikan Dinas, GTK SMP dan Pengawas SMP	1.01.1.01.01.20.10		Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	Jumlah GTK Yang dikutkan pembinaan, Penilaian Angka Kredit Guru dan Kenaikan pangkat PNS	1500	orang	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah GTK Yang dikutkan pembinaan, Penilaian Angka Kredit Guru dan Kenaikan pangkat PNS	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah GTK Yang dikutkan pembinaan, Penilaian Angka Kredit Guru dan Kenaikan pangkat PNS			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERIN TAHAN WAJIB YANG BERKAIT AN DENGAN PELAYAN AN DASAR	1.01.04.2.01.01
				Jumlah GTK yang Mengikuti Seleksi GTK Berprestasi	270	orang	Jumlah GTK yang Mengikuti Seleksi GTK Berprestasi	Jumlah GTK yang Mengikuti Seleksi GTK Berprestasi							
				Jumlah GTK yang diikutkan Sosialisasi/Implementasi Peraturan Kepegawaian	1000	orang	Jumlah GTK yang diikutkan Sosialisasi/Implementasi Peraturan Kepegawaian	Jumlah GTK yang diikutkan Sosialisasi/Implementasi Peraturan Kepegawaian							
<b>SUBBAG SUNGRAM</b>	<b>1.01.1.01.01.22</b>		<b>PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</b>	<b>IKM Layanan Pendidikan</b>	90	nilai									
	1.01.1.01.01.22.01		Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen Kegiatan Forum SKPD, SAKIP, dan RKS SD/SMP	3	dokumen	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Kegiatan Forum SKPD, SAKIP, dan RKS SD/SMP	Percanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Kegiatan Forum SKPD, SAKIP, dan RKS SD/SMP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	IKM Layanan Pendidikan			X.XX.01.2.01.03
	1.01.1.01.01.22.03	Pengendalian dan Pengawasan Penerapan Azas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan dana Dekonsentrasi dan dana Pembantuan	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi BOS	2	dokumen	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi BOS	Percanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi BOS						
			Jumlah dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Workshop BOS	3	dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Workshop BOS	Jumlah dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Workshop BOS								
	1.01.1.01.01.22.07		Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Jumlah dokumen pendataan dan informasi pendidikan	7	dokumen	Koordinasi da Sikronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pendataan dan informasi pendidikan	Percanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pendataan dan informasi pendidikan					X.XX.01.2.01.03
	1.01.1.01.01.22.11		Penerapan dan Penyebarluasan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Jumlah dokumen pelaksanaan implementasi SPM Pendidikan Dasar (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan)	4	dokumen	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan implementasi SPM Pendidikan Dasar (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan)	Percanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan implementasi SPM Pendidikan Dasar (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan)					X.XX.01.2.01.03
<b>SUBBAG SUNGRAM</b>	<b>1.01.1.01.01.49</b>		<b>PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)</b>	<b>IKM Layanan Pendidikan</b>											
	1.01.1.01.01.49.01		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	12	Bulan	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	IKM Layanan Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERIN TAHAN WAJIB YANG BERKAIT AN DENGAN PELAYAN AN DASAR	1.01.02.2.02.23
	1.01.1.01.01.49.02		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SD NEGERI	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	12	Bulan	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga	Pengeloalam Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pelaksanaan BOS Lembaga					

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	PAGU PROGRAM	URUSAN	KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>Kasubag Keuangan</b>	1 06 01 01 5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Belanja tidak langsung (gaji)				3.204.537.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.372.677.000,00	Administrasi Keuangan	Jumlah Administrasi Keuangan Yang Dipenuhi	3.825.877.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	SOSIAL	5.073.017.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1 06 01 2.02 01	
<b>Sekretaris</b>	1 06 01 01 1			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Layanan Kantor	100	Persen	1.350.581.500,00				Administrasi Umum	Jumlah Administrasi Umum Yang Dipenuhi	1.227.140.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		5.073.017.000,00		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1 06 01 2.03
<b>Kasubag Umum</b>	1 06 01 01 1.1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat Yang Terkirim	200	Surat	7.500.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat Yang Terkirim	5.500.000,00	Administrasi Umum	Jumlah Administrasi Umum Yang Dipenuhi	1.227.140.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		5.073.017.000,00			1 06 01 2.03 01
<b>Kasubag Umum</b>	1 06 01 01 1.2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Air, Telepon Yang Terbayar	12	Bulan	130.800.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Air, Telepon Yang Terbayar	158.800.000,00	Administrasi Umum	Jumlah Administrasi Umum Yang Dipenuhi	1.227.140.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		5.073.017.000,00			1 06 01 2.03 02
<b>Kasubag Umum</b>	1 06 01 01 1.3			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	1	Paket	52.738.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan dan Jasa Peralatan Kantor	85.700.000,00	Administrasi Umum	Jumlah Administrasi Umum Yang Dipenuhi	1.227.140.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		5.073.017.000,00			1 06 01 2.03 03
<b>Kasubag Umum</b>	1 06 01 01 1.7			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran Honor Adminitrasi Keuangan Yang Terbayar	16	Orang	477.540.000,00	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran Honor Adminitrasi Keuangan Yang Terbayar	99.540.000,00	Administrasi Umum	Jumlah Administrasi Umum Yang Dipenuhi	1.227.140.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		5.073.017.000,00			1 06 01 2.03 07
<b>Kasubag Umum</b>	1 06 01 01 1.10			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	1	Paket	59.667.000,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	49.000.000,00	Administrasi Umum	Jumlah Administrasi Umum Yang Dipenuhi	1.227.140.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		5.073.017.000,00			1 06 01 2.03 10
<b>Kasubag Umum</b>	1 06 01 01 1.11			Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan	1	Paket	37.833.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan	25.000.000,00	Administrasi Umum	Jumlah Administrasi Umum Yang Dipenuhi	1.227.140.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		5.073.017.000,00			1 06 01 2.03 11
<b>Kasubag Umum</b>	1 06 01 01 1.17			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Tersedianya Makan dan Minuman Rapat	1	Paket	45.000.000,00	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Tersedianya Makan dan Minuman Rapat	45.000.000,00	Administrasi Umum	Jumlah Administrasi Umum Yang Dipenuhi	1.227.140.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		5.073.017.000,00			1 06 01 2.03 17

Kasubag Umum	1 06 01 01 1.18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	235	OH	185.000.000,00	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	175.000.000,00	Administrasi Umum	Jumlah Administrasi Umum Yang Dipenuhi	1.227.140.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	5.073.017.000,00	1 06 01 2.03 18
Kasubag Umum	1 06 01 01 1.19		Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah Terbayarnya Gaji Honorer	12	Bulan	180.700.000,00	Penyediaan Adminstrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah Terbayarnya Gaji Honorer	373.200.000,00	Adminstrasi Keuangan	Jumlah Administrasi Keuangan Yang Dipenuhi	3.825.877.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	5.073.017.000,00	1 06 01 2.02 02
Kasubag Sungram	1 06 01 01 1.21		Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM Diklat Teknis Bagi Aparatur	40	Peserta	83.803.500,00	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah SDM Diklat Teknis Bagi Aparatur	20.000.000,00	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang Ditingkatkan Disiplin dan Kapasitasnya	20.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	5.073.017.000,00	1 06 01 2.04 09
Kasubag Sungram	1 06 01 01 1.22		Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Pelaksanaan Forum OPD, Penyusunan Renja dan Laporan OPD, Musrenbang	1	Paket	75.000.000,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Pelaksanaan Forum OPD, Penyusunan Renja dan Laporan OPD, Musrenbang	80.000.000,00	Adminstrasi Keuangan	Jumlah Administrasi Keuangan Yang Dipenuhi	3.825.877.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	5.073.017.000,00	1 06 01 2.02 06
Kasubag Umum	1 06 01 01 1.24		Penyediaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pembelian Pakaian Kerja	1	Paket	-	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pembelian Pakaian Kerja	-	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang Ditingkatkan Disiplin dan Kapasitasnya	20.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	5.073.017.000,00	1 06 01 2.04 05
Sekretaris	1 06 01 01 2		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Kondisi Baik</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>576.507.550,00</b>										
Kasubag Umum	1 06 01 01 2 10		Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	1	Paket	50.000.000,00	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	-	Administrasi Umum	Jumlah Administrasi Umum Yang Dipenuhi	1.227.140.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	5.073.017.000,00	1 06 01 2.03 25
Kasubag Umum	1 06 01 01 2 11		Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	1	Paket	156.642.550,00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	28.600.000,00	Administrasi Umum	Jumlah Administrasi Umum Yang Dipenuhi	1.227.140.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	5.073.017.000,00	1 06 01 2.03 24
Kasubag Umum	1 06 01 01 2 22		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Kantor	1	Paket	100.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Kantor	-	Administrasi Umum	Jumlah Administrasi Umum Yang Dipenuhi	1.227.140.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	5.073.017.000,00	1 06 01 2.03 28
Kasubag Umum	1 06 01 01 2 24		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	1	Paket	244.865.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	245.000.000,00	Administrasi Umum	Jumlah Administrasi Umum Yang Dipenuhi	1.227.140.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	5.073.017.000,00	1 06 01 2.03 30
Kasubag Umum	1 06 01 01 2 30		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	1	Paket	25.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10.000.000,00	Administrasi Umum	Jumlah Administrasi Umum Yang Dipenuhi	1.227.140.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	5.073.017.000,00	1 06 01 2.03 34
		Urusan Wajib Pelayanan Dasar		Sosial										SOSIAL			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR





Kasi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial	1 06 01 01 35 7			Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS	26	PMKS	97.600.000,00	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS	-	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	483.231.820,00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Penerima Manfaat Yang Graduasi	483.231.820,00	1 06 05 2.02 01
Kasi Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	1 06 01 01 35 8			Penghargaan dan Bantuan Sosial Bagi Pahlawan, Perintis dan Pejuang (Sarasehan dan Bansos)	Jumlah Penghargaan Yang Diberikan Bagi Pahlawan dan Perintis	420	Orang	365.550.000,00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Yang Diberikan Bagi Pahlawan dan Perintis	75.700.000,00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	140.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	140.000.000,00	1 06 07 2.01 02
Kasi Peanganan Fakir Miskin dan Masyarakat Tertinggal	1 06 01 01 35 9			Pemberdayaan Keluarga Rentan (Pendampingan KUBE)	Jumlah Pembentukan dan Penilaian KUBE	3	Kube	10.000.000,00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembentukan dan Penilaian KUBE	5.000.000,00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	483.231.820,00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Penerima Manfaat Yang Graduasi	483.231.820,00	1 06 05 2.02 02
Kasi Peanganan Fakir Miskin dan Masyarakat Tertinggal	1 06 01 01 35 10			Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Fakir Miskin (BPNT)	Jumlah Kuantitas BPNT	109.031	KPM	140.000.000,00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kuantitas BPNT	50.000.000,00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	483.231.820,00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Penerima Manfaat Yang Graduasi	483.231.820,00	1 06 05 2.02 02
Kasi Peanganan Fakir Miskin dan Masyarakat Tertinggal	1 06 01 01 35 11			Operasional Sembako	Jumlah Pendistribusian Sembako Tepat Sasaran	600	Paket	665.050.000,00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendistribusian Sembako Tepat Sasaran	100.000.000,00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	483.231.820,00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Penerima Manfaat Yang Graduasi	483.231.820,00	1 06 05 2.02 02
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	1 06 01 01 36	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Yang Direhabilitasi	100,00	Persen	713.407.000,00									SOSIAL	
Kasi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	1 06 01 01 36 1			Pelayanan Panti Anak	Jumlah Pendayagunaan Patra Penyandang Cacat dan Eks Trauma	37	LKSA	38.775.000,00	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pendayagunaan Patra Penyandang Cacat dan Eks Trauma	1.622.500.000,00	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial	1.937.500.000,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Yang Direhabilitasi	2.260.500.000,00	1 06 04 2.01 01

AHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

<b>Kasi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia</b>	1 06 01 01 36 2	Pelayanan dan Bimbingan Sosial Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar Yang Mendapat Bimbingan	380	Anak	140.929.000,00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Anak Terlantar Yang Mendapat Bimbingan	95.000.000,00	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial	1.937.500.000,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Yang Direhabilitasi	2.260.500.000,00	URUSAN PEMERINT.	1 06 04 2.01 05
	1 06 01 01 36 3	Tetirah Anak	Jumlah Anak Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	50	Anak	48.000.000,00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Anak Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	-	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial	1.937.500.000,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Yang Direhabilitasi	2.260.500.000,00		1 06 04 2.01 05
	1 06 01 01 36 4	Pelayanan dan Rehabilitasi PMKS Hasil Razia (Gelandangan, Pengemis, Tuna Sosial dan Anka Jalanan)	Jumlah Pelayanan dan Rehabilitasi Hasil Razia Yang Tertangani	350	Orang	187.700.000,00	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Pelayanan dan Rehabilitasi Hasil Razia Yang Tertangani	220.000.000,00	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	323.000.000,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Yang Direhabilitasi	2.260.500.000,00		1 06 04 2.02 08
	1 06 01 01 36 7	Penanganan Lansia dan Peringatan HALUN	Jumlah Penanganan Lanjut Usia Terlantar	255	Orang	121.253.000,00	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Penanganan Lanjut Usia Terlantar	80.000.000,00	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial	1.937.500.000,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Yang Direhabilitasi	2.260.500.000,00		1 06 04 2.01 06

Kasi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Usia Lanjut	1 06 01 01 36 10	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Bimbingan Lanjut eks. Klien	Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	180	Orang	158.000.000,00	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	140.000.000,00	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial	1.937.500.000,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Yang Direhabilitasi	2.260.500.000,00	1 06 04 2.01 06
Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	1 06 01 01 36 11			Rehabilitasi eks. Narapidana	Jumlah Eks Narapidana Yang Di Berangkatkan Dan Dibina	20	Orang	18.750.000,00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Eks Narapida Yang Di Berangkatkan Dan Dibina	3.000.000,00	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	323.000.000,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Yang Direhabilitasi	2.260.500.000,00	1 06 04 2.02 07
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1 06 01 01 37	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Keluarga Penerima Manfaat Yang Graduasi</b>	<b>75,00</b>	<b>Persen</b>	<b>1.639.517.500,00</b>										
Kasi Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial	1 06 01 01 37 1			Pengembangan dan Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah Sosialisasi KPM PKH	9700	KPM	931.392.500,00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi KPM PKH	228.231.820,00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	483.231.820,00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Penerima Manfaat Yang Graduasi	483.231.820,00	1 06 05 2.02 02
Kasi Pengembangan Publikasi dan Penyuluhan Sosial	1 06 01 01 37 2			Penyuluhan dan Publikasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penyuluhan Masalah Kesejahteraan Sosial	30	Kali	185.000.000,00	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penyuluhan Masalah Kesejahteraan Sosial	100.000.000,00	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	323.000.000,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Yang Direhabilitasi	2.260.500.000,00	1 06 04 2.02 13
<b>SOSIAL</b>																		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																		

Kasi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana	1 06 01 01 37 3				100	Persen	328.975.000,00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Pelaksanaan Kebencanaan Di Kampung Siaga Bencana	100.000.000,00	Penyelenggaran Pemberdayaan Masyarakat TerhadapKesiap siagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaran Pemberday aan Masyarakat TerhadapK esiapsiagaan Bencana Kabupaten /Kota	200.000.000,00	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana	280.000.000,00			1 06 06 2.02 01
								Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Pelaksanaan Kebencanaan Di Kampung Siaga Bencana										
Kasi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana	1 06 01 01 37 5				10	Orang	26.775.000,00	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental Lansia Tidak Potensial Serta Perdagangan	10.000.000,00	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindung an Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota	80.000.000,00	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana	280.000.000,00			1 06 06 2.01 05
Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Bermasalah dan Korban Tindak Kekerasan/Perlakuan Salah	Jumlah Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental Lansia Tidak Potensial Serta Perdagangan							Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindung an Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota										
Kasi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana	1 06 01 01 37 6				20	Orang	20.750.000,00	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Penanganan dan Perlindungan Orang Terlantar	20.000.000,00	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindung an Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota	80.000.000,00	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana	280.000.000,00			1 06 06 2.01 04
Penanganan dan Perlindungan Sosial Bagi Orang Terlantar	Jumlah Penanganan dan Perlindungan Orang Terlantar							Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindung an Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota										
Kasi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana	1 06 01 01 37 7				7500	Jiwa	146.625.000,00	Penyediaan Makanan	Jumlah Pemulihan Trauma Pasca Kebencanaan	50.000.000,00	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindung an Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota	80.000.000,00	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana	280.000.000,00			1 06 06 2.01 01
Pemulihan dan Perlindungan Sosial eks. Korban Bencana	Jumlah Pemulihan Trauma Pasca Kebencanaan							Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindung an Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota										

DK

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	PAGU PROGRAM	URUSAN	KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>																
Direktur	1.02.1.02.01.36	Wajib	Kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	- Jumlah pemenuhan SPM bidang mutu	100	%							1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Kesehatan	127.800.000.000	Wajib		
					- Jumlah pemenuhan SPM bidang keselamatan	100	%													
	1.02.1.02.01.36.01			- Peningkatan Mutu Pelayanan& Pendukung Pelayanan	Meningkatnya IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	82,35	%					1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase ketersediaan sarpras di rsud bangli		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Kesehatan			1 02 02 2.02 32
									1. Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
									2. Pengembangan Rumah Sakit			1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
									3. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
									4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan RS			1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
									5. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					











								46.Penyediaan Makanan dan Minuman				8. Administrasi Umum		3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
								47. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				8. Administrasi Umum		3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
								48. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				8. Administrasi Umum		3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
								49.Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas				8. Administrasi Umum		3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
								50.Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				8. Administrasi Umum		3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
								51. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas				8. Administrasi Umum		3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
								52. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				8. Administrasi Umum		3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
								53. Pengadaan Mebeleur				8. Administrasi Umum		3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
								54. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas				8. Administrasi Umum		3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
								55. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				8. Administrasi Umum		3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
								56. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				8. Administrasi Umum		3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
								57. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas				8. Administrasi Umum		3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
								58. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor				8. Administrasi Umum		3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
								59. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas				8. Administrasi Umum		3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					

										60. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			8. Administrasi Umum		3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
										61. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur			8. Administrasi Umum		3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
										62. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas			8. Administrasi Umum		3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
										63. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor			8. Administrasi Umum		3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
										64. Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional			8. Administrasi Umum		3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
										65. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi			9. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
										66. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			9. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
										67. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan			9. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
										68. Pengadaan Pakaian Korpri			9. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
										69. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			9. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
										70. Pendidikan dan Pelatihan Formal			9. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
										71. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			9. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
	1.02.1.02.01.34			Pembinaan Lingkungan Sosial	- Jumlah capaian presentase pemenuhan SPM bidang mutu										1. PROGRAM PENUHUN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Kesehatan		21.937.883.168	

Kabid Penunjang	1.02.1.02.01.34.49			(A) Penyediaan / Peningkatan / Pemeliharaan Sarana / Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Pengadaan Obat-obatan RSUD Bangli)	Jumlah penambahan obat-obatan yang sering digunakan	23	jenis obat	1. Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya obat-obatan		1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan Untuk UKM danUKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Tersedianya obat-2an		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan	6.000.000.000		1 02 02 2.01 16
Kabag Umum & Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan	1.02.1.02.01.34.50			(B) Penyediaan / Peningkatan / Pemeliharaan Sarana / Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Pengadaan Sarana Penunjang Gedung RSUD Bangli)	Jumlah penambahan sarana penunjang gedung	1	sarana prasarana fasilitas kesehatan fisik	2. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya sarana penunjang gedung		1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan Untuk UKM danUKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Tersedianya sarana penunjang gedung		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan	233.500.000		1 02 02 2.01 13
Kabag Pengembangan & Kasubag Sungram dan Evaluasi	1.02.1.02.01.34.51			(C) Penyediaan / Peningkatan / Pemeliharaan Sarana / Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran RSUD Bangli)	Jumlah penambahan alat kedokteran dan alat kesehatan		unit/set	3. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya peralatan kesehatan dan peralatan kedokteran		1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Tersedianya peralatan kesehatan dan peralatan kedokteran		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan	737.000.000		1 02 02 2.01 14
Kabag Pengembangan & Kasubag Sungram dan Evaluasi				(D) Penyediaan / Peningkatan / Pemeliharaan Sarana / Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan & Alat Kedokteran RSUD Bangli)	Jumlah kegiatan pemeliharaan alat kedokteran dan alat kesehatan RSUD Bangli		kegiatan	4. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya peralatan kesehatan dan peralatan kedokteran		1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Terpeliharanya peralatan kesehatan dan peralatan kedokteran		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan	2.000.000.000		1 02 02 2.01 20
Kabid Pelayanan Keperawatan & Kasie Sarpras Keperawatan	1.02.1.02.01.34.53			(E) Penyediaan / Peningkatan / Pemeliharaan Sarana / Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Pengadaan Bahan dan Alat Habis Pakai RSUD Bangli)	Jumlah kegiatan bahan dan alat habis pakai RSUD Bangli		kegiatan	5. Pengadaan Bahan Habis Pakai			1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Tersedianya bahan dan alat medis habis pakai		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan	4.673.633.168		1 02 02 2.01 17
	1.02.1.02.01.34.54			(F) Penyediaan / Peningkatan / Pemeliharaan Sarana / Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Pengadaan Peralatan Penunjang RSUD Bangli)	Jumlah penambahan peralatan penunjang		unit/set	6. Pengembangan RS	Tersedianya peralatan penunjang medis dan non medis		1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan Untuk UKM danUKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Tersedianya peralatan penunjang medis dan non medis		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan	-		1 02 02 2.01 14
	1.02.1.02.01.34.55			(G) Penyediaan / Peningkatan / Pemeliharaan Sarana / Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Pengadaan Sarana Transportasi Rujukan RSUD Bangli)	Jumlah penambahan transportasi rujukan		unit/set	7. Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	Tersedianya mobil ambulans		1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan Untuk UKM danUKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Tersedianya mobil ambulans		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan	700.000.000		1 02 02 2.01 12

1.02.1.02.01.34.56			(H) Penyediaan / Peningkatan / Pemeliharaan Sarana / Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Pengadaan Gedung Pelayanan dan Penunjang RSUD Bangil)	Jumlah pengadaan gedung dan penunjang RSUD Bangil		fisik		8. Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terbangunnya gedung pelayanan dan atau gedung penunjang pelayanan		1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Terbangunnya gedung pelayanan dan penunjang pelayanan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan		6.800.000.000		1 02 02 2.01 01
1.02.1.02.01.34.57			(I) Penyediaan / Peningkatan / Pemeliharaan Sarana / Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarpras Gedung dan Penunjang RSUD Bangil)	Jumlah gedung yang dilakukan pemeliharaan		kegiatan		9. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Terpeliharanya gedung pelayanan dan penunjang pelayanan		1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Terpeliharanya gedung pelayanan dan penunjang pelayanan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan		793.750.000		1 02 02 2.01 08
1.02.1.02.01.34.58			(J) Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (di RSUD Bangil)	Jumlah tenaga kesehatan dan/atau administratif yang mendapat pelatihan		org		10. Peningkatan Kompetensi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya kualitas SDM		3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kualitas SDM		2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM KESEHATAN	Kesehatan		200.000.000		1 02 03 2.04 01
			(K) Kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif/ maupun kuratif/rehabilitatif (di RSUD Bangil)	Jumlah kegiatan di RSUD Bangil				11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terkelolanya KLB		2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya KLB		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan		200.000.000		
1.02.1.02.01.26			<b>Program Pengadaan, Pemeliharaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata</b>	- Jumlah cakupan sarana dan prasarana bidang mutu yang berkualitas baik		%								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan				
				- Jumlah cakupan sarana dan prasarana bidang keselamatan yang berkualitas baik		%									Kesehatan				
1.02.1.02.1.01.07			Pengadaan alat-alat Rumah Sakit	Jumlah penambahan alat kedokteran dan alat kesehatan		unit/set		12. Pengadaan Alat Kesehatan / Alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya peralatan kesehatan/ peralatan kedokteran		1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Tersedianya peralatan kesehatan/ peralatan kedokteran		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan		13.250.142.286		1 02 02 2.01 14
								13. Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	tersedianya sarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan		1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	tersedianya sarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan			Kesehatan				1 02 02 2.01 12
1.02.1.02.1.01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah capaian persentase pemenuhan layanan kantor		%								3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			65.000.000		

	1.02.1.02.1.01.07			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah orang yang mendapat honor		org/bln		14. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya honor pengelolaan keuangan		3. Administrasi Umum	Tersedianya honor pengelolaan keuangan		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Sekretariat		65.000.000		x.xx.01.2.02.037
--	-------------------	--	--	---------------------------------------	----------------------------------	--	---------	--	---	--	--	----------------------	--	--	--------------------------------------	--	-------------	--	------------	--	------------------

<b>BLUD</b>			
JML	71	9	3

<b>SKPD</b>			
JML	14	3	3

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM /KEGIATAN PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019

SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dinas Kesehatan	12.00.00.01															
		Wajib	Kesehatan	Belanja Tidak Langsung (Gaji)		1	Tahun	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Administrasi Keuangan		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>				x.xx.01.2.02.01
<b>Sekretariat</b>	<b>1.02 . 1.02.1 . 01</b>		<b>Sekretariat</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan kantor</b>	<b>81</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan kantor</b>					<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>				<b>x.xx.01</b>
Subbag Umum & Kepeg	1.02 . 1.02.1 . 01 . 02		Sekretariat	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik / air / telepon	12	kali	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik / air / telepon	Administrasi Umum		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	x.xx.01.2.03.02
Subbag Umum & Kepeg	1.02 . 1.02.1 . 01 . 07		Sekretariat	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan	12	kali	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan	Administrasi Umum		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	x.xx.01.2.03.07
Subbag Umum & Kepeg	1.02 . 1.02.1 . 01 . 10		Sekretariat	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian ATK	1	paket	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian ATK	Administrasi Umum		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	x.xx.01.2.03.10
Subbag Umum & Kepeg	1.02 . 1.02.1 . 01 . 11		Sekretariat	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	1	paket	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	Administrasi Umum		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	x.xx.01.2.03.11
Subbag Umum & Kepeg	1.02 . 1.02.1 . 01 . 13		Sekretariat	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah pembelian peralatan kantor	1	paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah pembelian peralatan kantor	Administrasi Umum		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	x.xx.01.2.03.13
Subbag Umum & Kepeg	1.02 . 1.02.1 . 01 . 14		Sekretariat	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah pembelian peralatan rumah tangga	1	paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah pembelian peralatan rumah tangga	Administrasi Umum		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	x.xx.01.2.03.14
Subbag Umum & Kepeg	1.02 . 1.02.1 . 01 . 17		Sekretariat	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu	12	kali	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu	Administrasi Umum		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	x.xx.01.2.03.17
Subbag Umum & Kepeg	1.02 . 1.02.1 . 01 . 18		Sekretariat	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	12	kali	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Administrasi Umum		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	x.xx.01.2.03.18

Subbag Umum & Kepeg	1.02 . 1.02.1 . 01 . 19		Sekretariat	Penyediaan Jasa Perkantoran	Honor tenaga kontrak/THL	12	kali	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor tenaga kontrak/THL	Administrasi Keuangan		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	x.xx.01.2.02.02
Subbag Sungram & pelaporan	1.02 . 1.02.1 . 01 . 28		Sekretariat	Penyusunan Laporan Kinerja Dan Keuangan	Jumlah Dokumen Manajemen Kesehatan	7	dokumen	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Manajemen Kesehatan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	x.xx.01.2.01.02
								Penyusunan Dokumen Evaluasi perangkat daerah		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	x.xx.01.2.01.03
Subbag Sungram & pelaporan	1.02 . 1.02.1 . 01 . 29		Sekretariat	Dukungan Manajemen BOK (DAK)	Jumlah Pertemuan administasi BOK	12	bulan		Jumlah Pertemuan administasi BOK					Sekretariat		
	1.02 . 1.02.1 . 02		Sekretariat	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi</b>	<b>90</b>	<b>%</b>					<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>x.xx.01</b>
Subbag Umum & Kepeg	1.02 . 1.02.1 . 02 . 03		Sekretariat	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah pembangunan Gedung	1	unit	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah pembangunan Gedung	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Sekretariat	URUSAN WAJIB PELAYANAN	x.xx.01.2.03.38
Subbag Umum & Kepeg	1.02 . 1.02.1 . 02 . 05		Sekretariat	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	jumlah pengadaan kendaraan	2	unit	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	jumlah pengadaan kendaraan	Administrasi umum		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	x.xx.01.2.03.20
Subbag Umum & Kepeg	1.02 . 1.02.1 . 02 . 09		Sekretariat	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan	1	paket	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan	Administrasi umum		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	x.xx.01.2.03.22
Subbag Umum & Kepeg	1.02 . 1.02.1 . 02 . 10		Sekretariat	Pengadaan Mebelair	Jumlah pengadaan mebelair	1	paket	Pengadaan Mebelair	Jumlah pengadaan mebelair	Administrasi umum		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	x.xx.01.2.03.25
Subbag Umum & Kepeg	1.02 . 1.02.1 . 02 . 22		Sekretariat	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor	1	paket	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor	Administrasi umum		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	x.xx.01.2.03.28
Subbag Umum & Kepeg	1.02 . 1.02.1 . 02 . 24		Sekretariat	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan operasional dinas	20	kali	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan operasional dinas	Administrasi umum		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	x.xx.01.2.03.30
Subbag Umum & Kepeg			Sekretariat	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas	Jumlah rehab bangunan rumah dinas	1	paket	Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas	Jumlah rehab bangunan rumah dinas	Administrasi umum		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	x.xx.01.2.03.27
Subbag Umum & Kepeg	1.02 . 1.02.1 . 02 . 28		Sekretariat	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan rumah tangga yang dipelihara	1	paket	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan rumah tangga yang dipelihara	Administrasi umum		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	x.xx.01.2.03.34



Bidang sumber daya Kesehatan	1.02 . 1.02.1 . 15		SDK	<b>PROGRAM PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN</b>	Persentase Ketersediaan obat dan Perbekalan obat	96	%									
Seksi Kefarmasian	1.02 . 1.02.1 . 15 . 01		SDK	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah jenis kebutuhan (macam) sesuai Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	370	jenis	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis kebutuhan (macam) sesuai Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.01.16
Seksi Kefarmasian	1.02 . 1.02.1 . 15 . 08		SDK	Peningkatan Mutu Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Pembinaan peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas	86	%	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Pembinaan peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas	Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.04.2.01.01
Seksi Kefarmasian	1.02 . 1.02.1 . 15 . 09		SDK	Distribusi Obat dan eLogistic (DAK)	jumlah distribusi obat ke puskesmas	24	kali	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	jumlah distribusi obat ke puskesmas	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.34
Seksi Kefarmasian	1.02 . 1.02.1 . 15 . 10		SDK	Peningkatan Mutu Farmasi, Makanan dan Minuman	Jumlah sarana farmakmin yang dibina	150	sarana	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sarana farmakmin yang dibina	Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga		Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.04.2.03.01
	1.02 . 1.02.1 . 16		Pelayanan Kesehatan	<b>PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase mutu pelayanan kesehatan sesuai standart	100	%					<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase mutu pelayanan kesehatan sesuai standart			1.02.02
Seksi Yankes primer	1.02 . 1.02.1 . 16 . 23		Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar	Jumlah Pelaksanaan PKP	33	puskesmas	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Pelaksanaan PKP	Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.04.03

Seksi Yankes primer	1.02 . 1.02.1 . 16 . 24		Pelayanan Kesehatan	Akreditasi Puskesmas (DAK)	Jumlah Puskesmas terakreditasi minimal madya	30	puskesmas	Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di Kabupaten /kota	Jumlah Puskesmas terakreditasi minimal madya	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.35	
Seksi Yankes primer	1.02 . 1.02.1 . 16 . 25		Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DDL Propinsi)	Jumlah perawat ponkesdes dan dokter icon	80	orang	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah perawat ponkesdes dan dokter icon	Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.04.03	
Seksi Yankes Tradisional	1.02 . 1.02.1 . 16 . 26		Pelayanan Kesehatan	Bantuan Operasional Kesehatan UKM Sekunder Kesehatan Tradisional (DAK)	jumlah pembinaan penyelenggaraan Kesehatan Tradisional	33	UKM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	jumlah pembinaan penyelenggaraan Kesehatan Tradisional	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.19	
Seksi Yankes Rujukan	1.02 . 1.02.1 . 16 . 27		Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Jumlah Maskin yang dibiayai Non PBID	12	bulan	Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Maskin yang dibiayai Non PBID	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.26	
Seksi Yankes Rujukan	1.02 . 1.02.1 . 16 . 29		Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase Terbentuknya sistem Rujukan RS dan Puskesmas	100	%	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase Terbentuknya sistem Rujukan RS dan Puskesmas	Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.04.04	
Seksi Yankes primer	1.02 . 1.02.1 . 16 . 30		Pelayanan Kesehatan	Pengembangan PONKESDES dan PUSTU Layanan Gawat Darurat	Persentase Ponkesdes sesuai standart	75	%	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase Ponkesdes sesuai standart	Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.04.03	
<b>Bidang Kesehatan Masyarakat</b>	<b>1.02 . 1.02.1 . 19</b>		<b>Kesehatan Masyarakat</b>	<b>PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Rumah tangga Sehat</b>	<b>51</b>	<b>%</b>		<b>Persentase Rumah tangga Sehat</b>								
Seksi Promkes	1.02 . 1.02.1 . 19 . 01		Kesehatan Masyarakat	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Persentase Puskesmas yang melakukan Promosi Kesehatan	100	%	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Puskesmas yang melakukan Promosi Kesehatan	Pelaksanaan Sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah Kabupaten Kota		Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.05.2.02.01	
Seksi Promkes & Pemberdayaan Masyarakat	1.02 . 1.02.1 . 19 . 07		Kesehatan Masyarakat	Pengembangan UKBM (DDL Prop)	Persentase UKBM yang dibina	360	posyandu	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya masyarakat (UKBM)	Persentase UKBM yang dibina	Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat daerah Kabupaten/Kota		Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.05.2.03.01	

Seksi Promkes & Pemberdayaan Masyarakat	1.02 . 1.02.1 . 19 . 08		Kesehatan Masyarakat	Bantuan Operasional Kesehatan UKM Sekunder Promkes	Jumlah jenis UKBM yang dibina	8	UKBM	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya masyarakat (UKBM)	Jumlah jenis UKBM yang dibina	Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat daerah Kabupaten/Kota		Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.05.2.03.01
	1.02 . 1.02.1 . 20		Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	1, Presentase balita Stunting	25	%		1, Presentase balita Stunting					Kesehatan Masyarakat		
			Kesehatan Masyarakat		2, Persentase balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan	100	%		2, Persentase balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan					Kesehatan Masyarakat		
Seksi Kesehatan Keluarga & gizi masyarakat	1.02 . 1.02.1 . 20 . 02		Kesehatan Masyarakat	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	Jumlah Balita yang mendapat PMT	350	balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Balita yang mendapat PMT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Kesehatan Masyarakat		1.02.02.2.02.15
			Kesehatan Masyarakat		Jumlah Bumil yang mendapat PMT	150	balita		Jumlah Bumil yang mendapat PMT					Kesehatan Masyarakat		
Seksi Kesehatan Keluarga & gizi masyarakat	1.02 . 1.02.1 . 20 . 03		Kesehatan Masyarakat	Pengendalian Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Cakupan Pemberian tablet tambah darah pada bumil	91	%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Pemberian tablet tambah darah pada bumil	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.15
Seksi Kesehatan Keluarga & gizi masyarakat	1.02 . 1.02.1 . 20 . 07		Kesehatan Masyarakat	Bantuan Operasional Kesehatan UKM Sekunder kegiatan Gizi (DAK)	Jumlah pertemuan kegiatan gizi	24	kali	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah pertemuan kegiatan gizi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.15
	1.02 . 1.02.1 . 21		Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Persentase kualitas kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat	91	%		Persentase kualitas kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat							
Seksi Kesling & Kes. Olahraga	1.02 . 1.02.1 . 21 . 01		Kesehatan Masyarakat	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah sampel air yang diperiksa	415	sampel	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah sampel air yang diperiksa	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.17

Seksi Kesling & Kes. Olahraga	1.02 . 1.02.1 . 21 . 03		Kesehatan Masyarakat	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	Persentase TPM & TTU yang diperiksa	91	%	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase TPM & TTU yang diperiksa	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.17
Seksi Kesling & Kes. Olahraga	1.02 . 1.02.1 . 21 . 05		Kesehatan Masyarakat	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Jumlah Pos UKK (Absolut)	20	Pos UKK	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Jumlah Pos UKK (Absolut)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.16
			Kesehatan Masyarakat		Persentase Puskesmas Melaksanakan Tes Kebugaran pada kelompok masyarakat (%)				Persentase Puskesmas Melaksanakan Tes Kebugaran pada kelompok masyarakat (%)					KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Seksi Kesling & Kes. Olahraga	1.02 . 1.02.1 . 21 . 06		Kesehatan Masyarakat	Bantuan Operasional Kesehatan UKM Sekunder Penyehatan Lingkungan (DAK)	% Jumlah Desa yg dilakukan pemicuan STBM.	85	%	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Lingkungan	% Jumlah Desa yg dilakukan pemicuan STBM.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.17
	1.02 . 1.02.1 . 22		P2P	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR</b>	<b>1. Persentase Penyakit menular wabah yang dilakukan PE</b>	<b>100</b>	<b>%</b>		<b>1. Persentase Penyakit menular wabah yang dilakukan PE</b>							
					2. Persentase Desa UCI	95,03	%		2. Persentase Desa UCI							
					3. Cakupan penemuan dan penanganan penyakit TBC	100	%		3. Cakupan penemuan dan penanganan penyakit TBC							
					4. Cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD	100	%		4. Cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD							
seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.02 . 1.02.1 . 22 . 05		P2P	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah fasyankes Puskesmas Inisiasi ARV (pemberian obat ARV pada ODHA)	4	fasyankes	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah fasyankes Puskesmas Inisiasi ARV (pemberian obat ARV pada ODHA)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.25
			P2P		Prevalensi kusta	1,3			Prevalensi kusta					P2P		
Seksi Surveyance dan Imunisasi	1.02 . 1.02.1 . 22 . 08		P2P	Peningkatan Imunisasi	Persentase bayi yang diimunisasi dasar lengkap	98	%	Pengelolaan surveyance kesehatan	Persentase bayi yang diimunisasi dasar lengkap	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.20

seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.02 . 1.02.1 . 22 . 10		P2P	Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Jumlah Kader pencegahan penyakit (P2) yang dilatih	300	orang	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kader pencegahan penyakit (P2) yang dilatih	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.25	
seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.02 . 1.02.1 . 22 . 12		P2P	Pelayanan Penanggulangan Penyakit TB	Jumlah Penderita TBC ditangani	2700	orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Penderita TBC ditangani	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.11	
seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.02 . 1.02.1 . 22 . 15		P2P	Bantuan Operasional Kesehatan UKM Sekunder Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DAK)	Jumlah Puskesmas yang melaporkan penemuan kasus HIV	33	puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah Puskesmas yang melaporkan penemuan kasus HIV	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.12	
Seksi Surveilance dan Imunisasi	1.02 . 1.02.1 . 22 . 16		P2P	Bantuan Operasional Kesehatan UKM Sekunder imunisasi dan surveilance (DAK)	jumlah tenaga kesehatan yang dilatih kegiatan imunisasi	33	orang	Pengelolaan surveilance kesehatan	jumlah tenaga kesehatan yang dilatih kegiatan imunisasi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.20	
seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.02 . 1.02.1 . 22 . 17		P2P	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Zoonosis	jumlah pengamatan PES di Puskesmas	5	puskesmas	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	jumlah pengamatan PES di Puskesmas	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.23	
	1.02 . 1.02.1 . 25		SDK	<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA</b>	Persentase sarana dan prasarana puskesmas sesuai standart	70	%		Persentase sarana dan prasarana puskesmas sesuai standart								
Seksi Alkes dan PKRT	1.02 . 1.02.1 . 25 . 30		SDK	Rehabilitasi Puskesmas (DAK)	Jumlah Puskesmas yang dibangun	1	unit	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN		1.02.02.2.01.09	

Seksi Alkes dan PKRT	1.02 . 1.02.1 . 25 . 32		SDK	Pengadaan Alat Kesehatan Dasar (DAK)	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan	12	%	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN		1.02.02.2.01.14	
	1.02 . 1.02.1 . 30		Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	Persentase screening usia lanjut (> 65th) sesuai standart	76	%		Persentase screening usia lanjut (> 65th) sesuai standart								
Seksi Kesga dan Gizi masyarakat	1.02 . 1.02.1 . 30 . 09		Kesehatan Masyarakat	Bantuan Operasional Kesehatan UKM Sekunder Pelayanan Kesehatan Lansia (DAK)	Jumlah Posyandu Lansia	365	posyandu lansia	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Posyandu Lansia	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Kesehatan Masyarakat		1.02.02.2.02.07	
	1.02 . 1.02.1 . 32		Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	Pertolongan persalinaan oleh nakes	99,01	%		Pertolongan persalinaan oleh nakes								
			Kesehatan Masyarakat		Persentase Cakupan pelayanan balita	99,01	%		Persentase Cakupan pelayanan balita					Kesehatan Masyarakat			
Seksi Kesga dan Gizi masyarakat	1.02 . 1.02.1 . 32 . 05		Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Anak	jumlah pembinaan kesehatan anak dan kesehatan remaja	6	kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	jumlah pembinaan kesehatan anak dan kesehatan remaja	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.04	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.05	
Seksi Kesga dan Gizi masyarakat	1.02 . 1.02.1 . 32 . 06		Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi/ Jampersal (DAK)	Jumlah penerima jampersal	240	orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah penerima jampersal	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.01	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.02	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.03	

	1.02 . 1.02.1 . 34		SDK	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	1, Persentase Cakupan pelayanan Kesehatan Dasar	70	%		1, Persentase Cakupan pelayanan Kesehatan Dasar								
					2. Persentase maskin dibiayai jaminan Kesehatan	83	%		2. Persentase maskin dibiayai jaminan Kesehatan								
					Persentase rumah tangga/ KK yang menggunakan jamban sehat	83	%		Persentase rumah tangga/ KK yang menggunakan jamban sehat								
					Persentase Ketersediaan obat dan Perbekalan kesehatan	78	%		Persentase Ketersediaan obat dan Perbekalan kesehatan								
					Persentase sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan sesuai standart	96	%		Persentase sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan sesuai standart								
Seksi Kesga dan Gizi masyarakat	1.02 . 1.02.1 . 34 . 59		Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Promotif/Preventif maupun Kuratif/Rehabilitasi (Pelayanan Kesehatan Ibu Bayi)	Persentase Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	94	%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.01	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.02	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.03	
Seksi Kesga dan Gizi masyarakat	1.02 . 1.02.1 . 34 . 61		Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Promotif/Preventif maupun Kuratif/Rehabilitatif (Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan)	Persentase screening usia lanjut (> 65th) sesuai standart	25	%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Persentase screening usia lanjut (> 65th) sesuai standart	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.07	

Seksi Promkes dan Pemberdayaan masyarakat	1.02 . 1.02.1 . 34 . 62		Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Promotif/Preventif maupun Kuratif/Rehabilitatif (Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat)	Persentase tatanan rumah tangga yang disurvei PHBS	25	%	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase tatanan rumah tangga yang disurvei PHBS	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.18
Seksi Promkes dan Pemberdayaan masyarakat	1.02 . 1.02.1 . 34 . 63		Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Promotif/Preventif maupun Kuratif/Rehabilitatif (Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan)	Persentase UKBM yang dibina	100	%	Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif, preventif tingkat daerah Kabupaten / Kota	Persentase UKBM yang dibina	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.05.2.02.01
Seksi SDM	1.02 . 1.02.1 . 34 . 64		SDK	Pelatihan Tenaga Kesehatan dan/atau Tenaga Administrasi pada Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan (Pendidikan dan Pelatihan Formal)	jumlah tenaga kesehatan yang dilatih	90	orang	Peningkatan kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya manusia Kesehatan	jumlah tenaga kesehatan yang dilatih	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten kota		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.03.2.04.01
Seksi Alkes dan PKRT	1.02 . 1.02.1 . 34 . 65		SDK	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan (Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu)	Jumlah pustu yang direhab	6	unit	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah pustu yang direhab	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.01.10
Seksi Alkes dan PKRT	1.02 . 1.02.1 . 34 . 66		SDK	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan (Pengadaan Alat Kesehatan dan Laboratorium Pengadaan Alat Farmasi)	Jumlah pengadaan alat kesehatan	2	unit	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan alat kesehatan	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.01.14
Seksi Alkes dan PKRT	1.02 . 1.02.1 . 34 . 67		SDK	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan (Rehabilitasi Puskesmas)	Jumlah Puskesmas yang direhab	9	puskesmas	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang direhab	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.01.09



Seksi kefarmasian	1.02 . 1.02.1 . 34 . 68		SDK	Penyediaan/Peningkatan/Pe meliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan yang berkerjasama dengan BPJS Kesehatan (Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan)	Jumlah jenis obat	370	macam	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis obat	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.01.16
Seksi Alkes dan PKRT	1.02 . 1.02.1 . 34 . 69		SDK	Penyediaan/Peningkatan/Pe meliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan yang berkerjasama dengan BPJS Kesehatan (Pembangunan Rumah Sakit Grati)	Jumlah Gedung yang dibangun	1	paket	Pembangunan Rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya	Jumlah Gedung yang dibangun	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten Kota		Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.01.01
Seksi Yankes Primer	1.02 . 1.02.1 . 34 . 70		Pelayanan Kesehatan	Pembayaran luran Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pembayaran luran Jaminan Kesehatan bagi yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (Pembyaran luran Jaminan Kesehatan)	Jumlah peserta PBID	41000	orang	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta PBID	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.26
seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.02 . 1.02.1 . 34 . 72		P2P	Kegiatan Pelayanan Kesehatan baik Kegiatan Promotif/Preventif Kuratif/Rehabilitatif (Penanggulangan Penyakit DBD)	Jumlah desa Endemis DBD	65	desa	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah desa Endemis DBD	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.25
Seksi Surveilance dan Imunisasi	1.02 . 1.02.1 . 34 . 73		P2P	Kegiatan Pelayanan Kesehatan baik Kegiatan Promotif/Preventif Kuratif/Rehabilitatif (Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penanggulangan Wabah)	Jumlah Penyakit menular wabah yang dilakukan Penyelidikan epidemiologi	14 kejadian	kejadian	Pengelolaan surveylance kesehatan	Jumlah Penyakit menular wabah yang dilakukan Penyelidikan epidemiologi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.20
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.13
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.14

								Pelaksanaan Kewaspadaan dini dan respon wabah		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.37
Seksi PTM & Kesehatan Jiwa	1.02 . 1.02.1 . 34 . 74		P2P	Kegiatan Pelayanan Kesehatan baik Kegiatan Promotif/Preventif Kuratif/Rehabilitatif (Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular)	Jumlah pembinaan posbindu di Puskesmas	33 posbindu	posbindu	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah pembinaan posbindu di Puskesmas	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.06
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.08
Seksi Yankes Tradisional	1.02 . 1.02.1 . 34 . 75		Pelayanan Kesehatan	Kegiatan Pelayanan Kesehatan baik Kegiatan Promotif/Preventif Kuratif/Rehabilitatif (Peningkatan Kesehatan Tradisional)	Persentase penyelenggaraan Kesehatan Tradisional di puskesmas	30 %	%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase penyelenggaraan Kesehatan Tradisional di puskesmas	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.19
Seksi Yankes Rujukan	1.02 . 1.02.1 . 34 . 76		Pelayanan Kesehatan	Kegiatan Pelayanan Kesehatan baik Kegiatan Promotif/Preventif Kuratif/Rehabilitatif (Penanggulangan Krisis Kesehatan)	Persentase Tertanganinya Krisis Kesehatan di daerah Potensi Krisis Kesehatan (24 Kec)	100 %	%	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Persentase Tertanganinya Krisis Kesehatan di daerah Potensi Krisis Kesehatan (24 Kec)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.24
Seksi Kesling & Kesehatan Olahraga	1.02 . 1.02.1 . 34 . 77		Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Pelayanan Kesehatan baik Kegiatan Promotif/Preventif Kuratif/Rehabilitatif (Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan)	% Jumlah Desa yg dilakukan pemicuan STBM.	85	desa	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Lingkungan	% Jumlah Desa yg dilakukan pemicuan STBM.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.17
Seksi Pelayanan Kesehatan rujukan			Bidang Yankes	Pembayaran tindakan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan/atau orang tidak mampu	Jumlah maskin yang dibiayai pelayanan kesehatannya	50	orang	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah maskin yang dibiayai pelayanan kesehatannya	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.26
Seksi Kesga dan Kesh Masy			Bidang Kesmas	Kegiatan Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif (Pengelolaan pelayanan Kesehatan gizi Masyarakat)	Jumlah PMT Balita dan Bumil	500	orang	Pengelolaan Gizi Masyarakat	Jumlah PMT Balita dan Bumil	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.15

	1.02 . 1.02.1 . 37		P2P	PROGRAM Pencegahan DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	Persentase Pemeriksaan kesehatan Penduduk usia > 15 tahun yg diperiksa dalam satu tahun	81	Persentase Pemeriksaan kesehatan Penduduk usia > 15 tahun yg diperiksa dalam satu tahun		Persentase Pemeriksaan kesehatan Penduduk usia > 15 tahun yg diperiksa dalam satu tahun					KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Seksi PTM & Kesehatan Jiwa	1.02 . 1.02.1 . 37 . 06		P2P	Bantuan Operasional Kesehatan UKM Sekunder PTM dan Kesehatan Jiwa (DAK)	Jumlah Pembinaan PTM & Kesehatan Jiwa	33	UKM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Pembinaan PTM & Kesehatan Jiwa	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.09
Seksi PTM & Kesehatan Jiwa	1.02 . 1.02.1 . 37 . 07		P2P	Peningkatan Pelayanan Penanganan Kasus Jiwa dan NAPZA	Persentase Murid SD yang diperiksa Kesehatan Gigi	100	%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase Murid SD yang diperiksa Kesehatan Gigi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.22
	1.02 . 1.02.1 . 39		SDK	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan sesuai kompetensi jabatan fungsional	90	%		Persentase tenaga kesehatan sesuai kompetensi jabatan fungsional					KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Seksi SDM	1.02 . 1.02.1 . 39 . 01		SDK	Peningkatan Profesionalisme dan Pengembangan Karier Tenaga Kesehatan	Jumlah ijin nakes yang diterbitkan	1000	orang	Peningkatan kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya manusia Kesehatan	Jumlah ijin nakes yang diterbitkan	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten kota		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.03.2.04.01
					penilaian Angka Kredit (PAK) tenaga Kesehatan	250			penilaian Angka Kredit (PAK) tenaga Kesehatan					KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Puskesmas			Puskesmas	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata Nilai Hasil Kinerja Puskesmas	72			Rata-rata Nilai Hasil Kinerja Puskesmas							
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas	Nilai IKM Puskesmas	81,2		Operasional Pelayanan Puskesmas	Nilai IKM Puskesmas	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.33

				Pelayanan Kesehatan Dijamin Pemda di Puskesmas	Cakupan Kunjungan rawat jalan umum dijamin Pemda	77	%	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Kunjungan rawat jalan umum dijamin Pemda	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.33
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dana Kapitasi di Puskesmas	Cakupan Kunjungan Rawat Jalan Kapitasi JKN	72	%	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Kunjungan Rawat Jalan Kapitasi JKN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.33
				Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas	Jumlah SPM yang dikerjakan Puskemas	12	indikator	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah SPM yang dikerjakan Puskemas	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.33
RSUD Grati	1.02 . 1.02.1 . 40		RSUD Grati	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN UPTD RSUD</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD</b>	<b>76</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD</b>		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD</b>					KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
RSUD Grati	1.02 . 1.02.1 . 40 . 01		RSUD Grati	Peningkatan Mutu dan Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD Grati	BOR	62	%	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	BOR	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.32
RSUD Grati	1.02 . 1.02.1 . 40 . 02		RSUD Grati	Pelayanan BLUD RSUD Grati	Terakreditasi Madya	80	%	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Terakreditasi Madya	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.02.32
RSUD Grati	1.02 . 1.02.1 . 40 . 03		RSUD Grati	Pengadaan Sarpras dan Alat Kesehatan (DAK)	Jumlah sapras dan alkes	100	%	Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah sapras dan alkes	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten Kota		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		KESEHTAN	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.02.02.2.01.12

Mengetahui

Pt. Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Pasuruan

Ttd.

dr. Ani Latifah, M.Kes  
Pembina Tk.I / IV b  
Nip. 196609161996022001

STRUKTUR ORGANISASI	renja 2021								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										CATATAN	
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PAGU PROGRAM	BIDANG URUSAN		URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Belanja tidak langsung (gaji)				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.561.348.000	Administrasi Keuangan	jumlah terlaksananya administrasi keuangan	5.457.304.300	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	6.019.564.000		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	XX 01 2.02 01	
Kepala Dinas KB & PP																				
Sekretaris Dinas KB & PP																				
Kasubag Umum dan Kepegawaian	2.08 . 2.08.01 . 01	Rutin Penunjang		Program pelayanan administrasi perkantoran	Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	%	1.083.216.000						Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	6.019.564.000	Rutin Penunjang		XX 01	Nama program tidak sesuai di permendagri, di permendagri Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	2.08 . 2.08.01 . 01 . 02			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik / air / telepon / internet	12	bln	90.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik / air / telepon / internet	90.000.000	Administrasi Umum	jumlah terlaksananya administrasi umum	557.259.700	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah			XX 01 2.03 02	
	2.08 . 2.08.01 . 01 . 07			Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran honor pengelola keuangan, pengelola aset, pelaku pengadaan barang / jasa	12	bln	10.000.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran honor pengelola keuangan, pengelola aset, pelaku	10.000.000	Administrasi Umum	jumlah terlaksananya administrasi umum	557.259.700	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah			XX 01 2.03 07	
	2.08 . 2.08.01 . 01 . 10			Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pembelian ATK	12	bln	20.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pembelian ATK	20.000.000	Administrasi Umum	jumlah terlaksananya administrasi umum	557.259.700	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah			XX 01 2.03 10	
	2.08 . 2.08.01 . 01 . 11			Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan Penggandaan	12	bln	10.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan Penggandaan	10.000.000	Administrasi Umum	jumlah terlaksananya administrasi umum	557.259.700	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah			XX 01 2.03 11	
	2.08 . 2.08.01 . 01 . 13			Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bln	2.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000	Administrasi Umum	jumlah terlaksananya administrasi umum	557.259.700	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah			XX 01 2.03 13	
	2.08 . 2.08.01 . 01 . 17			Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan rapat dan tamu	12	bln	25.259.700	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan rapat dan tamu	25.259.700	Administrasi Umum	jumlah terlaksananya administrasi umum	557.259.700	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah			XX 01 2.03 17	
	2.08 . 2.08.01 . 01 . 19			Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak dan THL	12	bln	880.956.300	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak dan THL	880.956.300	Administrasi Keuangan	jumlah terlaksananya administrasi keuangan	5.457.304.300	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah			XX 01 2.02 02	
	2.08 . 2.08.01 . 01 . 18			Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	12	bln	25.000.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	25.000.000	Administrasi Umum	jumlah terlaksananya administrasi umum	557.259.700	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah			XX 01 2.03 18	
	2.08 . 2.08.01 . 01 . 21			Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan	Jumlah kegiatan Forum Perangkat Daerah	1	keg	15.000.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	Administrasi Keuangan	jumlah terlaksananya administrasi keuangan	5.457.304.300	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah			XX 01 2.02 06	Beda, di permendagri Nama kegiatan kurang kata-kata "dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD"
				Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah Kegiatan Bimtek ASN dan SDM	12	bln	5.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	5.000.000	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah terlaksananya peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	5.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah			XX 01 2.04.09	Nama kegiatan tidak sesuai di permendagri, di permendagri "Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur", tapi isi kegiatannya sama. Kegiatan ini diajukan di RRPD 2021 belum ada di renstra
	2.08 . 2.08.01 . 02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100		375.000.000						Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah		Rutin Penunjang		XX 01	Nama program tidak sesuai di permendagri, di permendagri Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	2.08 . 2.08.01 . 02 . 03			Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah pembangunan gedung	1	paket	5.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	5.000.000	Administrasi Umum	jumlah terlaksananya administrasi umum	557.259.700,00	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah			XX 01 2.03 38	Tidak Sesuai



	2.08.2.08.01.43.02			Kegiatan Pelatihan peningkatan keterampilan bagi organisasi perempuan dan masyarakat	Jumlah organisasi perempuan dan masyarakat yang mendapat pelatihan	5	kip	30.000.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	405.000.000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	405.000.000	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	520.000.000			2.08.02.2.02.01	Tidak Sesuai dengan permendagri, disini terdapat dana DAU dan dana cukai (DBHCT)
	2.08.2.08.01.43.03			Kegiatan Evaluasi PUG (2 tahun sekali,tahun 2021 tidak ada)	Jumlah kegiatan evaluasi PUG				Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG (*kegiatan evaluasi PUG 2 tahun sekali, 2021 tidak ada)	jumlah sub kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengarusutamaan gender (pug) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan			2.08.02.2.01.04	beda, di permendagri nama kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota di renstra evaluasi PUG, kegiatan ini dilaksanakan 2 tahun sekali, 2021 tidak ada	
	2.08.2.08.01.43.04			Kegiatan Fasilitasi perlindungan perempuan	Jumlah perempuan yang terfasilitasi	50	org	20.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	Program Perlindungan Perempuan	prosentase pelaksanaan perlindungan perempuan	70.000.000		2.08.03.2.01.01	beda, di permendagri nama kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota di renstra fasilitasi perlindungan perempuan gabungan dari 2 kegiatan di permendagri	
									Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	45.000.000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	45.000.000	Program Perlindungan Perempuan	prosentase pelaksanaan perlindungan perempuan	70.000.000		2.08.03.2.02.01		
Kasi. Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak	2.08.2.08.01.43.05			Kegiatan Fasilitasi perlindungan anak	Jumlah anak yang terfasilitasi	50	Org	20.000.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	20.000.000	Program Perlindungan Khusus Anak	prosentase pelaksanaan perlindungan khusus anak	20.000.000		2.08.07.2.02.01	beda, di permendagri nama kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, di renstra fasilitasi perlindungan anak	
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	10.000.000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus kabupaten/kota	Jumlah kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	20.000.000	Program Perlindungan Khusus Anak	prosentase pelaksanaan perlindungan khusus anak	20.000.000		2.08.07.2.02.02		
	2.08.2.08.01.43.06			Kegiatan Fasilitasi kabupaten layak anak	Jumlah OPD yang tersosialisasi tentang KLA	56	opd	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	Program Pemenuhan Hak Anak	prosentase pemenuhan hak anak	85.000.000		2.08.06.2.01.02	beda,di permendagri nama kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota di renstra nama kegiatan fasilitasi kabupaten layak anak	
	2.08.2.08.01.43.06								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000	Program Pemenuhan Hak Anak	prosentase pemenuhan hak anak	85.000.000		2.08.06.2.02.02		

Kabid Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk	2.08 . 2.08.01 . 45	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk	Peningkatan Jumlah Akseptor	7755	Akseptor	8.845.120.000							PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prosentase terlaksanannya pembinaan keluarga berencana (KB)			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14 03	nama program tidak sesuai, di permendagri yakni "PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) , di renstra KBPP nama program Kb tapi didalamnya juga ada pengendalian penduduk
Kasi. Jaminan Pelayanan dan Kesertan KB	2.08 . 2.08.01 . 45 . 01			Kegiatan KIE dan pelayanan KB	Jumlah kegiatan pelayanan KIE dan pelayanan KB	24	keg	75.000.000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan budaya lokal	Jumlah sub kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan budaya lokal	10.000.000	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	6.050.000.000	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prosentase terlaksanannya pembinaan keluarga berencana (KB)	8.830.120.000			2. 14. 03. 2. 01. 02	Tidak Sesuai, di permendagri Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, di renstra nama kegiatan KIE dan Pelayanan KB jadi gabungan 2 kegiatan di dalam kegiatan ini juga terdapat pelaksanaan hari keluarga nasional, di permendagri ada sub kegiatan pelaksanaan hari keluarga nasional
									Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas)	Jumlah sub kegiatan Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas)	10.000.000	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	6.050.000.000	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prosentase terlaksanannya pembinaan keluarga berencana (KB)	8.830.120.000			2. 14. 03. 2. 01. 05	
									Peningkatan kesertan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah sub kegiatan Peningkatan kesertan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	10.000.000	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prosentase terlaksanannya pembinaan keluarga berencana (KB)	8.830.120.000			2. 14. 03. 2. 03. 03	
									Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah sub kegiatan Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	15.000.000	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prosentase terlaksanannya pembinaan keluarga berencana (KB)	8.830.120.000			2. 14. 03. 2. 03. 08	
									Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah sub kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	30.000.000	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prosentase terlaksanannya pembinaan keluarga berencana (KB)	8.830.120.000			2. 14. 03. 2. 03. 11	
	2.08 . 2.08.01 . 45 . 02			Kegiatan Biaya operasional KB	Jumlah biaya BOKB	12	bin	6.030.000.000	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Jumlah sub kegiatan Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	6.030.000.000	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi / KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan lokal	Jumlah kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	6.050.000.000	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prosentase terlaksanannya pembinaan keluarga berencana (KB)	8.830.120.000			2. 14. 03. 2. 01. 08	Tidak Sesuai, di permendagri nama s kegiatan Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK di renstra nama kegiatan biaya operasi KB dan lainnya mengenai sarana di balai







<b>Kasi. Pelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan</b>	<b>2.08 - 2.08.01 - 42 - 01</b>			Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja	14	keg	375.000.000,00	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	jumlah kegiatan Sosialisasi Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	405.000.000	<b>Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>Prosentase pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan</b>	<b>520.000.000</b>		<b>2 08 02 2.02. 01</b>	Tidak Sesuai, tidak ada kegiatan cukai di permendagri, dan digabung dengan sub kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi di program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
--	---------------------------------	--	--	---	--	----	-----	----------------	--	--	--	--	-------------	--	---	--------------------	--	-------------------------	---

**Keterangan**

	= sesuai dengan pemendagri 90 tahun 2019
	= tidak sesuai dengan permendagri 90 tahun 2019
	= hampir sesuai dengan permendagri 90 tahun 2019 tapi berbeda nama (ada kata-kata yang kurang/ beda kata tapi maksud sama)

Kepala Dinas KB dan PP  
Kabupaten Pasuruan

Ttd.

drs. LOEMBINI PEDJATI LAJOENG  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630626 199102 2 001

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05	Wajib	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat													
Sekretariat	1.05.01			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	100	%									
	1.05.01.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air dan listrik	84	rek-bln	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air dan listrik	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan kebutuhan administrasi kantor dan sarana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor dan sarana	Kesatuan Bangsa dan Politik	Unsur Pemerintahan Umum	8.01.01.1.03.02
	1.05.01.07			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan	192	org-bln	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan kebutuhan administrasi kantor dan sarana prasarana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor dan sarana prasarana	Kesatuan Bangsa dan Politik	Unsur Pemerintahan Umum	8.01.01.1.03.07
	1.05.01.10			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian Alat Tulis Kantor	51	jenis-kali	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian Alat Tulis Kantor	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan kebutuhan administrasi kantor dan sarana prasarana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor dan sarana prasarana	Kesatuan Bangsa dan Politik	Unsur Pemerintahan Umum	8.01.01.1.03.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.11			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	4.158	eks	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan kebutuhan administrasi kantor dan sarana prasarana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor dan sarana prasarana	Kesatuan Bangsa dan Politik	Unsur Pemerintahan Umum	8.01.01.1.03.11
	1.05.01.13			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	117	unit	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan kebutuhan administrasi kantor dan sarana prasarana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor dan sarana prasarana	Kesatuan Bangsa dan Politik	Unsur Pemerintahan Umum	8.01.01.1.03.13
	1.05.01.14			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pembelian peralatan rumah tangga	477	unit	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pembelian peralatan rumah tangga	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan kebutuhan administrasi kantor dan sarana prasarana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor dan sarana prasarana	Kesatuan Bangsa dan Politik	Unsur Pemerintahan Umum	8.01.01.1.03.14
	1.05.01.17			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu	15	kali	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan kebutuhan administrasi kantor dan sarana prasarana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor dan sarana prasarana	Kesatuan Bangsa dan Politik	Unsur Pemerintahan Umum	8.01.01.1.03.17
	1.05.01.18			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	70	org-kali	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan kebutuhan administrasi kantor dan sarana prasarana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor dan sarana prasarana	Kesatuan Bangsa dan Politik	Unsur Pemerintahan Umum	8.01.01.1.03.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.19			Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah pembayaran honor PTT dan THL	170	org-bln	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran honor PTT dan THL	Administrasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang dikerjakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor dan sarana prasarana	Kesatuan Bangsa dan Politik	Unsur Pemerintahan Umum	8.01.01.1.02.02
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Jumlah pembelian koran dan majalah	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan kebutuhan administrasi kantor dan sarana prasarana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor dan sarana prasarana	Kesatuan Bangsa dan Politik	Unsur Pemerintahan Umum	8.01.01.1.03.15
	1.05.01.23			Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Laporan kinerja triwulan dan tahunan	1	dok	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja triwulan dan tahunan	Administrasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang dikerjakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor dan sarana prasarana	Kesatuan Bangsa dan Politik	Unsur Pemerintahan Umum	8.01.01.1.02.06
Sekretariat	1.05.02			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100	%									
	1.05.02.05			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	2	unit	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan kebutuhan administrasi kantor dan sarana prasarana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor dan sarana prasarana	Kesatuan Bangsa dan Politik	Unsur Pemerintahan Umum	8.01.01.1.03.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.09			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	16	unit	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan kebutuhan administrasi kantor dan sarana prasarana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor dan sarana prasarana	Kesatuan Bangsa dan Politik	Unsur Pemerintahan Umum	8.01.01.1.03.25
	1.05.02.24			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	15	unit	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan kebutuhan administrasi kantor dan sarana prasarana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor dan sarana prasarana	Kesatuan Bangsa dan Politik	Unsur Pemerintahan Umum	8.01.01.1.03.31
	1.05.02.30			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	35	unit	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan kebutuhan administrasi kantor dan sarana prasarana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor dan sarana prasarana	Kesatuan Bangsa dan Politik	Unsur Pemerintahan Umum	8.01.01.1.03.35
Bidang Politik dan Demokrasi	1.05.25			PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAM	Persentase kelompok masyarakat yang memahami hukum dan HAM	100	%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1. 05. 25. 01			Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama yang Menjamin Efektivitas Penegakan Hukum dan HAM	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan koordinasi dan kerjasama yang menjamin efektivitas penegakan hukum dan HAM	400	orang									
	1. 05. 25. 03			Pelaksanaan RANHAM di Kabupaten Pasuruan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan RANHAM di Kabupaten Pasuruan	1.000	orang	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, pencegahan penyalahgunaan narkotika, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Kabupaten Pasuruan	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah kebijakan teknis pemantapan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang ditetapkan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase peningkatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Kesatuan Bangsa dan Politik	Unsur Pemerintahan Umum	8. 01. 05. 2.01. 04



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bidang Kesatuan Bangsa	1.05.36			PROGRAM KESATUAN BANGSA	Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan konflik yang terfasilitasi	100	%									
	1.05.36.01			Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat Kabupaten Pasuruan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan di Kabupaten Pasuruan	1110	orang	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan koordinasi dan sosialisasi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Jumlah kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan ideologi Pancasila dan karakter bangsa yang ditetapkan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase kelompok masyarakat yang memahami ideologi Pancasila	Kesatuan Bangsa dan Politik	Unsur Pemerintahan Umum	8.01.02.2.01.03
	1.05.36.02			Peningkatan Toleransi dan Pemantapan Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Pasuruan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penoleransi dan pemantapan pembauran kebangsaan di Kabupaten Pasuruan	900	orang									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bidang Politik dan Demokrasi	1.05.37			PROGRAM PENGEMBANGAN ETIKA DAN BUDAYA POLITIK	Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan konflik yang terfasilitasi	100	%									
	1.05.37.03			Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kesadaran Pemahaman Etika dan Budaya Politik	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kesadaran pemahaman etika dan budaya politik	200	orang	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	- Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi; Jumlah partai politik yang terfasilitasi	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah dan pemantuan situasi politik yg ditetapkan	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik yang terfasilitasi	Kesatuan Bangsa dan Politik	Unsur Pemerintahan Umum	8.01.03.2.01.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bidang Hubungan Antar Lembaga	1.05.27			PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI	Persentase Ormas, LSM dan partai politik yang terfasilitasi	100	%									
	1.05.27.03			Vasilitasi dan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah perwakilan partai politik yang mengikuti verifikasi bantuan keuangan partai politik	54	orang									
	1.05.27.05			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Ormas/LSM dan partai politik yang dimonitor	40	lemb	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas dan Ormas Asing di Kabupaten Pasuruan yang dimonitor	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang terfasilitasi	Kesatuan Bangsa dan Politik	Unsur Pemerintahan Umum	8.01.04.2.01.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.27.06			Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Pemberdayaan Ormas/LSM	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dan fasilitasi pemberdayaan Ormas/LSM	1.500	orang	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	- Jumlah Ormas yang terfasilitasi; - Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan dan fasilitasi pemberdayaan Ormas.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang terfasilitasi	Kesatuan Bangsa dan Politik	Unsur Pemerintahan Umum	8.01.04.2.01.03
Bidang Kewaspadaan	1.05.35			PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase daerah rawan konflik yang dibina	100	%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.35.01			Pembinaan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini Terhadap Konflik Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan sistem deteksi dini dan cegah konflik masyarakat	2.376	orang	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Perumusan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang ditetapkan	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	Persentase penurunan kejadian konflik	Kesatuan Bangsa dan Politik	Unsur Pemerintahan Umum	8.01.06.2.01.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.35.02			Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	5.700	orang									



										Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan					1.05.01.1.04		
	1.05.03.01.20			Penyediaan pakaian kerja	Pakaian dinas PDH, PDU, PDL	186	stell	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas PDH, PDU, PDL								1.05.01.1.04.02	
	1.05.03.02	RUTIN	Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR.	Persentase Sarana dan Prasarana yang memenuhi syarat terhadap Sarana dan Prasarana yang harus tersedia	100%	%								Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	RUTIN		
	1.05.03.02.05			Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Pengadaan mobil damkar dan mobil linmas	6	unit	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Pengadaan mobil damkar dan mobil linmas									1.05.01.1.03.21
	1.05.03.02.10			Pengadaan Mebeleur	Pembelian barang Meubelair	12	unit	Pengadaan Mebeleur	Pembelian barang Meubelair									1.05.01.1.03.26
	1.05.03.02.09			Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor	Pengadaan komputer, printer, laptop, mesin foto copy, Rik, HT, AC, Scanner dan Lemari Arsip (Mobil Selving)	23	unit	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan komputer, printer, laptop, mesin foto copy, Rik, HT, AC, Scanner dan Lemari Arsip (Mobil Selving)									1.05.01.1.03.25
	1.05.03.02.13			Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung/Kantor	Pemeliharaan gedung kantor	1	ls	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor									1.05.01.1.03.29
	1.05.03.02.15			Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	Pembelian suku cadang, BBM dan servis kendaraan dinas	45	unit	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Pembelian suku cadang, BBM dan servis kendaraan dinas									1.05.01.1.03.31
	1.05.03.02.20			Pemeliharaan rutin/ berkala Mebelair	Pemeliharaan Mebelair Kantor	19	unit	Pemeliharaan rutin/ berkala Mebeleur	Pemeliharaan Mebelair Kantor									1.05.01.1.03.36
	1.05.03.02.19			Pemeliharaan rutin / berkala peralatan Gedung/kantor	Pemeliharaan mesin foto copy, komputer, printer, isi tabung pemadam kebakaran, ac, ricl, ht, cctv dan kamera.	70	unit	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan Gedung kantor	Pemeliharaan mesin foto copy, komputer, printer, isi tabung pemadam kebakaran, ac, ricl, ht, cctv dan kamera.									1.05.01.1.03.35
	1.05.03.18	RUTIN	Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR.	Prosentase anggota SatPol PP yang dilatih	100%	%					PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan tibum tranmas yang ditangani	Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	RUTIN		1.05.02	
	1.05.03.18.01			Peningkatan kemampuan ketrampilan dan kesamaptan Polisi Pamong Praja	Jumlah kegiatan latihan kesamaptan	58	kegiatan	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Jumlah kegiatan latihan kemampuan ketrampilan dan kesamaptan anggota satpol pp dan linmas	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten	Jumlah kegiatan teknis penanganan gangguan trantribum							1.05.02.2.01







	1.05.03.16	WAJIB	Bidang Urusan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	Prosentase gangguan tibus tranmas yang ditangani	64.9 %	%				Prosentase gangguan tibus tranmas yang ditangani	PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan tibus tranmas yang ditangani	Bidang Urusan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	WAJIB	1.05.02
	1.05.03.16.01			Operasi dan Penanganan terhadap PKL dan Reklame	Jumlah kegiatan operasi PKL dan Reklame yang dilakukan.	48	kegiatan									
									Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten	Jumlah kegiatan teknis penanganan gangguan tranribum						1.05.02.2.01
	1.05.03.16.02			Patroli Rutin dan Antisipasi terhadap Pelanggaran Perda dan Gangguan Tranribum.	Jumlah patroli rutin yang dilakukan.	369	kegiatan	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah pencegahan gangguan tibus dan tranmas							1.05.02.2.01.01
	1.05.03.16.03			Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah pembinaan tibus tranmas	15	kegiatan	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten	Jumlah koordinasi penyelenggaraan tibus dn tranmas serta perlindungan masyarakat							1.05.02.2.01.03
	1.05.03.16.04			Peningkatan Hubungan Kerjasama dalam rangka penyelenggaraan tibus dan tranmas	Jumlah kerjasama antar Sat Pol PP dan informasi peran Sat Pol PP	5	kegiatan	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kerjasama dalam teknis pencegahan dan penanganan gangguan tranribum tranmas							1.05.02.2.01.07
	1.05.03.16.05			Operasi Penanganan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Masalah Sosial Lainnya	Jumlah Operasi Penanganan dan Pemberantasan PSK, Minuman Keras dan PMKS	60	kegiatan	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara	Jumlah penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum							1.05.02.2.01.02
	1.05.03.15	WAJIB	Bidang Urusan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	PROGRAM PENEKAKAN PERATURAN DAERAH	Rasio Penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	100%	%							Bidang Urusan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	WAJIB	
	1.05.03.15.01			Koordinasi antar aparat penegak hukum.	Jumlah Rapat Koordinasi antar Aparat Penegak Hukum (PPNS, Pol PP, Kasi Tranrib Kecamatan, Kepolisian dan Instansi terkait)	12	kegiatan									
									Penegakan Peraturan daerah kabupaten dan peraturan Bupati	Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perbup						1.05.02.2.02



STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	Urusan Pemerintahan Fungsi penunjang														
	4.02		Pengawasan													
				<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan pelayanan kantor</b>	<b>100</b>	<b>%</b>									
				Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim melalui jasa pengiriman	1000	pucuk	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim melalui jasa pengiriman	Administrasi Umum	Terlaksananya Pengadministrasian Umum	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase terpenuhinya urusan penunjang</b>	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya dana pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik setiap bulan	6	Rekening	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya dana pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik setiap bulan	Administrasi Umum	Terlaksananya Pengadministrasian Umum	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase terpenuhinya urusan penunjang</b>	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pembayaran pajak kendaraan	16	unit	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pembayaran pajak kendaraan	Administrasi Umum	Terlaksananya Pengadministrasian Umum	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase terpenuhinya urusan penunjang</b>	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01
				Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah barang yang diasuransikan	6	Unit	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah barang yang diasuransikan	Administrasi Umum	Terlaksananya Pengadministrasian Umum	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase terpenuhinya urusan penunjang</b>	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya dana pembayaran jasa administrasi keuangan	14	Jabatan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya dana pembayaran jasa administrasi keuangan	Administrasi Umum	Terlaksananya Pengadministrasian Umum	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase terpenuhinya urusan penunjang</b>	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01

				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor	59	Jenis	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya Pengadministrasian Umum	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase terpenuhinya urusan penunjang</b>	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2	Paket	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Administrasi Umum	Terlaksananya Pengadministrasian Umum	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase terpenuhinya urusan penunjang</b>	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3	Jenis	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya Pengadministrasian Umum	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase terpenuhinya urusan penunjang</b>	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan Makanan & Minuman	3	Paket	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan Makanan & Minuman	Administrasi Umum	Terlaksananya Pengadministrasian Umum	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase terpenuhinya urusan penunjang</b>	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	120	Org/kali	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Administrasi Umum	Terlaksananya Pengadministrasian Umum	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase terpenuhinya urusan penunjang</b>	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Terlaksananya penyediaan jasa perkantoran & terbayar -nya honorarium Non PNS	1 dan 7	Paket dan Org/ bln	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya penyediaan jasa perkantoran & terbayar -nya honorarium Non PNS	Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pengadministrasian Keuangan	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase terpenuhinya urusan penunjang</b>	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01
								Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa perkantoran & terbayar -nya honorarium Non PNS		Administrasi Umum	Terlaksananya Pengadministrasian Umum	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase terpenuhinya urusan penunjang</b>	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Negeri	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Negeri	5	Org/kali	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Administrasi Umum	Terlaksananya Pengadministrasian Umum	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase terpenuhinya urusan penunjang</b>	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01



				Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Tercapainya pemeriksaan pada obyek pemeriksaan (obrik)	55	Obrik	Audit Kinerja dan Keuangan	Tercapainya pemeriksaan pada obyek pemeriksaan (obrik)	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tercapainya pemeriksaan pada obyek pemeriksaan (obrik)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase NHP tepat waktu dan tindak lanjut atas rekomendasi	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01
				Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Terlaksananya penyelesaian jumlah penanganan kasus pengaduan dan pendampingan kasus	10	kasus & pendampingan	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Terlaksananya penyelesaian jumlah penanganan kasus pengaduan dan pendampingan kasus	Asistensi dan Pendampingan	Terlaksananya Asistensi dan Pendampingan	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Prosentase NHP tepat waktu dan tindak lanjut atas rekomendasi	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01
				Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya frekuensi koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	3	kali rapat									
				Monitoring, Evaluasi & Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Monev Fisik proyek, Hibah/bansos, Dana BOS dan JKN	4	Lapran Monev									
				Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	Terlaksananya sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar	24	Sosialisasi/se tahun									
				Sistem Pengendalian Gratifikasi dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RADPPK)	Terealisasinya Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RADPPK)	4	Dokumen									
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya SDM Aparatur Pengawasan	180	Orang	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya SDM Aparatur Pengawasan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya urusan penunjang	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01
				Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah tenaga yang mengikuti Bintek, PKS, Penjurangan pejabat fungsional, penilaian angka kredit dan FGD	15	kali	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah tenaga yang mengikuti Bintek, PKS, Penjurangan pejabat fungsional, penilaian angka kredit dan FGD	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya urusan penunjang	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01



				Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Laporan PMRB Kab dan Reviu PMPRB OPD	34	Laporan									
				Penilaian ZI menuju WBK / WBBM	ZI berpredikat WBK	1	Laporan									
				Sistem pengendalian interen pemerintah (SPIP)	Sosialisasi dan penilaian maturitas SPIP	10	OPD									
				Rapat kerja / FGD PKS APIP, APH dan OPD	Terlaksananya Rapat Kerja APIP, APH dan OPD	3	kali rapat									
				Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi	Terealisasinya Korschupgah KPK dan MCP	12	Bulan									
				Survey Penilaian Integritas	Terlaksananya Survey penilaian Integritas	1	Hasil Survey									
				Pengawasan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Terlaksananya PUG	1	Hasil Evaluasi									
				Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi	75	Obrik	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tercapainya pemeriksaan pada obyek pemeriksaan (obrik)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase NHP tepat waktu dan tindak lanjut atas rekomendasi	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01
				Klinik Konsultasi Pengawasan	Menurunnya permasalahan terhadap hukum	12	Kali							INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01
				Review Perencanaan, Pelaksanaan & Pelaporan Pemda	Jumlah reviu RKPd dan RKPd perubahan pemerintah daerah yang terbit	2	LHR	Review Kinerja dan Keuangan	Jumlah Review kinerja dan keuangan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tercapainya pemeriksaan pada obyek pemeriksaan (obrik)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase NHP tepat waktu dan tindak lanjut atas rekomendasi	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01
					Jumlah LHP Reviu KUA PPAS dan Perubahan Pemerintah Daerah yang terbit	2	LHR	Review Kinerja dan Keuangan	Jumlah Review kinerja dan keuangan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tercapainya pemeriksaan pada obyek pemeriksaan (obrik)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase NHP tepat waktu dan tindak lanjut atas rekomendasi	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01
					Jumlah Renja, RKA Awal dan RKA Perubahan yang di reviu	56	LHR x 2	Review Kinerja dan Keuangan	Jumlah Review kinerja dan keuangan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tercapainya pemeriksaan pada obyek pemeriksaan (obrik)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase NHP tepat waktu dan tindak lanjut atas rekomendasi	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01

				Dokumen Laporan Reviu LKjIP Pemerintah Daerah yang terbit	1	LHR	Review Kinerja dan Keuangan	Jumlah Review kinerja dan keuangan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tercapainya pemeriksaan pada obyek pemeriksaan (obrik)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase NHP tepat waktu dan tindak lanjut atas rekomendasi	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01
				Dokumen Laporan Reviu Implementasi SAKIP (LKjIP) OPD yang terbit	56	LHR	Review Kinerja dan Keuangan	Jumlah Review kinerja dan keuangan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tercapainya pemeriksaan pada obyek pemeriksaan (obrik)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase NHP tepat waktu dan tindak lanjut atas rekomendasi	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01
				OPD yang mengelola dana DAK Fisik	3	Kali	Review Kinerja dan Keuangan	Jumlah Review kinerja dan keuangan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tercapainya pemeriksaan pada obyek pemeriksaan (obrik)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase NHP tepat waktu dan tindak lanjut atas rekomendasi	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01
				Dokumen Laporan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1	Kali	Review Kinerja dan Keuangan	Jumlah Review kinerja dan keuangan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tercapainya pemeriksaan pada obyek pemeriksaan (obrik)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase NHP tepat waktu dan tindak lanjut atas rekomendasi	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01
				Reviu Pengadaan Barang/Jasa dan APBD dab Dana Desa	1	kali/3 bulan	Review Kinerja dan Keuangan	Jumlah Review kinerja dan keuangan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tercapainya pemeriksaan pada obyek pemeriksaan (obrik)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase NHP tepat waktu dan tindak lanjut atas rekomendasi	INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01

**SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH  
PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2020**

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019						
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Sekretariat	2.07.2.07.01.01.01			<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	100	%									
Kasubag Umum dan Kepegawaian	2.07.2.07.01.01.01.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Telepon, Air dan Internet selama 12 bulan	12	Bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Telepon, Air dan Internet selama 12 bulan	Administrasi Umum	Jumlah Pembayaran Telepon, Air dan Internet selama 12 bulan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	01.2.03.02
Kasubag Umum dan Kepegawaian	2.07.2.07.01.01.01.07			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan, Kegiatan dan Pelaku Pengadaan Barang / Jasa	13	Orgbulan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan, Kegiatan dan Pelaku Pengadaan Barang / Jasa	Administrasi Umum	Jumlah Pembayaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan, Kegiatan dan Pelaku Pengadaan Barang / Jasa	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	01.2.03.07
Kasubag Umum dan Kepegawaian	2.07.2.07.01.01.01.08			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Pembayaran Honor Jasa Kebersihan	1	Orgbulan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Pembayaran Honor Jasa Kebersihan	Administrasi Umum	Jumlah Pembayaran Honor Jasa Kebersihan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	01.2.03.08
Kasubag Umum dan Kepegawaian	2.07.2.07.01.01.01.10			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor	52	Jenis	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor	Administrasi Umum	Jumlah pembelian alat tulis kantor	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	01.2.03.10
Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan	2.07.2.07.01.01.01.11			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	14	Jenis	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	Administrasi Umum	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	01.2.03.11
Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan	2.07.2.07.01.01.01.13			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	Jenis	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Umum	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	01.2.03.13
Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan	2.07.2.07.01.01.01.17			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Konsumsi Tamu dan Rapat	1	Keg	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Konsumsi Tamu dan Rapat	Administrasi Umum	Jumlah Penyediaan Konsumsi Tamu dan Rapat	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	01.2.03.17
Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan	2.07.2.07.01.01.01.18			Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan Perjalanan dinas luar daerah	1	Paket	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan Perjalanan dinas luar daerah	Administrasi Umum	Jumlah laporan koordinasi dan Perjalanan dinas luar daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	01.2.03.18
Kasubag Umum dan Kepegawaian	2.07.2.07.01.01.01.19			Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah Pembayaran Honor Tenaga Kontrak / THL	11	Orgbulan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honor Tenaga Kontrak / THL	Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran Honor Tenaga Kontrak / THL	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	01.2.02.01
Kasubag Umum dan Kepegawaian	2.07.2.07.01.01.01.19			-	-	34	Orangbulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima Gaji	Administrasi Keuangan	Jumlah PNS yang menerima Gaji	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	01.2.02.02
Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan	2.07.2.07.01.01.01.21			Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan tribulanan dan tahunan	5	Laporan	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah laporan tribulanan dan tahunan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan tribulanan dan tahunan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	01.2.01.02
Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan	2.07.2.07.01.01.01.			Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pembinaan Sertifikat Standart Pelayanan	37	Orang	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Orang yang mengikuti Diklat	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Orang yang mengikuti Diklat	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	01.2.04.09
Sekretariat	2.07.2.07.01.01.02			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Prosentase Sarpras kondisi baik	100	%									
Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan	2.07.2.07.01.01.02.			Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia	1	Unit	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia	Administrasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	01.2.03.20

Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan	2.07.2.07.01.01.02.07			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia	1	Jenis	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia	Administrasi Umum	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	01.2.03.22
Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan	2.07.2.07.01.01.02.04			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	17	Unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	Administrasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	01.2.03.30
Kasubag Umum dan Kepegawaian	2.07.2.07.01.01.02.06			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	4	Jenis	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	Administrasi Umum	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	01.2.03.32
Kasubag Umum dan Kepegawaian	2.07.2.07.01.01.02.00			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	10	Unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	Administrasi Umum	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	01.2.03.34
Kabid Bina Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan	2.07.2.07.01.01.22			<b>PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL</b>	<b>Prosentase BUMDes yang mengikuti pelatihan</b>	<b>24</b>	<b>Desa</b>									
Kasi Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan	2.07.2.07.01.01.22.01			Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah Desa yang diberdayakan melalui pembinaan dan pelatihan kerja bagi masyarakat	24	Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kabid Bina Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan	2.07.2.07.01.01.23			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Prosentase lembaga ekonomi desa yang aktif</b>	<b>46</b>	<b>%</b>									
Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.07.2.07.01.01.23.01			Pembinaan Pasar Desa	Jumlah Pasar Desa yang terbina	10	Pasar Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kasi Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan	2.07.2.07.01.01.23.02			Penyelenggaraan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah Desa yang mempunyai TTG	24	Desa	Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Desa yang mempunyai TTG	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang mempunyai TTG	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerintahan	2.13.05.2.01.06
Kasi Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan	2.07.2.07.01.01.23.03			Fasilitas Pengembangan BUMDesa	Jumlah Desa yang memiliki BUMDes	22	Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Desa yang memiliki BUMDes	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang memiliki BUMDes	Administrasi Pemerintahan Desa		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerintahan	2.13.04.2.01.08
Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.07.2.07.01.01.23.04			Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Desa yang usaha Ekonominya Masyarakatnya Berkembang	269	Desa	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Desa yang usaha Ekonominya Masyarakatnya Berkembang	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang usaha Ekonominya Masyarakatnya Berkembang	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerintahan	2.13.05.2.01.05
Kasi Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan	2.07.2.07.01.01.23.05			Optimalisasi Profil Desa / Kelurahan di Kabupaten Pasuruan	Jumlah Desa yang profil desanya lengkap	365	DesaKel	Fasilitas Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	Jumlah Desa yang profil desanya lengkap	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang profil desanya lengkap	Administrasi Pemerintahan Desa		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerintahan	2.13.04.2.01.11



Kasi Kelembagaan Pemerintahan Desa	2.07.2.07.01.01.25.01			Pembinaan Kelembagaan Keanggotaan BPD	Jumlah Anggota BPD yang dibina	341	Desa									
Kasi Kelembagaan Pemerintahan Desa	2.07.2.07.01.01.25.02			Fasilitasi Pengisian dan Pelantikan BPD	Jumlah anggota BPD yang dilantik	10	Orang	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah anggota BPD yang dilantik	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah anggota BPD yang dilantik	Administrasi Pemerintahan Desa		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerintahan	2.13.04.2.01.01
Kasi Penguatan Aparatur Pemerintahan Desa	2.07.2.07.01.01.25.03			Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah kepala desa yang terpilih	54	Desa	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah kepala desa yang terpilih	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kepala desa yang terpilih	Administrasi Pemerintahan Desa		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerintahan	2.13.04.2.01.09
Kasi Kelembagaan Pemerintahan Desa	2.07.2.07.01.01.25.04			Fasilitasi Pengkajian dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	24	Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah anggota BPD yang dilantik	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah anggota BPD yang dilantik	Administrasi Pemerintahan Desa		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerintahan	2.13.04.2.01.01
Kasi Administrasi dan Tata Perundangan Desa	2.07.2.07.01.01.25.05			Pembinaan dan Pengendalian Peraturan Desa	Jumlah Peraturan Desa yang terfasilitasi	341	Desa	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Peraturan Desa yang terfasilitasi	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Peraturan Desa yang terfasilitasi	Administrasi Pemerintahan Desa		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerintahan	2.13.04.2.01.07
Kasi Penguatan Aparatur Pemerintahan Desa	2.07.2.07.01.01.25.06			Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparat pemerintah desa yang terbina	54	Orang									
Kasi Administrasi dan Tata Perundangan Desa	2.07.2.07.01.01.25.07			Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Administrasi Desa	Jumlah Desa yang pengelolaan administrasinya tertib	24	Desa	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	Jumlah Desa yang pengelolaan administrasinya tertib	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang pengelolaan administrasinya tertib	Administrasi Pemerintahan Desa		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerintahan	2.13.04.2.05
<b>Kabid Bina Keuangan dan Kekayaan Desa</b>	<b>2.07.2.07.01.01.26</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA</b>	<b>Prosentase Desa yang tertib pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan desa</b>	<b>1,7</b>	<b>%</b>									
Kasi Asset, Sarana dan Prasarana Desa	2.07.2.07.01.01.26.01			Fasilitasi Pengelolaan Kekayaan Desa dan Sumber Pendapatan Desa Lainnya	Jumlah desa yang kekayaan dan sumber pendapatan lainnya dikelola dengan baik	75	Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah desa yang kekayaan dan sumber pendapatan lainnya dikelola dengan baik	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang kekayaan dan sumber pendapatan lainnya dikelola dengan baik	Administrasi Pemerintahan Desa		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerintahan	2.13.04.2.01.04
Kasi Asset, Sarana dan Prasarana Desa	2.07.2.07.01.01.26.02			Fasilitasi Kegiatan Pembangunan / Pengembangan Aset dan Sarana Prasarana Desa	Jumlah Desa yang sarana prasarannya bertambah	100	Desa	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang sarana prasarannya bertambah	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang sarana prasarannya bertambah	Penataan Desa		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerintahan	2.13.02.2.01.06
Kasi Fasilitasi Pendampingan Desa	2.07.2.07.01.01.26.03			Fasilitasi dan Koordinasi Pemantapan Tugas - Tugas Pendampingan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pendampingan tugas - tugas desa	341	Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pendampingan tugas - tugas desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pendampingan tugas - tugas desa	Administrasi Pemerintahan Desa		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerintahan	2.13.04.2.01.04
Kasi Pengelolaan Keuangan Desa	2.07.2.07.01.01.26.04			Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangan Desa yang baik	341	Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangan Desa yang baik	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangan Desa yang baik	Administrasi Pemerintahan Desa		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerintahan	2.13.04.2.01.04

Pasuruan, 15 Juli 2020

Ttd.

**NURUL HUDA, S.Sos.MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19700302 199003 1 002



Sekretariat	4.05.11.01.02.09	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jml pengadaan peralatan kantor	80	unit	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jml pengadaan peralatan kantor	Administrasi umum	tersedianya kebutuhan umum kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	Kepegawaian	Kepegawaian	01.2.03.24
Sekretariat	4.05.11.01.02.10	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pengadaan mebelair	Jml pengadaan meubelair	2	unit	Pengadaan mebeleur	Jml pengadaan meubelair	Administrasi umum	tersedianya kebutuhan umum kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	Kepegawaian	Kepegawaian	01.2.03.25
Sekretariat	4.05.11.01.02.22	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jml pemeliharaan gedung kantor	1	pkt	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jml pemeliharaan gedung kantor	Administrasi umum	tersedianya kebutuhan umum kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	Kepegawaian	Kepegawaian	01.2.03.28
Sekretariat	4.05.11.01.02.24	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jml pemeliharaan kendaraan dinas	33	unit	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jml pemeliharaan kendaraan dinas	Administrasi umum	tersedianya kebutuhan umum kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	Kepegawaian	Kepegawaian	01.2.03.30
Sekretariat	4.05.11.01.02.28	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin Berkala Peralatan Kantor	47	unit	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin Berkala Peralatan Kantor	Administrasi umum	tersedianya kebutuhan umum kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	Kepegawaian	Kepegawaian	01.2.03.34
BKPPD	4.05.11.01.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pegawai yang telah dibina berkelakuan baik	71	%									
					Persentase Pegawai Dengan SKP Berpredikat Sangat Baik	99	%									
Bid Penilaian Kinerja, Disiplin dan Penghargaan	4.05.11.01.03.09	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Proses Penanganan Pelanggaran Disiplin ASN	jumlah SK yang diterbitkan	25	SK	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	jumlah SK yang diterbitkan	Pembinaan ASN	Terlaksananya pembinaan pengembangan ASN	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan kepegawaian daerah	Kepegawaian	Kepegawaian	5.03.02.2.05.02
Bid Penilaian Kinerja, Disiplin dan Penghargaan	4.05.11.01.03.10	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Koordinasi fasilitasi LHKPN, penghargaan satya lencana	jumlah dokumen yang dilaporkan dan diusulkan	3	lap	Penegakan disiplin, pemberian penghargaan dan perlindungan	jumlah dokumen yang dilaporkan dan diusulkan	Pembinaan ASN	Terlaksananya pembinaan pengembangan ASN	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan kepegawaian daerah	Kepegawaian	Kepegawaian	5.03.02.2.05.03
Bid Penilaian Kinerja, Disiplin dan Penghargaan	4.05.11.01.03.11	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Sosialisasi peraturan tentang kepegawaian	jumlah org yang ikut sosialisasi	150	org	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	jumlah org yang ikut sosialisasi	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas SDA	Terkelolanya data dan informasi ASN	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan kepegawaian daerah	Kepegawaian	Kepegawaian	5.02.01.2.04.10
Bid Penilaian Kinerja, Disiplin dan Penghargaan	4.05.11.01.03.12	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Koordinasi dan fasilitasi penilaian kinerja	jumlah org melakukan penunjang SKP	180	org	Pengembangan penilaian kinerja ASN	jumlah org melakukan penunjang SKP	Peningkatan kapasitas ASN	Meningkatnya kompetensi ASN	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan kepegawaian daerah	Kepegawaian	Kepegawaian	5.03.02.2.03.02
BKPPD	4.05.11.01.30	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Pegawai terakui Kualifikasi dalam Kepangkatan	67	%									
Bid Mutasi, Kepangkatan dan Fasilitasi ASN	4.05.11.01.30.17	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Seleksi dan penetapan ASN dalam pangkat dan jabatan	Jumlah calon administrator dan pengawas	450	org	Pengembangan karir dan promosi ASN	Jumlah calon administrator dan pengawas	Pengembangan karir ASN	Terlaksananya pengembangan karir ASN	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan kepegawaian daerah	Kepegawaian	Kepegawaian	5.03.02.2.04.01



Bid Mutasi, Kepangkatan dan Fasilitasi ASN	4.05.11.01.30.19	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pelaksanaan ujian dinas tingkat I dan tingkat II	Jumlah peserta ujian dinas tingkat I dan II	100	org	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah peserta ujian dinas tingkat I dan II	Administrasi Kepegawaian	Terpenuhinya administrasi kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan kepegawaian daerah	Kepegawaian	Kepegawaian	5.03.02.2.02.10
Bid Mutasi, Kepangkatan dan Fasilitasi ASN	4.05.11.01.30.20	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pelaksanaan ujian dinas kenaikan pangkat (PI)	Jumlah peserta ujian dinas PI	80	org	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah peserta ujian dinas PI	Peningkatan kapasitas ASN	Meningkatnya kompetensi ASN	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan kepegawaian daerah	Kepegawaian	Kepegawaian	5.03.02.2.03.07
Bid Mutasi, Kepangkatan dan Fasilitasi ASN	4.05.11.01.30.26	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Koordinasi dan fasilitasi kenaikan pangkat	jumlah usulan SK kepangkatan	8500	SK	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	jumlah usulan SK kepangkatan	Administrasi Kepegawaian	Terpenuhinya administrasi kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan kepegawaian daerah	Kepegawaian	Kepegawaian	5.03.02.2.02.10
Bid Mutasi, Kepangkatan dan Fasilitasi ASN	4.05.11.01.30.51	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Fasilitasi/koordinasi profesi ASN	jumlah laporan koordinasi profesi ASN	10	kali	Fasilitasi profesi ASN	jumlah laporan koordinasi profesi ASN	Peningkatan kapasitas ASN	Meningkatnya kompetensi ASN	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan kepegawaian daerah	Kepegawaian	Kepegawaian	5.03.02.2.03.05
Bid Mutasi, Kepangkatan dan Fasilitasi ASN	4.05.11.01.30.54	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Seleksi pengisian dan pengangkatan JPT	Jumlah keg seleksi calon JPT	1	kali	Pengelolaan penempatan dalam jabatan ASN	Jumlah keg seleksi calon JPT	Administrasi Kepegawaian	Terpenuhinya administrasi kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan kepegawaian daerah	Kepegawaian	Kepegawaian	5.03.02.2.02.08
BKPPD	4.05.11.01.31	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program Pengelolaan Manajemen Aparatur	Jumlah Pegawai yang diberhentikan dengan tidak hormat	0	%									
Bid. Pengadaan, data dan pemberhentian	4.05.11.01.31.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Seleksi penerimaan pegawai ASN	jumlah keg seleksi calon ASN	1	kali	Penyusunan analisis kebutuhan, formasi dan pelaksanaan pengadaan ASN	jumlah keg seleksi calon ASN	Administrasi Kepegawaian	Terpenuhinya administrasi kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan kepegawaian daerah	Kepegawaian	Kepegawaian	5.03.02.2.02.01
Bid. Pengadaan, data dan pemberhentian	4.05.11.01.31.02	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pemberian penghargaan bagi ASN yang purna tugas (penyelesaian pensiun dan kesejahteraan pegawai)	jumlah SK pensiun BUP/APS	428	SK	Penyelesaian pemberhentian dan pemberian pensiun	jumlah SK pensiun BUP/APS	Administrasi Kepegawaian	Terpenuhinya administrasi kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan kepegawaian daerah	Kepegawaian	Kepegawaian	5.03.02.2.02.04
Bid. Pengadaan, data dan pemberhentian	4.05.11.01.31.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pemberkasan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen yang terdata	111000	dok	Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah dokumen yang terdata	Pengelolaan data dan informasi ASN	Terkelolanya data dan informasi ASN	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan kepegawaian daerah	Kepegawaian	Kepegawaian	5.03.02.2.01.04
Bid. Pengadaan, data dan pemberhentian	4.05.11.01.31.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Workshop penyusunan bezetting	jumlah org yg melakukan bezetting	80	org	Penyusunan analisis kebutuhan, formasi dan pelaksanaan pengadaan ASN	jumlah org yg melakukan bezetting	Administrasi Kepegawaian	Terpenuhinya administrasi kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan kepegawaian daerah	Kepegawaian	Kepegawaian	5.03.02.2.02.01
Bid. Pengadaan, data dan pemberhentian	4.05.11.01.31.05	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pembangunan/pengembangan layanan kepegawaian berbasis IT	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dikembangkan	1	paket	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dikembangkan	Pengelolaan data dan informasi ASN	Terkelolanya data dan informasi ASN	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan kepegawaian daerah	Kepegawaian	Kepegawaian	5.03.02.2.01.03
Bid. Pengadaan, data dan pemberhentian	4.05.11.01.31.06	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pembekalan ASN menjelang purna tugas	jumlah peseta yang mendapatkan pembekalan purna tugas	100	org	Fasilitasi pengadaan dan pemberhentian	jumlah peseta yang mendapatkan pembekalan purna tugas	Administrasi Kepegawaian	Terpenuhinya administrasi kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan kepegawaian daerah	Kepegawaian	Kepegawaian	5.03.02.2.02.06

BKPPD	4.05.11.01.28	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase peserta diklat aparatur berpredikat sangat memuaskan	28	%									
Bid. Pengembangan SDM	4.05.11.01.28.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pendidikan dan pelatihan teknis	Jumlah peserta yang mengikuti diklat	60	org	Pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	Jumlah peserta yang mengikuti diklat	Peningkatan kapasitas ASN	Meningkatnya kompetensi ASN	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan kepegawaian daerah	Kepegawaian	Kepegawaian	5.03.02.2.03.06
Bid. Pengembangan SDM	4.05.11.01.28.07	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Diklat Kepemimpinan Tk II	Jumlah peserta yang mengikuti diklat	4	org	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	Jumlah peserta yang mengikuti diklat	Pengembangan kompetensi teknis	Terlaksananya pengembangan kompetensi teknis ASN	Program pengembangan sumber daya manusia	Persentase kompetensi ASN	Pendidikan dan pelatihan	Pendidikan dan pelatihan	5.04.02.2.02.07
Bid. Pengembangan SDM	4.05.11.01.28.09	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Diklat Kepemimpinan Tk IV	Jumlah peserta yang mengikuti diklat	40	org	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	Jumlah peserta yang mengikuti diklat	Pengembangan kompetensi teknis	Terlaksananya pengembangan kompetensi teknis ASN	Program pengembangan sumber daya manusia	Persentase kompetensi ASN	Pendidikan dan pelatihan	Pendidikan dan pelatihan	5.04.02.2.02.07
Bid. Pengembangan SDM	4.05.11.01.28.10	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Diklat latihan prajabatan	Jumlah peserta yang mengikuti diklat	300	org	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	Jumlah peserta yang mengikuti diklat	Pengembangan kompetensi teknis	Terlaksananya pengembangan kompetensi teknis ASN	Program pengembangan sumber daya manusia	Persentase kompetensi ASN	Pendidikan dan pelatihan	Pendidikan dan pelatihan	5.04.02.2.02.07
BKPPD	4.05.11.01.29	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peserta diklat teknis fungsional yang sesuai dengan kompetensi	88	%									
Bid. Pengembangan SDM	4.05.11.01.29.50	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Asesment/uji kompetensi untuk pengisian dan pengangkatan jabatan	jumlah peserta asesment yang akan diseleksi	35	org	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	jumlah peserta asesment yang akan diseleksi	Pengembangan kompetensi teknis		Program pengembangan sumber daya manusia	Persentase kompetensi ASN	Pendidikan dan pelatihan	Pendidikan dan pelatihan	5.04.02.2.02.07
Bid. Pengembangan SDM	4.05.11.01.29	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Diklat sertifikasi pengadaan barang dan jasa	jumlah peserta diklat	80	org	Pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	jumlah peserta diklat	Peningkatan kapasitas ASN	Meningkatnya kompetensi ASN	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan kepegawaian daerah	Kepegawaian	Kepegawaian	5.03.02.2.03.06
Bid. Pengembangan SDM	4.05.11.01.29.54	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Bimtek peningkatan kemampuan aparatur pengelola kepegawaian	jumlah peserta bimtek	70	org	Peningkatan kapasitas ASN	jumlah peserta bimtek	Peningkatan kapasitas ASN	Meningkatnya kompetensi ASN	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan kepegawaian daerah	Kepegawaian	Kepegawaian	5.03.02.2.03.01
Bid. Pengembangan SDM	4.05.11.01.29.55	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Pemberian bantuan ijin belajar, tugas belajar dan ikatan dinas	jumlah pegawai yang mendapatkan beasiswa	140	org	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	jumlah pegawai yang mendapatkan beasiswa	Peningkatan kapasitas ASN	Meningkatnya kompetensi ASN	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan kepegawaian daerah	Kepegawaian	Kepegawaian	5.03.02.2.03.07
Bid. Pengembangan SDM	4.05.11.01.29.51	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepegawaian	Diklat Administrasi Kepegawaian	jumlah peserta diklat	40	org	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Daerah	jumlah peserta diklat	Peningkatan Kapasitas ASN	Meningkatnya kompetensi ASN	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan kepegawaian daerah	Kepegawaian	Kepegawaian	5.03.02.3.06

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	PAGU PROGRAM	URUSAN	KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	x.xx.01	Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan Dasar	Bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	<b>Belanja Tidak Langsung (Gaji)</b>	Jumlah gaji ASN yang tersedia		org ASN	<b>4.439.279.000,00</b>	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN yang tersedia	4.439.279.000,00	Administrasi Keuangan	Pemenuhan jumlah kegiatan administrasi keuangan	<b>4.439.279.000,00</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	<b>9.349.816.431,79</b>	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01.2.02.01
				<b>Belanja Langsung</b>				<b>10.275.564.431,79</b>												
<b>Bidang Sekretariat</b>		Urusan Pemerintahan	Bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Jumlah persentase jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani	100%	%	<b>3.071.506.831,79</b>	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga Harian lepas yang tersedia	1.770.600.000,00	Administrasi Keuangan	Pemenuhan jumlah kegiatan administrasi keuangan	<b>1.770.600.000,00</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					2.12.01.2.02.01
		Urusan Pemerintahan	Bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah lokasi penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	75	orang	321.400.706,00	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah peserta Pelaksanaan Forum OPD dan penyusunan renja	25.000.000,00	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan jumlah kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	<b>95.000.000,00</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah				2.12.01.2.01.02
		Urusan Pemerintahan	Bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis barang yang dibelanjakan	75	orang	105.000.000,00	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah peserta keag. Penyusunan SAKIP dan simoneva	70.000.000,00	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan jumlah kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah				2.12.01.2.01.03
		Urusan Pemerintahan	Bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah belanja cetak dan penggandaan	12	bulan	50.000.000,00	Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	40.000.000,00	Administrasi Umum	Pemenuhan jumlah kegiatan administrasi umum	<b>2.794.937.431,79</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah				2.12.01.2.03.01
		Urusan Pemerintahan	Bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3	rekening	41.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, air, dan internet dan penyediaan koran	321.400.000,00	Administrasi Umum	Pemenuhan jumlah kegiatan administrasi umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah				2.12.01.2.03.02
		Urusan Pemerintahan	Bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis makanan dan minuman yang tersedia	20	Unit	100.000.000,00	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan R2 dan R4 yang di asuransikan	25.000.000,00	Administrasi Umum	Pemenuhan jumlah kegiatan administrasi umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah				2.12.01.2.03.05
		Urusan Pemerintahan	Bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	15	org ASN	170.000.000,79	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Hr pengelola keuangan, panitia pengadaan yang tersedia	97.000.000,00	Administrasi Umum	Pemenuhan jumlah kegiatan administrasi umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah				2.12.01.2.03.07
		Urusan Pemerintahan	Bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	penyediaan Jasa Perkantoran	Tersedianya jasa perkantoran (tenaga THL, pengelola Keu, dan jasa pos)	60	jenis barang	1.799.106.125,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	110.000.000,00	Administrasi Umum	Pemenuhan jumlah kegiatan administrasi umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah				2.12.01.2.03.10
		Urusan Pemerintahan	Bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah peserta pengembangan sumber daya aparatur	12	bulan	250.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	90.000.000,00	Administrasi Umum	Pemenuhan jumlah kegiatan administrasi umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah				2.12.01.2.03.11
		Urusan Pemerintahan	Bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Fasilitasi operasional pelayanan administrasi kependudukan di 24 kecamatan	fasilitasi operasional forum SKPD dan penyusunan rencana program dan pelaporan	10	lokasi	200.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	50.000.000,00	Administrasi Umum	Pemenuhan jumlah kegiatan administrasi umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah				2.12.01.2.03.12
		Urusan Pemerintahan	Bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Laporan Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaksanaan kegiatan forum SKPD dan penyusunan rencana program dan pelaporan		unit	35.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah pembelian mainan anak (di ruang bermain anak dan korden	20.000.000,00	Administrasi Umum	Pemenuhan jumlah kegiatan administrasi umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah				2.12.01.2.03.13

DAK 17.322.870.431,79

DAU 3.589.937.431,79

selisih DAK

-12.389.843.431,79

				<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia		unit	<b>1.295.000.000,00</b>	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan alat alat kebersihan dan bahan pembersih, lampu	61.000.000,00	Administrasi Umum	Pemenuhan jumlah kegiatan administrasi umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah			2.12.01.2 03.14
	Urusan Pemerintah an	Bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan R2 dan R4	3 jenis	mamin	430.000.000,00	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman (HP, rapat, tamu) yang tersedia	100.000.000,00	Administrasi Umum	Pemenuhan jumlah kegiatan administrasi umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah			2.12.01.2 03.17	
	Urusan Pemerintah an	Bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Pengadaan Meubelair	Jumlah barang pengadaan meubelair	75	kali	65.000.000,00	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang tersedia	270.537.431,79	Administrasi Umum	Pemenuhan jumlah kegiatan administrasi umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah			2.12.01.2 03.18	
	Urusan Pemerintah an	Bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor yang dibelanjakan	1 R2 dan 1 R4	unit	350.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	480.000.000,00	Administrasi Umum	Pemenuhan jumlah kegiatan administrasi umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah			2.12.01.2 03.20	
	Urusan Pemerintah an	Bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah lokasi / gedung yang di lakukan pemeliharaan		unit	105.000.000,00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	500.000.000,00	Administrasi Umum	Pemenuhan jumlah kegiatan administrasi umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah			2.12.01.2 03.24	
	Urusan Pemerintah an	Bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dengan baik		unit	280.000.000,00	Pengadaan Mebeleur	Jumlah biaya pengadaan mebeleur yang tersedia	130.000.000,00	Administrasi Umum	Pemenuhan jumlah kegiatan administrasi umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah			2.12.01.2 03.25	
			Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dengan baik			65.000.000,00	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah lokasi gedung / kantor yang di pelihara	115.000.000,00	Administrasi Umum	Jumlah lokasi kantor yang di pelihara		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah			2.12.01.2 03.28	
								Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang tersedia	300.000.000,00	Administrasi Umum	Pemenuhan jumlah kegiatan administrasi umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah			2.12.01.2 03.30	
								Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor yang tersedia	85.000.000,00	Administrasi Umum	Pemenuhan jumlah kegiatan administrasi umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah			2.12.01.2 03.34	
								Pendidikan dan Pelatihan Formal	Biaya pendidikan pegawai yang tersedia	250.000.000,00	Peningkatan Disiplin Sumber Daya Aparatur	Jumlah peserta bintek implementasi peraturan perundang - undangan	<b>250.000.000,00</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah			2.12.01.2 04.09	
<b>Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	Urusan Pemerintah an	Bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan		%	<b>2.900.417.300,00</b>	Pendataan Penduduk non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	jumlah cakupan penduduk yang didata	150.000.000,00	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	<b>1.425.000.000,00</b>	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<b>1.425.000.000,00</b>	Urusan Pemerintah an	2.12.02.2 01.01
	Urusan Pemerintah an	Bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Pendataan Dokumen kependudukan bagi tenaga kerja WNI / WNA	Pendataan dokumen kependudukan bagi WNI / WNA			150.000.000,00	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	jumlah cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	325.000.000,00	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah cakupan kepemilikan dokumen kependudukan		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Pemerintah an	2.12.02.2 01.02	
	Urusan Pemerintah an	Bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Fasilitasi penerbitan KIA	Jumlah cakupan penerbitan KIA			185.000.000,00	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	jumlah cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	800.000.000,00	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah cakupan kepemilikan dokumen kependudukan		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Pemerintah an	2.12.02.2 01.04	
	Urusan Pemerintah an	Bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Penerbitan dokumen kependudukan	Jumlah pengadaan cetak blanko KK, dan ribbon KTP serta jasa cetak KTP el			2.565.417.300,00	Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa penting	jumlah cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	150.000.000,00	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah cakupan kepemilikan dokumen kependudukan		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Pemerintah an	2.12.02.2 01.07	

D  
A  
KD  
A  
K



<b>Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi</b>		Urusan Pemerintahan	Bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI KEPENDUDUKAN</b>	Persentase data kependudukan yang valid dan akurat			<b>644.363.600,00</b>	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota	jumlah data kependudukan yang bisa di akses	350.000.000,00	Penyusunan Profil Kependudukan	jumlah data kependudukan yang bisa di akses	<b>698.027.000,00</b>	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase program pengelolaan profil kependudukan	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<b>698.027.000,00</b>	Urusan Pemerintahan	2.12.05.2.01.01
		Urusan Pemerintahan	Bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Evaluasi dan Monitoring Petugas Registran	Jumlah petugas registran yang diberi honor	365 desa	62.960.000,00	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan	348.027.000,00	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase program pengelolaan profil kependudukan	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Pemerintahan	2.12.05.2.01.02			
				Sosialisasi kebijakan kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan	500 peserta	250.000.000,00													
				Kerjasama Lintas sektoral, fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	Jumlah MOU / kerjasama lintas sektoral	MOU	100.000.000,00													
				Gerakan Pasuruan Sadar Administrasi Kependudukan	Fasilitasi pengurusan dokumen	24 kee	231.403.600,00													
<b>JUMLAH</b>				<b>TOTAL</b>			<b>14.714.843.431,79</b>			<b>14.714.843.431,79</b>			<b>14.714.843.431,79</b>				<b>14.714.843.431,79</b>			

D  
A  
R

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
KECAMATAN PURWODADI		PEMERINTAHAN	UMUM	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	100%	%					Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	XXX01	
				Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Listrik/Air/Telephone	48 Rekening bulan	Rekening/bulan	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Listrik/Air/Telephone	Administrasi umum	Jumlah Pembayaran Listrik/Air/Telephone	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			XXX 012.0302	
				penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan rumah tangga			penyediaan peralatan rumah tangga				Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			XXX012.0313	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Keuangan	orang bulan	Orang/Bulan	penyediaan jasa administrasi keuangan		administrasi umum		Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			XXX012.0307	
				Penyediaan Peralatan rumah tangga	Honor Jasa Kebersihan	Orang Bulan	Orang/Bulan	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Honor Jasa Kebersihan	Administrasi umum	Honor Jasa Kebersihan	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			XXX012.0308	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pembelian ATK	4 Kali	Kali	Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah Pembelian ATK	Administrasi umum	Jumlah Pembelian ATK	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			XXX012.0310	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	4 Eksemplar	Eksemplar	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	Administrasi umum	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			XXX012.0311	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan Rapat dan Tamu	12 Kali	Kali	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan Rapat dan Tamu	Administrasi umum	Jumlah Kegiatan Rapat dan Tamu	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			XXX012.0317	
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar daerah	12 Kali	Kali	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar daerah	Administrasi umum	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar daerah	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			XXX012.0318	
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Honor Tenaga Kontrak / THL		Orang/Bulan	penyediaan administrasi tugas ASN		Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			XXX012.0202	
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100%	%					Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			XXX01	
				Pemeliharaan berkala rumah dinas	Jumlah Pemeliharaan berkala rumah dinas	1 paket	Paket	Pemeliharaan berkala rumah dinas	Jumlah Pemeliharaan berkala rumah dinas	Administrasi umum	Jumlah Pemeliharaan berkala rumah dinas	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			XXX012.0327	
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	1 paket	Paket	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Administrasi umum	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			XXX012.0322	
				Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan	1 paket	Paket	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan	Administrasi umum	Jumlah Pemeliharaan	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			XXX012.0328	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan	1 paket	Paket	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan	Administrasi umum	Jumlah Pemeliharaan	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			XXX012.0330	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan	1 paket	Paket	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan	Administrasi umum	Jumlah Pemeliharaan	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			XXX012.0334	
				PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	Nilai IKM Kecamatan	100%	%					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan			70102	
				Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM	2 Kali	kali	koordinasi /sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait		koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			701022,0102	
				koordinasi administrasi sosial budaya	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	2 Kali	kali	koordinasi /sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait		koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			701022,0102	

				penyusunan LAKIP	Jumlah pelaporan kegiatan dan ke			perencanaan kegiatan penyelenggaraan kepada masyarakat dikecamatan		penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan			701022.0201	
				Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemerintahan Kelurahan	2 kali	kali	koordinasi /sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait		koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan			701022.0101	
				PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN KECAMATAN	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang di Bina	100%	%					Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat			70103	
				Forum perencanaan dan pembangunan tingkat kecamatan	Jumlah Kegiatan	12 Kali	kali	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan	koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat			701032.0101	
				Peningkatan manakib dan spiritual	Jumlah Kegiatan			Peningkatan efektifitas kegiatan manaqib di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan	koordinasi kegiatan manaqib dan spiritual desa	Jumlah kegiatan spiritual	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat			701032.0103	
				KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN	Persentase Jumlah Kejadian Sesuai dengan Kewenangan Kecamatan	100%	%					Program Koordinasi dan ketertiban umum	Persentase Jumlah Kejadian Sesuai dengan Kewenangan Kecamatan			70104	
				Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Kelenstraman dan Ketertiban Kecamatan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi	6 Kali	kali	harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat		Koordinasi upaya penyelenggaraan kelenstraman dan ketertiban umum	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi	Program Koordinasi dan ketertiban umum	Persentase Jumlah Kejadian Sesuai dengan Kewenangan Kecamatan			701042.01	
				peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan tindak kriminal	jumlah kejadian yang terselesaikan			sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia dan TNI dari instansi vertikal di wilayah kecamatan		Koordinasi upaya penyelenggaraan kelenstraman dan ketertiban umum	Jumlah Koordinasi	Program Koordinasi dan ketertiban umum	Persentase Jumlah Kejadian Sesuai dengan Kewenangan Kecamatan			701042.0101	



STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	PAGU PROGRAM	URUSAN	KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
KECAMATAN PANDAAN		PEMERINTAHAN	UMUM	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan</b>	<b>100</b>	%	<b>914.925.000</b>			<b>914.925.000</b>			<b>914.925.000</b>		Kecamatan	<b>914.925.000</b>	Kewilayahan		
				Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Yang dibayar	4	Rekening	49.685.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Yang dibayar	49.685.000	Administrasi Umum	Jumlah Rekening Yang dibayar	49.685.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		49.685.000		x.xx.01.2.03.02
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang diberi honor	8	Orang	49.940.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang diberi honor	49.940.000	Administrasi Umum	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang diberi honor	49.940.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		49.940.000		x.xx.01.2.03.07
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor yang diberi honor	2	Orang	58.500.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor yang diberi honor	58.500.000	Administrasi Umum	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor yang diberi honor	58.500.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		58.500.000		x.xx.01.2.03.08
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis belanja ATK yang dibeli	8	jenis	20.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis belanja ATK yang dibeli	20.000.000	Administrasi Umum	Jumlah jenis belanja ATK yang dibeli	20.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		20.000.000		x.xx.01.2.03.10
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis belanja barang cetakan dan penggandaan yang dilakukan	1	Jenis	18.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis belanja barang cetakan dan penggandaan yang dilakukan	18.000.000	Administrasi Umum	Jumlah jenis belanja barang cetakan dan penggandaan yang dilakukan	18.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		18.000.000		x.xx.01.2.03.11
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis belanja alat listrik yang dibeli	3	Jenis	5.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis belanja alat listrik yang dibeli	5.000.000	Administrasi Umum	Jumlah jenis belanja alat listrik yang dibeli	5.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		5.000.000		x.xx.01.2.03.12
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis belanja perlengkapan dan peralatan kantor yang dibeli	3	Jenis	30.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis belanja perlengkapan dan peralatan kantor yang dibeli	30.000.000	Administrasi Umum	Jumlah jenis belanja perlengkapan dan peralatan kantor yang dibeli	30.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		30.000.000		x.xx.01.2.03.13
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis mamin rapat yang disediakan	2	Jenis	110.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis mamin rapat yang disediakan	110.000.000	Administrasi Umum	Jumlah jenis mamin rapat yang disediakan	110.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		110.000.000		x.xx.01.2.03.17
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah aparatur yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah	4	Orang	150.000.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah aparatur yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah	150.000.000	Administrasi Umum	Jumlah aparatur yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah	150.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		150.000.000		x.xx.01.2.03.18

				Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah Pegawai Non PNS yang diberi honor	11	Orang	420.200.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang diberi honor	420.200.000	Administrasi Umum	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang diberi honor	420.200.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		420.200.000		x.xx.01.2.03.25
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	6	set	3.600.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	3.600.000	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	3.600.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		3.600.000		x.xx.01.2.04.02
				<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>264.500.000</b>			<b>264.500.000</b>			<b>264.500.000</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		<b>264.500.000</b>		
				Pengadaan Meubelair	Jumlah jenis pengadaan mebeular	2	Jenis	7.000.000	Pengadaan Mebeleur	Jumlah jenis pengadaan mebeular	7.000.000	Administrasi Umum	Jumlah jenis pengadaan mebeular	7.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		7.000.000		x.xx.01.2.03.25
				Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan kantor	3	Jenis	119.500.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan kantor	119.500.000	Administrasi Umum	Jumlah jenis pengadaan peralatan kantor	119.500.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		119.500.000		x.xx.01.2.03.24
				Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan yang dilaksanakan	1	Jenis	30.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan yang dilaksanakan	30.000.000	Administrasi Umum	Jumlah jenis pemeliharaan yang dilaksanakan	30.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		30.000.000		x.xx.01.2.03.28
				Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jenis kendaraan Dinas yang dipelihara	2	Jenis	95.000.000	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jenis kendaraan Dinas yang dipelihara	95.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Jenis kendaraan Dinas yang dipelihara	95.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		95.000.000		x.xx.01.2.03.30
				Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara	3	Jenis	13.000.000	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara	13.000.000	Administrasi Umum	Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara	13.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		13.000.000		x.xx.01.2.03.34
				<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Nilai IKM</b>			<b>5.729.708.000</b>			<b>5.729.708.000</b>							<b>5.729.708.000</b>		
					<b>Nilai SAKIP</b>															
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Kutorejo	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	5	Kali	225.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	225.000.000	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai IKM dan SAKIP		225.000.000		7.01.02.2.01.02
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Jogosari	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	5	Kali	225.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	225.000.000	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai IKM dan SAKIP		225.000.000		7.01.02.2.01.02

				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Pandaan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	5	Kali	225.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	225.000.000	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai IKM dan SAKIP		225.000.000		7.01.02.2.01.02
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Petungasri	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	5	Kali	225.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	225.000.000	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai IKM dan SAKIP		225.000.000		7.01.02.2.01.02
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel Kutorejo	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	5	Kali	1.070.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	1.070.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarpras yang dibangun		Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Nilai IKM dan SAKIP		1.070.000.000		7.01.03.2.02.02
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel Jogosari	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	5	Kali	919.152.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	919.152.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarpras yang dibangun		Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Nilai IKM dan SAKIP		919.152.000		7.01.03.2.02.02
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel Pandaan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	5	Kali	784.083.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	784.083.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarpras yang dibangun		Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Nilai IKM dan SAKIP		784.083.000		7.01.03.2.02.02
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel Petungasri	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	5	Kali	869.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	869.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarpras yang dibangun		Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Nilai IKM dan SAKIP		869.000.000		7.01.03.2.02.02
				Pemberdayaan Masyarakat Kel Kutorejo	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	5	Kali	99.152.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	99.152.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Nilai IKM dan SAKIP		99.152.000		7.01.03.2.02.03
				Pemberdayaan Masyarakat Kel Jogosari	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	5	Kali	250.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	250.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Nilai IKM dan SAKIP		250.000.000		7.01.03.2.02.03
				Pemberdayaan Masyarakat Kel Pandaan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	5	Kali	385.069.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	385.069.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Nilai IKM dan SAKIP		385.069.000		7.01.03.2.02.03
				Pemberdayaan Masyarakat Kel Petungasri	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	5	Kali	300.152.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	300.152.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Nilai IKM dan SAKIP		300.152.000		7.01.03.2.02.03
				Penyusunan LAKIP dan Laporan Keuangan	Tersusunnya Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan	1	kali	39.000.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan	39.000.000	Administrasi Keuangan	Tersusunnya Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai IKM dan SAKIP		39.000.000		x.xx.01.2.02.06

				Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Terlaksananya Kegiatan Peringatan HUT Kemerdekaan RI	1	kali	50.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Kegiatan Peringatan HUT Kemerdekaan RI	50.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan Peringatan HUT Kemerdekaan RI		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai IKM dan SAKIP		50.000.000		7.01.05.2.01.01
				Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Jumlah aparatur desa yang memiliki keahlian pengelolaan keuangan desa	54	orang	4.100.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa yang memiliki keahlian pengelolaan keuangan	4.100.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	Jumlah aparatur desa yang memiliki keahlian pengelolaan keuangan desa		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Nilai IKM dan SAKIP		4.100.000		7.01.06.2.01.02
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	1	kali	60.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	60.000.000	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai IKM dan SAKIP		60.000.000		x.xx.01.2.04.09
				<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN KECAMATAN</b>	<b>Jumlah Lembaga Masyarakat Yang di Bina</b>	<b>1</b>	<b>%</b>	<b>62.850.000</b>			<b>62.850.000</b>							<b>62.850.000</b>		
				Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Manaqib	18	Kali	55.000.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Kegiatan Manaqib	55.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan Manaqib		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang di Bina		55.000.000		7.01.05.2.01.04
				Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan	3	Kali	7.850.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan	7.850.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang di Bina		7.850.000		7.01.03.2.01.03
				<b>KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN</b>	<b>Persentase Jumlah Kejadian Sesuai dengan Kewenangan Kecamatan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>14.625.000</b>			<b>14.625.000</b>							14.625.000		7.01.04.2

				Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan kejahatan	Jumlah rapat evaluasi permasalahan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan	5	Kali	14.625.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah rapat evaluasi permasalahan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan	14.625.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah rapat evaluasi permasalahan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Jumlah Kejadian Sesuai dengan Kewenangan Kecamatan		14.625.000		7.01.04.2.01
--	--	--	--	---	--	---	------	------------	---	--	------------	---	--	--	--	---	--	------------	--	--------------

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	PAGU PROGRAM	URUSAN	KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Belanja tidak langsung (gaji)					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Administrasi Keuangan			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					X XX 01 2.02 01
				<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Pekantor	12 Bulan	Rekening	517.412.000												X XX 01
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Tersedianya Jasa Perkantoran	12 bulan	12 orang/bulan	2.500.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	250.000.000	Administrasi Keuangan	Adanya Administrasi Keuangan	252.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kewilayahan	657.500.000		X XX 01
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	tersusunnya laporan capaian kinerja dan laporan keuangan	1 tahun	Laporan	2.500.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	2.500.000	Administrasi Keuangan	Adanya Administrasi Keuangan	252.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kewilayahan	657.500.000		
				Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Rekening	52.800.000	Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	52.800.000	Administrasi Umum	Adanya Administrasi Umum	383.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kewilayahan	657.500.000		
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Orang	41.476.050	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	41.476.050	Administrasi Umum	Adanya Administrasi Umum	383.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kewilayahan	657.500.000		
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	23.723.950	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	23.723.950	Administrasi Umum	Adanya Administrasi Umum	383.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kewilayahan	657.500.000		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	12.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12.500.000	Administrasi Umum	Adanya Administrasi Umum	383.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kewilayahan	657.500.000		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	5.000.000	Administrasi Umum	Adanya Administrasi Umum	383.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kewilayahan	657.500.000		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000	Administrasi Umum	Adanya Administrasi Umum	383.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kewilayahan	657.500.000		

				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	50.000.000	Administrasi Umum	Adanya Administrasi Umum	383.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kewilayahan	657.500.000		
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50.000.000	Administrasi Umum	Adanya Administrasi Umum	383.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kewilayahan	657.500.000		
				Penyediaan Pakaian Kerja	Tersedianya pakaian kerja	30	stel	16.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	adanya pakaian dinas untuk pegawai	16.500.000	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	meningkatnya disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur	21.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kewilayahan	657.500.000		
				<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor	1 tahun	1 Tahun	138.000.000												
				Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	Terpeliharanya rutin/berkala rumah dinas	1 kali	1 kali	15.000.000	Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	Terpeliharanya rutin/berkala rumah dinas	15.000.000	Administrasi Umum	Adanya Administrasi Umum	383.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kewilayahan	657.500.000		
				Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya rutin / berkala gedung kantor	1 kali	1 kali	15.000.000	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya rutin / berkala gedung kantor	15.000.000	Administrasi Umum	Adanya Administrasi Umum	383.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kewilayahan	657.500.000		
				Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	1 tahun	1 Tahun	75.000.000	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	75.000.000	Administrasi Umum	Adanya Administrasi Umum	383.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kewilayahan	657.500.000		
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Kantor	Adanya Taman kantor yang terpelihara	1 kali	1 kali	10.000.000	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	adanya peralatan gedung kantor yang terpelihara	10.000.000	Administrasi Umum	Adanya Administrasi Umum	383.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kewilayahan	657.500.000		
				Pemeliharaan rutin / berkala mebelair	Terpeliharanya mabelair	1 kali	1 kali	8.000.000	Pemeliharaan rutin / berkala mebelair	Terpeliharanya mabelair	8.000.000	Administrasi Umum	Adanya Administrasi Umum	383.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kewilayahan	657.500.000		
				Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 kali	1 kali	15.000.000	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	15.000.000	Administrasi Umum	Adanya Administrasi Umum	383.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kewilayahan	657.500.000		
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	Terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan kecamatan	1 tahun	1 Tahun	1.182.652.000												
				Sosialisasi peraturan perundang-undangan	terlaksananya peraturan perundang-undangan	1 kali	1 kali	5.000.000	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	terlaksananya peraturan perundang-undangan	5.000.000	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	meningkatnya disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur	21.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kewilayahan	657.500.000		

				Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang kependudukan	meningkatnya pelayanan publik dlam bidang kependudkan	1 tahun	1 Tahun	5.000.000	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	meningkatnya efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	5.000.000	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	terselenggaranya urusan pemerintahan yang tudak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	5.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik	Kewilayahan	324.500.000		
				Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Gratitunon	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Gratitunon	1 tahun	1 Tahun	803.152.000	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan gratitunon	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Gratitunon	803.152.000	kegiatan pemberdayaan kelurahan	terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	1.169.152.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	terlaksananya pemberdayan masyaraat desa dab kelurahan	Kewilayahan	1.239.152.000		
				Pemberdayaan di kelurahan Gratitunon	terlaksananya pemberdayaan di kelurahan gratitunon	1 tahun	1 Tahun	366.000.000	Pemberdayaan di kelurahan Gratitunon	terlaksananya pemberdayaan di kelurahan gratitunon	366.000.000	kegiatan pemberdayaan kelurahan	terlaksananya kegiatan pemeberdayaan kelurahan	1.169.152.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	terlaksananya pemberdayan masyaraat desa dab kelurahan	Kewilayahan	1.239.152.000		
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAN MASYAAKAT DESA/KELURAHAN KECAMATAN</b>	terselenggaranya pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan	1 tahun	1 Tahun	507.500.000												
				Forum perencanaan pembanguann tingkat kecamatan	terlaksananya musrenbang kecamatan	1 kali	1 kali	15.000.000	Koordinasi / sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan isntansi vertikal terkait	terlaksananya koordinasi musrenbang tingkat kecamatan	15.000.000	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan tingkat kecamatan	319.500.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik	Kewilayahan	324.500.000		
				Peningkatan kapasitas pemerintahan kelurahan	meningkatnya kapasitas pemerintahan kelurahan	1 tahun	1 Tahun	304.500.000	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	meningkatnya efektifitas kegiatanpemerintahan di tingkat kecamatan	304.500.000	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan tingkat kecamatan	319.500.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik	Kewilayahan	324.500.000		
				Pelaksanaan pembinaan mental spiritual dan kegiatan keagamaan lainnya	terlaksananya pembinaan mental spiritual dan kegiatan keagamaan lainnya	12 kali	12 kali	60.000.000	Peninghkatan efektifitas kegiatan pemberdayan masyarakat di wilayah kecamatan	meningkatya efektifitas kegiatan pemberdayan masyarakat di wilayah kecamatan	60.000.000	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	terkoordinirya kegiatan pemberdayaan desa	70.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	terlaksananya pemberdayan masyaraat desa dab kelurahan	Kewilayahan	1.239.152.000		
				Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	terlaksananya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	1 kali	1 kali	10.000.000	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintahan dan swasta di wilayah kerja kecamatan	terlaksananya sinkronisasi kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintahan dan swasta di wilayah kerja kecamatan	10.000.000	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	terkoordinirya kegiatan pemberdayaan desa	70.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	terlaksananya pemberdayan masyaraat desa dab kelurahan	Kewilayahan	1.239.152.000		



				Bimtek pengelolaan keuangan desa bagi perangkat desa	terlaksananya bimtek pengelolaan keuangan desa	1 kali	1 kali	50.000.000	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	50.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	terfasilitasinya rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahn desa	68.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	terlaksananya program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kewilayahan	68.000.000		
				Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya	1 kali	1 kali	60.000.000	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian Bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan	60.000.000	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	60.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHN UMUM	terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintahn umum	Kewilayahan	60.000.000		
				koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan	terlaksananya koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan	1 kali	1 kali	8.000.000	Fasilitasi administrasi tata pemerintahn desa	terfasilitasinya administrasi tata pemerintahan	8.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	terfasilitasinya rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahn desa	68.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	terlaksananya pembinaan dan pengawsan pemerintahan desa	Kewilayahan	68.000.000		
				<b>PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN</b>	Terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	1 kali	1 kali	20.000.000												
				Peningkatan kerjasama dengan aparat kemanan dalam teknik dan pencegahan kejahatan	meningkatnya kerjasama dengan aparat kemanan dalam teknik dan pencegahan kejahatan	1 tahun	1 Tahun	10.000.000	sinergitas dengan kepolisia negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatn	terlaksananya sinergitas dengan aparat keamanan	10.000.000	koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketrtiban umum	terkoordinasinya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	10.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	terlaksananya program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kewilayahan	10.000.000		

				Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan	terfasilitasinya dan terkoordinirnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan	1 kali	1 kali	10.000.000	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	terfasilitasinya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	10.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	terfasilitasinya rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahn desa	68.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	terlaksananya pembinaan dan pengawsan pemerintahan desa	Kewilayahan	68.000.000		
--	--	--	--	--	---	--------	--------	------------	--	--	------------	---	---	------------	--	---	-------------	------------	--	--

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	PAGU PROGRAM	URUSAN	KODE	KETERANGAN
KECAMATAN WONOREJO	2	PEMERINTAHAN	UMUM	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan kantor</b>	100%	%							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Kecamatan		Unsur Kewilayahan	XX 01	
			1	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Listrik, air, dan internet	3	Rek/Bulan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Listrik, air, dan internet		Administrasi Umum	Jumlah Pembayaran Listrik, air, dan internet	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				XX 01 2.03 02	
			2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pegawai Yang diberi Honor	7	Orgn/Bln		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pegawai Yang diberi Honor		Administrasi Umum	Jumlah Pegawai Yang diberi Honor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				XX 01 2.03 07	
			3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor	4	Kali		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor		Administrasi Umum	Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				XX 01 2.03 10	
			4	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan	4	Kali		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan		Administrasi Umum	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				XX 01 2.03 11	
			5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan Rapat	12	Bulan		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan Rapat		Administrasi Umum	Jumlah Kegiatan Rapat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				XX 01 2.03 17	
			6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar daerah	12	Bulan		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar daerah		Administrasi Umum	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				XX 01 2.03 18	
			7	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah Pembayaran Honor THL dan TPKL	11	Orgn/Bln		PENYEDIAAN ADMINISTRASI RELAKSASANAAN TUGAS ASN	Jumlah Pembayaran Honor THL dan TPKL		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
				<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kondisi baik</b>	100%	%							<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kondisi baik</b>				XX 01	
			8	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas	1	Kali		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas		Administrasi Umum	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik				XX 01 2.03 20	
			9	pengadaan Mebelair	Jumlah Pengadaan Mebelair	4	Jenis		Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair		Administrasi Umum	Jumlah Pengadaan Mabelair	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik				XX 01 2.03 25	
			10	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	7	Unit		Pengadaan Peralatan Kantor	Pengadaan Peralatan Kantor		Administrasi Umum	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik				XX 01 2.03 24	
			11	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	1	Kali		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Administrasi Umum	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik				XX 01 2.03 28	
			12	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Yang Dipelihara	9	Kendaraan		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Administrasi Umum	Jumlah Kendaraan Yang Dipelihara	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik				XX 01 2.03 30	
			13	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	12	Bulan		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Administrasi Umum	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik				XX 01 2.03 34	
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan</b>	82	Nilai													
					<b>Nilai Sakip Kecamatan</b>	64,11	Nilai													
			22	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang berkualitas	12	Bulan		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>						
			23	fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi	1	Laporan		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>						
			24	Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pembinaan	2	Kegiatan		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan	Kecamatan				
			25	Pembinaan Aparatur Pemdes Di Bidang Manajemen Desa	Jumlah peserta sosialisasi	1	Kegiatan		Pembinaan Aparatur Pemdes Di Bidang Manajemen Desa			Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Suparatlumber Daya A		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESAKELURAHAN</b>	<b>Jumlah Organisasi Masyarakat Yang dibina</b>	2	Organisasi												7 01 03	
					<b>Persentase usulan Musrenbang yang terfasilitasi</b>	60%	%													
			26	fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	Jumlah fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	1	Keg					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan					701320103	
			28	Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa Yang mengikuti Musrenbang	7	Desa		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa Yang mengikuti Musrenbang		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Yang mengikuti Musrenbang	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat				7 01 03 2.01 01	
				<b>PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN</b>	<b>Rasio Jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai kewenangan kecamatan</b>	100	%												7 01 04	
			29	Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan tindak kriminal	jumlah Laporan Koordinasi	12	Bulan		Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterbitan Umum		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
			30	fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	1	Keg		Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterbitan Umum	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Rasio Jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai kewenangan kecamatan</b>				7 01 04 2.01	

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	PAGU PROGRAM	URUSAN	KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Lekom				Belanja tidak langsung (gaji)					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Administrasi Keuangan			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Kecamatan		Kewilayahan	X XX 01 2.02 01
				<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	100	%								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan		624.700.000		7.01.01
												Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Administrasi Kantor	345.900.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.03
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Air, Listrik, Telepon dan Internet	60	Rekening	47.540.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik/air/telpon/internet	47.540.000	Administrasi Umum			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.03.02
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan	8	Orang	36.000.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai yang diberikan honor	36.000.000	Administrasi Umum			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.03.07
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor jasa kebersihan	1	Orang	19.000.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor jasa kebersihan	19.000.000	Administrasi Umum			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.03.08
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor	50	Jenis	13.600.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor	13.600.000	Administrasi Umum			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.03.10
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	10	Jenis	5.600.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	5.600.000	Administrasi Umum			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.03.11
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu	24	Kali	30.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu	30.000.000	Administrasi Umum			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.03.17

				Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	10	Orang	50.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor	50.000.000	Administrasi Umum			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.03.18
												Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Dokumen administrasi Keuangan	268.800.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.02
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah pembayaran honor TPKL dan THL	12	Orang	268.800.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran honor TPKL dan THL	268.800.000	Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Dokumen administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.02.02
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pembelian komponen	8	Jenis	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pembelian komponen	3.000.000	Administrasi Umum			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.03.12
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	372	Eksemplar	2.160.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	2.160.000	Administrasi Umum			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.03.15
												Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Tercukupinya pakaian aparatur	10.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.04
				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tercukupinya pakaian aparatur	10	Orang	10.000.000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Penyediaan Pakaian Dinas	10.000.000	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Tercukupinya pakaian aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.04.05
				<b>PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik	100	%								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				
				Pengadaan Mebelair	Jumlah pengadaan mebelair	10	Unit	15.000.000	Pengadaan Mebelair	Jumlah pengadaan mebelair	15.000.000	Administrasi Umum			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.03.19
				Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	4	Unit	15.000.000	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	15.000.000	Administrasi Umum			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.03.13
				Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	15	Jenis	10.000.000	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	10.000.000	Administrasi Umum			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.03.21

				Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	16	Unit	4.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	4.000.000	Administrasi Umum			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.03.03
				Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang kantor yang terpelihara	3	Unit	30.000.000	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang kantor yang terpelihara	30.000.000	Administrasi Umum			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.03.28
				Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5	Unit	60.000.000	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	60.000.000	Administrasi Umum			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.03.30
				Pemeliharaan Rutin/berkala Taman Kantor	Jumlah taman yang dilakukan pemeliharaan	1	Bulan	5.000.000	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah taman yang dilakukan pemeliharaan	5.000.000	Administrasi Umum			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.03.32
				<b>PROG. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	Nilai SAKIP Kecamatan Nilai SKM Kecamatan	62 85	Nilai								PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan		72.900.000		7.01.06
												Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	60.900.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan				7.01.06.2.01
									Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya koordinasi & pembinaan antara kec & desa	60.900.000			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan					
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya koordinasi & pembinaan antara kec & desa	2	Keg.	36.900.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya koordinasi & pembinaan antara kec & desa	36.900.000			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan					







				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Terlaksananya kegiatan kamtibmas di wil kec lekok	1	Keg.	10.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi kamtibmas di lingkungan kecamatan	10.000.000									7.01.04.2.01.01	
								<b>875.000.000</b>			<b>875.000.000</b>			<b>875.000.000</b>							

Pasuruan, 2020  
Camat Lekom,

Ttd.

FAUZAN, S.Pd, MM  
Pembina  
NIP. 19670615 198602 1 001

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	PAGU PROGRAM	URUSAN	KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Kec. Rejoso				Belanja tidak langsung (gaji)					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Administrasi Keuangan			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Kecamatan		Kewilayahan	X XX 01 2.02 01
				<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	100	%								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan		646.623.500		7.01.01
												Administrasi keuangan	Persentase Pemenuhan Dokumen administrasi Keuangan	254.200.000						7.01.01.2.02
									Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak dan THL	250.200.000	Administrasi keuangan	Persentase Pemenuhan Dokumen administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.02.02
									Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	4.000.000	Administrasi keuangan	Persentase Pemenuhan Dokumen administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.02.06
												Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Administrasi Kantor	382.423.500						7.01.01.2.03
				Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik/air/telpon/internet	48	Rek.	48.450.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik/air/telpon/internet	48.450.000	Administrasi Umum			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.03.02
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	10	Unit	6.000.000	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	6.000.000	Administrasi Umum			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.03.03
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai yang diberikan honor	9	Org/Bln	36.360.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai yang diberikan honor	36.360.000	Administrasi Umum			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.03.07









				Fasl. Penegakan Perda/Perkada	Terlaksananya fasilitasi penegakan perda/perkada	1	Keg.	8.895.000				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Implementasi ketentuan yang ada dalam Perda	8.895.000					7.01.04.2.02
									Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tersosialisasikan tatanan baru / new normal	8.895.000								7.01.04.2.02.01
				Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan	Persentase kantrantibmas yang ditangani	3	Keg.	4.500.000				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan	4.500.000					7.01.04.2.01
									Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Terlaksananya Koordinasi FORKOMPIMKA	4.500.000								7.01.04.2.01.01
								<b>840.000.000</b>			<b>840.000.000</b>			<b>840.000.001</b>				<b>840.000.000</b>	

Pasuruan, 2020  
CAMAT REJOSO,

Ttd.

KOMARI, SH, MM  
Pembina  
NIP. 19660904 198702 1 004





				Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor			16.380.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	16.380.000	Administrasi Umum							7.01.21.01.2.03.13.	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional			95.000.000	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional	98.000.000	Administrasi Umum								7.01.21.01.2.03.30.
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>				-												
				Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Peningkatan kegiatan sosial masyarakat			132.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan kegiatan sosial masyarakat	110.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemerintahan Desa								7.01.21.03.2.01.03.
				Koordinasi pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya pelatihan dan pembinaan			20.800.000	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan	97.680.000	Koordinasi Kegiatan Pemerintahan Desa								7.01.21.02.2.01.01
				Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan Tingkat Kecamatan	Peningkatan fasilitasi pemerintahan tingkat kecamatan			3.000.000												
				Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang tepat waktu			11.020.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang tepat waktu	11.020.000	Koordinasi Kegiatan Pemerintahan Desa								7.01.21.03.2.01.02.
				<b>PROGRAM KETENTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				-												
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentaman dan Ketertiban Kecamatan Winongan	Persentase Kantrantibmas yang ditangani			50.880.000	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pantau Wilayah	4.320.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum								7.01.21.04.2.01.01.
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN</b>				-												
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja			12.000.000	Penyusunan Laporean Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja		Administrasi Keuangan								7.01.21.01.2.02.06.
				Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Peningkatan Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan Desa															

784.000.000

784.000.000

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	PAGU PROGRAM	URUSAN	KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Belanja tidak langsung (gaji)				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Administrasi Keuangan			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					X XX 01 2.02 01
KECAMATAN PRIGEN	18	PEMERINTAHAN	UMUM	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor</b>	100	%													
				Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Listrik/Air/Telephone	8	Rekening/Bulan	47.280.000	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Listrik/Air/Telephone	47.280.000	Administrasi Umum	Jumlah Pembayaran Listrik/Air/Telephone	47.280.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Kecamatan	643.552.500	Unsur Kewilayahaan	X XX 01 2.03 02
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelola Keuangan	12	Bulan	44.700.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelola Keuangan	44.700.000	Administrasi Umum	Jumlah Pembayaran Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelola Keuangan	44.700.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Kecamatan	643.552.500	Unsur Kewilayahaan	X XX 01 2.03 07
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pembelian ATK	12	Bulan	28.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pembelian ATK	28.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Pembelian ATK	28.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Kecamatan	643.552.500	Unsur Kewilayahaan	X XX 01 2.03 10
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	8.252.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	8.252.500	Administrasi Umum	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	8.252.500	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Kecamatan	643.552.500	Unsur Kewilayahaan	X XX 01 2.03 11
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen listrik/penerangan kantor	1	Tahun	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen listrik/penerangan kantor	5.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Komponen listrik/penerangan kantor	5.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Kecamatan	643.552.500	Unsur Kewilayahaan	X XX 01 2.03 12
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan Rapat dan Tamu	12	Bulan	50.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan Rapat dan Tamu	50.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Kegiatan Rapat dan Tamu	50.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Kecamatan	643.552.500	Unsur Kewilayahaan	X XX 01 2.03 17
				Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1	Tahun	30.000.000	Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	30.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	30.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Kecamatan	643.552.500	Unsur Kewilayahaan	X XX 01 2.03 18
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Honor Tenaga Kontrak / THL	12	Bulan	355.100.000	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		355.100.000	Administrasi Umum		355.100.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Kecamatan	643.552.500	Unsur Kewilayahaan	x.xx.01.2.02 02
				<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik</b>	<b>100</b>	<b>%</b>													
				Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor Yang Terawat	1	Tahun	7.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor Yang Terawat	7.000.000	Administrasi Umum	Gedung Kantor Yang Terawat	7.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Kecamatan	74.220.000	Unsur Kewilayahaan	X XX 01 2.03 28
				Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas yang dipelihara	12	Bulan	49.420.000	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas yang dipelihara	49.420.000	Administrasi Umum	Jumlah kendaraan Dinas yang dipelihara	49.420.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Kecamatan	74.220.000	Unsur Kewilayahaan	X XX 01 2.03 30
				Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	12	Bulan	17.800.000	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	17.800.000	Administrasi Umum	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	17.800.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Kecamatan	74.220.000	Unsur Kewilayahaan	X XX 01 2.03 34
				<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Nilai IKM Kecamatan</b>	<b>84</b>	<b>Skor</b>													
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Ledug	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	12	Bulan	154.397.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	154.397.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	154.397.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Kecamatan	4.070.323.500	Unsur Kewilayahaan	7.01.02.2.01 02
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Pecalukan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	12	Bulan	221.183.500	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	221.183.500	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	221.183.500	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Kecamatan	4.070.323.500	Unsur Kewilayahaan	7.01.02.2.01 02
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Prigen	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	12	Bulan	170.037.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	170.037.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	170.037.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Kecamatan	4.070.323.500	Unsur Kewilayahaan	7.01.02.2.01 02
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel Ledug	Jumlah Sarpras yang dibangun	1	Tahun	818.406.400	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	818.406.400	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarpras yang dibangun	818.406.400	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pembangunan wilayah yang dilaksanakan	Kecamatan	4.070.323.500	Unsur Kewilayahaan	7.01.03.2.02 02
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel Pecalukan	Jumlah Sarpras yang dibangun	1	Tahun	818.406.400	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	818.406.400	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarpras yang dibangun	818.406.400	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pembangunan wilayah yang dilaksanakan	Kecamatan	4.070.323.500	Unsur Kewilayahaan	7.01.03.2.02 02
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel Prigen	Jumlah Sarpras yang dibangun	1	Tahun	818.406.400	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	818.406.400	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarpras yang dibangun	818.406.400	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pembangunan wilayah yang dilaksanakan	Kecamatan	4.070.323.500	Unsur Kewilayahaan	7.01.03.2.02 02
				Pemberdayaan Masyarakat Kel. Ledug	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	1	Tahun	350.745.600	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	350.745.600	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	350.745.600	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pembangunan wilayah yang dilaksanakan	Kecamatan	4.070.323.500	Unsur Kewilayahaan	7.01.03.2.02 03

				Pemberdayaan Masyarakat Kel. Pecalukan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	1	Tahun	350.745.600	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	350.745.600	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	350.745.600	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pembangunan wilayah yang dilaksanakan	Kecamatan	4.070.323.500	Unsur Kewilayahan	7.01.03.2.02.03
				Pemberdayaan Masyarakat Kel.Prigen	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	1	Tahun	350.745.600	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	350.745.600	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	350.745.600	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pembangunan wilayah yang dilaksanakan	Kecamatan	4.070.323.500	Unsur Kewilayahan	7.01.03.2.02.03
				Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Tertaksananya Kegiatan Pembinaan	12	Bulan	17.250.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	17.250.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	17.250.000	Program Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Kecamatan	4.070.323.500	Unsur Kewilayahan	7.01.03.2.02.03
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN KECAMATAN</b>	<b>Jumlah Lembaga Masyarakat Yang di Bina</b>	<b>100</b>	<b>%</b>													
				Forum Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan	Tertaksananya Musrenbang RKPD tingkat kecamatan	1	Kali	10.480.000	Koordinasi / sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Desa Yang mengikuti Musrenbang	10.480.000	Koordinasi / sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Desa Yang mengikuti Musrenbang	10.480.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Terbentuknya SDM yang memadai	Kecamatan	39.130.000	Unsur Kewilayahan	7.01.02.2.01.01
				Koordinasi pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi	12	Bulan	20.700.000	Peningkatan Efektifitas pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	20.700.000	Peningkatan Efektifitas pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	20.700.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Terbentuknya SDM yang memadai	Kecamatan	39.130.000	Unsur Kewilayahan	7.01.03.2.01.03
				Fasilitasi kegiatan Sosial Masyarakat	Jumlah Fasilitasi	12	Bulan	7.950.000	Peningkatan Efektifitas pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Tertaksananya Kegiatan Fasilitasi	7.950.000	Peningkatan Efektifitas pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Tertaksananya Kegiatan Fasilitasi	7.950.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Terbentuknya SDM yang memadai	Kecamatan	39.130.000	Unsur Kewilayahan	7.01.03.2.01.03
				<b>PROGRAM KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN</b>	<b>Persentase jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan kecamatan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>													
				Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Kecamatan	Tertaksananya koordinasi dengan aparat keamanan	12	Bulan	14.450.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah rapat evaluasi permasalahan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan	14.450.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah rapat evaluasi permasalahan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan	14.450.000	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tertaksananya Ketenteraman Dan Ketertiban Kecamatan	Kecamatan	14.450.000	Unsur Kewilayahan	7.01.04.2.02.01

Prigen, Juni 2020  
CAMAT PRIGEN

Ttd.

**TRI KRISNI ASTUTI,S.Sos,M.Si**  
NIP. 19700424 199703 2 007

SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH								PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									
STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kecamatan Sukorejo		Pemerintahan	Umum	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan administrasi kantor		%					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
				Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran listrik/air/ telpon/internet		rekening/bulan	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Listrik/Air/Telephone	Administrasi umum	Jumlah Pembayaran Listrik/Air/Telephone	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.02	
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor		unit	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pembayaran peralatan dan perlengkapan kantor	Administrasi umum	Jumlah pembayaran peralatan dan perlengkapan kantor	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.03	
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang diberikan honor		orang/bulan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang diberikan honor	Administrasi umum	Jumlah pegawai yang diberikan honor	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.07	
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang diberikan honor		orang/bulan	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Honor Jasa Kebersihan	Administrasi umum	Honor Jasa Kebersihan	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.08	
				Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor		jenis	Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah Pembelian ATK	Administrasi umum	Jumlah Pembelian ATK	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.10	
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan		bulan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetakan dan Penggandaan	Administrasi umum	Jumlah Pembelian Barang Cetakan dan Penggandaan	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.11	
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan gedung/kantor		jenis	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah pembayaran komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Administrasi umum	Jumlah pembayaran komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.12	
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor		unit	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	Administrasi umum	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.13	
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu		kali	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan Rapat dan Tamu	Administrasi umum	Jumlah Kegiatan Rapat dan Tamu	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.17	
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi		kali	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar daerah	Administrasi umum	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar daerah	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.18	
				Penyediaan jasa perkantoran	Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak dan THL		orang/bulan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak dan THL	Administrasi umum	Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak dan THL	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.02.02	
				Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli		buah	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	Administrasi umum	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.15	
				Pengadaan pakaian kerja	Jumlah pakaian kerja		potong	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan	Administrasi umum	Jumlah Pengadaan	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.04.02	

							Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	Jumlah Pengadaan	Administrasi umum	Jumlah Pengadaan	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				x.xx.01.2.04.05		
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarpras kondisi baik		%					Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor						
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan		unit	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Jumlah Pengadaan Kenadaraan Dinas	Administrasi umum	Jumlah Pengadaan Kenadaraan Dinas	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				x.xx.01.2.03.20		
			Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah pengadaan		unit	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Administrasi umum	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				x.xx.01.2.03.21		
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan		unit	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Administrasi umum	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				x.xx.01.2.03.24		
			Pengadaan Mebelair	Jumlah pengadaan mebelair kantor		unit	Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubeler	Administrasi umum	Jumlah Pengadaan Meubeler	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				x.xx.01.2.03.25		
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan		unit	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Administrasi umum	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				x.xx.01.2.03.22		
			Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional		unit	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan	Administrasi umum	Jumlah Pemeliharaan	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				x.xx.01.2.03.30		
			Pemeliharaan rutin /berkala peralatan kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin /berkala peralatan kantor		unit	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan	Administrasi umum	Jumlah Pemeliharaan	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				x.xx.01.2.03.34		
			Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor		unit	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan	Administrasi umum	Jumlah Pemeliharaan	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				x.xx.01.2.03.28		
			Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas		unit	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	Administrasi umum	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				x.xx.01.2.03.27		
			Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor		unit	Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	Administrasi umum	Jumlah Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				x.xx.01.2.03.32		
			Pemeliharaan rutin /berkala mebeleur	Jumlah Pemeliharaan rutin /berkala mebeleur		unit	Pemeliharaan rutin /berkala mebeleur	Jumlah Pemeliharaan rutin /berkala mebeleur	Administrasi umum	Jumlah Pemeliharaan rutin /berkala mebeleur	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				x.xx.01.2.03.35		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	Nilai SKM Kecamatan		nilai					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan						
			Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan		kali	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa	Jumlah kegiatan pembinaan	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah kegiatan pembinaan	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kanto				7.01.06.2.01.02		
			Peningkatan sumber daya aparatur	Jumlah peserta bimtek		orang	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta bimtek	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				x.xx.01.2.04.09		





STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	PAGU PROGRAM	URUSAN	KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
KECAMATAN KRATON				Belanja tidak langsung (gaji)					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Administrasi Keuangan			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					X XX 01 2.02 01
		PEMERINTAHAN	UMUM	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	100%	%	457.595.000			457.595.000			457.595.000	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Presentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Unsur Kewilayahan	457.595.000	Kecamatan	<b>X XX 01 2.02 01</b>
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Listrik/Telepon	48 Bulan	Rekening/Bulan	62.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Listrik/Air/Telepon	62.400.000	Administrasi Umum	Jumlah Pembayaran Listrik/Air/Telepon	62.400.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Unsur Kewilayahan		Kecamatan	X XX 01 2.03 02
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	1 Paket	Paket	4.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	4.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	4.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Unsur Kewilayahan		Kecamatan	X XX 01 2.03 03
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran Honor Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keuangan	12 Orang Bulan	Orang/Bulan	223.580.000	Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honor Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keuangan	223.580.000	Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran Honor Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keuangan	223.580.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Unsur Kewilayahan		Kecamatan	X XX 01 2.02 02
				Penyediaan Jasa Kebersihan	Honor Jasa Kebersihan	2 Orang Bulan	Orang/Bulan	24.000.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor Jasa Kebersihan	24.000.000	Administrasi Umum	Honor Jasa Kebersihan	24.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Unsur Kewilayahan		Kecamatan	X XX 01 2.03 08
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pembelian ATK	4 Kali	Kali	13.216.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pembelian ATK	13.216.000	Administrasi Umum	Jumlah Pembelian ATK	13.216.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Unsur Kewilayahan		Kecamatan	X XX 01 2.03 10
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	Paket	4.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Unsur Kewilayahan		Kecamatan	X XX 01 2.03 12
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	4 Eksemplar	Eksemplar	11.650.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	11.650.000	Administrasi Umum	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	11.650.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Unsur Kewilayahan		Kecamatan	X XX 01 2.03 11
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Rapat dan Tamu	12 Kali	Kali	33.564.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan Rapat dan Tamu	33.564.000	Administrasi Umum	Jumlah Kegiatan Rapat dan Tamu	33.564.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Unsur Kewilayahan		Kecamatan	X XX 01 2.03 17
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas luar Daerah	12 Kali	Kali	70.000.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah	70.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah	70.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Unsur Kewilayahan		Kecamatan	X XX 01 2.03 18



				Penyusunan Lakip dan Laporan Keuangan	Laporan Akhir Tahun Tepat Waktu	1 Paket	Paket	3.685.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3.685.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.685.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Unsur Kewilayahan		Kecamatan	X XX 01 2.02 06
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Yang Dibeli	1 Paket	Paket	7.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia	7.500.000	Administrasi Umum	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia	7.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Unsur Kewilayahan		Kecamatan	X XX 01 2.03 14
				<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik</b>	<b>100%</b>	<b>%</b>	<b>224.500.000</b>			<b>224.500.000</b>	<b>Administrasi Umum</b>		<b>224.500.000</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Presentase Pemenuhan Pelayanan Kantor</b>	<b>Unsur Kewilayahan</b>		<b>Kecamatan</b>	<b>X XX 01 2.03</b>
				Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Yang Direhab	1 Paket	Paket	10.000.000	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor	10.000.000	Administrasi Umum	Tersedianya Gedung Kantor	10.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Unsur Kewilayahan		Kecamatan	X XX 01 2.03 24
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diadakan	1 Unit	Unit	40.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diadakan	40.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diadakan	40.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Unsur Kewilayahan		Kecamatan	X XX 01 2.03 20
				Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	1 Paket	Paket	10.000.000	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	10.000.000	Administrasi Umum	Tersedianya Peralatan Kantor	10.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Unsur Kewilayahan		Kecamatan	X XX 01 2.03 24
				Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair yang di Beli	1 Paket	Paket	30.000.000	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair yang di Beli	30.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Mebelair yang di Beli	30.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Unsur Kewilayahan		Kecamatan	X XX 01 2.03 25
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Yang Dilakukan Pemeliharaan	1 Paket	Paket	112.300.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Yang Dilakukan Pemeliharaan	112.300.000	Administrasi Umum	Kendaraan Yang Dilakukan Pemeliharaan	112.300.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Unsur Kewilayahan		Kecamatan	X XX 01 2.03 30
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan	1 Paket	Paket	12.200.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan	12.200.000	Administrasi Umum	Jumlah Peralatan Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan	12.200.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Unsur Kewilayahan		Kecamatan	X XX 01 2.03 34
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Gedung Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan	1 Paket	Paket	10.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan	10.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Gedung Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan	10.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Unsur Kewilayahan		Kecamatan	X XX 01 2.03 28
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KECAMATAN KRATON</b>	1. Jumlah Lembaga Masyarakat yang di Bina 2. Presentase Usulan Musrenbang Yang Terealisasi	<b>100%</b>	<b>%</b>	<b>146.515.000</b>			<b>146.515.000</b>	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		<b>146.515.000</b>	<b>PENYELENGGARAHAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Presentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Unsur Kewilayahan		Kecamatan	X XX 01 2.03
				Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Jumlah Kegiatan Sosial Masyarakat	5 Keg	Keg	112.545.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	112.545.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		112.545.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Unsur Kewilayahan		Kecamatan	7 01 03 2.01 03
				Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 Keg	Keg	33.970.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	33.970.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		33.970.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Unsur Kewilayahan		Kecamatan	7 01 03 2.01 01

				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN KRATON</b>	Nilai IKM dan SAKIP Kecamatan Kraton	100%	%	<b>66.390.000</b>			<b>66.390.000</b>	Administrasi Umum		<b>66.390.000</b>	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Unsur Kewilayahan		Kecamatan	X XX 01 2.03
				Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Tingkat Kecamatan	5 Keg	Keg	40.545.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	40.545.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		40.545.000	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Unsur Kewilayahan		Kecamatan	7 01 02 2.01 02
				Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	5 Keg	Keg	25.845.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset desa	25.845.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		25.845.000	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Unsur Kewilayahan		Kecamatan	7 01 06 2.01 01
				<b>PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		12 Bulan	Bulan	<b>15.000.000</b>			<b>15.000.000</b>			<b>15.000.000</b>	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Unsur Kewilayahan	15.000.000	Kecamatan	
					Presentase Kasus Kamtrantibmas Yang di Tindaklanjuti Sesuai Kewenangan			15.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	15.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		15.000.000				15.000.000		7 01 04 2.01 01

Pasuruan, Juni 2020  
CAMAT KRATON

Ttd.

RIDWAN HARRIS, S.STP, M.Si  
Pembina  
NIP. 19820528 200012 1 002

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	PAGU PROGRAM	URUSAN	KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
KECAMATAN NGULING		PEMERINTAHAN	UMUM	Belanja tidak langsung (gaji)					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Administrasi Keuangan			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					X XX 01 2.02 01
KECAMATAN NGULING	1	PEMERINTAHAN	UMUM	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	100%	%	529.000.000							Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Kecamatan	529.000.000	Unsur Kewilayahan	x.xx.01
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Listrik, Telpon, PDAM & Internet	12 Bulan	Bulan	39.700.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Air/ PDAM, Listrik, dan Telpon/Internet	39.700.000	Administrasi Umum	Jumlah Pembayaran Rekening Listrik, Telpon, PDAM & Internet	39.700.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				x.xx.01.2.03.02
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honorarium Bagi Pengelola Keuangan	12 Bulan	Orang/ Bulan	45.500.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honorarium Bagi Pengelola Keuangan	45.500.000	Administrasi Umum	Tersedianya Honorarium Bagi Pengelola Keuangan	45.500.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				x.xx.01.2.03.07
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honor Jasa / Petugas Kebersihan	12 Bulan	Orang/ Bulan	36.000.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor Jasa Kebersihan	36.000.000	Administrasi Umum	Honor Jasa Kebersihan	36.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				x.xx.01.2.03.08
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)	12 Bulan	Bulan	10.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pengadaan ATK	10.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Pembelian ATK	10.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				x.xx.01.2.03.10
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	Bulan	10.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				x.xx.01.2.03.11
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik yang di beli	12 Bulan	Bulan	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik yang di beli	3.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Alat Listrik yang di beli	3.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				x.xx.01.2.03.12
				Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Bulan	5.000.000	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Kantor	5.000.000	Administrasi Umum	Terpeliharanya Perlengkapan Kantor	5.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				x.xx.01.2.03.13
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Alat Rumah Tangga	12 Bulan	Bulan	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Alat Rumah Tangga	5.000.000	Administrasi Umum	Tersedianya Alat Rumah Tangga	5.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				x.xx.01.2.03.14
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan & Minuman Rapat	12 Bulan	Bulan	66.800.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan & Minuman Rapat	66.800.000	Administrasi Umum	Tersedianya Makanan & Minuman Rapat	66.800.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				x.xx.01.2.03.17
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar daerah	12 Bulan	Bulan	35.000.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar daerah	35.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar daerah	35.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				x.xx.01.2.03.18
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Tersedianya Honor PTT & THL	12 Bulan	Bulan	273.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honor PTT & THL	273.000.000	Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor PTT & THL	273.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				x.xx.01.2.02.02
				Penyediaan Pakaian Kerja	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja	12 Bulan	Bulan		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				x.xx.01.2.04.05
KECAMATAN NGULING	2	PEMERINTAHAN	UMUM	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100%	%	141.000.000							Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Kecamatan	141.000.000	Unsur Kewilayahan	x.xx.01

				Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	100	%	31.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	31.000.000	Administrasi umum	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	31.000.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor					x.xx.02.2.03.24	
				Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubelair	100	%	20.000.000	Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubelair	20.000.000	Administrasi umum	Jumlah Pengadaan Meubelair	20.000.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor						x.xx.02.2.03.25
				Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	100	%	5.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	5.000.000	Administrasi umum	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	5.000.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor						x.xx.02.2.03.28
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dilakukan Pemeliharaan	100	%	70.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dilakukan Pemeliharaan	70.000.000	Administrasi umum	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dilakukan Pemeliharaan	70.000.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor						x.xx.02.2.03.30
				Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung/Kantor	Jumlah Taman Kantor Yang Mendapatkan Perawatan	100	%	5.000.000	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung/Kantor	Jumlah Taman Kantor Yang Mendapatkan Perawatan	5.000.000	Administrasi umum	Jumlah Taman Kantor Yang Mendapatkan Perawatan	5.000.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor						x.xx.02.2.03.32
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang di lakukan Pemerintahan	100	%	10.000.000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang di lakukan Pemerintahan	10.000.000	Administrasi umum	Jumlah Peralatan Kantor Yang di lakukan Pemerintahan	10.000.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor						x.xx.02.2.03.34
<b>KECAMATAN NGULING</b>	<b>3</b>	<b>PEMERINTAHAN</b>	<b>UMUM</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Nilai SAKIP KECAMATAN</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>80.000.000</b>							<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Nilai SAKIP KECAMATAN</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>80.000.000</b>	<b>Unsur Kewilayahan</b>	<b>7 01 02</b>		
				Kordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Pemerintahan	Tersedianya Koordinasi & Pembinaan Antara Kecamatan & desa	100	%	5.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersedianya Koordinasi & Pembinaan Antara Kecamatan & desa	5.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peralatan Kantor Yang di lakukan Pemerintahan	5.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	Nilai SAKIP KECAMATAN						7 01 02 2 01 02
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya HUT-RI & Hari-hari Jadi Kabupaten Pasuruan	100	%	45.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya HUT-RI & Hari-hari Jadi Kabupaten Pasuruan	45.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya HUT-RI & Hari-hari Jadi Kabupaten Pasuruan	45.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	Nilai SAKIP KECAMATAN						7 01 02 2 02 03
				Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Forum Tingkat Kecamatan Musrenbang	100	%	15.000.000	Koordinasi / sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Forum Tingkat Kecamatan Musrenbang	15.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Forum Tingkat Kecamatan Musrenbang	15.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	Nilai SAKIP KECAMATAN						7 01 02 2 01 01
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Laporan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan LAKIP & Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	%	15.000.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Laporan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan LAKIP & Laporan Keuangan Tepat Waktu	15.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Penyusunan LAKIP & Laporan Keuangan Tepat Waktu	15.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	Nilai SAKIP KECAMATAN						
<b>KECAMATAN NGULING</b>	<b>4</b>	<b>PEMERINTAHAN</b>	<b>UMUM</b>	<b>Program Sosial Keagamaan Di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Di Tingkat Kecamatan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>120.000.000</b>							<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>120.000.000</b>	<b>Unsur Kewilayahan</b>	<b>7 01 03</b>		

				Pelaksanaan Pembinaan Mental Spiritual dan Kegiatan Keagamaan Lainnya ( Manaqib, dst )	Terlaksananya Kegiatan Manaqib	100	%	100.000.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Manaqib	100.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Manaqib	100.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Di Tingkat Kecamatan				7 01 03 2.01 02
				Fasilitas Kegiatan MTQ	Tersedianya Kegiatan PKK & MTQ Kecamatan	100	%	20.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya Kegiatan PKK & MTQ Kecamatan	20.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tersedianya Kegiatan PKK & MTQ Kecamatan	20.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Di Tingkat Kecamatan				7 01 03 2.01 03
KECAMATAN NGULING	5	PEMERINTAHAN	UMUM	Program Pembinaan Dan Pengawasan Desa	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Desa	100	%	5.000.000							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Desa	Kecamatan	5.000.000	Unsur Kewilayahan	7 01 06
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kegiatan Kantrantibmas di Wilayah Kecamatan Nguling	100	%	5.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kegiatan Kantrantibmas di Wilayah Kecamatan Nguling	5.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kegiatan Kantrantibmas di Wilayah Kecamatan Nguling	5.000.000	Program Pembinaan Dan Pengawasan Desa	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Desa				7 01 06 2.01 11
				<b>TOTAL</b>				<b>875.000.000</b>										<b>875.000.000</b>		

Pasuruan, .....  
CAMAT NGULING

Ttd.

**Drs. BUNARDI**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19680604 198903 1 012

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	PAGU PROGRAM	URUSAN	KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		13	14	15		16	17	
Kecamatan Tutur	7-1 0-0 0-0 24	Unsur Kewilayahan	Kewilayahan	Belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan)				Gaji Pokok			Administrasi Keuangan			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					X XX 01 2.02 01	
								Tunjangan Keluarga			Administrasi Keuangan									
								Tunjangan Jabatan			Administrasi Keuangan									
								Tunjangan Umum			Administrasi Keuangan									
								Tunjangan Beras			Administrasi Keuangan									
								Tunjangan PPH			Administrasi Keuangan									
								Pembulatan Gaji			Administrasi Keuangan									
								TPPD			Administrasi Keuangan									
											<b>Admisistrasi Keuangan</b>		<b>306.200.000</b>							
											<b>Administrasi Umum</b>		<b>417.950.000</b>							
											<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>8.800.000</b>							
				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	100%	%							Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Kewilayahan	732.950.000	Unsur Kewilayahan	xxx.01	
				Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Listrik/Air/Telephone	48	Rekening / Bulan	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Listrik/Air/Telephone	30.000.000	Administrasi umum	Jumlah Pembayaran Listrik/Air/Telephone	30.000.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				X-XX-01.2.03.02	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelola Keuangan	7 orang	Orang/Bulan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelola Keuangan	31.980.000	Administrasi umum	Jumlah Pembayaran Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelola Keuangan	31.980.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				X-XX-01.2.03.07	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor Jasa Kebersihan	1	Orang/Bulan	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Honor Jasa Kebersihan	17.400.000	Administrasi umum	Honor Jasa Kebersihan	17.400.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				X-XX-01.2.03.08	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pembelian ATK	45	Jenis	Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah Pembelian ATK	24.000.000	Administrasi umum	Jumlah Pembelian ATK	24.000.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				X-XX-01.2.03.10	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	2	Jenis	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	13.000.000	Administrasi umum	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	13.000.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				X-XX-01.2.03.11	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan Rapat dan Tamu	12	Kali	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan Rapat dan Tamu	50.000.000	Administrasi umum	Jumlah Kegiatan Rapat dan Tamu	50.000.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				X-XX-01.2.03.17	
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar daerah	12	Kali	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar daerah	75.570.000	Administrasi umum	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar daerah	75.570.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				X-XX-01.2.03.18	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Tenaga Kontrak / THL	15	Orang / Bulan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Tenaga Kontrak / THL	#####	Administrasi Keuangan	Honor Tenaga Kontrak / THL	296.200.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				X-XX-01.2.02.01	

				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	8	Jenis	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	-	Administrasi umum	Jumlah Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	-	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				X-XX-01.2.03.14
				Penyediaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas		Stel	Penyediaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah Penyediaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu	8.800.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				X-XX-01.2.04.02
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22	Buah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000	Administrasi umum	Jumlah tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				X-XX-01.2.03.13
				<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik</b>	<b>100%</b>	<b>%</b>							<b>Program Penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor</b>				<b>x.xxx.01</b>
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2	Unit	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	18.000.000	Administrasi umum	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	18.000.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				X-XX-01.2.03.22
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	2	Unit	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	30.000.000	Administrasi umum	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	30.000.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				X-XX-01.2.03.24
				Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubeler	3	Unit	Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubeler	-	Administrasi umum	Jumlah Pengadaan Meubeler	-	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				X-XX-01.2.03.25
				Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan	1	Paket	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan	-	Administrasi umum	Jumlah Pemeliharaan	-	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				X-XX-01.2.03.28
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	2	Unit	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	-	Administrasi Umum	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	-	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				X-XX-01.2.03.20
				Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	6	Unit	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan	70.000.000	Administrasi umum	Jumlah Pemeliharaan	70.000.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				X-XX-01.2.03.30
				Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	3	Unit	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan	6.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Pemeliharaan	6.000.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				X-XX-01.2.03.33
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Jumlah Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas	1	Unit	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Jumlah Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas	15.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Pemeliharaan	15.000.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				X-XX-01.2.03.27
				Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang di rehab	1	Paket	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang di rehab	25.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Kantor yang di rehab	25.000.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				X-XX-01.2.03.38
				Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor	1	Unit												
				<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Nilai IKM Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>%</b>						<b>62.000.000</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya Nilai SKM kecamatan</b>			<b>62.000.000</b>	<b>7.01.02</b>
				Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	4	kali	Koordinasi dan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat saerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	62.000.000	koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	62.000.000	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan			62.000.000	7.01.02.2.01.02

				Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Jumlah Koordinasi dan Pembinaan	4	Kegiatan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan			7.01.06.2.01
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan	4	Lap	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	10.000.000	Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan	10.000.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			X-XX-01.2.02.06
				PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN KECAMATAN	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang di Bina	100%	%		76.050.000			76.050.000	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat		76.050.000	7.01.03	
					Persentase usulan Musrenbang yang terfasilitasi	60%	%											
				Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Jumlah Fasilitasi	6	Kegiatan	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan		koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat			
				Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan	4	Kegiatan	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan	64.050.000	koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan	64.050.000	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat			7.01.03.2.01.03
				Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan	1	Kali	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan	12.000.000	koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan	12.000.000	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat			7.01.03.2.01.02
				KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN	Persentase Jumlah Kejadian Sesuai dengan Kewenangan Kecamatan	100%	%			4.000.000			4.000.000	Program Koordinasi dan ketertiban umum	Persentase Jumlah Kejadian Sesuai dengan Kewenangan Kecamatan		4.000.000	7.01.04
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Koordinasi dan Penyelenggaraan Kegiatan ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	4	kali	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi	4.000.000	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi	4.000.000	Program Koordinasi dan ketertiban umum	Persentase Jumlah Kejadian Sesuai dengan Kewenangan Kecamatan		4.000.000	7.01.04.2.01.01

875.000.000



STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	PAGU PROGRAM	URUSAN	KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.1			Belanja tidak langsung (gaji)				1.973.137.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Administrasi Keuangan		1.973.137.000						X XX 01 2.02 01	
	5.2			Belanja Langsung				700.000.000						700.000.000							
KECAMATAN POHJENTRIK	5.2.01	PEMERINTAHAN	UMUM	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	100%	%	584.800.000			584.800.000			584.800.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
	5.2.01.02			Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, telepon dan internet yang dibayar	3	rek/bulan	30.000.000	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, telepon dan internet yang dibayar	30.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Rekening Listrik, telepon dan internet yang dibayar	30.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					X XX 01 2.03 02	
	5.2.01.07			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah honorarium jasa administrasi keuangan	8	orang/bulan	39.700.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah honorarium jasa administrasi keuangan	39.700.000	Administrasi Umum	Jumlah honorarium jasa administrasi keuangan	39.700.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						X XX 01 2.03 07
	5.2.01.08			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Upah Petugas Kebersihan	3	orang/bulan	36.000.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Upah Petugas Kebersihan	36.000.000	Administrasi Umum	Upah Petugas Kebersihan	36.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						X XX 01 2.03 08
	5.2.01.10			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang diadakan	15	jenis	7.500.000	Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah ATK yang diadakan	7.500.000	Administrasi Umum	Jumlah ATK yang diadakan	7.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						X XX 01 2.03 10
	5.2.01.11			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	4	jenis	6.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						X XX 01 2.03 11
	5.2.01.13			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli	2	jenis	6.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli	6.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli	6.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						X XX 01 2.03 13
	5.2.01.15			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bacaan yang dibeli	12	eks	1.800.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bacaan yang dibeli	1.800.000	Administrasi Umum	Jumlah Bacaan yang dibeli	1.800.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						X XX 01 2.03 15
	5.2.01.17			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Konsumsi	2	jenis	35.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Konsumsi	35.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Konsumsi	35.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						X XX 01 2.03 17
	5.2.01.18			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi	2	Laporan	20.000.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi	20.000.000	Administrasi Umum	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi	20.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						X XX 01 2.03 18
	5.2.01.19			Penyediaan Jasa Perkantoran	Honorarium Tenaga Kontak/ PTT, THL & TPPL	18	orang	400.800.000	Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Tenaga Kontak/ PTT, THL & TPPL	400.800.000	Administrasi Keuangan	Honorarium Tenaga Kontak/ PTT, THL & TPPL	400.800.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						X XX 01 2.02 02
	5.2.01.20			Penyediaan Pakaian Kerja	Jumlah pakaian yang dibeli	20	buah	2.000.000	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian yang dibeli	2.000.000	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pakaian yang dibeli	2.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						X XX 01 2.04 05
				<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100%	%	84.000.000			84.000.000			84.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
	5.2.01.11			Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang dibeli	1	Unit	4.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang dibeli	4.000.000	Administrasi umum	Jumlah Peralatan kantor yang dibeli	4.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						X XX 01 2.03 24
	5.2.01.12			Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan yang dibeli	1	Unit	14.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Kendaraan yang dibeli	14.000.000	Administrasi umum	Jumlah Kendaraan yang dibeli	14.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						X XX 01 2.03 20
	5.2.01.21			Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara	1	Unit	4.000.000	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara	4.000.000	Administrasi umum	Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara	4.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						X XX 01 2.03 27
	5.2.01.22			Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1	Unit	4.000.000	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	4.000.000	Administrasi umum	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	4.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						X XX 01 2.03 28



5.2.42.01			Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Forum	1	Laporan	4.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Hasil Forum	4.000.000	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan	4.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					7 01 02 2.01 01
5.2.43			<b>KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN</b>	Rasio Jumlah kejadian yang Terfasilitasi jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan	100%	%	6.000.000				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rasio Jumlah kejadian yang Terfasilitasi jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan	6.000.000	Urusan Pemerintahan					
5.2.43.03			Fasilitasi penegakan perda/perkada	jumlah Laporan Koordinasi	1	Laporan	3.000.000	Koordinasi /sinergi dengan peraturan Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian RI	jumlah Laporan Koordinasi	3.000.000	Koordinasi Penerapan dan penegakan perda dan perkada		3.000.000	Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum					7 01 04 2.02 01
5.2.43.02			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	jumlah Laporan Koordinasi	1	Laporan	3.000.000	Fasilitasi penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	jumlah Laporan Koordinasi	3.000.000	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		3.000.000	Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa					7 01 06 2.01 11

CAMAT POHJENTREK

Ttd.

**SUHARTONO,S.Sos,M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197402091993021001







## SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

## PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	PAGU PROGRAM	URUSAN	KODE	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
KECAMATAN TOSARI		PEMERINTAHAN	UMUM	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	100%	%	450.050.000				ADMINISTRASI UMUM		356.700.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	KECAMATAN	#REF!	UNSUR KEWILAYAHAN	X XX 01	
												ADMINISTRASI KEUANGAN		282.350.000							
												PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA		22.500.000							
			1	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Listrik, air, Telpn dan Internet	5	Rek/Bulan	30.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Listrik, air, Telpn dan Internet	30.600.000	Administrasi Umum	Jumlah Pembayaran Listrik, air, Telpn dan Internet		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				X XX 01 2.03 02	
			2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pegawai Yang diberi Honor	6	Org/Bln	29.340.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pegawai Yang diberi Honor	29.340.000	Administrasi Umum	Jumlah Pegawai Yang diberi Honor		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				X XX 01 2.03 07	
			3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor	2	Kali	15.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor	15.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				X XX 01 2.03 10	
			4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	2	Kali	10.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				X XX 01 2.03 11	
			5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pembelian Komponen Instalasi Listrik	2	Kali	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pembelian Komponen Instalasi Listrik	3.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Pembelian Komponen Instalasi Listrik		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				X XX 01 2.03 12	
			6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12	Bulan	5.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				X XX 01 2.03 13	
			7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pembelian Peralatan Rumah Tangga	1	Kali	2.460.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pembelian Peralatan Rumah Tangga	2.460.000	Administrasi Umum	Jumlah Pembelian Peralatan Rumah Tangga		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				X XX 01 2.03 14	
			8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	Bulan	2.300.000	Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah Pembayaran Bahan Bacaan	2.300.000	Administrasi Umum	Jumlah Pembelian Bahan Bacaan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				X XX 01 2.03 15	
			9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan Rapat	12	Bulan	30.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan Rapat	30.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Kegiatan Rapat		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				X XX 01 2.03 17	
			10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar daerah	12	Bulan	30.000.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar daerah	30.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Perjalanan Dinas Luar daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				X XX 01 2.03 18	





			22	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang berkualitas	12 Bulan	Bulan	7.500.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang berkualitas	7.500.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						7 01 02 2.01 02	
			23	fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi	1	Laporan	51.300.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi	51.300.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						7 01 02 2.01 02	
			24	Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pembinaan	4	Laporan	9.500.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	9.500.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan	Kecamatan				7.01.06.2.01.03	
			25	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi	1	Kegiatan	7.500.000	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan		7.500.000	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						X XX 01 1.04 10	
				PROGRAM PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	Jumlah Organisasi Masyarakat Yang dibina	2 Organisasi	Organisasi	131.150.000				COORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	131.150.000		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Organisasi Masyarakat Yang dibina		131.150.000			7 01 03	
					Persentase usulan Musrenbang yang terfasilitasi	60%	%			120.400.000							Persentase usulan Musrenbang yang terfasilitasi					
			26	Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	Jumlah fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	1	Keg	30.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		30.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						7 01 03 2.01 03	
			27	Koordinasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	4	Keg	90.400.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	90.400.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat					7 01 03 2.01 03	
			28	Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa Yang mengikuti Musrenbang	8	Desa	10.750.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa Yang mengikuti Musrenbang	10.750.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Yang mengikuti Musrenbang		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat					7 01 03 2.01 01	
				PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN	Rasio Jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai kewenangan	100	%	14.000.000				COORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.000.000		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			14.000.000			7 01 04	

			29	Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan tindak kriminal	Jumlah Laporan Koordinasi	12	Bulan	5.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		5.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					7 01 04 2.01 01		
			30	Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	1	Keg	9.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	9.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio Jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai kewenangan					7 01 04 2.01 01	

Tosari, 09 Juli 2020

CAMAT TOSARI

Ttd.

**HARI HIJROH SAPUTRO, S.STP**  
Pembina  
NIP. 19790517 199810 1 001

SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/ RENJA PD								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	PAGU PROGRAM	URUSAN	KODE	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		13	14	15	16	17	18		
KECAMATAN PUSPO		PEMERINTAHAN	UMUM	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	100%	%							Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Kecamatan	Rp 332.840.000	Unsur Kewilayahan	X XX 01		
			1	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Listrik, air, dan Internet	3	Rek/Bulan	Rp 23.640.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Listrik, air, dan Internet	Rp 23.640.000	Administrasi Umum	Jumlah Pembayaran Listrik, air, dan Internet	Rp 23.640.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			X XX 01 2.03 02		
			2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pegawai Yang diben Honor	7	Omg/Bln	Rp 28.440.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pegawai Yang diben Honor	Rp 28.440.000	Administrasi Umum	Jumlah Pegawai Yang diben Honor	Rp 28.440.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			X XX 01 2.03 07		
			3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor	4	Kali	Rp 10.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor	Rp 10.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor	Rp 10.000.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			X XX 01 2.03 10		
			4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	4	Kali	Rp 12.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 12.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 12.000.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			X XX 01 2.03 11		
			5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2	Kali	Rp 3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pembelian Komponen Instalasi Listrik	Rp 3.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Pembelian Komponen Instalasi Listrik	Rp 3.000.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			X XX 01 2.03 12		
			6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2	Kali	Rp 2.660.000	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jumlah Pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Rp 2.660.000	Administrasi Umum	Jumlah Pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Rp 2.660.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			X XX 01 2.03 13		
			7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pembelian Peralatan Rumah Tangga	2	Kali	Rp 3.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pembelian Peralatan Rumah Tangga	Rp 3.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Pembelian Peralatan Rumah Tangga	Rp 3.000.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			X XX 01 2.03 14		
			8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	Bulan	Rp 2.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah Pembayaran Bahan Bacaan	Rp 2.400.000	Administrasi Umum	Jumlah Pembelian Bahan Bacaan	Rp 2.400.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			X XX 01 2.03 15		
			9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan Rapat	12	Bulan	Rp 49.200.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan Rapat	Rp 49.200.000	Administrasi Umum	Jumlah Kegiatan Rapat	Rp 49.200.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			X XX 01 2.03 17		
			10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar daerah	12	Bulan	Rp 25.000.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar daerah	Rp 25.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar daerah	Rp 25.000.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			X XX 01 2.03 18		
			11	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas	1	Kali	Rp 7.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Rp 7.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 7.000.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik			X XX 01 2.03 20		
			12	Pengadaan Mabelair	Jumlah Pengadaan Mabelair	4	Jenis	Rp 16.000.000	Pengadaan Mebeleur	Pengadaan Mebeleur	Rp 16.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Pengadaan Mabelair	Rp 16.000.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik			X XX 01 2.03 25		
			13	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	7	Unit	Rp 10.000.000	Pengadaan Peralatan Kantor	Pengadaan Peralatan Kantor	Rp 10.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Rp 10.000.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik			X XX 01 2.03 24		
			14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	1	Kali	Rp 7.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp 7.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	Rp 7.000.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik			X XX 01 2.03 28		
			15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair	Jumlah Pemeliharaan Mebelair	1	Kali	Rp 1.500.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair	Rp 1.500.000	Administrasi Umum	Jumlah Pemeliharaan Mebelair	Rp 1.500.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik			X XX 01 2.03 35		
			16	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Yang Dipelihara	9	Kendaraan	Rp 119.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 119.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Kendaraan Yang Dipelihara	Rp 119.000.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik			X XX 01 2.03 30		
			17	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	12	Bulan	Rp 9.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Rp 9.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	Rp 9.000.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik			X XX 01 2.03 34		
			18	Penyediaan Pakain Kerja	Jumlah Pakain Dinas Berserta Kelengkapannya	6	Stel	Rp 4.000.000	Pengadaan Pakain Dinas Berserta Kelengkapannya	Jumlah Pakain Dinas Berserta Kelengkapannya	Rp 4.000.000	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah Pakain Dinas Berserta Kelengkapannya	Rp 4.000.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			X XX 01 2.04 02		
																			X XX 01 2.04 05		
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik	100%	%								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik	Rp 277.810.000		X XX 01		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	88	Nilai														
					Nilai Sakip Kecamatan	60,52	Nilai														
			19	Penyusunan LAKIP dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan capaian kinerja dan Laporan Keuangan	2	Laporan	Rp 3.560.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Iktislar Realisasi Kinerja SDPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan Laporan Keuangan	Rp 3.560.000	Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan capaian kinerja dan Laporan Keuangan	Rp 3.560.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah					X XX 01 1.02 06	
			20	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah Pembayaran Honor THL dan TPKL	11	Omg/Bln	Rp 201.600.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honor THL dan TPKL	Rp 201.600.000	Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran Honor THL dan TPKL	Rp 201.600.000	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah					X XX 01 1.02 02	
			21	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang berkualitas	12	Bulan	Rp 4.900.000	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan		Rp 4.900.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan		Rp 4.900.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik						
			22	Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi	1	Laporan	Rp 59.250.000	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan		Rp 59.250.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan		Rp 59.250.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik						
			23	Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pembinaan	2	Kegiatan	Rp 8.500.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	Rp 8.500.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	Rp 8.500.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan	Kecamatan				
				PROGRAM PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	Jumlah Organisasi Masyarakat Yang dibina	2	Organisasi										Rp 82.850.000		7 01 03		
					Persentase usulan Musrenbang yang terfasilitasi	60%	%														
			24	Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	Jumlah fasilitas Kegiatan Sosial Masyarakat	1	Keg	Rp 74.650.000	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitas Kegiatan Sosial Masyarakat	Rp 74.650.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitas Kegiatan Sosial Masyarakat	Rp 74.650.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat				7 01 03 2 01 03	
			25	Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa Yang mengikuti Musrenbang	7	Desa	Rp 8.200.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa Yang mengikuti Musrenbang	Rp 8.200.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Yang mengikuti Musrenbang	Rp 8.200.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat				7 01 03 2 01 01	

				PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN	Rasio Jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai kewenangan kecamatan	100	%										Rp	6.500.000		7 01 04			
		26	Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan tindak kriminal	Jumlah Laporan Koordinasi		12	Bulan	Rp	2.000.000	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	Rp	2.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenenteraman dan Keteriban Umum	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	Rp	2.000.000	Program Koordinasi Ketentraman Dan Keteriban Umum	Rasio Jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai kewenangan kecamatan			7 01 04 2.01.01	
		27	Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi		1	Keg	Rp	4.500.000	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	Rp	4.500.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenenteraman dan Keteriban Umum	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	Rp	4.500.000	Program Koordinasi Ketentraman Dan Keteriban Umum	Rasio Jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai kewenangan kecamatan			7 01 04 2.01.01	

CAMAT PUSPO

Ttd.

KARTONO, SH, M.Hum  
Pembina  
NIP. 19650827 199102 1 001

SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH								PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																	
STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																	
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			KET						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18						
KECAMATAN GONDANGWETAN		Pemerintahan	Umum												KEWILAYAHAN	7									
																		7	01						
															PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			X	XX	01				
															ADMINISTRASI KEUANGAN					X	XX	01	2.02		
							1 Program Administrasi Perkantoran/ Kegiatan Penyediaan Jasa perkantoran	Tersedianya Jasa Perkantoran, THL, dan Tenaga Kontrak PTT yang berkualitas	12	Bulan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Perkantoran, THL, dan Tenaga Kontrak PTT yang berkualitas								X	XX	01	2.02	02	
							2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan Gondangwetan/ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP, Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun, Renstra, Renja dan Laporan Aset'	5	Laporan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP, Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun, Renstra, Renja dan Laporan Aset'								X	XX	01	2.02	06	
							<b>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor</b>	<b>100</b>	<b>%</b>															
																					X	XX	01	2.03	
							3 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	12	Bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik									X	XX	01	2.03	02
							4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya honorarium pengelola keuangan	12	Bulan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya honorarium pengelola keuangan									X	XX	01	2.03	07
			5 Penyediaan Alat Tulis	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1	Ls	Penyediaan Alat	Tersedianya Alat Tulis Kantor									X	XX	01	2.03	10				
			6 Penyediaan Barang Cetak dan	Tersedianya Barang Cetak dan	1	Ls	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									X	XX	01	2.03	11				









STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
KECAMATAN KEJAYAN	4.01.09.15.01	PEMERINTAHAN	UMUM	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	100	%					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		Urusan Pemerintah Daerah	x.xx.01	Program Tidak Sesuai
	4.01.09.15.01.02			Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Listrik dan Air	12	Bulan	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Listrik dan Air	Administrasi umum	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Listrik dan Air	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		Urusan Pemerintah Daerah	x.xx.01.2.03.02	
	4.01.09.15.01.06			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan	12	Bulan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan	Administrasi umum	tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		Urusan Pemerintah Daerah	x.xx.01.2.03.06	
	4.01.09.15.01.07			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	tersedianya honorarium jasa administrasi keuangan	12	Bulan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	tersedianya honorarium jasa administrasi keuangan	Administrasi umum	tersedianya honorarium jasa administrasi keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		Urusan Pemerintah Daerah	x.xx.01.2.03.07	
	4.01.09.15.01.10			Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor	12	Bulan	Penyediaan Alat tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor	Administrasi umum	tersedianya alat tulis kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		Urusan Pemerintah Daerah	x.xx.01.2.03.10	
	4.01.09.15.01.11			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Administrasi umum	tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		Urusan Pemerintah Daerah	x.xx.01.2.03.11	
	4.01.09.15.01.17			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	12	Bulan	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	Administrasi umum	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		Urusan Pemerintah Daerah	x.xx.01.2.03.17	

	4.01.09.15.01.18			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Terlaksananya Rapat dan Konsultasi Luar Daerah	12	Bulan	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Terlaksananya Rapat dan Konsultasi Luar Daerah	Administrasi umum	Terlaksananya Rapat dan Konsultasi Luar Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		Usuran Pemerintah Daerah	x.xx.01.2.03.18	
	4.01.09.15.01.19			Penyediaan Jasa Perkantoran	Tersedianya Jasa Tenaga Kontak/ PTT, THL & TPCL yang berkualitas	12	Bulan	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	tersedianya Jasa Tenaga Kontak/ PTT, THL & TPCL yang berkualitas	Administrasi Keuangan	ersedianya Jasa Tenaga Kontak/ PTT, THL & TPCL yang berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		Usuran Pemerintah Daerah	x.xx.01.2.02.02	
								Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Administrasi umum	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		Usuran Pemerintah Daerah	x.xx.01.2.03.08	
	4.01.09.15.02			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100	%					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		Usuran Pemerintah Daerah	x.xx.01	Program Tidak Sesuai
	4.01.09.15.02.10			Pengadaan Meubelair	Tersedianya Peralatan Kantor	1	Paket	Pengadaan Meubelair	Tersedianya Peralatan Kantor (mebelair)	Administrasi umum	Tersedianya Peralatan Kantor (mebelair)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		Usuran Pemerintah Daerah	x.xx.01.2.03.25	
	4.01.09.15.02.09			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	1	Paket	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan gedung Kantor	Administrasi umum	Tersedianya Peralatan gedung Kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		Usuran Pemerintah Daerah	x.xx.01.2.03.24	
	4.01.09.15.02.05			Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional	1	Unit	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional	Administrasi umum	Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		Usuran Pemerintah Daerah	x.xx.01.2.03.20	
	4.01.09.15.02.21			Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12	Bulan	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Administrasi umum	Terpeliharanya gedung kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		Usuran Pemerintah Daerah	x.xx.01.2.03.28	
	4.01.09.15.02.24			Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	8	Unit	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	Administrasi umum	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		Usuran Pemerintah Daerah	x.xx.01.2.03.30	

	4.01.09.15.02.21			Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas	12	Bulan	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas	Administrasi umum	Terpeliharanya Rumah Dinas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		Urusan Pemerintah Daerah	x.xx.01.2.03.27	
	4.01.09.15.02.25.			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	Terpeliharanya Perlengkapan Rumah jabatan/dinas	12	Bulan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	Terpeliharanya Perlengkapan Rumah jabatan/dinas	Administrasi umum	Terpeliharanya Perlengkapan Rumah jabatan/dinas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		Urusan Pemerintah Daerah	x.xx.01.2.03.31	
	4.01.09.15.02.28			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12	Bulan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Administrasi umum	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		Urusan Pemerintah Daerah	x.xx.01.2.03.34	
	4.01.09.15.41			<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	Nilai SAKIP Kecamatan	100	%					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayaan	7.01.02	Program Tidak Sesuai
	4.01.09.15.41.88			Peningkatan Kapasitas pemerintahan Kecamatan	Terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang berkualitas	12	Bulan	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Terwujudnya efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang berkualitas	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayaan	7.01.02.2.01.02	
	4.01.09.15.41.89			Koordinasi administrasi Sosial Budaya (hari jadi dan HUT RI)	Terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang berkualitas	1	kali	koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Terwujudnya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang berkualitas	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayaan	7.01.02.2.01.01	
	4.01.09.15.41.05			Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan	Terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang baik	1	kali	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayaan Aset Desa	Terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang baik	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang baik	Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayaan	7.01.06.2.01.03	

	4.01.09.15.41.85			Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Kejayan	Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi Perkantoran Kel. Kejayan	12	Bulan	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi Perkantoran Kel. Kejayan	koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang berkualitas	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayaan	7.01.02.2.01.02	
	4.01.09.15.41.87			Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan kejayan	Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana kel. Kejayan	12	Bulan	Pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan	Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana kel. Kejayan	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pembangunan wilayah yang dilaksanakan	Kecamatan	Unsur Kewilayaan	7.01.03.2.02.02	
	4.01.09.15.41.86			Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Kejayan	Terwujudnya peningkatan Pemberdayaan masyarakat Kel. Kejayan	12	Bulan	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Terwujudnya peningkatan Pemberdayaan masyarakat Kel. Kejayan	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pembangunan wilayah yang dilaksanakan	Kecamatan	Unsur Kewilayaan	7.01.03.2.02.03	
	4.01.09.15.42			<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN KECAMATAN</b>	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang di Bina	100	%					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat	Kecamatan	Unsur Kewilayaan	7.01.03	Program Sesuai
	4.01.09.15.42.08			Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan sosial masyarakat	5	kali	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat	Kecamatan	Unsur Kewilayaan	7.01.03.2.01.03	
	4.01.09.15.42.01			Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	2	Kegiatan	koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Terwujudnya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang berkualitas	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayaan	7.01.02.2.01.01	
	4.01.09.15.42.23			Sosialisasi Pengembangan UMKM	Peningkatan ekonomi masyarakat	1	kali	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat	Kecamatan	Unsur Kewilayaan	7.01.03.2.01.03	
	4.01.09.15.42.17			Pengembangan Materi dan Pelaksanaan Kegiatan tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	Terwujudnya kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	1	kali	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat	Kecamatan	Unsur Kewilayaan	7.01.03.2.01.03	

	4.01.09.15.42.02			Pembinaan Organisasi Pemuda	Meningkatnya kualitas Organisasi Pemuda	1	kali	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat	Kecamatan	Unsur Kewilayaan	7.01.03.2.01.03	
	4.01.09.15.42.16			Fasilitasi Kegiatan MTQ	Meningkatnya kualitas Keagamaan	1	kali	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat	Kecamatan	Unsur Kewilayaan	7.01.03.2.01.03	
	4.01.09.15.42.24			Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani	Meningkatnya kesehatan jasmani dan rohani pegawai kecamatan	10	Bulan	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat	Kecamatan	Unsur Kewilayaan	7.01.03.2.01.03	
	4.01.09.15.16			<b>KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN</b>	Rasio Jumlah kejadian yang Terfasilitasi jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan	100	%					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rasio Jumlah kejadian yang Terfasilitasi jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan	Kecamatan	Urusan Pemerintahan	7.01.04	Program Tidak Sesuai
	4.01.09.15.16.01			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dengan Muspika	1	kali	Koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang undangan dan/ atau Kepolisian negara Republik Indonesia	Terlaksananya koordinasi dengan Muspika	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Terlaksananya koordinasi dengan Muspika	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rasio Jumlah kejadian yang Terfasilitasi jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan	Kecamatan		7.01.04.2.02.01	

## SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

## PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJAPD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
KECAMATAN BANGIL		PEMERINTAHAN	UMUM	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	100%	%					Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	x.xx.01	
				Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Listrik/Air/Telephone	48 Rekening bulan	Rekening/bulan	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Listrik/Air/Telephone	Administrasi umum	Jumlah Pembayaran Listrik/Air/Telephone	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.02	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelola Keuangan	96 orang bulan	Orang/Bulan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honor Jasa Administrasi Keuangan	Administrasi umum	Honor Jasa Administrasi Keuangan	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.07	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor Jasa Kebersihan	60 Orang Bulan	Orang/Bulan	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Honor Jasa Kebersihan	Administrasi umum	Honor Jasa Kebersihan	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.08	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pembelian ATK	4 Kali	Kali	Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah Pembelian ATK	Administrasi umum	Jumlah Pembelian ATK	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.10	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	4 Eksemplar	Eksemplar	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	Administrasi umum	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.11	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan Rapat dan Tamu	12 Kali	Kali	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan Rapat dan Tamu	Administrasi umum	Jumlah Kegiatan Rapat dan Tamu	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.17	
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar daerah	12 Kali	Kali	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar daerah	Administrasi umum	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar daerah	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.18	
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Honor Tenaga Kontrak / THL	204 Orang Bulan	Orang/Bulan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Jasa Pelaksana Tugas ASN	Administrasi umum	Honor Jasa Pelaksana Tugas ASN	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.02.02	
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100%	%					Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	1 paket	Paket	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Administrasi umum	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.24	
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	1 paket	Paket	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Administrasi umum	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.22	

				Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubeler	1 paket	Paket	Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubeler	Administrasi umum	Jumlah Pengadaan Meubeler	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.25	
				Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan	1 paket	Paket	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan	Administrasi umum	Jumlah Pemeliharaan	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.28	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Pengadaan Kenadaraan Dinas	2 Unit	Unit	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Jumlah Pengadaan Kenadaraan Dinas	Administrasi umum	Jumlah Pengadaan Kenadaraan Dinas	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.20	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan	1 paket	Paket	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan	Administrasi umum	Jumlah Pemeliharaan	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.30	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	Jumlah Pemeliharaan	1 paket	Paket	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan	Administrasi umum	Jumlah Pemeliharaan	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.34	
				Pengadaan Seragam Dinas	Jumlah Pengadaan	1 Paket	paket	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan	Administrasi umum	Jumlah Pengadaan	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.04.02	
								Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	Jumlah Pengadaan	Administrasi umum	Jumlah Pengadaan	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.04.05	
				PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	Nilai IKM Kecamatan	100%	%					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan				
				Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM	2 Kali	kali			Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.04.	
								Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.04.09	
				Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	2 Kali	kali	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan			x.xx.02.2.01.02	
								Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan forkompimcam	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan forkompimcam	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan			x.xx.05.2.01.08	
										Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah pelimpahan urusan yang dilaksanakan	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan				

								Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi	Program Peminaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
				Fasilitasi Administrasi Perangkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemerintahan Kelurahan	2 kali	kali			Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan				
								Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah desa yang didampingi	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	Jumlah desa yang didampingi	Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa tertib administrasi			x.xx.06.2.01.18	
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Kiduldalem	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	12 Kali	kali	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan ( Kelurahan Kiduldalem )	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan			x.xx.02.2.02.03	Hanya ada 1 Nomenklatur Sub Kegiatan
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Kersikan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	12 Kali	kali	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan ( Kelurahan Kersikan )	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan			x.xx.02.2.02.03	Hanya ada 1 Nomenklatur Sub Kegiatan
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Kauman	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	12 Kali	kali	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan ( Kelurahan Lauman )	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan			x.xx.02.2.02.03	Hanya ada 1 Nomenklatur Sub Kegiatan
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Bendumunggal	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	12 Kali	kali	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan ( Kelurahan Bendumunggal )	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan			x.xx.02.2.02.03	Hanya ada 1 Nomenklatur Sub Kegiatan
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Gempeng	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	12 Kali	kali	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan ( Kelurahan Gempeng )	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan			x.xx.02.2.02.03	Hanya ada 1 Nomenklatur Sub Kegiatan



				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Pogar	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	12 Kali	kali	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan ( Kelurahan Pogar )	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan			x.xx.02.2.02.03	Hanya ada 1 Nomenklatur Sub Kegiatan
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Kolarsari	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	12 Kali	kali	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan ( Kelurahan Kolarsari )	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan			x.xx.02.2.02.03	Hanya ada 1 Nomenklatur Sub Kegiatan
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Dermo	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	12 Kali	kali	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan ( Kelurahan Dermo )	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan			x.xx.02.2.02.03	Hanya ada 1 Nomenklatur Sub Kegiatan
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Kalirejo	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	12 Kali	kali	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan ( Kelurahan Kalirejo )	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan			x.xx.02.2.02.03	Hanya ada 1 Nomenklatur Sub Kegiatan
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Latek	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	12 Kali	kali	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan ( Kelurahan Latek )	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan			x.xx.02.2.02.03	Hanya ada 1 Nomenklatur Sub Kegiatan
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Kalianyar	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	12 Kali	kali	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan ( Kelurahan Kalianyar )	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan			x.xx.02.2.02.03	Hanya ada 1 Nomenklatur Sub Kegiatan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kiduldalem	Jumlah Sarpras yang dibangun	1 paket	Paket	Pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan ( Kiduldalem )	Jumlah Sarpras yang dibangun	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Jumlah Sarpras yang dibangun	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pembangunan wilayah yang dilaksanakan			x.xx.03.2.02.02	Hanya ada 1 Nomenklatur Sub Kegiatan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kersikan	Jumlah Sarpras yang dibangun	1 paket	Paket	Pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan ( Kersikan )	Jumlah Sarpras yang dibangun	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Jumlah Sarpras yang dibangun	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pembangunan wilayah yang dilaksanakan			x.xx.03.2.02.02	Hanya ada 1 Nomenklatur Sub Kegiatan

				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman	Jumlah Sarpras yang dibangun	1 paket	Paket	Pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan ( Kauman )	Jumlah Sarpras yang dibangun	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Jumlah Sarpras yang dibangun	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pembangunan wilayah yang dilaksanakan			x.xx.03.2.02.02	Hanya ada 1 Nomenklatur Sub Kegiatan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bedomungal	Jumlah Sarpras yang dibangun	1 paket	Paket	Pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan ( Bedomungal )	Jumlah Sarpras yang dibangun	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Jumlah Sarpras yang dibangun	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pembangunan wilayah yang dilaksanakan			x.xx.03.2.02.02	Hanya ada 1 Nomenklatur Sub Kegiatan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gempeng	Jumlah Sarpras yang dibangun	1 paket	Paket	Pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan ( Gempeng )	Jumlah Sarpras yang dibangun	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Jumlah Sarpras yang dibangun	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pembangunan wilayah yang dilaksanakan			x.xx.03.2.02.02	Hanya ada 1 Nomenklatur Sub Kegiatan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pogar	Jumlah Sarpras yang dibangun	1 paket	Paket	Pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan ( Pogar )	Jumlah Sarpras yang dibangun	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Jumlah Sarpras yang dibangun	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pembangunan wilayah yang dilaksanakan			x.xx.03.2.02.02	Hanya ada 1 Nomenklatur Sub Kegiatan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kolursari	Jumlah Sarpras yang dibangun	1 paket	Paket	Pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan ( Kolursari )	Jumlah Sarpras yang dibangun	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Jumlah Sarpras yang dibangun	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pembangunan wilayah yang dilaksanakan			x.xx.03.2.02.02	Hanya ada 1 Nomenklatur Sub Kegiatan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dermo	Jumlah Sarpras yang dibangun	1 paket	Paket	Pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan ( Dermo )	Jumlah Sarpras yang dibangun	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Jumlah Sarpras yang dibangun	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pembangunan wilayah yang dilaksanakan			x.xx.03.2.02.02	Hanya ada 1 Nomenklatur Sub Kegiatan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kalirejo	Jumlah Sarpras yang dibangun	1 paket	Paket	Pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan ( Kalirejo )	Jumlah Sarpras yang dibangun	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Jumlah Sarpras yang dibangun	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pembangunan wilayah yang dilaksanakan			x.xx.03.2.02.02	Hanya ada 1 Nomenklatur Sub Kegiatan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Latek	Jumlah Sarpras yang dibangun	1 paket	Paket	Pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan ( Latek )	Jumlah Sarpras yang dibangun	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Jumlah Sarpras yang dibangun	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pembangunan wilayah yang dilaksanakan			x.xx.03.2.02.02	Hanya ada 1 Nomenklatur Sub Kegiatan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kalianyar	Jumlah Sarpras yang dibangun	1 paket	Paket	Pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan ( Kalianyar )	Jumlah Sarpras yang dibangun	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Jumlah Sarpras yang dibangun	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pembangunan wilayah yang dilaksanakan			x.xx.03.2.02.02	Hanya ada 1 Nomenklatur Sub Kegiatan
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kiduldalem	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	1 paket	Paket	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan ( Kiduldalem )	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pembangunan wilayah yang dilaksanakan			x.xx.03.2.02.03	Hanya ada 1 Nomenklatur Sub Kegiatan



				PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN KECAMATAN	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang di Bina	100%	%					Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat							
				Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Jumlah Fasilitasi	12 kali	kali	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Fasilitasi	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Fasilitasi	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan			x.xx.02.2.01.02	Untuk menampung Kegiatan Sosial			
				Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan	12 Kali	kali	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan	koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat			x.xx.03.2.01.01				
								Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan	koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat						x.xx.03.2.01.03	
								Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat						x.xx.03.2.02.01	
				Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan	6 Kali	kali	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di	Jumlah kegiatan	koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah kegiatan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat			x.xx.03.2.01.02				
								Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan	koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat						x.xx.03.2.01.03	
				KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN	Persentase Jumlah Kejadian Sesuai dengan Kewenangan Kecamatan	100%	%					Program Koordinasi dan ketertiban umum	Persentase Jumlah Kejadian Sesuai dengan Kewenangan							
				Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi	6 Kali	kali			Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi	Program Koordinasi dan ketertiban umum	Persentase Jumlah Kejadian Sesuai dengan Kewenangan Kecamatan			x.xx.04.2.01				
										Koordinasi Penerapan dan penegakan perda dan perkada	Jumlah Koordinasi	Program Koordinasi dan ketertiban umum	Persentase Jumlah Kejadian Sesuai dengan Kewenangan Kecamatan			x.xx.04.2.02				

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	PAGU PROGRAM	URUSAN	KODE	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Belanja tidak langsung (gaji)					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Administrasi Keuangan			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						X XX 01 2.02 01
<b>KECAMATAN BEJI</b>	<b>18</b>	<b>PEMERINTAHAN</b>	<b>UMUM</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan kantor</b>	<b>87.50</b>		<b>713.016.000</b>			<b>713.016.000</b>			<b>713.016.000</b>				<b>713.016.000</b>			<b>X.XX.01</b>
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Internet yang Memadai	7	Rek	100.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Internet yang Memadai	100.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Internet yang Memadai	100.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Internet yang Memadai	Kecamatan	100.000.000	Unsur Kewilayahan		7.01.01.2.03.02
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Honorarium pada pengelolaan keuangan	7	Org/Bln	41.316.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Honorarium pada pengelolaan keuangan	41.316.000	Administrasi Umum	Jumlah Honorarium pada pengelolaan keuangan	41.316.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Honorarium pada pengelolaan keuangan			41.316.000		7.01.01.2.03.07
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan	1	Org/Bln	19.500.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan	19.500.000	Administrasi Umum	Jumlah Tenaga Kebersihan	19.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Tenaga Kebersihan			19.500.000		7.01.01.2.03.08
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor	100	%	10.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor	10.000.000	Administrasi Umum	Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor	10.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor			10.000.000		7.01.01.2.03.10
				Penyediaan Barang cetakan foto copy dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	%	5.000.000	Penyediaan Barang cetakan foto copy dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			5.000.000		7.01.01.2.03.11
				Penyediaan Komponen listrik/Penerangan Gedung Kantor Kecamatan	Jumlah penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Lampu,Terminal Listrik, Rumah Lampu dan Alat Listrik Lainnya)	100	%	8.000.000	Penyediaan Komponen listrik/Penerangan Gedung Kantor Kecamatan	Jumlah penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Lampu,Terminal Listrik, Rumah Lampu dan Alat Listrik Lainnya)	8.000.000	Administrasi Umum	Jumlah penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Lampu,Terminal Listrik, Rumah Lampu dan Alat Listrik Lainnya)	8.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Lampu,Terminal Listrik, Rumah Lampu dan Alat Listrik Lainnya)			8.000.000		7.01.01.2.03.12
				Penyediaan Makanan dan minuman	Jumlah penyediaan Belanja Mamin Rapat dalam Kegiatan Rapat dan Evaluasi	100	%	20.000.000	Penyediaan Makanan dan minuman	Jumlah penyediaan Belanja Mamin Rapat dalam Kegiatan Rapat dan Evaluasi	20.000.000	Administrasi Umum	Jumlah penyediaan Belanja Mamin Rapat dalam Kegiatan Rapat dan Evaluasi	20.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah penyediaan Belanja Mamin Rapat dalam Kegiatan Rapat dan Evaluasi			20.000.000		7.01.01.2.03.17
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah penyediaan kegiatan yang dapat dilaksanakan	100	%	15.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah penyediaan kegiatan yang dapat dilaksanakan	15.000.000	Administrasi Umum	Jumlah penyediaan kegiatan yang dapat dilaksanakan	15.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah penyediaan kegiatan yang dapat dilaksanakan			15.000.000		7.01.01.2.03.18
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah tenaga Jasa Kantor Yang Tersedia	14	Org/Bln	494.200.000	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah tenaga Jasa Kantor Yang Tersedia	494.200.000	Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga Jasa Kantor Yang Tersedia	494.200.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah tenaga Jasa Kantor Yang Tersedia			494.200.000		7.01.01.1.02.02
				<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kondisi Baik</b>	<b>85</b>	<b>%</b>	<b>25.000.000</b>			<b>25.000.000</b>			<b>25.000.000</b>				<b>25.000.000</b>			
				Pemeliharaan rutin berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung kantor yg memadai	100	%	10.000.000	Pemeliharaan rutin berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung kantor yg memadai	10.000.000	Administrasi Umum	Terpeliharanya Gedung kantor yg memadai	10.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpeliharanya Gedung kantor yg memadai			10.000.000		7.01.01.2.03.30
				Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan dinas Operasional	Jumlah kendaraan Dinas yang dipelihara	100	%	10.000.000	Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan dinas Operasional	Jumlah kendaraan Dinas yang dipelihara	10.000.000	Administrasi Umum	Jumlah kendaraan Dinas yang dipelihara	10.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah kendaraan Dinas yang dipelihara			10.000.000		7.01.01.2.03.30
				Pemeliharaan rutin berkala Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan kantor yg terpelihara	100	%	5.000.000	Pemeliharaan rutin berkala Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan kantor yg terpelihara	5.000.000	Administrasi Umum	Jumlah Peralatan kantor yg terpelihara	5.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Peralatan kantor yg terpelihara			5.000.000		7.01.01.2.03.34
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Nilai IKM Kecamatan</b>	<b>87,5</b>	<b>Nilai</b>	<b>2.562.304.000</b>			<b>2.562.304.000</b>			<b>2.562.304.000</b>				<b>2.562.304.000</b>			<b>7.01.03</b>
				<b>Nilai SAKIP Kecamatan</b>	<b>62,5</b>	<b>Nilai</b>															
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kel. Pagak	Jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi	100	%	105.000.000	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kel. Pagak	Jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi	105.000.000		Jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi	105.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi			105.000.000		7.01.02.1.02
				Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kel. Glanggang	Jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi	100	%	105.000.000	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kel. Glanggang	Jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi	105.000.000		Jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi	105.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi			105.000.000		7.01.02.1.02
				Pembangunan Sarpras Kelurahan Pagak	Jumlah Sarana & Prasarana yang dapat difasilitasi	100	%	803.152.000	Pembangunan Sarpras Kelurahan Pagak	Jumlah Sarana & Prasarana yang dapat difasilitasi	803.152.000		Jumlah Sarana & Prasarana yang dapat difasilitasi	803.152.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Sarana & Prasarana yang dapat difasilitasi			803.152.000		7.01.03.2.02.02
				Pembangunan Sarpras Kelurahan Glanggang	Jumlah Sarana & Prasarana yang dapat difasilitasi	100	%	803.152.000	Pembangunan Sarpras Kelurahan Glanggang	Jumlah Sarana & Prasarana yang dapat difasilitasi	803.152.000		Jumlah Sarana & Prasarana yang dapat difasilitasi	803.152.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Sarana & Prasarana yang dapat difasilitasi			803.152.000		7.01.03.2.02.02
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pagak	Jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi	100	%	366.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pagak	Jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi	366.000.000		Jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi	366.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi			366.000.000		7.01.03.2.02.03

				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pagak	Jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi	100	%	366.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pagak	Jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi	366.000.000		Jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi	366.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi	366.000.000	7.01.03.2.02.03
				Fasilitasi Administrasi Perangkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	100	%	9.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Kegiatan	9.000.000	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		9.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Kegiatan	9.000.000	7.01.01.2.04.09
				Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa Yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa	100	%	5.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa	5.000.000		Jumlah Desa Yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa	5.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Jumlah Desa Yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa	5.000.000	7.01.06.2.01.06
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN KECAMATAN</b>	Jumlah Masyarakat Yang dibina dan Persentase usulan Musrenbang yang terfasilitasi	<b>2</b>	<b>Lembaga</b>	<b>10.000.000</b>			<b>10.000.000</b>			<b>10.000.000</b>			<b>10.000.000</b>	<b>7.01.03</b>
				Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Musrenbang & Sosialisasi Perencanaan	100	%	10.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		10.000.000		Jumlah Kegiatan Musrenbang & Sosialisasi Perencanaan	10.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		10.000.000	5.01.02.2.01.03
				<b>PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN</b>	Rasio Jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan kecamatan	<b>11</b>	<b>Kasus</b>	<b>7.984.000</b>			<b>7.984.000</b>			<b>7.984.000</b>			<b>7.984.000</b>	<b>7.01.04</b>
					Jumlah koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Kecamatan			<b>7.984.000</b>			<b>7.984.000</b>			<b>7.984.000</b>			<b>7.984.000</b>	
				Peningkatan Kerjasama dengan aparat Keamanan dalam Teknik pencegahan Kejahatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Kecamatan	100	%	7.984.000	Peningkatan Kerjasama dengan aparat Keamanan dalam Teknik pencegahan Kejahatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Kecamatan	7.984.000		Jumlah rapat evaluasi permasalahan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan	7.984.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah rapat evaluasi permasalahan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan	7.984.000	7.01.04.2.01
								<b>3.318.304.000</b>			<b>3.318.304.000</b>			<b>3.318.304.000</b>			<b>3.318.304.000</b>	

Beji,

CAMAT BEJI

Ttd.

**TAUFIKHUL GHONY, SE.,MSI.**  
Pembina  
NIP. 19700211 199303 1 006

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
KECAMATAN LUMBANG		URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENJUNJANG	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	100%	%					Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	x.xx.01	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Listrik/Air/Telephone	48 Rekening bulan	Rekening/bulan	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Listrik/Air/Telephone	Administrasi umum	Jumlah Pembayaran Listrik/Air/Telephone	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.02	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelola Keuangan	96 orang bulan	Orang/Bulan					Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				Tidak ada Kegiatan/ sub kegiatan yang sesuai
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor Jasa Kebersihan	60 Orang Bulan	Orang/Bulan	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Honor Jasa Kebersihan	Administrasi umum	Honor Jasa Kebersihan	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.08	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pembelian ATK	4 Kali	Kali	Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah Pembelian ATK	Administrasi umum	Jumlah Pembelian ATK	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.10	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	4 Eksemplar	Eksemplar	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	Administrasi umum	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pembelian Komponen Instalasi Listrik	2	Kali	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pembelian Komponen Instalasi Listrik	Administrasi Umum	Jumlah Pembelian Komponen Instalasi Listrik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			X XX 01 2.03 12	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12	Bulan	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jumlah Pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Administrasi Umum	Jumlah Pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			X XX 01 2.03 13	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan Rapat dan Tamu	12 Kali	Kali	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan Rapat dan Tamu	Administrasi umum	Jumlah Kegiatan Rapat dan Tamu	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar daerah	12 Kali	Kali	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar daerah	Administrasi umum	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar daerah	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Honor Tenaga Kontrak / THL	204 Orang Bulan	Orang/Bulan										Tidak ada Kegiatan/ sub kegiatan yang sesuai
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan	1 Paket	paket	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan	Administrasi umum	Jumlah Pengadaan	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				







				Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi	1	kali			Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi	Program Koordinasi dan ketertiban umum	Persentase Jumlah Kejadian Sesuai dengan Kewenangan Kecamatan				
--	--	--	--	---	--	---	------	--	--	---	---	---	---	--	--	--	--

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	PAGU PROGRAM	URUSAN	KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Kec. Pasrepan				Belanja tidak langsung (gaji)					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Administrasi Keuangan			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Kecamatan		Kewilayahan	X XX 01 2.02 01
				<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	100	%								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan		<b>607.500.000</b>		7.01.01
												<b>Administrasi Umum</b>	Persentase Pemenuhan Administrasi Kantor	<b>236.000.000</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.03
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Air, Listrik, Telepon dan Internet	60	Rekening	51.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik/air/ telpon/internet	51.000.000	Administrasi Umum			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.03.02
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan	8	Orang	32.940.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai yang diberikan honor	32.940.000	Administrasi Umum			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.03.07
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor jasa kebersihan	1	Orang	-	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor jasa kebersihan	-	Administrasi Umum			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.03.08
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor	50	Jenis	15.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor	15.000.000	Administrasi Umum			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.03.10
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	10	Jenis	9.060.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	9.060.000	Administrasi Umum			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.03.11

				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu	24	Kali	10.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu	10.000.000	Administrasi Umum			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.03.17
				Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	10	Orang	10.000.000	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	10.000.000	Administrasi Umum			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.03.18
												Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Dokumen administrasi Keuangan	361.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.02
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah pembayaran honor TPKL dan THL	12	Orang	356.500.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran honor TPKL dan THL	356.500.000	Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Dokumen administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.02.02
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pembelian komponen	8	Jenis	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pembelian komponen	5.000.000	Administrasi Umum			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.03.12
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	372	Eksemplar	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	-	Administrasi Umum			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.03.15
												Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Tercukupinya pakaian aparatur	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.04
				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tercukupinya pakaian aparatur	10	Orang	10.000.000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Penyediaan Pakaian Dinas	10.000.000	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Tercukupinya pakaian aparatur	10.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.04.05
				<b>PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik	100	%								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				
				Pengadaan Mebelair	Jumlah pengadaan mebelair	10	Unit	-	Pengadaan Mebelair	Jumlah pengadaan mebelair	-	Administrasi Umum			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan				7.01.01.2.03.19

				Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	4	Unit	15.000.000	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	15.000.000	Administrasi Umum			-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan					7.01.01.2.03.13		
				Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	15	Jenis	-	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	-	Administrasi Umum				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan					7.01.01.2.03.21		
				Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	16	Unit	5.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	5.000.000	Administrasi Umum				-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan					7.01.01.2.03.03	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang kantor yang terpelihara	3	Unit	10.000.000	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang kantor yang terpelihara	10.000.000	Administrasi Umum				-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan					7.01.01.2.03.28	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5	Unit	70.000.000	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	70.000.000	Administrasi Umum				-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan					7.01.01.2.03.30	
				Pemeliharaan Rutin/berkala mebeair Kantor	Jumlah taman yang dilakukan pemeliharaan	1	Bulan	3.000.000	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah taman yang dilakukan pemeliharaan	3.000.000	Administrasi Umum				-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan					7.01.01.2.03.32	
				<b>PROG. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	Nilai SAKIP Kecamatan Nilai SKM Kecamatan	62 85	Nilai										PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan			-		7.01.06	
												Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa			-	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan					7.01.06.2.01
									Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya koordinasi & pembinaan antara kec & desa	-					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan							

				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya koordinasi & pembinaan antara kec & desa	2	Keg.	10.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya koordinasi & pembinaan antara kec & desa	10.000.000				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan				7.01.06.2.01.03
				Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Terlaksananya koordinasi & pembinaan antara kec & desa	11	Keg.	10.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya koordinasi & pembinaan antara kec & desa	10.000.000				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan				7.01.06.2.01.03
				Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pelayanan kependudukan & manajemen aset/barang daerah	2	Keg.	5.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya koordinasi & pembinaan antara kec & desa	5.000.000				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan				
				<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN KECAMATAN</b>	Jumlah lembaga masy. yang dibina prosentase usulan musrenbang yang terfasilitasi	3 100	Lmbga %								PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan		<b>10.000.000</b>		07.01.02
													<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi	<b>10.000.000</b>				-	7.01.02.2.01
				Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Laporan hasil musrenbang kecamatan	17	Desa	10.000.000	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan hasil musrenbang kecamatan	10.000.000									7.01.02.2.01.01
															PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan				7.01.03



				<b>KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN</b>	Rasio jumlah kegiatan yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan	100	%								PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan	<b>7.500.000</b>		7.01.04
													<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Implementasi ketentuan yang ada dalam Perda			<b>7.500.000</b>		7.01.04.2.01
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Terlaksananya kegiatan kamtibmas di wil kec lekok	1	Keg.	10.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi kamtibmas di lingkungan kecamatan	10.000.000			-					7.01.04.2.01.01
								<b>700.000.000</b>			<b>700.000.000</b>			<b>700.000.000</b>			<b>700.000.000</b>		

Pasuruan, 2020  
CAMAT PASREPAN

Ttd.

**ZAKI YAMANI, S.STP, MT**  
Pembina  
NIP. 19820929 200112 1 002



SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH								PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									
STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kecamatan Sukorejo		Pemerintahan	Umum	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan administrasi kantor		%					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
				Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran listrik/air/ telpon/internet		rekening/bulan	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Listrik/Air/Telephone	Administrasi umum	Jumlah Pembayaran Listrik/Air/Telephone	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.02	
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor		unit	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pembayaran peralatan dan perlengkapan kantor	Administrasi umum	Jumlah pembayaran peralatan dan perlengkapan kantor	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.03	
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang diberikan honor		orang/bulan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang diberikan honor	Administrasi umum	Jumlah pegawai yang diberikan honor	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.07	
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang diberikan honor		orang/bulan	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Honor Jasa Kebersihan	Administrasi umum	Honor Jasa Kebersihan	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.08	
				Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor		jenis	Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah Pembelian ATK	Administrasi umum	Jumlah Pembelian ATK	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.10	
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan		bulan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetakan dan Penggandaan	Administrasi umum	Jumlah Pembelian Barang Cetakan dan Penggandaan	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.11	
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan gedung/kantor		jenis	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah pembayaran komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Administrasi umum	Jumlah pembayaran komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.12	
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor		unit	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	Administrasi umum	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.13	
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu		kali	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan Rapat dan Tamu	Administrasi umum	Jumlah Kegiatan Rapat dan Tamu	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.17	
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi		kali	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar daerah	Administrasi umum	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar daerah	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.18	
				Penyediaan jasa perkantoran	Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak dan THL		orang/bulan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak dan THL	Administrasi umum	Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak dan THL	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.02.02	
				Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli		buah	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	Administrasi umum	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.03.15	
				Pengadaan pakaian kerja	Jumlah pakaian kerja		potong	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan	Administrasi umum	Jumlah Pengadaan	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.04.02	

							Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	Jumlah Pengadaan	Administrasi umum	Jumlah Pengadaan	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.04.05
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarpras kondisi baik	%						Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan	unit	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Jumlah Pengadaan Kenadaraan Dinas	Administrasi umum	Jumlah Pengadaan Kenadaraan Dinas	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				x.xx.01.2.03.20
			Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah pengadaan	unit	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Administrasi umum	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				x.xx.01.2.03.21
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan	unit	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Administrasi umum	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				x.xx.01.2.03.24
			Pengadaan Mebelair	Jumlah pengadaan mebelair kantor	unit	Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubeler	Administrasi umum	Jumlah Pengadaan Meubeler	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				x.xx.01.2.03.25
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan	unit	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Administrasi umum	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				x.xx.01.2.03.22
			Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	unit	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan	Administrasi umum	Jumlah Pemeliharaan	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				x.xx.01.2.03.30
			Pemeliharaan rutin /berkala peralatan kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin /berkala peralatan kantor	unit	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan	Administrasi umum	Jumlah Pemeliharaan	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				x.xx.01.2.03.34
			Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	unit	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan	Administrasi umum	Jumlah Pemeliharaan	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				x.xx.01.2.03.28
			Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	unit	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	Administrasi umum	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				x.xx.01.2.03.27
			Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	unit	Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	Administrasi umum	Jumlah Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				x.xx.01.2.03.32
			Pemeliharaan rutin /berkala mebeleur	Jumlah Pemeliharaan rutin /berkala mebeleur	unit	Pemeliharaan rutin /berkala mebeleur	Jumlah Pemeliharaan rutin /berkala mebeleur	Administrasi umum	Jumlah Pemeliharaan rutin /berkala mebeleur	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor				x.xx.01.2.03.35
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	Nilai SKM Kecamatan	nilai					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan				

			Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan		kali	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa	Jumlah kegiatan pembinaan	Fasilitasi , Rekomendasi pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah kegiatan pembinaan	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kanto			7.01.06.2.01.02	
			Peningkatan sumber daya aparatur	Jumlah peserta bimtek		orang	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta bimtek	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.04.09	
			Fasilitasi & koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan fasilitasi & koordinasi		kali	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan			7.01.02.2.01.01	
							Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan			7.01.02.2.01.02	
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan laporan keuangan	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja & keuangan		laporan	penyusunan laporan capaian kiinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja	Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	jumlah laporan capaian kinerja	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor			x.xx.01.2.02.06	
			PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian yang terfasilitasi sesuai dengan Kewenangan Kecamatan		%					Program Koordinasi dan keteriban umum	Persentase Jumlah Kejadian Sesuai dengan Kewenangan Kecamatan				
			Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan tindak kejahatan	Jumlah laporan koordinasi		laporan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan koordinasi	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum	Jumlah laporan koordinasi	Program Koordinasi dan keteriban umum	Persentase Jumlah Kejadian Sesuai dengan Kewenangan Kecamatan			7.01.04.2.01.01	

				Fasilitasi penegakan perda	Jumlah kegiatan fasilitasi		kali	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan atau kepolisian negara republik indonesia	Jumlah kegiatan penerapan dan penegakan perda dan perkada	Koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkada	Jumlah kegiatan penerapan dan penegakan perda dan perkada	Program Koordinasi dan keterliban umum	Persentase Jumlah Kejadian Sesuai dengan Kewenangan Kecamatan			7.01.04.2.02.01	
				Koordinasi penyelenggaraan ketentraman & keterliban kecamatan	Jumlah laporan koordinasi		laporan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan keterliban umum	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi	Program Koordinasi dan keterliban umum	Persentase Jumlah Kejadian Sesuai dengan Kewenangan Kecamatan			7.01.04.2.01.01	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	Prosentase Usulan Musrenbang yang terfasilitasi		%										
				Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Laporan hasil musrenbang kecamatan		laporan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Laporan hasil musrenbang kecamatan	koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Laporan hasil musrenbang kecamatan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat			7.01.03.2.01.01	
				Fasilitasi kegiatan sosial	Jumlah kegiatan sosial masyarakat		kali										
				Koordinasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah kegiatan pemberdayaan		kali	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan	koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat			7.01.03.2.01.03	

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	PAGU PROGRAM	URUSAN	KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				Belanja tidak langsung (gaji)								Administrasi Keuangan								X XX 01 2.02 01
				<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	100	%	<b>520.025.000</b>								Kecamatan	822.725.000	Kewilayahan	7.01.01	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Air dan Telepon	7	rek/bulan	71.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi,		76.080.000	Administrasi Umum		76.080.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				7.01.01.2.03.02	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pegawai yang diberi Honor	7	org/bln	36.240.000	Penyediaan Jasa Administrasi		36.240.000	Administrasi Umum		36.240.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				7.01.01.2.03.07	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan	1	Org/Bln	12.000.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		12.000.000	Administrasi Umum		12.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				7.01.01.2.03.08	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor	2	kali	12.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor		12.000.000	Administrasi Umum		12.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				7.01.01.2.03.10	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	1	eks	3.655.000	Penyediaan Barang Cetak dan		3.655.000	Administrasi Umum		3.655.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				7.01.01.2.03.11	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Jumlah Pembelian Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor	2	kali	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi		2.000.000	Administrasi Umum		2.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				7.01.01.2.03.12	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pembelian Peralatan Rumah Tangga	1	kali	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		5.000.000	Administrasi Umum		5.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				7.01.01.2.03.14	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan Rapat	12	Bulan	30.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman		30.000.000	Administrasi Umum		30.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				7.01.01.2.03.17	
				Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar Daerah	12	Bulan	15.000.000	Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi Ke		15.000.000	Administrasi Umum		15.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				7.01.01.2.03.18	
				Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah Pembayaran Tenaga Kontak dan THL	16	org/bln	332.730.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan		328.050.000	Administrasi Keuangan		328.050.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				7.01.01.2.02.02	
				<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kondisi baik</b>	100	%	<b>302.700.000</b>							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor	3	Jenis	22.000.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		22.000.000	Administrasi Umum		22.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				7.01.01.2.03.22	
				Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Mabelair	1	Paket	35.000.000	Pengadaan Meubelair		35.000.000	Administrasi Umum		35.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				7.01.01.2.03.25	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	5	Jenis	124.000.000	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor		124.000.000	Administrasi Umum		124.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				7.01.01.2.03.28	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	9	Kendaraan	101.700.000	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional		101.700.000	Administrasi Umum		101.700.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				7.01.01.2.03.30	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yg dipelihara	12	Bulan	20.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		20.000.000	Administrasi Umum		20.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				7.01.01.2.03.34	



STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	PAGU PROGRAM	URUSAN	KODE
								913.150.000			913.150.000			913.150.000				913.150.000		

Pasuruan, Juli 2020  
Camat Gempol

Ttd.

M. NUR KHOLIS,S.STP., MM  
Pembina  
NIP. 19800506 199912 1 001

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 24 Juli 2020  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd.

MIZBAH ZUNIB  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR